

**PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2024-2026**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2023**



**BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Nasional Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, mengakibatkan terjadinya kekosongan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah-nya berakhir pada Tahun 2023;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Diktum Pertama huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom baru, maka Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
- c. bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Morowali telah berakhir pada Tahun 2023 bersamaan dengan berakhirnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen

- perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
 4. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
 6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
 7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 8. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
 10. Bupati adalah Bupati Morowali.
 11. Penjabat Bupati yang selanjutnya disebut Pj. Bupati adalah Pj. Bupati Morowali.
 12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 13. Badan Perencanaan Pembangunan penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 2

- (1) RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah Kebijakan serta program prioritas yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 2024-2026 yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (2) RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang akan digunakan oleh Penjabat Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026.

Pasal 3

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

Pasal 4

(1) Dokumen RPD disajikan dengan Sistematika sebagai berikut.

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Umum Daerah
- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
- d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis
- e. BAB V : Tujuan dan sasaran;
- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Daerah;
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- i. BAB IX : Penutup

(3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Bapelitbangda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026;
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapelitbangda berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya;

Pasal 6

RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan apabila :

- a. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian

kinerja sampai dengan tahun berkenaan;

- c. terjadi perubahan yang mendasar;
- d. Perubahan RPD tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 5 April 2023
BUPATI MOROWALI,

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 5 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023 NOMOR ..012



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2024-2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	DI-i
DAFTAR TABEL	DT-i
DAFTAR GAMBAR	DG-i

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-2
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	I-8
1.4. Maksud dan Tujuan	I-11
1.5. Sistematika Penulisan	I-12

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Aspek Geografi Dan Demografi	II-3
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Luas Wilayah	II-3
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-21
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-34
2.1.4 Aspek Demografis	II-36
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-44
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-44
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-75
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-103
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-105
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	II-106
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	II-163
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-200
2.3.4 Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan	II-216
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-222
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-222
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-224



2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-230
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-232

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.2 Neraca Daerah	III-15
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-22
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-22
3.2.2 Analisis Pembiayaan	III-23
3.3 Kerangka Pendanaan	III-27
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-27
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-33

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-2
4.1.1 Permasalahan Pokok Daerah.....	IV-2
4.1.2 Permasalahan Daerah Berdasarkan Urusan.....	IV-8
4.2 Isu-Isu Strategis	IV-44
4.2.1 Isu Strategis Global	IV-44
4.2.2 Telaahan Kebijakan Nasional	IV-59
4.2.3 Isu Regional Sulawesi	IV-70
4.2.4 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tengah	IV-74
4.2.5 Isu Strategis Daerah Lainnya	IV-108
4.2.6 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDG's</i>)	IV-109
4.2.7 Penelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali	IV-111
4.2.8 Penelaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali.	IV-114
4.2.9 Isu Strategis Kabupaten Morowali	IV-118

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan	V-3
5.1.1 Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata	V-3
5.1.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah.....	V-4
5.1.3 Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	V-4
5.1.4 Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah Dan Infrastruktur Dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah	



Secara Merata	V-5
5.1.5 Menciptakan Tataan Kehidupan Wilayah Yang Aman, Tentram Dan Tertib Serta Jauh Dari Risiko Bencana Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan Wilayah	V-5
5.2 Sasaran	V-6
5.2.1 Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin.....	V-6
5.2.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.....	V-6
5.2.3 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja di Pasar Tenaga Kerja	V-7
5.2.4 Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah.....	V-7
5.2.5 Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	V-8
5.2.6 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	V-8
5.2.7 Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.....	V-9
5.2.8 Meningkatnya Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik.....	V-10
5.2.9 Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	V-11
5.2.10 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	V-11
5.2.11 Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tentram Damai Dan Harmonis	V-12
5.2.12 Meningkatnya Wilayah Tangguh Bencana.....	V-12

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI-3
6.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMN 2020- 2024	VI-3
6.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Sulawesi Tengah 2021-2026	VI-6
6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026	VI-11
6.2.1 Arah Kebijakan Tahunan.....	VI-27
6.2.2 Arah Kebijakan Tahun 2025.....	VI-28
6.3 Tema Pembangunan	VI-30
6.4 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial.....	VI-31
6.4.1 Pendekatan Spasial	VI-31
6.4.2 Pendekatan Spasial Pengentasan Kemiskinan	VI-35
6.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah	VI-37

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PD.....VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH VIII-1



BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1 Pedoman Transisi	IX-2
9.2 Kaidah Pelaksanaan	IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Daratan, Jumlah Desa, dan Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-4
Tabel 2.2	Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ha) Di Kabupaten Morowali, Tahun 2018-2022	II-22
Tabel 2.3	Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ton) Kabupaten Morowali, Tahun 2018-2022	II-23
Tabel 2.4	Luas Lahan (Ha) dan Produksi (Ku) Beberapa Jenis Tanaman Sayuran Utama Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-25
Tabel 2.5	Produksi Beberapa Jenis Tanaman Buah-Buahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-26
Tabel 2.6	Produksi Beberapa Jenis Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-27
Tabel 2.7	Luas Lahan Beberapa Jenis Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-28
Tabel 2.8	Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil Kabupaten Morowali, Tahun 2018-2022	II-28
Tabel 2.9	Jumlah Unggas Menurut Jenisnya di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-29
Tabel 2.10	Perkembangan Rumah Tangga Perikanan RTP per Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022..	II-30
Tabel 2.11	Produksi Perikanan Laut (Tangkap dan Budidaya Laut) selama Empat Tahun Terakhir dan Persentase Produksi per Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-32
Tabel 2.12	Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali (Hektar), Tahun 2022	II-32
Tabel 2.13	Potensi dan Luas Areal Pertambangan dan Energi di Kabupaten Morowali	II-34
Tabel 2.14	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali, Tahun 2019 - 2022	II-38

Tabel 2.15	Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-39
Tabel 2.16	Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Dengan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2018-2022	II-39
Tabel 2.17	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Morowali Menurut Kecamatan Tahun 2022	II-41
Tabel 2.18	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Di Kabupaten Morowali, Tahun 2022	II-42
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Menurut Kelompok Umur Tahun 2022	II-43
Tabel 2.20	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (persen) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-44
Tabel 2.21	Nilai Sektor PDRB ADHK 2010 Tahun 2018-2022 Kabupaten Morowali (Miliar Rupiah)	II-48
Tabel 2.22	Kontribusi Sektor PDRB ADHK 2010 Tahun 2018-2022 Kabupaten Morowali (%)	II-49
Tabel 2.23	Nilai Sektor PDRB ADHB Tahun 2018-2022 Kabupaten Morowali (Miliar Rupiah)	II-51
Tabel 2.24	Kontribusi Sektor PDRB ADHB Tahun 2018-2022 Kabupaten Morowali (Juta Rupiah)	II-52
Tabel 2.25	Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Tahun 2018-2022 Kabupaten Morowali	II-53
Tabel 2.26	Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Tahun 2022....	II-54
Tabel 2.27	PDRB Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-57
Tabel 2.28	Jumlah Keluarga Menurut Status Kesejahteraan Pada Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-65
Tabel 2.29	IPM Kabupaten/Kota, Sulawesi Tengah, Dan Nasional Tahun 2018-2022	II-74
Tabel 2.30	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	II-79
Tabel 2.31	Angka UHH Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022	II-81
Tabel 2.32	Perkembangan Angka Stunting Kabupaten Morowali dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2023	II-84
Tabel 2.33	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022	II-87

Tabel 2.34	Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-90
Tabel 2.35	Opini Audit BPK Atas LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-91
Tabel 2.36	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-93
Tabel 2.37	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-93
Tabel 2.38	Produksi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-94
Tabel 2.39	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-95
Tabel 2.40	Produksi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-96
Tabel 2.41	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-96
Tabel 2.42	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-97
Tabel 2.43	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-97
Tabel 2.44	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-98
Tabel 2.45	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-99
Tabel 2.46	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-100
Tabel 2.47	Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap Sektor PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 ...	II-100
Tabel 2.48	Investasi, Pertumbuhan PDRB dan ICOR Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-103
Tabel 2.49	Jumlah Group Kesenian dan Gedung Kesenian Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-105
Tabel 2.50	Jumlah Klub Olahraga dan Fasilitas Olahraga Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-105
Tabel 2.51	Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-107
Tabel 2.52	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar (SD/MI) Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	II-112



Tabel 2.53	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar (SMP/MTs) Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	II-113
Tabel 2.54	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	II-114
Tabel 2.55	Angka Pendidikan Yang ditamatkan Tahun 2018-2022 Kabupaten Morowali	II-115
Tabel 2.56	Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	II-116
Tabel 2.57	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	II-118
Tabel 2.58	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	II-119
Tabel 2.59	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	II-120
Tabel 2.60	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	II-120
Tabel 2.61	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	II-121
Tabel 2.62	Angka Kelulusan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-124
Tabel 2.63	Angka Yang Melanjutkan Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-125
Tabel 2.64	Fasilitas Pendidikan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-125
Tabel 2.65	Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-126
Tabel 2.66	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-127
Tabel 2.67	Rasio guru/murid sekolah pendidikan Menengah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-128
Tabel 2.68	Rasio Guru/Murid Per Rata-Rata Kelas Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-128
Tabel 2.69	Perkembangan Rasio Posyandu Persatuan Balita Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-137



Tabel 2.70	Rasio Puskesmas, Poliklinik Rasio Pustu Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-138
Tabel 2.71	Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-139
Tabel 2.72	Rasio Dokter per Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-139
Tabel 2.73	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk di Kabupaten Morowali Tahun Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-140
Tabel 2.74	Cakupan pertolongan persalinan (Persen) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-141
Tabel 2.75	Penderita TBC dan BTA Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-145
Tabel 2.76	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-145
Tabel 2.77	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-146
Tabel 2.78	Jumlah Kasus Penderita Diare Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-148
Tabel 2.79	Angka Kejadian Malaria Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-149
Tabel 2.80	Angka Kejadian Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-150
Tabel 2.81	Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-151
Tabel 2.82	Jumlah Kasus HIV/AIDS Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-151
Tabel 2.83	Cakupan Puskesmas Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-152
Tabel 2.84	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-154
Tabel 2.85	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-155
Tabel 2.86	Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2018-2022 di Kabupaten Morowali	II-161
Tabel 2.87	Indikator Capaian Pembangunan Bidang Sosial pada Tahun 2018- 2022 di Kabupaten Morowali	II-162
Tabel 2.88	Ketersediaan Energi (Kkal) dan Protein (gr) per Kapita di Kabupaten Morowali Selama Tahun 2018-2022	II-172

Tabel 2.89	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-173
Tabel 2.90	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-173
Tabel 2.91	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-173
Tabel 2.92	Terfasilitasnya Pendampingan Pengakuan MHA Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-174
Tabel 2.93	Penetapan Hak HMA Tradisional Morowali Tahun 2018-2022	II-174
Tabel 2.94	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-174
Tabel 2.95	Ketersediaan database kependudukan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-177
Tabel 2.96	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-178
Tabel 2.97	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-186
Tabel 2.98	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-187
Tabel 2.99	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-188
Tabel 2.100	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per Tahun Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-189
Tabel 2.101	Data Jaringan Tower Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-191
Tabel 2.102	Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Morowali Tahun 2022.....	II-193
Tabel 2.103	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-196
Tabel 2.104	Capaian Indikator Statistik di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-198
Tabel 2.105	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-201
Tabel 2.106	Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-202
Tabel 2.107	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-203
Tabel 2.108	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-204

Tabel 2.109	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-204
Tabel 2.110	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal per Hektar Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-205
Tabel 2.111	Rasio Elektrifikasi Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-207
Tabel 2.112	Daya Terpasang Listrik (kw) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-208
Tabel 2.113	Ekspor Perdagangan Menurut PDRB ADH Konstan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 (Miliar)	II-209
Tabel 2.114	Industri Prioritas Morowali	II-210
Tabel 2.115	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenisnya (ton) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-213
Tabel 2.116	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Territorial Tahun 2018-2022 di Kabupaten Morowali	II-215
Tabel 2.117	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-216
Tabel 2.118	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-217
Tabel 2.119	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-218
Tabel 2.120	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-218
Tabel 2.121	Opini Audit BPK Atas LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-219
Tabel 2.122	Penetapan APBD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-221
Tabel 2.123	Gambaran Capaian Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-221
Tabel 2.124	Pengeluaran Per Kapita Rumah tangga Kabupaten Morowali 2018 – 2021	II-222
Tabel 2.125	Produktivitas Total Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-223
Tabel 2.126	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-225

Tabel 2.127	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per Tahun Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-226
Tabel 2.128	Jumlah Bank dan Jenisnya Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-227
Tabel 2.129	Jumlah Rumah Makan/Restoran Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-228
Tabel 2.130	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Kabupaten Morowali, Tahun 2018-2022	II-234
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2020	III-5
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 Dalam Persen (%)	III-8
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 Dalam Persen (%)	III-13
Tabel 3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	III-18
Tabel 3.5	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	III-22
Tabel 3.6	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	III-23
Tabel 3.7	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	III-24
Tabel 3.8	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	III-26
Tabel 3.9	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 s/d Tahun 2026 Kabupaten Morowali	III-30
Tabel 3.10	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026	III-34
Tabel 3.11	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali	III-36
Tabel 4.1	Masalah Pokok Daerah	IV-3
Tabel 4.2.	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan	IV-9
Tabel 4.3	Kondisi Capaian Urusan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023	IV-25
Tabel 4.4.	Identifikasi RPJMD Daerah Lain	IV-109



Tabel 5.1.	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026	V-14
Tabel 6.1	Arahan Presiden untuk Strategi Pembangunan Nasional 2020-2024	VI-3
Tabel 6.2	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026	VI-7
Tabel 6.3	Desain Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Morowali tahun 2024-2026	VI-11
Tabel 6.4	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Morowali Tahun 2023-2026	VI-19
Tabel 6.5	Jumlah Keluarga Menurut Status Kesejahteraan Per Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022	VI-36
Tabel 6.6	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Morowali	VI-38
Tabel 7.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026	VII-3
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Utama 2024-2026	VIII-4
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026	VIII-14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya..	I-11
Gambar 2.1	Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Morowali, Tahun 2022	II-5
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Morowali	II-8
Gambar 2.3	Peta Topografi Kabupaten Morowali	II-10
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Morowali	II-11
Gambar 2.5	Peta Hidrologi Kabupaten Morowali	II-12
Gambar 2.6	Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Morowali	II-13
Gambar 2.7	Kondisi Iklim Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-14
Gambar 2.8.	Peta Curah Hujan Kabupaten Morowali	II-14
Gambar 2.9	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Morowali	II-15
Gambar 2.10	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Morowali	II-21
Gambar 2.11	Potensi Persawahan di Kecamatan Bumi Raya dan Wita Ponda di Kabupaten Morowali	II-22
Gambar 2.12	Peta Rawan Bencana di Kabupaten Morowali	II-35
Gambar 2.13	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022	II-47
Gambar 2.14	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2021-2022	II-47
Gambar 2.15	Perkembangan Inflasi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022	II-56
Gambar 2.16	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	II-58
Gambar 2.17	PDRB PerKapita Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2022	II-59
Gambar 2.18	Indeks Gini Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022	II-60
Gambar 2.19	Gini Rasio Kabupaten Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-61
Gambar 2.20	Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali (Rp) Tahun 2018-2023	II-63
Gambar 2.21	Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2022	II-63
Gambar 2.22	Jumlah (Ribuan Orang) dan persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-64

Gambar 2.23	Persentase Kesejahteraan Keluarga Menurut Desil di Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-66
Gambar 2.24	Persentase Keluarga Menurut Status Kesejahteraan Pada Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-67
Gambar 2.25	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022	II-68
Gambar 2.26	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-69
Gambar 2.27	Persentase Penduduk Diatas Kemiskinan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022	II-69
Gambar 2.28	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	II-70
Gambar 2.29	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-71
Gambar 2.30	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	II-71
Gambar 2.31	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-72
Gambar 2.32	IPM Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022	II-74
Gambar 2.33	Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	II-75
Gambar 2.34	Angka Melek Huruf Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	II-76
Gambar 2.35	Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-77
Gambar 2.36	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	II-78
Gambar 2.37	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-79
Gambar 2.38	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-80
Gambar 2.39	Angka UHH Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-82
Gambar 2.40	Jumlah Kasus Bayi Gizi Buruk Kupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-83
Gambar 2.41	Angka Stunting Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-84

Gambar 2.42	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-85
Gambar 2.43	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-86
Gambar 2.44	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	II-88
Gambar 2.45	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-89
Gambar 2.46	Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-89
Gambar 2.47	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-91
Gambar 2.48	Pertumbuhan Industri (%) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-102
Gambar 2.49	Akreditasi PAUD di Kabupaten Morowali Tahun 2022.	II-109
Gambar 2.50	Akreditasi Jenjang Pendidikan SD/MI di Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-109
Gambar 2.51	Akreditasi Jenjang Pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-110
Gambar 2.52	Akreditasi Jenjang Pendidikan Menengah SMA di Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-110
Gambar 2.53	Akreditasi Jenjang Pendidikan Menengah SMK di Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-111
Gambar 2.54	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-112
Gambar 2.55	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-114
Gambar 2.56	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-115
Gambar 2.57	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-117
Gambar 2.58	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-118

Gambar 2.59	Angka Partisipasi Murni (APK) SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-119
Gambar 2.60	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-122
Gambar 2.61	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-123
Gambar 2.62	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Tahun 2018-2022 Kabupaten Morowali	II-123
Gambar 2.63	Kualifikasi Pendidik Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021 Kabupaten Morowali (Persen)	II-129
Gambar 2.64	Pendidik Tersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021 Kabupaten Morowali (Persen)	II-130
Gambar 2.65	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-131
Gambar 2.66	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-133
Gambar 2.67	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-134
Gambar 2.68	Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-135
Gambar 2.69	Perkembangan Jumlah Bayi Lahir Dan Kasus Gizi Buruk Di Kabupaten Morowali 2018-2022	II-142
Gambar 2.70	Persentase Balita Yang Pernah di Imunisasi Campak Kabupaten Morowali 2018-2022	II-143
Gambar 2.71	Perkembangan Penderita TB dan BTA di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-144
Gambar 2.72	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-146
Gambar 2.73	Perkembangan Kasus Diare yang ditangani di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-147
Gambar 2.74	Cakupan Puskesmas Pembantu Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-153
Gambar 2.75	Proporsi panjang jalan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-155
Gambar 2.76	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 km/jam), Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-156
Gambar 2.77	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-157

Gambar 2.78	Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-158
Gambar 2.79	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2018-2022	II-159
Gambar 2.80	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-160
Gambar 2.81	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-161
Gambar 2.82	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun (Orang) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-164
Gambar 2.83	Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-165
Gambar 2.84	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 ...	II-166
Gambar 2.85	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-167
Gambar 2.86	Rasio KDRT Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022...	II-167
Gambar 2.87	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Morowali Tahun 2018 - 2022	II-168
Gambar 2.88	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-169
Gambar 2.89	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-169
Gambar 2.90	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-170
Gambar 2.91	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-171
Gambar 2.92	Jumlah Penduduk Per satuan KTP di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-175
Gambar 2.93	Jumlah Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-176
Gambar 2.94	Jumlah Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-177
Gambar 2.95	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-179
Gambar 2.96	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-179
Gambar 2.97	Persentase PKK Aktif Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-180
Gambar 2.98	Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-181

Gambar 2.99	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-182
Gambar 2.100	Perkembangan Rasio Aseptor KB di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-183
Gambar 2.101	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-184
Gambar 2.102	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-185
Gambar 2.103	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-186
Gambar 2.104	Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-187
Gambar 2.105	Pemasangan Rambu di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-188
Gambar 2.106	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi (%) Tahun 2019-2022	II-191
Gambar 2.107	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-194
Gambar 2.108	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-195
Gambar 2.109	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda) di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-197
Gambar 2.110	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-200
Gambar 2.111	Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-206
Gambar 2.112	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-207
Gambar 2.113	Konsumsi Ikan Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-215
Gambar 2.114	Persentase SILPA Terhadap APBD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-219
Gambar 2.115	Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-220
Gambar 2.116	Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-228
Gambar 2.117	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2018-2022	II-229



Gambar 2.118	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-230
Gambar 2.119	Angka Kriminalitas Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-231
Gambar 2.120	Jumlah Demonstrasi Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-232
Gambar 2.121	Perkembangan Rasio Ketergantungan Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022	II-233
Gambar 4.1	Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	IV-60
Gambar 4.2	Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pulau Sulawesi	IV-61
Gambar 4.3	Peta pengembangan Wilayah Sulawesi dalam RPJMNas 2020-2024 khususnya Morowali sebagai Kawasan Industri (KI) Prioritass Nasional	IV-74
Gambar 4.4	Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali tahun 2024-2026	IV-132
Gambar 4.5	Keterkaitan Isu Strategis Global, Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali	IV-132
Gambar 6.1	Tema Pembangunan Tahunan Kabupaten Morowali ...	VI-31
Gambar 6.2	Peta Penduduk Miskin menurut Status Kesejahteraan Desil 1,2,3 dan 4 Kabupaten Morowali Tahun 2022 (Berdasarkan Rumah Tangga)	VI-37

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar belakang

Pemerintah Daerah (*regional government*) sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan daerah. Dimana perencanaan pembangunan daerah (*regional development planning*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah (*regional competitiveness*). Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional.

Pembangunan daerah secara umum bertujuan untuk: Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat; Peningkatan dan Pemerataan Kesempatan Kerja; Peningkatan dan Pemerataan Lapangan Berusaha; Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik; dan Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis baik sebagai alat bantu (*tools*) bagi Kepala Daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan, maupun sebagai acuan (*guideline*) bagi tahap pelaksanaan maupun pengendalian pembangunan di daerah. Proses pembangunan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Pada sisi lain, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritas bertujuan untuk meningkatkan hasil pembangunan daerah bagi kesejahteraan dan pendapatan masyarakat secara adil dan merata.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 dimana masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Morowali berakhir pada tahun 2023, maka untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dalam masa transisi, perlu disusun rencana pembangunan daerah yang terarah

sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Morowali dan akan dilaksanakannya pemilu serentak pada tahun 2024, Juga berakhirnya periodisasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Morowali 2018-2023, maka perlu dirumuskan perencanaan pembangunan selama tiga tahun ke depan dalam rangka mengisi kekosongan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali periode 2024-2026 sebagai pedoman bagi Penjabat (Pj) Bupati yang ditunjuk dalam melaksanakan pemerintahan daerah berbasis tujuan dan sasaran terukur dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dimana, Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan, serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk periode 2024–2026 yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Morowali. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024–2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPD sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan dalam setiap tahun RKPD. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Untuk menjaga sinergitas dan sinkronasi antara RPD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah maka setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD yang bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah Kabupaten Morowali, serta untuk menjalankan program dan kegiatan dalam mengisi kekosongan dokumen perencanaan daerah. Selain itu, RPD akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama tiga tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal

- 18 Ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966).Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
 10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

- Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 831);
 32. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 34. **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022** Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah Ononom baru (DOB);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37);
 37. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2021;
 38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 90);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008-2028;
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali;
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039;

42. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah transisi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana secara spesifik diatur dalam **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022** Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah Ononom baru (DOB). Hubungan antara dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Dokumen RPD dan RPJPD Kabupaten Morowali

Dokumen RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025 khususnya periode terakhir. Oleh sebab itu, penyusunan dokumen RPD selain memuat kondisi umum daerah, juga harus memperhatikan Visi Misi RPJPD, Prioritas periode akhir RPJPD Kabupaten Morowali, masalah pembangunan dan isu-isu strategis, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, pagu indikatif, indikator kinerja daerah, dan pedoman transisi dengan memperhatikan Prioritas RPJPD Morowali khususnya pada periode keempat 2021-2025.

b. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 dan RPJM Nasional 2020-2024

Penyusunan dokumen RPD Kabupaten Morowali memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2020-2024 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten

Morowali dengan Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Pusat. Keterkaitan RPJMN tahun 2020-2024 yang berlaku saat ini dalam Penyusunan Dokumen RPD ini maka akan diulas terkait dengan substansi dokumen RPJM Nasional menyangkut Tujuan, Sasaran serta arah kebijakan pembangunan dalam RPJMNas dan keterkaitan dengan rumusan RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026. Adapun keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis termuat dalam Bab IV RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026. Kemudian Tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 dengan Tujuan dan Sasaran strategis yang dijabarkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta prioritas pembangunan Nasional dimuat dalam Bab V RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026.

c. Dokumen RPD Morowali dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah

Penyusunan Dokumen RPD Kabupaten Morowali juga memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 khususnya periode 2024-2026. Berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen RPD Kabupaten Morowali diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk Prioritas pencapaian Visi Misi, Program Prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 yang menjadi pertimbangan utama.

d. Dokumen RPD Morowali dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Sejalan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menegaskan bahwa Gubernur akan bersama-sama dengan para Bupati/Walikota dalam pelaksanaan TPB/SDG's yang dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kabupaten Morowali berkomitmen melaksanakan TPB/SDG's dalam upaya transformasi peradaban global dan nasional yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDG's tidak hanya sangat penting bagi rakyat Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah akan tetapi pada Kabupaten Morowali yang terefleksi dari sinergitas antara Tujuan sasaran daerah dengan Tujuan dan sasaran SDG's, namun juga merupakan wujud kontribusi Kabupaten Morowali bagi pencapaian SDG's Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Lebih lanjut, TPB/SDG's juga menjadi instrumen untuk peningkatan Kerjasama yang menjadikan Kabupaten Morowali lebih Sejahtera.

e. Dokumen RPD Kabupaten Morowali dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan dokumen RPD Kabupaten Morowali memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Morowali. Selain itu, Dokumen RPD Kabupaten Morowali juga memuat arah pembangunan pengembangan wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.

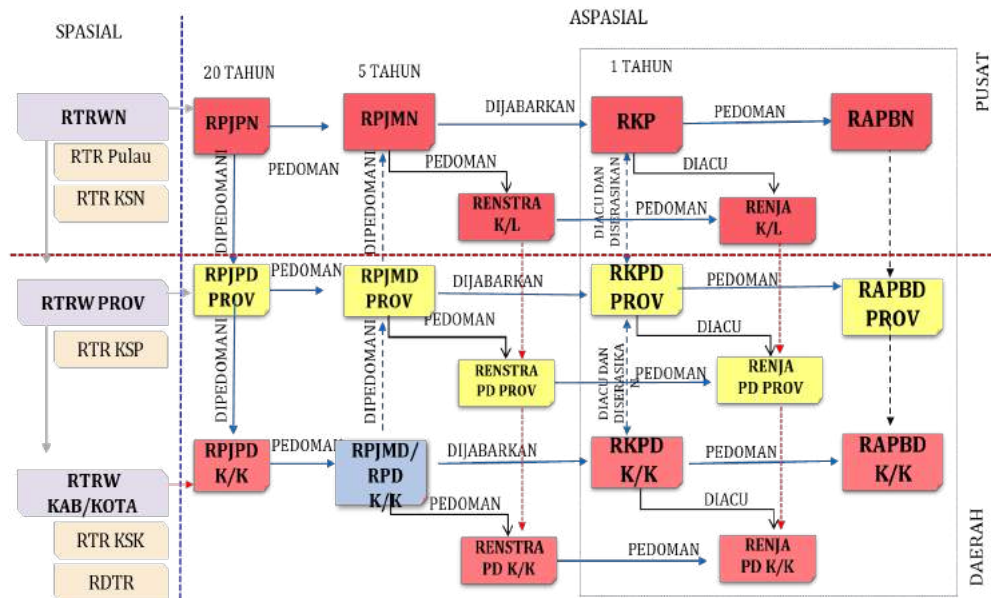
f. Dokumen RPD Kabupaten Morowali dan Renstra OPD

Sesuai amanat **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022** Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dokumen RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) periode 2024-2026. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali (Bapelitbangda) Kabupaten Morowali. Renstra OPD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran sebagai penjabaran atas Tujuan sasaran RPD, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan selama 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis OPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Rencana Kerja Anggaran OPD (Renja-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

g. Dokumen RPD dan RKPD Kabupaten Morowali

Pelaksanaan dokumen RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 yang setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Morowali yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran (KUA-PPAS); serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Gambaran tentang hubungan antara RPD Kabupaten Morowali dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Hubungan RPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah transisi dalam mempersiapkan Pilkada 2024 sekaligus untuk menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Kabupaten Morowali yang sejalan dengan Arah Pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis dan koordinatif. Adapun tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Memberikan landasan dan pedoman Penjabat (Pj) Bupati dalam melaksanakan pembangunan pada periode 2024-2026;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Morowali selama kurun waktu 2024-2026;
3. Memberikan arah pembangunan bagi upaya pencapaian kesejahteraan

- masyarakat Kabupaten Morowali melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah (PD) dan pelaku pembangunan lainnya di dalam satu pola strategi dan tindakan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat; dan
 5. Mewujudkan penggunaan sumber daya dan mengembangkan potensi daerah secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
 6. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang meliputi Penyusunan Renstra PD, RKPD, dan Renja PD tahun 2024-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Morowali yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, dan kebutuhan perumusan strategi, yang mencakup aspek: geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah sampai dengan tahun 2022.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kinerja keuangan di masa lalu antara lain kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah tersebut, termasuk arah kebijakan pengembangan wilayah berdasarkan tataruang daerah serta rangkuman hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah paruh waktu periode RPJMD kabupaten Morowali sampai dengan tahun 2022.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan Tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026. Pada bagian ini juga menguraikan tujuan dan sasaran pembangunan serta indikator yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang yang terkait dengan isu strategis daerah khususnya Periode 2024-2026. Tujuan dan sasaran di desain secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026, tema pembangunan tahunan. Penentuan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026 sesuai mekanisme cascading di bab V.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali selama 3 (Tiga) tahun, baik yang bersifat program unggulan/Inovasi, program prioritas, maupun program penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan yang disertai indikasi kerangka pendanaannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Juga memuat kerangka pendanaan seluruh program PD Tahun 2024-2026; serta daftar program PD Tahun 2024-2026 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan sasaran Utama, Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan dan diperhatikan untuk pelaksanaan RPD secara terpadu dan berkesinambungan.

BAB 2

GAMBARAN UMUM



Kabupaten Morowali merupakan Kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 1999. Kabupaten Morowali merupakan aspirasi yang sudah tumbuh di masyarakat setempat. Aspirasi tersebut terus berkembang, yang kemudian sampai pada tingkat lahirnya kemauan politik dari wakil-wakil rakyat di lembaga DPRD dengan dicetuskannya Resolusi DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 1/DPRD/1966, yang meminta kepada Pemerintah Pusat agar Provinsi Sulawesi Tengah dimekarkan menjadi 11 (sebelas) daerah otonom tingkat II, yaitu 2 (dua) Kotamadya dan 9 Kabupaten, diantaranya adalah Kabupaten Morowali (waktu itu masih disebut Mori Bungku).

Aspirasi ini terus berlanjut hingga orde reformasi, peralihan orde baru ke masa reformasi saat ini, di mana isu-isu demokrasi dan desentralisasi lebih dikedepankan sebagai konsep pemerintahan, dengan diterapkannya konsep pemerintahan desentralisasi, yang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah kabupaten, dimana kabupaten diberi ruang yang lebih besar untuk mengatur daerah. Maka semakin luaslah potensi bagi terbentuknya daerah otonom baru. Oleh karena itu, momentum direspons seluruh lapisan masyarakat di daerah Morowali untuk diberikan kesempatan bagi pembentukan Kabupaten Morowali. Akhirnya, Pemerintah Pusat untuk membentuk daerah Morowali, berdiri sebagai daerah otonom baru, yakni Kabupaten Morowali.

Keputusan Pemerintah Pusat untuk membentuk Kabupaten Morowali dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999. Setelah terbentuk, mempersiapkan perangkat pemerintahan daerah yakni DPRD dan Bupati/Wakil Bupati. Kepala daerah terpilih pertama yang memimpin secara definitif Kabupaten Morowali adalah Andi Muhammad Abubakar (Bupati), dan Datlin Tamalagi (wakil bupati), serta H. Chaerudin Zen sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.

Kabupaten Morowali terjadi perubahan dengan terbentuknya dan berpisahnya Kabupaten Morowali Utara yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara. Setelah pembentukan Kabupaten Morowali Utara, maka Kabupaten Morowali saat ini memiliki 10 (sembilan) wilayah kecamatan yaitu Witaponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bahodopi, Bungku Pesisir, Bungku Selatan, dan Menui Kepulauan serta Kecamatan Sombori Kepulauan yang baru saja dimekarkan tahun 2023.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Luas Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup: 1) Luas dan batas wilayah administrasi, 2) Letak dan kondisi geografis yaitu menyangkut kondisi dari; a) Posisi astronomis; b) Posisi geostrategis; dan c) Kondisi/kawasan; 3) Topografi, antara lain terdiri dari: Kemiringan lahan dan ketinggian lahan; 4) Geologi, diantaranya yaitu; struktur, karakteristik dan Potensi kandungan; 5) Hidrologi, antara lain; a) Daerah Aliran Sungai; b) Sungai, danau dan rawa; dan c) Debit; 6) Klimatologi terdiri dari: Tipe; Curah hujan; Suhu; dan Kelembaban; 7) Penggunaan lahan, antara lain yaitu; Kawasan budidaya dan Kawasan lindung.

a. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah daratan Kabupaten Morowali saat berdiri pada Tahun 1999 seluas 15.490,12 km² atau 22,77 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Ibukota Kabupaten di Kolonodale, namun mengalami perubahan setelah pemekaran. Kabupaten Morowali memiliki wilayah kecamatan yang meliputi: Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan. Pada tahun 2023 dilakukan pemekaran Wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kecamatan Sombori Kepulauan. Kecamatan Sombori Kepulauan merupakan pemekaran dari 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Menui Kepulauan; dan 3 (tiga) Desa di Kecamatan Bungku Selatan. Kecamatan Sombori Kepulauan memiliki wilayah seluas 267,78 Km². (1)

Cakupan wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan terdiri atas 13 (tiga belas) Desa meliputi:

1. Desa Tanjung Harapan seluas 12,90 Km² ;
2. Desa Matano seluas 13,79 Km²;
3. Desa Tanona seluas 7,10 Km²;
4. Desa Tanjung Tiram seluas 9,00 Km²;
5. Desa Matarape seluas 20,03 Km²;
6. Desa Mbokita seluas 7,07 Km²;
7. Desa Dongkalan seluas 13,01 Km²;
8. Desa Pulau Tengah seluas 3,2 Km²;
9. Desa Masadian seluas 6,03 Km²;
10. Desa Pulau Tiga seluas 3,85 Km²;
11. Desa La Lemo seluas 48,09 Km²;
12. Desa Lamontoli seluas 118,70 Km²; dan
13. Desa Pulau Dua Darat seluas 5,01 Km².

Namun pada penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 data yang disajikan belum

menyesuaikan dengan pembentukan Kecamatan Sombori dikarenakan data yang belum tersedia. Data wilayah, jumlah desa/kelurahan dan jarak setiap Kecamatan dengan ibukota kabupaten di Kabupaten Morowali selengkapnya terdapat pada Tabel 2.1.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Morowali Tahun 2022, luas wilayah daratan Kabupaten Morowali mencapai 5.472,00 km² atau 8,85 persen dari wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan terluas 1.080,98 km², sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Menui Kepulauan hanya seluas 127,65 km². Kecamatan memiliki desa terbanyak adalah Kecamatan Bungku Selatan yakni 26 desa, sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Wita Ponda yakni memiliki 5 desa. Pada tahun 2023 telah dimekarkan Kecamatan Sombori Kepulauan melalui penggabungan 10 (Sepuluh) desa di Kecamatan Menui Kepulauan dan 3 (Tiga) desa di Kecamatan Bungku Selatan di Kabupaten Morowali, namun data terkait kecamatan tersebut masih belum tersedia.

Tabel 2.1

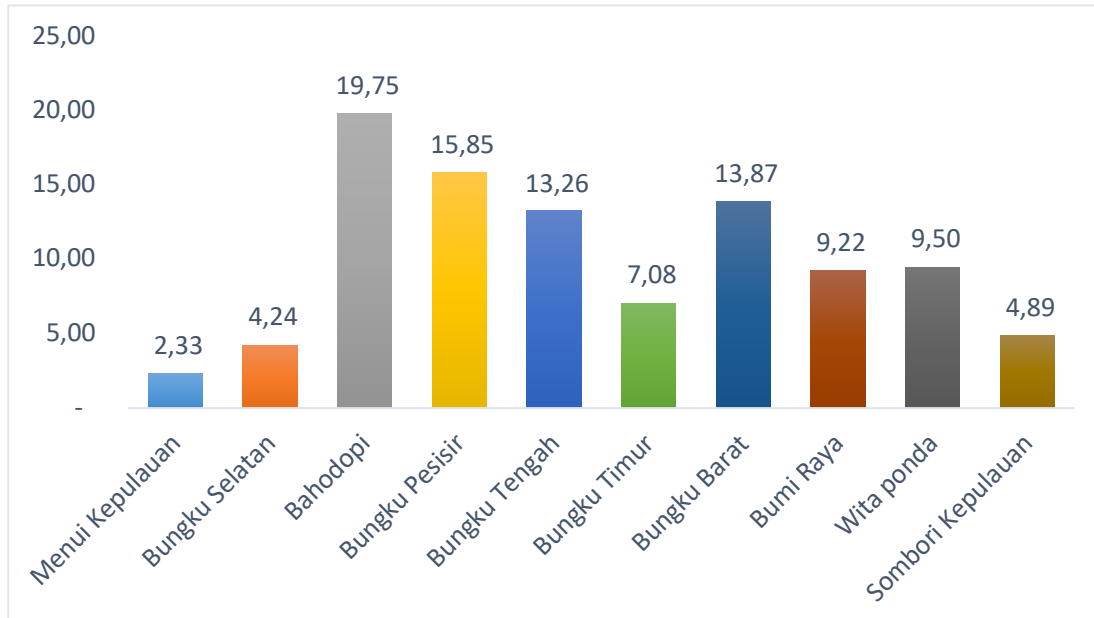
Luas Wilayah Daratan, Jumlah Desa, dan Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022

Kecamatan	Luas (Km ²)	%	Jumlah Desa/Kel	Keterangan	
				Ibukota Kecamatan	Jarak (mil laut/Km)
Menui Kepulauan	127,65	2,33	13/1	Ulunambo	99
Bungku Selatan	232,1	4,24	23	Kaleroang	64
Bahodopi	1.080,98	19,75	12	Bahodopi	41
Bungku Pesisir	867,29	15,85	10	Lafeu	75
Bungku Tengah	725,57	13,26	13/6	Marsaoleh	0
Bungku Timur	387,23	7,08	10	Kolono	18
Bungku Barat	758,93	13,87	10	Wosu	27
Bumi Raya	504,77	9,22	13	Bahonsuai	48
Wita ponda	519,7	9,50	9	Laantula Jaya	61
Sombori Kepulauan	267,78	4,89	13	Tanjung Harapan	
Luas Kabupaten	5.472,00	100	133		

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka, 2023

Jika ditinjau dari jarak masing-masing ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten (Kelurahan Marsaoleh Kecamatan Bungku Tengah), maka kecamatan terjauh adalah Kecamatan Menui Kepulauan dengan jarak 99 mil laut yang berarti untuk menjangkau ibukota kecamatan tersebut dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, sementara kecamatan yang terdekat adalah Bungku Timur dengan jarak 18 km dan Bungku Barat dengan jarak 27 km ditempuh dengan menggunakan transportasi darat terutama roda empat dan roda dua.

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Morowali dapat ditempuh dengan akses moda transportasi darat dan laut dari ibukota Kabupaten menuju ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali dengan menggunakan kendaraan roda empat, roda dua dan kapal laut. Meski demikian, masih ada sebagian besar yakni terdapat 41 desa dari 50 desa di Kecamatan Bungku Selatan dan Menui Kepulauan, dimana desa-desa tersebut berada di wilayah kepulauan yang ditempuh dengan hanya berjalan kaki atau pun menggunakan kendaraan roda dua atau jalur laut.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka, 2023

Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Morowali, Tahun 2022

Secara singkat, profil singkat 10 (sepuluh) kecamatan di wilayah Kabupaten Morowali diuraikan sebagai berikut.

- Menui Kepulauan** : Merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil dengan luas sebesar 223.63 km² atau 4,07% dari total wilayah Kabupaten yang berjarak 99 (mil laut) dari Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Ulunambo;
- Bungku Selatan** : Luas wilayah 403.90 km² atau 7,38% dari total wilayah Kabupaten yang berjarak 64 (mil laut) dari Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Kaleroang;
- Bahodopi** : Merupakan kecamatan pemekaran pertama dari Kecamatan Bungku Selatan, merupakan wilayah kepulauan dan memiliki luas wilayah Kecamatan Bahodopi seluas 1080,98 km² adalah kecamatan yang

- memiliki luas wilayah terbesar di kabupaten. Persentase luas wilayah sebesar 19,76 persen dari total wilayah kabupaten, berjarak kurang lebih 41 km dari Ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan di Desa Bahodopi, memiliki ketinggian tempat 2 m dpl.
- Bungku Pesisir** : Merupakan juga kecamatan pemekaran kedua dari Kecamatan Bungku Selatan dan berada di wilayah daratan utama Sulawesi, memiliki luas wilayah 867,29 km² atau 15,85 persen dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 75 km dari ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan di Lafeu, memiliki ketinggian tempat 4 m dpl.
- Bungku Tengah** : Merupakan ibu kota kabupaten dengan luas wilayah 725,57 km² atau 13,26 persen dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 0 km dari ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan di Marsaoleh, memiliki 6 kelurahan, memiliki ketinggian tempat 2 m dpl.
- Bungku Timur** : Merupakan kecamatan hasil pemekaran Kecamatan Bungku Tengah, Desa Kolono adalah ibukota Kecamatan Bungku Timur dengan luas wilayah 387,23 km² atau 7,08 persen dari total luas wilayah yang jarak 18 km dari Ibukota Kabupaten Morowali, memiliki ketinggian tempat 7 m dpl.
- Bungku Barat** : Merupakan kecamatan yang berada di wilayah daratan dan sangat dekat dengan ibukota kabupaten, memiliki luas wilayah 758,93 km² atau 13,87 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali yang berjarak 27 km dari Ibukota Kabupaten, dengan Ibukota Kecamatan di Wosu, memiliki ketinggian tempat 2 m dpl.
- Bumiraya** : Merupakan kecamatan pemekaran dari Bungku Tengah bersama kecamatan Bungku Barat dan Wita Ponda, memiliki luas wilayah 504,77 km² atau 9,23 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali yang berjarak 48 km dari Ibukota, dengan Ibukota Kecamatan di Bahonsuai, memiliki ketinggian tempat 2 m dpl.
- Witaponda** : Merupakan kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara, memiliki jarak 61 km dari Ibukota Kabupaten dengan luas wilayah 519,70 km² atau sebesar 9,50 persen dari total wilayah, dengan Ibukota Kecamatan di Laantula Jaya, memiliki ketinggian tempat 11 m dpl.

Sombori : Merupakan kecamatan yang baru dibentuk Pada tahun
Kepulauan 2023, merupakan pemekaran dari 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Menui Kepulauan; dan 3 (tiga) Desa di Kecamatan Bungku Selatan dengan Ibukota Kecamatan Desa Tanjung Harapan.

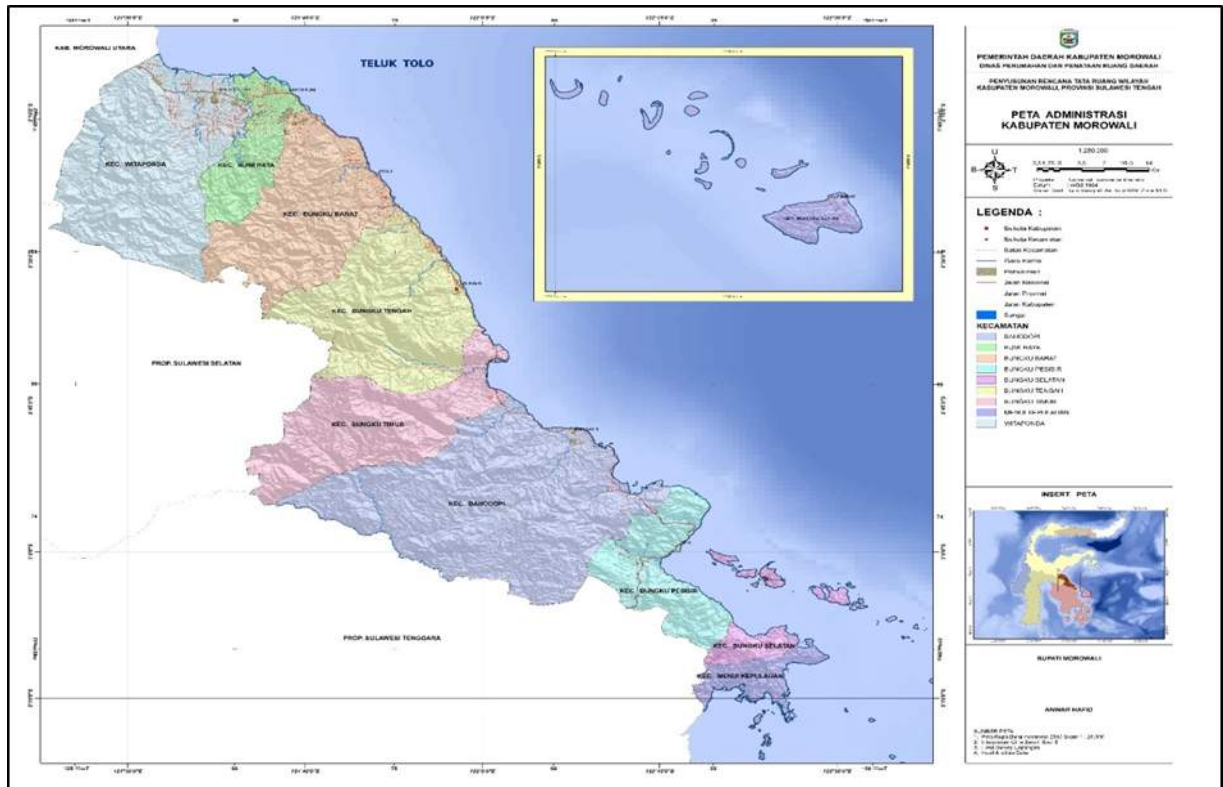
Jika ditinjau dari posisi geografis, Kabupaten Morowali memiliki batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara;
- Sebelah Timur merupakan Wilayah Perairan Teluk Tolo.

Letak, batas dan kondisi geografis wilayah Kabupaten Morowali selengkapnya terdapat pada Gambar 2.2 tentang peta administratif Kabupaten Morowali.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Morowali terletak antara $01^{\circ} 31' 12''$ Lintang Selatan dan $03^{\circ} 46' 48''$ Lintang Selatan serta antara $121^{\circ} 02' 24''$ Bujur Timur dan $123^{\circ} 15' 36''$ Bujur Timur. Kabupaten Morowali wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat dan melebar ke Bagian Timur, sebagian besar (88,55 persen) berada di daratan Pulau Sulawesi, dan sebagian kecil lainnya (11,45 persen) merupakan pulau-pulau kecil terutama bagian paling selatan Kabupaten Morowali terdapat wilayah Kecamatan Menui Kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil. Berdasarkan letak dan kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Morowali tersebut, maka wilayah kabupaten ini dapat dipetakan menjadi dua wilayah yakni wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan wilayah kepulauan.



Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Morowali

Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

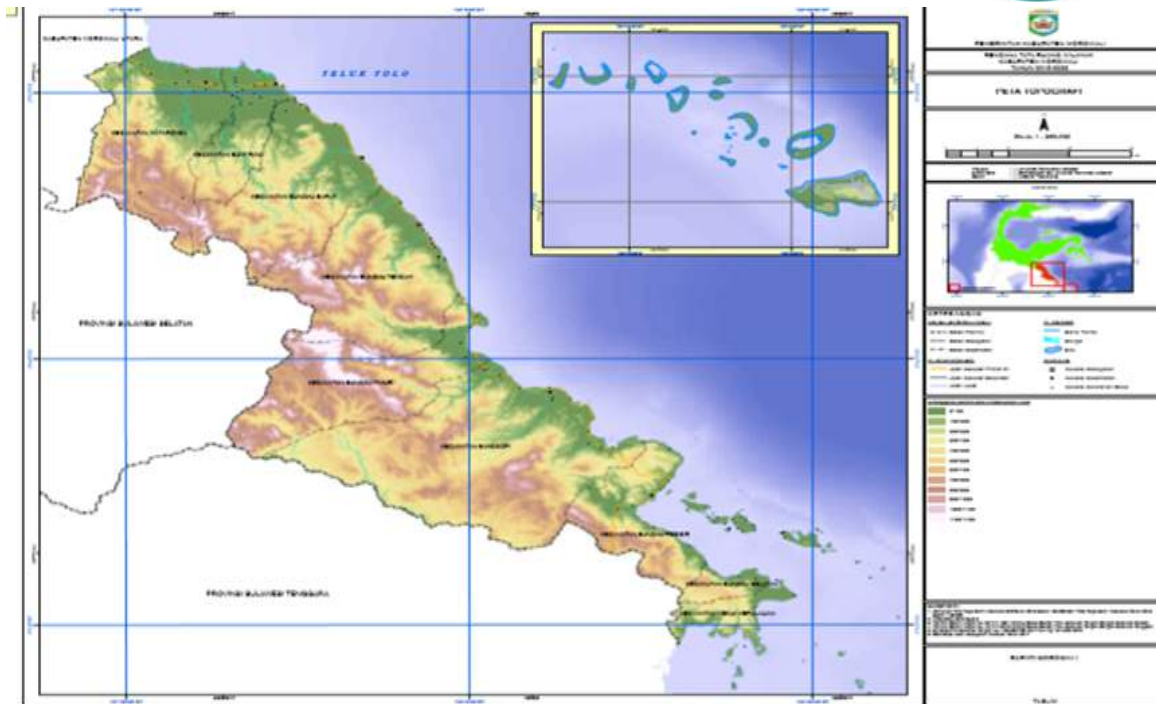
- 1) Wilayah **daratan** Pulau Sulawesi meliputi Kecamatan Wita Ponda, Bumiraya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bahodopi, dan Bungku Pesisir merupakan kecamatan yang ada di sekitar wilayah pesisir dan non pesisir yang memiliki potensi sumberdaya alam dominan pada pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan sumberdaya tambang mineral, serta sumberdaya alam pendukung seperti tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan darat;
- 2) Wilayah kepulauan meliputi Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan merupakan daerah yang relatif didominasi oleh potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil guna dimanfaatkan untuk pengembangan sektor perikanan, dan pariwisata bahari. Dari jumlah 126 (seratus dua puluh enam) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan tersebut terdapat 110 desa berada di wilayah pesisir dan pulau, serta 23 desa dikategorikan sebagai desa non pesisir (BPS Kabupaten Morowali, 2020). Di antara 110 desa pesisir dan pulau tersebut, terdapat 45 desa yang berada di wilayah pulau-pulau kecil dan 5 desa yang berada di wilayah pesisir, yang tersebar di dua kecamatan yakni Menui Kepulauan dan Bungku Selatan. Sisanya merupakan desa-desa pesisir yang berada di wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan tersebar di 7 (tujuh) kecamatan lainnya di

Kabupaten Morowali. Dari 23 desa non pesisir, terdapat 5 desa yang berada pada kondisi topografi wilayah yang dikategorikan memiliki kelerengan, dan 18 desa non pesisir pada kondisi topografi datar, terutama desa-desa yang berada di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda.

c. Topografi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Morowali terdiri dari 9 kecamatan yang terdiri dari 7 kelurahan dan 126 desa yang tersebar di bagian tenggara Pulau Sulawesi sehingga jika dilihat dari posisi di permukaan bumi, wilayah Kabupaten Morowali umumnya terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan hutan dan lereng pegunungan. Kondisi geografis ini berpengaruh pada kemiringan dan ketinggian lahan dari permukaan laut (dpl). Kondisi topografi Kabupaten Morowali bervariasi, sebagian besar (52,74 persen) berada pada ketinggian antara 100-200 meter dpl, kemudian seluas 33,74 persen berada pada ketinggian antara 200-500 meter dpl, dan selebihnya seluas 13,52 persen berada pada ketinggian di bawah 100 meter dpl. Tingkat kelerengannya, yaitu seluas 52,30 persen kemiringan topografi lebih besar dari 40 persen (curam-sangat curam), 11,70 persen luas wilayah dengan kemiringan di bawah 2 persen (datar) agak landai), 12,56 persen luas wilayah dengan kemiringan 3 – 15 persen dan 23,30 persen luas wilayah dengan kemiringan antara 16 - 40 persen (miring agak curam) dan danau seluas 0,14 persen.

Namun, berdasarkan elevasi (ketinggian tempat) setiap ibukota kecamatan, dataran ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali seluruhnya berada pada ketinggian 0 m - 100 m dpl (100 persen). Ini berarti bahwa umumnya, ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali berada pada wilayah pesisir dan pulau kecil dengan kondisi topografi yang datar.



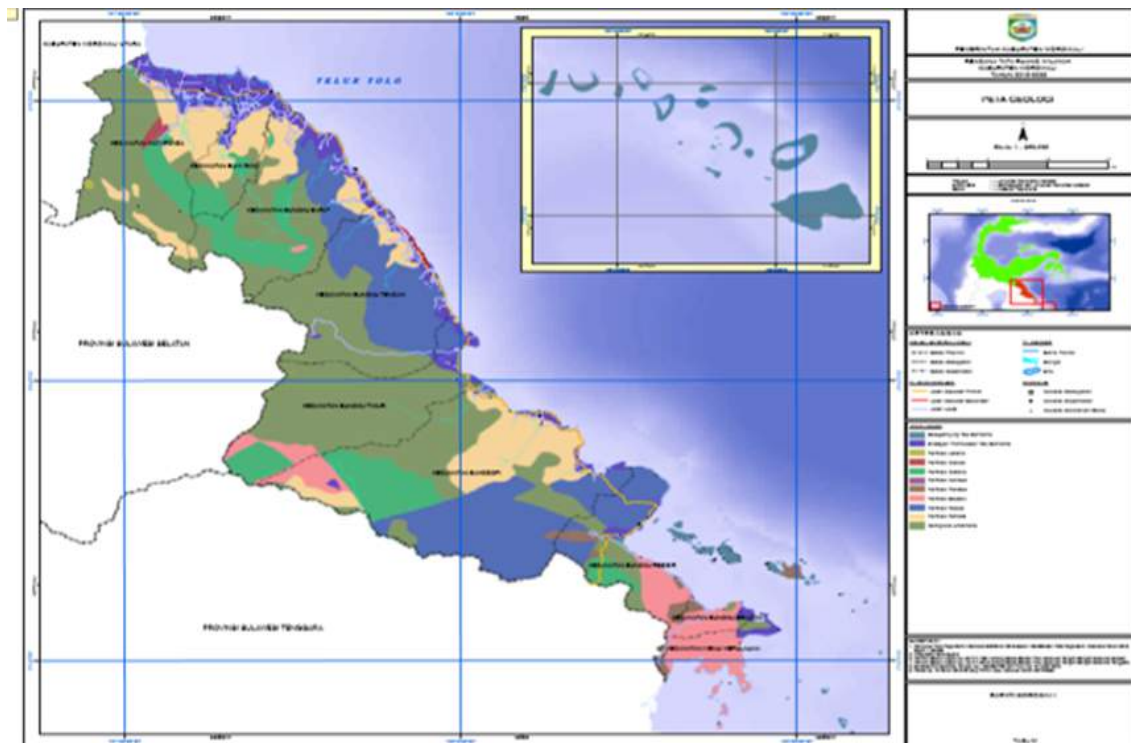
Gambar 2.3
Peta Topografi Kabupaten Morowali

d. Geologi

Secara geologis, wilayah Kabupaten Morowali tersusun atas beberapa jenis batuan yaitu: Batuan Mollase, Batuan kapur, Batuan skiss, Batuan basic, Batuan ultra basic, dan Batuan sedimen. Sedangkan dari sisi geomorfologinya, wilayah ini merupakan beberapa bentukan lahan (landform) yaitu: Aluvial (A) tersebar di dataran rendah (0 - 3 persen), di sekitar sungai besar; Marine (M) tersebar di wilayah agak cekung di sepanjang pantai; Vulkanik (V) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung; Tektonik dan struktural (T) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung.

Kondisi aktual eksplorasi dan produksi bahan galian yang terdapat di daerah ini tersebut (Uno, 2010): di wilayah Sulawesi Tengah, tiga jenis bahan galian utama yang telah nampak *survey* dan produksinya adalah minyak, gas bumi dan nikel. Kegiatan ekplorasi minyak bumi dilakukan di wilayah perairan Morowali (Teluk Tomori) sedangkan Gas bumi terletak di Senoro (Sinorang) Kabupaten Banggai dan telah melakukan produksinya. Adapun nikel yang terdapat di wilayah Banggai dan Morowali (menerus sampai ke wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara) sampai saat ini masih dalam tahapan eksplorasi. Kegiatan penambangan nikel sebetulnya berskala besar telah dan sedang dilakukan bahkan dengan melakukan perubahan fungsi lahan di mana sebagian lahan permukiman (umumnya transmigrasi) dan pertanian menjadi wilayah konsesi tambang sebagaimana terjadi di Kecamatan

Petasia, Witaponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bahodopi dan Bungku Selatan (Morowali). Peta Geologi Kabupaten Morowali secara lengkap terdapat pada Gambar 2.4 berikut.



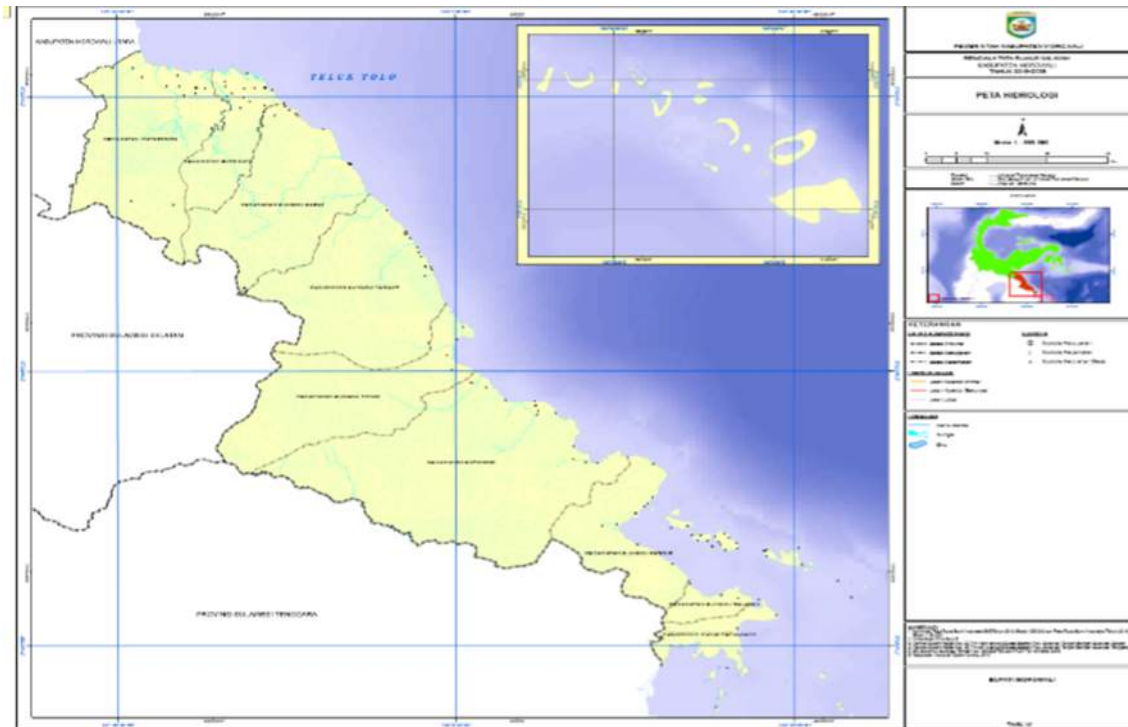
Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Morowali

e. Hidrologi

Beberapa sumber air permukaan terutama sungai-sungai kecil tersebar dari Kecamatan Wita Ponda sampai Kecamatan Bungku Pesisir. Sumber air sungai tersebut umumnya dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11A/PRT/M/2006 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai, bahwa wilayah sungai yang ada di Kabupaten Morowali termaksud dalam wilayah sungai strategis nasional.

Adapun wilayah sungai tersebut adalah wilayah sungai Laa-Tambalako seluas 1045,6 Ha, yang meliputi daerah Sungai Laa seluas 2.875,6 Ha, selanjutnya DAS Tirongan, DAS Salato, DAS Morowali, DAS Sumare seluas 237,5Ha, serta DAS Bahombelu dan DAS Bahodopi seluas 246,87Ha. Ketersediaan air permukaan dan air tanah juga dipengaruhi oleh kondisi hutan. Penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan nikel, serta konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir

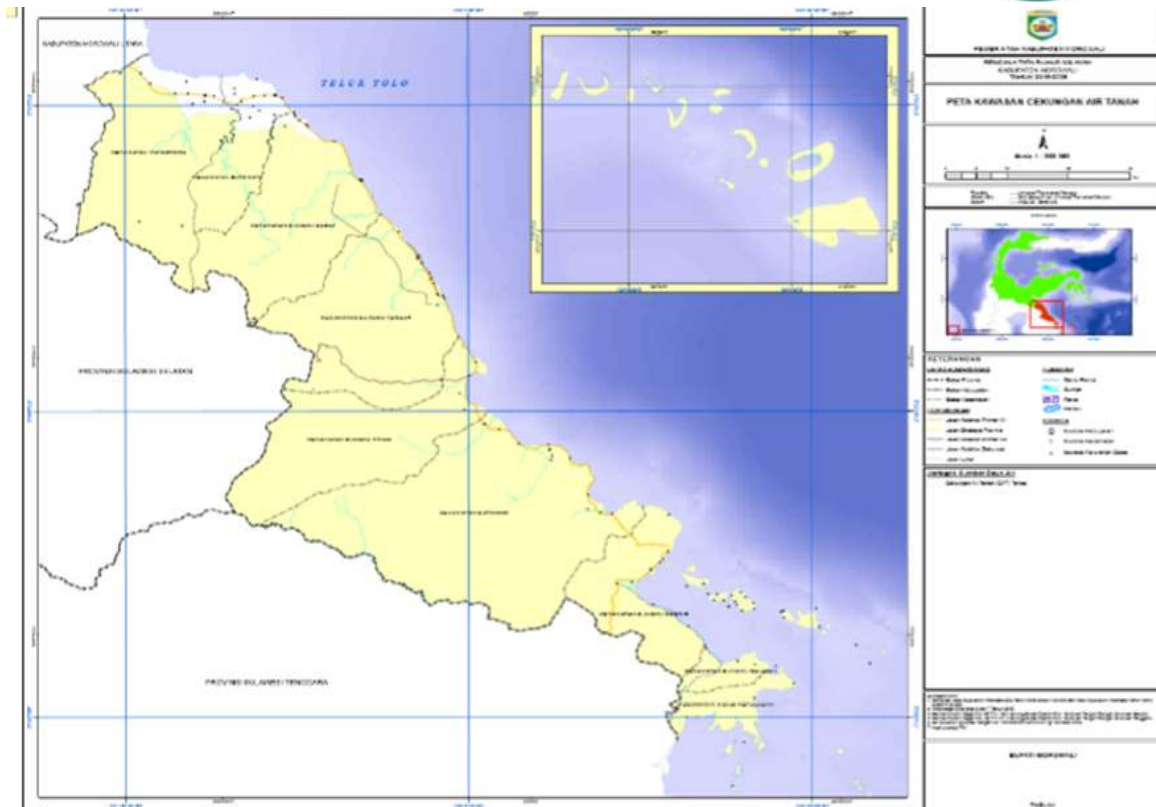
dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Peta Hidrologi Kabupaten Morowali terdapat pada Gambar 2.5 sebagai berikut.



Gambar 2.5
Peta Hidrologi Kabupaten Morowali

Berdasarkan peta potensi penyebaran hidrologi yang merujuk kepada peta Geologi Regional menunjukkan bahwa sekitar 40 persen wilayah Kabupaten Morowali termasuk dalam zona akuifer produktif dengan penyebaran luas artinya memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga maupun industri. Sisanya 60 persen lagi termasuk dalam zona akuifer dengan produktivitas kecil yang berarti memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah rendah tetapi dalam pemanfaatannya dapat diusahakan melalui teknologi geolistrik dan pemboran dengan diameter besar

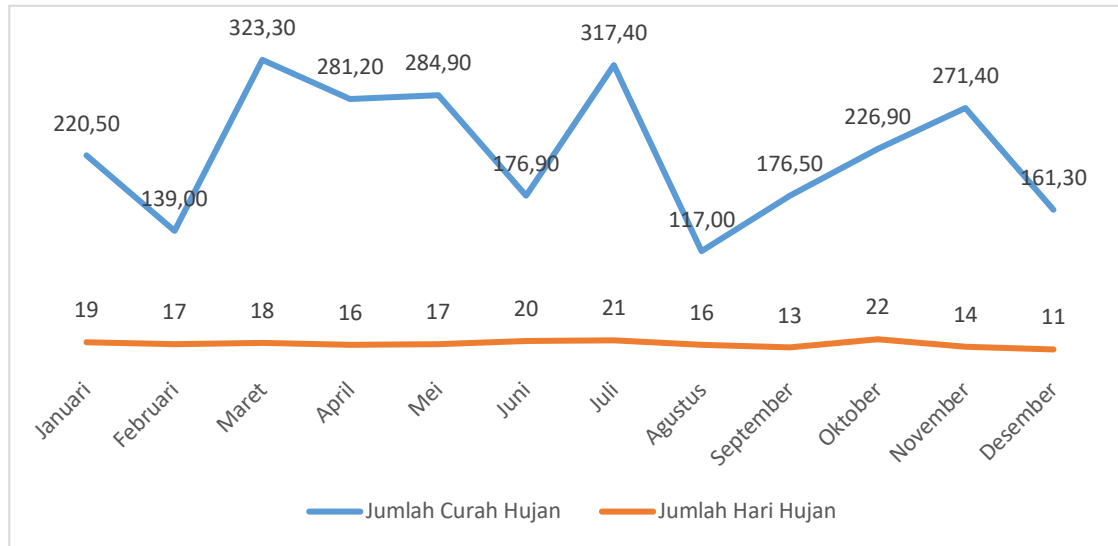
Terdapat sejumlah sumber air kecil dan besar, serta cadangan air tanah yang cukup besar di Kabupaten Morowali, karena menjadi daerah resapan air (catchment area). Beberapa potensi air tanah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam bentuk air kemasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Morowali pada Gambar 2.6 sebagai berikut.



Gambar 2.6
Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Morowali

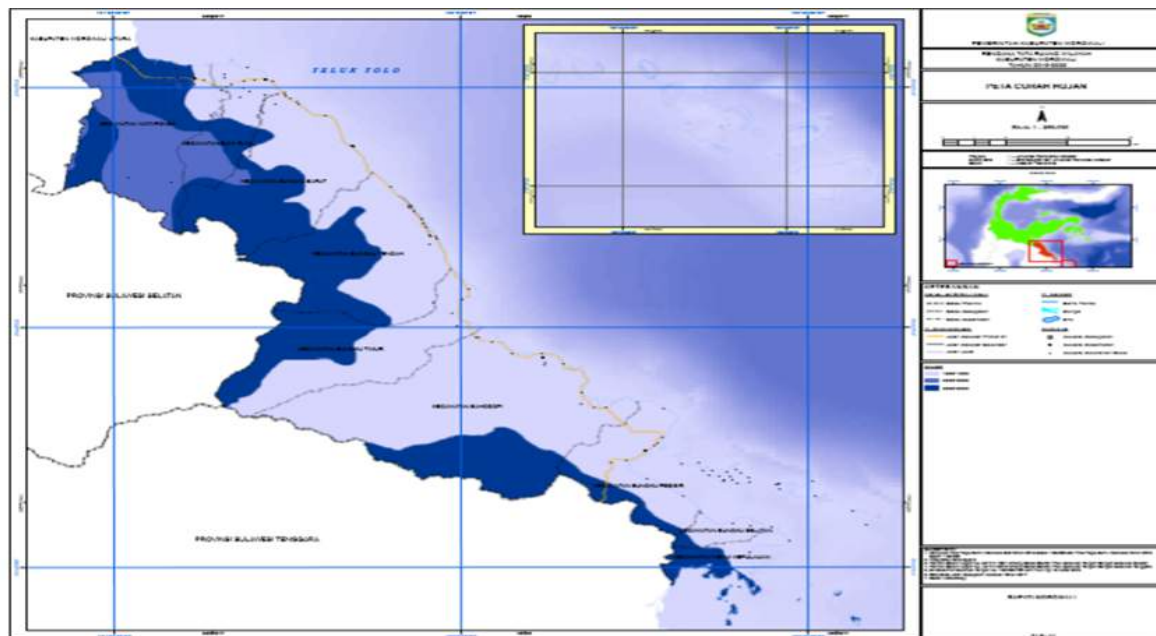
f. Klimatologi

Kabupaten Morowali merupakan daerah tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan sehingga wilayah tergolong iklim A atau sangat basah. Karena itu, wajar jika daerah ini memiliki sungai yang cukup banyak sebagai sumber daya air yang potensial di manfaatkan untuk pengairan. Komponen yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi aliran air permukaan (*run off*) pada lokasi kegiatan antara lain curah hujan, bentang lahan, jenis tanah dan vegetasi sebagai tutupan lahan. Curah hujan sebagai input utama dalam besarnya aliran air permukaan di daerah tangkapan air (*catchment area*), daerah tangkapan air merupakan fungsi dari vegetasi yang dapat menyimpan air hujan yang turun pada daerah tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali tahun 2022, Curah hujan tertinggi pada bulan Maret dengan Curah Hujan 323,20 mm3 dengan selama 18 hari hujan. Selanjutnya diikuti dengan Bulan Juli dan Mei dengan Curah Hujan 317,40 mm3 dan 284,90 mm3 selama 21 hari dan 17 hari hujan. Sedangkan, Curah Hujan paling sedikit yaitu bulan Desember dengan Curah Hujan 161,30 mm3 selama 11 hari hujan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram dibawah ini dan gambar 2.7 peta Klimatologi Kabupaten Morowali.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

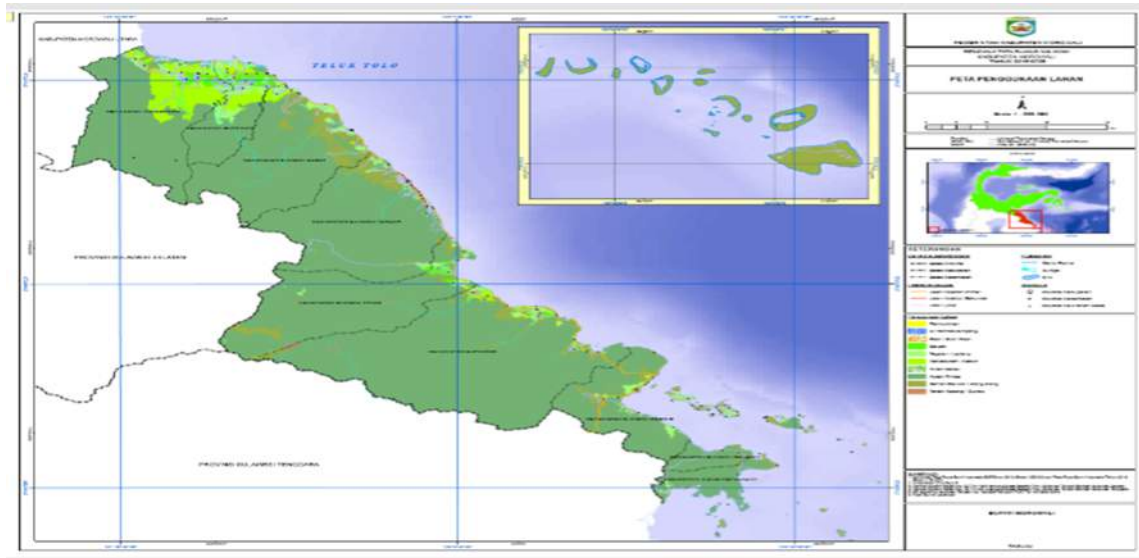
Gambar 2.7
Kondisi Iklim Kabupaten Morowali Tahun 2022



Gambar 2.8.
Peta Curah Hujan Kabupaten Morowali

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali terdiri dari lahan kering dan lahan basah. Lahan basah untuk sawah, sementara lahan kering untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, perumahan dan bangunan lainnya. Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali didominasi lahan Kehutanan, Lahan Pertanian dan Perkebunan teradapat pada Tabel 2.2, dan Peta Penggunaan Lahan terdapat pada Gambar 2.9.



Gambar 2.9
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Morowali

h. Peruntukkan Lahan

Peruntukan Lahan di Kabupaten Morowali diuraikan pada Rencana Pola Ruang Kota mencakup rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, maka dapat dirumuskan rencana pola ruang untuk Kabupaten Morowali yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Luas kawasan lindung tersebar di wilayah Kabupaten Morowali seluas $\pm 99.576,41$ ha yang terdiri atas hutan lindung, kawasan lindung lainnya, sempadan sungai, sempadan pantai berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 yang diuraikan sebagai berikut.

- Kawasan lindung terdapat Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan.
- Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan dan taman bawah laut berupa terumbu karang terdapat di Kecamatan

Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan.

- Kawasan cagar alam geologi, berupa kawasan keunikan bentang alam karst yang terdapat di kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Menui Kepulauan.
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah kawasan imbuhan Cekungan air tanah pada CAT Tonoa di Kecamatan Wita-ponda, Kecamatan Bumi Raya, dan Kecamatan Bungku Barat dan kawasan sekitar mata air terdapat di setiap kecamatan dengan garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.
- Kawasan cagar budaya terdiri atas: a. kawasan cagar budaya Masjid Tua Bungku terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; b. kawasan cagar budaya Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah; dan c. Kawasan cagar budaya Goa di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang diperuntukan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Adapun rincian luas kawasan budidaya yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut.

- Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 120.665,27 hektar yang terdapat di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 28.280,57 hektar yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 40.207,91 hektar yang terdapat di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap kecamatan;
- Kawasan hortikultura terdiri atas tanaman sayur, tanaman buah-buahan dan tanaman biofarma tersebar di kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan permukiman perdesaan di setiap Kecamatan;

- Kawasan perkebunan terdiri atas kawasan perkebunan rakyat dengan komoditi tanaman perkebunan campuran yang terdapat di setiap kecamatan;
- Kawasan peternakan terdiri atas : (a). kawasan integrasi tanaman dan ternak meliputi semua komoditi ternak terdapat di setiap kecamatan; (b). rencana lahan penggembalaan ternak di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bahodopi; (c). rencana sentra peternakan rakyat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bungku Barat; (d). rencana pengembangan kawasan Budidaya Ternak terdapat di setiap Kecamatan; (e). rumah Pemotongan Hewan terdapat di kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi, (f). rencana Rumah Pemotongan Hewan di Kecamatan Bungku Pesisir; (g). pasar dan terminal hewan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (h). rencana pasar dan terminal hewan di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Pesisir;
- Kawasan perikanan tangkap (a). seluruh perairan Kabupaten Morowali yang memiliki potensi hasil perikanan tangkap; (b). Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bungku Selatan; dan (c). rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Kepulauan Menui dan sekitarnya di Kecamatan Menui Kepulauan, Kawasan Minapolitan Moahino dan sekitarnya di Kecamatan Witaponda, dan Kawasan Minapolitan Umbele dan sekitarnya di Kecamatan Bumi Raya;
- Kawasan perikanan budidaya laut terdiri atas: (a). perikanan budidaya keramba, komoditi ikan kerapu, ikan kuwe, dan lobster di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan; (b). rencana pengembangan perikanan budidaya keramba di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir; dan (c). perikanan budidaya rumput laut di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan budidaya perikanan air Payau terdiri atas: (a). tambak udang, ikan bandeng dan rumput laut terdapat di Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; dan (b). kawasan budidaya perikanan tambak yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas $\pm$ 26 (dua puluh enam) hektar di Kecamatan Bahodopi;
- Kawasan budidaya perikanan kolam air tawar berupa kolam air tawar dengan komoditi ikan lele, ikan nila dan ikan mas, ikan patin terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya Kecamatan Bungku

Barat Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi;

- Kawasan Pertambangan Mineral Logam meliputi: (a). pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat; (b). Pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi terbatas seluas 6.451,95 (enam ribu empat ratus lima puluh satu koma sembilan lima) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (c). pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi konversi seluas 423,57 (empat ratus dua puluh tiga koma lima tujuh) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (d). rencana WUP mineral logam terdapat di setiap kecamatan; dan (e). Wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) yang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bahodopi;
- Kawasan Pertambangan bukan Logam meliputi rencana WUP mineral bukan logam yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan Pertambangan Batuan meliputi: (a). pertambangan batuan terdapat di Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, dan Kecamatan Bungku Selatan; dan (b). Wilayah pertambangan rakyat (WPR) direncanakan pada lokasi dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat yang memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundangundangan, dengan komoditi tambang rakyat terdiri atas Pasir batu di setiap kecamatan, Batu kali di setiap kecamatan, Batu gunung di setiap kecamatan, Tanah liat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Tengah;
- Kawasan industri besar terdiri atas: (a) Kawasan Industri Logam; (b) Kawasan Industri perkebunan; (c) Kawasan Industri (KI) Morowali terdapat di Kecamatan Bahodopi; (d) kawasan Industri (KI) Morowali yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas 30.39 hektar di Kecamatan Bahodopi, dan kawasan hutan produksi konversi (HPK) seluas 6,35 hektar; (e) pengembangan kawasan industri pengolahan hasil tambang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Bungku Pesisir; dan (f) rencana industri pengolahan hasil tambang di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan sentra industri kecil dan menengah merupakan

pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah dengan kegiatan industri terdiri atas: (a). industri pengolahan hasil pertanian pangan berupa Sentra Industri Kecil Menengah (Sikim) Pangan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (b). industri pengolahan hasil perkebunan terdiri atas: (a). industri pengolahan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Witaponda; dan (b). rencana industri pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bumi Raya;

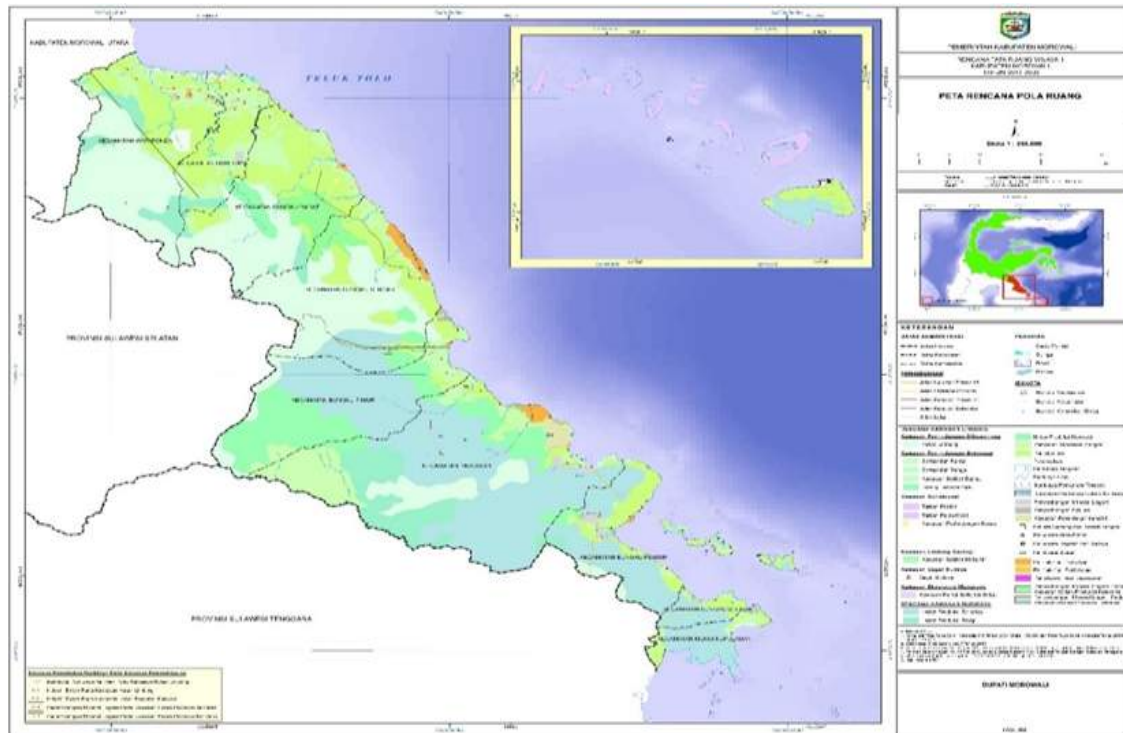
- Industri pengolahan hasil hutan terdiri atas: (a). industri meubel kayu terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; dan (b). rencana industri meubel rotan di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bungku Tengah;
- Industri pengolahan hasil perikanan terdiri atas: (a). Industri pengolahan ikan di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, dan Kecamatan Witaponda;
- Kawasan pariwisata alam pegunungan/ hutan terdiri atas: (a). Wisata Goa terdiri atas: 1). Goa Petakoa di Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda; 2). Goa Fafompogaro, Goa Kotaeya, Goa Tengkorak di Kecamatan Bungku Barat; 3). Goa Kumapa, Goa Tambeanpana Api, Goa Fumbunsanua di Kecamatan Bungku Tengah; 4). Goa Berlian, Goa Alo, Kecamatan Menui Kepulauan; (b). Wisata Puncak/ Pegunungan terdiri atas: 1). Puncak Fafobaho di Kecamatan Bungku Tengah; 2). Puncak Mateantina, Puncak Unsongi di Kecamatan Bungku Timur; dan 3). Puncak Kayangan, Puncak Narita Kecamatan Menui Kepulauan. (c). Wisata air terjun terdiri atas: 1). Kecamatan Bungku Barat Air Terjun Batu Kapal; 2). Kecamatan Bungku Tengah: Air Terjun Mempueno, Air Terjun Sampa laa, Air Terjun Veranomata, Permandian Tompaika, Air Terjun Vera Inense, Air Terjun Perawan; 3). Kecamatan Bungku Timur Permandian Lofi; 4). Kecamatan Bahodopi, Air Terjun Bahoumumpa; 5). Kecamatan Bungku Pesisir Air terjun Buleleng; dan 6). Kecamatan Menui Kepulauan Air kiri Sombori, (d). Penangkaran Rusa dan Penangkaran Burung Maleo di Kecamatan Bungku Barat;
- Kawasan pariwisata maritim/bahari terdiri atas: (a). wisata alam Bentang Laut meliputi: 1). Ekowisata Tracking Mangrove di Kecamatan Bungku Tengah; dan 2). Ekowisata Mangrove Nambo-Laroue di Kecamatan Bungku Timur. (b). Wisata alam pantai/pesisir dan Pulau-pulau kecil meliputi: 1). Pantai pasir Putih Pebotoa, Pantai Lambelu di Kecamatan Bumi Raya; 2). Pantai Raha-Raha ada rasa, Pantai Raha-raha ada Bio di Kecamatan Bungku Barat; 3). Pantai Tanjung Karang, Pantai Tapuno Bahomante, Pantai Tapuno Bente, Pantai Tudua Di

Kecamatan Bungku Tengah; 4). Pantai Pasir Besi, Pantai Puluti, Pulau Pasir Hitam di Kecamatan Bungku Timur; 5). Pulau Langala, Pulau Kanda Pute, Pantai Kea kea di Kecamatan Bahodopi; 6). Pantai Panjang, Pasir Putih Tangofa di Kecamatan Bungku Pesisir; 7). Pulau Dua Laut, Pulau Umbeleyang kecamatan Bungku Selatan; dan 8). Pulau Sombori, Pasir Putih Koi-koila, Pulau Koko, Rumah Nenek, Danau Air Asin, Konservasi perairan pulau tiga Kecamatan Menui Kepulauan; (c). Wisata alam bawah laut meliputi perairan di sekitar Pantai Kecamatan Menui Kepulauan;

- Kawasan pariwisata sejarah dan budaya terdiri atas: (a). Situs Istana Raja Bungku di kecamatan bungku tengah; (b). Makam Raja Bungku di kecamatan Bungku Tengah; (c). Masjid Tua Bungku, Masjid Agung dan Islamic center di kecamatan Bungku Tengah; dan (d). Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah;
- Kawasan pariwisata buatan antara lain: (a). Taman Kota Fonuasingko, Alun-alun Rumah Jabatan Bupati, Taman Sangiang Kinambuka di Kecamatan Bungku tengah; dan (b). Permandian Bahoruru di Kecamatan Bungku Tengah;

Rencana kawasan potensi pariwisata lainnya di setiap kecamatan;

- Kawasan permukiman terdiri atas: (a). kawasan permukiman perkotaan terdiri atas: 1). kawasan perkotaan bungku Tengah; 2). permukiman kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)/Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Tengah; 3). Permukiman perkotaan di Kecamatan Bahodopi; 4). rencana permukiman perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bungku Pesisir; dan 5). rencana kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)/Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; (b). kawasan permukiman perdesaan terdiri atas: 10. permukiman perdesaan terdapat di setiap Kecamatan; 2). kawasan permukiman Transmigrasi Terdapat di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Pesisir; 3). rencana kawasan permukiman Transmigrasi Nelayan di kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan; dan 4). rencana pengembangan kawasan permukiman Transmigrasi di kecamatan Bahodopi, kecamatan Bungku Pesisir, kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda. Data seacra lebih jelas dan lengkap terdapat pada pada gambar 2.10 tentang Peta Pola Ruang sebagai berikut.



Gambar 2.10
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Morowali

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2.1 Potensi Sumberdaya Alam

a. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor memegang peranan penting dan strategis dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Morowali. Hal tersebut ditunjukkan, sektor ini memegang peranan penting, lebih dari 50 persen tiap Tahunnya dalam perekonomian di wilayah ini. Keberhasilan program pembangunan sektor pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Sektor pertanian terdiri dari beberapa sub sektor, yaitu Subsektor Hortikultura, Subsektor Perkebunan, Subsektor Peternakan, Subsektor Perikanan dan Subsektor Kehutanan. Sebagai gambaran dan dasar evaluasi serta perencanaan pengembangan selanjutnya, berikut ini disajikan keadaan sub sektor pertanian di Kabupaten Morowali.

1) Pertanian Tanaman Pangan

Potensi tanaman pangan di Kabupaten Morowali meliputi tanaman padi (sawah dan ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Lahan untuk tanaman padi umumnya beririgasi, dan juga terdapat lahan non irigasi (sawah tadah hujan dan padi ladang). Luas lahan padi (Ha) menurut jenis irigasi dan jenis padi pada setiap kecamatan di Kabupaten Morowali disajikan pada Tabel 2.2



Gambar 2.11
Potensi Persawahan di Kecamatan Bumi Raya dan Wita Ponda di Kabupaten Morowali

Potensi usaha tani untuk padi ladang hanya terdapat di dua kecamatan yakni Bungku Barat dan Bahodopi. Potensi lahan untuk tanaman pangan lain selain untuk tanaman padi juga terdapat di kecamatan lain dengan kondisi topografi landai sampai bergunung. Berdasarkan data BPS Tahun 2021, potensi lahan tegalan di Kabupaten Morowali seluas 16.685,70 Ha (terluas di Bungku Pesisir 1549 Ha), lahan huma/ladang mencapai 1900 Ha yang terluas di Kecamatan Bungku Barat seluas 871Ha, dan tidak digunakan seluas 27.875 Ha yang terluas juga berada di Bungku Barat seluas 3.977 Ha. Luas panen tanaman pangan di Kabupaten Morowali Tahun 2022 seperti tanaman padi meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 9.343 Ha. Luas jagung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Data perkembangan luas panen tanaman pangan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ha)
Di Kabupaten Morowali, Tahun 2018-2022

Jenis Tanaman	Tahun (Hektar)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Padi	8.021,00	9.069,00	9.225,00	9.343,00	8.650,00
Jagung	1.530,40	1.180,00	1.180,00	1.040,10	1.040,10
Ubi Kayu	163,00	144,00	144,00	190,00	190,00
Ubi Jalar	47,50	38,00	38,00	69,90	69,90
Kacang Tanah	51,50	52,00	52,00	224,50	224,50
Kacang Kedelai	1.573,70	61,00	61,00	87,00	87,00
Kacang Hijau	44,80	61,00	61,00	57,50	57,50

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah kembali)

Merujuk pada Tabel 2.2 di atas, luas lahan panen tanaman pangan di Kabupaten Morowali yang terbesar di Tahun 2021 adalah lahan tanaman pangan padi sebesar 9.343 Ha, kemudian yang terluas kedua yakni tanaman pangan padi sebesar 1.040 Ha. Sedangkan yang terendah adalah tanaman pangan Ubi Jalar. Dari total luas lahan, perkembangan berfluktuatif kurun Tahun 2018-2022. Pada Tahun 2017, total luas panen tanaman pangan seluas 11.431,90 Ha, menurun pada Tahun 2019 seluas 10.605,00 Ha dan meningkat kembali Tahun 2020 seluas 10.761,00 Ha dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 11.012,00 Ha.

Berdasarkan data pada Tabel 2.3, produksi tanaman padi sawah pada Tahun 2018 sebesar 54.520,00 ton. Kemudian Tahun 2019 produksi menurun menjadi sebesar 44.672 Ton. Namun di tahun 2020 produksi tanaman padi juga mengalami menurun menjadi 42.068,22 Ton, dan pada tahun 2021 sebesar 45.434,34 Ton, sampai pada tahun 2023 sebesar 46.520,32 Ton.

Untuk tanaman jagung jumlah produksi tertinggi pada Tahun 2018 yakni sebesar 7.083,00 ton, sementara pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5.283,00 ton, selanjutnya sampai pada Tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga menjadi 1.865,00 ton, data terkait secara lengkap disajikan pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ton)
Kabupaten Morowali, Tahun 2018-2022

Jenis Tanaman	Tahun (Ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Padi	40.477,00	44.672,00	42.068,22	45.434,34	39.507,32
Jagung	7.083,00	5.283,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
Ubi Kayu	4.298,00	4186	4.186,00	4.186,00	4.186,00
Ubi Jalar	644,00	775	775,00	775,00	775,00
Kacang Tanah	62,00	56	56,00	56,00	56,00
Kacang Kedelai	1.924,00	46	127,00	127,00	127,00
Kacang Hijau	32,00	4	4,00	4,00	4,00

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2019-2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Morowali

Untuk jenis tanaman pangan lokal lainnya di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022, secara keseluruhan mengalami sedikit penurunan produksi seperti padi dari 40.477,00 ton pada Tahun 2017 menjadi 39.507,32 pada Tahun 2022. Hal yang sama juga terjadi, pada tanaman jagung yang produksinya menurun sangat besar dari 7.083,00 ton pada tahun 2017 dan menurun pada tahun 2021 menjadi 1.865 ton. Untuk Tanaman Ubi Kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau, produksinya menurun selama periode 2018-2022. Penurunan produksi

ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan kondisi Kabupaten Morowali sebagai daerah industri tambang yang padat penduduk dan tenaga kerja dari berbagai daerah. Sehingga kebutuhan akan ketersediaan pangan juga meningkat. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Morowali.

2) Pertanian Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura merupakan jenis tanaman yang terkait keperluan bahan pangan dan kebutuhan keindahan atau seni. Dilihat dari segi umur, tanaman hortikultura umumnya tergolong tanaman semusim dan ada juga yang berumur jangka panjang. Tanaman hortikultura digolongkan dalam tiga kelompok tanaman yakni tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan hias. Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah, dan umbinya, yang berumur kurang dari satu Tahun. Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu Tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak. Tanaman buah-buahan Tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman Tahunan. Tanaman sayuran Tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari satu Tahun.

Tanaman biofarmaka adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik, dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi (rimpang) ataupun akar. Tanaman hias adalah tanaman yang mempunyai nilai keindahan baik bentuk, warna daun, tajuk maupun bunganya, sering digunakan untuk penghias pekarangan dan lain sebagainya. Luas lahan dan produksi tanaman hortikultura terutama sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Morowali disajikan pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5. Diman pada Tabel 2.4 menunjukkan bahwa tanaman kangkung dan tomat merupakan tanaman yang memiliki produksi terbesar dibanding tanaman lain di Kabupaten Morowali. Selain potensi tanaman hortikultura jenis sayuran, Kabupaten Morowali juga memiliki potensi produksi tanaman buah yang selanjutnya disajikan pada Tabel 2.4.



Tabel 2.4
Luas Lahan (Ha) dan Produksi (Ku) Beberapa Jenis Tanaman Sayuran Utama
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022

No	Kecamatan	Bawang Merah		Cabe Rawit		Kangkung		Tomat		Petsai/Sawi		Kacang panjang	
		Luas Lahan	Produksi (Ku)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ku)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ku)
1	Menui Kepulauan	-	-	3,00	33,00	2,00	25,00	-	-	-	-	2,00	28,00
2	Bungku Selatan	-	-	1,00	18,00	-	2,00	-	-	-	-	1,00	11,00
3	Bahodopi	1	60,00	4,00	346,00	27,00	1.350,00	2,00	246,00	25,00	2.040,00	10,00	704,00
4	Bungku Pesisir	-	-	10,00	373,00	8,00	188,00	10,00	420,00	-	-	8,00	99,00
5	Bungku Tengah	-	-	34,00	530,00	-	-	4,00	197,00	-	-	10,00	365,00
6	Bungku Timur	-	-	15,00	444,00	4,00	47,00	3,00	112,00	3,00	84,00	6,00	144,00
7	Bungku Barat	13	529,00	28,00	761,00	25,00	347,00	9,00	691,00	67,00	5.093,00	13,00	300,00
8	Bumi Raya	-	-	16,00	1.075,00	31,00	1.080,00	27,00	1.180,00	25,00	390,00	28,00	1.065,00
9	Wita Ponda	-	-	8,00	317,00	5,00	195,00	1,00	165,00	-	-	8,00	258,00
	Morowali	14	589,00	118,00	3.897,00	102,00	3.234,00	55,00	3.011,00	120,00	7.607,00	85,00	2.974,00

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

Tabel 2.5
Produksi Beberapa Jenis Tanaman Buah-Buahan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022

No	Kecamatan	Produksi (Kuintal) Tanaman Buah						
		Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Langsat	Salak
1	Menui Kepulauan	33	17	53	630	130	55	-
2	Bungku Selatan	36	13	-	48	23	80	-
3	Bahodopi	-	115	25	2.256	1.719	-	-
4	Bungku Pesisir	319	52	31	57	338	60	1
5	Bungku Tengah	244	300	-	-	-	-	-
6	Bungku Timur	-	330	-	340	-	-	-
7	Bungku Barat	22	4 618	-	900	1.774	291	-
8	Bumi Raya	500	-	-	1.655	85	-	-
9	Wita Ponda	-	-	1.350	448	-	-	1
	Morowali	1.154	5.445	1.459	6.334	4.069	486	2

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2021 (diolah kembali)

Mengutip data pada Tabel 2.5, menunjukkan bahwa jenis komoditi buah-buahan yang memiliki produksi yang tinggi adalah tanaman pisang dan diusahakan oleh hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Morowali atau tersebar di sembilan kecamatan. Secara umum, tanaman pisang juga merupakan tanaman kedua yang banyak ditanam oleh masyarakat di Sulawesi Tengah selain tanaman nenas. Produksi tanaman buah terbesar yakni pisang sebesar 6.334 kuintal, meningkat dari tahun sebelumnya, kemudian pepaya sebesar 4.069 kuintal dan durian sebesar 5.445 kuintal. Sedangkan yang terkecil adalah salak sebesar 2 kuintal. Gambaran produksi tanaman buah-buahan tersebut kedepan harus dikembangkan menjadi produk-produk IKM di Kabupaten Morowali.

3) Potensi Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan merupakan jenis tanaman yang berumur Tahunan atau jangka panjang. Penghitungan luas tanaman perkebunan besar adalah pada keadaan akhir Tahun dan tidak termasuk yang luasnya kurang dari 5 hektar. Bentuk produksi perkebunan adalah; karet kering (karet), daun kering (the dan tembakau), biji kering (kopi dan coklat), kulit kering (kayu manis dan kina), serat kering (rami), bunga kering (cengkeh), refined sugar (tebu dari perkebunan besar), gula mangkok (tebu dari perkebunan rakyat), ekivalen kopra (kopra), biji dan bunga (pala) serta minyak daun (sereh). Jenis tanaman perkebunan

yang umumnya ditanam petani di Kabupaten Morowali adalah kelapa, kakao, kelapa sawit, cengkeh, kopi, lada, karet, dan pala. Produksi dan luas lahan tanaman perkebunan di Kabupaten Morowali disajikan pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7.

Tabel 2.6
Produksi Beberapa Jenis Tanaman Perkebunan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022

No	Kecamatan	Produksi (ton) Tanaman Perkebunan				
		Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Karet	Kakao
1	Menui Kepulauan	50.000,00	-	-	-	84.300,00
2	Bungku Selatan	98.800,00	-	13.500,00	-	251.400,00
3	Bahodopi	50.400,00	33.250,00	900,00	-	52.250,00
4	Bungku Pesisir	66.650,00	134.000,00	15.486,00	-	20.250,00
5	Bungku Tengah	107.000,00	-	-	-	726.336,00
6	Bungku Timur	189.249,00	-	-	-	100,00
7	Bungku Barat	86.688,00	45.489.000,00	3.600,00	2.400,00	454.467,00
8	Bumi Raya	39.200,00	20.000.000,00	-	-	72.000,00
9	Wita Ponda	45.500,00	10.440.000,00	140,00	-	66.650,00
	Morowali	733.487,00	76.096.250,00	33.626,00	2.400,00	1.727.753,00

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

Tabel 2.6 menunjukkan produksi tertinggi tanaman perkebunan di Kabupaten Morowali adalah tanaman kelapa sawit (76.096.250,00 Ton), dan produksi terendah adalah tanaman Kopi (33.626 Ton). Tanaman kelapa sawit umumnya terkonsentrasi di Bungku Barat, Bumi Raya dan Wita Ponda. Produksi tanaman Kelapa adalah yang terbesar kedua dan usaha ini dilakukan masyarakat di hampir seluruh kecamatan, selain Menui Kepulauan, Bungku Selatan dan Bungku Timur. Selanjutnya Sedangkan, untuk produksi tanaman Kakao pada tahun 2022 sebesar 1.727.753 ton, produksi tanaman kakao tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Morowali kecuali Menui Kepulauan. Produksi tanaman Kakao terbesar berada di Kecamatan Wita Ponda, Bungku Timur dan Kecamatan Bungku Barat.

Tabel 2.7 menunjukkan jenis tanaman perkebunan yang memiliki lahan terluas adalah tanaman kelapa sawit. Tanaman ini diusahakan masyarakat dan perusahaan perkebunan di 6 (enam) kecamatan. Tanaman terluas di Kecamatan Bungku Barat mencapai luas 10.080 ha dan terkecil di Kecamatan Bungku Timur sebesar 9 ha. Meski, mengalami penurunan produksi akibat serangan hama, tanaman kakao masih menempati urutan kedua terluas di Kabupaten Morowali.

Tabel 2.7
Luas Lahan Beberapa Jenis Tanaman Perkebunan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha) Tanaman Perkebunan			
		Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Kakao
1	Menui Kepulauan	394	-	8	300
2	Bungku Selatan	216	-	80	1.180
3	Bahodopi	140	60	6	107
4	Bungku Pesisir	71	72	101	37
5	Bungku Tengah	1,840	30	-	1.685
6	Bungku Timur	298	9	-	1.093
7	Bungku Barat	130	10.080	9	813
8	Bumi Raya	66	2.695	-	96
9	Wita Ponda	50	4.075	4	359
	Morowali	3.205	17.021	208	5.670

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

4) Peternakan

Jenis-jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Morowali Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 diklasifikasikan ke dalam tiga bagian yaitu: a) Ternak besar yang meliputi: sapi kuda dan kerbau b) Ternak kecil antara lain: kambing, domba dan babi; dan c) Ternak unggas yang meliputi: ayam kampung, ayam petelur dan itik. Ternak besar jenis sapi merupakan ternak yang mendominasi di Kabupaten Morowali dan umumnya tersebar di Kecamatan Bungku Barat, Bahodopi, Bungku Timur dan Bungku Tengah. Populasi ternak besar pada Tahun 2022 sebanyak 10.325 ekor sapi lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, ternak kerbau sebanyak 65 ekor dan kuda 4 ekor. Ternak besar tersebut mengalami peningkatan dari 7.121 ekor pada Tahun 2018 menjadi 9.122 ekor pada Tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022 populasi ternak besar sebanyak 10.394 ekor. Data populasi ternak besar di Kabupaten Morowali terlihat pada Tabel 2.8 sebagai berikut.

Tabel 2.8
Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil
Kabupaten Morowali, Tahun 2018-2022

Jenis Ternak	Tahun (Ekor)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ternak Besar					
- Kerbau	247	322	336	99	65
- Sapi	6.866	7.758	7.931	9.019	10.325
- Kuda	8	7	8	4	4
Ternak Kecil			8.275		
- Kambing	12.277	14.532	16.608	13.608	16.512

Jenis Ternak	Tahun (Ekor)				
	2018	2019	2020	2021	2022
- Domba	12	8	-	0	-
- Babi	3.241	3.921	4.162	1.812	2.189

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

Populasi ternak kecil (kambing domba dan babi) di Kabupaten Morowali cenderung mengalami peningkatan. Populasi ternak kecil seperti kambing mengalami peningkatan populasinya dari 12.277 ekor di Tahun 2018 meningkat menjadi 16.512 ekor pada Tahun 2021, juga meningkat dari tahun 2020 sebelumnya. Sementara populasi ternak kecil jenis babi di Tahun 2018 sebanyak 3.241 ekor mengalami penurunan pada Tahun 2021 menjadi sebesar 1.812 ekor, dan kembali meningkat ditahun 2022 sebesar 2.189 ekor. Secara keseluruhan populasi ternak kecil meningkat kurun Tahun 2018-2022, dimana sebanyak 15.530 ekor Tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 20.770 ekor Tahun 2020, namun menurun cukup signifikan ditahun 2021 sebesar 15.420 ekor. Kembali meningkat ditahun 2022 sebanyak 16.512 ekor.

Populasi unggas yang dternak masyarakat Kabupaten Morowali terdiri dari Ayam Kampung, Ayam Pedaging, Ayam Petelur dan Itik. Dari 4 (empat) jenis unggas yang dternak masyarakat di Kabupaten Morowali dalam 2 (dua) Tahun terakhir didominasi unggas ayam kampung. Data populasi unggas di Kabupaten Morowali pada Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Jumlah Unggas Menurut Jenisnya
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Jenis Tanaman	Tahun (Ekor)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ayam Kampung	79.790	95.858	101.926	114.158	141.754
Ayam Petelur	21.044	27.484	31.918	65.044	37.249
Ayam Pedaging	58.042	243.876	343.836	93.940	97.538
Itik	9.443	35.417	41.532	10.781	15.690

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

Seperti yang di tampilkan pada Tabel 2.9 di atas, jumlah populasi ternak unggas jenis ayam kampung di Kabupaten Morowali pada Tahun 2018 menjadi 79.790 ekor kemudian pada Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 95.858 ekor dan hingga Tahun 2020 meningkat menjadi 101.926 ekor dan ditahun 2021 kembali meningkat menjadi 114.158 ekor, ditahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan 141.754 ekor. Untuk populasi ternak unggas

ayam pedaging pada Tahun 2018 menjadi 58.042 ekor, Selanjutnya Tahun 2019 meningkat lagi menjadi sebesar 243.876 ekor dan hingga Tahun 2020 meningkat dengan sangat signifikan menjadi 343.836 ekor, namun pada tahun 2021 menurun signifikan menjadi 93.940 ekor, kemudian pada tahun 2022 sedikit meningkat menjadi 97.538 ekor. Sementara populasi ternak itik Tahun 2018 sebanyak 9.443 ekor meningkat menjadi 41.532 ekor pada Tahun 2020, sampai dengan tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 15.690 ekor. Dan untuk ayam petelur juga meningkat dari Tahun 2018 sebanyak 21.044 ekor, menjadi 31.918 ekor di Tahun 2020, namun meningkat signifikan ditahun 2021 sebesar 65.044 ekor dan ditahun 2022 menurun menjadi 37.249 ekor. Secara keseluruhan jumlah unggas di kabupaten Morowali sebanyak 70.167 ekor meningkat 73,62 persen dari Tahun 2018. Peningkatan populasi unggas ini dapat menjadi kesempatan pengembangan industri pedaging di Kabupaten Morowali kedepannya. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat kebutuhan pasar di wilayah pertambangan yang sangat besar.

5) Perikanan

Potensi perikanan terdiri atas sumberdaya perikanan dan sumberdaya manusia (nelayan dan pembudidaya). Sumberdaya perikanan dikelola melalui dua kegiatan/usaha perikanan yakni perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Sumberdaya manusia pada sub sektor perikanan dilakukan secara bersama-sama oleh satu keluarga yang disebut dengan Rumah Tangga Perikanan (RTP). Jumlah rumah tangga Perikanan di Kabupaten Morowali mencapai 7.138 RTP pada Tahun 2018 lalu meningkat menjadi 7.138 RTP pada Tahun 2018 dan hingga Tahun 2019 sebanyak 7.153 meningkat dari Tahun 2018, dan ditahun 2020 jumlah RT perikanan sebesar 7.178, pada tahun 2021 mengalami sedikit pertambahan menjadi 7.264, kemudian pada tahun 2022 sebanyak 8.535 RT, seperti yang disajikan pada Tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10

Perkembangan Rumah Tangga Perikanan RTP per Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Menui Kepulauan	2.237	2.237	2.237	2.237	2.710
Bungku Selatan	3.030	3.032	3.043	3.049	3.312
Bahodopi	128	141	141	125	219
Bungku Pesisir	313	313	313	331	357

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bungku Tengah	526	526	526	526	649
Bungku Timur	265	265	265	293	392
Bungku Barat	256	256	270	270	337
Bumi Raya	241	241	241	241	301
Witaponda	142	142	142	192	258
Kabupaten Morowali	7.138	7.153	7.178	7.264	8.535

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 Dinas Perikanan

Garis pantai Kabupaten Morowali kurang lebih 500 km, dengan luas perairan laut sekitar 29.962,88 km² memiliki potensi biotik yang jenis dan jumlahnya cukup banyak, terdiri dari berbagai jenis ikan, kepiting, cumi-cumi, gurita, dan kerang mutiara. Sedangkan untuk perikanan budidaya antara lain tambak dan kolam dengan jenis potensi udang windu, bandeng, rumput laut, ikan mas, nila, dan udang galah. Selama ini jenis ikan pelagis ekonomis rendah seperti kembung, teri, dan layang yang banyak ditangkap nelayan. Hasil tangkapan dalam bentuk segar dan kering untuk konsumsi lokal atau luar daerah. Pada Tahun 2018, produksi perikanan tangkap mencapai 34.126,60 ton yang sebagian besar berasal dari produksi perikanan tangkap di Kecamatan Bungku Selatan sebanyak 17.292,40 atau sebesar 50,67 persen. Kemudian diikuti oleh Menui Kepulauan mencapai 4.535,90 ton atau proporsinya mencapai 13,29 persen. Sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Bahodopi dengan produksi hanya sebesar 390,60 ton. Kecamatan Bungku Selatan Produksi perikanan lautnya meningkat signifikan hingga Tahun 2019 menjadi 22.048,00 ton, namun menurun ditahun 2020 menjadi sebesar 16.821,20 ton dan kembali menurun ditahun 2021 menjadi 14.309,30 ton sedikit meningkat ditahun 2022 sebesar 14.761,80 ton. Kemudian Kecamatan Bungku Tengah juga meningkat signifikan produksi perikanan laut menjadi 5.829,80 ton (menggeser kecamatan menui kepulauan dengan produksi perikanan laut terbesar), namun ditahun 2022 produksinya juga mengalami penurunan menjadi 8.526,90 ton. Kecamatan lainnya yang mengalami peningkatan produksi yakni Bahodopi, Bungku Pesisir, Bungku Timur, Bungku Barat dan Wita Ponda. Produksi perikanan tangkap tersebut diperoleh dari mengoperasikan alat tangkap dan perahu, kapal motor dan perahu tanpa motor. Total kapal motor berjumlah 1.301 unit pada Tahun 2022, perahu motor mencapai 4.762 unit, dan tanpa motor

sebanyak 1.755 unit.

Tabel 2.11

**Produksi Perikanan Laut (Tangkap dan Budidaya Laut)
selama Empat Tahun Terakhir dan Persentase Produksi per
Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022**

Kecamatan	Produksi Perikanan Laut Tahun (ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Menui Kepulauan	4.535,90	5.434,90	5.532,00	8.675,70	9.021,90
Bungku Selatan	17.292,40	22.048,00	16.821,20	14.309,30	15.131,80
Bahodopi	390,60	166,60	182,40	307,00	382,6
Bungku Pesisir	2.206,30	1.258,10	1.158,60	1.558,80	1.472,00
Bungku Tengah	6.242,70	5.829,80	5.135,10	3.373,30	2.603,20
Bungku Timur	676,20	594,30	573,70	1.168,90	1.074,20
Bungku Barat	871,90	1.300,40	1.015,30	705,40	973,9
Bumi Raya	510,70	404,20	417,40	611,50	787,9
Wita Ponda	1.399,90	1.537,40	1.367,50	2.599,40	3.196,30
Kabupaten Morowali	34.126,60	38.573,70	32.203,20	33.309,30	34.643,80

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

6) Sumberdaya Hutan

Sebelum dilakukan pemekaran Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali memiliki potensi sumber daya hutan yang cukup besar. Berdasarkan data Publikasi BPS Tahun 2022, Tercatat pada Tahun 2021 Kabupaten Morowali memiliki hutan seluas 303.306,97 Ha, terdiri dari Hutan Produksi terbatas sebesar 114.200,51 Ha, kemudian hutan Produksi tetap sebesar 37.416,69 Ha, Hutan Produksi dapat di Konversi sebesar 41.340,71 Ha, kemudian terdapat hutan lindung seluas 114.322,01 Ha.

Selanjutnya Hasil hutan non kayu, kulit dan daun mencapai 29.777,185 ton dan hasil perburuan (madu) 23.604 liter. Cagar alam di Kabupaten Morowali memiliki luas 225.000 Ha. Kawasan ini merupakan wilayah konservasi terluas kedua di Provinsi Sulawesi Tengah. Berbagai flora dan fauna dilindungi ada di kawasan ini, seperti anoa, babi rusa, musang coklat, dan burung maleo. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Morowali (setelah pemekaran Kabupaten Morowali Utara) terbagi atas:

Tabel 2.12

**Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan
Kabupaten Morowali (Hektar), Tahun 2022**

Kecamatan	Hutan Produksi			Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Jumlah Luas Hutan
	Terbatas	Tetap	Dapat Dikonversi			
Menui Kepulauan	10.911,42	-	-	388,99	-	11.300,41
Bungku Selatan	5.182,67	-	-	-	-	5.182,67

Kecamatan	Hutan Produksi			Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Jumlah Luas Hutan
	Terbatas	Tetap	Dapat Dikonversi			
Bahodopi	47.299,26	23.976,06	10.578,41	10.820,43	-	92.674,16
Bungku Pesisir	19.237,36	847,59	1.011,04	1.441,26	-	22.537,25
Bungku Tengah	7.867,65	538,75	2.977,02	31.970,62	-	43.354,04
Bungku Timur	23.702,15	-	23.001,29	913,82	-	47.617,26
Bungku Barat	-	1.991,37	3.474,73	20.353,16	-	22.344,53
Bumi Raya	-	1.485,40	298,22	502,43	-	1.987,83
Witaponda	-	8.577,52	-	47.931,30	-	56.308,82
Morowali	114.200,51	37.416,69	41.340,71	114.322,01	-	303.306,97

Sumber: Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 Selanjutnya berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 pada pasal 128 Kawasan hutan produksi di Kabupaten Morowali terdiri atas:

- Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 120.665,27 (seratus dua ribu enam ratus enam puluh lima koma dua tujuh) hektar yang terdapat di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 28.280,57 (dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh koma lima tujuh) hektar yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas seluas 40.207,91 (empat puluh ribu dua ratus tujuh koma sembilan satu) hektar yang terdapat di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Menui Kepulauan;

7) Potensi Sumberdaya Mineral

Di sektor pertambangan, kabupaten Morowali menyimpan deposit tambang yang cukup besar, seperti minyak bumi, nikel, besi, dan chromit. Tabel 2.13 berikut ini disajikan luas potensi tambang dan area pertambangan yang telah dikelola di Kabupaten Morowali.

Tabel 2.13
Potensi dan Luas Areal Pertambangan dan Energi
di Kabupaten Morowali

Jenis Bahan Tambang/Galian	Luas Area (Ha)	Lokasi Tambang
Minyak Bumi dan Gas Alam	-	-
Nikel	142.000	Menui Kepulauan, Bungku Bahodopi, Bungku Timur, Bungku Tengah, Bungku Barat, Bumi Raya, Wita Ponda
Chromit	5.729	Bungku Barat
Marmer	-	-
Total	147.729	

Berdasarkan data pada Tabel 2.13 menunjukkan bahwa potensi Nikel di Kabupaten Morowali memiliki luas areal hampir 150.000 Ha, lokasinya menyebar hampir di sebagian wilayah Morowali dengan cadangan diperkirakan akan sampai 8 juta WMT. Untuk chromit yang merupakan bahan galian yang banyak digunakan dalam industri baja dan industri bahan kimia, cadangannya diperkirakan mencapai 1 juta ton terdapat di Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Barat. Begitu juga dengan batu gamping yang cadangannya mencapai 30 juta meter kubik dengan luas area 25 Ha yang berada di Kecamatan Bungku Selatan.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

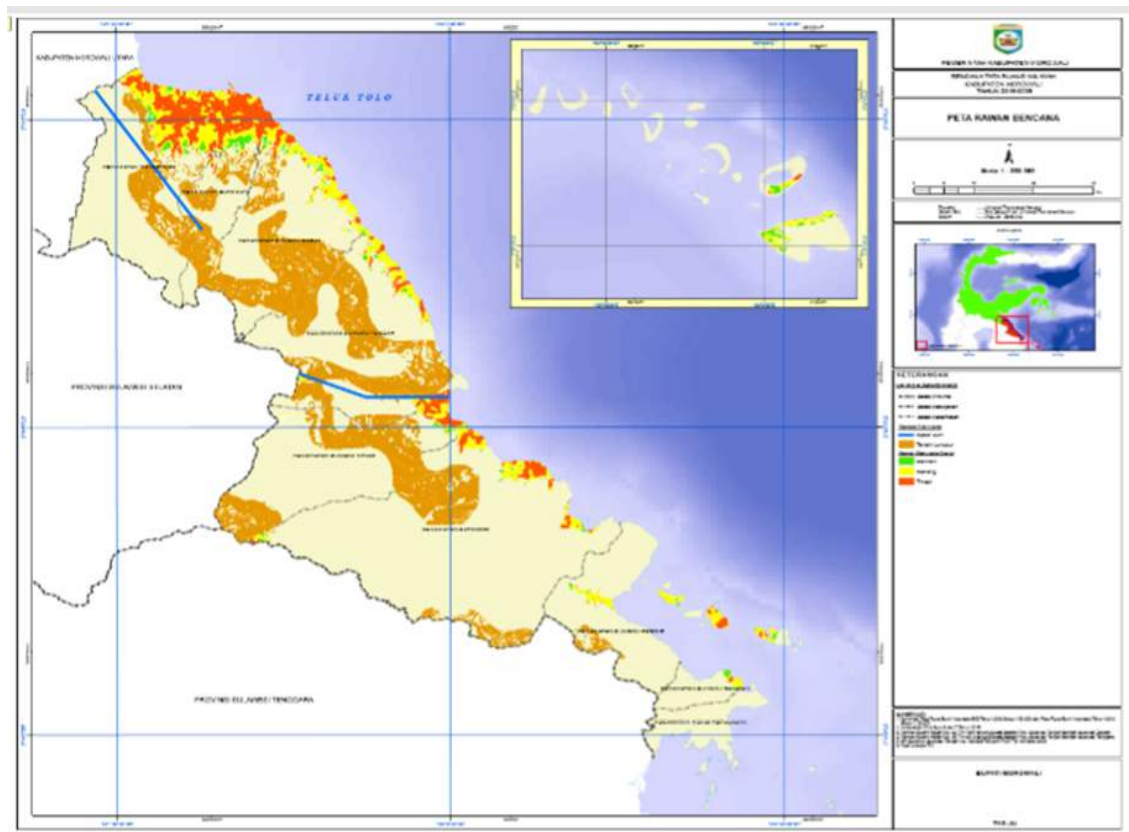
Kabupaten Morowali rentan terhadap proses-proses tektonik aktif karena dilewati oleh sesar aktif Matano. Oleh karena itu, kabupaten ini sangat rentan terhadap gempa bumi besar, tsunami, dan banjir. Perubahan iklim di masa mendatang cenderung memperbesar intensitas badai ekstrem yang mengakibatkan banjir besar. Selain itu, intensitas dan curah hujan yang tinggi dan semakin berkurangnya daerah tangkapan hujan akibat kegiatan pertambangan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Morowali berpotensi untuk lebih meningkatkan terjadinya banjir dan longsor.

Kondisi Topografi di Kabupaten Morowali yang merupakan perbukitan dan pegunungan, membuat kabupaten ini rawan longsor, aliran debris, dan erosi. Potensi-potensi bahaya ini menghasilkan sejumlah besar sedimen yang mengisi dasar sungai dan menyebabkan lebih banyak terjadi banjir dan penambahan sedimen di daerah pesisir. Di daerah pesisir, hilangnya hutan bakau juga telah menyebabkan meningkatnya abrasi pantai. Daerah dataran rendah di pantai juga

berisiko terkena intrusi air laut akibat gelombang pasang dan tsunami. Banjir sering terjadi di Kabupaten Morowali selama musim hujan, sedangkan kekeringan sering terjadi di musim kemarau. Perkiraan adanya perubahan iklim di masa depan, diperkirakan akan meningkatkan intensitas bencana banjir dan kekeringan.

Terjadinya penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan, serta konversi hutan menjadi perkebunan di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan.

Beberapa Tahun terakhir terdapat bencana Alam yang melanda Kabupaten Morowali banjir bandang, Gempa Bumi dan Longsor yang terjadi pada kurun Tahun 2018 s/d 2022. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Akibat dari fenomena iklim yang ekstrim dan semakin berkurangnya daerah tangkapan air di kawasan hutan Kecamatan Bungku tengah, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Kawasan rawan bencana di Kabupaten Morowali Pada Gambar 2.12.



Gambar 2.12
Peta Rawan Bencana di Kabupaten Morowali

Adapun Kawasan rawan bencana dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut.

- Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Pesisir
- Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi.
- Kawasan rawan bencana gempa bumi berupa kawasan sempadan sesar aktif terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur
- Kawasan rawan bencana gelombang pasang, terdapat di Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan sebagian Kecamatan Bungku Timur.

2.1.4 Aspek Demografis

Istilah kependudukan (*population*) dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), perkawinan, perpindahan penduduk (*migration*) dan mobilitas sosial. Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya. Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi.

Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat banyak merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu,

pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk.

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk akan terus bertambah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian dan migrasi masuk (*in migration*) lebih besar dari pada migrasi keluar (*out migration*). Sensus Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2020 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Morowali sebanyak 161.727 jiwa meningkat sebesar 72,40 persen dari Tahun 2010 atau bertambah sebanyak 74.016,00 jiwa, Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2020 diketahui bahwa penduduk di Kabupaten Morowali sebanyak 161.727, jauh dari jumlah proyeksi BPS selama ini. Pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Morowali mencapai 167.910 jiwa, dan ditahun 2022 juga meningkat menjadi 176.244 jiwa atau sebesar 5,03 persen. Peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan tersebut terjadi disebabkan oleh banyaknya penduduk baru yang terdaftar sebagai penduduk kabupaten Morowali yakni pekerja di wilayah pertambangan. Data tren pertumbuhan penduduk Kabupaten Morowali antara Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menurut kecamatan tersaji pada Tabel 2.14.

Pada tabel 2.14 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Bahodopi, yang pada Tahun 2022 tercatat berjumlah 50.171 jiwa. Lonjakan penduduk di Kecamatan Bahodopi didominasi oleh penduduk pendatang yang bekerja di wilayah pertambangan dan telah berpindah kependudukan (ber KTP) Kabupaten Morowali. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Bungku Tengah sebesar 30.344 jiwa. Kemudian Kecamatan Wita Ponda sebanyak 20.686 jiwa, Kecamatan Bungku Barat sebesar 14.524 jiwa, dan selanjutnya Kecamatan Bumi Raya sebanyak 20.666 jiwa, Kecamatan paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bungku Pesisir sebesar 6.968 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk yang merupakan profil dari tingkat perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Morowali bervariasi antar kecamatan.

Tabel 2.14
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Morowali, Tahun 2019 - 2022

No	Kecamatan	Penduduk				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) 2020- 2022
		2019	2020	2021	2022	
1	Menui Kepulauan	13.609	13.232	13.043	12.948	(1,23)
2	Bungku Selatan	14.831	13.914	13.672	13.528	(1,59)
3	Bahodopi	7.754	37.322	43.121	50.171	18,42
4	Bungku Pesisir	4.745	6.625	6.771	6.968	2,93
5	Bungku Tengah	26.193	29.302	29.715	30.344	2,02
6	Bungku Timur	8.989	12.061	12.284	12.600	2,53
7	Bungku Barat	12.331	14.061	14.185	14.411	1,41
8	Bumi Raya	12.952	14.524	14.515	14.608	0,33
9	Witaponda	19.892	20.686	20.604	20.666	(0,06)
	Morowali	121.296	161.727	167.910	176.244	5,03

Sumber: Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

Rata-rata pertumbuhan penduduk periode Tahun 2022 sekitar 5,03 persen (Tahun 2020-2022), tertinggi di Kecamatan Bahodopi antara Tahun 2020-2022 dan Bungku Pesisir. Lonjakan jumlah penduduk tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya bagi penduduk Pendatang yang bekerja di Kabupaten Morowali. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Morowali sangat tinggi, bukan karena angka kelahiran yang tinggi, melainkan banyak pendatang yang bekerja di Kabupaten Morowali dan berpindah kependudukan.

b. Penduduk Menurut Kecamatan

Indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut *jenis* kelamin adalah rasio jenis kelamin (*sex ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Semakin besar penduduk perempuan, potensi fertilitasnya semakin tinggi. Meskipun tinggi rendahnya fertilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan karakteristik demografi. Dilihat dari proporsi jenis kelamin Penduduk di Kabupaten Morowali diketahui bahwa terbanyak adalah penduduk dengan jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 96.909 atau sebesar 54,99%, sedangkan penduduk jenis kelamin perempuan sebanyak 79.335 jiwa atau sebesar 45,01%, sehingga rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Morowali sebesar 122,15. Rasio jenis kelamin penduduk terbesar di Kecamatan Bahodopi (184,77), kemudian Kecamatan Bungku Tengah (109,43), sebaliknya yang terkecil adalah Kecamatan Menui Kepulauan yakni

sebesar 95,18. Secara lengkap informasi mengenai rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Morowali Tahun 2022

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan		
Menui Kepulauan	6.314	6.634	12.948	7,35
Bungku Selatan	6.755	6.773	13.528	7,68
Bahodopi	32.553	17.618	50.171	28,47
Bungku Pesisir	3.622	3.346	6.968	3,95
Bungku Tengah	15.855	14.489	30.344	17,22
Bungku Timur	6.450	6.150	12.600	7,15
Bungku Barat	7.515	6.896	14.411	8,18
Bumi Raya	7.403	7.205	14.608	8,29
Wita Ponda	10.442	10.224	20.666	11,73
Total	96.909	79.335	176.244	100

Sumber: Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

Seperti pada Tabel 2.15, persentase jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Morowali adalah Kecamatan Bahodopi sebagai ibukota Kabupaten Morowali dengan persentase sebesar 28,47 persen dari total penduduk Kabupaten Morowali secara keseluruhan, diikuti oleh Kecamatan Bungku Tengah sebesar 17,22 persen dan selanjutnya Wita Ponda sebesar 11,73 persen, sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya di Kabupaten Morowali adalah Kecamatan Bungku Pesisir yang hanya sebesar 6.968 jiwa atau proporsinya mencapai 3,95 persen dari total penduduk Kabupaten Morowali. Penduduk Kabupaten Morowali mengalami peningkatan dari 121.296 jiwa ditahun 2019 dan ditahun 2020 sebanyak 161.727 jiwa, kemudian pada tahun 2022 mencapai 176.244 jiwa. Selanjutnya dilihat dari data perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Morowali dengan Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Dengan
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bangkep	117,63	118,4	120,14	121,68	123,58
Banggai	371,32	376,81	362,28	366,22	370,97
Morowali	119,29	121,3	161,73	167,91	176,24
Poso	251,18	256,39	244,88	248,35	252,65

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Donggala	301,59	304,11	300,44	302,97	305,89
Toli-Toli	233,4	235,8	225,15	226,80	228,64
Buol	158,79	162,18	145,25	146,63	148,25
Parigi Moutong	482,79	490,92	440,02	443,17	446,71
Tojo Una-una	152,47	153,99	163,83	166,34	169,48
Sigi	237,01	239,42	257,59	261,68	266,81
Banggai Laut	73,69	75	70,44	70,87	71,35
Morowali Utara	125,62	128,32	120,79	122,24	124,01
Palu	385,61	391,38	373,22	377,03	381,57
Sulawesi Tengah	3.010	3.054	2.986	3.021,88	3.066,14

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka, Tahun 2019-2023 (diolah kembali)

Secara umum, pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terus-menerus mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2018, total penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 3.010 ribu jiwa dan mengalami peningkatan sebesar 3.054 juta jiwa pada tahun 2019 dan di tahun 2020 berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS mendata sebanyak 2.986 juta jiwa penduduk yang tercatat berada di Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian pada tahun 2021 jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 3.021 juta jiwa, sampai dengan tahun 2022 mencapai 3.066 juta jiwa. Pada Tahun 2022, Kabupaten Parigi Moutong merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 446,71 ribu jiwa; kemudian diikuti Kota Palu dengan jumlah penduduk sebanyak 381,57 ribu jiwa dan peringkat ketiga Kabupaten Banggai sebanyak 370,97 ribu jiwa, terbesar keempat Kabupaten Donggala sebanyak 305,89 ribu jiwa.

Jumlah penduduk Kabupaten Morowali menempati urutan kedelapan dari tiga belas kabupaten/kota pada Tahun 2022 sebanyak 176,24 jiwa, serta Kabupaten Banggai Laut menjadi Kabupaten dengan jumlah penduduk terendah yakni sebanyak 71,35 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor yakni jumlah kelahiran dan kematian, emigrasi dan imigrasi.

c. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Morowali adalah 32,21 jiwa per km². Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Morowali tidak merata jumlahnya pada semua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bungku Tengah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Morowali memiliki luas wilayah kecamatan sebesar 725,57 km², dengan jumlah

penduduk sebanyak 30.344 mencapai kepadatan penduduk sebanyak 41,82 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Menui Kepulauan yaitu 57,90 jiwa per km². Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Bungku Pesisir dengan tingkat kepadatan sebesar 8,03 jiwa per km². Data rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Morowali Menurut Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan (Org/Km ²)
	Km ²	%	Jumlah	%	
Menui Kepulauan	223,63	4,07	12.948	7,35	57,90
Bungku Selatan	403,9	7,38	13.528	7,68	33,49
Bahodopi	1.080,98	19,76	50.171	28,47	46,41
Bungku Pesisir	867,29	15,85	6.968	3,95	8,03
Bungku Tengah	725,57	13,26	30.344	17,22	41,82
Bungku Timur	387,23	7,08	12.600	7,15	32,54
Bungku Barat	758,93	13,87	14.411	8,18	18,99
Bumi Raya	504,77	9,23	14.608	8,29	28,94
Wita Ponda	519,7	9,5	20.666	11,73	39,77
Morowali	5.472,00	100	176.244	100	32,21

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

Tabel 2.17 menunjukkan bahwa Kecamatan Menui Kepulauan merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dibanding kecamatan lain, sementara terendah kepadatan penduduknya di Kecamatan Bungku Pesisir. Hal ini disebabkan karena luas wilayah Kecamatan Menui Kepulauan lebih sempit dibanding kecamatan lain yakni hanya 4,07 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali. Data yang disajikan belum menyesuaikan dengan pemekaran wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan.

d. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang selanjutnya disebut dengan "*Sex Ratio*" adalah merupakan Profil untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas, yakni semakin besar porsi penduduk perempuan, maka potensi fertilitas semakin tinggi. Sementara itu, hubungannya dengan ketenagakerjaan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sangat bervariasi antara penduduk laki-laki dengan penduduk

perempuan.

Jika dilihat dengan cermat tabel 2.18, tergambarkan bahwa Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi di Kabupaten Morowali pada Tahun 2022 dengan rasio sebesar 184,77, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terendah adalah Kecamatan Menui Kepulauan dengan rasio sebesar 95,18. Data terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Di Kabupaten Morowali, Tahun 2022

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Rasio
	Laki-laki	Perempuan		
Menui Kepulauan	6.314	6.634	12.948	95,18
Bungku Selatan	6.755	6.773	13.528	99,73
Bahodopi	32.553	17.618	50.171	184,77
Bungku Pesisir	3.622	3.346	6.968	108,25
Bungku Tengah	15.855	14.489	30.344	109,43
Bungku Timur	6.450	6.150	12.600	104,88
Bungku Barat	7.515	6.896	14.411	108,98
Bumi Raya	7.403	7.205	14.608	102,75
Witaponda	10.442	10.224	20.666	102,13
	96.909	79.335	176.244	122,15

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

Secara keseluruhan terlihat *sex rasio* pada tingkat kecamatan di Kabupaten Morowali relatif bervariasi antara 95,18 sampai 184,77. Namun secara kumulatif, pada tingkat Kabupaten Morowali dalam Tahun terakhir komposisi penduduk laki-laki dan perempuan telah relatif berbeda (*sex rasio*=100) dengan angka rasio sebesar 122,15 dan bahkan terdapat kecenderungan *sex rasio* tetap di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Ketimpangan rasio kelamin penduduk di Kabupaten Morowali dikarenakan Potensi wilayah kecamatan yang berbeda, seperti Kecamatan Bahodopi rasionya sangat tinggi karena merupakan wilayah industri yang mempekerjakan banyak penduduk laki-laki.

e. Penduduk Menurut Umur

Perubahan dalam aspek demografi jelas terlihat dari perubahan struktur umur penduduk Kabupaten Morowali. Pada Tahun 2022 penduduk di bawah usia 15 Tahun mencapai 46.299 jiwa atau sebesar 26,27 persen dari total penduduk Kabupaten Morowali yang berjumlah 176.244 jiwa. Dengan demikian, Kabupaten Morowali mempunyai penduduk tergolong dalam penduduk *Intermediate*, yakni proporsi

penduduk usia di bawah 15 Tahun sekitar 30 persen, seperti yang terlihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali
Menurut Kelompok Umur Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	9.816	9.368	19.184
2	5-9	7.740	7.439	15.179
3	10-14	6.173	5.763	11.936
4	15-19	6.591	5.481	12.072
5	20-24	13.692	7.823	21.515
6	25-29	12.760	8.793	21.553
7	30-34	9.825	7.554	17.379
8	35-39	7.085	6.038	13.123
9	40-44	5.663	4.868	10.531
10	45-49	4.641	4.166	8.807
11	50-54	3.889	3.515	7.404
12	55-59	3.016	2.856	5.872
13	60-64	2.386	2.280	4.666
14	65-69	1.733	1.480	3.213
15	70-74	1003	1015	2.018
16	75+	896	896	1.792
	Morowali	96.909	79.335	176.244

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

Merujuk data pada Tabel 2.19, komposisi atau struktur umur penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2022 sebesar 67,42 persen berada pada kelompok umur 0-34 Tahun. Hal ini menunjukkan penduduk dominan berada pada kelompok penduduk usia muda. Sementara untuk Rasio Ketergantungan Anak (*Child Dependency Ratio*) Tahun 2022 tercatat sebesar 26,54 yang berarti bahwa terdapat sekitar 30 orang anak menjadi beban tanggungan untuk setiap 100 orang penduduk yang berada dalam usia produktif. Di sisi lain, penduduk usia lanjut juga tidak dapat melakukan kegiatan secara produktif, sehingga akan menjadi beban tanggungan bagi penduduk lainnya yang masih produktif. Rasio Ketergantungan Lanjut Usia (*Old Dependency Ratio*) Tahun 2022 di Kabupaten Morowali sebesar 17,50 persen. Bila kedua kelompok usia ketergantungan tersebut digabungkan, maka akan diperoleh angka Rasio Ketergantungan Umum (*Dependency Ratio*) sebesar 43,53 persen. Ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung kurang lebih 43 orang penduduk yang belum/tidak produktif.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi, yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen indikator makro tersebut di antaranya adalah; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB perkapita, dan tingkat inflasi.

a. Pertumbuhan PDRB

Kemajuan perekonomian Kabupaten Morowali dapat dilihat dari gambaran perekonomian makro daerah ini, di mana secara makro laju pertumbuhan pembangunan Kabupaten Morowali dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta peningkatan PDRB Perkapita. PDRB merupakan suatu dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi penduduk dalam suatu wilayah/region.

PDRB tingkat regional (provinsi dan kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.

Sedangkan dari PDRB sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 menjadi 17 lapangan usaha. Sementara laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) diperoleh dari perhitungan PDRB ADHK. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada Tahun ke-n terhadap nilai pada Tahun ke n-1 (Tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada Tahun ke n-1, dikali dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan nilai agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Morowali disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (persen)
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan,	1,28	1,84	(2,76)	3,21	1,81

Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	dan Perikanan					
B	Pertambangan dan Penggalian	51,25	19,77	34,40	23,11	17,22
C	Industri Pengolahan	277,16	24,00	35,72	24,53	31,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,25	1,98	4,47	2,69	11,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,17	0,17	0,11	9,06	2,33
F	Konstruksi	6,27	13,31	(14,62)	70,45	34,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,81	2,90	(4,98)	9,00	62,22
H	Transportasi dan Pergudangan	3,42	6,47	(28,38)	201,86	151,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(5,26)	4,01	(10,48)	14,19	56,23
J	Informasi dan Komunikasi	12,87	6,80	7,09	9,83	23,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,29	0,17	13,23	7,89	5,92
L	Real Estat	2,12	0,90	0,15	3,77	28,73
M,N	Jasa Perusahaan	(10,02)	4,98	(1,17)	1,27	14,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,83	5,05	1,06	4,59	(3,00)
P	Jasa Pendidikan	1,21	3,00	(0,18)	0,74	0,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,16	8,35	6,91	4,05	2,22
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,93	2,59	(0,44)	14,40	10,05
Produk Domestik Regional Bruto		112,20	20,20	28,93	25,15	28,21

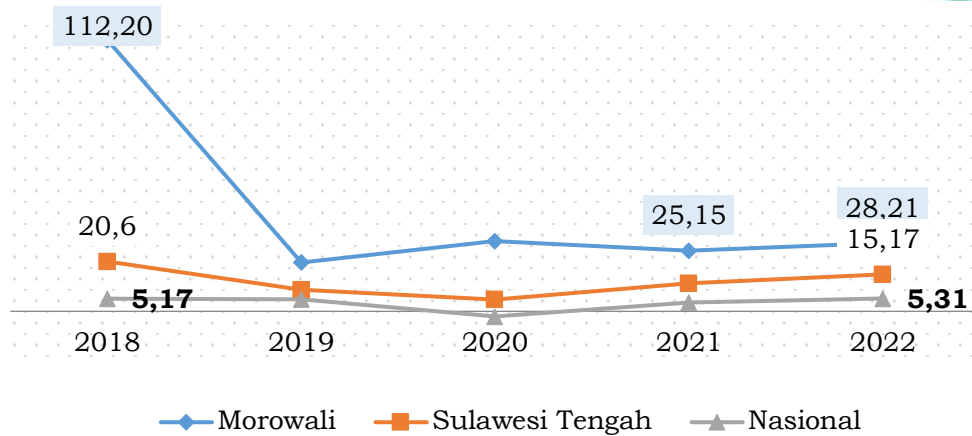
Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

Pada Tabel 2.20 di atas ditunjukkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali berdasarkan ADHK 2010 kurun waktu 2018-2022. Perekonomian Kabupaten Morowali yang diukur melalui indikator pertumbuhan PDRB memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata per Tahun sebesar 42,94 persen yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah sebesar 11,72 persen. Selama kurun waktu tersebut, pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali cenderung berfluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 112,20 persen.

Hingga Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi sebesar 20,20 persen. Selanjutnya di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tetap tumbuh positif dan sangat tinggi yakni sebesar 28,93%. Hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Morowali tidak terdampak pandemi Covid-19, yang mana berdampak di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Morowali mencapai 25,15 (lebih rendah dari tahun sebelumnya). Selanjutnya data pada tahun 2022 ekonomi Morowali masih dua digit diangka 28,21 meningkat dari tahun sebelumnya.

Terdapat 3 (tiga) sektor yang memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 62,22 persen, Sektor Konstruksi sebesar 151,77 persen dan Sektor Jasa Keuangan sebesar 34,62 persen. Sementara itu, sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan kecil dan negatif yakni sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (-3,00%), sektor lainnya yakni Jasa Pendidikan (0,48%), Konstruksi (-14,62) persen, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,81 persen. Sektor pertanian perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali, mengingat pertumbuhan yang semakin menurun setiap tahunnya. Diperlukan peningkatan produktivitas di Sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor Pertanian.

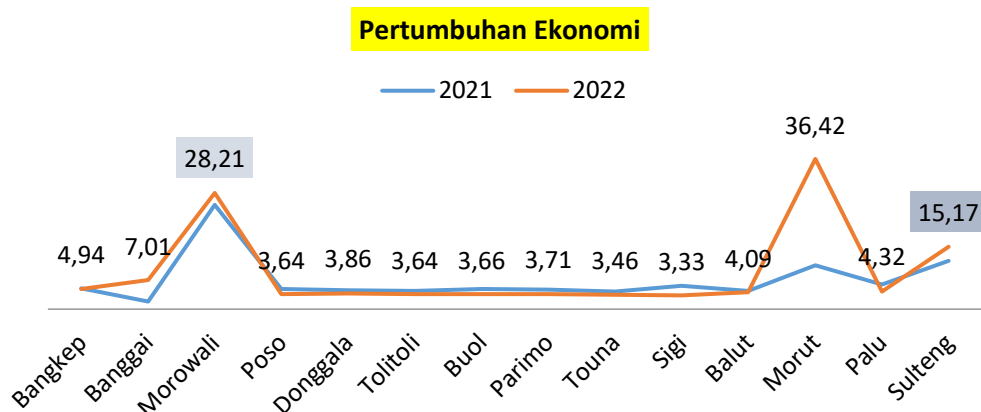
Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, dalam periode Tahun 2018-2022 dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali selalu berada di atas rata-rata. Dan hingga Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali sebesar 20,20 persen, tetap lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 7,15 persen dan rata-rata secara nasional sebesar 5,02 persen. Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat parah ada kondisi Perekonomian global termasuk Indonesia, pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh negatif (-2,10) persen. Namun perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah, tetap tumbuh positif sebesar 4,86 persen. Sedangkan Kabupaten Morowali tumbuh sangat tinggi yakni sebesar 28,93%. Salah satu yang menyebabkan ekonomi Sulawesi Tengah tetap tumbuh positif yakni berasal dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali yang tumbuh sangat besar dari Sektor Pertambangan dan Penggalian. Sampai dengan tahun 2022 ekonomi Morowali Tumbuh sebesar 28,21%, tumbuh jauh di atas rata-rata nasional (5,31%) dan Provinsi Sulawesi Tengah (15,17%) secara lengkap terdapat pada Gambar 2.13 sebagai berikut.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.13
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022**

Selanjutnya, dilihat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Maka, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua, setelah Kabupaten Morowali Utara dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 36,42 persen dan di urutan ketiga Kabupaten Banggai sebesar 7,01 persen. Sedangkan Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Sigi sebesar 3,33 persen, Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 3,46 persen dan Kabupaten Poso, Tolitoli sebesar 3,64 persen. Selain Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, 11 kabupaten/kota rata-rata pertumbuhannya di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2021 dan tahun 2022, data terkait terdapat pada Gambar 2.14 berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.14
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Sulawesi Tengah Tahun 2021-2022**

b. Nilai dan Kontribusi PDRB Kabupaten Morowali

Data PDRB dapat menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mengelola sumber daya daerah yang dimiliki. Kondisi perekonomian Kabupaten Morowali saat ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya. Kondisi ini ditunjukkan dengan meningkatnya PDRB ADHB maupun PDRB ADHK, serta terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang positif.

Nilai PDRB ADHK 2010 kabupaten Morowali pada Tahun 2018 sebesar Rp28.358,40 miliar, meningkat hingga Tahun 2020 menjadi sebesar Rp43.947.504,40 juta dan ditahun 2022 nilai PDRB ADHK 2010 sebesar Rp70.515,62 miliar. Dalam periode Tahun 2018-2022 pertambahan nilai PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali sebesar Rp 42.157,22 miliar. Data perkembangan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali terdapat pada Tabel 2.21 berikut ini.

Tabel 2.21
Nilai Sektor PDRB ADHK 2010 Tahun 2018-2022
Kabupaten Morowali (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun (%) - KONSTAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.411,28	1.437,27	1.397,64	1.442,50	1.468,63
B	Pertambangan dan Penggalian	6.408,96	7.676,33	10.317,36	12.701,49	14.888,97
C	Industri Pengolahan	17.168,97	21.289,18	28.893,19	35.981,45	47.464,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,61	1,64	1,71	1,76	1,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,93	3,94	3,94	4,30	4,40
F	Konstruksi	1.980,84	2.244,40	1.916,34	3.266,30	4.396,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	603,13	620,63	589,75	642,84	1.042,81
H	Transportasi dan Pergudangan	53,28	56,73	40,63	122,65	308,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,97	14,53	13,00	14,85	23,20
J	Informasi dan Komunikasi	170,84	182,45	195,38	214,59	265,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	106,77	106,95	121,10	130,65	138,39
L	Real Estat	106,05	107,00	107,16	111,20	143,15
M,N	Jasa Perusahaan	2,26	2,37	2,34	2,37	2,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	145,02	152,35	153,98	161,05	156,22

Lapangan Usaha		Tahun (%) - KONSTAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
P	Jasa Pendidikan	82,84	85,32	85,17	85,80	86,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	58,81	63,72	68,12	70,88	72,45
R,S,T,U	Jasa lainnya	39,85	40,88	40,70	46,56	51,24
Produk Domestik Regional Bruto		28.358,40	34.085,70	43.947,50	55.001,24	70.515,62

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.21 di atas, dapat diketahui bahwa nilai sektor lapangan usaha terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan dengan nilai sebesar Rp47.464,37 miliar, setelah itu Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar Rp14.888,97 miliar, serta Sektor Konstruksi sebesar Rp4.396,97 miliar. Ketiga sektor tersebut mencapai total Rp 66.750,31 miliar, atau sebesar 94,66 persen. Sedangkan sektor dengan nilai terendah adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp1,96 miliar dan Sektor Jasa Perusahaan Rp2,71 miliar, serta Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp4,40 miliar. Selanjutnya jika dilihat dari aspek kontribusi setiap sektor dapat ditampilkan dan dijelaskan pada Tabel 2.22 sebagai berikut ini.

Tabel 2.22
Kontribusi Sektor PDRB ADHK 2010 Tahun 2018-2022
Kabupaten Morowali (%)

Lapangan Usaha		Tahun (%) -				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,98	4,22	3,18	2,62	2,08
B	Pertambangan dan Penggalan	22,6	22,52	23,48	23,09	21,11
C	Industri Pengolahan	60,54	62,46	65,74	65,42	67,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0	0	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	6,99	6,58	4,36	5,94	6,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,13	1,82	1,34	1,17	1,48
H	Transportasi dan Pergudangan	0,19	0,17	0,09	0,22	0,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03
J	Informasi dan Komunikasi	0,6	0,54	0,44	0,39	0,38

Lapangan Usaha		Tahun (%) -				
		2018	2019	2020	2021	2022
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,38	0,31	0,28	0,24	0,20
L	Real Estat	0,37	0,31	0,24	0,20	0,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,51	0,45	0,35	0,29	0,22
P	Jasa Pendidikan	0,29	0,25	0,19	0,16	0,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,21	0,19	0,16	0,13	0,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,14	0,12	0,09	0,08	0,07
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

Merujuk pada Tabel 2.22 di atas diketahui sektor yang berpengaruh besar dalam memajukan perekonomian Kabupaten Morowali. Terdapat 2 (dua) sektor yang berpengaruh besar dan berkontribusi tertinggi yakni Sektor Industri pengolahan dan sektor Pertambangan dan penggalan dengan kontribusi yakni masing-masing sebesar 67,31 persen dan 21,11 persen. Kedua sektor tersebut dalam periode Tahun 2018-2022 memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian di Kabupaten Morowali. Pertambangan nikel menjadi andalan dari perekonomian Kabupaten Morowali. Terdapat 10 perusahaan pertambangan nikel besar di daerah ini yang menyerap tenaga kerja lokal hingga mencapai sekitaran 45 ribu jiwa. Tumbuhnya sektor pertambangan yang besar di Kabupaten Morowali menjadi daya tarik pencari kerja di wilayah Sulawesi bahkan di luar Sulawesi. Sektor lainnya dengan kontribusi besar dalam menopang perekonomian Morowali yakni Sektor Konstruksi sebesar 6,24 persen.

Sebaliknya, sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi terendah adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 0,001 persen, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Jasa Perusahaan 0,01 persen, serta Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,03 persen. Selanjutnya, Sektor Pertanian dengan kontribusi yang semakin menurun yakni sebesar 2,08 persen, kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan setiap Tahun. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk memastikan sektor ini terus tumbuh positif, karena sebagian besar penduduk Kabupaten Morowali masih bekerja di sektor ini.

Sementara itu, di sisi PDRB ADHB juga mengalami peningkatan dalam kurun Tahun 2018-2022. Nilai PDRB ADHB Tahun 2018 sebesar

Rp37.356,48 miliar, dan meningkat terus hingga Tahun 2022 menjadi sebesar Rp146.599,32 miliar. Data PDRB ADHB terdapat pada Tabel 2.23 berikut ini.

Tabel 2.23
Nilai Sektor PDRB ADHB Tahun 2018-2022
Kabupaten Morowali (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun (Rp) - BERLAKU				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.049,00	2.063,37	2.023,94	2.147,50	2.346,57
B	Pertambangan dan Penggalian	6.928,11	8.242,67	11.364,64	18.404,88	25.349,78
C	Industri Pengolahan	23.463,41	29.346,70	43.380,51	70.356,85	107.299,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,68	1,73	1,70	1,90	2,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,66	5,24	5,46	5,82	6,17
F	Konstruksi	2.976,24	3.480,35	3.096,96	5.543,21	7.880,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	893,43	960,77	949,45	1.065,44	1.832,17
H	Transportasi dan Pergudangan	70,97	81,34	59,90	183,05	496,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21,03	21,35	19,04	22,75	39,19
J	Informasi dan Komunikasi	202,09	221,71	234,25	260,05	322,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	148,35	156,37	168,16	191,63	222,62
L	Real Estat	138,88	145,54	148,42	151,95	201,46
M,N	Jasa Perusahaan	3,36	3,77	3,74	3,82	4,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	213,40	254,34	261,51	278,72	277,91
P	Jasa Pendidikan	111,57	119,10	120,36	121,85	127,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73,35	80,83	87,84	97,66	100,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	55,95	59,56	59,73	79,73	89,43
Produk Domestik Regional Bruto		37.356,48	45.244,73	61.985,63	98.916,81	146.599,32

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Melihat data Tabel 2.23 di atas menjelaskan PDRB ADHB Kabupaten Morowali, dapat diketahui nilai sektor lapangan usaha terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp107.299,77 miliar, Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp25.349,78 miliar, serta Sektor Konstruksi sebesar Rp7.880,45 miliar. Ketiga sektor tersebut jika ditotal mencapai sebesar Rp140.530,00 miliar atau sebesar 95,86 persen. Sedangkan sektor dengan nilai terendah adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp2,13 miliar dan Sektor Jasa Perusahaan Rp4,40 miliar serta Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai sebesar Rp6,17 miliar. Sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp2.346,57 miliar.

Selanjutnya melihat data pada Tabel 2.24 di bawah, diketahui sektor yang berpengaruh besar dalam memajukan perkenomian Kabupaten Morowali. Yakni 2 (dua) sektor yang dominan yakni Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi masing-masing sebesar 73,19 persen dan 17,29 persen, kemudian Sektor Konstruksi sebesar 5,38 persen. Serta Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,60 persen, menurun sangat signifikan. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian dan tenaga kerja pada sektor tersebut.

Tabel 2.24

**Kontribusi Sektor PDRB ADHB Tahun 2018-2022
Kabupaten Morowali (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha		Tahun (%) -				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,48	4,56	3,27	2,17	1,60
B	Pertambangan dan Penggalian	18,55	18,22	18,33	18,61	17,29
C	Industri Pengolahan	62,81	64,86	69,98	71,13	73,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0	0	0	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
F	Konstruksi	7,97	7,69	5	5,60	5,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,39	2,12	1,53	1,08	1,25
H	Transportasi dan Pergudangan	0,19	0,18	0,1	0,19	0,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,06	0,05	0,03	0,02	0,03
J	Informasi dan Komunikasi	0,54	0,49	0,38	0,26	0,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,4	0,35	0,27	0,19	0,15

Lapangan Usaha		Tahun (%) -				
		2018	2019	2020	2021	2022
L	Real Estat	0,37	0,32	0,24	0,15	0,14
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,57	0,56	0,42	0,28	0,19
P	Jasa Pendidikan	0,3	0,26	0,19	0,12	0,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,2	0,18	0,14	0,10	0,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,15	0,13	0,1	0,08	0,06
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Selanjutnya dari Tabel 2.24 di atas sektor yang kontribusi terendah adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 0,001 persen, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Jasa Perusahaan 0,001 persen, serta Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,03 persen. Sektor Pertanian masih berkontribusi cukup rendah yakni sebesar 1,60 persen, namun kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan. Data kontribusi sektor dalam PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 terdapat pada Tabel 2.25 berikut ini.

Tabel 2.25
Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB ADHB
dan PDRB ADHK 2010 Tahun 2018-2022 Kabupaten Morowali

Lapangan Usaha		2018		2019		2020		2021		2022		Pertumbuhan (%)	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,48	4,98	4,56	4,22	3,27	3,18	2,17	2,62	1,60	2,08	3,42	3,42
B	Pertambangan dan Penggalan	18,55	22,60	18,22	22,52	18,33	23,48	18,61	23,09	17,29	21,11	18,20	22,56
C	Industri Pengolahan	62,81	60,54	64,86	62,46	69,98	65,74	71,13	65,42	73,19	67,31	68,40	64,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	7,97	6,99	7,69	6,58	5,00	4,36	5,60	5,94	5,38	6,24	6,33	6,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,39	2,13	2,12	1,82	1,53	1,34	1,08	1,17	1,25	1,48	1,67	1,59
H	Transportasi dan Pergudangan	0,19	0,19	0,18	0,17	0,10	0,09	0,19	0,22	0,34	0,44	0,20	0,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04



Lapangan Usaha		2018		2019		2020		2021		2022		Pertumbuhan (%)	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
J	Informasi dan Komunikasi	0,54	0,60	0,49	0,54	0,38	0,44	0,26	0,39	0,22	0,38	0,38	0,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,40	0,38	0,35	0,31	0,27	0,28	0,19	0,24	0,15	0,20	0,27	0,28
L	Real Estat	0,37	0,37	0,32	0,31	0,24	0,24	0,15	0,20	0,14	0,20	0,24	0,27
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,57	0,51	0,56	0,45	0,42	0,35	0,28	0,29	0,19	0,22	0,41	0,36
P	Jasa Pendidikan	0,30	0,29	0,26	0,25	0,19	0,19	0,12	0,16	0,09	0,12	0,19	0,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,20	0,21	0,18	0,19	0,14	0,16	0,10	0,13	0,07	0,10	0,14	0,16
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,15	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,06	0,07	0,10	0,10
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Selanjutnya pada Tabel 2.26 di bawah ditunjukkan pertumbuhan kontribusi sektoral pada PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali selama periode 2022 sebagai berikut.

Tabel 2.26
Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Tahun 2022

Lapangan Usaha		Pertumbuhan (%)	
		Hb	Hk
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,27	1,81
B	Pertambangan dan Penggalian	37,73	17,22
C	Industri Pengolahan	52,51	31,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,11	11,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,01	2,33
F	Konstruksi	42,16	34,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	71,96	62,22
H	Transportasi dan Pergudangan	171,35	151,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	72,26	56,23
J	Informasi dan Komunikasi	24,20	23,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	16,17	5,92
L	Real Estat	32,58	28,73
M,N	Jasa Perusahaan	15,18	14,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,29	-3,00
P	Jasa Pendidikan	4,57	0,48

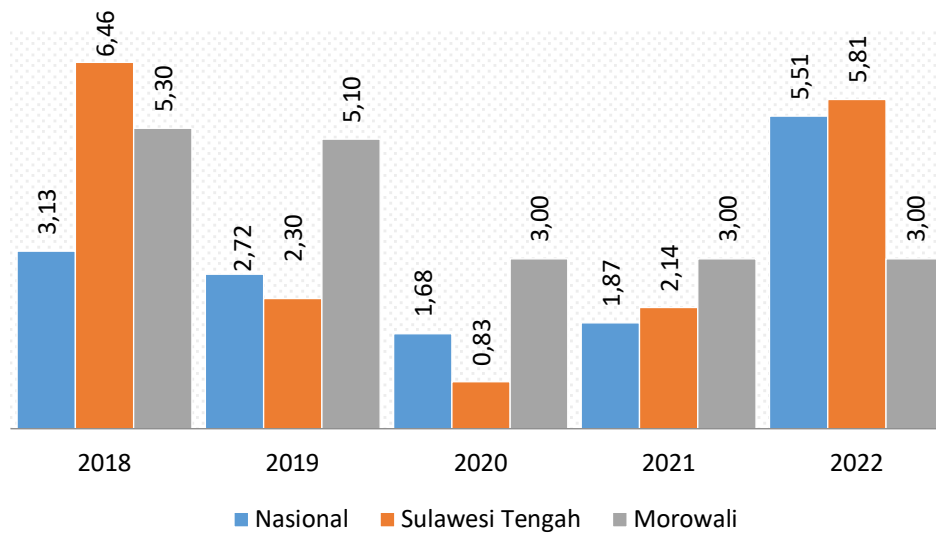
Lapangan Usaha		Pertumbuhan (%)	
		Hb	Hk
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,59	2,22
R,S,T,U	Jasa lainnya	12,17	10,05

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Pertumbuhan kontribusi masing-masing sektor selama periode 2018-2022 di Kabupaten Morowali menunjukkan sektor-sektor yang memiliki peranan semakin meningkat, atau sebaliknya. Sektor-sektor yang memperlihatkan pertumbuhan positif, maka sektor tersebut memiliki peranan semakin meningkat. Di sisi lain, sektor-sektor dengan pertumbuhan negatif, maka sektor-sektor tersebut memiliki peranan semakin menurun. Merujuk pada data Tabel 2.26 di atas, diketahui bahwa seluruh sektor tersebut tumbuh positif selama 5 (lima) Tahun terakhir. Sektor dengan rata-rata pertumbuhan terbesar yakni Sektor Industri Pengolahan 64,30 persen, Sektor Pertambangan dan Penggalian 22,56 persen dan Sektor Konstruksi 6,02, serta Sektor Pertanian sebesar 3,42 persen. Sedangkan sektor-sektor lainnya dengan rata-rata pertumbuhan rendah yakni Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan Sektor Jasa Perusahaan.

c. Laju Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi berupa kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Inflasi yang relatif tinggi akan dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui menurunnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi di suatu daerah perlu dikendalikan, sehingga diharapkan tidak berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.15
Perkembangan Inflasi Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Pada Gambar 2.15 di atas ditunjukkan perkembangan tingkat inflasi selama kurun waktu 2018-2022 di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional. Inflasi Kabupaten Morowali Tahun 2018 sebesar 5,30 persen lebih tinggi dari rata-rata inflasi secara Nasional yakni sebesar 3,13 persen dan lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 6,46 persen. Dan hingga Tahun 2022, besaran inflasi Kabupaten Morowali diangka sebesar 3,00 persen, dan jauh di bawah rata-rata inflasi Provinsi Sulawesi Tengah, dan secara Nasional masing-masing mencapai sebesar 5,51 persen dan 5,81 persen.

d. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara (daerah). Pendapatan perkapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan suatu negara (PDRB bagi daerah) dengan jumlah penduduk negara (daerah). Pendapatan perkapita direfleksikan melalui perhitungan PDB Perkapita atau PDRB perkapita. Jadi untuk melakukan perhitungan PDRB perkapita, dilakukan dengan cara membagi nilai total PDRB terhadap jumlah penduduk yang ada pada periode perhitungan PDRB perkapita tersebut.

Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai salah satu referensi dan indikator ekonomi sebuah wilayah (daerah), yakni besarnya pendapatan perkapita tersebut dapat merefleksikan kemakmuran atau kesejahteraan sebuah wilayah (daerah) dalam suatu waktu tertentu.

Pada level negara, manfaat pendapatan perkapita seringkali digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: (1) mengetahui tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (penduduk), (2) membandingkan perkembangan tingkat kesejahteraan di berbagai negara, (3) dapat mengelompokkan suatu negara berdasarkan tingkat kesejahteraan. Data PDRB Perkapita Kabupaten Morowali terdapat pada Tabel 2.27 sebagai berikut.

Tabel 2.27

PDRB Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Nilai PDRB (Milliar Rupiah)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
- ADHB	37.356,48	45.244,72	61.985,63	98.917	146.599
- ADHK 2010	28.358,40	34.085,70	43.947,50	55.001	70.516
PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	313,16	373,00	383,27	589,11	831,80
- ADHK 2010	237,72	281,01	356,20	327,56	400,10
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	10,55	12,62	26,76	-8,04	22,14
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	119,29	121,3	161,73	167,91	176,24

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

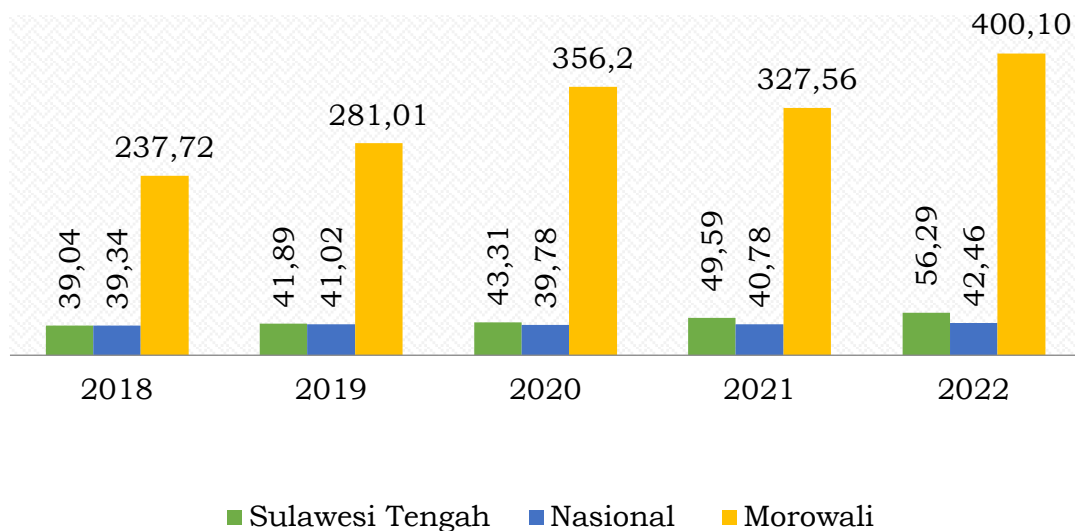
Pada Tabel 2.27 disajikan perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Morowali selama kurun waktu 2018-2022. Selama periode tersebut pendapatan perkapita Kabupaten Morowali diukur melalui PDRB per kapita memperlihatkan kecenderungan terus meningkat. Pada Tahun 2018 pendapatan per kapita sebesar Rp237,72 juta, mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp281,01 juta Tahun 2018, Rp281,01 juta Tahun 2019, dan ditahun 2020 PDRB Perkapita Kabupaten Morowali sebesar Rp356,20 Juta. Selanjutnya pada tahun 2021 PDRB Perkapita Kabupaten Morowali sebesar Rp327,56 juta, dan mencapai Rp400,10 juta ditahun 2022. Peningkatan pendapatan perkapita Kabupaten Morowali tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dalam kurun waktu tersebut.

Namun, perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Morowali yang tinggi tersebut tidak serta merta disimpulkan bahwa tingkat daya beli per kapita Kabupaten Morowali 7,11 kali lipat daya beli per kapita rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Secara umum diketahui, pertumbuhan PDRB Morowali didominasi oleh pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian, serta Sektor Industri Pengolahan yang *multiplier effect*-nya kepada perekonomian lokal masih sangat kecil. Latar belakangnya adalah karena pada kedua sektor tersebut keterlibatan faktor produksi lokal (tenaga kerja, *capital*, dan *skill*) masih sangat kecil. Kedua sektor tersebut, terutama pada industri feronikel, merupakan *enclave* dalam

ekonomi daerah Kabupaten Morowali.

Selanjutnya, PDRB Perkapita Kabupaten Morowali sangat jauh di atas capaian rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Dimana pada Tahun 2019 PDRB Perkapita Kabupaten Morowali sebesar Rp281,01 Juta, sedangkan Nasional sebesar Rp59,10 juta, dan Nasional sebesar Rp36,35 juta. Selanjutnya ditahun Pandemi Covid-19 PDRB perkapita Kabupaten Morowali sangat jauh di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah yakni sebesar Rp356,20 Juta, sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah hanya sebesar Rp43,32 juta, PDRB Perkapita Nasional tumbuh minus di tahun 2020 yakni sebesar Rp56,39 Juta. Pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Morowali sebesar Rp327,56 juta, sangat jauh dari Nasional dan Provinsi. Hingga tahun 2022 mencapai Rp400,10 juta, sedangkan Nasional sebesar Rp42,46 juta dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp56,29 juta.

Data Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional diuraikan pada Gambar 2.16 sebagai berikut ini.

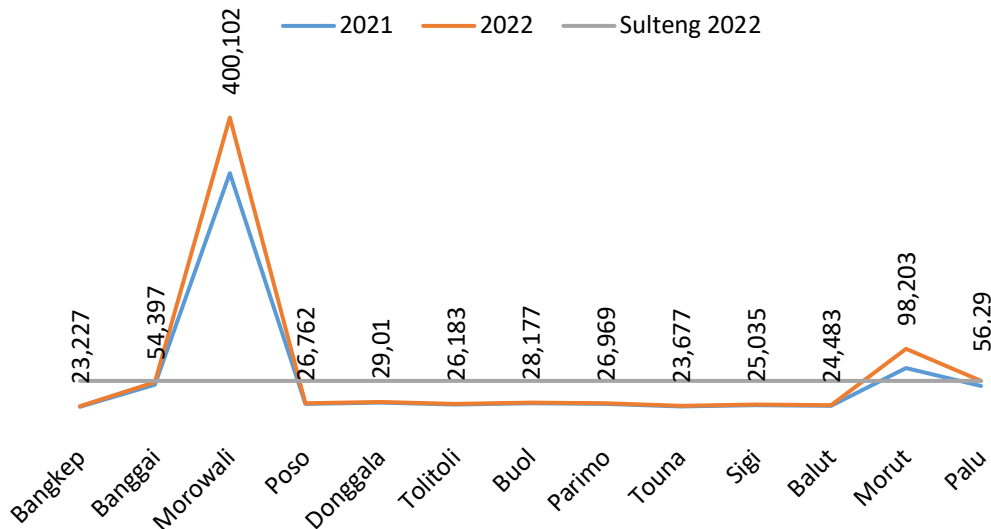


Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.16
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Merujuk pada data Gambar 2.16 di atas, terlihat jelas bahwa pendapatan per kapita Kabupaten Morowali bukan saja melampaui pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan berlipat ganda sebanyak 7,11 kali lipat, atau sebanyak 9,42 kali lipat dari PDB perkapita Indonesia Tahun 2022. Dengan pendapatan perkapita yang terus mening-kat tersebut, diharapkan berdampak positif pula terhadap

bidang-bidang yang lain (misalnya bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) sehingga tingkat kesejahteraan hidup masyarakat Morowali akan semakin meningkat. Perbandingan PDRB Perkapita antara Kabupaten Morowali dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan Kabupaten Morowali adalah tertinggi dari Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang disajikan secara lengkap pada Gambar 2.17 berikut ini.



Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

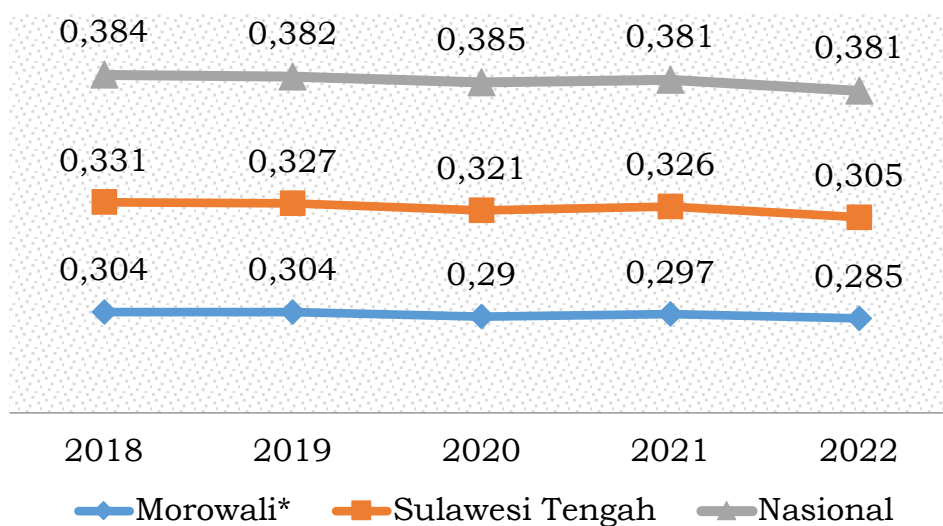
Gambar 2.17
PDRB PerKapita Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2022

Berdasarkan data pada Gambar 2.17 di atas, sampai dengan tahun 2018 capaian PDRB tertinggi adalah Kabupaten Morowali dengan PDRB Per Kapita sebesar Rp400,10 juta, dan Kabupaten Morowali Utara berada pada posisi kedua sebesar Rp98,20juta, serta tertinggi ketiga Kota Palu sebesar Rp56,29 juta. Sedangkan untuk Kabupaten dengan PDRB Perkapita terendah adalah Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan serta Kabupaten Sigi.

e. Indeks Gini

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menghitung kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat adalah koefisien Gini atau indeks Gini. Indeks Gini mempunyai nilai dari nol (merata mutlak) hingga 1 (tidak merata mutlak). Indeks Gini dengan nilai nol menunjukkan semua penduduk di wilayah tersebut memiliki pendapatan yang sama. Sementara itu, jika indeks Gini memiliki angka 1. Hal ini menunjukkan semua pendapatan di wilayah tersebut hanya

dinikmati oleh 1 (satu) orang penduduk. Dimana, indeks Gini dengan angka nol atau satu adalah hamper tidak pernah terjadi dalam suatu perekonomian hingga saat ini. Sehubungan dengan besarnya angka indeks Gini yang digunakan untuk menentukan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar masyarakat, maka digunakan kriteria sebagai berikut: jika indeks Gini berada pada: 1). 0 sampai dengan 0,3, maka memiliki tingkat kesenjangan rendah, 2). di atas 0,3 sampai dengan 0,4, maka memiliki tingkat kesenjangan moderat, dan 3). lebih besar dari 0,4 memiliki tingkat kesenjangan tinggi. Data perkembangan indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional terdapat pada Gambar 2.18 sebagai berikut.



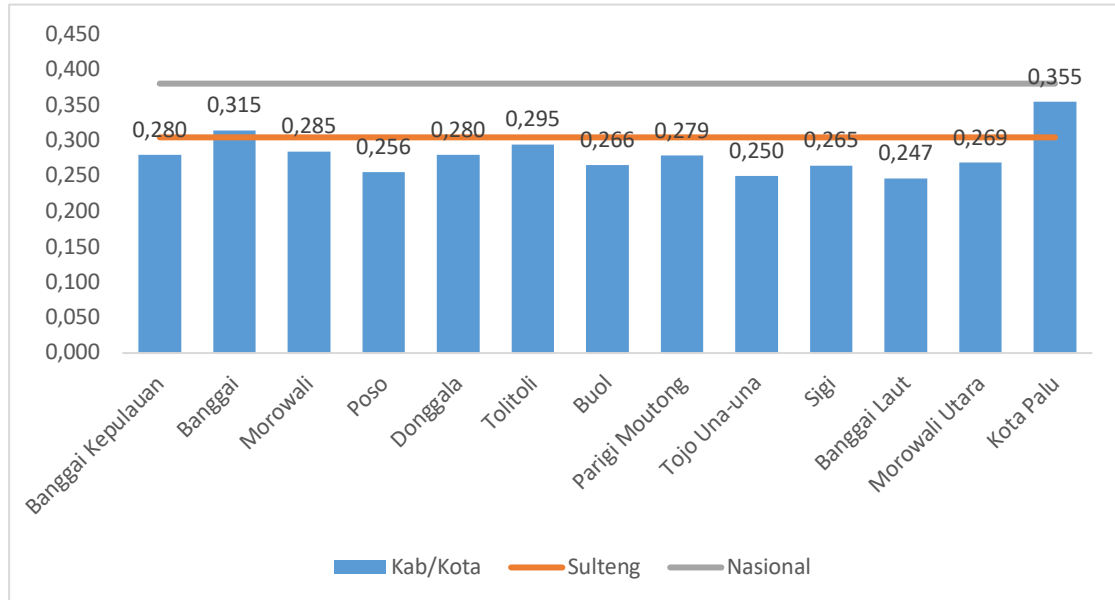
Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.18
Indeks Gini Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Pada Gambar 2.18 di atas disajikan besarnya indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi tengah dan Nasional Tahun 2018-2022. Selama kurun waktu tersebut indeks Gini Kabupaten Morowali memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada Tahun 2018 indeks Gini Kabupaten Morowali sebesar 0,304 mengalami penurunan Tahun 2020 menjadi sebesar 0,290. Pada tahun 2022 kondisi indeks Gini Kabupaten Morowali lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,305 dan rata-rata Nasional sebesar 0,381. Dengan besarnya angka-angka indeks Gini Kabupaten Morowali tersebut masuk dalam range 0-0,30 yakni 0,285, maka distribusi pendapatan dalam kategori ketimpangan rendah.

Selanjutnya jika dilihat menurut Kabupaten/kota di Provinsi

Sulawesi Tengah, indeks Gini Kabupaten Morowali tertinggi keempat. Sedangkan, terendah pertama adalah Kabupaten Banggai Laut dan terendah kedua Kabupaten Tojo Una-Una. Sebaliknya, daerah dengan indeks Gini tertinggi adalah Kabupaten Banggai dan Kota Palu. Data mengenai perbandingan indeks Gini kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.19 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.19
Gini Rasio Kabupaten Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

f. Penduduk Miskin

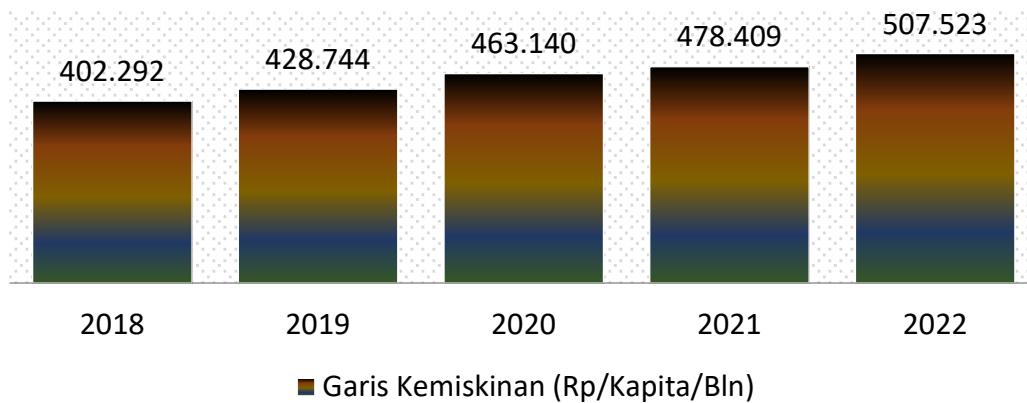
Tingkat kemiskinan adalah rasio jumlah orang miskin terhadap jumlah penduduk suatu wilayah (negara atau daerah) pada Tahun tertentu. Seseorang dikatakan miskin bila pendapatan berada di bawah ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin adalah setara dengan harga 2.100 kalori bahan makanan ditambah 10 (sepuluh) persen dari padanya untuk keperluan lainnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin tergantung kepada besarnya pendapatan dan pendapatan ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin sangat dipengaruhi oleh tingkat harga bahan makanan utama masyarakat dan tingkat harga barang konsumsi lain. Gambaran kondisi kemiskinan Kabupaten Morowali dijelaskan pada beberapa aspek yaitu: garis kemiskinan, penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2), yang dapat dijelaskan pada beberapa bagian berikut ini.

1) Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

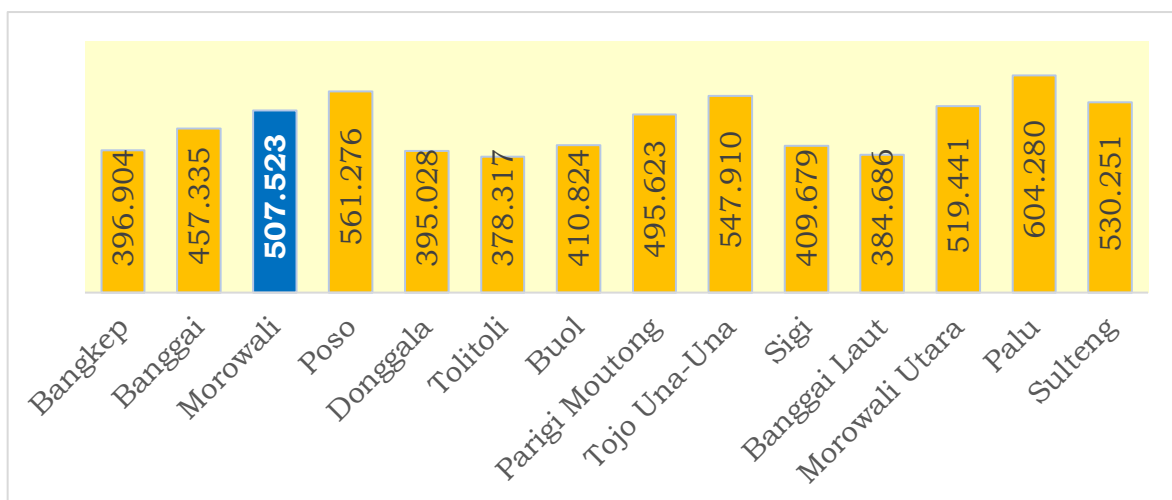
Garis kemiskinan di Kabupaten Morowali periode 2018-2022 mengalamikan peningkatan setiap Tahunnya. Rata-rata peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Morowali dalam rentan waktu tersebut sebesar 6,22 persen. Pada Tahun 2018, garis kemiskinan Kabupaten Morowali sebesar Rp402.292, meningkat tahun 2019 menjadi sebesar Rp428.744, selanjutnya pada tahun 2020 garis kemiskinan Kabupaten Morowali meningkat menjadi Rp463.140. Setiap tahunnya Indeks Gini mengalami peningkatan dimana hingga tahun 2022 sudah mencapai angka Rp507.523. Kondisi garis kemiskinan Kabupaten Morowali Tahun 2022 masih di bawah atau lebih baik dari rata-rata garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp557.183. Selain itu, juga di bawah rata-rata Nasional sebesar Rp535.547. Data mengenai garis kemiskinan Kabupaten Morowali kurun Tahun 2018-2022 secara lengkap terdapat pada Gambar 2.20 berikut ini.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.20
Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali (Rp)
Tahun 2018-2023

Kondisi garis kemiskinan Kabupaten Morowali kemudian dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi tengah. Dimana rata-rata garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp557.183, beberapa Kabupaten berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kota Palu dan Kabupaten Poso. Sedangkan daerah dengan garis kemiskinan yang terendah adalah Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Donggala. Sementara itu, Kabupaten Morowali berada pada urutan kelima garis kemiskinan tertinggi, seperti yang disajikan pada Gambar 2.21 berikut ini.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.21
Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2022

2) Penduduk Miskin

Penduduk miskin (*poverty people*) merupakan masalah utama yang terjadi di setiap daerah. Sementara itu, pembangunan dimaksudkan sebagai suatu proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata, sehingga mereka keluar dari kondisi kemiskinan. Wujud nyata dari kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup (*basic needs*), yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat (*consumption society*). Oleh karena itu, berbagai upaya dan usaha telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk, melalui peningkatan kinerja perekonomian daerah, maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan.

Kemiskinan (*poverty*) adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau pun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lain memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Perkembangan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada Gambar 2.22 berikut ini.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.22
Jumlah (Ribuan Orang) dan persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Merujuk pada Gambar 2.22 di atas, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali mengalami penurunan kurun Tahun 2018-2022. Pada Tahun 2018 persentase penduduk miskin sebesar 14,34 persen, dan menurun hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 13,75 persen. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin Tahun 2015 sebanyak 17,79 ribu jiwa, dan Tahun 2019 sebanyak 16,61 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Morowali juga menurun sebesar 16,50 ribu jiwa atau sebesar 13,43 persen. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 13,75 persen atau sebanyak 17,07 ribu jiwa. Peningkatan terjadi akibat pandemic covid-19 yang terjadi. Tahun 2022, pandemic sudah dapat dikendalikan, berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat yang juga meningkat, sehingga penduduk miskin menurun cukup signifikan menjadi 12,58 persen atau sebanyak 15,86 ribu jiwa.

Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya dengan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomian maupun pemerataan pembangunan, serta meningkatkan ketajaman dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Morowali antara lain yakni meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Status kesejahteraan menurut keluarga menurut desil menunjukkan bahwa total keluarga yang di Kabupaten Morowali sebanyak 13.663 RT, dimana keluarga terbesar pada desil 3. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28

Jumlah Keluarga Menurut Status Kesejahteraan Pada Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022

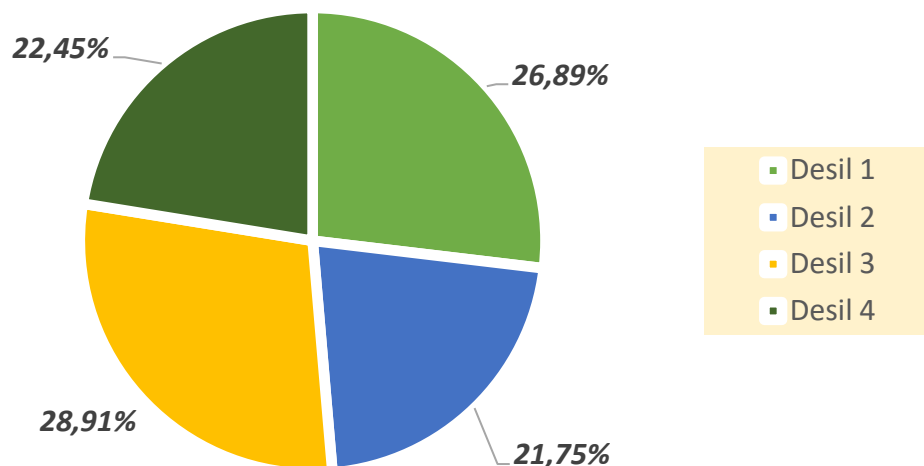
No.	Kecamatan	Keluarga				
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
1.	Bungku Tengah	1.072	131	179	387	375
2.	Bungku Selatan	2.502	1.117	551	549	285
3.	Menui Kepulauan	2.408	917	562	563	366
4.	Bungku Barat	1.397	374	293	415	315
5.	Bumi Raya	1.428	223	326	493	386
6.	Bahodopi	1.110	138	220	395	357
7.	Wita Ponda	2.136	448	484	645	559
8.	Bungku Pesisir	561	88	133	180	160
9.	Bungku Timur	1.049	238	224	323	264

No.	Kecamatan	Keluarga				
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
	Total	13.663	3.674	2.972	3.950	3.067

Sumber: <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/>, 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa kecamatan Bungku Selatan, Menui Kepulauan dan Wita Ponda adalah Kecamatan dengan jumlah keluarga menurut status kesejahteraannya tertinggi hingga mencapai angka dua ribu namun kecamatan paling tertinggi dengan angka sebesar 2.500 adalah Bungku Selatan. Sedangkan Bumi raya, Bungku barat, Bungku Tengah, Bungku Timur dan Bahodopi adalah kecamatan dengan jumlah keluarga berdasarkan status kesejahteraan mencapai angka seribu. Namun yang terendah adalah kecamatan Bungku Pesisir dengan jumlah keluarga menurut status kesejahteraan sebanyak 561. Sehingga akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah.

Selanjutnya dilihat dari desil 1, keluarga yang masuk kategori desil 1 terbesar terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan, untuk Desil 2 terbanyak berada di Kecamatan Bungku Selatan, untuk Desil 3 terbesar berada di Kecamatan Wita Ponda dan Kecamatan Menui Kepulauan. Dan untuk desil 4 terbanyak di Kecamatan Wita Ponda dan Kecamatan Bumi Raya. Data tersebut dapat menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kemiskinan pada keluarga khususnya yang berada pada desil 1 dan desil 2.

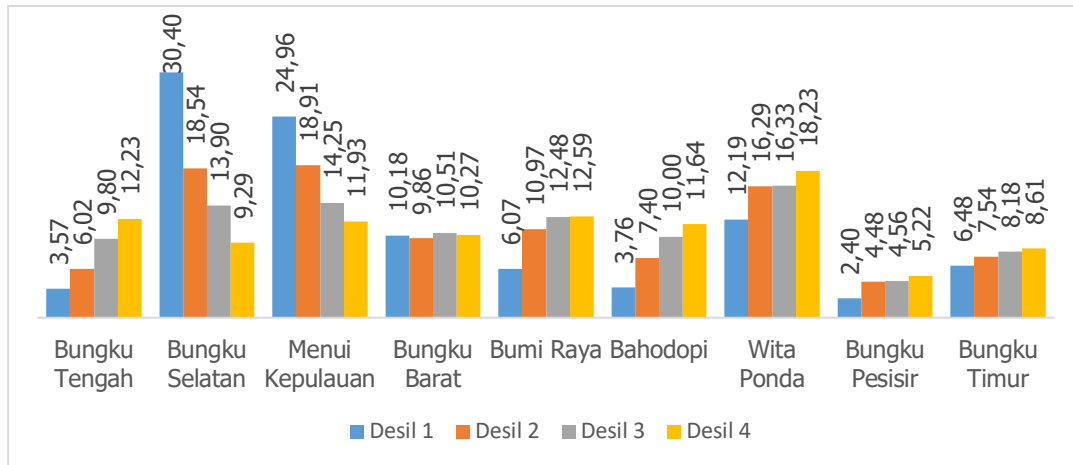


Sumber: <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/>, 2022

Gambar 2.23
Persentase Kesejahteraan Keluarga Menurut Desil
di Kabupaten Morowali Tahun 2022

Merujuk pada Gambar 2.23 di atas, persentase kesejahteraan keluarga menurut desil Kabupaten Morowali, tertinggi pada desil 3 dengan jumlah persentase sebesar 28,91 persen, kemudian tertinggi kedua desil 1 dengan jumlah persentase sebesar 26,89 persen, berikut desil 4 dengan jumlah persentase sebesar 22,45 persen dan terakhir desil 2 dengan jumlah persentase sebesar 21,75 persen.

Selanjutnya pada grafik berikut ini juga disajikan data persentase sebaran kesejahteraan keluarga menurut kecamatan.



Sumber: <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/>, diolah 2022

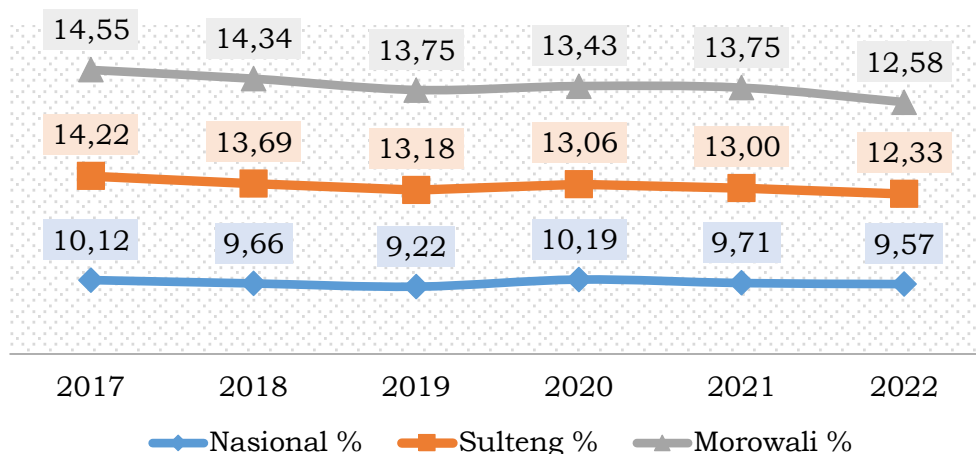
Gambar 2.24

Persentase Keluarga Menurut Status Kesejahteraan Pada Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022

Berdasarkan gambar diagram di atas diketahui persentase keluarga menurut status kesejahteraan pada desil 1 adalah kecamatan Bungku Selatan sebagai kecamatan tertinggi persentase keluarganya dengan nilai persentase sebesar 30,40 persen. Sedangkan yang paling terendah adalah Bungku Pesisir dengan jumlah persentase keluarga sebesar 2,40 persen pada desil 1. Kemudian, pada desil 2 dengan jumlah persentase keluarga tertinggi adalah kecamatan Menui Kepulauan dengan jumlah persentase sebesar 18,54 persen dan yang terendah pada desil 2 yaitu kecamatan Bungku Pesisir dengan jumlah persentase sebesar 4,48 persen. Berikut kecamatan Witaponda sebagai kecamatan yang memiliki jumlah persentase keluarga tertinggi pada desil 3 dengan jumlah persentase sebesar 16,33 persen dan yang paling terendah adalah kecamatan Bungku Pesisir dengan jumlah persentase sebesar 4,56 persen. Dan pada desil 4, kecamatan yang memiliki persentase keluarga tertinggi adalah kecamatan Witaponda dengan jumlah persentase sebesar 18,23 persen sedangkan yang paling terendah persentase keluarganya adalah kecamatan Bungku Pesisir dengan

jumlah persentase sebesar 5,22 persen. Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa Bungku Pesisir adalah kecamatan yang paling terendah tingkat persentase keluarganya menurut status kesejahteraan pada masing-masing desil sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah Morowali.

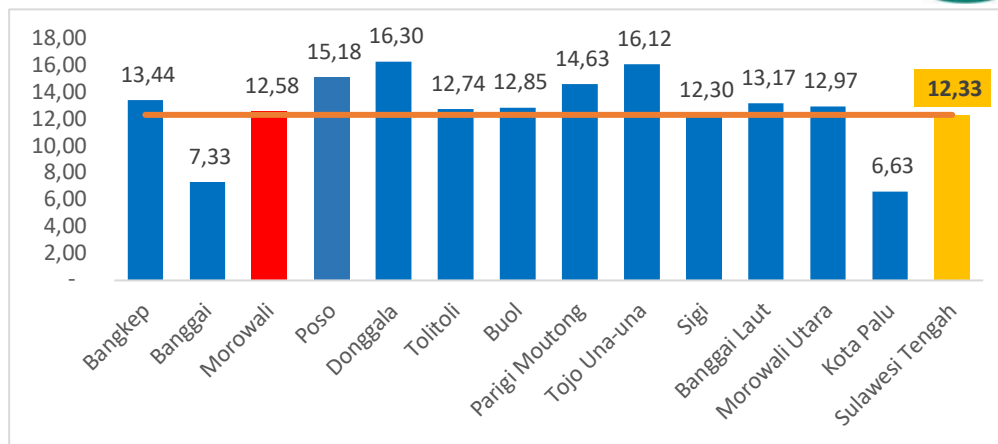
Namun, penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Morowali hingga Tahun 2022 tersebut, masih berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Dimana, persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 12,33 persen dan nasional sebesar 9,57 persen. Pasca Pandemi Covid-19 penduduk miskin di Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional menunjukkan kinerja yang positif. Data terdapat pada Gambar 2.25 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.25
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Selanjutnya perkembangan penduduk miskin antar Kabupaten Morowali dengan Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Morowali masih di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, maka posisi Kabupaten Morowali berada pada urutan kesepuluh. Sedangkan Kota Palu memiliki persentase penduduk miskin terendah. Beberapa daerah dengan persentase penduduk miskin lebih baik dari rata-rata Provinsi hanya Kabupaten Banggai dan Kabupaten Sigi, selain itu persentase penduduk miskin masih di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Data mengenai persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.26 sebagai berikut ini.

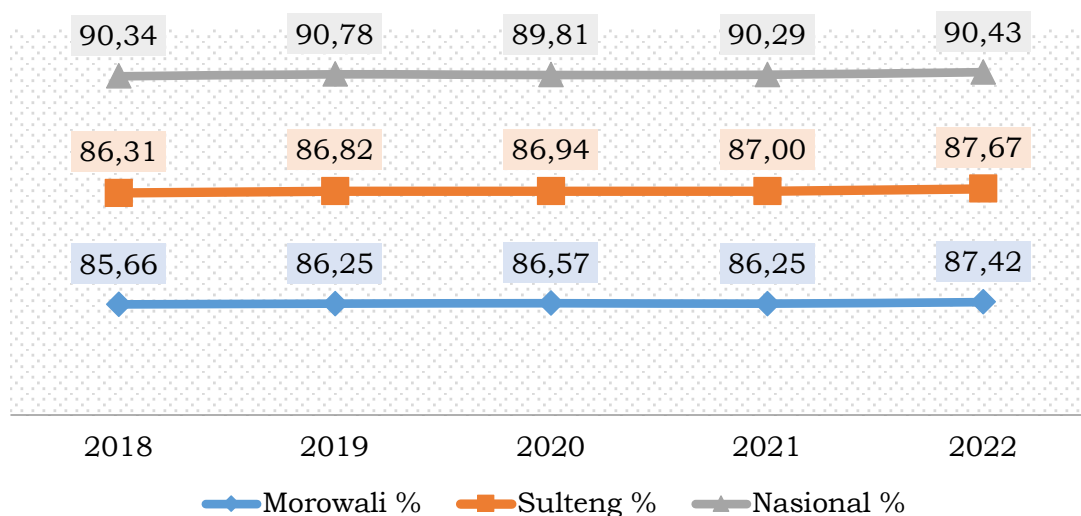


Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.26
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

3) Persentase Penduduk Di Atas Kemiskinan

Persentase penduduk di atas di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan seiring dengan menurun jumlah penduduk miskin selama periode Tahun 2018-2022. Hingga pada Tahun 2022, persentase penduduk di atas garis kemiskinan yakni sebesar Rp507.523 dimana terdapat jumlah persentase penduduk di atas garis kemiskinan sebesar 86,57 persen, namun angka ini masih lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional yang disajikan pada Gambar 2.27 sebagai berikut ini.



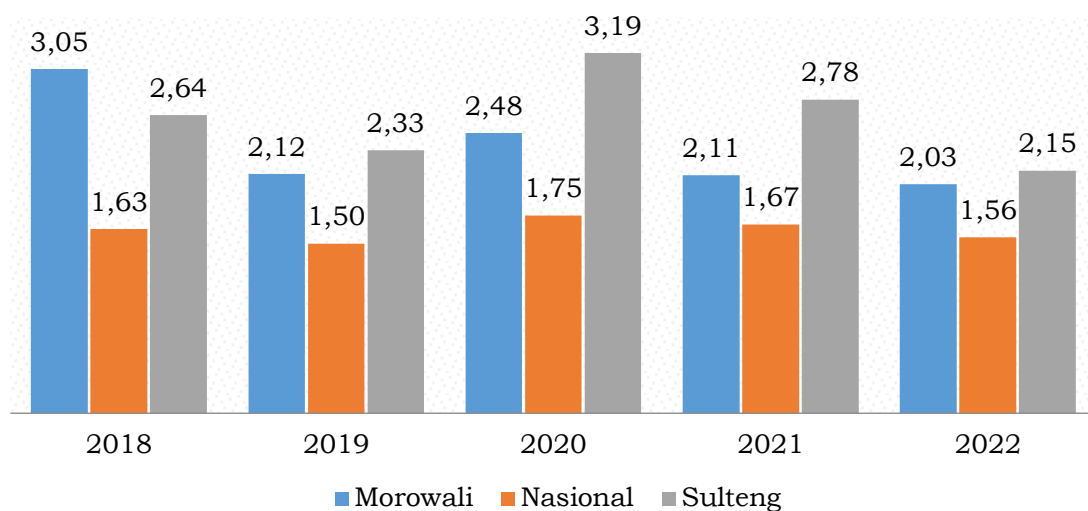
Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.27
Persentase Penduduk Diatas Kemiskinan Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

4) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga harus memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Morowali cenderung meningkat dan berfluktuatif. Tahun 2018, dimana P1 Kabupaten Morowali sebesar 3,05 menurun di Tahun 2019 menjadi sebesar 2,12, namun kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 2,48%. Pada tahun 2021 kembali menurun sebesar 2,11 persen dan di tahun 2022 sebesar 2,03 persem. P1 Kabupaten Morowali lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, namun masih jauh lebih tinggi dari rata-rata Nasional. Data P1 Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.28 sebagai berikut ini.

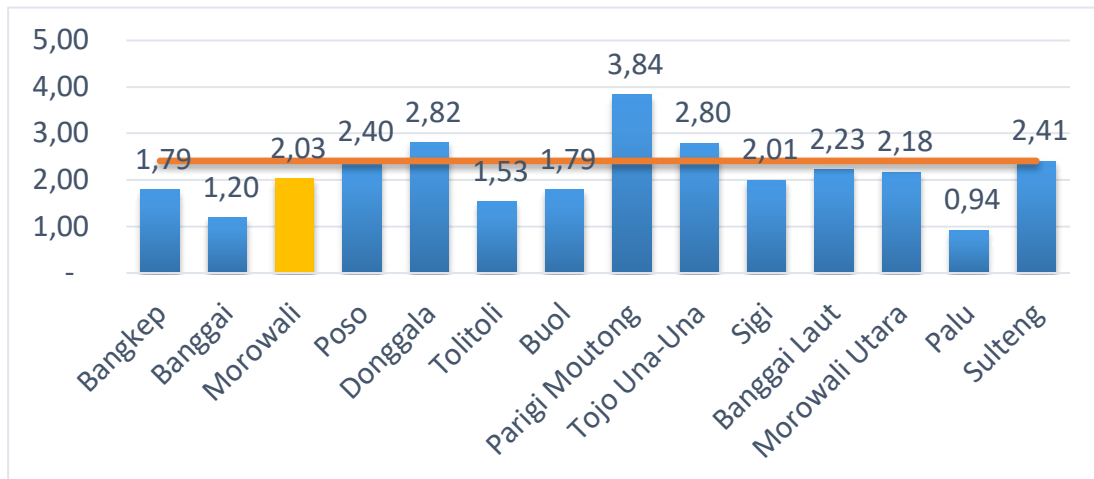


Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.28
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Morowali
Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Selanjutnya jika dilihat dari wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, dimana P1 Kabupaten Morowali Tahun 2022 lebih rendah (lebih baik) dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, namun lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kondisi P1 Kabupaten Morowali berada pada urutan ketujuh. Sedangkan, P1 terendah adalah Kota Palu dan Kabupaten Banggai, sedangkan P1 tertinggi adalah Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala. Data P1 terdapat dilihat pada

Gambar 2.29 sebagai berikut ini.

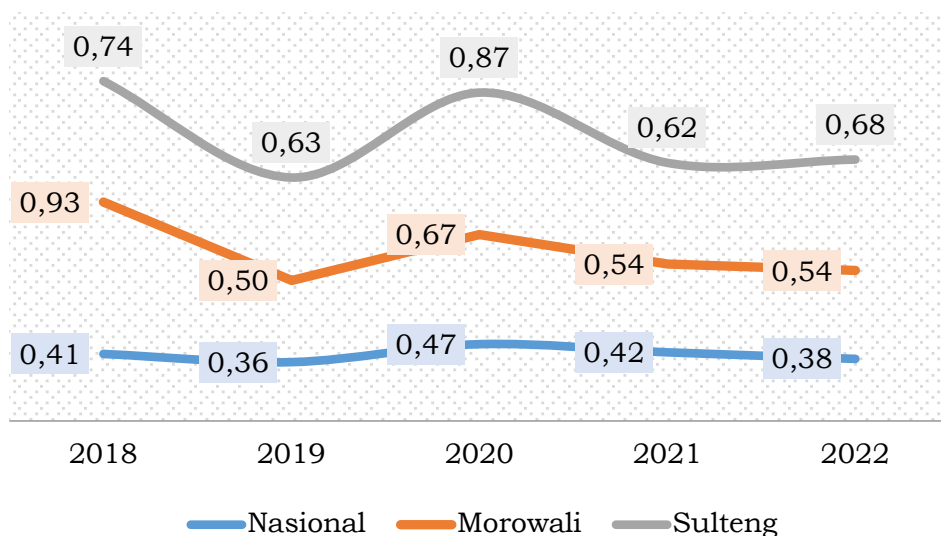


Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.29
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2022

5) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Data P2 ditampilkan pada Gambar 2.30 sebagai berikut.

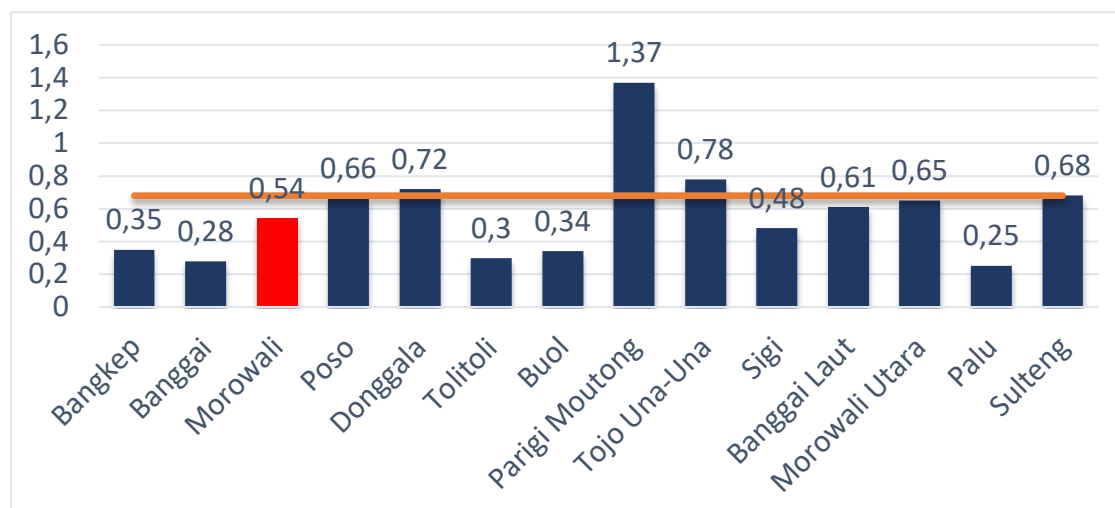


Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.30
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Morowali
Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Berdasarkan Gambar 2.30 di atas, diketahui bahwa perkembangan P2 Kabupaten Morowali berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Hal ini terlihat dari capaian Tahun 2018 sebesar 0,93 menurun ditahun menjadi sebesar 0,50, ditahun 2020 kembali meningkat menjadi 0,67% dan pada tahun 2021-2022 sebesar 0,54 persen. Kondisi P2 Kabupaten Morowali, tergolong tinggi. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah setempat. Upaya melalui berbagai program dan bantuan sosial yang dikucurkan harus tepat sasaran dan sesuai dengan target. Kondisi P2 Tahun 2022 tersebut lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,68 dan berada di atas rata-rata Nasional sebesar 0,38.

Capaian pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di Kabupaten Morowali ternyata belum sepenuhnya mampu memperbaiki taraf kehidupan masyarakat, mengingat masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam kemiskinan, dan cenderung melebar jarak pendapatan kemiskinan di antara penduduk miskin. Selanjutnya, data P2 Kabupaten Morowali dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah ditampilkan pada Gambar 2.31 sebagai berikut ini.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.31
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Berdasarkan Gambar 2.31 di atas rata-rata P2 Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,68. Beberapa daerah masih memiliki P2 lebih tinggi dari rata-rata Provinsi yakni Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Donggala. Kabupaten Morowali berada pada urutan ke-tujuh P2 di Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan P2 tertinggi

adalah Kabupaten Parigi Moutong dan P2 terendah adalah Kabupaten Banggai, Kota Palu dan Kabupaten Tolitoli.

6) Indeks Pembangunan Manusia

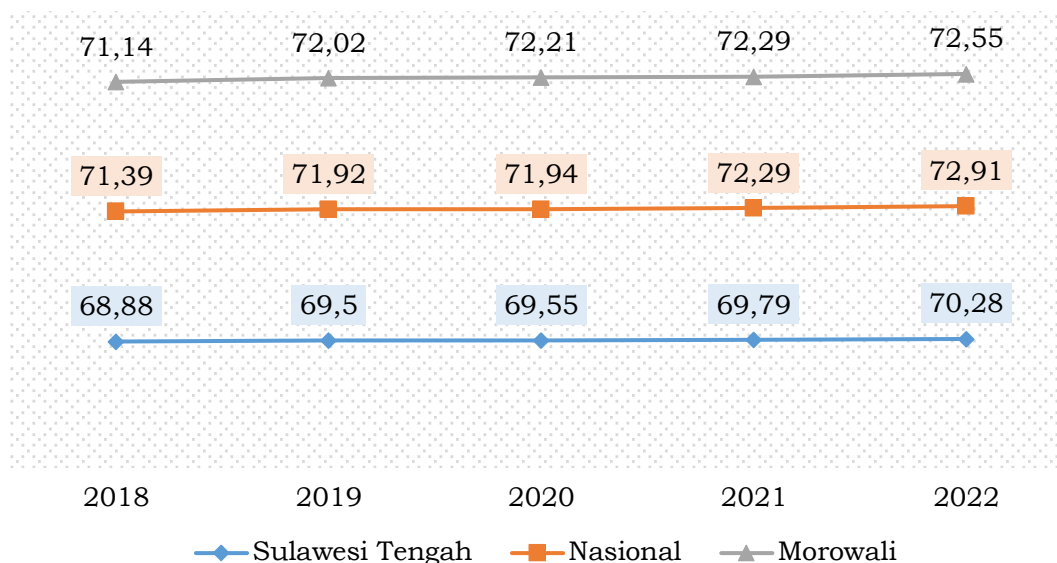
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh antara lain pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM diperkenalkan oleh UNDP Tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi Tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru Tahun 2014 dan melakukan *backcasting* Tahun 2010. Selanjutnya, IPM merupakan salah satu alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kualitas pembangunan manusia. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yakni: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), penge-tahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*).

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah Tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (Tahun) penduduk usia 25 Tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai lamanya (Tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Morowali ditunjukkan melalui IPM mengalami peningkatan periode Tahun 2018-2022. Kondisi ini ditunjukkan Tahun 2018 dimana IPM sebesar 71,14, terus meningkat hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 72,55. IPM

Kabupaten Morowali Tahun 2022 masuk kategori **tinggi**. Dimana, capaian IPM ini, tidak lebih baik dari rata-rata capaian Nasional sebesar 72,91, sedangkan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 70,28 yang ditampilkan pada Gambar 2.32 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.32
IPM Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,
dan Nasional Tahun 2018-2022

Selanjutnya untuk perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2022 menunjukkan Kota palu dengan IPM tertinggi yakni sebesar 82,02 masuk kategori **sangat tinggi**. Sedangkan, Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua. Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Banggai Kepulauan yang disajikan pada Tabel 2.29 sebagai berikut ini.

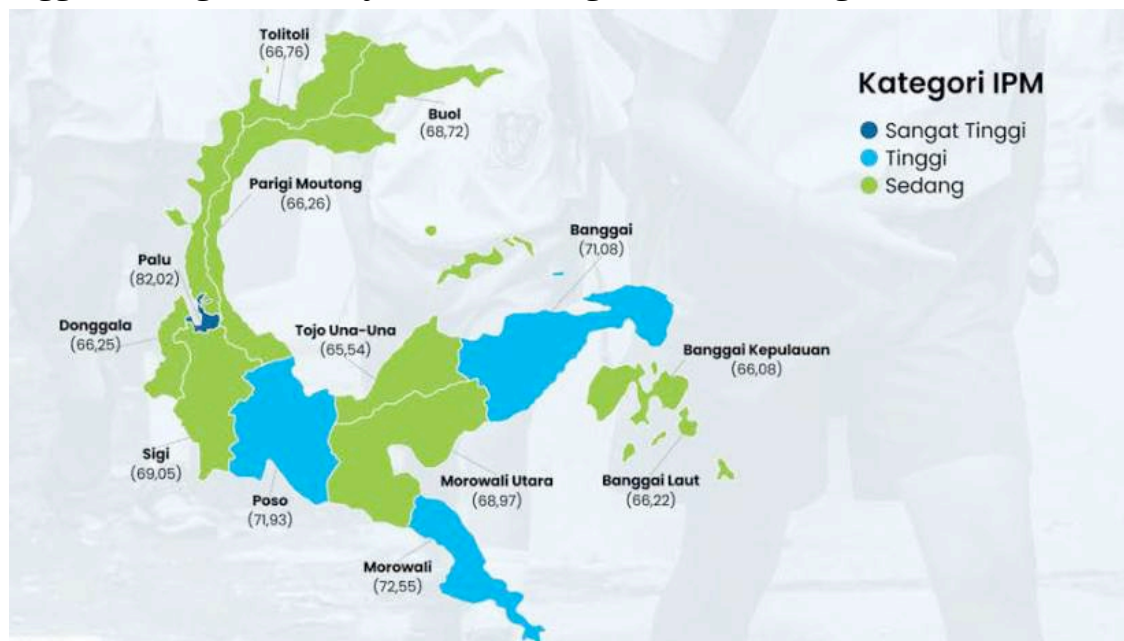
Tabel 2.29
IPM Kabupaten/Kota, Sulawesi Tengah,
Dan Nasional Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Banggai Kepulauan	64,68	65,13	65,42	65,61	66,08
Banggai	69,85	70,36	70,52	70,6	71,08
Morowali	71,14	72,02	72,21	72,29	72,55
Poso	70,68	71,40	71,28	71,45	71,93
Donggala	65,14	65,49	65,56	65,72	66,25
Toli-Toli	64,6	65,42	65,69	66,3	66,76
Buol	67,3	67,69	67,82	68,25	68,72

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Parigi Moutong	64,85	65,47	65,44	65,82	66,26
Tojo Una-Una	63,38	64,52	64,59	64,74	65,54
Sigi	67,66	68,16	68,12	68,49	69,05
Banggai Laut	64,8	65,27	65,43	65,65	66,22
Morowali Utara	67,95	68,45	68,36	68,48	68,97
Kota Palu	80,91	81,50	81,47	81,7	82,02
Sulawesi Tengah	68,88	69,5	69,55	69,79	70,28
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Pada Gambar 2.33 di bawah ini ditampilkan peta IPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana, hingga Tahun 2022, hanya Kota Palu dengan status IPM **Sangat Tinggi**, kemudian disusul Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai pada kategori tinggi, sedangkan sisanya dalam kategori IPM sedang.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

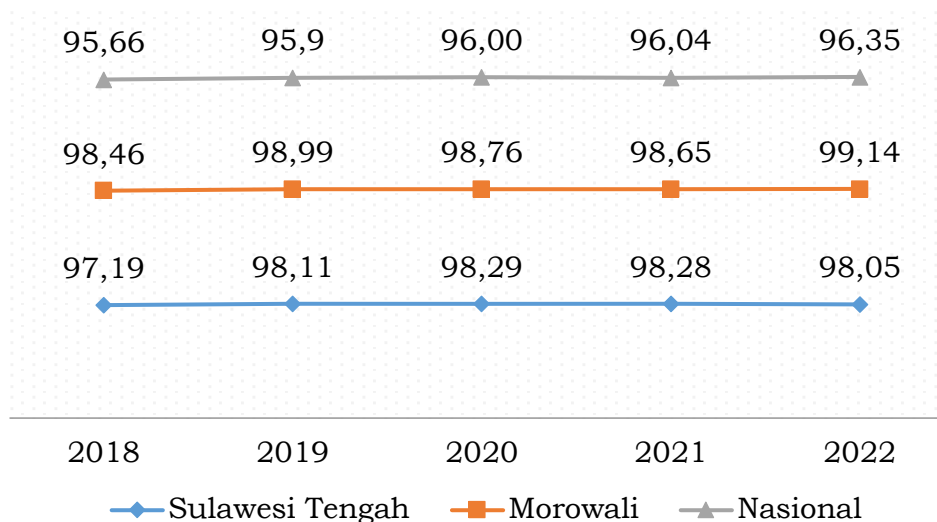
Gambar 2.33
Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Angka Melek Huruf

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin,

huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji) terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas. Kegunaan dari AMH untuk melihat penca-paian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Kondisi AMH Kabupaten Morowali periode Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.34 berikut.

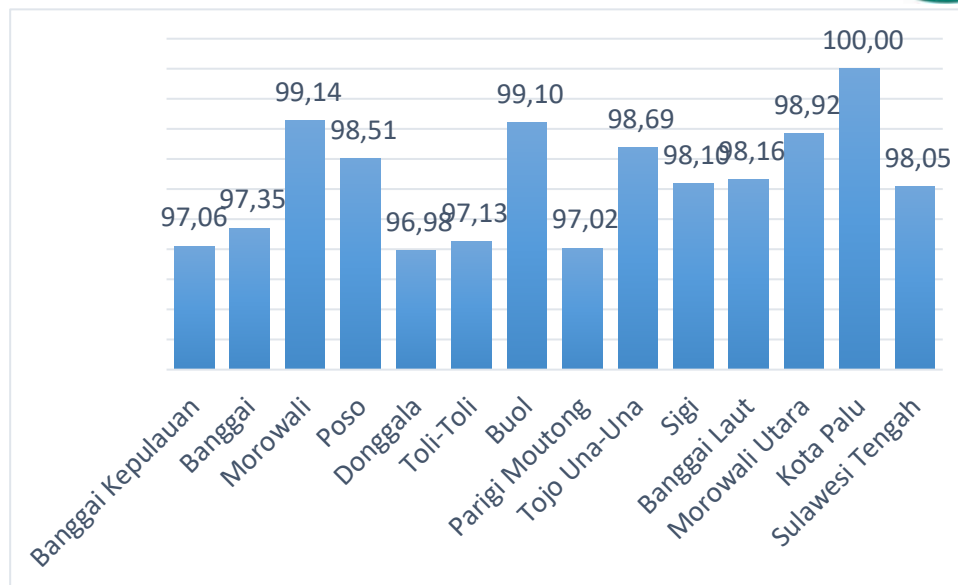


Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.34
Angka Melek Huruf Kabupaten Morowali
Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 2.34 di atas, dapat dijelaskan AMH Kabupaten Morowali kurun Tahun 2018-2022 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dari capaian Tahun 2018 yang sebesar 98,46 persen, dan hingga Tahun 2022 hanya tumbuh sedikit menjadi sebesar 99,14 persen. Selanjutnya capaian AMH Kabupaten Morowali Tahun 2022 berada di atas rata-rata secara Nasional, juga masih lebih baik dari rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Tengah.

Kondisi AMH Kabupaten Morowali dibanding dengan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sudah cukup baik. Pada Tahun 2022 Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua setelah Kota Palu. Beberapa Kabupaten yang AMH yang terendah adalah Kabupaten Parigi Moutong, Tolitoli, dan Kabupaten Donggala. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini.



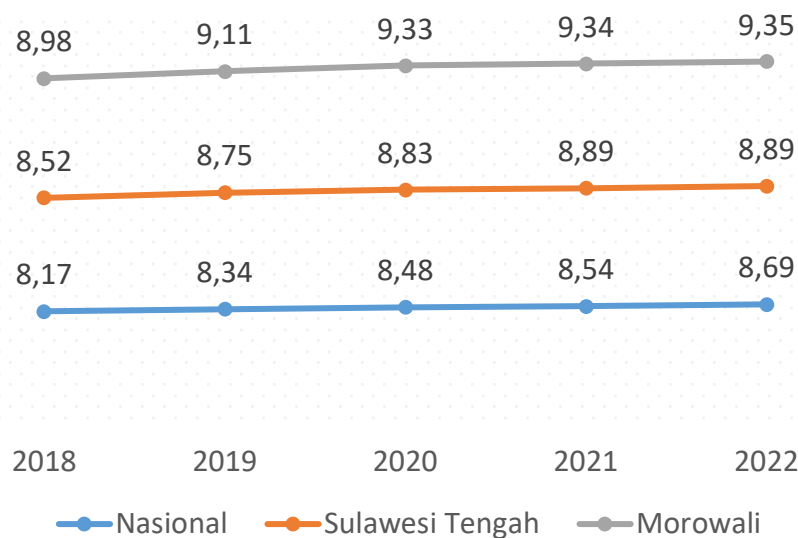
Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka, 2023 (data diolah)

Gambar 2.35
Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kualitas (daya saing) seseorang. RLS merupakan indikator yang dihasilkan dari kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Namun, jumlah Tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali.

Berdasarkan RLS dapat diperoleh gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. Dimana angka RLS adalah rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sehingga lamanya sekolah atau *years of schooling* dari setiap penduduk merupakan sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal, seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya. Data mengenai perkembangan rata-rata lama sekolah kabupaten Morowali periode Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.36 sebagai berikut ini.

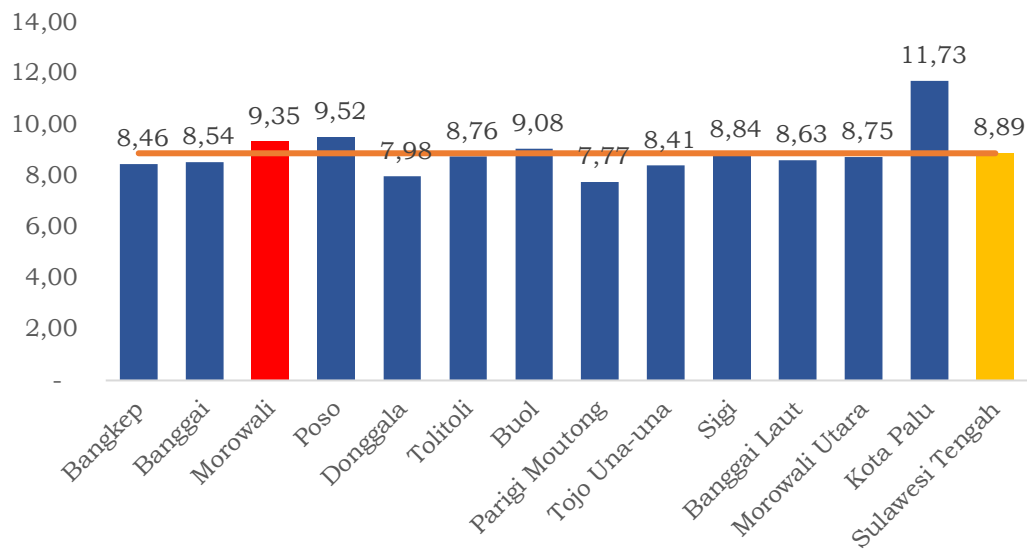


Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.36
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Morowali
Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Merujuk pada Gambar 2.36 di atas, diketahui bahwa angka RLS Kabupaten Morowali mengalami peningkatan setiap Tahun. Pada Tahun 2018 selama 8,98 Tahun, meningkat hingga Tahun 2022 menjadi selama 9,35 Tahun. Artinya secara umum penduduk kabupaten Morowali Usia 25 Tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas 3). Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal manusia (*human capital*) untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Morowali. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Capaian Kabupaten Morowali Tahun 2022 ini juga lebih baik dari rata-rata capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah, dimana masing selama 8,89 Tahun dan 8,69 Tahun. Dalam periode Tahun 2018-2022, angka RLS Kabupaten Morowali selalu berada di atas rata-rata capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Perbandingan angka RLS Kabupaten Morowali dengan Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengetahui gambaran posisi Kabupaten Morowali dari Kabupaten/kota. Selanjutnya berdasarkan Gambar 2.37 di dibawah ini, diketahui bahwa angka RLS tertinggi Kota Palu selama 11,73 Tahun, kemudian Kabupaten Poso selama 9,52 Tahun, dan tertinggi ketiga Kabupaten Morowali selama 9,35 Tahun. Sedangkan RLS yang terendah adalah Kabupaten Parigi Moutong selama 7,77 Tahun.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.37
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

3) Harapan Lama Sekolah

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 (tujuh) Tahun ke atas, karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Data perbandingan HLS Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional disajikan pada Tabel 2.30 sebagai berikut.

Tabel 2.30
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Morowali
Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

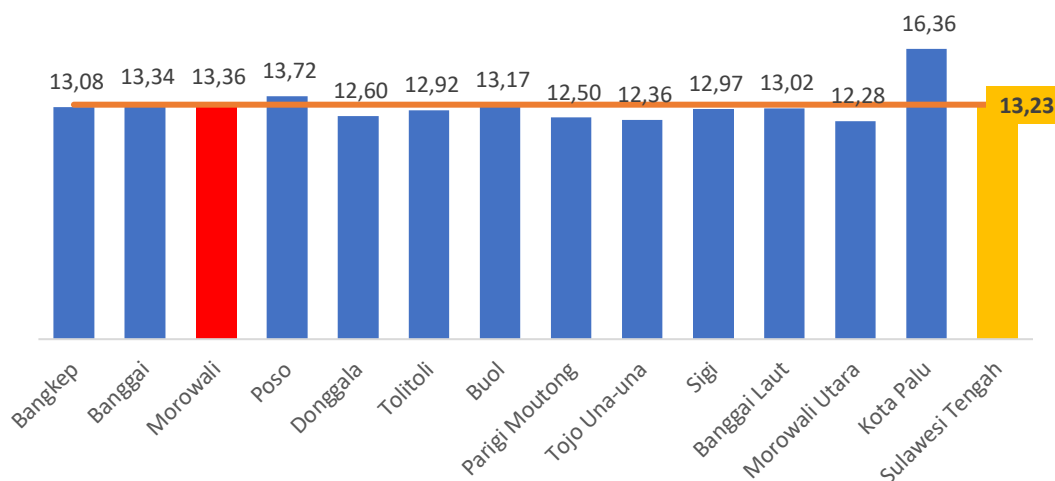
No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nasional	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10
2	Sulawesi Tengah	13,13	13,14	13,17	13,23	13,32
3	Morowali	12,89	13,31	13,34	13,35	13,36

Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Selama kurun Tahun 2018-2022, HLS Kabupaten Morowali selalu meningkat setiap Tahun. Pada Tahun 2018 yakni selama 12,89 Tahun, hingga Tahun 2022 meningkat hingga selama 13,36 Tahun. Meningkatnya angka HLS menjadi signal positif, bahwa semakin banyak

penduduk yang bersekolah. Pada Tahun 2022, angka HLS Morowali telah mencapai selama 13,36 Tahun, berarti anak-anak usia 7 Tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus diploma satu (D1). Capaian HLS Kabupaten Morowali Tahun 2022 lebih baik atau lebih tinggi, dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah selama 13,32 Tahun maupun rata-rata secara Nasional selama 13,10 Tahun.

Untuk data Provinsi Sulawesi Tengah, diketahui bahwa angka HLS Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, yang tertinggi adalah Kota Palu selama 16,36 Tahun, Kabupaten Poso selama 13,72 Tahun dan Kabupaten Morowali selama 13,36 Tahun. Posisi Kabupaten Morowali berada pada urutan ketiga di antara Kabupaten/kota yang disajikan pada Gambar 2.38 sebagai berikut ini.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.38
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

4) Angka Usia Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosialekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan UHH penduduk dari suatu negara. Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui berbagai fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas, meningkatnya kema-mpuan daya beli masyarakat akan berimplikasi dengan makin mening-katkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebu-tuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

UHH pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. UHH sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka UHH rendah di suatu daerah menunjukkan capaian pembangunan kesehatan, kecukupan gizi dan kalori. Data UHH Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional disajikan pada Tabel 2.31 sebagai berikut.

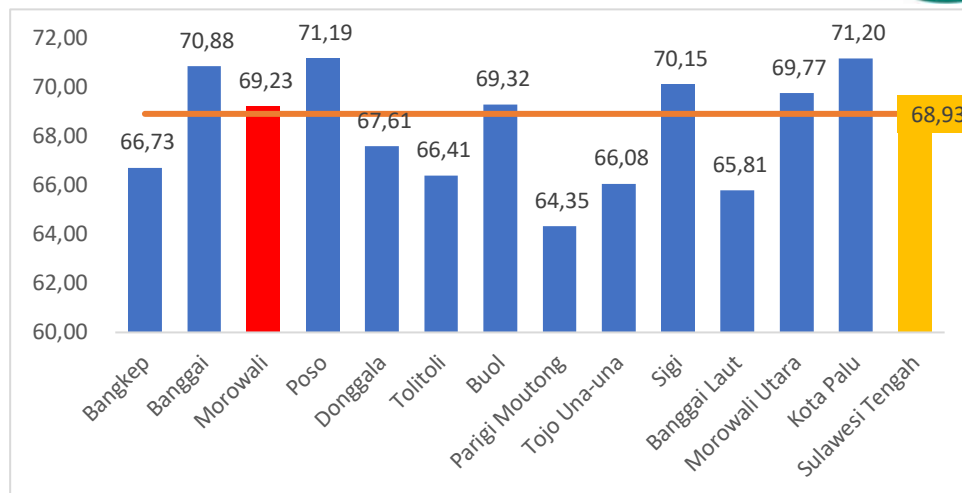
Tabel 2.31
Angka UHH Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sulawesi Tengah	67,78	68,23	68,69	68,83	68,93
2	Morowali	68,45	68,77	69,18	69,23	69,23
3	Nasional	73,00	73,20	73,40	73,50	73,83

Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Periode Tahun 2018-2022, Angka UHH Kabupaten Morowali meningkat sebesar 0,78 Tahun. Tahun 2018 UHH selama 68,46 Tahun dan hingga Tahun 2022 selama 69,23 Tahun. Peningkatan dalam kurun waktu tersebut masih rendah. capaian UHH Kabupaten Morowali Tahun 2022 masih jauh dari rata-rata UHH secara Nasional selama 73,83 Tahun. Namun, lebih baik dari rata-rata UHH Provinsi Sulawesi Tengah selama 68,93 Tahun.

Angka UHH Kabupaten Morowali dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan UHH Kabupaten Morowali lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, terlihat pada Tahun 2022 UHH Kabupaten Morowali 69,23 Tahun dan rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah 68,93 Tahun. Namun, kondisi berbeda jika dibanding rata-rata secara nasional. Posisi UHH Kabupaten Morowali Tahun 2022 berada pada urutan ketujuh dari Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. UHH Tertinggi Kota Palu dan Kabupaten Poso sedangkan UHH terendah Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Banggai Laut yang ditampilkan pada Gambar 2.39 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

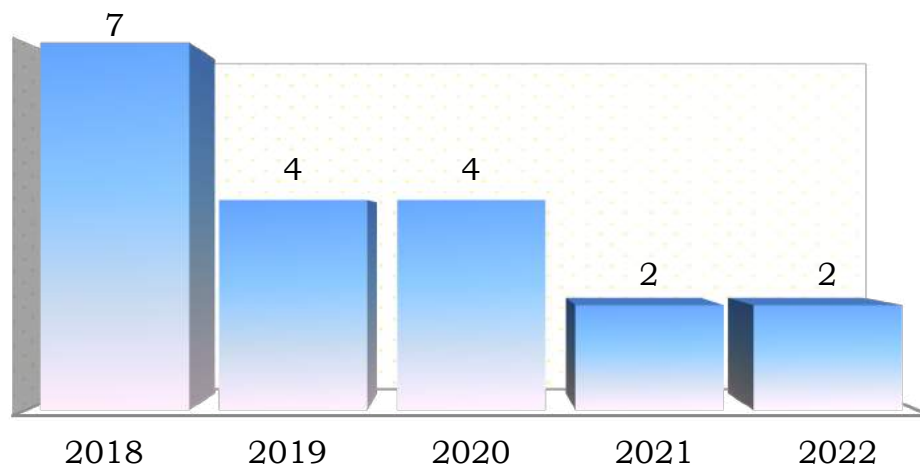
Gambar 2.39
Angka UHH Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

5) Persentase Balita Gizi Buruk

Kondisi gizi buruk merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Sedangkan, persentase balita gizi buruk merupakan persentase balita dalam kondisi gizi buruk (berat badan sangat kurang) terhadap jumlah keseluruhan balita. Dimana, kondisi ini terlihat dari keadaan tubuh anak, atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. Untuk status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan melakukan perbandingan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Bila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, maka anak disebut berstatus gizi baik. Bila sedikit berada di bawah standar maka disebut berstatus gizi kurang.

Akibat dari kurang gizi ini kerentanan terhadap penyakit-penyakit infeksi terlebih pada kasus gizi buruk, gizi buruk seperti fenomena gunung es dimana kejadian gizi buruk dapat menyebabkan kematian. Data mengenai balita gizi kurang tidak tersedia di Kabupaten Morowali, sehingga yang ditampilkan pada bagian ini adalah jumlah kasus bayi yang mengalami gangguan gizi buruk selama Tahun 2018-2022.

Kasus bayi gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Morowali dalam 5 (lima) Tahun terakhir, namun menunjukkan tren yang membaik. Hal ini terlihat dari jumlah kasus pada Tahun 2018 sebanyak 7 kasus, kasus bayi gizi buruk berada pada kisaran 4 kasus hingga Tahun 2019 pada tahun 2020 dan 2021 kasus balita gizi buruk sebanyak 2 Kasus, meningkat sangat signifikan. Data mengenai jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Morowali terdapat pada Gambar 2.40 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

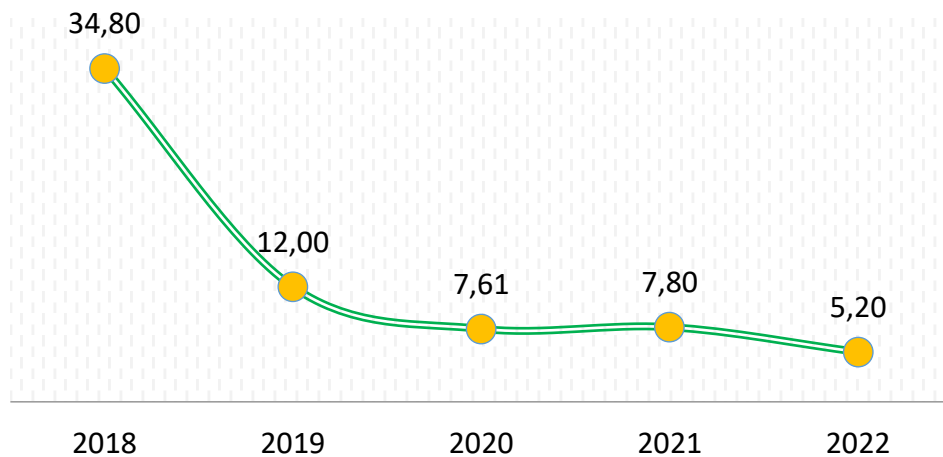
Gambar 2.40
Jumlah Kasus Bayi Gizi Buruk Kupaten Morowali
Tahun 2018-2022

6) Stunting

Istilah *underweight* sendiri merupakan kondisi gabungan pada masalah gizi yang menitik beratkan pada hasil penimbangan berat badan berdasarkan umur antara gizi buruk dan gizi kurang ($BB/U < -2$ SD) stunting merupakan kondisi gabungan pada masalah gizi yang menitik beratkan pada hasil pengukuran tinggi/panjang badan berdasarkan umur antara sangat pendek dan pendek ($TB/U < -2$ SD) sedangkan wasting merupakan kondisi gabungan pada masalah gizi yang menitik beratkan pada hasil penimbangan berat badan dibandingkan hasil pengukuran tinggi/panjang badan antara sangat kurus dan kurus ($BB/TB < -2$ SD). Risiko yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka pendek diantaranya meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian, gangguan perkembangan (kognitif, motorik, bicara), meningkatnya beban ekonomi untuk biaya perawatan dan pengobatan anak yang sakit. Jangka panjang menyebabkan menurunnya kesehatan reproduksi, konsentrasi belajar dan rendahnya produktivitas kerja.

Penanganan *stunting* di Kabupaten Morowali menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dari angka stunting yang menurun sangat signifikan. Tahun 2018 angka *stunting* di Kabupaten Morowali sebesar 34,80 persen. Namun Tahun 2019 menurun sangat signifikan menjadi 12,00 persen, kemudian pada tahun 2020 angka stunting kabupaten Morowali sudah menurun sangat signifikan menjadi 7,71 persen, sampai dengan tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Morowali sebesar 5,20 persen. Capaian ini menunjukkan kinerja

kesehatan dalam penanganan *stunting* di daerah setempat semakin baik. Beragam intervensi yang dilakukan mulai dari alokasi dana APBD dan pemanfaatan dana desa dalam mengatasi masalah *stunting* di Kabupaten Morowali.



Sumber: Profil Kesehatan Sulteng 2023 (diolah)

Gambar 2.41
Angka Stunting Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

Secara umum di Propinsi Sulawesi Tengah masalah gizi yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Pemberian makanan tambahan bagi anak gizi kurang tidak dipantau sehingga pemberian tidak tepat sasaran dan tidak sesuai petunjuk teknis yang diberikan.
2. Dengan adanya kegiatan surveilans gizi melalui e-PPGBM yang mengharuskan capaian *by name by address* sehingga didapat kasus yang lebih banyak.
3. Masih ada tenaga pengelola gizi yang bukan berlatar belakang ilmu gizi (*nutritionist*).

Selanjutnya, angka perkembangan *stunting* Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah ditampilkan pada Tabel 2.32 sebagai berikut.

Tabel 2.32
Perkembangan Angka Stunting Kabupaten Morowali dan
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2023

Kab/Kota	Prevalensi TB/U				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sigi	43,0	24,6	19,0	16,3	14,5
Tojo Una-Una	26,2	26,0	22,7	22,7	18,8
Bangkep	40,5	22,6	23,0	15,1	21,5
Palu	24,1	17,0	14,0	14,0	7,8
Parimo	33,7	21,5	11,4	11,4	10,9

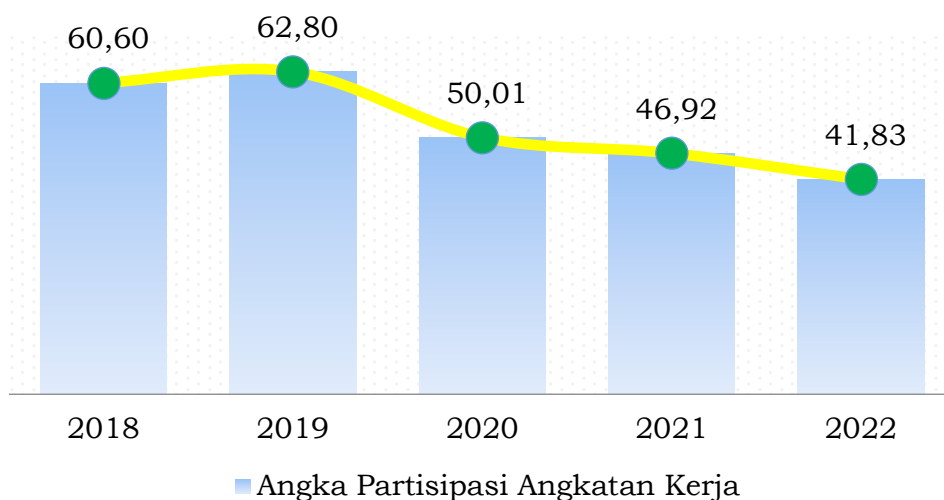
Kab/Kota	Prevalensi TB/U				
	2018	2019	2020	2021	2022
Poso	26,2	21,8	16,8	16,8	12,4
Morowali	34,8	12,0	7,6	7,8	5,2
Banggai	31,9	19,9	17,9	17,9	14,0
Balut	34,2	20,7	20,8	20,8	10,3
Morut	28,5	24,0	17,4	17,4	7,6
Donggala	36,0	34,9	16,8	16,8	21,4
Toli-Toli	31,7	11,2	9,8	9,8	13,2
Buol	34,2	9,4	11,7	11,7	8,5
Sulteng	32,3	21,4	16,2	13,2	13,1

Sumber: Profil Kesehatan Sulteng 2023 (diolah)

Angka *stunting* di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 sebesar 13,10 persen. Kabupaten dengan prevalensi angka *stunting* terbesar adalah Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 21,50 persen, dan Kabupaten Donggala sebesar 21,40 persen. Sedangkan terendah Kabupaten Morowali.

7) Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Angka partisipasi angkatan kerja di peroleh dari Angkatan kerja 15 Tahun ke atas dibagi jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas. Kondisi angkatan Partisipasi Angkatan Kerja ditampilkan pada Gambar 2.42 sebagai berikut.



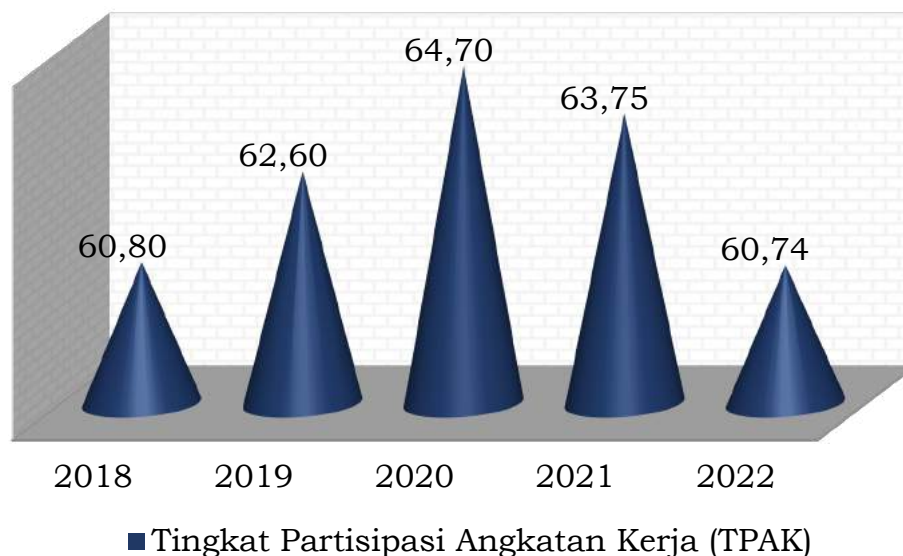
Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.42
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

Berdasarkan pada Gambar 2.42 di atas, diketahui bahwa angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Morowali cenderung meningkat dalam 5 Tahun terakhir, meskipun perkembangan setiap Tahun berfluktuatif. Hal ini ditunjukkan dari kondisi Tahun 2018 sebesar 60,60 persen, di Tahun 2019 meningkat menjadi 62,80 persen. Selanjutnya di tahun 2020 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Morowali menurun menjadi 50,01 persen. Menurun hingga tahun 2022 sebesar 41,83 persen.

8) Tingkat partisipasi angkatan kerja

Tenaga kerja (*man power*) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Untuk mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja (*labor force*) yang dapat diserap oleh pasar kerja, biasanya dipakai suatu ukuran yang dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yaitu rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.43
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

Berdasarkan data pada Gambar 2.43 di atas, TPAK Kabupaten morowali Tahun 2018 sebesar 60,80 persen dan Tahun 2019 menjadi sebesar 62,60 persen, kemudian di tahun 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Morowali meningkat menjadi 64,70 persen. Dua tahun terakhir menurun sebesar 60,74 persen di tahun 2022.

Selanjutnya, kondisi TPAK Kabupaten Morowali adalah terendah kedua dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah setelah Kabupaten Banggai Laut sebesar 58,37 persen. Sedangkan tertinggi adalah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Parigi Moutong. Rata-rata TPAK Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 sebesar 69,99 persen yang disajikan pada Tabel 2.33 sebagai berikut ini.

Tabel 2.33
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Banggai Kepulauan	72,97	71,98	74,63	71,98	74,63
2	Banggai	69,79	71,80	73,48	71,8	73,48
3	Morowali	64,70	63,75	60,74	63,75	60,74
4	Poso	74,78	73,54	72,41	73,54	72,41
5	Donggala	63,93	67,47	72,03	67,47	72,03
6	Toli-Toli	65,95	64,04	64,70	64,04	64,7
7	Buol	69,75	67,52	69,18	67,52	69,18
8	Parigi Moutong	72,50	68,82	74,05	68,82	74,05
9	Tojo Una-Una	75,33	74,86	68,47	74,86	68,47
10	Sigi	69,24	70,76	72,69	70,76	72,69
11	Banggai Laut	67,20	61,42	58,37	61,42	58,37
12	Morowali Utara	69,85	68,47	69,93	68,47	69,93
13	Kota Palu	66,46	65,07	64,68	65,07	64,68
	Sulawesi Tengah	69,44	68,73	69,99	68,73	69,99

Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

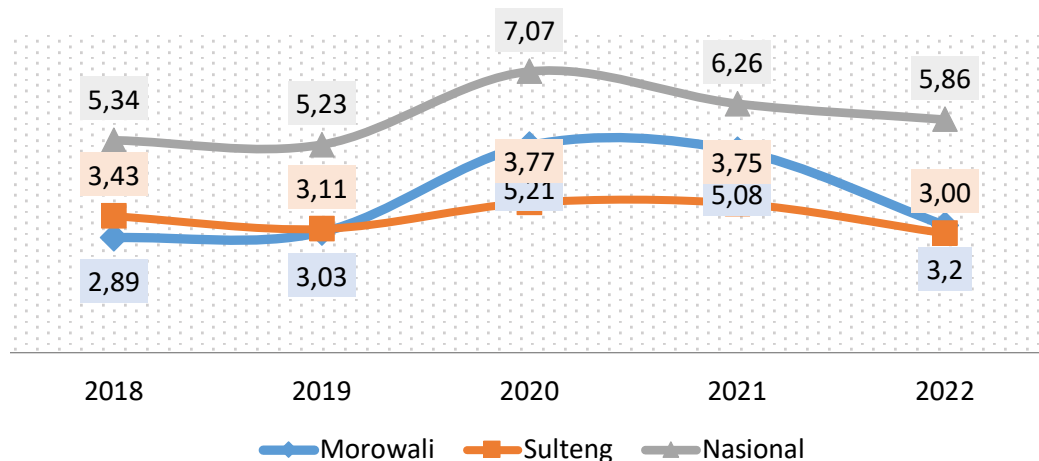
9) Tingkat Pengangguran Terbuka

Penganggur (*unemployment*) adalah penduduk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja, karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela), maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa).

Sebagai daerah yang kaya Sumber daya Alam (*natural resources*) Kabupaten Morowali ‘negeri tambang’ di Indonesia. Potensi pertambangan ini seharusnya dapat menjadi sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melalui penciptaan

lapangan kerja atau kesempatan kerja. Namun, kondisi ini belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari data persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang justru meningkat dalam kurun 5 (lima) Tahun terakhir dan juga hingga Tahun 2022. Pada Tahun 2018 persentase TPT Kabupaten Morowali sebesar 2,89 persen meningkat setiap Tahun hingga Tahun 2021 menjadi 3,75 persen. Ditahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,20 persen. Namun, kondisi Tahun 2022 masih sedikit lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3,00 persen. Sedangkan untuk kondisi Nasional TPT Kabupaten Morowali masih lebih baik yakni sebesar 5,86 persen.

Pada Tahun 2020, bencana non-alam Pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut berdampak sangat buruk pada kondisi perekonomian nasional, salah satunya dengan meningkatnya jumlah penganggur termasuk di Kabupaten Morowali. Pada Tahun 2022, pasca pandemi kondisi ekonomi morowali semakin membaik, hal ini berdampak pada persentase TPT Kabupaten Morowali menurun menjadi 3,20 persen, Provinsi Sulawesi Tengah meningkat menjadi 3,00 persen dan Nasional meningkat sebesar 5,86 persen yang disajikan pada Gambar 2.44 sebagai berikut ini.

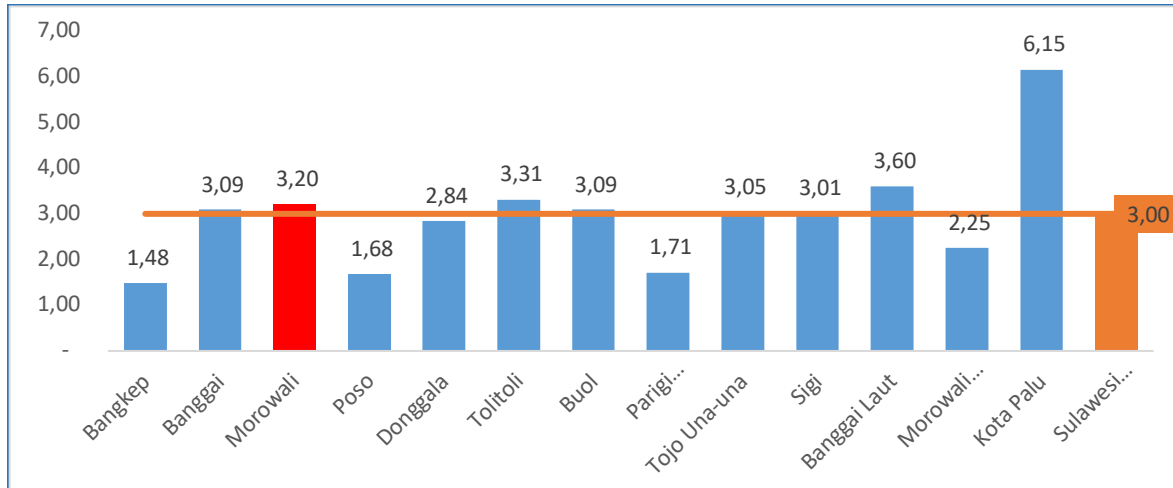


Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.44
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali
Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Selanjutnya, kondisi TPT Kabupaten Morowali dibandingkan dengan kondisi capaian Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah untuk melihat sejauh mana kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam menangani masalah pengangguran. Berdasarkan data TPT Kabupaten Morowali menurun cukup signifikan di Tahun 2022 menjadi sebesar 3,20. TPT tertinggi yakni Kota Palu mencapai 6,15

persen, kemudian Kabupaten Banggai Laut mencapai 3,60 persen. Sedangkan, TPT terendah adalah Kabupaten Poso sebesar 1,68 persen, Kabupaten Banggai 1,48 persen dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 1,71 persen. Data capaian TPT Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.45 sebagai berikut ini.

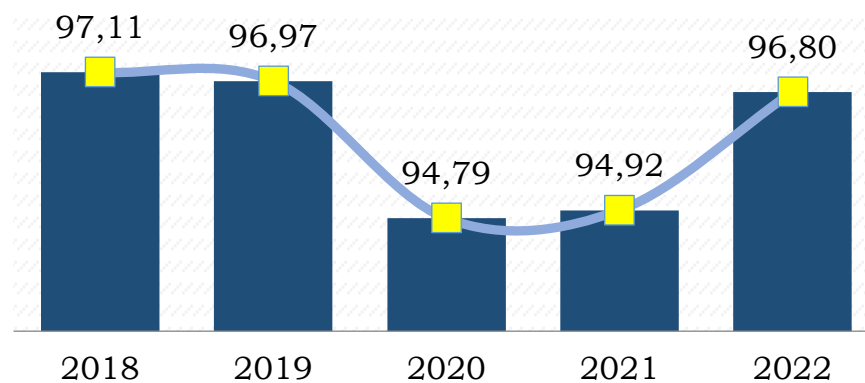


Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.45
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

10) Rasio Penduduk Yang Bekerja

Sejalan dengan persentase TPT yang meningkat dari Tahun 2018-2022, terhubung rasio penduduk Kabupaten Morowali yang bekerja yang berfluktuasi setiap Tahun. Hingga Tahun 2022 rasio penduduk yang bekerja sebesar 96,80 persen ditampilkan pada Gambar 2.46 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.46
Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

11) Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja

Jumlah PDRB ADHB Kabupaten Morowali sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp146.599,32 miliar, sedangkan PDRB ADHK 2010 sebesar Rp70.515,62 miliar, sedangkan untuk jumlah tenaga kerja di Kabupaten Morowali pada Tahun 2022 sebanyak 56.158 orang. Sehingga Laju pertumbuhan PDRB ADHB per tenaga kerja pada Tahun 2022 sebesar 261.047,97, sedangkan untuk laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 per tenaga kerja sebesar 125.566,47. Data mengenai laju pertumbuhan PDRB terhadap tenaga kerja di Kabupaten Morowali untuk periode Tahun 2018-2022 terdapat pada Tabel 2.34 sebagai berikut.

Tabel 2.34
Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADH Berlaku	37.356.484,50	45.244.727,10	61.985.633,20	98.916,81	146.599,32
PDRB ADH Konstan	28.358.401,60	34.085.704,80	43.947.504,40	55.001,24	70.515,62
Jumlah TK	49.747,00	52.354,00	54.721,00	54.998,00	56.158,00
Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja:					
PDRB ADH Berlaku	75.092,94	86.420,76	113.275,77	179.855,29	261.047,97
PDRB ADH Konstan	57.005,25	65.106,21	80.311,95	100.005,89	125.566,47

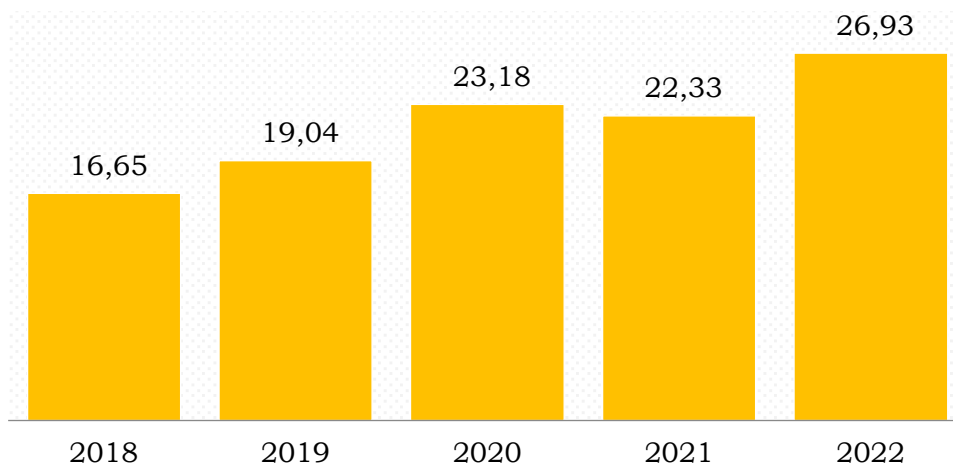
Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

12) Persentase PAD terhadap pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran berkenaan. Pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan asli daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

PAD Kabupaten Morowali periode Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan sangat signifikan yakni sebesar 198,17 persen. Pada Tahun 2018 sebesar Rp181.232.941.457,03 naik menjadi Rp394.951.348.983,00 Tahun 2022. Peningkatan ini dampak dari aktivitas pertambangan di Kabupaten Morowali. Peningkatan tersebut kemudian meningkatkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah setiap Tahun dalam APBD Kabupaten Morowali. Tahun 2018 proporsi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 16,65 persen, meningkat hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 19,04 persen. Dilihat dari tingkat rasio kemandirian keuangan daerah, dengan proporsi sebesar 19,04 persen selanjutnya pada tahun 2020 persentase PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 23,18 persen. Meningkat setiap

tahun sampai dengan tahun 2022 mencapai 26,93 persen. Dimana angka rasio kemandirian Kabupaten Morowali dalam kategori **tinggi** yang disajikan data pada Gambar 2.47 berikut ini.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2018-2022

Gambar 2.47
Persentase PAD Terhadap Pendapatan
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

13) Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Data perkembangan opini audit BPK atas LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.35 sebagai berikut.

Tabel 2.35
Opini Audit BPK Atas LKPD
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Tahun	Opini BPK
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Tahun	Opini BPK
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Menunggu Opini BPK

Sumber: BPK Perwakilan Sulawesi Tengah 2018-2022

Kabupaten Morowali memantapkan komitmen untuk mencapai hasil terbaik dalam penerapan *good governance* pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini berhasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tahun 2017 Kabupaten Morowali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian Tahun 2018-2021 meraih opini WTP. Untuk tahun 2022 masih menunggu hasil pemeriksaan BPK. Dengan pencapaian ini Pemerintah Kabupaten Morowali berharap dapat menjadikan informasi dalam LKPD sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan putusan pengelolaan keuangan, sehingga dari LKPD saat ini dapat dinilai kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

14) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Sektor ini mencakup Sub-kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sub-kategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sub-kategori Perikanan. Sub-kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Perikanan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Sektor ini di sebagian besar daerah Kabupaten/Kota menjadi sektor dengan kontribusi terbesar dalam meningkatkan perekonomian daerah setempat. Namun, kondisi tersebut tidak terjadi di Kabupaten Morowali.

Merujuk data pada Tabel 2.36 di bawah ini diketahui bahwa, kontribusi Sektor Pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Morowali dalam periode Tahun 2018-2022 mengalami penurunan setiap Tahunnya baik untuk PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010. Kontribusi sektor ini Tahun 2018, sebesar 5,48 persen untuk PDRB ADHB dan 4,98 persen PDRB ADHK 2010. Terus menurun setiap Tahunnya sampai Tahun 2022 kontribusi sektor ini sudah turun menjadi sebesar 1,46 persen untuk ADHB dan 2,05 persen untuk PDRB ADHK 2010. Penurunan kontribusi sektor ini menjadi indikator bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah tepat dan cepat dalam menyelamatkan sektor ini ke depan antara lain meningkatkan nilai tambah (*value added*), kualitas produksi dan penggunaan teknologi. Tahun 2022 terus menurun hingga sangat rendah menjadi sebesar 1,46

persen PDRB ADHB dan sebesar 2,05 persen untuk PDRB ADHK 2010 disajikan pada Tabel 2.36 sebagai berikut ini.

Tabel 2.36
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	37.356.484,50	45.244.727,10	61.985.633,20	98.779,81	146.599,32
- ADHK 2010	28.358.401,60	34.085.704,80	43.947.504,40	54.916,24	70.515,62
Nilai PDRB Sektor Pertanian (Rp)					
- ADHB	2.049.001,70	2.063.374,20	2.023.944,10	2.147,50	2.147,50
- ADHK 2010	1.411.278,90	1.437.272,30	1.397.644,00	1.442,50	1.442,50
Kontribusi Sektor (%)					
- ADHB	5,48	4,56	3,27	2,17	1,46
- ADHK 2010	4,98	4,22	3,18	2,63	2,05

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

15) Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 menunjukkan penurunan setiap Tahun. Hal tersebut di tunjukan dari persentase kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Morowali. Dimana Tahun 2018 kontribusi sektor ini sebesar 0,30 persen PDRB ADHB menurun hingga Tahun 2021 menjadi sebesar 0,001 persen. Sedangkan untuk kontribusi PDRB ADHK 2010 di Tahun sebesar 0,26 persen, menurun hingga Tahun 2021 menjadi sebesar 0,15 persen. Persentase kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB mengalami penurunan. Selanjutnya nilai dari Sektor Pertanian Palawija di Tahun 2022 sebesar Rp133.186,05 juta untuk PDRB ADHB dan sebesar Rp80.715,77 PDRB ADHK 2010 yang terdapat pada Tabel 2.37 sebagai berikut ini.

Tabel 2.37
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2021
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	37.356.484,50	45.244.727,10	61.985.633,20	98.779.810,00	146.599.320,00
- ADHK 2010	28.358.401,60	34.085.704,80	43.947.504,40	54.916.240,00	70.515.620,00
Nilai PDRB Sektor Pertanian (Palawija) (Rp)					
- ADHB	111.855,35	122.510,75	133.166,15	133.176,10	133.186,05
- ADHK 2010	72.766,06	76.735,38	80.704,71	80.710,15	80.715,77

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2021
Kontribusi Sektor (%)					
- ADHB	0,30	0,27	0,21	0,001	0,001
- ADHK 2010	0,26	0,23	0,18	0,15	0,11

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

16) Produksi Sektor Pertanian

Produksi tanaman padi sawah sebesar 44.672,00 ton pada Tahun 2019. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 10,36 persen jika dibandingkan produksi tanaman padi pada Tahun 2018 yaitu sebesar 40.477,00 ton. Produksi tanaman padi mengalami penurunan Tahun 2020 sebesar 42.068,22 ton dan Tahun 2021 produksi sebesar 45.434,34 Ton, menurun pada tahun 2022 menjadi 39.507,32 ton.

Untuk tanaman jagung jumlah produksi tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 7.083,00 ton, sementara pada Tahun 2019 hanya sebesar 5.283,00 ton menurun dari Tahun sebelumnya, selanjutnya pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 1.865,00 ton. Sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1.865,00 ton.

Tanaman Ubi Kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau, menurun produksi selama periode Tahun 2018-2022. Penurunan produk-si ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan kondisi Kabupaten Morowali sebagai daerah industri tambang yang semakin padat penduduk dan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang masuk dari berbagai daerah. Sehingga kebutuhan ketersediaan pangan juga semakin meningkat. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang dan kesempatan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani di Kabupaten Morowali disajikan pada Tabel 2.38 sebagai berikut ini.

Tabel 2.38
Produksi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Jenis Tanaman	Tahun (Ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Padi	40.477,00	44.672,00	42.068,22	45.434,34	39.507,32
Jagung	7.083,00	5.283,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
Ubi Kayu	4.298,00	4186	4.186,00	4.186,00	4.186,00
Ubi Jalar	644,00	775	775,00	775,00	775,00
Kacang Tanah	62,00	56	56,00	56,00	56,00
Kacang Kedelai	1.924,00	46	127,00	127,00	127,00

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

17) Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Subkategori tanaman perkebunan terdiri dari perkebunan semusim dan perkebunan Tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lain sampai kegiatan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Pada Tahun 2022 Nilai Sektor Perkebunan berdasarkan PDRB ADHB sebesar Rp652.916,52 miliar, kemudian untuk nilai PDRB ADHK 2010 sebesar Rp465.019,89 miliar. Sementara itu, untuk kontribusi sektor ini terhadap nilai PDRB ADHB Kabupaten Morowali sebesar 0,45 persen menurun dari Tahun sebelumnya. Sedangkan untuk PDRB ADHK 2010 sebesar 0,66 persen juga menurun dari Tahun sebelumnya disajikan pada Tabel 2.39 sebagai berikut ini.

Tabel 2.39
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	37.356.484,50	45.244.727,10	61.985.633,20	98.779.810,00	146.599.320,00
- ADHK 2010	28.358.401,60	34.085.704,80	43.947.504,40	54.916.240,00	70.515.620,00
Nilai PDRB Sektor Perkebunan (Rp)					
- ADHB	627.095,85	640.004,72	652.913,58	652.913,35	652.916,52
- ADHK 2010	463.514,08	464.267,29	465.020,50	465.019,60	465.019,89
Kontribusi Sektor (%)					
- ADHB	1,68	1,41	1,05	0,66	0,45
- ADHK 2010	1,63	1,36	1,06	0,85	0,66

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

18) Produksi Sektor Perkebunan

Tanaman perkebunan yang memiliki jumlah produksi besar yakni Kelapa, Kelapa Sawit, Kopi, dan kakao. Produksi tanaman perkebunan mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya kecuali Kopi. Produksi Kelapa Tahun 2018 sebesar 1.176,00 ton menurun hingga Tahun 2020 menjadi 1.163,23 ton, dan menurun kembali ditahun 2022 sebesar 733,49 ton. Selanjutnya, Kelapa Sawit Tahun 2018 sebesar 83.538,00 ton dan meningkat sangat signifikan hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 76.096,25 ton. Kemudian untuk Kopi jumlah produksi di Tahun 2018 sebesar 49.923,00 ton, menurun menjadi sebesar 33.626,00 ton. Tanaman Kakao juga mengalami penurunan produksi. Tahun 2018 sebesar 3.079,05 ton menjadi 1.727,75 ton pada tahun 2022. Data mengenai produksi Sektor Perkebunan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 pada Tabel 2.40 sebagai berikut ini.

Tabel 2.40
Produksi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun (Ribuan Ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kelapa	1.176,00	1.239,35	1.163,23	739,35	733,49
Kelapa Sawit	83.538,00	78.362,45	80.148,90	74.092,52	76.096,25
Kopi	49.923,00	35.780,00	23.477,00	35.200,00	33.626,00
Kakao	3.079,05	1.554,21	6.971,70	2.400,00	1.727,75
Karet	1.640,00	-	-	2.400,00	2.400,00

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2018-2023 (diolah)

19) Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Sub-kategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran, termasuk adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Pada Tahun 2022, nilai produksi Sektor Kehutanan berdasarkan PDRB ADHB sebesar Rp73.585,14 miliar, dan berdasarkan PDRB ADHK 2010 sebesar Rp55.568,66 juta. Kontribusi sektor terkait terhadap nilai PDRB ADH Berlaku Kabupaten Morowali tahun 2022 sebesar 0,05 persen menurun dari Tahun 2018 sebesar 0,18 persen. Sedangkan untuk PDRB ADHK 2010 sebesar 0,08 persen Tahun 2022 juga menurun dari Tahun sebelumnya yang disajikan pada Tabel 2.41 sebagai berikut ini.

Tabel 2.41
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	37.356.484,50	45.244.727,10	61.985.633,20	98.779.810,00	146.599.320,00
- ADHK 2010	28.358.401,60	34.085.704,80	43.947.504,40	54.916.240,00	70.515.620,00
Nilai PDRB Sektor Kehutanan (Rp)					
- ADHB	66.290,01	69.931,62	73.573,22	73.579,18	73.585,14
- ADHK 2010	52.800,60	54.181,95	55.563,29	55.565,91	55.568,66
Kontribusi Sektor (%)					
- ADHB	0,18	0,15	0,12	0,07	0,05
- ADHK 2010	0,19	0,16	0,13	0,10	0,08

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

20) Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

Kategori Pertambangan dan Penggalan dirinci menjadi 4 (empat) subkategori, antara lain: sub-kategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi, sub-kategori Pertambangan Batubara dan Lignit, sub-kategori Pertambangan Bijih Logam, dan sub-kategori Pertambangan

dan Penggalian lainnya. Pada Tahun 2022, Nilai produksi Sektor pertambangan berdasarkan PDRB ADHB sebesar Rp25.349.780,00 miliar, dan berdasarkan PDRB ADHK Konstan 2010 sebesar Rp14.888.970,00 juta. Kontribusi sektor terkait terhadap nilai PDRB ADHB sebesar 18,33 persen pada Tahun 2022 menurun dari Tahun 2018 sebesar 17,29 persen. Sedangkan untuk PDRB ADHK 2010 sebesar 21,11 persen Tahun 2022 juga menurun dari Tahun 2018 dari sebesar 22,60 persen. Sektor pertambangan menjadi sektor andalan Kabupaten Morowali. Peran besar sektor ini berdampak besar pada perkembangan Kabupaten Morowali. Data kontribusi Sektor Pertambangan di Kabupaten Morowali periode Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.42 sebagai berikut ini.

Tabel 2.42
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	37.356.484,50	45.244.727,10	61.985.633,20	98.779.810,00	146.599.320,00
- ADHK 2010	28.358.401,60	34.085.704,80	43.947.504,40	54.916.240,00	70.515.620,00
Nilai PDRB Sektor Pertambangan (Rp)					
- ADHB	6.928.105,90	8.242.666,10	11.364.639,80	18.404.880,00	25.349.780,00
- ADHK 2010	6.408.961,50	7.676.333,50	10.317.359,70	12.701.490,00	14.888.970,00
Kontribusi Sektor (%)					
- ADHB	18,55	18,22	18,33	18,63	17,29
- ADHK 2010	22,60	22,52	23,48	23,13	21,11

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

21) Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kabupaten Morowali juga memiliki destinasi wisata yang indah, seperti Pulau Sombori. Pada Tahun 2022, nilai Sektor Pariwisata berdasarkan PDRB ADHB sebesar Rp89.469,19 miliar, dan untuk nilai PDRB ADHK 2010 sebesar Rp51.263,20 miliar. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB ADHB sebesar 0,06 persen dan untuk PDRB ADHK 2010 sebesar 0,07 persen yang terdapat pada Tabel 2.43 sebagai berikut ini.

Tabel 2.43
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	37.356.484,50	45.244.727,10	61.985.633,20	98.779.810,00	146.599.320,00
- ADHK 2010	28.358.401,60	34.085.704,80	43.947.504,40	54.916.240,00	70.515.620,00
Nilai PDRB Sektor Pariwisata (Rp)					

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
- ADHB	76.981,10	80.902,30	78.771,80	79.752,75	89.469,19
- ADHK 2010	53.812,20	55.404,10	53.704,00	46.574,85	51.263,20
Kontribusi Sektor (%)					
- ADHB	0,21	0,18	0,13	0,08	0,06
- ADHK 2010	0,19	0,16	0,12	0,08	0,07

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2018-2023 (diolah)

22) Kontribusi Sektor Kelautan Dan Perikanan Terhadap PDRB

Subkategori sektor perikanan dan kelautan meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun laun. Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Morowali sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Pada Tahun 2022, nilai Sektor Kelautan Dan Perikanan berdasarkan PDRB ADHB sebesar Rp1.026.025,38 miliar, dan berdasarkan PDRB ADHK 2010 sebesar Rp570.898,91 juta. Kontribusi sektor ini Tahun 2022 terhadap nilai PDRB ADHB sebesar 0,70 persen menurun dari Tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusi berdasarkan PDRB ADHK 2010 sebesar 0,81 persen juga lebih rendah dari Tahun sebelumnya yang disajikan pada Tabel 2.44 sebagai berikut ini.

Tabel 2.44

Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	37.356.484,50	45.244.727,10	61.985.633,20	98.779.810,00	146.599.320,00
- ADHK 2010	28.358.401,60	34.085.704,80	43.947.504,40	54.916.240,00	70.515.620,00
Nilai PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan (Rp)					
- ADHB	881.007,15	953.504,90	1.026.002,66	1.026.015,05	1.026.025,38
- ADHK 2010	569.572,17	570.226,97	570.881,76	570.891,88	570.898,91
Kontribusi Sektor (%)					
- ADHB	2,36	2,11	1,66	1,04	0,70
- ADHK 2010	2,01	1,67	1,30	1,04	0,81

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

23) Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kategori ini terdiri atas subsektor diantaranya Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2022 Nilai Sektor Perdagangan berdasarkan PDRB ADHB sebesar Rp1.832.170,00 juta, dan untuk PDRB ADHK 2010 sebesar Rp1.042.810,00 juta. Kontribusi sektor ini Tahun 2022 terhadap nilai PDRB ADHB sebesar 1,25 persen menurun dari Tahun sebelumnya. Sedangkan untuk PDRB ADHK 2010 sebesar 1,48 persen juga menurun dari Tahun sebelumnya yang disajikan pada Tabel 2.45 berikut ini.

Tabel 2.45
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	37.356.484,50	45.244.727,10	61.985.633,20	98.779.810,00	146.599.320,00
- ADHK 2010	28.358.401,60	34.085.704,80	43.947.504,40	54.916.240,00	70.515.620,00
Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Rp)					
- ADHB	893.433,00	960.770,50	949.451,70	1.065.440,00	1.832.170,00
- ADHK 2010	603.127,20	620.626,90	589.746,00	642.840,00	1.042.810,00
Kontribusi Sektor (%)					
- ADHB	2,39	2,12	1,53	1,08	1,25
- ADHK 2010	2,13	1,82	1,34	1,17	1,48

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

24) Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kategori ini terdiri dari subsektor diantaranya Industri Batubara dan Pengilangan Migas; Industri Makanan dan Minuman; Industri Pengolahan Tembakau; Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; Industri Barang Galian bukan Logam; Industri Logam Dasar; Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik; Industri Mesin dan Perlengkapan; Industri Alat Angkutan; Industri Furnitur Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Sektor Industri sebagai sektor dengan nilai dan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Morowali. Aktivitas industri logam dasar yang besar di PT. IMIP menjadi aktivitas sentra dari sektor ini di Kabupaten Morowali. Perkembangan kontribusi sektor ini juga

mengalami pening-katan setiap Tahunnya. Pada tahun 2022 Nilai Sektor Industri berdasarkan PDRB ADHB sebesar Rp107.299.770,00 miliar, dan untuk nilai PDRB ADHK 2010 sebesar Rp47.464.370,00 juta. Pada Tahun 2022 kontribusi Sektor Industri terhadap nilai PDRB ADHB sebesar 73,19 persen meningkat dari Tahun 2018 sebesar 62,81 persen. Sedangkan untuk PDRB ADHK 2010 sebesar 67,31 persen Tahun 2022 juga meningkat dari Tahun 2018 sebesar 60,54 persen. Sektor industri menjadi salah satu sektor primadona Kabupaten Morowali. Peran besar sektor ini berdampak besar pada perkembangan dan kemajuan ekonomi di Kabupaten Morowali yang disajikan pada Tabel 2.46 sebagai berikut ini.

Tabel 2.46
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	37.356.484,50	45.244.727,10	61.985.633,20	98.779.810,00	146.599.320,00
- ADHK 2010	28.358.401,60	34.085.704,80	43.947.504,40	54.916.240,00	70.515.620,00
Nilai PDRB Sektor Industri (Rp)					
- ADHB	23.463.411,70	29.346.699,60	43.380.510,20	70.356.850,00	107.299.770,00
- ADHK 2010	17.168.966,60	21.289.184,50	28.893.186,60	35.981.450,00	47.464.370,00
Kontribusi Sektor (%)					
- ADHB	62,81	64,86	69,98	71,23	73,19
- ADHK 2010	60,54	62,46	65,74	65,52	67,31

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

25) Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

Keberadaan industri kecil (*small industry*) atau kerajinan rumah tangga (*homeindustry*) ini menempati peran yang penting dan strategis dalam pembangunan, karena dapat memberikan corak dan warna terhadap usaha-usaha pembangunan pertanian, kepariwisataan, dan tingkat urbanisasi serta meningkatkan pendapatan masyarakat Data mengenai kontribusi industri rumah tangga terhadap nilai PDRB Sektor industri Kabupaten Morowali untuk Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.47 berikut ini.

Tabel 2.47
Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap Sektor PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB Sektor Industri (Juta Rp)					
- ADHB	37.356.484,50	45.244.727,10	61.985.633,20	98.779.810,00	146.599.320,00

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
- ADHK 2010	28.358.401,60	34.085.704,80	43.947.504,40	54.916.240,00	70.515.620,00
Nilai PDRB Sektor Industri Rumah Tangga (Rp)					
- ADHB	1.416.984,30	1.573.672,86	1.730.361,43	1.887.050,00	2.043.738,56
- ADHK 2010	830.451,60	874.055,87	917.660,15	961.264,43	1.004.868,70
Kontribusi Sektor (%)					
- ADHB	3,79	3,48	2,79	1,91	1,39
- ADHK 2010	2,93	2,56	2,09	1,75	1,43

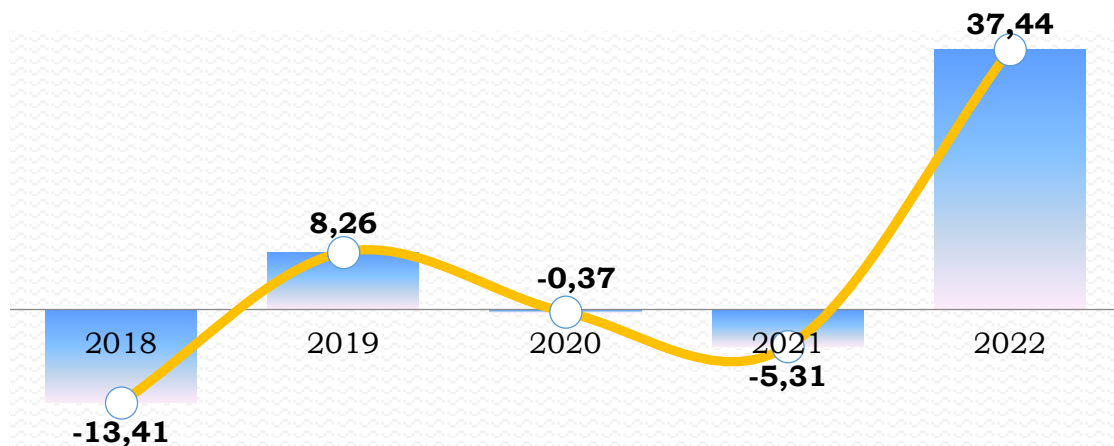
Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Merujuk data pada Tabel 2.47 di atas, ditahun 2022 nilai sektor Industri Rumah Tangga PDRB ADHB sebesar Rp2.043.738,56 miliar, kemudian untuk nilai Sektor Industri Rumah Tangga ADH Konstan 2010 sebesar Rp1.004.868,70 miliar. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB ADHB sebesar 1,39 persen menurun dari Tahun sebelumnya dan untuk kontribusi sektor industri PDRB ADH Konstan 2010 sebesar 1,43 persen.

26) Pertumbuhan Industri

Morowali telah berubah, menjadi *Sulawesi Mining Industry* di wilayah Kabupaten Sulawesi Tengah selama beberapa Tahun terakhir telah menjadi kawasan pertambangan bouksit dan nikel terbesar keenam di dunia (*menurut US Geological Survey*). Para pakar pertambangan memperkirakan Morowali mempunyai prospek kegiatan industri yang luar biasa besar karena di bawah tanahnya tersedia materi *lithium* 40 persen dari produksi *lithium* dunia.

Pertumbuhan industri diukur dari jumlah industri setiap Tahun di Kabupaten Morowali. Merujuk pada data yang dipublikasi oleh BPS, diketahui pertumbuhan industri di Kabupaten Morowali cenderung naik dan berfluktuatif. Tahun 2018 pertumbuhan Industri sebesar minus 13,41 persen, kemudian meningkat Tahun 2019 meningkat menjadi 8,26 persen, kemudian pada tahun 2020 pertumbuhan industri di Kabupaten Morowali mengalami penurunan atau bahkan berkurang dari tahun sebelumnya yakni sebesar 0,37%. Ditahun 2022 industri di Kabupaten Morowali meningkat sebesar 37,44 persen. Meski, pertumbuhan jumlah industri tidak stabil, namun nilai produksi dan kontribusi Sektor Industri di Kabupaten morowali selalu meningkat setiap Tahun. Hal ini dikarenakan industri yang terdapat di Kabupaten Morowali adalah industri besar yang tetap beroperasi. Data mengenai pertumbuhan industri di Kabupaten morowali terdapat pada Gambar 2.48 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.48
Pertumbuhan Industri (%)
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

27) Pertumbuhan Investasi terhadap PDB

Pertumbuhan produksi pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan (pertumbuhan) faktor-faktor produksinya (modal, tenaga kerja, tanah, dan teknologi). Analisis terhadap pertumbuhan ekonomi dihubungkan dengan perkembangan faktor-faktor produksi. Salah satu metode yang dikembangkan untuk menghubungkan pertumbuhan faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi (output) adalah *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). ICOR adalah suatu konsep yang menghubungkan besarnya pembentukan modal tetap domestik bruto (inves-tasi) dengan pertambahan PDB atau PDRB.

Banyak studi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara erat kaitan dengan tingkat produktivitas penggunaan modal, sehingga penggunaan ICOR untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan faktor produksi modal dapat dipertanggung jawabkan. Di samping itu, ICOR dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat efisiensi suatu perekonomian dalam menggunakan barang modal. Semakin rendah ICOR berarti perekonomian tersebut semakin efisien dalam menggunakan barang modal.

ICOR dapat pula menunjukkan kecenderungan penggunaan metode produksi (padat karya atau padat modal) dalam suatu perekonomian. Penggunaan metode produksi padat modal akan cenderung menyebabkan nilai ICOR menjadi tinggi. Faktor lainnya yang turut mempengaruhi ICOR adalah periode tenggang waktu (*time lag*) antara saat melakukan investasi dengan saat berproduksi. Tenggang waktu yang terlalu lama antara saat investasi dengan saat berproduksi juga dapat membuat nilai ICOR menjadi tinggi. Data mengenai nilai investasi,

pertumbuhan ekonomi, dan ICOR Kabupaten Morowali selama periode 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.48 sebagai berikut ini.

Tabel 2.48
Investasi, Pertumbuhan PDRB dan ICOR
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB (ADHK 2010) - Miliar Rp	28.358,00	34.086,00	43.948,00	54.916,24	70.515,62
Perubahan - Miliar Rp	14.994,00	5.728,00	9.862,00	10.968,24	15.599,38
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	8.076,00	11.788,00	10.174,00	54.683,10	54.683,10
ICOR	0,54	2,06	1,03	4,99	3,51

Sumber: PDRB Kabupaten Morowali Menurut Pengeluaran Tahun 2023

Pengaruh investasi terhadap perubahan PDRB yang relatif kecil tersebut juga dapat diamati melalui nilai ICOR yang dapat dikatakan sangat baik Tahun 2018 yakni sebesar 0,54. Namun, setelah Tahun 2018 nilai ICOR Kabupaten Morowali cenderung menurun hingga Tahun 2020 sebesar 1,03. Meningkat ditahun 2021 sebesar 4,99 persen, dan di tahun 2022 di angka 3,51 persen, Kondisi menunjukan tingkat dibutuhkan nilai investasi yang lebih besar untuk menaikkan/menambah satu unit output baik secara fisik maupun secara nilai (uang).

ICOR Kabupaten Morowali selama periode Tahun 2018-2022 yang dapat dikatakan cukup tinggi tersebut disebabkan, kegiatan penanaman modal di Kabupaten Morowali yang dominan pada sektor pertambangan dengan kebutuhan modal relatif besar bersifat jangka panjang, belum dapat memproduksi secara optimal pada periode awal kegiatan investasi. Namun demikian, di masa depan ketika kegiatan penanaman modal yang dilakukan telah mampu menghasilkan nilai produksi secara optimal, diyakini akan menghasilkan nilai ICOR yang semakin menurun.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kabupaten Morowali dikenal sebagai daerah yang memiliki khazanah budaya yang kaya dan melimpah bersumber dari nilai, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, seni, dan bahasa yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kekayaan budaya tersebut tidak cukup hanya untuk dilestarikan, tapi juga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan.

Untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan, serta tata kelola pembangunan yang efektif dan efisien. Ekosistem kebudayaan

merupakan jejaring kebudayaan yang saling membangun antara pelaku, pengguna, infrastruktur, lingkungan dan unsur kebudayaan lainnya. Saat ini ekosistem kebudayaan belum berjalan dengan optimal. Masyarakat dan pelaku budaya belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Morowali.

Selain aspek kebudayaan, fokus pembangunan manusia di Kabupaten Morowali dengan memajukan aspek olahraga. Fokuem pembangunan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia Kabupaten Morowali yang berkualitas dan berdaya saing.

2.2.3.1 Seni Budaya

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Pengembangan kebudayaan pada dasarnya merupakan upaya dalam rangka mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh, berbudi luhur, toleran dan berakhlak mulia. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan keragaman budaya, revitalisasi dan pelestarian seni budaya.

Kata seni dan budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan, karena pada setiap seni pasti mempunyai kebudayaan yang khas. Begitu juga sebaliknya, pada setiap kebudayaan pasti mempunyai nilai seni yang begitu indah dan tidak ternilai harganya. Seni Budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Morowali harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Mengingat Kabupaten Morowali sebagai kawasan industri yang sangat besar, akan menarik banyak manusia untuk bekerja dan mencari kehidupan di Kabupaten morowali. Untuk itu penanaman nilai-nilai budaya Bungku harus terus digalakkan agar Kabupaten Morowali yang kaya akan seni budaya dapat di lestarikan. Jumlah group kesenian di Kabupaten Morowali s/d Tahun 2022 sebanyak 17 kelompok, sedangkan untuk gedung kesenian terdapat 1 gedung yang di dimanfaatkan sebagai lokasi pertunjukan seni di Kabupaten Morowali. Gambaran capaian fokus pembangunan seni budaya di Kabupaten Morowali pada Tabel 2.49

sebagai berikut.

Tabel 2.49
Jumlah Group Kesenian dan Gedung Kesenian Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Group Kesenian	17	17	17	17	17
2	Jumlah Gedung Kesenian	0	0	0	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Morowali, 2023

2.2.3.2 Olahraga

Pencapaian pembangunan bidang Olahraga di Kabupaten Morowali dapat dilihat berdasarkan indikator antara lain; 1) Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk dan 2) Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk, dan beberapa indikator lainnya terdapat pada Tabel 2.50 sebagai berikut.

Tabel 2.50
Jumlah Klub Olahraga dan Fasilitas Olahraga
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Klub Olahraga	14	14	12	14	14
2	Jumlah Gedung/Fasilitas Olahraga	391	391	390	391	391

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 2021 (diolah)

Jumlah klub olahraga di Kabupaten Morowali yang terdata hingga Tahun 2022 sebanyak 14 klub sedangkan untuk fasilitas olahraga sebanyak 391 unit. Prasarana dan sarana olahraga sangat penting keberadaannya untuk menunjang pembinaan dan pengembangan olahraga, khususnya olahraga prestasi. Prasarana dan sarana olahraga yang diperlukan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga sebaiknya memenuhi standar nasional atau bahkan Internasional.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan pemerintah daerah yang bersifat wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang berkaitan dengan kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi 6 (enam) Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali. Indikator kinerja pelaksanaan pembangu-

nan pada aspek pelayanan umum selama periode 2018-2022 disampaikan sebagai berikut.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh pada kondisi kemiskinan masyarakat, karena upaya memperoleh mata pencaharian yang lebih baik diperlukan pengetahuan dan *skill* yang baik. Dengan kata lain, tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pola hidup penduduk dalam suatu daerah. Saat ini masih terjadi kesenjangan yang masih cukup besar pada tingkat lulusan pendidikan sejumlah wilayah Keca-matan Bungku Selatan dan Menui Kepulauan di Kabupaten Morowali, di mana hanya kecamatan yang berada dekat dengan wilayah perkotaan atau wilayah pemerintahan yang spesifikasi pendidikan yang lebih baik, sedangkan sejumlah Kecamatan yang berada jauh di pelosok, relatif tingkat pendidikannya masih tergolong rendah. Kondisi ini tentunya membutuhkan strategi program pendidikan yang lebih menyentuh hingga ke daerah terpencil dan daerah terisolasi (terutama daerah kepulauan).

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memegang peranan yang penting bagi perkembangan seorang anak. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2019-2024 disebutkan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan keempat, yakni; “memastikan pendidikan bermutu yang inklusif dan berkesetaraan dan menyediakan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua”, secara spesifik mencantumkan kesetaraan akses terhadap layanan PAUD berkualitas sebagai sebuah indikator pembangunan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan akan pentingnya PAUD dalam pembangunan nasional, terkait dengan pembangunan SDM.

Dalam konteks ini, pembangunan pendidikan dipandang sebagai usaha sadar untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan perkembangan optimal dari potensi yang dibawa lahir peserta didik sejak dini. PAUD) sebagai bagian dari seluruh usaha sadar melaksanakan pembangunan manusia seutuhnya, sejak dekade terakhir telah memposisikan diri dalam membangun masyarakat Indonesia sebagai hal strategis. Dalam paradigma pendidikan kini, PAUD bukan lagi hanya terbatas pada konseling pendidikan anak usia dini oleh orang tuanya, sebagai bagian dari pendidikan informal, melainkan sudah mengalami perubahan signifikan. Paradigma PAUD kini mencakup usaha sadar dari seluruh masyarakat, sekolah, pemerintah dan berbagai lembaga swasta dalam melakukan tugas pendidikan. Saat ini, pendidikan anak usia dini

dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup luas, namun harus ditangani secara spesifik dan profesional. Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan yang diberikan pada anak sedini mungkin sejak anak dilahirkan ke dunia ini sampai lebih kurang anak berusia enam-delapan Tahun.

Pendidikan pada masa-masa ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak yang bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak, terutama orangtua dan atau orang dewasa lainnya yang berada dekat dengan anak. Secara konseptual, tujuan utama pendidikan anak usia dini dicirikan dari pembelajaran dengan prinsip belajar melalui bermain. Hal ini ditunjukkan dengan upaya seoptimal mungkin menumbuhkembangkan semua potensi anak yang dibawa sejak lahir. Proses pembelajaran pada anak usia dini diharapkan dapat mengembangkan kebermaknaan melalui pengalaman nyata yang bermanfaat bagi anak di kehidupan sehari-hari.

Gambaran kondisi pendidikan PAUD di Kabupaten Morowali menunjukkan bahwa jumlah sekolah PAUD cenderung berkurang. Dimana Tahun 2018 jumlah sekolah PAUD sebanyak 125 sekolah berkurang hingga Tahun 2020 menjadi 121 sekolah. Kemudian ditahun 2022 jumlah sekolah mencapai 127 sekolah. Selanjutnya untuk jumlah guru juga mengalami penurunan, Tahun 2018 jumlah sekolah sebanyak 291 orang, meningkat hingga Tahun 2022 menjadi 405 guru. Jumlah sekolah dan guru yang meningkat sejalan dengan jumlah siswa/murid yang bertambah setiap Tahunnya. Jumlah siswa PAUD Tahun 2018 sebanyak 4.669 orang, bertambah hingga Tahun 2022 menjadi 5.570 orang.

Selanjutnya rasio siswa terhadap jumlah sekolah meningkat dari Tahun 2018 sebesar 37,35 meningkat menjadi 43,86 pada tahun 2022. Hal yang sama juga terjadi pada rasio siswa/guru dari 16,04 Tahun 2018 meningkat menjadi 13,75 Tahun 2022. Kondisi ini terjadi dikarenakan tidak linearnya peningkatan jumlah siswa setiap Tahun, dengan jumlah sekolah dan guru yang justru menurun. Gambaran pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Morowali terdapat pada Tabel 2.51 sebagai berikut ini.

Tabel 2.51
Pendidikan Anak Usia Dini
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Sekolah	125	125	121	121	127
2	Jumlah Siswa	4.669	4.669	4.941	4.633	5.570
3	Jumlah Guru	291	318	355	360	405
	Rasio Sekolah	37,35	37,35	40,83	38,29	43,86

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Rasio Guru	16,04	14,68	13,92	12,87	13,75

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (data diolah)

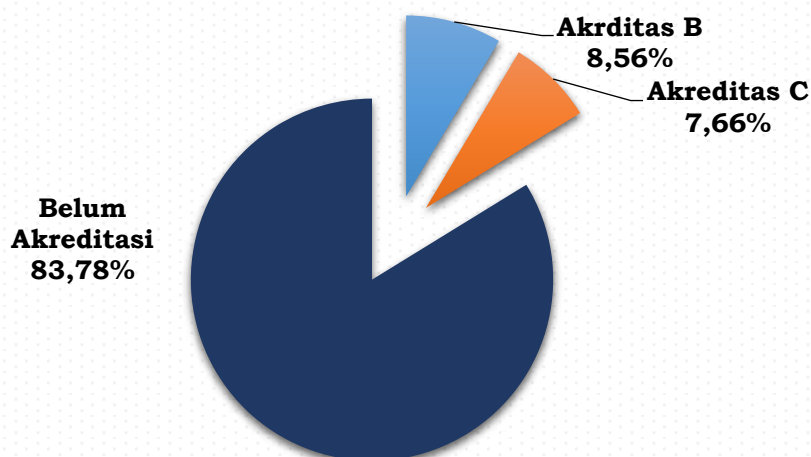
b. Akreditasi Sekolah di Kabupaten Morowali

Akreditasi sekolah merupakan cara untuk mengawasi upaya peningkatan mutu pendidikan. Mengantisipasi perubahan-perubahan yang berlangsung begitu cepat, serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, pendidikan menengah di Sulawesi Tengah harus berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan daya saing lulusan, serta produk-produk akademik lainnya. Akreditasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya.

Akreditasi ialah proses yang berkesinambungan dari evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan (*accreditation is a continuous process of self-evaluation, reflection, and improvement*). Dalam akreditasi terdapat kegiatan penilaian (*assessment*) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi dapat dipandang sebagai instrumen regulasi diri (*self-regulation*), dengan maksud agar sekolah dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri; dan berdasarkan atas pemahaman kekuatan dan kelemahan diri tersebut, sekolah dapat melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan (*quality continues improvement*). Akreditasi juga dapat dipandang sebagai hasil penilaian dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akreditasi sejatinya adalah suatu pengakuan formal yang diberikan oleh badan akreditasi terhadap kompetensi suatu lembaga atau organisasi.

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PAUD di Kabupaten Morowali sebagian besar masih belum terakreditasi yakni mencapai 83,76 persen, yang terakreditasi B sebesar 8,56 persen dan PAUD akreditasi C sebesar 7,66 persen yang disajikan pada Gambar 2.49 sebagai berikut ini.

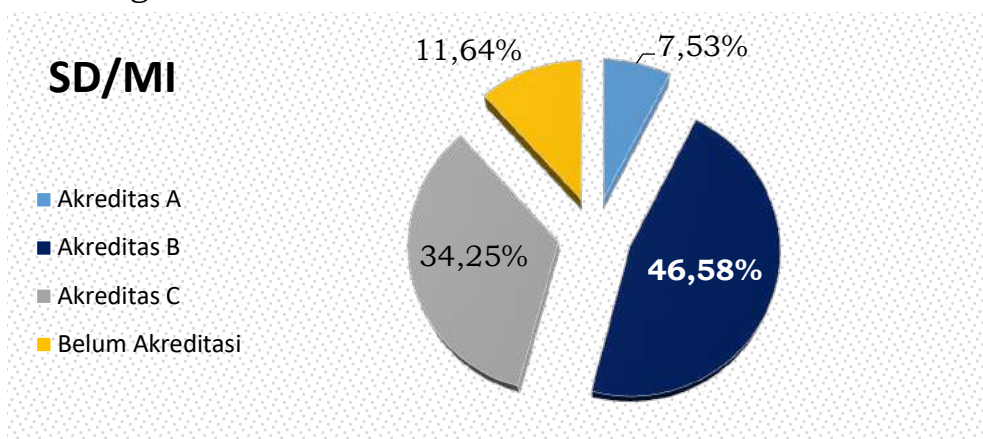


Sumber: Neraca Pendidikan Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Gambar 2.49
Akreditasi PAUD di Kabupaten Morowali
Tahun 2022

- Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs)

Akreditasi sekolah untuk jenjang pendidikan Dasar (SD/MI) menunjukan di Tahun 2022 sebagian besar sekolah yang ada di Kabupaten Morowali telah terakreditasi dengan rincian sekolah akreditasi A sebesar 7,53 persen, kemudian akreditasi B sebesar 46,58 persen dan akreditasi C sebesar 34,25 persen serta yang belum terakreditasi sebesar 8 persen yang disajikan pada Gambar 2.50 sebagai berikut.

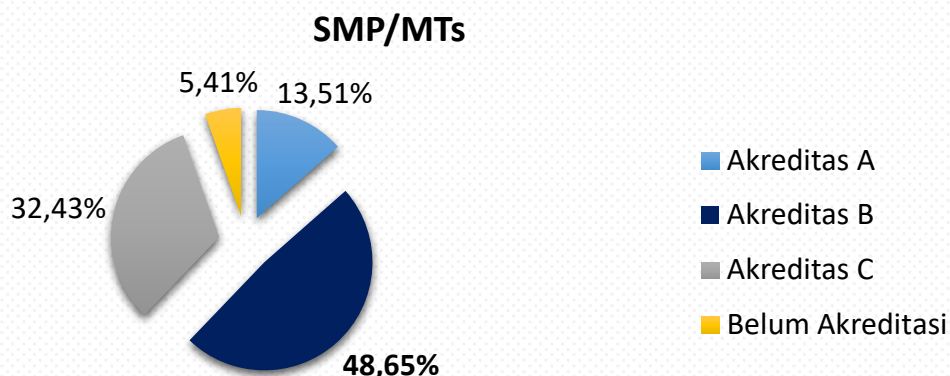


Sumber: Neraca Pendidikan Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Gambar 2.50
Akreditasi Jenjang Pendidikan SD/MI di Kabupaten Morowali
Tahun 2022

Selanjutnya untuk jenjang pendidikan SMP/MTs yang terakreditasi A sebesar 13,51 persen, kemudian takreditasi B sebesar 48,65 persen

dan yang terakreditasi C sebesar 32,43 persen. Namun yang masih belum terakreditasi sebesar 5,41 persen yang disajikan pada Gambar 2.51 sebagai berikut.

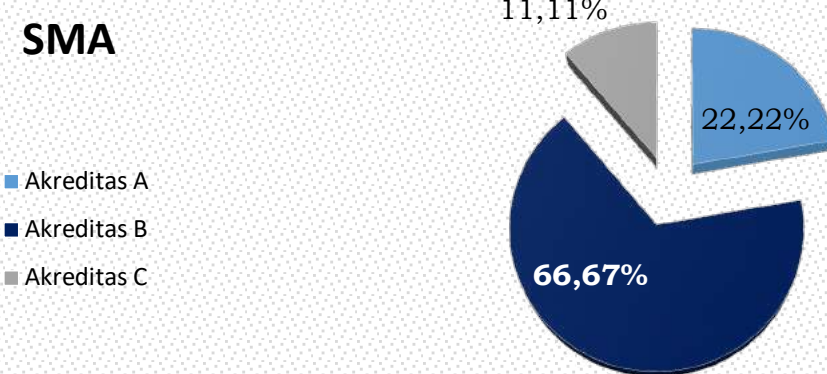


Sumber: Neraca Pendidikan Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Gambar 2.51
Akreditasi Jenjang Pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Morowali
Tahun 2022

- Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)

Berdasarkan gambar di bawah ini diketahui bahwa 100 persen SMA di Kabupaten Morowali terakreditasi. Tahun 2022 SMA terakreditasi A sebesar 22,22 persen, terakreditasi B sebesar 66,67 persen dan terakreditasi C sebesar 11,11 persen terdapat pada Gambar 2.52.

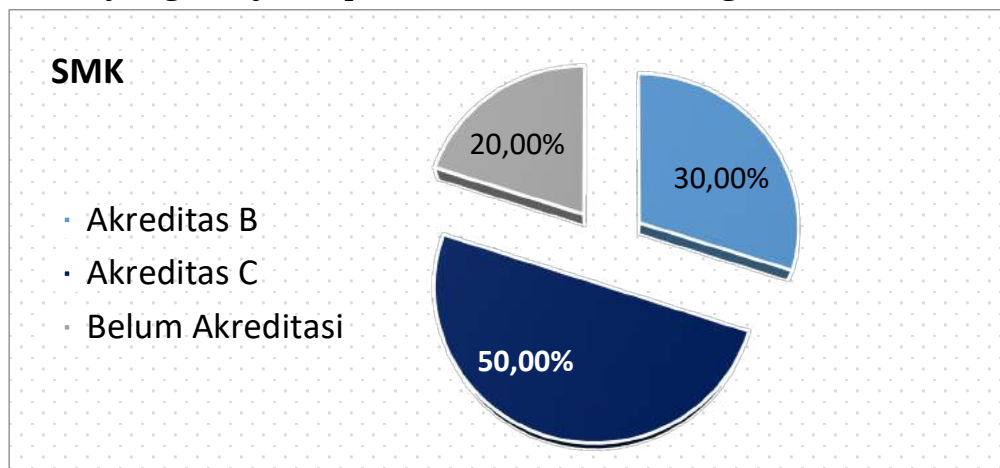


Sumber: Neraca Pendidikan Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Gambar 2.52
Akreditasi Jenjang Pendidikan Menengah SMA
di Kabupaten Morowali Tahun 2022

Selanjutnya untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagian besar terakreditasi C yakni sebesar 50,00 persen, terakreditasi B

sebesar 30,00 persen dan yang belum terakreditasi sebesar 20,00 persen yang disajikan pada Gambar 2.53 sebagai berikut ini.



Sumber: Neraca Pendidikan Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Gambar 2.53
Akreditasi Jenjang Pendidikan Menengah SMK di Kabupaten Morowali Tahun 2022

c. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Jika jumlah populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK jenjang tersebut akan lebih dari 100. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya siswa yang masuk suatu jenjang sekolah terlalu dini dibandingkan usianya, atau sebaliknya, lebih lambat dibandingkan usianya, serta adanya pengulangan kelas oleh siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Gambaran APK semua jenjang pendidikan di Kabupaten Morowali dijelaskan berikut ini.

- Pendidikan Dasar (SD/MI)

APM jenjang pendidikan SD/MI Kabupaten Morowali mengalami peningkatan namun berfluktuatif, hal ini ditunjukkan pada Tahun 2018 APM SD/MI Kabupaten Morowali sebesar 106,66 persen. Namun meningkat hingga Tahun 2019 menjadi 121,33 persen, dan menurun ditahun 2020 sebesar 108,95 persen, kemudian pada tahun 2022 sebesar 109,40. Capaian Kabupaten Morowali Tahun 2022 tersebut cukup jauh di atas rata-rata nasional sebesar 106,27 dan juga rata-rata

Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 103,55 yang disajikan pada Tabel 2.52 sebagai berikut ini.

Tabel 2.52
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar (SD/MI)
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional
Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI					
Morowali	106,66	121,33	108,95	109,42	109,40
Sulawesi Tengah	105,28	105,13	103,95	103,68	103,55
Nasional	103,54	103,50	106,32	106,20	106,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2019-2023

APK pada jenjang pendidikan SD/ sederajat melebihi angka 100 persen yang menunjukkan bahwa usia anak yang mengenyam pendidikan dasar masih ada yang berada di luar kelompok umur 7-12 Tahun. Dengan kata lain, murid SD yang bersekolah lebih banyak dibandingkan jumlah anak pada usia 7-12 Tahun. Banyak hal bias menjadi alasan, antara lain beberapa orang tua terkadang mendaftarkan anaknya yang belum mencapai usia 7 Tahun langsung ke sekolah dasar tanpa melewati PAUD terlebih dahulu, angka mengulang kelas yang masih tinggi, dan sebagainya. Semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APK juga akan semakin rendah. Selanjutnya capaian APK jenjang pendidikan SD/MI Kabupaten Morowali dan kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.54 sebagai berikut ini.



Sumber: APK, APM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

Gambar 2.54
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Berdasarkan Gambar 2.54 di atas, maka diketahui APK jenjang pendidikan SD/MI Kabupaten Morowali di Tahun 2022 berada pada urutan tertinggi kedua dari 13 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Tertinggi pertama adalah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan APK SD/MI sebesar 110,21, dan tertinggi ketiga Kabupaten Buol dan disusul Kabupaten Tojo Una-Una, lalu disusul Kota Palu dan Kabupaten Banggai. Sedangkan Kabupaten dengan APK SD/MI terendah adalah Kabupaten Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Tolitoli serta Kabupaten Morowali Utara.

- Pendidikan Dasar (SMP/MTs)

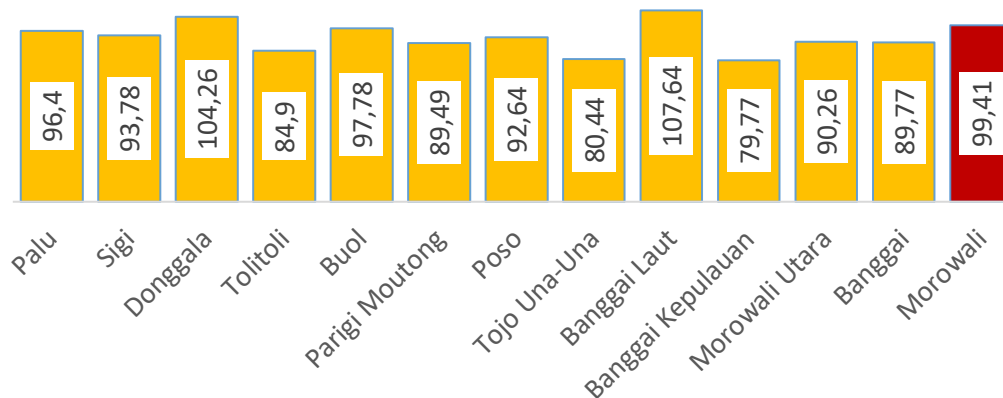
APK jenjang pendidikan SMP/MTs Kabupaten Morowali dari Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Tahun 2018 APK jenjang pendidikan SMP/MTs masih dibawah 100. Namun Tahun 2019 meningkat di atas 100 yakni sebesar 105,13 persen, dan ditahun 2020 sebesar 103,84 persen. Hingga tahun 2022 sebesar 99,41 persen menurun dari tahun sebelumnya. APK pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Tahun 2022 dibawah angka 100 persen yang menunjukkan bahwa usia anak yang mengenyam pendidikan dasar masih terdapat yang berada di luar kelompok umur 13-15 Tahun. Capaian Tahun 2022 tersebut di atas rata-rata capaian Nasional dan Provinsi yakni masing-masing sebesar 92,11 dan 92,86 persen. Secara detail terdapat pada Tabel 2.53 sebagai berikut ini.

Tabel 2.53
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar (SMP/MTs)
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional
Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SMP/MTs					
Morowali	94,66	105,13	103,84	102,31	99,41
Sulawesi Tengah	92,88	90,63	91,98	93,17	92,86
Nasional	100,86	101,32	92,06	92,80	92,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2019-2023

Selanjutnya, capaian Kabupaten Morowali jika dibandingkan dengan kondisi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukan bahwa APK jenjang pendidikan SMP/MTs yang tertinggi adalah Kabupaten Banggai Laut sebesar 107,64, dan Kabupaten Donggala sebesar 104,26, dan Kabupaten Morowali sebesar 99,41. Sedangkan Kabupaten dengan APK SMP/MTs terendah adalah Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 80,44, dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 79,77. Data terkait dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: APK, APM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

Gambar 2.55
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

- Pendidikan Menengah

Kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Namun capaian tersebut perlu untuk dianalisis capaian. Merujuk pada Tabel 2.54 di bawah ini, dapat dijelaskan APK pendidikan Menengah di Kabupaten Morowali sebesar 98,22 persen di Tahun 2022, berada di atas rata-rata secara Nasional sebesar 85,49 persen dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 87,99 persen. Dilihat dari kurun waktu 2018-2022, APK pendidikan menengah Kabupaten Morowali cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan dari capaian Tahun 2018 sebesar 82,52 dan Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 103,50, dan ditahun 2020 menurun menjadi 81,03 persen, ditahun 2021 meningkat menjadi 98,22 persen serta ditahun 2022 signifikan meningkat menjadi 98,22 persen, yang disajikan pada Tabel 2.54 sebagai berikut ini.

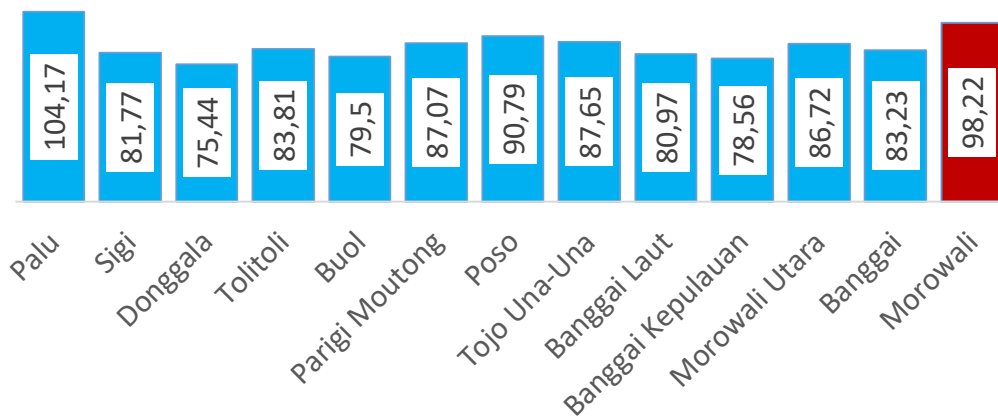
Tabel 2.54
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional
Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SMA/SMK/MA					
Morowali	82,52	103,50	81,03	83,39	98,22
Sulawesi Tengah	83,53	87,35	88,42	88,06	87,99

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	88,55	92,92	84,53	85,23	85,49

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Selanjutnya capaian APK SMA/SMK/MA kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa APK jenjang pendidikan SMA/SMK/ MA tertinggi adalah Kota Palu sebesar 104,17, Kabupaten Kabupaten Morowali sebesar 98,22 dan Kabupaten Poso sebesar 90,76. Sedangkan Kabupaten Morowali berada urutan kedua di antara kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, kabupaten dengan APK terendah adalah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Buol yang disajikan pada Gambar 2.56 sebagai berikut ini.



Sumber: APK, APM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

Gambar 2.56
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

d. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah. Tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Morowali di Tahun 2022 mencapai 100 persen untuk semua jenjang pendidikan ditampilkan pada Tabel 2.55 sebagai berikut ini.

Tabel 2.55
Angka Pendidikan Yang ditamatkan Tahun 2018-2022
Kabupaten Morowali

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	100	100	100	100	100

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
2	SMP/MTS	100	100	100	100	100
3	SMA/SMK/MA	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021 (diolah)

e. Angka Partisipasi Murni

APM mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Sehingga APM dapat juga digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalani oleh penduduk tersebut saat ini. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Secara umum dalam rentang Tahun 2018-2022, Perkembangan APM SD/MI di Kabupaten Morowali terus menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, yaitu masing-masing sebesar 94,66 Tahun 2018; dan sebesar 94,79 Tahun 2019 dan ditahun 2020 sebesar 94,72, tahun 2021 meningkat sebesar 95,07 persen, kemudian menurun ditahun 2022 menjadi 93,67 persen. Capaian APM ini menunjukkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Morowali akan pentingnya sekolah pada jenjang Pendidikan SD/Sederajat, namun sedikit mengalami penurunan. Selanjutnya, capaian Kabupaten Morowali Tahun 2022 lebih baik dari capaian rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, namun lebih rendah dari rata-rata capaian Nasional. Dimana capaian Sulawesi Tengah sebesar 93,25 dan Nasional sebesar 97,88 persen yang terdapat pada Tabel 2.56 sebagai berikut ini.

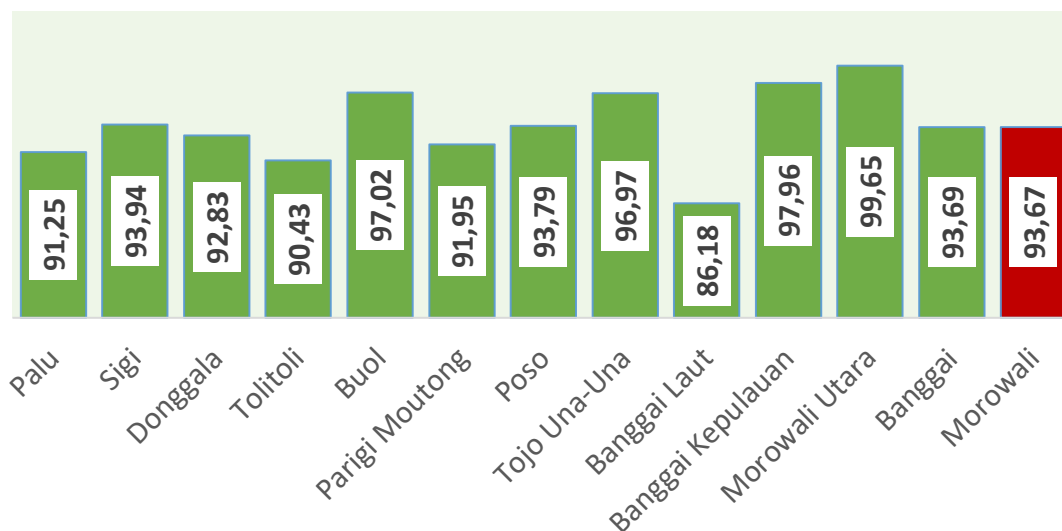
Tabel 2.56

**Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Morowali,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022**

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI					
Morowali	94,66	94,79	94,72	95,07	93,67
Sulawesi Tengah	92,82	93,17	93,24	93,33	93,25
Nasional	91,94	92,88	97,69	97,80	97,88

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Selanjutnya dari 13 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, capaian Kabupaten Morowali berada pada urutan tertinggi kedelapan. Sedangkan yang berada pada urutan pertama Kabupaten Morowali Utara sebesar 99,65 urutan kedua yakni Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 97,96. Sedangkan Kabupaten dengan APM jenjang pendidikan SD/MI terendah yakni Kabupaten Banggai Laut sebesar 86,18 persen; dan Kabupaten Tolitoli sebesar 90,43 persen yang terdapat pada Gambar 2.57 sebagai berikut ini.



Sumber: APK, APM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

Gambar 2.57
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

- Pendidikan Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

APM SMP/MTs Kabupaten Morowali mengalami peningkatan dari periode Tahun 2018-2022. Dimana pada Tahun 2018 sebesar 70,96 persen dan Tahun 2022 sebesar 73,13 persen. Peningkatan APM ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat Morowali akan pentingnya sekolah pada jenjang Pendidikan SMP/Sederajat. Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional tahun 2022, Kabupaten Morowali masih berada di bawah rata-rata keduanya. Dimana APM SMP/MTs Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 75,63 persen dan Nasional sebesar 80,89 persen yang terdapat data pada Tabel 2.57 sebagai berikut ini.

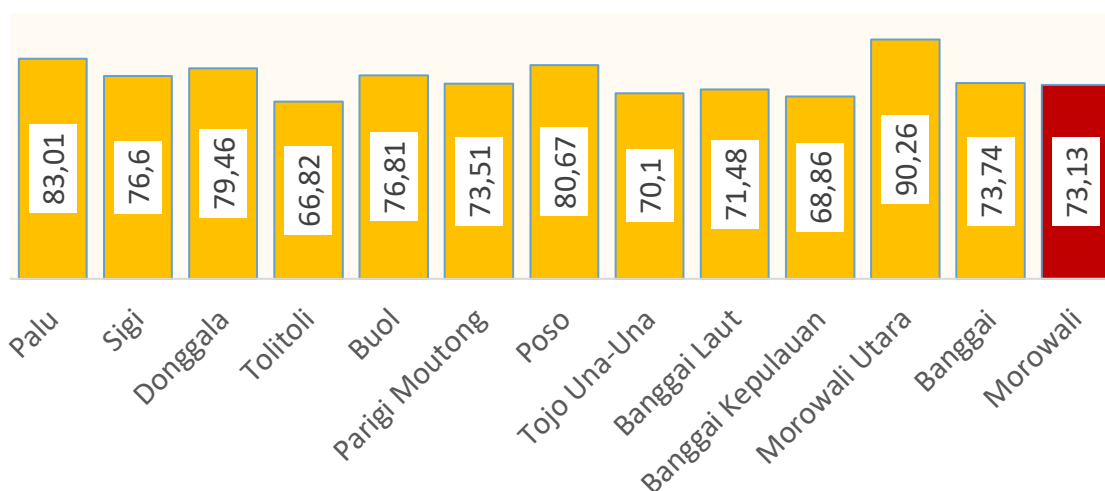
Tabel 2.57

**Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Morowali,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022**

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SMP/MTs					
Morowali	70,96	72,73	73,49	73,23	73,13
Sulawesi Tengah	73,2	73,82	74,42	74,99	75,63
Nasional	75,57	77,21	80,12	80,59	80,89

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Capaian APM jenjang pendidikan SMP/MTs kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa Kabupaten Morowali berada pada urutan kesembilan. Sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Morowali Utara sebesar 90,26, Kota Palu sebesar 83,10 dan Poso sebesar 80,67. Data APM SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 terdapat dilihat pada Gambar 2.58 sebagai berikut ini.



Sumber: APK, APM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

Gambar 2.58

**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

- Pendidikan Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA

APM jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) Kabupaten Moro-wali menurun dari Tahun 2018 sebesar 68,43 persen menjadi 70,62 persen pada tahun 2022. APM pada jenjang pendidikan Menengah yang masih belum mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya.

Kondisi Tahun 2022 tersebut masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 65,72 persen, Nasional sebesar 61,97 yang disajikan pada Tabel 2.58 sebagai berikut ini.

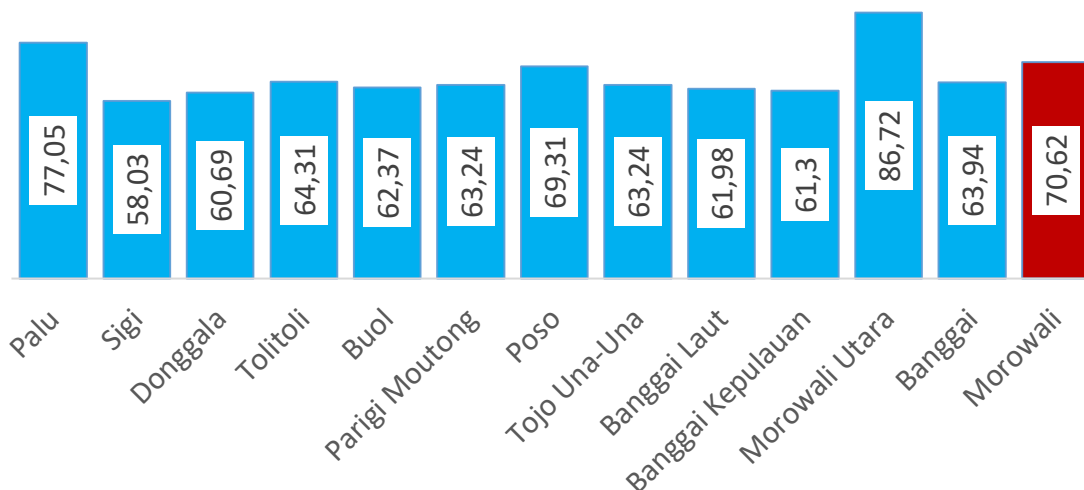
Tabel 2.58

**Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA Kabupaten Morowali,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022**

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SMA/SMK/MA					
Morowali	68,43	67,59	67,54	69,71	70,62
Sulawesi Tengah	64,25	64,66	65,02	65,44	65,72
Nasional	67,14	70,99	61,25	61,65	61,97

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Dilihat dari keseluruhan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, capaian Kabupaten Morowali berada pada urutan ketiga. Dimana yang berada pada urutan pertama adalah Morowali Utara sebesar 86,72, kemudian Kota Palu sebesar 77,05. Sebaliknya, terendah Kabupaten Sigi sebesar 58,03 persen dan Kabupaten Donggala sebesar 60,69 persen yang terdapat pada Gambar 2.59 sebagai berikut ini.



Sumber: APK, APM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

Gambar 2.59

**Angka Partisipasi Murni (APK) SMA/SMK/MA
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

f. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Salah satu pengukuran daya serap sekolah terhadap penduduk yang sekolah dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). Tingkat partisipasi sekolah penduduk pada suatu wilayah menunjukkan terbukanya peluang untuk mengakses pendidikan secara

umum pada suatu wilayah tersebut. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS pada suatu kelompok usia di wilayah tertentu menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar bagi penduduk di wilayah tersebut untuk dapat mengenyam pendidikan menurut jenjang tertentu.

- Angka Partisipasi Sekolah SD/MI

APS jenjang pendidikan SD/MI Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 perkembangannya berfluktuatif. Hal ini ditunjukkan Tahun 2018 sebesar 98,73 persen. Namun, menurun hingga Tahun 2019 menjadi 98,73 persen dan ditahun 2020 sebesar 98,84, sampai dengan tahun 2022 meningkat menjadi 97,78. Capaian di Tahun 2022 tersebut masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 98,22 persen, dan di bawah rata-rata secara Nasional sebesar 99,10 persen yang disajikan pada Tabel 2.59 sebagai berikut ini.

Tabel 2.59

**Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Kabupaten Morowali,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022**

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI					
Morowali	98,73	98,73	98,84	97,06	97,78
Sulawesi Tengah	98,24	98,40	98,38	98,38	98,22
Nasional	99,22	99,24	99,26	99,19	99,10

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2019-2023

- Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs

APS jenjang pendidikan SMP/MTs Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 perkembangannya meningkat namun berfluktuatif. Hal ini ditunjukkan Tahun 2018-2019 sebesar 94,20 persen, meningkat hingga Tahun 2020 menjadi 94,79 persen, pada tahun 2021 menurun menjadi 94,40, dan kembali meningkat ditahun 2022 sebesar 94,97 persen. Capaian di Tahun 2022 tersebut juga masih di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 93,02 persen, namun masih di bawah rata-rata Nasional sebesar 95,92 persen yang terdapat pada Tabel 2.60 sebagai berikut ini.

Tabel 2.60

**Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Kabupaten Morowali,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022**

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SMP/MTs					
Morowali	94,20	94,20	94,97	94,40	94,97

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Tengah	92,74	93,01	93,13	93,13	93,02
Nasional	95,36	95,51	95,74	95,99	95,92

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

- Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA

Selanjutnya untuk APS jenjang pendidikan SMA/SMK/MA Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 perkembangannya juga meningkat namun masih berfluktuatif. Hal ini ditunjukkan Tahun 2018 sebesar 89,66 persen, menurun di Tahun 2019 menjadi 84,70 persen dan ditahun 2020 sebesar 89,35 persen, tahun 2021 sebesar 89,75 persen serta ditahu 2022 meningkat sebesar 90,06 persen. Capaian Kabupaten Morowali di Tahun 2022 tersebut masih lebih baik dari rata-rata Nasional sebesar 73,15 persen, dan juga rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 75,84 persen, yang disajikan pada Tabel 2.61 sebagai berikut ini.

Tabel 2.61

**Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA Kabupaten Morowali,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022**

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SMA/SMK/MA					
Morowali	89,66	84,70	89,35	89,75	90,06
Sulawesi Tengah	74,81	75,73	75,89	75,89	75,84
Nasional	71,99	72,36	72,72	73,09	73,15

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

g. Angka Putus Sekolah

Dalam rangka memastikan kualitas dan inklusivitas pendidikan, Undang-Undang Dasar 45 mewajibkan pemerintah mengalokasikan 20 persen dari APBN/APBD di sektor pendidikan. Dengan begitu, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia termasuk Kabupaten Morowali dapat mengenyam dan menuntaskan pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Tantangan upaya pemenuhan pendidikan salah satunya adalah permasalahan adanya anak sekolah yang mengalami putus sekolah sebelum menuntaskan pendidikannya dengan berbagai alasan seperti tidak ada biaya, karena bekerja, ataupun alasan lain. zangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan kemampuan belajar), maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat mengakibatkan siswa menjadi putus/berhenti sekolah.

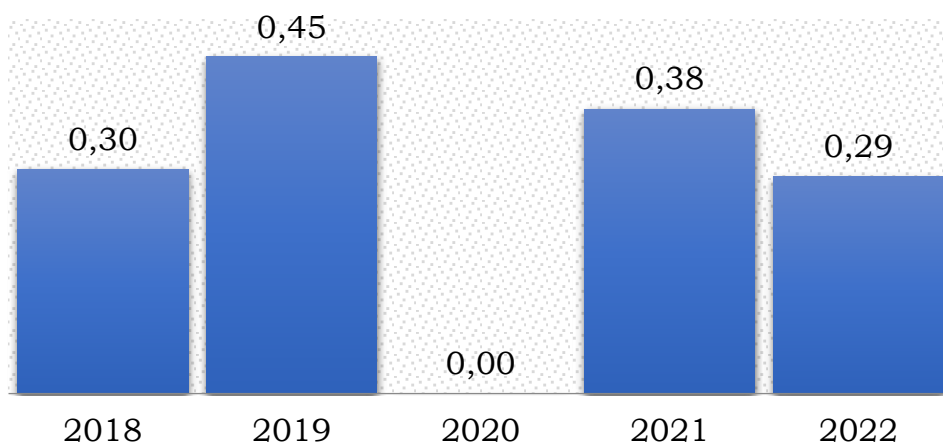
Kondisi ekonomi keluarga yang minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga, cara pandang yang sempit

terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa alasan banyaknya siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus sekolah.

Di Kabupaten Morowali semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi angka putus sekolah. Pada Tahun 2022 sebesar 0,29 persen penduduk putus sekolah di jenjang SD/ sederajat. Persentase ini lebih kecil dibandingkan angka putus sekolah di jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat yakni sebesar 0,18 persen. Sedangkan, angka putus sekolah pada jenjang SMA/ Sederajat mencapai 0,48 persen. Secara detail dijelaskan pada pembahasan berikut ini.

- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Pada periode Tahun 2018-2022 APS jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Morowali masih terjadi, namun dalam proporsi yang masih rendah. Kondisi tersebut ditunjukkan pada Tahun 2018 APS jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Morowali sebesar 0,30 persen, tertinggi terjadi di Tahun 2019 sebesar 0,45 persen. Meningkat Tahun 2019 sebesar 0,45 persen, dan ditahun 2020 sebesar nol persen, tahun 2021 sebesar 0,38 persen dan ditahun 2022 sebesar 0,29 persen yang disajikan pada Gambar 2.60 sebagai berikut ini.



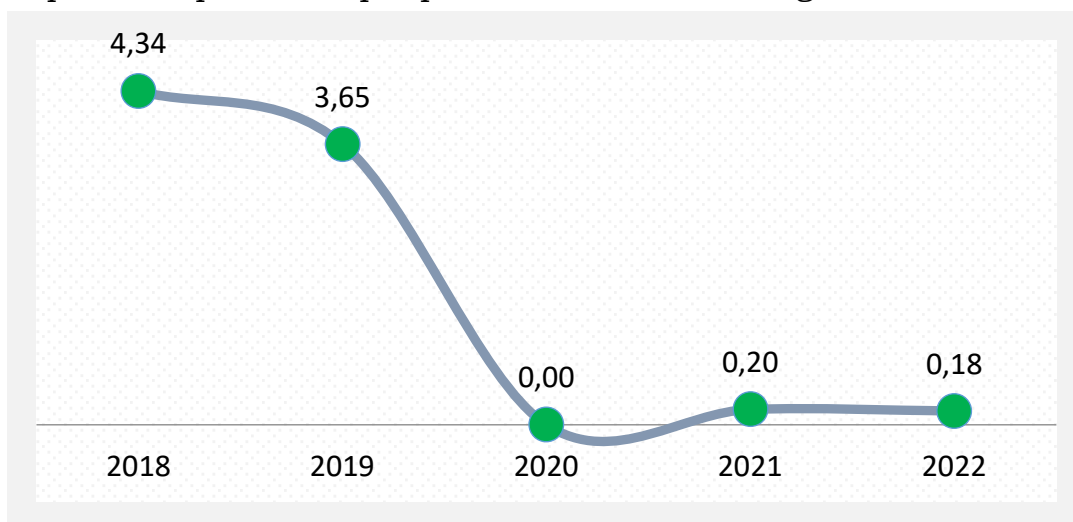
Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.60
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

APS pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Morowali lebih tinggi dibanding jenjang pendidikan SD/MI. Dalam kurun Tahun 2018 s/d 2022 APS jenjang pendidikan SMP/MTs cenderung meningkat. Terlihat di Tahun 2018 yang sebesar 4,34 persen, meningkat hingga

Tahun 2019 menurun menjadi 3,65 persen, dan ditahun 2020 sebesar nol persen, Tahun 2021 sebesar 0,20 persen dan tahun 2022 sebesar 0,18 persen seperti terdapat pada Gambar 2.61 sebagai berikut.

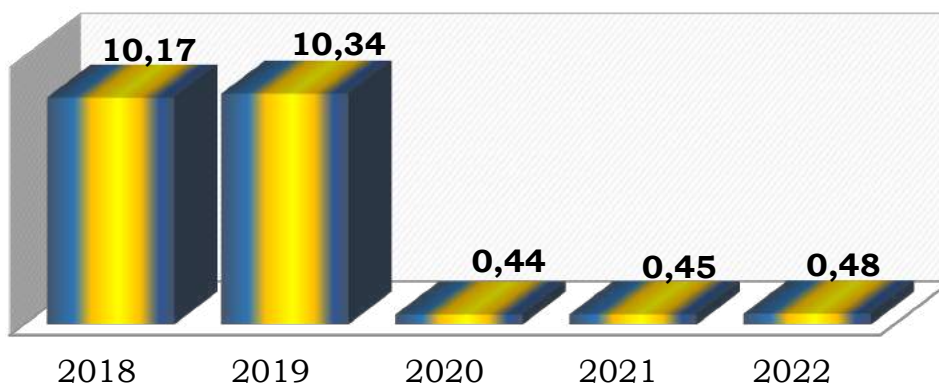


Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.61
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

- Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

APS pada jenjang pendidikan SMA/Sederajat masih cukup tinggi pda periode Tahun 2018-2022. Rata-rata APS periode Tahun 2018 sebesar 10,17 persen. Dan Tahun 2020 sebesar 0,44 persen. Kemudian tahun 2022 sebesar 0,48 persen. Perkembangan APS jenjang pendidikan SMA/Sederajat Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.62 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.62
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Tahun 2018-2022
Kabupaten Morowali

h. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolok ukur tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar. Angka kelulusan tinggi juga dianggap sebuah prestasi bagi sekolah yang bersangkutan. angka kelulusan yang tinggi menjadi bahan promosi untuk menarik minat calon siswa baru sehingga angka kelulusan ini menjadi begitu penting dan berharga bagi sekolah. Oleh karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan paralel dengan peningkatan mutu pembelajaran. Data angka kelulusan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Tabel 2.62 sebagai berikut.

Tabel 2.62
Angka Kelulusan
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs	100	100	100	100	100
3	SMA/SMK/MA	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 2.62 di atas, periode Tahun 2018-2022 angka kelulusan Kabupaten Morowali pada semua jenjang pendidikan mencapai 100 persen. Hal ini memberikan gambaran adanya peningkatan kualitas jenjang semua jenjang pendidikan di Kabupaten Morowali, Hal ini disebabkan secara umum angka kelulusan yang mencapai angka sempurna yaitu 100 persen.

i. Angka Yang Melanjutkan

Siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya diharapkan semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Morowali berkomitmen untuk mendorong masyarakatnya untuk sekolah hingga pendidikan tinggi. Dalam meningkatkan minat siswa untuk terus bersekolah pemerintah memberikan bantuan pendidikan hingga perguruan tinggi. Hingga Tahun 2022 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 100 persen, meningkat dari Tahun 2018 yang sebesar 99,80 persen. Selanjutnya Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun 2018 sebesar 100,00 persen meningkat hingga Tahun 2022 sebesar 99,71 persen. Namun Angka Lulusan SMA/SMK/MA Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi menurun Tahun 2022 menjadi 76,41 persen. Penurunan lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi, dikarenakan sebagian siswa pada jenjang tersebut setelah tamat sekolah lebih memilih untuk bekerja di

perusahaan, dan lain sebagainya. Data yang melanjutkan di Kabupaten Morowali Tahunn 2018-2022 terdapat pada Tabel 2.63 sebagai berikut.

Tabel 2.63
Angka Yang Melanjutkan
Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,80	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,00	100,00	100,00	98,90	99,71
3	Angka Lulusan SMA/SMK/MA Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi	70,00	70,00	73,18	76,80	76,41

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali 2023 (diolah)

j. Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan sarana prasarana pendidikan merupakan hal yang mutlak tersedia di setiap wilayah. Secara keseluruhan jumlah sekolah di Kabupaten Morowali bertambah dari periode Tahun 2018-2022. Fasilitas pendidikan SD/MI di Tahun 2018 sebanyak 148 sekolah, bertambah hingga Tahun 2022 sebanyak 162 sekolah. Selanjutnya untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami penambahan, hal ini ditunjukkan di Tahun 2018 sebanyak 48 sekolah, bertambah 3 sekolah menjadi 51 sekolah di Tahun 2022. Untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat juga bertambah dari 26 sekolah di Tahun 2018 menjadi 26 sekolah di Tahun 2022 yang tersaji pada Tabel 2.64 sebagai berikut.

Tabel 2.64
Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	148	148	153	159	162
2	SMP/MTs	48	49	49	51	51
3	SMA/SMK/MA	26	26	26	26	26
Total		222	223	228	236	239

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

k. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio Gedung ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia

pendidikan dasar jumlah sekolah jenjang pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia SD/MI dan SMP/MTs serta SMA/SMK/MA. Data mengenai ketersediaan sekolah di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs serta SMA/SMK/MA disajikan sebagai Tabel 2.65 berikut.

Tabel 2.65
Rasio Ketersediaan Sekolah
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI	1:120	1:99	1:120	1:108	1:99
2	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs	1:150	1:189	1:160	1:160	1:170
3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MI	1:175	1:231	1:251	1:275	1:269

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Merujuk pada Tabel 2.65 di atas, Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan nilai rasio yang semakin menurun. Tahun 2018 sebesar 1:120, dan hingga Tahun 2022 menjadi 1:99. Selanjutnya Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs perkembangan berfluktuatif. Tahun 2018 sebesar 1:150 meningkat hingga tahun 2020 sebesar 1:160, dan ditahun 2022 sebesar 1:170. Kemudian untuk Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA meningkat dari 1:175 Tahun 2018 menjadi 1:269 Tahun 2022.

1. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar

Kualitas dan distribusi guru yang merata menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan di sektor pendidikan. Salah satu indikator untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan adalah rasio murid-guru. Angka ini mencerminkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi nilai rasio murid-guru dalam sebuah sekolah, berarti semakin mengurangi efektivitas proses pembelajaran karena tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid menjadi berkurang sehingga mutu pengajaran cenderung lebih rendah.

Jumlah Guru sekolah pendidikan dasar Tahun 2018 (1.882) orang, menurun hingga Tahun 2019 sebesar 1.905 orang, dan ditahun

2020 jumlah guru bertambah sebanyak 2.573 orang dan ditahun 2022 sebanyak 2.550 orang. Sedangkan jumlah murid jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Morowali bertambah dari 24.442 ditahun 2018 siswa menjadi 29.039 Tahun 2022. Selanjutnya untuk rasio guru terhadap murid perkembangannya berfluktuatif, hal ini ditunjukkan pada Tahun 2018 sebesar 12,99, hingga Tahun 2020 menjadi 10,20, selanjutnya ditahun 2021 sebesar 11,55 dan ditahun 2022 menurun menjadi 11,39. Rasio tersebut dibawah rasio ideal yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa pada jenjang SD idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Data terkait dapat dilihat pada Tabel 2.66 sebagai berikut ini.

Tabel 2.66
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar
Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Guru	1.882	1.905	2.573	2.359	2.550
SD/MI	1.290	1.294	1.780	1.543	1.705
SMP/MTs	592	611	793	816	845
Jumlah Murid	24.442	24.667	26.243	27.250	29.039
SD/MI	16.882	17.028	18.378	19.287	20.947
SMP/MTs	7.560	7.639	7.865	7.963	8.092
Rasio	12,99	12,95	10,20	11,55	11,39

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

m. Rasio guru/murid sekolah pendidikan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa pada menengah SMA/Sederajat idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Rasio murid-guru bukanlah faktor mutlak keberhasilan anak dalam proses belajar. Rasio murid-guru yang ideal akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Rasio murid-guru di kelas tentunya akan memengaruhi manaje-men kelas, proses belajar di kelas, tapi bukan satu satunya faktor penentu untuk meningkatkan kualitas belajar di kelas. Keterampilan dan pengalaman guru juga perlu dipertimbangkan karena guru yang lebih terampil dan berpengalaman, misalnya, mungkin sudah biasa menangani kelas yang lebih besar dari pada yang kurang berpengalaman.

Perkembangan Rasio guru/murid sekolah pendidikan Menengah Tahun 2018-2022 Kabupaten Morowali berfluktuatif. Hal ini ditunjukkan

dari capaian Tahun 2018 sebesar 12,21, Tahun 2019 sebesar 9,24, dan ditahun 2020 sebesar 12,29, kemudian menurun ditahun 2021 sebesar 11,81, dan kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 12,73. Capaian hingga Tahun 2022 tersebut masih di bawah standar ideal. Data terkait dapat dilihat pada Tabel 2.67 sebagai berikut.

Tabel 2.67
Rasio guru/murid sekolah pendidikan Menengah
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Guru	483	658	532	563	537
Jumlah Murid	5.899	6.080	6.540	6.647	6.838
Rasio	12,21	9,24	12,29	11,81	12,73

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

n. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah

Rasio guru/murid per rata-rata kelas untuk jenjang pendidikan SD/MI Tahun 2018 sebesar 1:20 menurun diTahun 2019 menjadi 1:14, sampai dengan tahun 2022 yakni 1:23. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMP/MTs Tahun 2018 sebesar 1:15, juga menurun Tahun 2019 menjadi 1:12, dan ditahun 2022 sebesar 1:14. Untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA Tahun 2018 sebesar 1:12 dan Tahun 2022 sebesar 1:20. Secara lengkap ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.68
Rasio Guru/Murid Per Rata-Rata Kelas
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

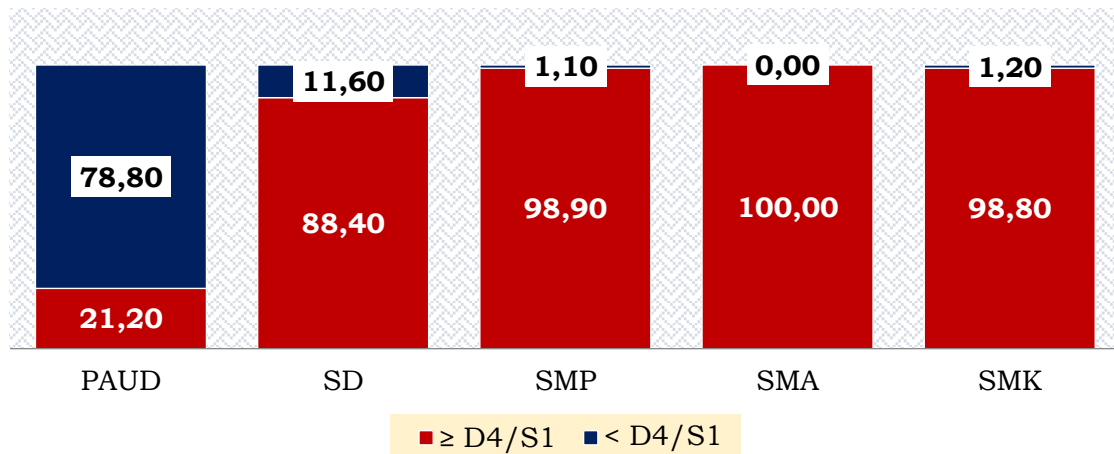
No	Uraian	Rasio guru/murid per kelas rata-rata				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	1:20	1:14	1:22	1:23	1:23
2	SMP/MTS	1:15	1:12	1:14	1:14	1:14
3	SMA/SMK/MA	1:12	1:19	1:20	1:20	1:20

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

o. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Hal lain yang turut menentukan capaian kualitas output pendidikan adalah faktor Guru, tidak hanya dari pemenuhan aspek kuantitas saja, namun juga kualitas dari seorang Guru menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan. Salah satu indikator yang menunjukkan kualitas guru secara umum ditentukan dari tingkat pendidikannya. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh seorang guru, maka akan berpengaruh pada kualitasnya dalam memfasilitasi proses belajar-mengajar murid di kelas. Diharapkan semakin tinggi pendidikan seorang guru maka akan memiliki pengetahuan yang lebih baik. Data kualifikasi pendidik menurut jenjang

Pendidikan di Kabupaten Morowali Tahun 2021 disajikan pada Gambar 2.63 sebagai berikut.

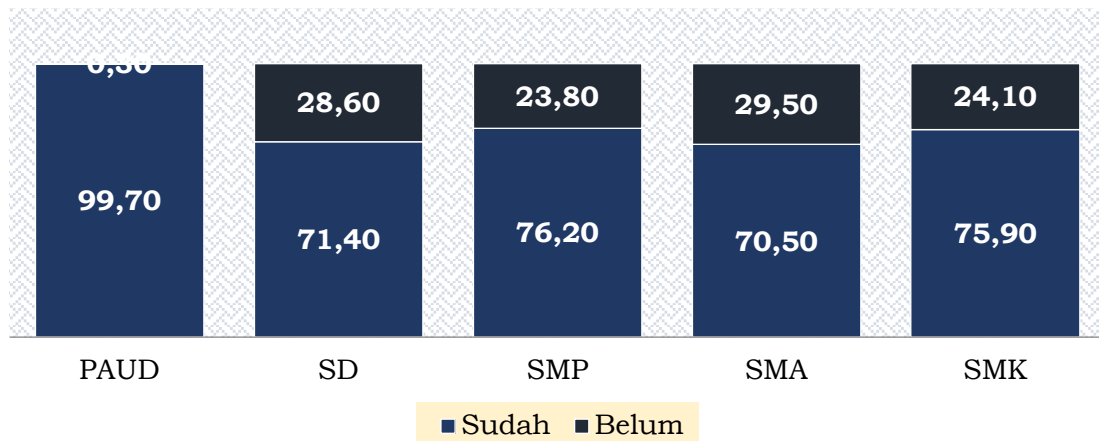


Sumber: Neraca Pendidikan Sulawesi Tengah, Tahun 2022 (diolah)

Gambar 2.63
Kualifikasi Pendidik Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021
Kabupaten Morowali (Persen)

Berdasarkan gambar di atas, diketahui kualifikasi pendidik untuk jenjang pendidikan *pra Sekolah (PAUD)* yang $\geq D4/S1$ sebesar 21,20 persen dan 78,80 persen yang $< D4/S1$. Selanjutnya untuk guru jenjang pendidikan SD/Sederajat sebesar 88,40 persen $\geq D4/S1$ dan 11,60 persen $< D4/S1$. Jenjang pendidikan SMP/Sederajat $\geq D4/S1$ sebesar 98,90 persen $\geq D4/S1$, 1,10 persen $< D4/S1$. Untuk jenjang pendidikan SMA sebesar 100,00 persen yang memiliki kualifikasi $\geq D4/S1$. Untuk sekolah kejuruan SMK sebanyak 98,80 persen kualifikasi $\geq D4/S1$ dan 1,20 persen kualifikasi $< D4/S1$.

Selanjutnya untuk tenaga pendidik/guru yang telah tersertifikasi untuk jenjang pendidikan pra sekolah (PAUD) sebesar 99,70 persen, SD sebesar 71,40 persen, SMP sebesar 36,20 persen, SMA sebesar 70,50 persen dan SMK sebesar 75,90 persen, disajikan pada Gambar 2.64 sebagai berikut ini.



Sumber: Neraca Pendidikan Sulawesi Tengah, Tahun 2022 (diolah)

Gambar 2.64
Pendidik Tersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021
Kabupaten Morowali (Persen)

2.3.1.2 Kesehatan

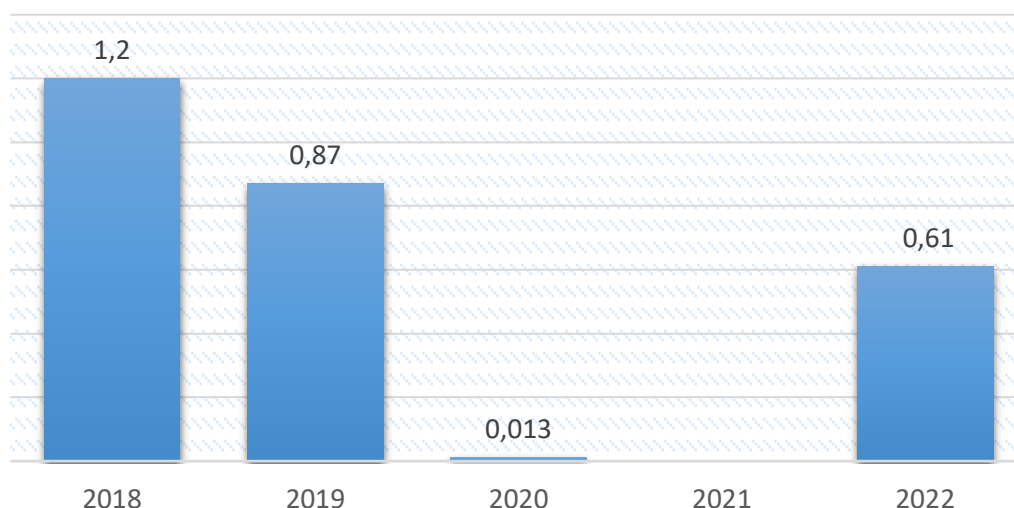
Masalah kesehatan merupakan salah satu masalah yang dihadapi penduduk Kabupaten Morowali secara umum. Relatif membaiknya penghasilan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2022 sebesar Rp400,10 juta per Tahun berdasarkan PDRB Perkapita ADHK 2010. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang semakin hari semakin meningkat. Namun bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tentu lebih sulit memenuhi kebutuhan kesehatan. Salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap status kesehatan penduduk adalah akses fasilitas kesehatan, semakin sulit akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan, akan semakin jelek status kesehatan penduduk tersebut. Penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedesaan biasanya mempunyai akses yang lebih sulit dibandingkan penduduk yang bermukim di daerah perkotaan. Apalagi penduduk yang tinggal di daerah berbukit-bukit dan kepulauan semakin sulit mencapai fasilitas kesehatan karena terbatasnya fasilitas yang tersedia di desa. Untuk dapat menyusun suatu tindakan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Morowali maka diperlukan suatu analisis situasi kesehatan yang ada saat ini dan potensi apa saja yang dimiliki oleh masyarakat dalam mendukung pembangunan pada urusan kesehatan dalam suatu kawasan tertentu.

a. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka kematian ibu dan bayi merupakan satu dari beberapa indikator derajat kesehatan, pendarahan dan prevalensi anemia menjadi

penyebab utama kematian ibu dan bayi pada saat melahirkan. Pantauan kesehatan ibu semasa kehamilan baik keadaan normal maupun darurat serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih memainkan peran penting dalam menekan angka kematian ibu.

Bayi adalah sebutan untuk anak usia 0–1 Tahun dan makhluk hidup yang baru saja dilahirkan dari Rahim ibu. Bayi adalah anak dari manusia atau hewan yang masih berusia sangat muda. Ketika bayi sudah mulai berjalan, disebut dengan balita. Umumnya istilah bayi diberikan kepada anak manusia yang berusia di bawah 12 bulan, namun definisi di berbagai tempat dapat bervariasi, bahkan ada yang hingga 2 tahun. Dalam konteks kedokteran, bayi yang baru berusia di bawah 28 hari disebut *neonata* (dari bahasa latin *neonatus*, "yang baru dilahirkan") (Sumber: Wikipedia). Data angka kematian bayi di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.65 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2023, data diolah

Gambar 2.65
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu Tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu Tahun tertentu. Berdasarkan data yang tersaji pada gambar di atas menunjukkan informasi mengenai perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Morowali periode waktu 2018-2022, terus mengalami fluktuasi di mana pada Tahun 2018 sebesar 1,20 per 1000 kelahiran hidup yang bermakna setiap kelahiran 1000 kelahiran hidup 1 orang bayi meninggal dunia. Selanjutnya berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali kurun waktu 2018-2022 angka

kematian bayi cenderung konstan dengan angka terbesar terjadi pada Tahun 2020 mencapai 0,013 yang bermakna setiap 1000 kelahiran hidup 1 orang bayi meninggal dunia sebelum usia 1 Tahun, hingga ditahun 2022 sebesar 0,61 lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yang artinya masih terdapat 1 bayi meninggal setiap 1000 kelahiran. Walaupun per 1000 kelahiran jumlah yang meninggal konstan yaitu 1 jiwa.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian, angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

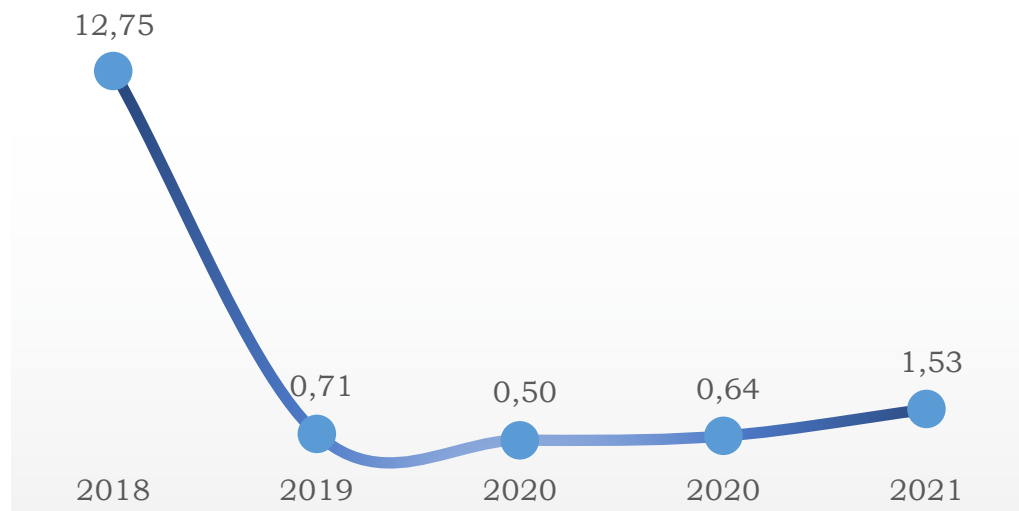
Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu Tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

b. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup jumlah kematian anak berusia 0-4 Tahun selama satu Tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan Tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya.

Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk yang mengakibatkan terabaikannya dan ketidakberdayaan masyarakat yang berada pada menengah ke bawah akan pemenuhan investasi dan pemenuhan akan kesehatan yang bersifat tidak terduga. Selain itu, seringkali masyarakat suatu tempat kurang memperhatikan dan waspada bahwa suatu penyakit tertentu yang dianggap dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Penanganan yang tidak tepat dan terlambat seringkali menjadi penyebab terjadinya kematian balita di Indonesia. Data

kematian Balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar 2.66 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2023, data diolah

Gambar 2.66
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

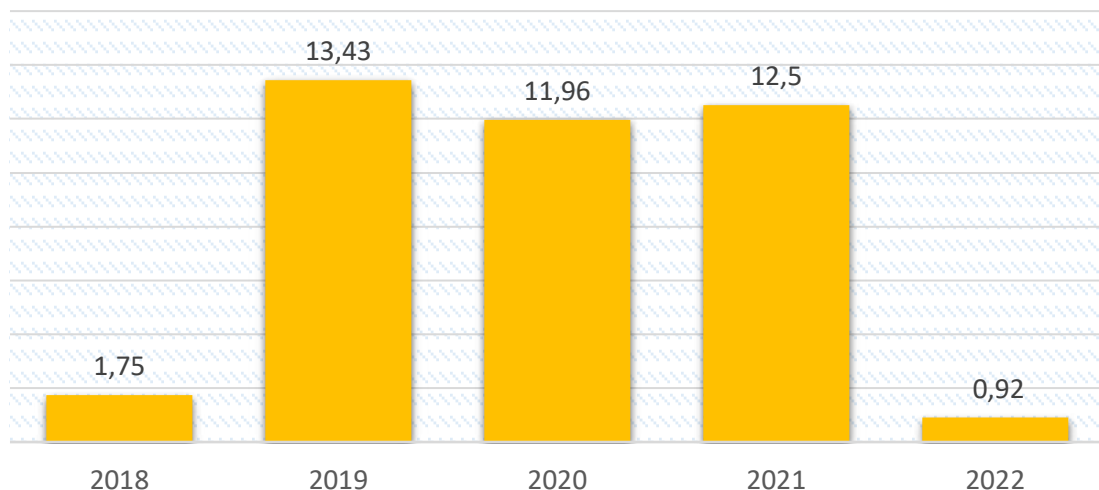
Kurun waktu 2018-2022, jumlah kematian balita di Kabupaten Morowali cenderung mengalami peningkatan dengan jumlah kematian tertinggi Tahun 2018 sebanyak 12,75 kematian balita. Jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Morowali cenderung mengalami peningkatan dengan angka kematian balita yang juga makin meningkat yaitu Tahun 2019 yaitu sama dengan 0,71 yang bermakna setiap 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Morowali terjadi peristiwa kematian sekitar 1 anak berumur kurang 5 Tahun pada satu Tahun tertentu. Hingga Tahun 2022 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup mengalami penurunan menjadi 1,53 meningkat dari tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukan keberhasilan pemerintah Kabupaten Morowali dalam mengatasi masalah tersebut.

c. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian, angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari

semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu Tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Data Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.67 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2023, data diolah

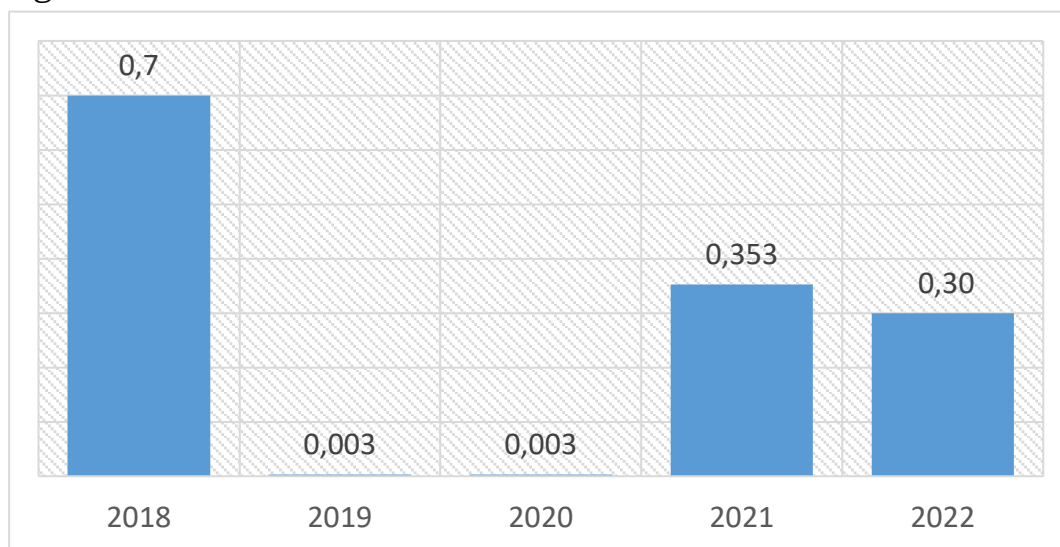
Gambar 2.67
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Kurun waktu 2018-2022, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Morowali, mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 angka kematian neonatal 1,75 yang berarti setiap 1000 kelahiran hidup sebanyak 1 sampai 2 orang meninggal. Hingga Tahun 2020, angka kematian neonatal mencapai 11,96 atau 12 balita kurang dari setahun yang meninggal. Hingga Tahun 2022 meningkat sangat signifikan menjadi 0,92 menurun sangat signifikan. Angka ini merupakan indikasi belum optimalnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali di sisi ibu hamil sampai ke wilayah terpencil, proses kelahiran dan pasca kelahiran.

d. Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup

World Health Organization (WHO) memiliki beberapa istilah berbeda terkait dengan AKI. Istilah pertama adalah *maternal death* – atau kematian ibu, yang didefinisikan sebagai “kematian yang terjadi saat kehamilan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan, yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan” (WHO, 2004). Konsep *maternal death* ini berbeda dengan konsep *maternal mortality ratio*, atau yang lebih dikenal sebagai Angka Kematian Ibu (AKI), jika mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik (BPS). Baik BPS maupun WHO mendefinisikan *maternal mortality ratio*/AKI sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2004; BPS, 2012).

Menurut laporan dari WHO, kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi saat, dan pasca kehamilan. Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu sekitar 75 persen dari total kasus kematian ibu adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak aman (WHO, 2014). Data Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar 2.68 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2022, data diolah

Gambar 2.68
Perkembangan Angka Kematian Ibu
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Kurun waktu 2018-2022, angka kematian ibu di Kabupaten Morowali cenderung berfluktuasi dengan capaian terburuk Tahun 2018 dengan 0,70 dengan jumlah kejadian kematian ibu per 100.000

kelahiran. Pada Tahun 2019 angka kematian ibu di Kabupaten Morowali 0,003 per 100.000 kelahiran hidup yang bermakna setiap 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Morowali terjadi peristiwa kematian ibu sebanyak 1 kematian ibu. Tahun 2022 angka kematian ibu adalah 0,30, yang artinya tidak ada kasus kematian Ibu di Kabupaten Morowali. Makin rendah nilai indikator ini, maka merupakan gambaran awal cukup baiknya pelayanan kesehatan bagi ibu baik yang sedang hamil ataupun pasca melahirkan.

- ***Safe Motherhood Initiative* dan Gerakan Sayang Ibu (GSI)**

Tingginya angka kasus kematian ibu sebenarnya bukanlah masalah yang terbilang baru. Upaya penanganan kasus kematian ibu merupakan diskursus level global yang telah diperbincangkan sejak abad ke 17. Dalam penelitiannya yang berjudul “*Death in Childbed from the Eighteenth Century to 1935*,” Loudon menjelaskan bahwa catatan-catatan terkait kasus kematian ibu mulai muncul pada awal abad ke-17, seiring dengan berkembangnya praktik kebidanan di masyarakat Inggris (Loudon, 1986). Tetapi, komitmen masyarakat global terkait penanganan kasus kematian ibu agaknya baru hadir di akhir abad ke-20. Pada Tahun 1987, kekhawatiran terkait dampak dari tingginya kasus kematian ibu mendorong WHO dan organisasi-organisasi internasional lain untuk melahirkan *The Safe Motherhood Initiative* (Women & Children First, 2015).

Konsep *safe motherhood* sendiri mencakup serangkaian upaya, praktik, protokol, dan panduan pemberian pelayanan yang didesain untuk memastikan perempuan menerima layanan ginekologis, layanan keluarga berencana, serta layanan *prenatal*, *delivery*, dan *postpartum* yang berkualitas, dengan tujuan untuk menjamin kondisi kesehatan sang ibu, janin, dan anak agar tetap optimal pada saat kehamilan, persalinan, dan pasca-melahirkan (USAID, 2005). Mengacu pada modul yang disusun oleh *The Health Policy Project* (2003), konsep *safe motherhood* sendiri memiliki enam pilar utama.

e. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Rasio Posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1000 balita. Posyandu adalah pos pelayanan terpadu yang merupakan kegiatan pelayanan terpadu untuk imunisasi, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, penanggulangan diare dan gizi (melakukan penimbangan dan pemberian makanan tambahan untuk balita). Posyandu diselenggarakan oleh masyarakat melalui kader kesehatan di bawah bimbingan Puskesmas.

Tujuan Posyandu adalah untuk mempercepat penurunan angka

kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran. Selain itu, Posyandu juga bertujuan untuk mempercepat penerimaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), serta agar masyarakat dapat mengembangkan kegiatan kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Satu unit Posyandu, idealnya melayani sekitar 100 balita (120 kepala keluarga) atau sesuai dengan kemampuan petugas dan keadaan setempat.

Posyandu KB Kesehatan biasanya dipadukan dengan pelayanan kesehatan lainnya, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lengkap pada waktu dan tempat yang sama. Posyandu umumnya dibuka sebulan sekali dan dilaksanakan oleh kader Posyandu yang terlatih di bidang KB dan kesehatan yang berasal dari PKK, tokoh masyarakat dan pemuda secara sukarela dengan bimbingan tim pembina dari Puskesmas. Ketersediaan posyandu untuk melayani balita di Kabupaten Morowali secara keseluruhan (*aggregate*) cukup memadai. Menurut Kementerian Kesehatan idealnya satu posyandu melayani 100 balita atau ratio posyandu per 1000 balita berada di atas angka 10. Data perkembangan rasio Posyandu persatuan balita di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Tabel 2.69 sebagai berikut.

Tabel 2.69
Perkembangan Rasio Posyandu Persatuan Balita
Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Posyandu	153	150	153	153	156
Jumlah Balita	9.923	10.448	17.872	18.404	19.184
Rasio Posyandu Persatuan Balita Di Kabupaten Morowali	15,42	14,36	8,56	8,31	8,13

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2023, data diolah

Rasio Posyandu per satuan balita digunakan untuk mengukur ketersediaan Posyandu berdasarkan jumlah balita yang ada. Kurun waktu 2018-2022 rasio posyandu masih belum memenuhi standar ideal Kementerian Kesehatan idealnya satu posyandu melayani 100 balita atau ratio posyandu per 1000 balita berada di atas angka 10. Dimana di Tahun 2018 Rasio Posyandu Persatuan Balita Di Kabupaten Morowali di Kabupaten Morowali sebesar 15,42, membaik hingga Tahun 2022 menjadi 8,13. Rasio yang semakin membaik tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Morowali dalam meningkatkan kesehatan Balita.

f. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk adalah jumlah seluruh puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu per 1000 penduduk. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan. Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan, biasanya tanpa fasilitas perawatan menginap, berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, tidak termasuk klinik yang terdapat di puskesmas/rumah sakit. Gambaran Tentang Rasio Puskesmas, Rasio Pustu dan Rasio Poskesdes di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.70 sebagai berikut.

Tabel 2.70
Rasio Puskesmas, Poliklinik Rasio Pustu Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Puskesmas	9	9	11	13	13
Poliklinik	1	5	4	8	8
Pustu	30	30	26	24	24
Jumlah Faskes	40	44	41	45	45
Jumlah Penduduk	119.292	121.296	161.727	167.910	176.244
Rasio	0,335	0,363	0,254	0,268	0,255
<i>Rasio Puskesmas</i>	<i>0,075</i>	<i>0,074</i>	<i>0,068</i>	<i>0,077</i>	<i>0,074</i>
<i>Rasio Poliklinik</i>	<i>0,008</i>	<i>0,041</i>	<i>0,025</i>	<i>0,048</i>	<i>0,045</i>
<i>Rasio Pustu</i>	<i>0,251</i>	<i>0,247</i>	<i>0,161</i>	<i>0,143</i>	<i>0,136</i>

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 2.70 di atas diketahui bahwa rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap penduduk di Kabupaten Morowali semakin membaik, Rasio Puskesmas, Poliklinik Rasio Pustu Kabupaten Morowali di Tahun 2018 sebesar 0,335, dan hingga Tahun 2022 menjadi 0,255. Selanjutnya untuk puskesmas pada Tahun 2022 rasionya sebesar 0,074. Sementara itu, ketersediaan Puskesmas Pembantu pada Tahun 2022 sebesar 0,136 lebih baik dari Tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Rasio Poliklinik terhadap jumlah penduduk Kabupaten Morowali di Tahun 2022 sebesar 0,045 meningkat dari Tahun sebelumnya. Rasio yang semakin baik tersebut menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Morowali dalam pelayanan kesehatan masyarakat semakin meningkat.

g. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Makin tinggi nilai rasio ini menunjukkan, makin tinggi tingkat kemampuan suatu daerah dalam

penyelenggaraan layanan bidang kesehatan. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Makin tinggi nilai rasio ini menunjukkan, makin tinggi tingkat kemampuan suatu daerah dalam penyelenggaraan layanan bidang kesehatan. Capaian indikator ini disajikan pada Tabel 2.71 sebagai berikut ini.

Tabel 2.71
Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	2	3
Jumlah Penduduk	119.292	121.296	161.727	167.910	176.244
Rasio	0,017	0,016	0,012	0,012	0,017

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Periode 2018-2022 jumlah rumah sakit di Kabupaten Morowali mengalami penambahan dengan rasio terhadap penduduk 0,017 ditahun 2018 dan untuk Tahun 2022 jumlah rumah sakit bertambah 1 sehingga rasio terhadap penduduk meningkat menjadi 0,017.

h. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya bertugas untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar da-lam bidang kedokteran. Dokter yang dimaksud di sini adalah dokter umum dan dokter ahli/spesialis, tetapi tidak termasuk dokter hewan. Indikator ini menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan dokter terhadap penduduk suatu daerah. Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, dimana kondisi idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Semakin banyak tenaga dokter yang tersedia dapat mengindikasikan layanan pengobatan semakin mudah dipenuhi. Rasio dokter per 10000 penduduk menurut standar pelayanan minimal adalah 40 persen dari 10000 penduduk. Data Rasio Dokter per Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.72 berikut ini.

Tabel 2.72
Rasio Dokter per Penduduk Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Dokter	38	73	64	85	77
Jumlah Penduduk	119.292	121.296	161.727	167.910	176.244
Rasio	0,319	0,602	0,396	0,506	0,437

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Standar Kementrian Kesehatan, yaitu sebanyak 26 dokter per 100.000 penduduk atau 0,26. Berdasarkan hasil perhitungan kurun waktu 2018-2022, rasio dokter di Kabupaten Morowali melampaui standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Dimana Tahun 2022 sudah mencapai sebesar 0,437 meningkat dari Tahun 2018 sebesar 0,319. Kondisi tersebut masih di atas standar yang ditetapkan kementrian Kesehatan sebesar 0,26 per 100.000 penduduk. Namun, yang perlu menjadi perhatian terkait distribusi dokter di seluruh kecamatan, atau hanya berada di wilayah tertentu saja (perkotaan). Kegunaan dari perhitungan rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemungkinan akses penduduk terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, dapat juga diinterpretasikan sebagai semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan layanan kesehatan dan semakin mampu daerah tersebut menyelenggarakan otonomi.

i. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk adalah rasio untuk mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Dari sisi lain, rasio ini juga merupakan indikasi ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Data Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk di Kabupaten Morowali Tahun Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Tabel 2.73 sebagai berikut.

Tabel 2.73

**Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk di Kabupaten Morowali
Tahun Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022**

Tenaga Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
Perawat	188	173	220	228	432
Bidan	310	300	334	373	455
Medis	16	14	14	17	59
Farmasi	26	23	40	41	80
Kes. Lainnya	77	74	71	84	25
Total Tenaga Kesehatan	617	584	679	743	1051
Jumlah Penduduk	119.292	121.296	161.727	167.910	176.244
Rasio	5,17	4,81	4,20	4,42	5,96

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.73 di atas, jumlah Tenaga kesehatan pada Tahun 2018 ke Tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dari Tahun 2018 rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Morowali sebesar 5,17, meningkat hingga Tahun 2022 menjadi 5,96. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah

daerah untuk menghadirkan layanan kesehatan yang semakin berkualitas kepada masyarakat Kabupaten Morowali. Pada sisi lain, rasio kebutuhan tenaga kesehatan harus sesuai dengan target nasional di Kabupaten Morowali. Upaya kesehatan terus mengalami perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan mencanangkan program Pencegahan Komplikasi Persalinan dan Kelas Ibu Hamil.

Indikator ini digunakan sebagai indikasi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan kesehatan. Semakin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemungkinan akses penduduk terhadap kesehatan, dan makin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan kesehatan. Target ideal yang diharapkan dapat dicapai dalam rangka pencapaian tujuan adalah 88 persen dari kelahiran bayi mendapat pertolongan linakes (persalinan oleh tenaga kesehatan).

j. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Persalinan oleh tenaga kesehatan yang profesional seperti tenaga dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya adalah hal yang penting di lakukan. Diharapkan persalinan oleh tenaga kebidanan akan mengurangi resiko melahirkan pada ibu dan anak. Gambaran cakupan pertolongan persalinan di Kabupaten Morowali mayoritas telah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional. Data Cakupan pertolongan persalinan (Persen) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.74 sebagai berikut.

Tabel 2.74
Cakupan pertolongan persalinan (Persen)
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Dokter	32,28	40,9	34,35	39,35	44,35
Bidan/Tenaga Medis	62,13	53,2	65,65	60,65	55,65
Dukun	5,59	5,9	0	0	0
Famili Lainnya	0	0	0	0	0
	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

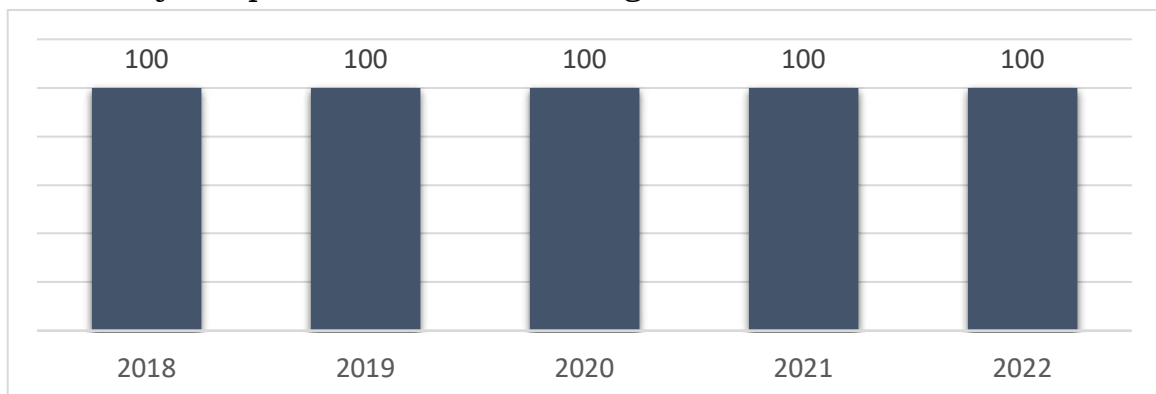
Merujuk pada Tabel 2.74 di atas diketahui bahwa pada Tahun 2022 cakupan persalinan oleh dokter sebesar 44,35 persen, Bidan/Tenaga Medis sebesar 55,65 persen. Hingga Tahun 2022 sudah tidak terdapat persalinan yang masih dilakukan oleh Dukun. Kondisi capaian tersebut menunjukkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten

Morowali dalam memberikan layanan kesehatan masyarakat semakin membaik.

J. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Tanda-tanda klinis dari gizi buruk secara garis besar dapat dibedakan marasmus, kwashiorkor atau marasmic-kwashiorkor. Definisi gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada anak juga dapat disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Banyak faktor yang dapat mengakibatkan gangguan nutrisi pada anak seperti pola makan anak dan kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian jenis makanan yang seimbang, dapat juga karena adanya penyakit atau kondisi tertentu yang menyebabkan tubuh tidak mampu mencerna dan menyerap makanan secara sempurna.

Persentase balita gizi buruk adalah proporsi balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Status gizi masyarakat dapat digambarkan terutama pada status anak balita dan wanita hamil. Oleh karena itu, sasaran dari program perbaikan gizi makro ini berdasarkan siklus kehidupan yaitu dimulai dari wanita usia subur, dewasa, ibu hamil, bayi baru lahir, balita, dan anak sekolah. Data Perkembangan Jumlah Bayi Lahir Dan Kasus Gizi Buruk Di Kabupaten Morowali 2018-2022 disajikan pada Gambar 2.69 sebagai berikut.



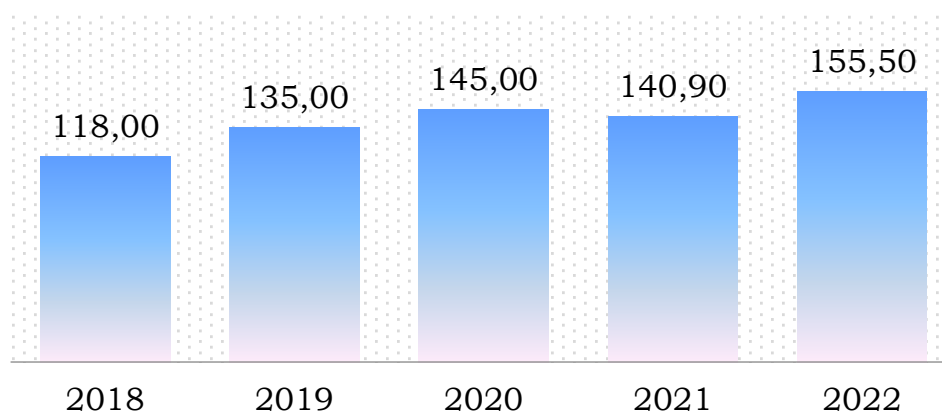
Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka, Data SIPD Tahun 2023, data diolah

Gambar 2.69
Perkembangan Jumlah Bayi Lahir Dan Kasus Gizi Buruk Di
Kabupaten Morowali 2018-2022

Pada kurun waktu 2018-2022 jumlah bayi lahir di Kabupaten Morowali setiap Tahun mengalami kenaikan. Selanjutnya, jumlah yang lahir teridentifikasi terdapat kasus Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Tahun 2018 s/d tahun 2022 Sebesar 100 persen. Selanjutnya dijelaskan bahwa 100 persen kasus gizi buruk yang ditemukan di Kabupaten Morowali telah ditangani. Semakin tinggi jumlah balita dengan status gizi buruk di suatu daerah, semakin buruk kondisi kesehatan penduduk di daerah tersebut. Hal ini merupakan indikasi rendahnya kemampuan daerah tersebut menyediakan layanan dan akses kesehatan bagi penduduk. Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai rendahnya kemampuan daerah tersebut untuk menjalankan otonomi.

K. Persentase Balita Yang Pernah diimunisasi campak

Campak alias measles adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat ditularkan melalui batuk dan bersin. Penyakit ini sangat mudah menular dan banyak menyerang anak-anak. Melihat tingginya angka kejadian campak dan rubella, maka pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan pencegahan dengan imunisasi measles-rubella (MR) alias campak rubella. Imunisasi MR dapat diberikan untuk semua anak usia 9 bulan sampai dengan usia kurang dari 15 Tahun. Balita yang pernah imunisasi campak di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan. Tahun 2018 persentase balita yang pernah imunisasi campak sebesar 118,00 persen, dan hingga Tahun 2022 menjadi 155,50 persen. Data Persentase Balita Yang Pernah di Imunisasi Campak di Kabupaten Morowali 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.70 sebagai berikut.



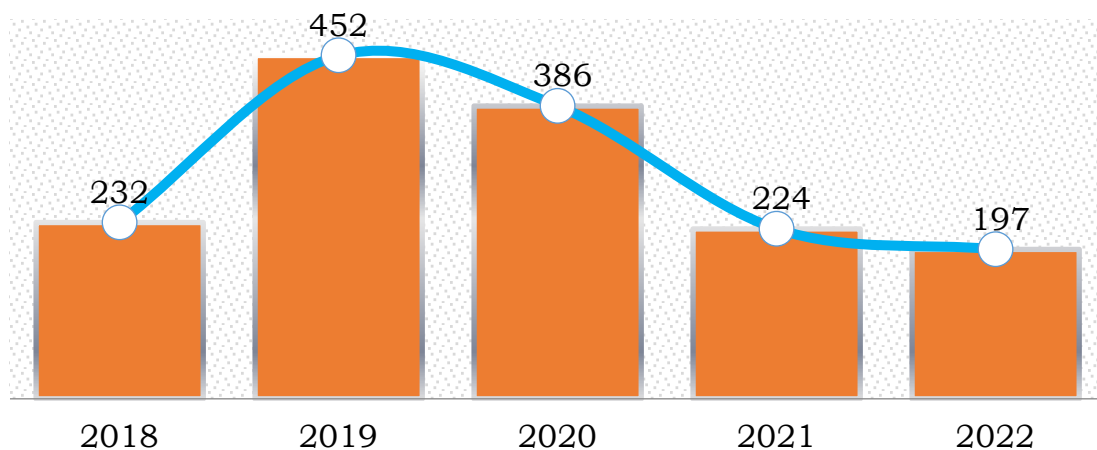
Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.70
Persentase Balita Yang Pernah di Imunisasi Campak
Kabupaten Morowali 2018-2022

L. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

TBC (*tuberculosis*) adalah infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang menyerang dan merusak jaringan tubuh manusia. Bakteri tersebut dapat ditularkan melalui saluran udara. Umumnya TBC menyerang paru-paru, namun dapat juga menyebar ke tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan organ lainnya. Jenis tuberkulosis yang diderita oleh pasien sering kali merupakan infeksi TBC laten, di mana terdapat bakteri TBC yang “tertidur” atau belum aktif secara klinis. Bakteri TBC akan aktif dan mulai menunjukkan gejala setelah periode waktu tertentu, beberapa minggu bahkan beberapa Tahun, tergantung kondisi kesehatan dan daya tahan pasien.

Jika pasien memiliki sistem kekebalan tubuh yang melemah (misalnya pada penderita HIV, kanker, atau pasien yang menjalani kemoterapi), maka TBC akan berkembang lebih cepat. Berdasarkan data dari dinas kesehatan Kabupaten Morowali, kurun waktu 2018-2022 seluruh jumlah kasus TB cenderung mengalami peningkatan dengan kasus yang terbanyak ditemukan Tahun 2018 sebanyak 232 kasus. Di Tahun 2019 meningkat sangat signifikan dengan jumlah kasus 452, namun selalu menurun dalam 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2022 sebanyak 197 kasus. Data Perkembangan Penderita TB dan BTA di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.71 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.71
Perkembangan Penderita TB dan BTA
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Kasus TBC yang masih terjadi dan cenderung bertambah menunjukkan bahwa penyakit tersebut masih menjadi masalah yang

penting untuk diatas kedepannya. Selanjutnya dilihat dari kasus TBC menurut kecamatan, di Tahun 2022 penderita TBC dan BTA terbanyak di Kecamatan Bahodopi sebanyak 117 kasus, kemudian Kecamatan Bungku Tengah sebanyak 95 kasus. Sedangkan yang terendah ada di Kecamatan Bungku Pesisir sebanyak 13 kasus yang secara lengkap diuraikan pada Tabel 2.75 sebagai berikut.

Tabel 2.75
Penderita TBC dan BTA Menurut Kecamatan
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Menui Kepulauan	9	29	17	17	18
2	Bungku Selatan	23	29	7	22	20
3	Bahodopi	66	123	66	98	117
4	Bungku Pesisir	19	21	7	12	13
5	Bungku Tengah	25	100	26	21	95
6	Bungku Timur	24	44	27	27	33
7	Bungku Barat	15	27	16	29	15
8	Bumi Raya	24	35	22	19	24
9	Witaponda	27	44	198	26	19
Total		232	452	386	271	354

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

M. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) meningkat seiring jumlah kasus yang meningkat setiap Tahunnya. Hal ini ditunjukkan tingkat prevalensi di Tahun 2018 sebesar 194,48 meningkat sangat signifikan menjadi 969,11 di Tahun 2022 yang terdapat pada Tabel 2.76 sebagai berikut ini.

Tabel 2.76
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

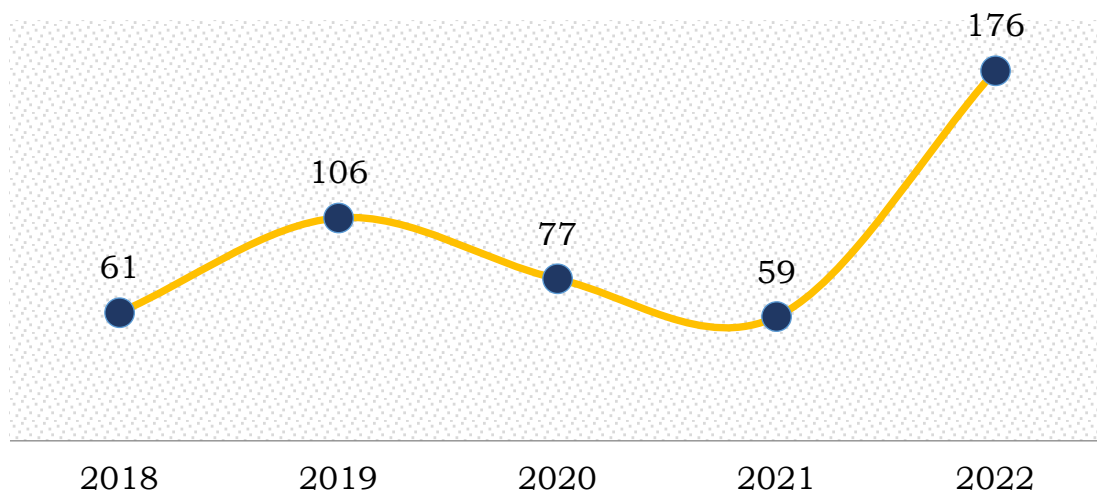
Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
Banyaknya kasus penderita TBC	232	452	386	224	1708
Jumlah Penduduk	119.292	121.296	161.727	167.910	176.244
	194,48	372,64	238,67	133,40	969,11

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

P. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Pengertian DBD terjadinya penyakit demam berdarah dengue disebabkan oleh virus dengue yang menyerang sel-sel darah. Virus ini ditularkan oleh *nyamuk Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. *Aedes aegypti* yang hidup dan tinggal di daerah beriklim tropis dengan suhu

lembab. Pada dasarnya, serangan nyamuk menggigit manusia di siang hari. Bila seseorang telah terinfeksi dengan virus ini juga mengalami sakit otot, sakit kepala, sakit sendi, dan penurunan jumlah sel-sel darah putih. Satu penurunan dalam jumlah sel darah putih menyebabkan kegagalan, sehingga pasien akan menderita *dengue syndrome shock*. Pada Tahun 2018 dan 2019 jumlah penderita DBD yang ditemui sebanyak 61 dan 106 kasus, ditahun 2020 sebanyak 77 kasus, meningkat ditahun 2022 sebanyak 176 kasus. Jumlah pasien yang ditangani mencakup 100 persen artinya semua penderita diberikan penanganan yang baik. Data Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.72 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.72
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Selanjutnya dilihat dari kasus Penyakit DBD menurut kecamatan, di Tahun 2022 penderita penyakit DBD terbanyak di Kecamatan Bahodopi (118 kasus), kemudian Kecamatan Bungku Tengah (45 kasus). Sedangkan terdapat beberapa kecamatan dengan kasus 0-1 yakni Kecamatan Menui Kepulauan, Bungku Selatan, dan Kecamatan Timur yang terdapat pada Tabel 2.77 sebagai berikut.

Tabel 2.77
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit
DBD Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Menui Kepulauan	-	-	-	-	0
2	Bungku Selatan	1	-	1	2	0
3	Bahodopi	11	39	22	35	118

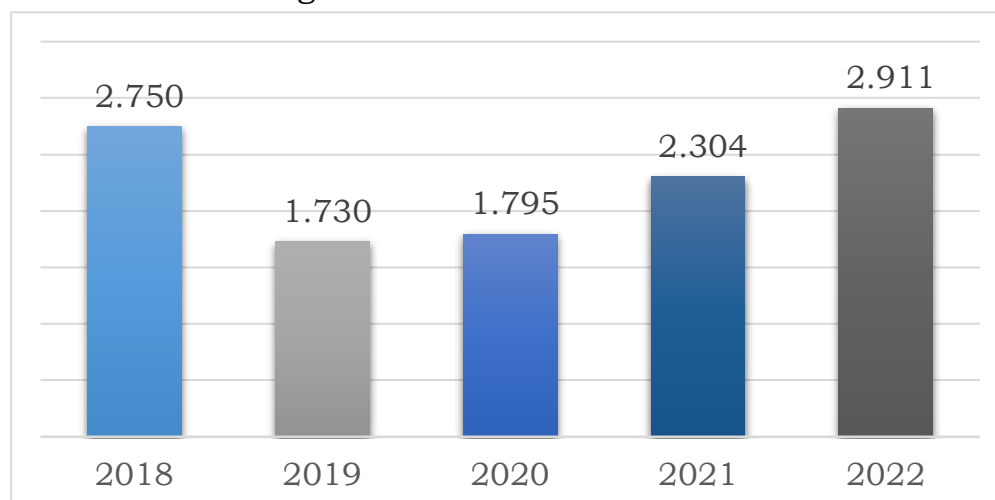
No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
4	Bungku Pesisir	1	17	3	2	1
5	Bungku Tengah	31	25	20	12	45
6	Bungku Timur	-	2	1	-	0
7	Bungku Barat	3	6	18	5	7
8	Bumi Raya	14	17	11	2	3
9	Witaponda	-	0	1	1	2
Total		61	106	77	59	176

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Q. Penderita Diare Yang Ditangani

Diare (*diarrhea*) adalah sebuah penyakit di saat tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit tiga kali dalam 24 jam. Di negara berkembang, diare adalah penyebab kematian paling umum kematian balita, dan juga membunuh lebih dari 2,6 juta orang setiap Tahun.

Menurut WHO (1999) secara klinis diare didefinisikan sebagai bertambahnya defekasi (uang air besar) lebih dari biasanya/lebih dari tiga kali sehari, disertai dengan perubahan konsisten tinja (menjadi cair) dengan atau tanpa darah. Secara klinik dibedakan tiga macam sindroma diare yaitu diare cair akut, disentri, dan diare persisten. Sedangkan menurut menurut Depkes RI (2005), diare adalah suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja, yang melembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar biasanya tiga kali atau lebih dalam sehari. Data Perkembangan Kasus Diare yang ditangani di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.73 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.73
Perkembangan Kasus Diare yang ditangani
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Tahun 2018-2022 jumlah kasus diare yang perkembangannya berfluktuatif dari 2.750 kasus di tahun 2018, menurun di tahun 2019 sebesar 1.730 kasus, kemudian ditahun 2020 meningkat sebanyak 1.795 kasus meningkat dari tahun sebelumnya dan 100 telah ditangani oleh layanan kesehatan Kabupaten Morowali. Sampai dengan tahun 2022 kasus diare meningkat menjadi 2.911 kasus. Kasus diare di Tahun 2022 terbanyak terjadi di Kecamatan Bahodopi, Bungku Tengah dan Menui Kepulauan, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Bungku Timur dan Bungku Pesisir. Data Jumlah Kasus Penderita Diare Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Tabel 2.78 sebagai berikut.

Tabel 2.78
Jumlah Kasus Penderita Diare Menurut Kecamatan
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Menui Kepulauan	207	231	222	321	418
2	Bungku Selatan	476	372	555	353	242
3	Bahodopi	359	7	295	439	610
4	Bungku Pesisir	242	7	64	213	141
5	Bungku Tengah	666	308	131	181	552
6	Bungku Timur	122	171	156	159	107
7	Bungku Barat	188	163	106	221	341
8	Bumi Raya	305	296	177	294	296
9	Witaponda	185	175	89	123	204
Total		2.750	1.730	1.795	2.304	2.304

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

R. Angka Kejadian Malaria

Malaria adalah penyakit yang menyebar melalui gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi parasit. Infeksi malaria dapat terjadi hanya dengan satu gigitan nyamuk. Jika tidak ditangani dengan benar, penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Malaria jarang sekali menular secara langsung dari satu orang ke orang lainnya. Penyakit ini dapat menular jika terjadi kontak langsung dengan darah penderita. Janin di dalam kandungan juga dapat terinfeksi malaria karena tertular dari darah sang ibu. Gejala malaria biasanya akan muncul antara satu sampai dua minggu setelah tubuh terinfeksi. Gejala juga dapat muncul setahun setelah gigitan nyamuk, namun kasus ini jarang terjadi. Gejala-gejala malaria umumnya terdiri dari demam, berkeringat, menggigil atau kedinginan, muntah-muntah, sakit kepala, diare, dan nyeri otot. Jika anda sudah terlanjur mengalami gejala-gejala malaria, segera temui dokter agar dapat dilakukan diagnosis dan penanganan secepatnya. Malaria dapat didiagnosis dengan mudah melalui tes darah yang sederhana.

Malaria disebabkan oleh parasit *Plasmodium*. Sebetulnya ada banyak jenis parasit *Plasmodium*, tapi hanya lima jenis yang menyebabkan malaria pada manusia. Parasit *Plasmodium* hanya disebarkan oleh nyamuk *Anopheles* betina. Dua jenis parasit yang umum di Indonesia adalah *Plasmodium falciparum* dan *Plasmodium vivax*. Gigitan nyamuk malaria lebih sering terjadi pada malam hari. Setelah terjadinya gigitan, parasit akan masuk ke dalam aliran darah. Penyebaran penyakit malaria juga dapat terjadi melalui transfusi darah atau melalui pemakaian jarum suntik secara bergantian. Meski kasus ini jarang sekali terjadi, Anda tetap harus berhati-hati. Pengobatan Malaria Penderita malaria dapat sembuh total jika diobati dan dirawat dengan benar. Berbagai jenis obat-obatan antimalaria dipakai untuk mengobati sekaligus mencegah penularan malaria. Obat-obatan yang diberikan tergantung pada beberapa hal, yaitu tingkat keparahan gejala-gejalanya, jenis parasit yang menjadi penyebabnya, lokasi penularan malaria, serta kondisi pasien. Jika pasien sedang hamil, pengobatannya akan dibedakan dengan penderita yang sedang tidak hamil. Komplikasi Malaria Penyakit malaria akan memiliki dampak lebih buruk jika terjadi pada wanita hamil, bayi, anak kecil, dan orang tua. Malaria berpotensi membuat ketahanan tubuh menurun secara drastis dalam waktu yang singkat. Karena itu, penanganannya perlu dilakukan dengan cepat. Jika malaria tidak segera ditangani sejak awal, penyakit ini dapat menimbulkan beberapa komplikasi seperti dehidrasi, anemia parah, gagalnya organ tubuh, dan beberapa kondisi lainnya. Untuk menghindari diri dari gigitan nyamuk adalah cara yang paling penting untuk mencegah penularan malaria. Anda dapat memakai kelambu untuk menutupi ranjang saat tidur, menyingkirkan genangan air di sekitar rumah, memakai *lotion* anti serangga, dan menggunakan pakaian atau selimut yang menutupi kulit tubuh. Data Angka Kejadian Malarian Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 tersaji pada Tabel 2.79 sebagai berikut.

Tabel 2.79
Angka Kejadian Malarian Per 100.000 Penduduk
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kejadian Malaria	30	15	10	10	19
Jumlah Penduduk	119.292	121.296	161.727	167.910	176.244
	25,15	12,37	6,18	5,96	10,78

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Kejadian malaria ditemukan di Kabupaten Morowali Tahun 2018 sebanyak 30 kasus dan menurun ditahun 2019 sebanyak 15 kasus. Namun Tahun 2022 jumlah kasus malaria menurun menjadi 19 kasus, angka kejadian malaria per 100.000 penduduk sebesar 10,78. Angka kejadian Malaria per 100.000 penduduk Kabupaten Morowali menurun seiring dengan jumlah kasus yang terjadi. Selanjutnya kejadian malaria di Kabupaten Morowali telah 100 persen tertangani. Berdasarkan persebaran kasus di Kecamatan, Tahun 2022 kasus malaria terbesar di Kecamatan Bungku Barat sebanyak 14 kasus, Kecamatan Bumi Raya sebanyak 3 kasus, Kecamatan Witaponda dan Buku Pesisir sebanyak 1 kasus. Kecamatan dengan Nol kejadian malaria adalah Kecamatan Menui Kepulauan, Bungku Selatan, dan Bahodopi dan Bungku Timur, serta Bungku Tengah yang terdapat pada Tabel 2.80 sebagai berikut ini.

Tabel 2.80

**Angka Kejadian Malaria Menurut Kecamatan
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Angka Kejadian Malaria Kabupaten Morowali				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Menui Kepulauan	-	-	-	-	0
2	Bungku Selatan	6	-	-	-	0
3	Bungku Barat	-	-	1	8	14
4	Bumi Raya	1	1	5	-	3
5	Bahodopi	6	1	2	-	0
6	Wita Ponda	7	3	-	2	1
7	Bungku Pesisir	10	7	1	-	1
8	Bungku Timur	-	1	-	-	0
9	Bungku Tengah	-	2	1	-	0
Total		30	15	10	10	19

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

S. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

HIV adalah dari Human Immunodeficiency Virus yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang akan melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit. HIV akan berubah menjadi AIDS jika tidak ditata laksana dengan baik. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. ARV (Anti Retroviral) berguna untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi. ARV bekerja dengan mengontrol proses replikasi dari HIV

yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan membuat salinan palsu dari DNA. Hal itu membuat HIV tampak seperti normal dari tubuh yang tidak mengancam, sehingga sistem kekebalan tubuh tidak bisa mendeteksi virus dan keberadaan HIV dalam tubuh tetap aman. Data Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Tabel 2.81 sebagai berikut.

Tabel 2.81
Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pasien HIV	11	16	12	5	36
Jumlah Penduduk	119.292	121.296	161.727	167.910	176.244
	0,0092	0,0132	0,0074	0,0030	0,0204

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Jumlah pasien penderita HIV di Kabupaten Morowali cenderung mengalami peningkatan, dari 11 kasus Tahun 2018 bertambah menjadi 16 kasus Tahun 2019, dan menurun di tahun 2020 sebanyak 12 kasus, ditahun 2021 menurun signifikan hanya terdapat 5 kasus, namun di tahun 2022 kembali meningkat signifikan sebesar 36 kasus. Tingkat prevalensi HIV/AIDS tahun 2022 sebesar 0,0204. Selanjutnya pasien HIV/AIDS terbanyak di Kecamatan Bahodopi 14 kasus, Bungku Tengah 10 kasus, serta Kecamatan Bungku Barat, Bumi Raya sebanyak 3 Kasus, selain itu dikecamatan lainnya tidak terdapat kasus HIV/AIDS. Dari data sebaran tersebut kasus HIV/AIDS marak terjadi di kawasaan pertambangan, untuk itu peningkatan pengawasan di wilayah tersebut juga harus ditingkatkan. Data Jumlah Kasus HIV/AIDS Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 tersaji pada Tabel 2.82 sebagai berikut.

Tabel 2.82
Jumlah Kasus HIV/AIDS Menurut Kecamatan
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Menui Kepulauan	0	0	0	-	0
2	Bungku Selatan	0	0	0	-	1
3	Bahodopi	1	4	7	-	14
4	Bungku Pesisir	0	-	1	-	1
5	Bungku Tengah	0	1	4	3	10
6	Bungku Timur	0	-	0	2	2
7	Bungku Barat	0	1	0	-	3

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
8	Bumi Raya	5	5	0	-	3
9	Witaponda	5	5	0	-	2
Total		11	16	12	5	36

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

T. Cakupan Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu prasarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan suatu wilayah kerja tertentu (Depkes, 2011). Pengertian puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dapat diterima dan terjangkau masyarakat serta peran aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan Iptek tepat guna, dengan biaya dari Pemerintah dan masyarakat guna mencapai derajat kesehatan optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan (Depkes, 2009). Jika ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka peranan dan kedudukan puskesmas sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan, maka Puskesmas bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kedokteran. Data cakupan Puskesmas di Kabupaten Morowali disajikan pada Tabel 2.83 sebagai berikut.

Tabel 2.83
Cakupan Puskesmas Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

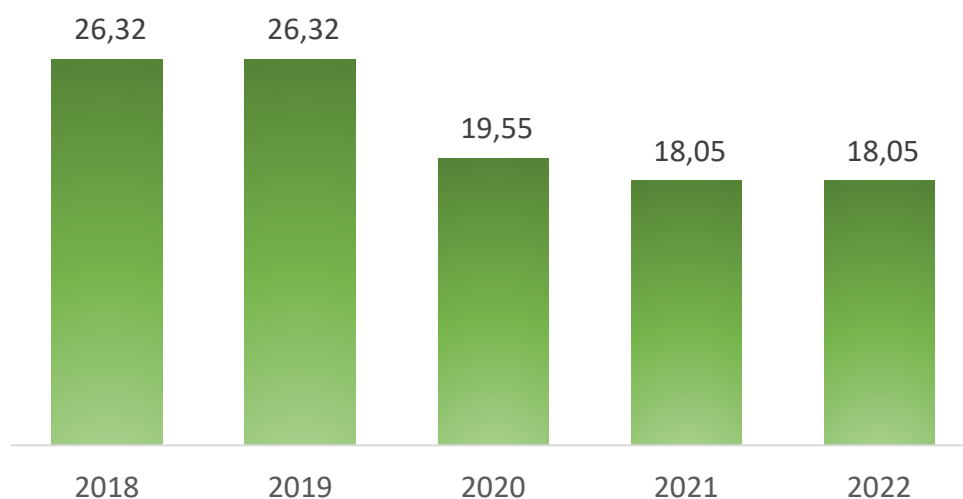
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kecamatan	9	9	9	9	9
Jumlah Puskesmas	9	9	9	9	9
Rasio Puskesmas	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Angka indikator ini lebih tinggi lebih baik, kegunaan indikator ini sebagai gambaran awal tentang kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat dengan mendekatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dengan mempertimbangkan jumlah kecamatan. Cakupan layanan Puskesmas di Kabupaten Morowali mencapai 100 persen, yang artinya fasilitas Puskesmas telah tersedia di Semua Kecamatan Kabupaten Morowali.

U. Cakupan Pembantu Puskesmas

Puskesmas Pembantu (Pustu) yaitu unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membantu kegiatan Puskesmas di sebagian dari wilayah kerja. Rumus yang digunakan adalah dengan menggunakan jumlah desa. Data cakupan Pustu disajikan pada Gambar 2.74 berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2023, data diolah

Gambar 2.74
Cakupan Puskesmas Pembantu
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Pada kurun waktu 2018-2022 jumlah Pustu di Kabupaten Morowali sebanyak 24. Dengan Jumlah desa yang tetap sebanyak 133 desa cakupan Pustu juga tetap dengan 18,05. Cakupan pustu menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Nilai indikator ini makin tinggi makin baik, yang menggambarkan makin baiknya kemampuan daerah.

V. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang ke empat atau lebih untuk mendapatkan pelayanan *Ante Natal Care (ANC)* sesuai standar yang ditetapkan dengan syarat:

- 1) Satu kali dalam trimester pertama (sebelum 14 minggu);
- 2) Satu kali dalam trimester kedua (antara minggu 14-28;
- 3) Dua kali dalam trimester ketiga (antara minggu 28-36 dan setelah minggu ke 36);
- 4) Pemeriksaan khusus bila terdapat keluhan-keluhan tertentu;
- 5) Faktor-faktor yang mempengaruhi Ante Natal Care (ANC).

Tabel 2.84
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Di Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Ibu Hamil yang melakukan Kunjungan K4	2.525	2.697	2.707	2.672	2.744
Jumlah Sasaran Ibu Hamil	2.900	3.374	3.363	3.411	3.339
Rasio Kunjungan K4	87,07	79,93	80,49	78,33	82,18

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Berdasarkan data ibu hamil k4 pada Tabel 2.84 di atas, maka kondisi di Kabupaten Morowali dari Tahun ke Tahun mengalami fluktuasi namun yang menjadi fokus adalah jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan ibu hamil K4 tidak mencapai 100 persen kurun waktu 2018-2022. Rasio kunjungan Ibu Hamil K4 hingga Tahun 2022 mencapai 82,18 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

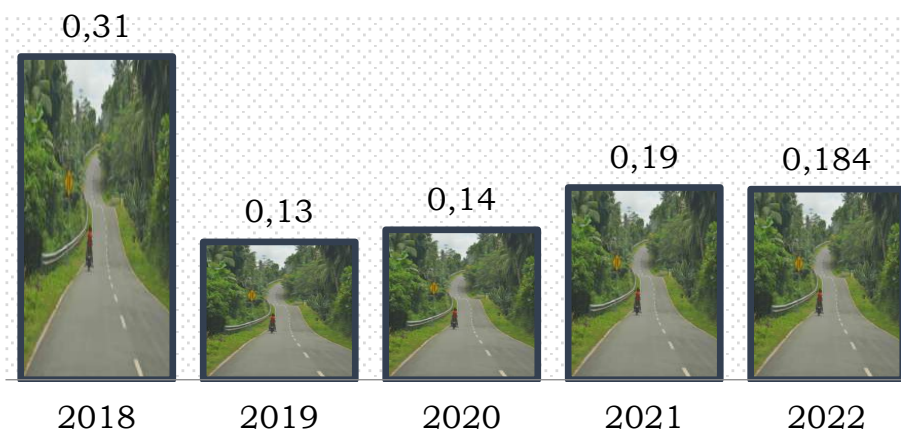
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Infrastruktur jalan yang baik adalah modal fisik (physical capital) bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik. Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan optimalisasi potensi sumber daya alam (*natural resources*), sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya fisik (*physical resources*) serta sumber daya modal (*capital resources*) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Morowali dari Tahun 2018-2022 mengalami penurunan dan masih sangat rendah dari total panjang jalan yang ada. Secara keseluruhan tidak mencapai 50 persen dari Tahun 2018-2022. Tahun 2018 proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Morowali sebesar 0,31,

menurun hingga Tahun 2019 menjadi 0,13, diakibatkan bencana alam yang terjadi berdampak pada banyaknya jalan yang mengalami kerusakan, sehingga proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Tahun tersebut menurun sangat signifikan menjadi 0,133 atau hanya sebesar 13,30 persen dari total panjang jalan yang ada, dan di tahun 2020 sebesar 0,14. Sampai dengan tahun 2022 sebesar 0,184. Data proporsi Panjang jalan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.75 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.75
Proporsi panjang jalan
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

2. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk

Panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi total panjang jalan (km) dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Rasio ini memiliki arti, setiap 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani.

Rasio panjang jalan terhadap penduduk pada Tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan kondisi pada Tahun 2018 sebesar 0,0076 dan hingga Tahun 2022 sebesar 0,0054 terdapat pada Tabel 2.85 sebagai berikut ini.

Tabel 2.85
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk (jiwa)	119.292	121.296	161.727	167.910	176.244

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Total panjang jalan (km)	902,71	948,72	948,72	948,81	947,34
Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk	0,0076	0,0078	0,0059	0,0057	0,0054

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

3. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik merupakan angka perbandingan antara panjang jaringan jalan dalam kondisi baik terhadap panjang jalan secara keseluruhan (meliputi jalan nasional, provinsi, dan kabupaten). Mutu dan kualitas jalan di suatu daerah sangat berpengaruh terhadap semua aktivitas penduduk di daerah tersebut, khususnya sektor kegiatan perdagangan dan transportasi ke daerah kantong produksi dengan pasar yang lebih besar.

Nilai indikator ini berguna untuk mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jaringan jalan yang ada. Hal ini merupakan indikator dari kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan dan memelihara sarana serta prasana bagi publik. Semakin tinggi nilai indikatornya, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyediakan serta memelihara sarana dan prasarana publik. Data Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 km/jam), Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 disajikan pada Gambar 2.76 sebagai berikut.



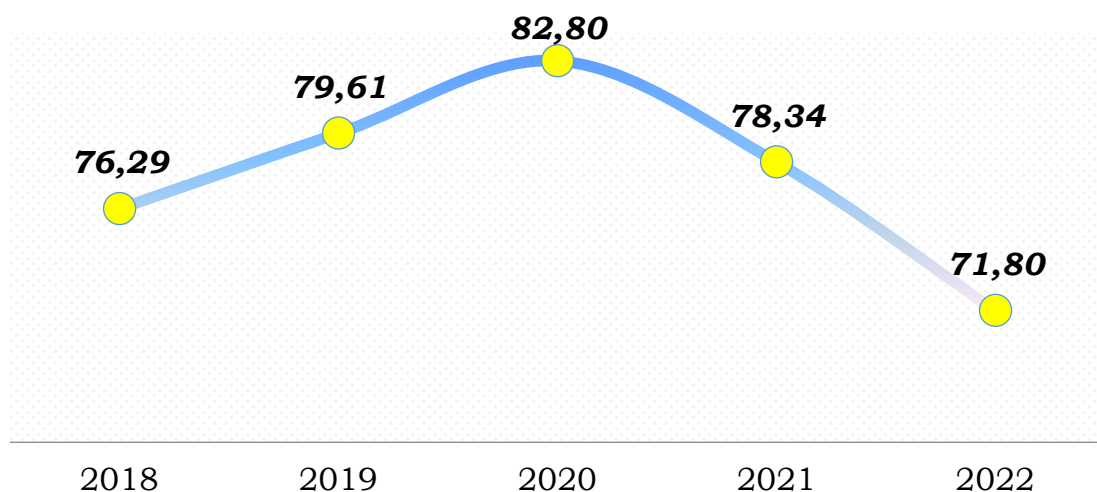
Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.76
Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 km/jam), Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022

Dalam indikator ini, diasumsikan bahwa proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik merupakan jalan yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 dengan kecepatan ≥ 40 km per jam. Berdasarkan data panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 proporsi panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik berada di bawah 50 persen dari total panjang jalan bahkan menurun. Dari 41,97 persen pada Tahun 2018 menurun menjadi 24,30 persen ditahun 2022.

4. Persentase Rumah Tinggal bersanitasi

Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya. Salah satu masalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat diperlukan adalah fasilitas sanitasi yang layak. Banyak manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat apabila terdapat pengelolaan sanitiasi yang baik. Salah satunya adalah mengurangi angka masyarakat yang sakit. Dengan sanitasi masyarakat dapat mengurangi terjadinya dan penularan penyakit pada masyarakat sehingga produktivitas masyarakat dapat lebih maksimal dan kerugian yang dihasilkan menurun. Persentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Tahun 2018 menjadi 76,29 persen. Pada Tahun 2018-2020 meningkat setiap Tahunnya hingga Tahun 2019 menjadi 79,61 persen, dan ditahun 2020 meningkat menjadi 82,80 persen. Namun dalam 2 tahun terakhir menurun hingga 71,80 persen di tahun 2022. Data Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 tersaji pada Gambar 2.77 sebagai berikut.



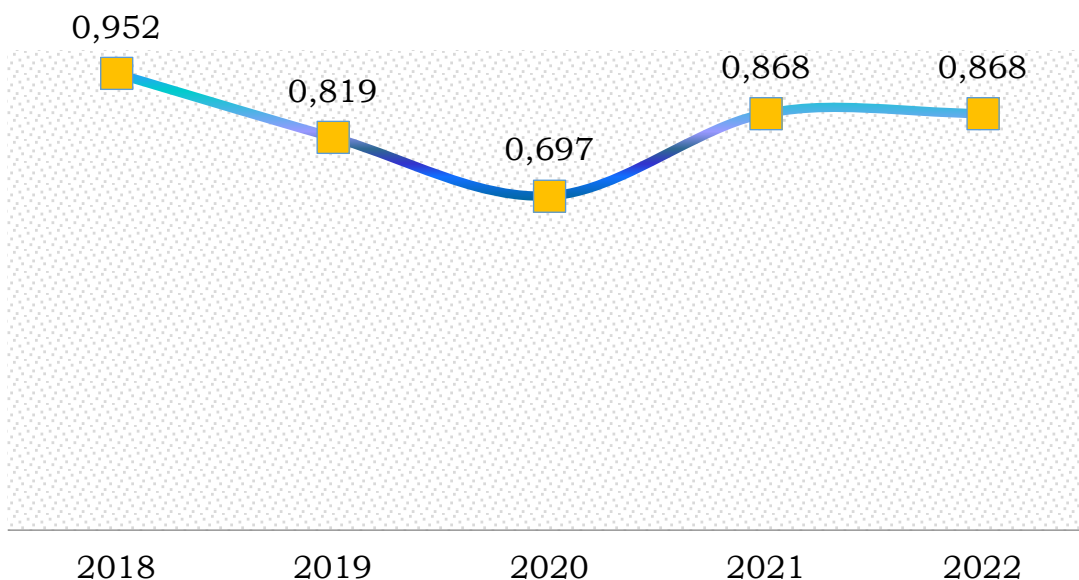
Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.77
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

5. Rasio Jaringan Irigasi

Kondisi jaringan irigasi akan makin menurun seiring dengan waktu dan penggunaannya dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Upaya pemeliharaan jaringan irigasi sangat diperlukan untuk menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar dapat berfungsi dengan baik. Melalui pemeliharaan jaringan irigasi diharapkan kondisi jaringan irigasi dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya dan/atau dapat dikembalikan sesuai dengan fungsinya sama seperti sebelum terjadi kerusakan.

Rasio jaringan irigasi merupakan kondisi keberadaan jaringan irigasi yang berada dan mengairi lahan usahatani penduduk. Rasio jaringan irigasi diperoleh dari perbandingan antara panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian. Rasio jaringan irigasi pada periode Tahun 2018-2022 berkembang fluktuatif, Hal ini di tunjukan pada Tahun 2018 sebesar 0,952, kemudian tahun 2019 menurun sebesar (0,819), dan ditahun 2020 sebesar 0,679. Selanjutnya meningkat pada tahun 2022 sebesar 0,868, secara lengkap yang disajikan pada Gambar 2.78 sebagai berikut.



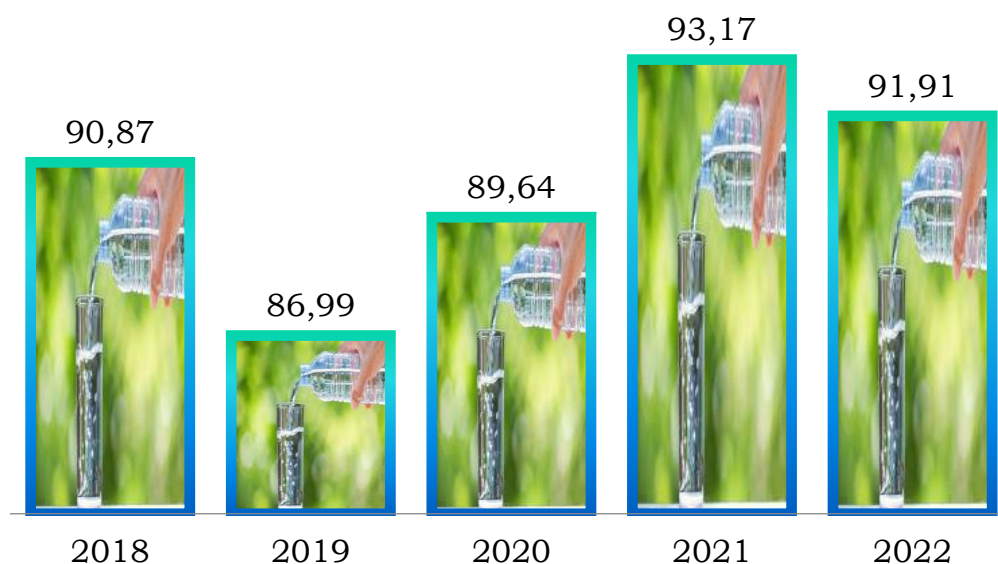
Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.78
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

6. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk yang berakses air minum diperoleh dari hasil pembagian antara banyaknya penduduk yang berakses air minum dengan jumlah total penduduk di daerah tersebut dikalikan 100.

Berdasarkan data yang diperoleh dari gambar di bawah ini, persentase penduduk berakses air minum dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari 90,87 persen pada Tahun 2018 menjadi 91,91 persen pada Tahun 2022. Capaian setiap Tahun yakni, Tahun 2018 (90,87 persen), 2019 (86,99). Tahun 2020 (89,64) dan ditahun 2021 sebesar (93,17). Hal ini mengindikasikan bahwa akses penduduk untuk mendapatkan air minum yang layak mengalami peningkatan. Data Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2018–2022 tersaji pada Gambar 2.79 sebagai berikut.

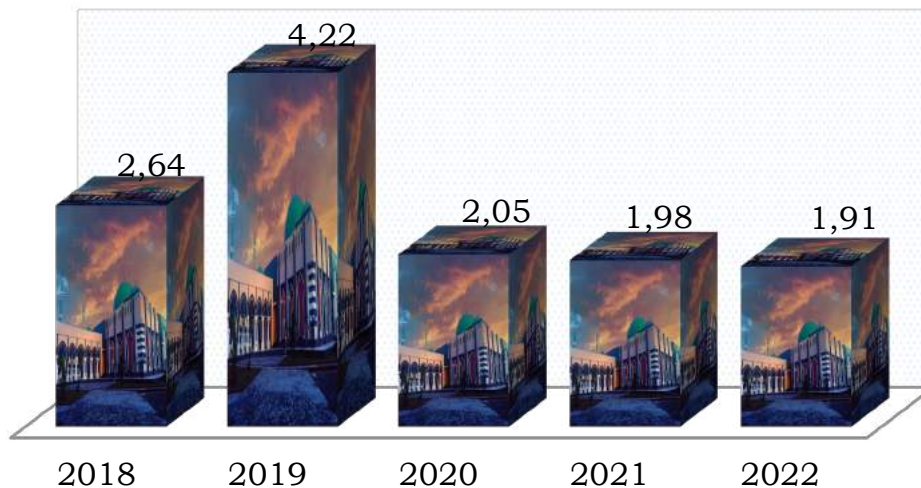


Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.79
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2018–2022

7. Rasio Tempat Ibadah/Satuan Penduduk

Beribadah menurut agama dan kepercayaan dijamin oleh negara, karena beribadah merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah merupakan hak asasi dasar manusia yang harus difasilitasi pemerintah untuk dapat dilaksanakan setiap pemeluk agama. Pemerintah wajib menyediakan sarana beribadah bagi warga, sehingga dapat menjalankan kewajiban beribadah. Data Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 terdapat pada Gambar 2.80 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

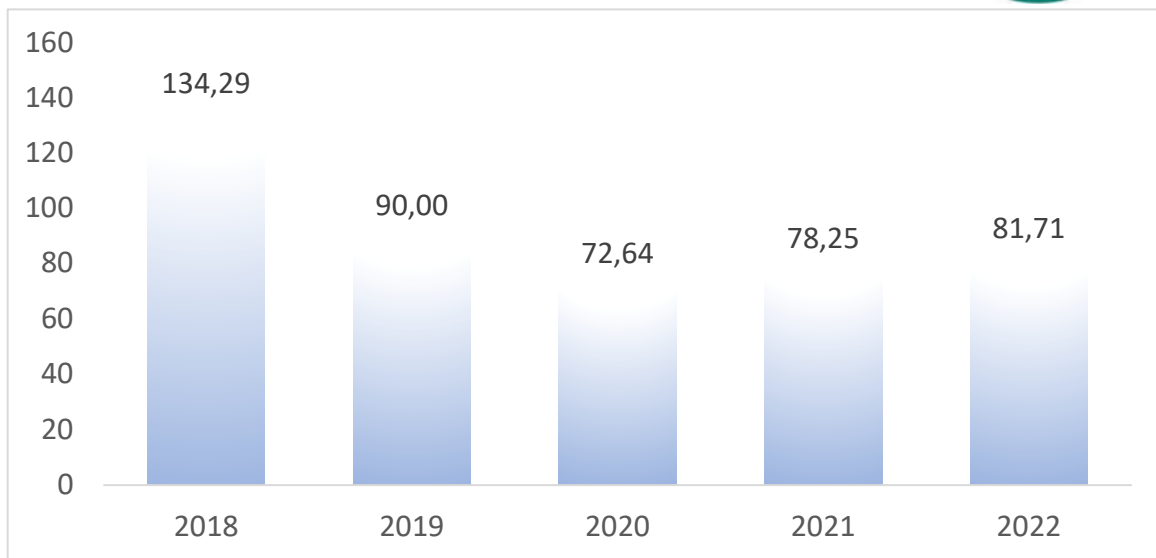
Gambar 2.80
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022

Rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk di Kabupaten Morowali hingga Tahun 2018 mencapai 2,64, meningkat tahun 2019 sebesar 4,22, menurun ditahun 2020 sebesar 2,05. Kemudian menurun ditahun 2022 sebesar 1,91 per 1.000 penduduk. Angka ini semakin kecil, menunjukkan bahwa masih kurangnya tempat ibadah dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap Tahunnya.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rumah sederhana sehat, yaitu rumah yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana, tetapi masih memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi lokal meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan, geologis, dan iklim setempat serta potensi sosial budaya seperti arsitektur lokal, dan cara hidup. Data Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 terdapat pada Gambar 2.81 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Berbagai Tahun Terbitan, data diolah, SIPD Kabupaten Morowali Tahun 2023.

Gambar 2.81
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan meningkatnya kepemilikan rumah layak huni bagi penduduk di kabupaten Morowali pada kurun waktu 2018-2022. Hal ini diperlihatkan oleh semakin meningkatnya rasio rumah layak huni dengan jumlah penduduk yang menempati. Kemudian pada Tahun 2018-2022 telah mengalami peningkatan yang drastis.

2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Terdapat 5 (lim) indikator yang dapat diukur untuk mengetahui capaian pembangunan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang disajikan pada Tabel 2.86 sebagai berikut ini.

Tabel 2.86
Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2018-2022 di Kabupaten Morowali

No	Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	951	975	975	975,00	825,00
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	12	8	8	8,00	5,00

No	Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	4	5	7	7,00	7,00

Sumber: SIPD Kabupaten Morowali Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) mengalami peningkatan dari 951 di Tahun 2018 menjadi 975 di Tahun 2019, namun di tahun 2022 menurun sebesar 825. Selanjutnya untuk Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) justru mengalami penurunan dari 18 di Tahun 2018 dan Tahun 2022 sebesar 5. Untuk indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota sampai dengan Tahun 2022 sebesar 7 meningkat dari Tahun 2018.

2.3.1.6 Sosial

Terdapat 9 (Sembilan) indikator yang dapat diukur untuk mengetahui capaian pembangunan di bidang sosial. Namun, karena ketidaktersediaan data, dokumen P-RPJMD ini hanya memaparkan 6 (enam) indikator yang disajikan pada Tabel 2.87 sebagai berikut ini.

Tabel 2.87
Indikator Capaian Pembangunan Bidang Sosial pada Tahun 2018-2022 di Kabupaten Morowali

No	Indikator Capaian Urusan Sosial	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	48.887	47.091	50.330	50.680	51.030
2.	Persentase PMKS yang tertangani	68,99	68,99	99	107,67	116,34
3.	Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0	0	0	1	1
4.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100	100	100	100	100
5.	Korban bencana alam (Jiwa/KK)	0	2.706	136	NA	NA
6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	5,8	2,4	8	0	0

Sumber: EKPD Dinas Sosial Kabupaten Morowali Tahun 2023

Berdasarkan data pada Tabel 2.87 di atas ditunjukkan bahwa secara umum terdapat peningkatan realisasi pembangunan dalam bidang sosial, dan ada beberapa indikator yang belum diidentifikasi oleh OPD. Dalam hal indikator. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan persentase PMKS yang tertangani, dan juga penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia menunjukkan peningkatan jumlah orang yang memperoleh bantuan (jaminan) sosial dari pemerintah daerah. Demikian pula dengan adanya kejadian bencana pada Tahun 2018-2022, seluruh korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

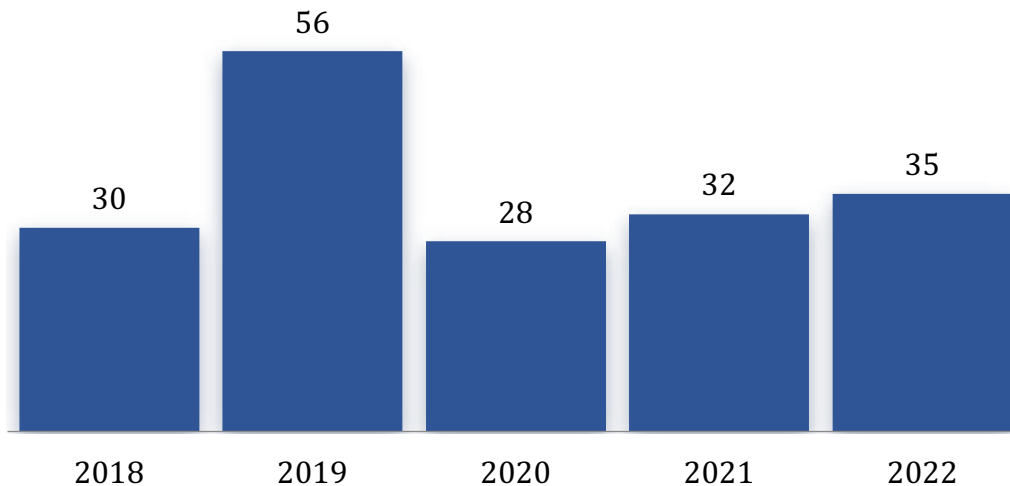
2.3.2.1 Tenaga Kerja

Terkait urusan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan, terdapat dua belas indikator yang dapat diukur dalam menilai keberhasilan pembangunan selama lima Tahun terakhir. Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah, sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli). Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain; Angka partisipasi angkatan kerja; Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun; Tingkat partisipasi angkatan kerja; Pencari kerja yang ditempatkan; Tingkat pengangguran terbuka; Keselamatan dan perlindungan; Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah. Adapun beberapa indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun (orang)

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sebagai daerah industri besar

di Provinsi Sulawesi Tengah, sering terjadi sengketa pengusaha dan pekerja setiap Tahunnya di Kabupaten Morowali. Angka sengketa pengusaha-pekerja cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan dari jumlah sengketa yang ada Tahun 2018 hanya sebanyak 30 sengketa hingga Tahun 2022 meningkat menjadi 35 sengketa. Sengketa terbanyak terjadi di Tahun 2019 yaitu 56 sengketa. Data Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun (Orang) Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 tersaji pada Gambar 2.82 Sebagai berikut.

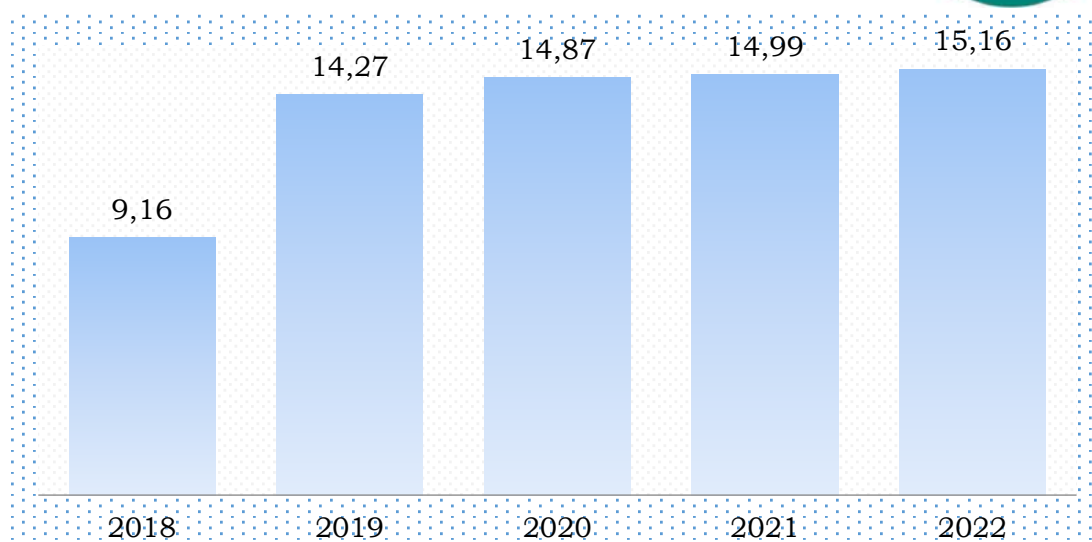


Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.82
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun (Orang)
Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022

2. Rasio lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas SDM. Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1, S2 dan S3 Tahun 2018 sebesar 9,92 persen, menurun di Tahun 2019 sebesar 9,16 persen, tahun 2020 sebesar 14,27 persen. Sampai dengan tahun 2022 rasio lulusan S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk Kabupaten Morowali sebesar 15,16 persen. Data Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 yang disajikan pada Gambar 2.83 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Morowali Tahun 2019-2023 (diolah)

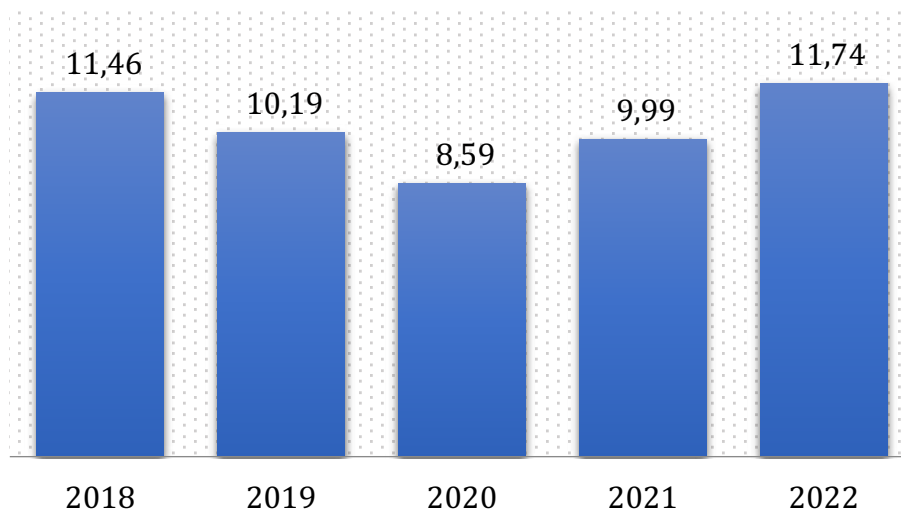
Gambar 2.83
Rasio lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Terdapat 19 indikator yang dapat diukur untuk mengetahui capaian pembangunan di urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Beberapa indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah. Jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Morowali yang bekerja pada lembaga pemerintah dari Tahun 2018-2022 tidak terjadi perkembangan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dari Tahun 2018 sebesar 11,46 persen, menurun Tahun 2019 sebesar 10,19 persen, ditahun 2020 sebesar 8,59 persen. Kemudian meningkat ditahun 2021 menjadi 9,99 persen, dan ditahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 11,74 persen. Data Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 terdapat pada Gambar 2.84 Sebagai berikut.

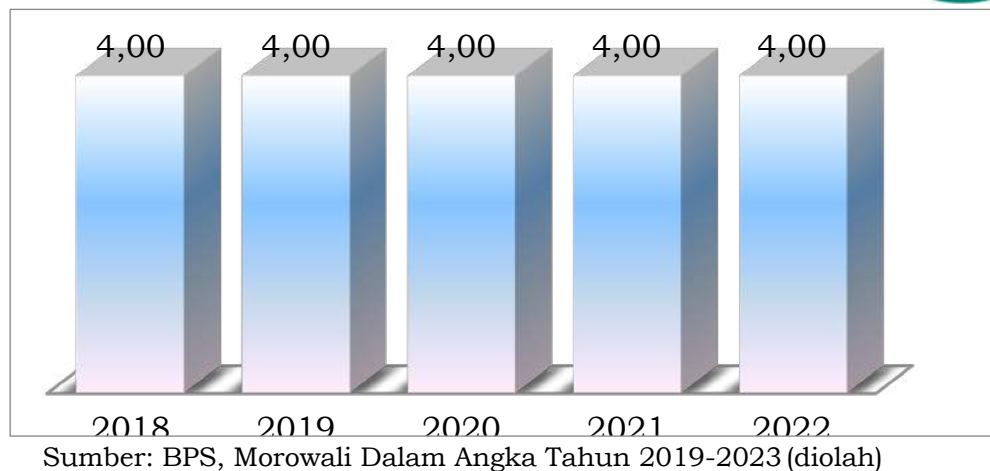


Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.84
**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022**

2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

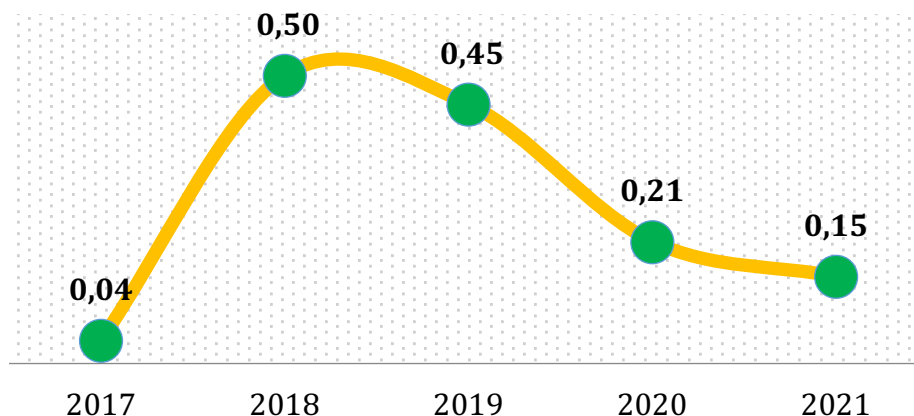
Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tentang Kuota perempuan sebesar 30 persen dalam menduduki kursi DPRD. Selain ditujukan untuk mengatur pencalonan anggota legislatif, peraturan itu juga disusun dengan mempertimbangkan *affirmative action* keterwakilan perempuan. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Morowali di periode 2014-2019 sebanyak 4 orang atau sebesar 16 persen, namun di Priode Tahun 2019-2024 hanya terdapat 1 anggota dewan perempuan atau sebesar 4 persen. Namun dalam pelaksanaan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Morowali di Pemilu Tahun 2019 sebesar 30 persen atau sesuai aturan KPU. Data Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 yang tersaji pada Gambar 2.85 sebagai berikut.



Gambar 2.85
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

3. Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Rasio KDRT di Kabupaten Morowali perkembangannya berfluktuatif. Tahun 2018 rasio KDRT sebesar 0,04, dan hingga Tahun 2019 sebesar 0,45 persen, menurun dua tahun terakhir menjadi 0,15 ditahun 2022. Data Rasio KDRT Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 tersaji pada Gambar 2.86 sebagai berikut.

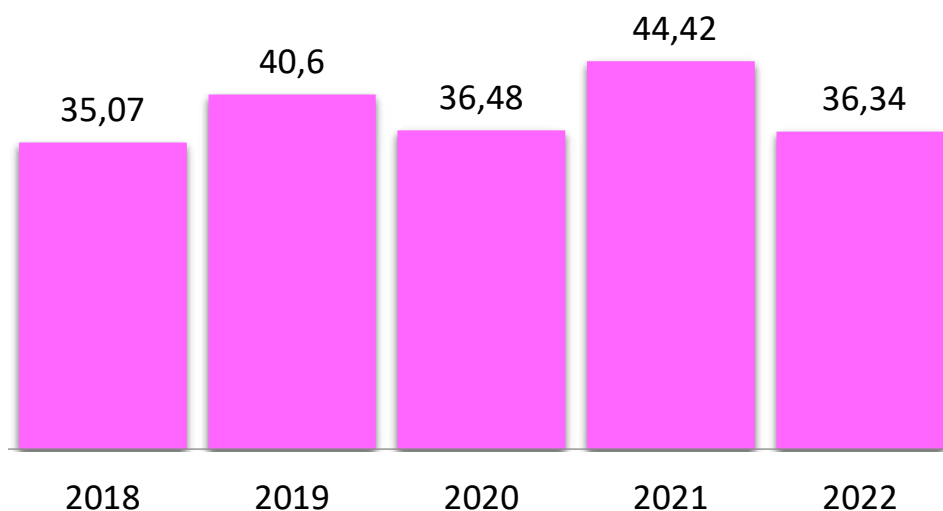


Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2020 (diolah)
BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2021-2022 (diolah)

Gambar 2.86
Rasio KDRT Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

4. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Perempuan terbukti memiliki kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan rumah tangga. Usia kerja yang sudah bekerja atau masih mencari pekerjaan terhadap penduduk usia kerja yaitu 15 Tahun ke atas TPAK dapat menjadi indikator sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memberikan ruang bagi partisipasi kesetaraan gender dan peluang kerja bagi perempuan khususnya pendidikan dan pekerjaan di sektor formal. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Morowali pada Tahun 2018 sebesar 35,07 persen, meningkat Tahun 2019 sebesar 40,60 persen, namun menurun ditahun 2020 sebesar 36,48 persen, kembali meningkat pada tahun 2021, dan menurun ditahun 2022 sebesar 36,34 persen. Data terkait terdapat pada Gambar 2.87 sebagai berikut ini.



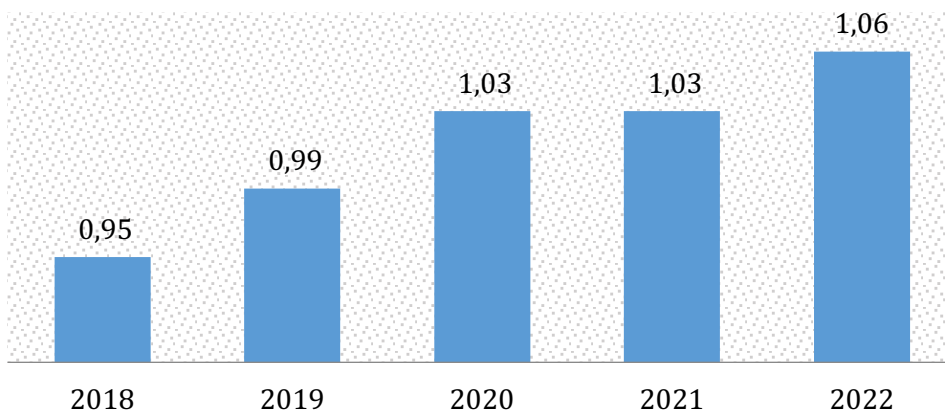
Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.87
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Morowali Tahun 2018 – 2022

5. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD

Perkembangan Rasio APM perempuan/laki-laki di SD di Kabupaten Morowali dalam 2 Tahun menunjukkan peningkatan, Tahun 2018 sebesar 0,95 meningkat di Tahun 2019 menjadi 0,99 dan ditahun 2020 sebesar 1,03, tahun 2021 1,03, dan ditahun 2022 meningkat menjadi 1,06 Data Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 tersajikan pada Gambar 2.88 sebagai berikut.

■ Rasio APM perempuan/laki-laki di SD



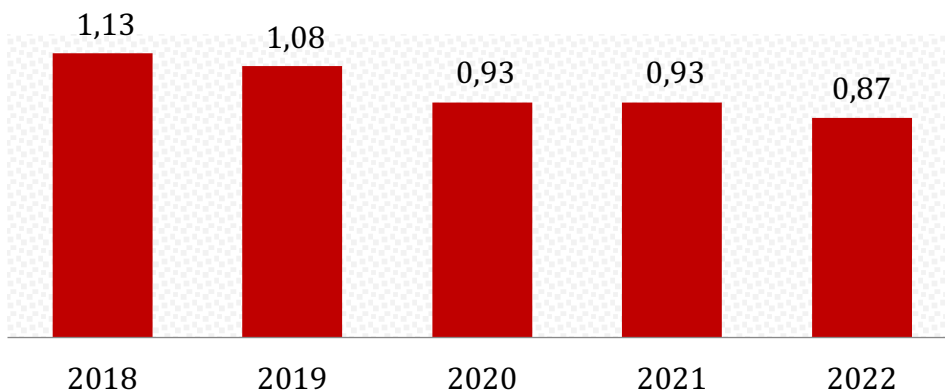
Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.88
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD
Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022

6. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

Perkembangan Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP di Kabupaten Morowali dalam 2 Tahun di atas 1 yang menunjukkan bahwa perempuan yang bersekolah pada umurnya lebih besar dibanding dengan laki-laki, hal ini ditunjukkan Tahun 2018 sebesar 1,13 dan Tahun 2019 sebesar 1,08, dan pada tahun 2020 sebesar 0,93. Sampai tahun 2022 menurun sebesar 0,06 poin menjadi 0,87. Data Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 tersaji pada Gambar 2.89 sebagai berikut.

■ Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

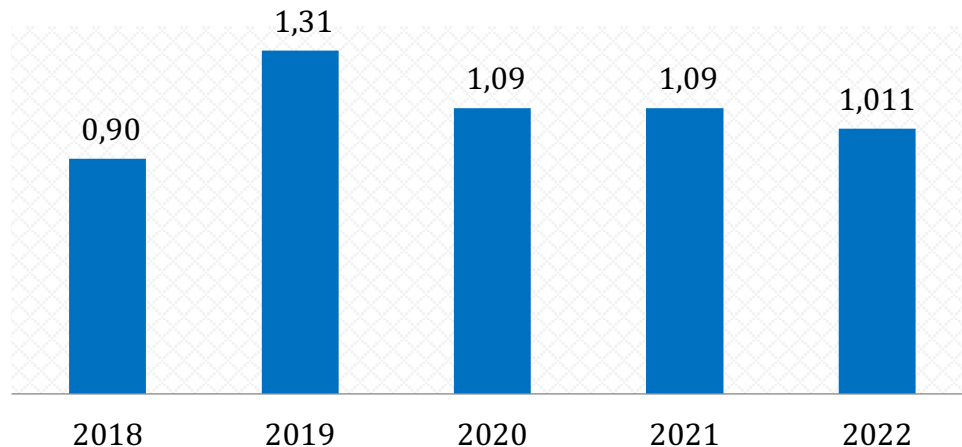


Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.89
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP
Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022

7. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA

Selanjutnya untuk Perkembangan Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA di Kabupaten Morowali dalam 2 Tahun menunjukkan peningkatan, Tahun 2018 sebesar 0,90 meningkat di Tahun 2019 menjadi 1,31, kemudian pada tahun 2020 sedikit menurun menjadi 1,09. Tahun 2022 sebesar 1,011. Data Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 terdapat Gambar 2.90 Sebagai berikut.



Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.90
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA
Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022

2.3.2.3 Pangan

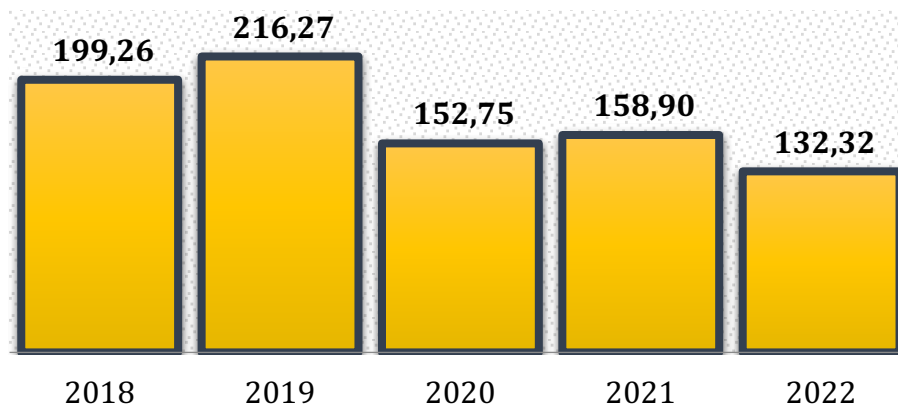
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Ketersediaan pangan terkait dengan usaha produksi, distribusi dan perdagangan pangan. Ketahanan pangan di tingkat mikro dinilai dari ketersediaan dan konsumsi pangan dalam bentuk energi dan protein perkapita per hari (Suryana, 2004). Ketersediaan pangan adalah suatu kondisi dalam penyediaan pangan yang mencakup makanan dan minuman tersebut berasal apakah dari tanaman, ternak atau ikan bagi keluarga dalam suatu kurun waktu tertentu. Ketersediaan pangan dalam keluarga dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan (Baliwati dan Rosita, 2004). Urusan pangan dalam penyusunan RPD menyangkut tiga aspek

yakni persentase ketersediaan pangan utama, Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita dan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.

a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Analisis indikator ketersediaan pangan utama dilakukan dengan membandingkan ketersediaan pangan dengan jumlah penduduk Kabupaten Morowali.

Ketersediaan pangan utama berdasarkan produksi dan konsumsi pangan utama, secara umum Kabupaten Morowali memiliki cadangan pangan setara beras yang cukup besar setiap Tahunnya. Apabila konsumsi pangan masih tetap didominasi oleh beras sebagai sumber karbohidrat, maka akan cukup memberatkan bagi upaya pemantapan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan bertumpu kepada sumber daya lokal. Diversifikasi pangan menjadi sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi ketergantungan yang sangat tinggi pada jenis pangan tertentu saja seperti beras. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Morowali menunjukkan peningkatan setiap Tahunnya yakni di Tahun 2018 sebesar 199,26 hingga Tahun 2022 menjadi 132,32 menurun dari tahun sebelumnya yang terdapat pada Gambar 2.91 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.91
Ketersediaan Pangan Utama
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

b. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan minimal 2.400 kkal/kapita/ hari untuk energi dan minimal 63 gram/kapita/hari untuk protein. Hasil perhitungan ketersediaan energi dan protein per kapita di Kabupaten Morowali disajikan pada Tabel 2.88 sebagai berikut.

Tabel 2.88
Ketersediaan Energi (Kkal) dan Protein (gr) per Kapita
di Kabupaten Morowali Selama Tahun 2018-2022

No	Ketersediaan Energi dan Protein	2018	2019	2020	2021	2022
1	Energi (Kkal)	3.468	3.071	3.071	3.947	4.014
2	Protein (gr)	42,51	86,19	73,80	83,80	82,13

Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2022 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 2.88 di atas menunjukkan bahwa ada kecenderungan ketersediaan energi per kapita per hari selama 5 Tahun terakhir mengalami penurunan hingga Tahun 2022 sebesar 4.014 Kkal, sebaliknya ketersediaan protein perhari mengalami peningkatan hingga Tahun 82,13 sebesar 86,19 gr.

2.3.2.4 Lingkungan Hidup

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator capaian pembangunan bidang Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten memiliki 24 indikator. Penilaian capaian setiap indikator tersebut ada yang sifatnya terukur (kuantitatif) dan tidak terukur atau bersifat kualitatif. Hasil analisis terhadap seluruh indikator capaian kinerja bidang lingkungan hidup diperlihatkan di jelaskan masing-masing sebagai berikut.

1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten Morowali

RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dokumen tersebut diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selama periode Tahun 2018-2020 pemerintah Kabupaten belum menyusun RPLLH, ditahun 2021 telah disusun dokumen RPPLH oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali. Data terkait ditampilkan pada Tabel 2.89 sebagai berikut ini.

Tabel 2.89
Tersusunnya RPPLH
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tersusunnya RPPLH Kabupaten Morowali	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali, 2023.

2. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten Morowali

Dokumen RPPLH Kabupaten Morowali masih belum tersedia sampai dengan tahun 2020. Sehingga integrasi dokumen terkait kedalam rencana pembangunan Kabupaten Morowali belum dilakukan dalam kurun waktu tersebut. Tahun 2021 telah disusun dokumen RPPLH, rincian lengkapnya tercatat pada Tabel 2.90 sebagai berikut.

Tabel 2.90
Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Morowali	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali, 2023.

3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi

Pedoman penyusunan KLHS juga di atur dalam peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dokumen terkait telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Morowali yakni RPJMD dan KLHS RDTR Perkotaan Morowali Lantula Jaya tahun 2021-2041, yang tersaji pada Tabel 2.91 sebagai berikut.

Tabel 2.91
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tersusunnya KLHS Kabupaten Morowali	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali, 2021

4. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA

Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat adalah sebuah deklarasi yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dalam sesi ke-61-nya di Markas PBB di New York pada Kamis, 13 September 2007, mayoritas 144 negara yang mendukung. Belum ada fasilitasi pendampingan pengakuan MHA di Kabupaten Morowali hingga Tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.92 sebagai berikut.

Tabel 2.92
Terfasilitasinya Pendampingan Pengakuan MHA
Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan HMA Kabupaten Morowali	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali, 2023.

5. Penetapan hak MHA

Dari periode Tahun 2018-2022 belum ada penetapan MHA di Kabupaten Morowali seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.93 sebagai berikut ini.

Tabel 2.93
Penetapan Hak HMA Tradisional Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penetapan HMA Kabupaten Morowali	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali, 2023.

6. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Perhargaan pemberian lingkungan hidup di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 belum dilaksanakan tersaji data pada Tabel 2.94 ini.

Tabel 2.94
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada

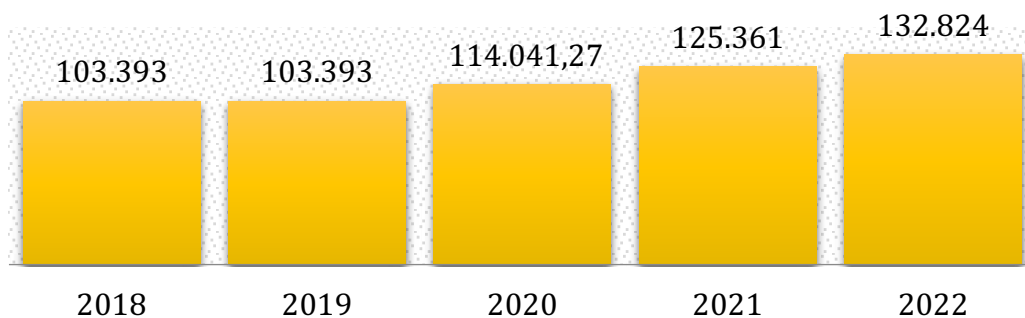
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali, 2023.

2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator pembangunan dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dapat dievaluasi pencapaiannya adalah Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, Penerapan KTP nasional berbasis NIK, Cakupan penerbitan KTP dan Cakupan penerbitan akte kelahiran. Capaian bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk

KTP merupakan dokumen identitas bukti diri resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan berlaku di Tanah Air. Selain sebagai dokumen identitas diri, KTP juga sangat diperlukan untuk registrasi ke beberapa tempat resmi yang membutuhkan identitas asli setempat. Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 Tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 Tahun keatas (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Jumlah penduduk Ber KTP di Kabupaten Morowali Tahun 2018 sebanyak 103.393 orang meningkat sampai Tahun 2020 sebesar 114.041,27, sampai dengan tahun 2022 jumpah penduduk ber-KTP sebanyak 132.824 orang. Peningkatan kepemilikan KTP selama empat Tahun terakhir menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat pentingnya e-KTP yang ditandai dengan meningkatnya perekaman jumlah e-KTP. Data Jumlah Penduduk Per satuan KTP di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 yang terdapat pada Gambar 2.92 sebagai berikut.

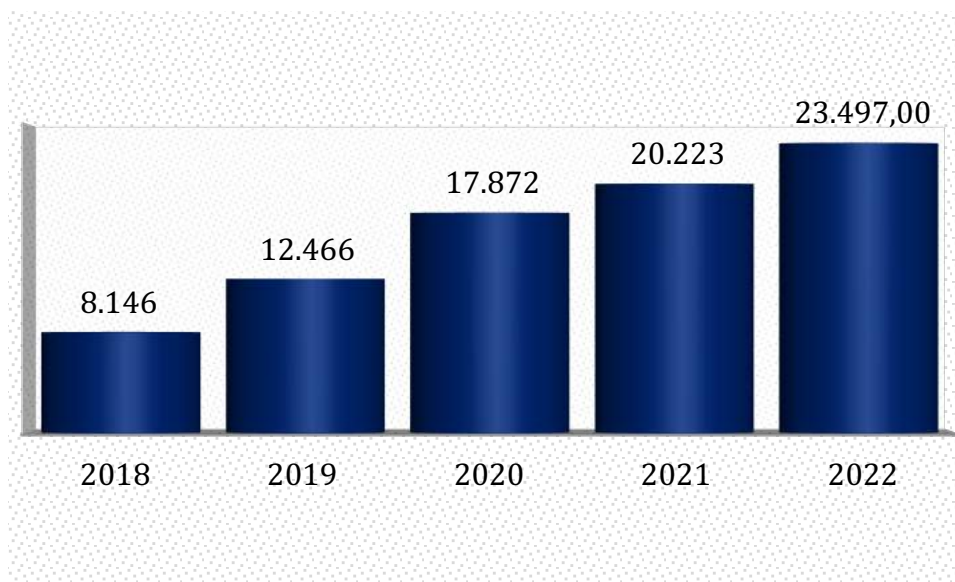


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali, Tahun 2023.

Gambar 2.92
Jumlah Penduduk Per satuan KTP di Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

2. Rasio bayi berakte kelahiran

Akta Kelahiran mempunyai banyak manfaat antara lain: Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang. Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang. Jumlah bayi berakte kelahiran di Kabupaten Morowali di Tahun 2018 sebanyak 8.146 bayi, kemudian Tahun 2022 sebesar 23.497 bayi terdapat pada Gambar 2.93 sebagai berikut ini.



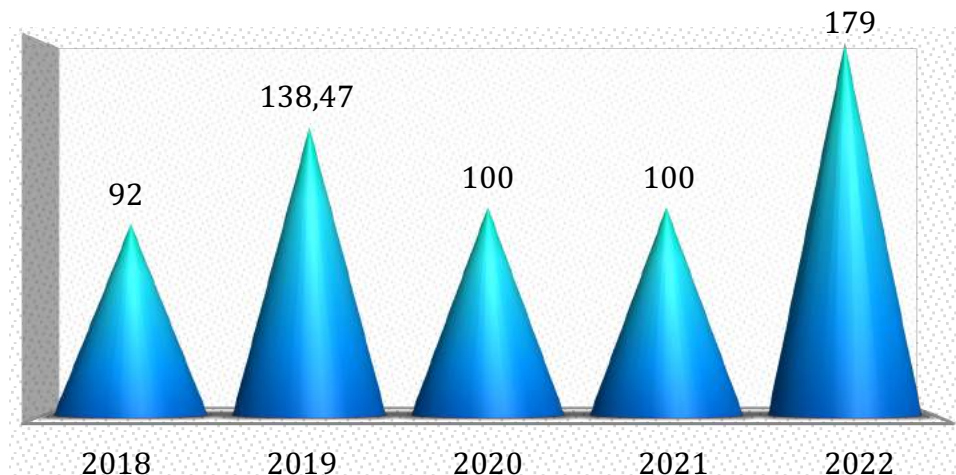
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali, Tahun 2023.

Gambar 2.93
Jumlah Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

3. Rasio pasangan berakte nikah

setiap pasangan yang menikah harus memiliki akta perkawinan atau buku nikah sebagai bukti sahnya pernikahan mereka. Akta perkawinan atau buku nikah memiliki banyak manfaat, baik bagi pasangan itu sendiri maupun bagi anak-anak dan keluarga mereka. Akta perkawinan atau buku nikah juga merupakan syarat untuk mengurus berbagai dokumen penting lainnya, seperti kartu keluarga, akta kelahiran, paspor, dan lain-lain. Dengan demikian, akta perkawinan atau buku nikah adalah dokumen yang sangat penting bagi pasangan yang menikah dan harus segera dibuat setelah pernikahan dilangsungkan. Saat ini, pemerintah telah mempermudah proses pembuatan akta perkawinan atau buku nikah dengan menghadirkan layanan online yang dapat diakses melalui QR code yang terdapat di

buku nikah. Jumlah pasangan berakte nikah di Kabupaten Morowali di Tahun 2018 sebanyak 92 pasangan, 2019 sebanyak 138 pasangan dan Tahun 2020 sebanyak 100 pasangan dan ditahun 2022 sebesar 179 persen, seperti yang terdapat pada Gambar 2.94 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali, Tahun 2023.

Gambar 2.94
Jumlah Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

4. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Data base kependudukan di Kabupaten Morowali periode Tahun 2018-2022 telah tersedia ditampilkan pada Tabel 2.95 sebagai berikut ini.

Tabel 2.95
Ketersediaan database kependudukan
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali, Tahun 2023.

5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Penerapan KTP nasional berbasis NIK merupakan kebijakan pemerintah Indonesia dan diwajibkan untuk diterapkan di seluruh wilayah Rerpublik Indonesia. Data penerapan KTP nasional berbasis NIK di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Tabel 2.96 berikut ini.

Tabel 2.96
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

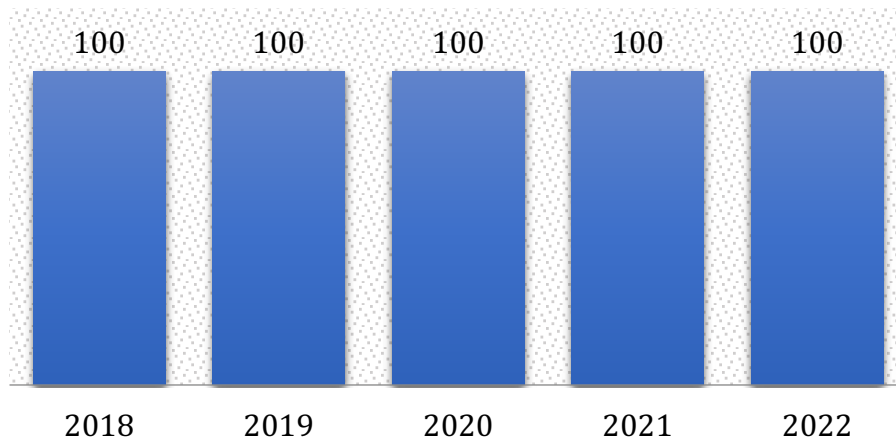
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali, Tahun 2023.

2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemerintahan terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki beberapa indikator kinerja yakni: (1) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik yang diperoleh dari persentase perbandingan jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dengan Jumlah seluruh pemerintahan desa; (2) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) diperoleh dari perbandingan Jumlah kelompok binaan LPM dengan Jumlah LPM; (3) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah rasio Jumlah kelompok binaan PKK dengan Jumlah PKK; (4) Persentase LSM aktif adalah rasio Jumlah LSM aktif dengan Jumlah LPM dikali 100 persen; (5) Persentase LPM Berprestasi adalah rasio Jumlah LPM berprestasi dengan Jumlah LPM dikali 100 persen; (6) Persentase PKK aktif adalah rasio Jumlah PKK aktif dengan Jumlah PKK dikali 100 persen; (7) Jumlah/Persentase Posyandu aktif adalah rasio Jumlah Posyandu aktif dengan Total Posyandu dikali 100 persen, beberapa indikator dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Sarana prasarana perkantoran yang baik diperlukan dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di desa. Di Kabupaten Morowali, cakupan sarana prasarana perkantoran hingga Tahun 2022 telah sepenuhnya dalam kondisi baik atau sebesar 100 persen. Kondisi ini meningkat dari Tahun 2018 yang hanya sebesar 80,16 persen. Dengan semakin baiknya sarana perkantoran diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Kabupaten Morowali kedepan. Data Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 yang tersaji pada Gambar 2.95 sebagai berikut.

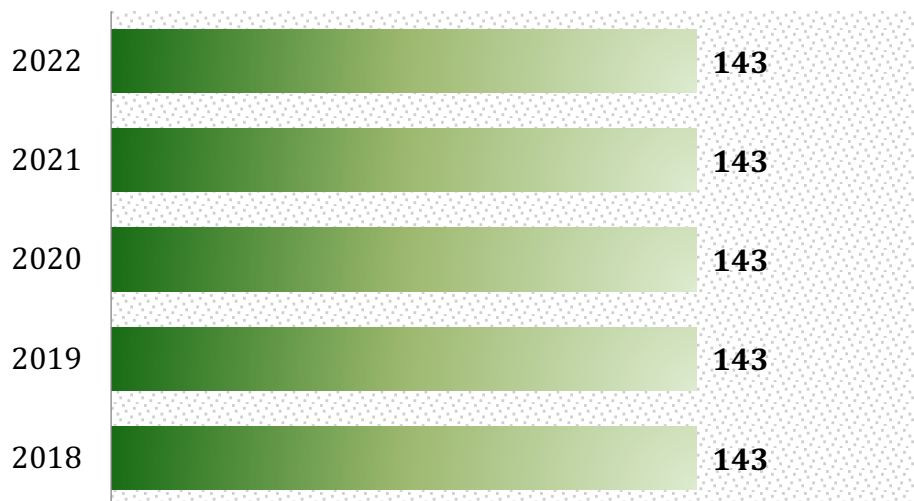


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali, Tahun 2023.

Gambar 2.95
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Morowali dari Tahun 2018-2022 sebanyak 143 kelompok. Peningkatan peran PKK kedepan dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa kedepannya. Data rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Morowali pada Gambar 2.96 berikut ini.

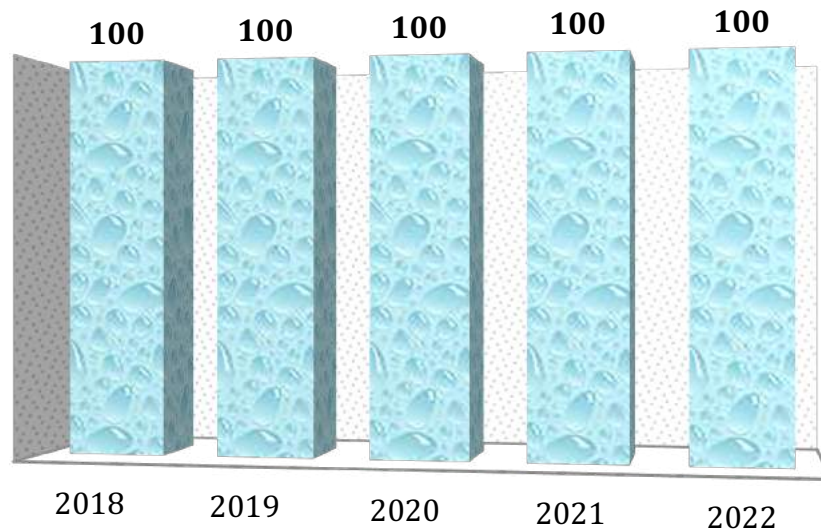


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali, Tahun 2023.

Gambar 2.96
**Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022**

3. Persentase PKK Aktif

Semua PKK di Kabupaten Morowali aktif dan berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan, hal ini di tunjukan dari Persentase PKK yang aktif di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 sebesar 100 persen. Data Persentase PKK Aktif Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.97 sebagai berikut.

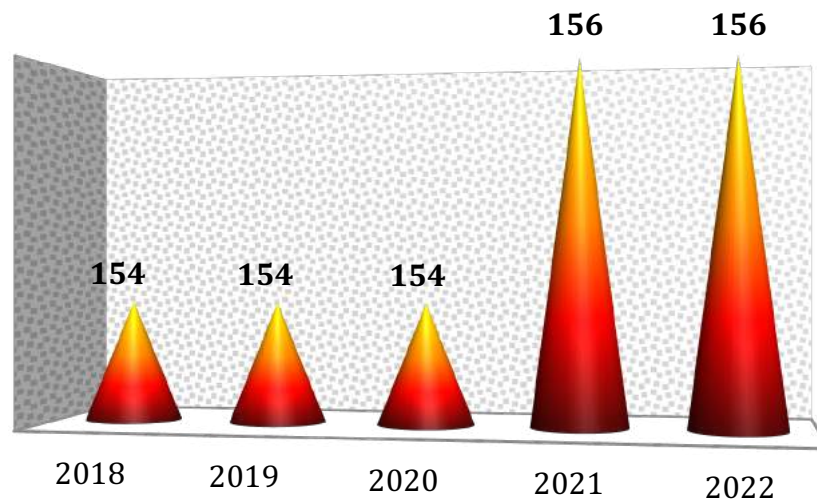


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali, Tahun 2023.

Gambar 2.97
Persentase PKK Aktif
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

4. Persentase Posyandu aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Data Posyandu aktif di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.98 sebagai berikut ini.



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Morowali, Tahun 2023.

Gambar 2.98
Persentase Posyandu Aktif
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Merujuk pada gambar di atas, jumlah posyandu yang ada di Kabupaten Morowali sampai dengan tahun 2022 sebanyak 154 posyandu. Dan semua posyandu yang ada di Kabupaten Morowali aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

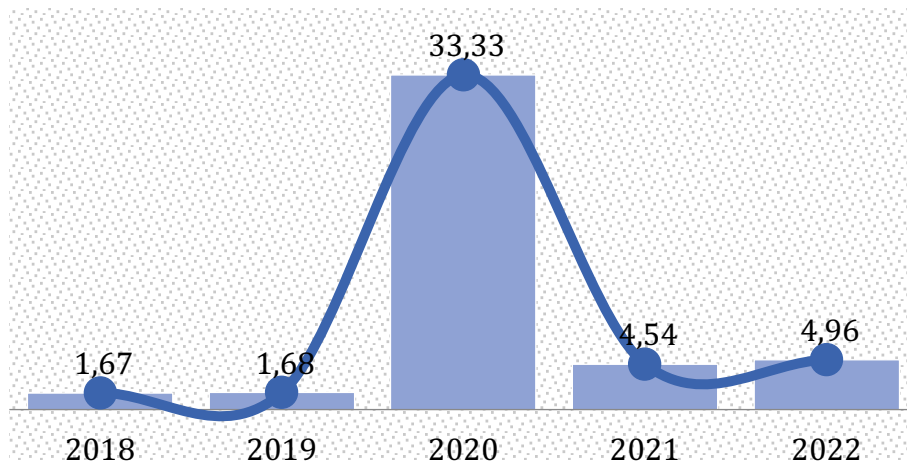
2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik. Seperti telah diketahui bersama bahwa Gerakan Keluarga Berencana yang awalnya dimulai dengan Program Keluarga Berencana secara perlahan-lahan diharapkan akan menuju pada suatu kebutuhan yang sifatnya mendasar dalam suatu keluarga, yang pada akhirnya gerakan KB secara keseluruhan akan menjadi Keluarga Berencana Mandiri. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dari indikator laju pertumbuhan penduduk; Rasio akseptor KB; Cakupan peserta KB aktif; Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang diuraikan sebagai berikut.

1. Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah

penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau Negara maupun dunia. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Data Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 yang terdapat pada Gambar 2.99 sebagai berikut.



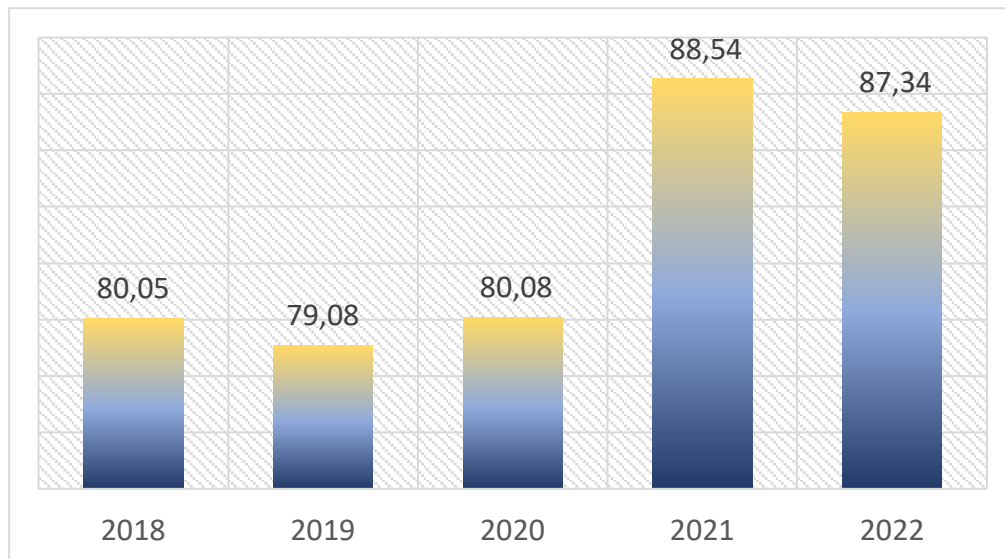
Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.99
Laju Pertumbuhan Penduduk
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap Tahunnya. Kegunaannya adalah untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Jumlah penduduk Kabupaten Morowali selalu mengalami kenaikan tiap Tahun. Tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Morowali sebanyak 119,296 jiwa, meningkat ditahun 2020 menjadi 161.727 jiwa, sampai dengan tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Morowali mencapai 176.244 jiwa. Sedangkan pertumbuhan penduduknya cenderung meningkat dan cepat, yaitu dari 1,67 persen pada Tahun 2018 menjadi 1,68 persen Tahun 2019. Dan pada tahun 2020 sebesar 33,33 persen. Peningkatan signifikan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Morowali pada tahun 2020 merupakan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Morowali. Tahun 2021 pertumbuhan penduduk Kabupaten Morowali sebesar 4,54 persen dan tahun 2022 sebesar 4,96 persen.

2. Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali

Persentase akseptor KB adalah prosentase jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) Tahun per 1000. *Ever User*, yaitu banyaknya perempuan usia 15-49 yang berstatus kawin (PUS) yang pernah memakai sesuatu cara KB dari seluruh perempuan usia subur yang berstatus kawin. Informasi persentase *ever user* bermanfaat untuk mengetahui potensi pemakaian alat/cara KB tertentu di kalangan PUS. Para pelaksana program akan dapat memperbaiki pelayanan atau mengarahkan program secara lebih tepat sasaran. Persentase PUS yang pernah memakai sesuatu cara KB dihitung dengan membagi jumlah semua PUS yang pernah memakai sesuatu cara KB dengan jumlah semua jumlah semua PUS kemudian dikalikan dengan 100. Data Perkembangan Rasio Aseptor KB di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 tersaji pada Gambar 2.100 sebagai berikut.



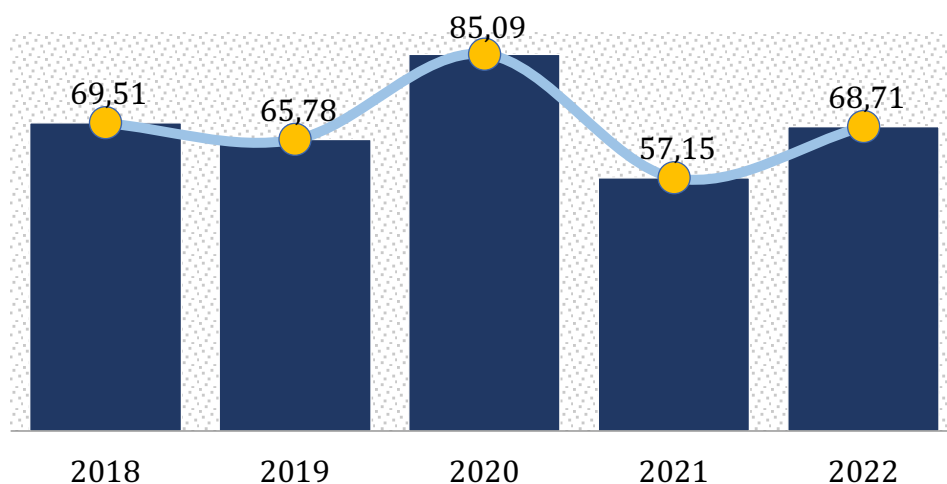
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023

Gambar 2.100
Perkembangan Rasio Aseptor KB
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Dalam penyusunan ini persentase aseptor KB aktif di Kabupaten Morowali diasumsikan dari jumlah pasangan yang menggunakan kontrasepsi. Kurun waktu 2018-2022 persentase akseptor Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Morowali berfluktuasi dengan capaian tertinggi Tahun 2018-2022 sebagian besar PUS menggunakan akseptor KB, ditahun 2018 sebesar 80,05 persen, meningkat besar ditahun 2021 sebesar 88,54 persem dan hingga tahun 2022 sebesar 87,34 persen menurun dari tahun sebelumnya.

3. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49

Keluarga berencana merupakan sebuah program pemerintah yang dicanangkan untuk menekan angka kelahiran yang semakin hari semakin tinggi. Tujuan Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Sementara itu, Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan satu cara atau alat kontrasepsi. Data Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.101 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.101
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah
Usia 15-49 di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

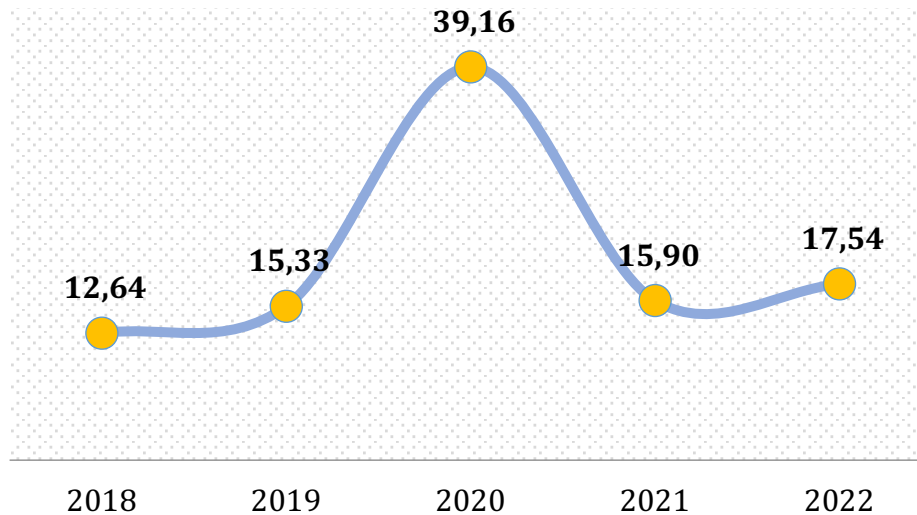
Perkembangan Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 di Kabupaten Morowali pada Tahun 2018 adalah sebesar 69,51 persen, namun menurun di Tahun 2019 menjadi 65,78 persen dan di tahun 2020 sebesar 85,09 persen, menurun signifikan di tahun 2021 sebesar 57,15 persen dan di tahun 2022 sedikit meningkat menjadi 68,71 persen.

4. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) merupakan metode kontrasepsi dengan tingkat keefektifan yang tinggi dengan tingkat kegagalan yang rendah serta komplikasi dan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan metode kontrasepsi yang lain, jenis kontrasepsi ini

diantaranya adalah AKDR/IUD, implan, MOW dan MOP.

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022, menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif setiap Tahunnya. Dimana capaian pada Tahun 2018 sebesar 12,64 persen, meningkat signifikan pada Tahun 2020 sebesar 39,16 persen, namun menurun ditahun 2021 sebesar 15,90 persen, dan ditahun 2022 sedikit meningkat menjadi 17,54 persen, seperti yang terdapat pada Gambar 2.102 sebagai berikut ini.

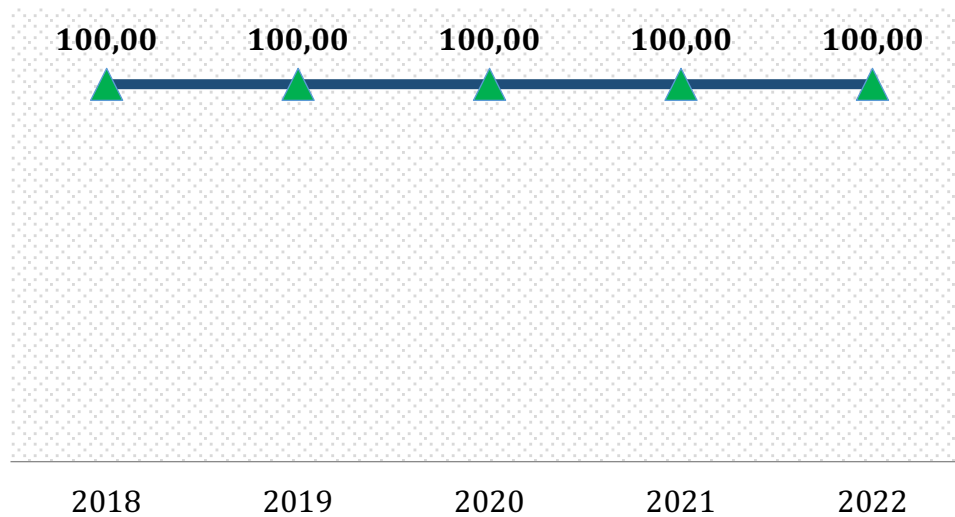


Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.102
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

5. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat desa/kelurahan. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan di Kabupaten Morowali hingga Tahun 2022 sebesar 100 persen, yang artinya di setiap desa/kelurahan terdapat petugas pembantu pembina KB Desa di Kabupaten Morowali yang terdapat pada Gambar 2.103 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2022 (diolah)

Gambar 2.103

Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

2.3.2.8 Perhubungan

Dinas perhubungan Kabupaten Morowali memiliki tanggungjawab dan wewenang untuk menetapkan arus lalu lintas dan jaringan jalan. Kinerja perhubungan di Kabupaten Morowali dapat dilihat dari kinerja Sub Sektor Angkutan dan Masih relatif kecilnya kontribusi sub sektor angkutan pada PDRB Kabupaten Morowali menunjukkan masih rendahnya tingkat aksesibilitas dan mobilitas yang terjadi di daerah setempat.

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Data Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Morowali yang tersedia hanya angkutan laut. Dimana jumlah arus penumpang mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sebesar 17.000 orang hingga Tahun 2022 sebanyak 18.851 penumpang, seperti yang di tampilkan pada Tabel 2.97 sebagai berikut ini.

Tabel 2.97

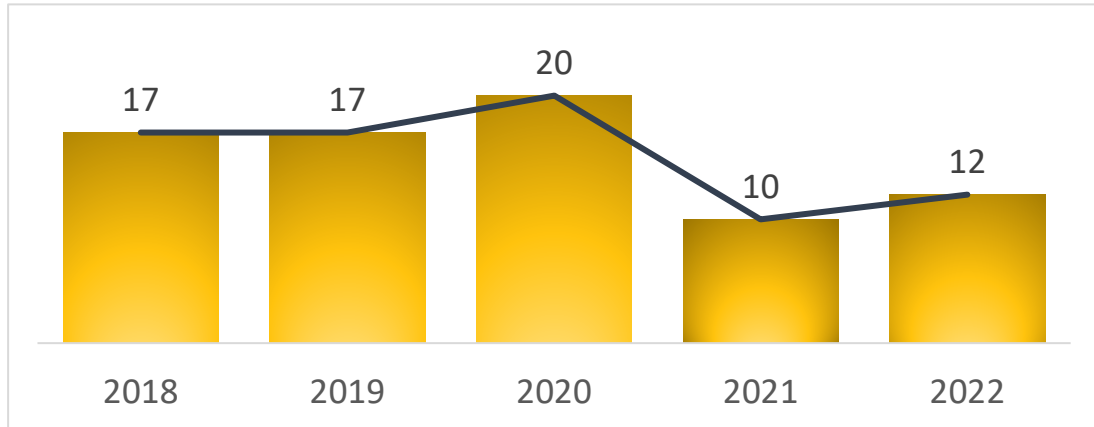
**Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (kapal laut)	17.000	17.000	17.145	18.241	18.851

Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

2. Rasio ijin trayek

Rasio Izin trayek yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2018 yakni 17 per 10.000 penduduk. Rasio terus meningkat sampai Tahun 2022 sebanyak 12 per 10.000 penduduk yang terdapat pada Gambar 2.104 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Perhubungan 2023 (diolah)

Gambar 2.104
Rasio Ijin Trayek
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Keberhasilan pemerintah dalam membangun infrastruktur perhubungan kepada masyarakat secara tidak langsung juga di nilai dari ketersediaan pelabuhan laut, udara dan darat yang miliki. Kabupaten Morowali memiliki masing-masing satu (1) pelabuhan laut, bandara udara, dan terminal Bis. Data mengenai jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis yang terdapat di kabupaten Morowali terdapat pada Tabel 2.98 sebagai berikut.

Tabel 2.98
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

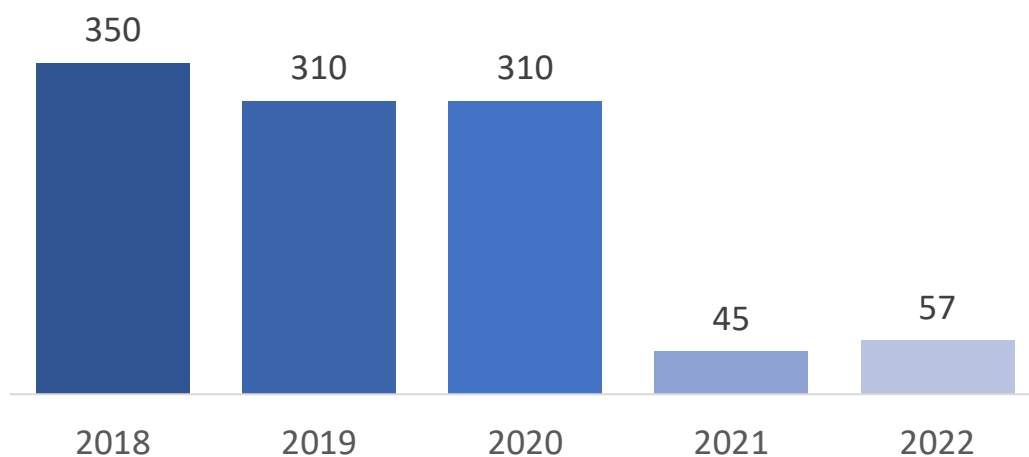
No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2	3	3	3	3

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2023 (diolah)

4. Pemasangan Rambu-rambu

Masih tingginya tingkat kejadian kecelakaan khususnya pada transportasi jalan di Kabupaten Morowali masih menjadi masalah pada urusan perhubungan yang perlu diatas, salah satunya adalah melalui pemasangan rambu-rambu jalan. Rambu-rambu lalu lintas diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Pemasangan

rambu-rambu merupakan bagian dari fungsi perlengkapan jalan yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pengguna jalan. Berikut ini di dapat dilihat mengenai persentase pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Morowali. Hingga Tahun 2022 jumlah pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Morowali sebanyak 57 rambu jalan yang tersaji pada Gambar 2.105 berikut ini.



Sumber: Dinas Perhubungan 2023 (diolah)

Gambar 2.105
Pemasangan Rambu di Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

5. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan. Keterse-diaan sarana jalan memberikan kemudahan/akses bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial dan ekonomi serta aktivitas lainnya. Meningkatnya kebutuhan perhubungan atau transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan). Secara lebih jelasnya Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Morowali, Tahun 2018-2022 terdapat pada Tabel 2.99 sebagai berikut.

Tabel 2.99
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1:7	1:7	1:5	1:7	1:9

Sumber: Dinas Perhubungan 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.99 di atas, diketahui bahwa rasio penjangkalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Morowali dari Tahun 2018-2019 berada pada rasio 1:7, tahun 2020 sebesar 1:5 dan ditahun 2022 sebesar 1:9.

6. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per Tahun

Jumlah penumpang turun di Kabupaten Morowali mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni 8.564 di Tahun 2018 menjadi 9.677 pada Tahun 2022. Sedangkan untuk jumlah penumpang naik juga meningkat sangat signifikan dari 8.419 penumpang di Tahun 2019 menjadi 9.719 Tahun 2022. Selanjutnya untuk jumlah barang yang di bongkar mengalami penurunan dari 197.027 ton di tahun 2018 menjadi 214.034 ton pada tahun 2022. Untuk Jumlah barang muat (ton) sebesar 439.419 ton pada Tahun 2018 meningkat sangat signifikan sebesar 500.409 ton pada Tahun 2022.

Sejak Tahun 2018 bandar udara Morowali beroperasi, dimana Tahun 2018 jumlah penumpang yang datang sebanyak 70.035 orang, menurun pada Tahun 2019 menjadi 32.301 penumpang. Sedangkan untuk penumpang yang berangkat sebanyak 45.977 orang Tahun 2018, juga menurun di Tahun 2019 sebanyak 33.266 penumpang. Pada Tahun 2019 sebesar 7.340 di Bandara Morowali sebesar 107.487 ton dan Jumlah barang muat (ton) sebesar 77.498 ton. Selanjutnya pada tahun 2020 arus penumpang dan barang di bandara Udara Morowali tetap meningkat meskipun di tahun pandemic Covid-19, dimana larangan penerbangan, pembatasan jumlah penerbangan dan berbagai macam protokol kesehatan dilakukan. Jumlah penumpang yang datang sebanyak 58.447 orang sedangkan Jumlah Penumpang Berangkat sebanyak 15.247. Sampai dengan tahun 2022 jumlah penumpang yang datang sebanyak 31.271 dan berangkat sebanyak 21.973 orang.

Kemudian untuk Jumlah Barang Bongkar sampai dengan tahun 2022 sebesar 244.256 (Ton) dan Jumlah barang muat (ton) sebesar 99.202, yang disajikan data pada Tabel 2.100 sebagai berikut.

Tabel 2.100

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per Tahun Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2019	2020
Angkutan Laut						
1	Jumlah Penumpang Turun	8.564	8.726	8.726	9.557	9.677
2	Jumlah Penumpang Naik	NA	8.419	8.419	9.195	9.719

No	Uraian	2018	2019	2020	2019	2020
3	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	197.027	200.751	200.751	210.789	214.034
4	Jumlah barang muat (ton)	439.419	447.724	447.724	470.110	500.409
Angkutan Udara						
5	Jumlah Penumpang Datang	70.035	32.301	58.447	31.271	31.271
6	Jumlah Penumpang Berangkat	45.977	33.266	15.247	21.973	21.973
7	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	NA	107.487	122.089	270.442	244.256
8	Jumlah barang muat (ton)	NA	77.498	39.268	100.059	99.202

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

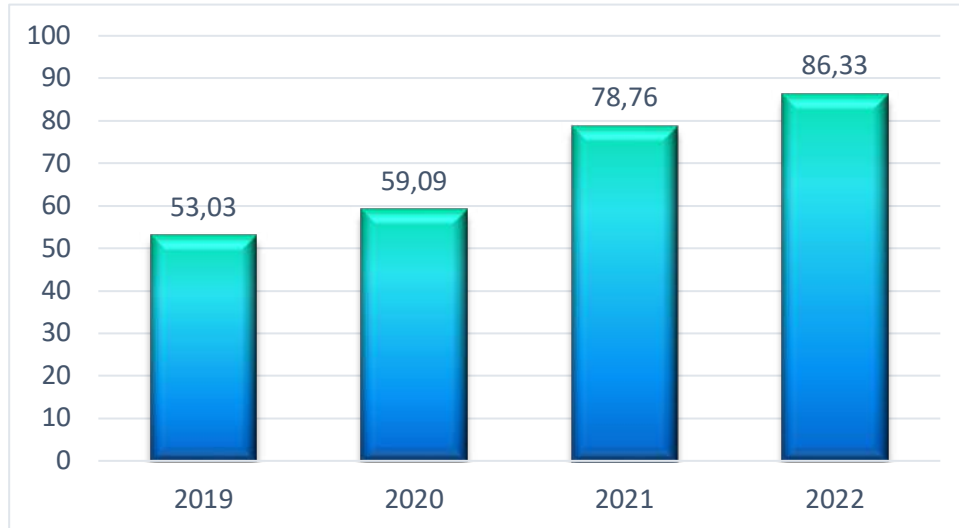
Teknologi informasi sangat berpengaruh di era industri 4.0 karena di era industri 4.0 mengandalkan teknologi informasi dalam segala bidang, dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan lain-lain. Karena teknologi informasi sangat memudahkan manusia dalam memproduksi, mengolah data dan menyebarkan informasi. Data mengenai kinerja urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Morowali dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Akses Jaringan Komunikasi

Akses jaringan informasi di Kabupaten Morowali adalah salah satu faktor yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dengan akses jaringan informasi yang baik, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi yang bermanfaat, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Akses jaringan informasi juga dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Morowali. Selain itu, akses jaringan informasi juga dapat meningkatkan potensi pariwisata, investasi, dan industri di Kabupaten Morowali yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Namun, akses jaringan informasi di Kabupaten Morowali masih menghadapi berbagai kendala, seperti infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan provider telekomunikasi dan internet, serta bencana alam yang sering terjadi di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan sulitnya akses telepon dan data di beberapa wilayah di Kabupaten Morowali³. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah daerah, provider telekomunikasi dan internet, serta

masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan informasi di Kabupaten Morowali. Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi (%) Tahun 2019-2022 dalam kurun waktu tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari 55,03 persen di tahun 2019, meningkat hingga 86,33 persen pada tahun 2022, secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

Gambar 2.106

Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi (%) Tahun 2019-2022

2. Data Jaringan Tower

Data jaringan tower di Kabupaten Morowali seluruh telah tersedia di Semua kecamatan di Kabupaten Morowali, namun jenis jaringan masih belum merata 4G. Masih terdapat beberapa tower yang jaringannya masih 2G (hanya bisa menelpon dan mengirim pesan singkat), masih kesulitan untuk jaringan internet, diantaranya Desa Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan, Solonsa Jaya Kecamatan Wita Ponda, Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan, Desa Bete-Bete dan Desa Tangofa di Kecamatan Bungku Pesisir terdapat pada Tabel 2.101 sebagai berikut ini.

Tabel 2.101

Data Jaringan Tower Kabupaten Morowali Tahun 2022

No	Kecamatan	Desa	Jenis Jaringan		
			2G	3G	4G
1	Bahodopi	Fatufia	Ya	-	Ya
2	Bungku Tengah	Ipi	Ya	Ya	Ya
3	Bungku Tengah	Marsaoleh	Ya	Ya	Ya
4	Bumi Raya	Parilangke	Ya	Ya	Ya



No	Kecamatan	Desa	Jenis Jaringan		
			2G	3G	4G
5	Wita Ponda	Lantula Jaya	Ya	Ya	Ya
6	Bungku Barat	Wosu	Ya	Ya	Ya
7	Bahodopi	Bahodopi	Ya	Ya	Ya
8	Bumi Raya	Pebatae	Ya	Ya	Ya
9	Wita Ponda	Ungkaya	Ya	Ya	Ya
10	Bungku Tengah	Bente	Ya	Ya	Ya
11	Bumi Raya	Limbo Makmur	Ya	Ya	Ya
12	Bungku Tengah	Bente	Ya	Ya	Ya
13	Menui Kepulauan	Ulunambo	Ya	-	-
14	Bumi Raya	Samarenda	Ya	-	Ya
15	Bungku Tengah	Lanona	Ya	Ya	Ya
16	Bungku Tengah	Matansala	Ya	Ya	Ya
17	Bungku Tengah	Tofuti	Ya	Ya	Ya
18	Bungku Tengah	Bahomoleo	Ya	Ya	Ya
19	Bungku Timur	Kapala	Ya	-	
20	Bungku Timur	Bahomoteffe	Ya	Ya	Ya
21	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
22	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
23	Bahodopi	Bahomakmur	Ya	Ya	Ya
24	Bahodopi	Bahodopi	Ya	Ya	
25	Wita Ponda	Solonsa Jaya	Ya	-	
26	Bungku Barat	Tofogaro	Ya	Ya	Ya
27	Bungku Selatan	Kaleroang	Ya	-	
28	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
29	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
30	Bungku Pesisir	Laroenai	Ya	Ya	Ya
31	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
32	Bungku Tengah	Bahomohoni	Ya	Ya	Ya
33	Bahodopi	Labota	Ya	Ya	Ya
34	Bungku Tengah	Bungi	Ya	Ya	Ya
35	Bumi Raya	Umbele	Ya	Ya	Ya
36	Bungku Tengah	Bahomohoni	Ya	Ya	Ya
37	Bungku Timur	Bahomoteffe	Ya	Ya	Ya
38	Bahodopi	Labota	Ya	Ya	Ya
39	Bahodopi	Labota	Ya	Ya	Ya
40	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
41	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
42	Wita Ponda	Moahino	Ya	Ya	Ya
43	Wita Ponda	Moahino	Ya	Ya	Ya
44	Bahodopi	Bahodopi	Ya	Ya	Ya
45	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya

No	Kecamatan	Desa	Jenis Jaringan		
			2G	3G	4G
46	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
47	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
48	Bungku Pesisir	Bete-Bete	Ya	-	
49	Bungku Pesisir	Tangofa	Ya	-	

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika, Tahun 2023

3. Jaringan Telekomunikasi Untuk Kabupaten Morowali

Data jaringan telekomunikasi terdapat pada Tabel 2.102 berikut ini.

Tabel 2.102

Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Morowali Tahun 2022

No	Lokasi	Status Sinyal Komunikasi				Ket.
		4G	3G	2G	No Signal	
1	Kec. Bungku Tengah	1	15	1	2	
2	Kec. Bungku Timur	0	5	0	5	
3	Kec. Bahodopi	0	7	2	2	
4	Kec. Bungku Pesisir	1	4	2	2	
5	Kec. Bungku Selatan	0	2	4	20	
6	Kec. Menui Kepulauan	0	3	3	18	Signal untuk desa Dongkalan berasal dari desa Molore, Provinsi SulTra
7	Kec. Bungku Barat	0	10	0	0	
8	Kec. Bumi Raya	0	13	0	0	
9	Kec. Witaponda	0	9	0	0	

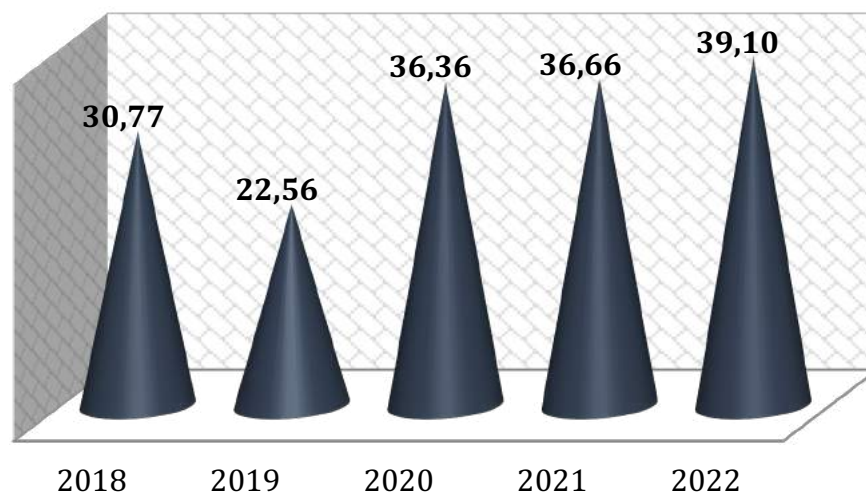
Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika, Tahun 2023

2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi mendapatkan perhatian dalam pembangunan Morowali mengingat perannya dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di Morowali. Sedangkan Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari usaha persaingan yang tidak sehat.

1. Persentase koperasi aktif

Koperasi merupakan suatu wadah ekonomi rakyat yang memegang peran penting bagi pemberdayaan masyarakat miskin, terutama yang berada di daerah perdesaan. Sebagai satu diantara pelaku ekonomi, koperasi mempunyai kedudukan yang strategis bagi tatanan perekonomian yang dapat berfungsi sebagai sarana untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Koperasi semestinya bisa menjadi katup penyelamat masyarakat miskin dari jeratan dan lilitan rentenir/lintah darat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi di Kabupaten Morowali selama periode 2018-2022 dilaksanakan cukup baik namun belum maksimal. Semakin banyak koperasi aktif dalam suatu daerah tentunya akan semakin berkembang perekonomian masyarakat. aktifnya koperasi tersebut akan mendorong terjadi pergerakan dan perkembangan aktivitas atau usaha ekonomi produktif masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah koperasi aktif di Kabupaten Morowali terdapat pada Gambar 2.107 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.107
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

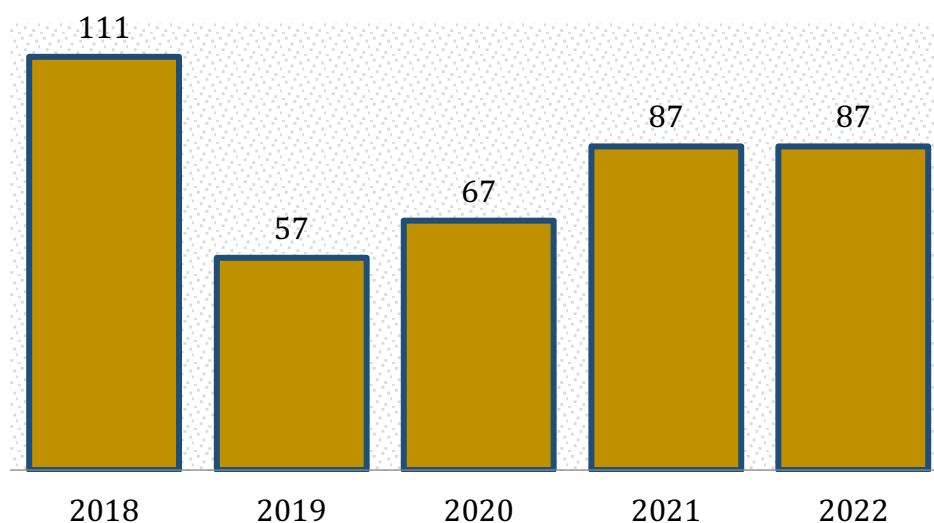
Perkembangan persentase koperasi yang aktif dalam periode Tahun 2018-2022 di Kabupaten Morowali cenderung menurun. Hal ini ditunjukkan dari 30,77 persen pada Tahun 2018 menurun hingga Tahun 2019 menjadi 22,56 persen, dan ditahun 2020 sebesar 36,36 persen, sampai dengan tahun 2022 mencapai 39,10 persen. Pembinaan dan pendampingan terhadap koperasi kedepan perlu ditingkatkan.

2.3.2.11 Penanaman Modal

Indikator penanaman modal menunjukkan kondisi investasi yang masuk dan berkembang di wilayah Kabupaten Morowali. Indikator penanaman modal terdiri atas Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (ribu), Rasio daya serap tenaga kerja (TK/PMA dan PMDN), dan Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (juta). Rasio daya serap tenaga kerja diperoleh dari perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMD dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Sedangkan nilai kenaikan/penurunan Nilai realisasi PMDN diperoleh dari rasio realisasi PMDN Tahun evaluasi-realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi dengan realisasi PMDN sebelum evaluasi, satuan persen.

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Salah satu variabel penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi dapat dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain: Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan. Data Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.108 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2023 (diolah)

Gambar 2.108
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Berdasarkan data pada Gambar 2.108 di atas, diketahui bahwa jumlah investor di Kabupaten Morowali cenderung tinggi, Tahun 2018 menjadi 111 investor, namun Tahun 2019 sedikit menurun sebesar 57 investor, dan ditahun 2020 sebanyak 67 Investor, ditahun 2022 Investor di Kabupaten Morowali baik investor asing dan dalam negeri mencapai 87 investor. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Morowali masih menjadi magnet investasi PMA/PMDN kedepannya. Diharapkan jumlah investor yang masuk semakin meningkat dan perekonomian Morowali tumbuh seiring dengan kesejahteraan masyarakat.

2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investasi PMA/PMDN di Kabupaten adalah yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah. Perkembangan nilai investasi cukup besar namun berfluktuatif. Tahun 2018 sebesar 89.608.672.100.000,00, dan Tahun 2019 menurun cukup besar menjadi Rp25.862.850.460.000,00 dan ditahun 2020 sebesar Rp32.786.800.000.000,00, selanjutnya tahun 2021 sebesar Rp52.060.945.480.000,00, dan ditahun 2022 meningkat signifikan menjadi Rp101.146.180.000.000,00. Rata-rata peningkatan investasi dalam 5 tahun terakhir sebesar 27,18 persen. Secara lengkap terdapat pada Tabel 2.103 sebagai berikut ini.

Tabel 2.103
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Tahun	Nilai Investasi (Rp)
2018	89.608.672.100.000,00
2019	25.862.850.460.000,00
2020	32.786.800.000.000,00
2021	52.060.945.480.000,00
2022	101.146.180.000.000,00

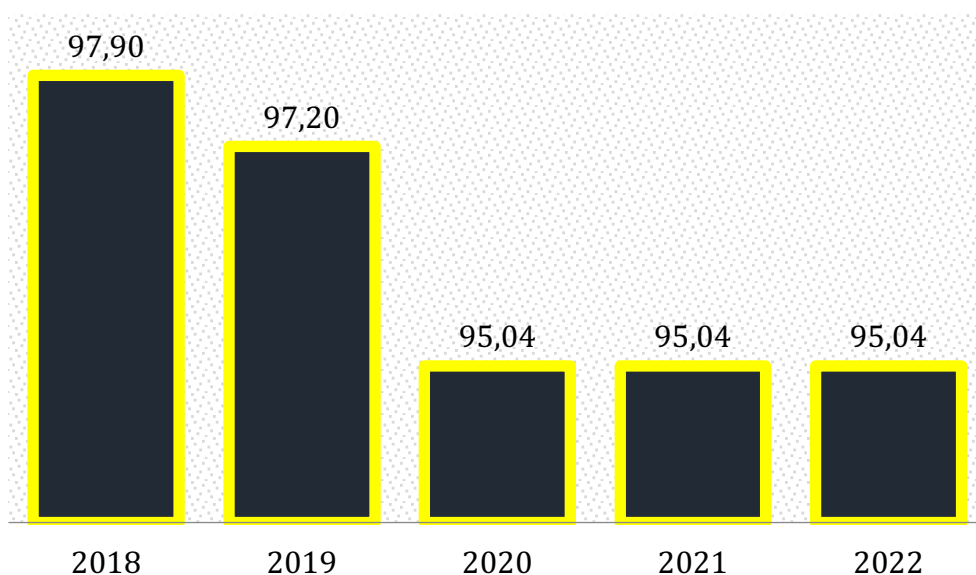
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2023 (diolah)

2.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian indikator bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda), Persentase wirausaha muda, Cakupan pembinaan olah raga, Cakupan Pelatih yang bersertifikasi, Cakupan pembinaan atlet muda, Jumlah atlet berprestasi, dan Jumlah prestasi olahraga. Namun, hanya tiga indikator yang mempunyai data tersedia. Realisasi bidang kepemudaan dan olahraga tersebut disajikan sebagai berikut.

1. Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda).

Keaktifan organisasi pemuda di Kabupaten Morowali cenderung tinggi. Hal ini dilihat dari persentase keaktifan di Tahun Tahun 2018 menjadi 97,90 persen. Namun sedikit menurun di Tahun 2019 menjadi 97,20 persen, dan di tahun 2020 sebesar 95,05 persen, sampai dengan tahun 2022 sebesar 95,04 persen. Masih tingginya keaktifan organisasi pemuda ini menunjukkan pembinaan yang dilakukan oleh Pemda melalui OPD terkait sudah baik. Data Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda) di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar 2.109 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 2023 (diolah)

Gambar 2.109
Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda)
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

2.3.2.13 Statistik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kondisi statistik dapat dilihat dari ketersediaan dokumen statistik daerah. Dokumen statistik tersebut sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan, perumusan kebijakan strategis daerah, serta bahan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah.

Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (data statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah

secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Dokumen statistik sebagaimana dimaksud adalah Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Kinerja Pembangunan Manusia, Profil Kabupaten, Profil Kecamatan dan Profil Kesejahteraan Rakyat. Data ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Morowali selama kurun waktu Tahun 2018-2022 terdapat pada Tabel 2.104 sebagai berikut.

Tabel 2.104
Capaian Indikator Statistik
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku Kabupaten dalam angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku “PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

2.3.2.14 Kebudayaan

Cagar Budaya yang telah dilindungi dan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya di Kabupaten Morowali berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yaitu.

- **Rumah Raja Bungku** merupakan salah satu situs budaya terletak di Kelurahan Marsaoleh Kecamatan Bungku Tengah merupakan peninggalan Raja Bungku. Lokasinya berhadapan dengan lokasi pantai. Rumah yang ditempati sebagai tempat menjalankan pemerintahan. Di dalam rumah aja tersebut tersimpan artefak-artefak atau benda-benda budaya peninggalan raja berupa benda pusaka dan surat-surat penting kerajaan. Kondisi objek terawat dan berada dalam penguasaan keluarga kerajaan dan mendapat bantuan anggaran pemeliharaan dari pemerintah daerah.
- **Masjid Tua** terletak di Kelurahan Marsaoleh Kecamatan Bungku tengah berdampingan dengan Rumah Raja Bungku. Masjid tua ini merupakan situs sejarah yang menandakan masuknya islam di Bungku. Model dan arsitektur masjid dengan rangka kayu dan atap yang tergolong unik. Kondisi objek masih terawat dan dipergunakan dan beberapa bagian ditambahkan. Masjid tua oleh pemerintah daerah dijadikan pusat kegiatan hafidz Alqur'an dan telah mengalami penambahan bagian bagunan dengan bantuan anggaran dari pemerintah daerah.

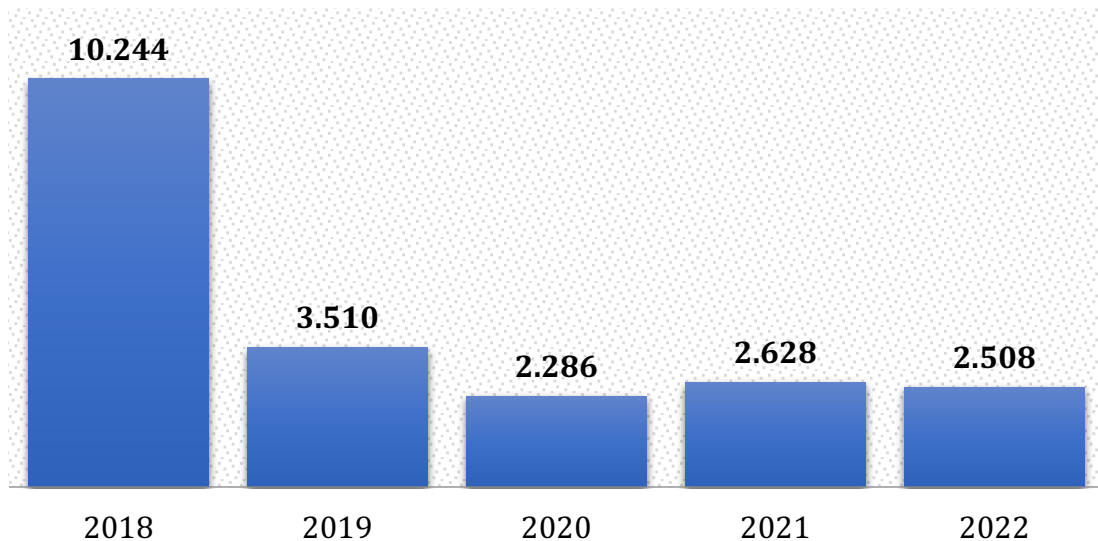
- **Benteng Fafontofure** terletak puncak Gunung Tudua, tepatnya di desa Bahontobungku, berjarak $\pm$ 5 km dari ibukota kabupaten. Kondisi kawasan hanya menyisakan bekas-bekas dan sebagian sudah di jamah oleh penduduk menjadi areal perkebunan. Luasan wilayah benteng seluas 288,75 m². Lokasi ketinggian menjadikan objek sejarah ini dapat berfungsi untuk tujuan rekreasi terutama menikmati panorama laut dan alam.

2.3.2.15 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Guna menunjang peningkatan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten Morowali menambah jumlah perpustakaan maupun menambah jumlah koleksi pustaka. Banyaknya unit perpustakaan ini memberi kemudahan pada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan.

1. Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun

Membaca merupakan proses pemahaman simbol untuk memperoleh informasi yang disampaikan oleh penulis melalui kata-kata. Membaca memiliki berbagai manfaat, diantaranya memperluas wawasan dan meningkatkan kreatifitas. Salah satu wadah bagi masyarakat untuk memperluas wawasan adalah melalui perpustakaan. Kunjungan masyarakat ke persputakaan di Kabupaten Morowali masih cenderung rendah, hal ini sedikit menggambarkan minat membaca masyarakat yang masih kurang. Jumlah kunjungan perspustakaan di Tahun 2018 sebesar 10.244 orang, namun menurun sangat signifikan sampai dengan tahun 2020 menjadi 3.510 orang, selanjutnya pengunjung ditahun 2022 menurun setiap tahunnya menjadi 2.508 orang. Pemanfaatan teknologi Informasi perlu dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Morowali kedepan untuk memudahkan masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan daerah serta meningkatkan budaya literasi yang lebih baik lagi. Data Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.110 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah 2023 (diolah)

Gambar 2.110
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1 Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu cara untuk memajukan ekonomi di suatu daerah. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pengembangan sektor kepari-wisataan antara lain bertujuan untuk: 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2) meningkatkan kesejahteraan rakyat, 3) menghapus kemis-kinan, dan 4) mengatasi pengangguran.

Kabupaten Morowali memiliki potensi pariwisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata bahari sampai dengan wisata budaya yang cukup beragam. Pariwisata di Kabupaten Morowali lebih diarahkan untuk pengembangan pariwisata dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli daerah. Di Kabupaten Morowali terdapat beberapa jenis obyek wisata bahari seperti pantai pasir putih dan beberapa pulau (Pulau Sombori dan Pulau Koikoila) yang terdapat di Kecamatan Menui Kepulauan. Kemudian, wisata budaya seperti peninggalan makam Raja Bungku yang terdapat di Kecamatan Bungku Tengah serta Masjid Tua di Kota Bungku dan benteng dekat Kota Bungku. Sedangkan wisata alam seperti air terjun, hutan *mangrove* yang juga terletak di Kecamatan Bungku Tengah.

Pemerintah Kabupaten Morowali saat ini sangat gencar dalam melakukan promosi di bidang pariwisata. Hal ini ditandai dengan banyak dilaksanakannya kegiatan wisata seperti pada Tahun 2015, diadakan acara Festival Bajo Pasakay yang diselenggarakan di Kecamatan Bungku Selatan. Ribuan kapal hias memenuhi dermaga dalam upaya pemecahan rekor MURI untuk rangkaian karnaval perahu terpanjang di Indonesia. Festival ini bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan asli suku Bajo dan sekaligus mempromosikan pariwisata dalam upaya menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

1. Jumlah Kunjungan Wisata

Sektor pariwisata diyakini akan mempunyai dampak langsung dan positif terhadap peningkatan ekonomi daerah dalam bentuk peningkatan kegiatan berusaha dan peningkatan kesempatan kerja. Perkembangan sektor pariwisata akan dapat membangkitkan berbagai kegiatan usaha: rumah makan (restoran), penginapan (perhotelan), transportasi lokal, dan penyedia cenderamata bagi wisatawan. Seiring dengan kunjungan wisatawan yang terus meningkat di Kabupaten Morowali, maka diperlukan sarana-prasarana (akomodasi) yang memadai dan berkualitas. Para wisatawan perlu memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya, mengingat mereka yang berwisata akan membawa kemakmuran bagi masyarakat Morowali.

Tabel 2.105

Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mancanegara	643	194	34	7	79
2.	Domestik	1.525	4.822	5.461	7.234	3.545
	Total Kunjungan Wisata	2.168	5.016	5.495	7.241	3.624

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data pada Tabel 2.105 di atas ditunjukkan perkembangan jumlah kunjungan wisata baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara di Kabupaten Morowali selama kurun waktu 2018-2022. Selama kurun waktu tersebut jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Morowali terus menunjukkan angka angka berfluktuatif, yaitu dari 2.168 orang pada Tahun 2018, dan meningkat terus menjadi 5.016 orang pada Tahun 2019 dan ditahun 2020 juga meningkat sebanyak 5.495 orang. Ditahun 2021, meningkat cukup banyak sebanyak 7.241 orang, dan ditahun 2022 menurun sekitar 50% menjadi 3.624 orang. Dari keseluruhan jumlah wisatawan tersebut

sebagian besar berasal dari wisatawan domestik, dan hanya sebagian kecil saja yang berasal dari mancanegara.

2. Lama Kunjungan Wisata

Dampak dari semakin lamanya kunjungan wisatawan, akan menghidupkan aktivitas ekonomi di masyarakat. Lama kunjungan wisata yang berkunjung di kabupaten Morowali rata-rata dalam 5 Tahun terakhir yakni 3 hari. Untuk meningkatkan lama kunjungan pemerintah daerah perlu mengembangkan destinasi wisata secara menyeluruh (obyek, industri, pemasaran, pertunjukan) agar wisatawan yang berkunjung memiliki alternatif aktivitas wisata yang akan menahan mereka untuk lebih lama berkunjung di Kabupaten Morowali. Data Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 tersaji pada Tabel 2.106 sebagai berikut.

Tabel 2.106
Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-rata Lama Kunjungan Wisata (Hari)	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kab Morowali Tahun 2023

2.3.3.2 Pertanian

Sektor pertanian di Kabupaten Morowali masih merupakan kegiatan yang masih mendominasi sumber pendapatan dan mata pencaharian masyarakat setempat. Sektor pertanian sampai saat ini masih memegang peranan penting dan strategis dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Keberhasilan program pembangunan sektor pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Sebagai gambaran dan dasar evaluasi serta perencanaan pengembangan selanjutnya, berikut ini disajikan data mengenai keadaan sektor pertanian di Kabupaten Morowali beserta sub sektornya, yakni: Sub-Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura, Sub-Sektor Perkebunan, Sub Sektor Kehutanan, dan Sub Sektor Peternakan. Indikator kinerja urusan pilihan sektor pertanian dapat dievaluasi melalui pencapaian besaran kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, produktivitas, cakupan bina kelompok pada setiap sub sektornya. Selengkapnya disajikan sebagai berikut.

1. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Sektor ini mencakup Sub-kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sub-kategori Perikanan. Sub-kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Sektor ini di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi menjadi sektor dengan kontribusi terbesar dalam meningkatkan perekonomian daerah. Namun hal tersebut tidak terjadi di Kabupaten Morowali.

Merujuk pada tabel dibawah ini diketahui bahwa, kontribusi Sektor Pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Morowali dalam periode Tahun 2018-2022 mengalami penurunan setiap Tahunnya baik untuk PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010. Kontribusi sektor ini Tahun 2018, sebesar 5,48 persen untuk PDRB ADHB dan 4,98 persen PDRB ADHK 2010. Terus menurun setiap Tahunnya sampai Tahun 2022 kontribusi sektor ini sudah turun menjadi sebesar 1,46 persen untuk ADHB dan 2,05 persen untuk PDRB ADHK 2010. Penurunan kontribusi sektor ini menjadi indikator bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah tepat dan cepat dalam menyelamatkan sektor ini ke depan antara lain meningkatkan nilai tambah (value added), kualitas produksi dan penggunaan teknologi. Tahun 2022 terus menurun hingga sangat rendah menjadi sebesar 1,46 persen PDRB ADHB dan sebesar 2,05 persen untuk PDRB ADHK 2010, secara lengkap disajikan pada Tabel 2.107 sebagai berikut ini.

Tabel 2.107
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	37.356.484,50	45.244.727,10	61.985.633,20	98.779,81	146.599,32
- ADHK 2010	28.358.401,60	34.085.704,80	43.947.504,40	54.916,24	70.515,62
Nilai PDRB Sektor Pertanian (Rp)					
- ADHB	2.049.001,70	2.063.374,20	2.023.944,10	2.147,50	2.147,50
- ADHK 2010	1.411.278,90	1.437.272,30	1.397.644,00	1.442,50	1.442,50
Kontribusi Sektor (%)					
- ADHB	5,48	4,56	3,27	2,17	1,46
- ADHK 2010	4,98	4,22	3,18	2,63	2,05

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

2. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 menunjukkan penurunan setiap Tahun. Hal tersebut di tunjukan dari persentase kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Morowali. Dimana Tahun 2018 kontribusi sektor ini sebesar 0,30 persen PDRB ADHB menurun hingga Tahun 2021 menjadi sebesar 0,001 persen. Sedangkan untuk kontribusi PDRB ADHK 2010 di Tahun

sebesar 0,26 persen, menurun hingga Tahun 2021 menjadi sebesar 0,15 persen. Persentase kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB mengalami penurunan. Selanjutnya nilai dari Sektor Pertanian Palawija di Tahun 2022 sebesar Rp133.186,05 juta untuk PDRB ADHB dan sebesar Rp80.715,77 PDRB ADHK 2010, yang dapat dilihat pada Tabel 2.108 sebagai berikut ini.

Tabel 2.108
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	37.356.484,50	45.244.727,10	61.985.633,20	98.779.810,00	146.599.320,00
- ADHK 2010	28.358.401,60	34.085.704,80	43.947.504,40	54.916.240,00	70.515.620,00
Nilai PDRB Sektor Pertanian (Palawija) (Rp)					
- ADHB	111.855,35	122.510,75	133.166,15	133.176,10	133.186,05
- ADHK 2010	72.766,06	76.735,38	80.704,71	80.710,15	80.715,77
Kontribusi Sektor (%)					
- ADHB	0,30	0,27	0,21	0,001	0,001
- ADHK 2010	0,26	0,23	0,18	0,15	0,11

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

3. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Subkategori tanaman perkebunan terdiri dari perkebunan semusim dan perkebunan Tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lain sampai kegiatan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Pada Tahun 2022 Nilai Sektor Perkebunan berdasarkan PDRB ADHB sebesar Rp652.916,52 juta, kemudian untuk nilai PDRB ADHK 2010 sebesar Rp465.019,89 juta. Sementara itu, untuk kontribusi sektor ini terhadap nilai PDRB ADHB Kabupaten Morowali sebesar 0,45 persen menurun dari Tahun sebelumnya. Sedangkan untuk PDRB ADHK 2010 sebesar 0,66 persen juga menurun dari Tahun sebelumnya disajikan pada Tabel 2.109 sebagai berikut ini.

Tabel 2.109
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	37.356.484,50	45.244.727,10	61.985.633,20	98.779.810,00	146.599.320,00
- ADHK 2010	28.358.401,60	34.085.704,80	43.947.504,40	54.916.240,00	70.515.620,00
Nilai PDRB Sektor Perkebunan (Rp)					
- ADHB	627.095,85	640.004,72	652.913,58	652.913,35	652.916,52
- ADHK 2010	463.514,08	464.267,29	465.020,50	465.019,60	465.019,89

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor (%)					
- ADHB	1,68	1,41	1,05	0,66	0,45
- ADHK 2010	1,63	1,36	1,06	0,85	0,66

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

4. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Mengutip dari Tabel di atas, tanaman padi dan bahan makanan lainnya yang mengalami produktivitas paling tinggi menurut jenis ton/ha pada Tahun 2022 adalah tanaman ubi kayu sebesar 290,69 ton perhektar kemudian diikuti oleh tanaman ubi jalar sebesar 203,95 ton perhektar. Tanaman padi berada pada posisi ketiga produktivitas perhektar yaitu sebesar 45,67 ton perhektar. Tanaman yang paling rendah produktivitas yaitu tanaman kacang hijau sebesar 0,66 ton perhektar yang disajikan pada Tabel 2.110 sebagai berikut ini.

Tabel 2.110

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal per Hektar Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Jenis Tanaman	Tahun (Ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Padi	52,15	49,26	45,6	51,11	45,67
Jagung	46,28	44,78	15,81	15,81	15,81
Ubi Kayu	263,67	289,69	290,69	290,69	290,69
Ubi Jalar	135,6	201,35	203,95	203,95	203,95
Kacang Tanah	12,01	10,75	10,77	10,77	10,77
Kacang Kedelai	12,22	7,46	20,82	20,82	20,82
Kacang Hijau	8,2	0,67	0,66	0,66	0,66

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

2.3.3.3 Kehutanan

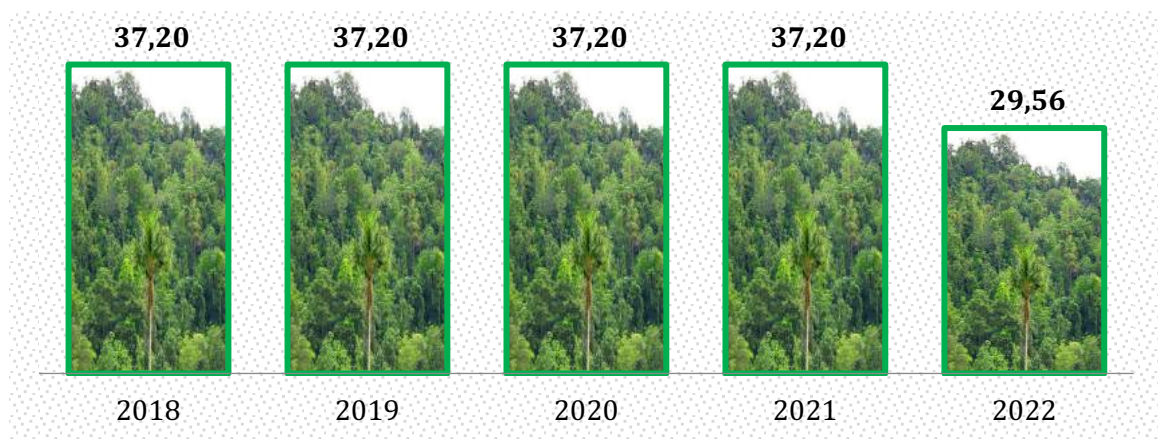
Kinerja urusan kehutanan memiliki 3 (tiga) indikator yakni rehabilitasi hutan dan lahan kritis, Kerusakan Kawasan Hutan, dan Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan.

1. Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan

Pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya hutan merupakan upaya pengelolaan sumberdaya alam di dalam kawasan hutan melalui fungsi lindung, konservasi dan produksi dengan memper-

hitungkan kelangsungan persediaannya dan lingkungan sekitar. Secara khusus untuk fungsi lindung, pemerintah telah mengupayakan Undang-Undang 32 Tahun 2009 (tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawas-an, dan penegakan hukum.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Rasio luas kawasan hutan lindung yang terdapat di Kabupaten Morowali dari Tahun 2018-2021 ditetapkan sebesar 37,20 persen, kemudian ditahun 2022 menurun sebesar 29,56 persen atau seluas 88.102,04 Ha dari total luas hutan yang ada di Kabupaten Morowali yang ditampilkan pada Gambar 2.111 berikut ini.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.111
Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

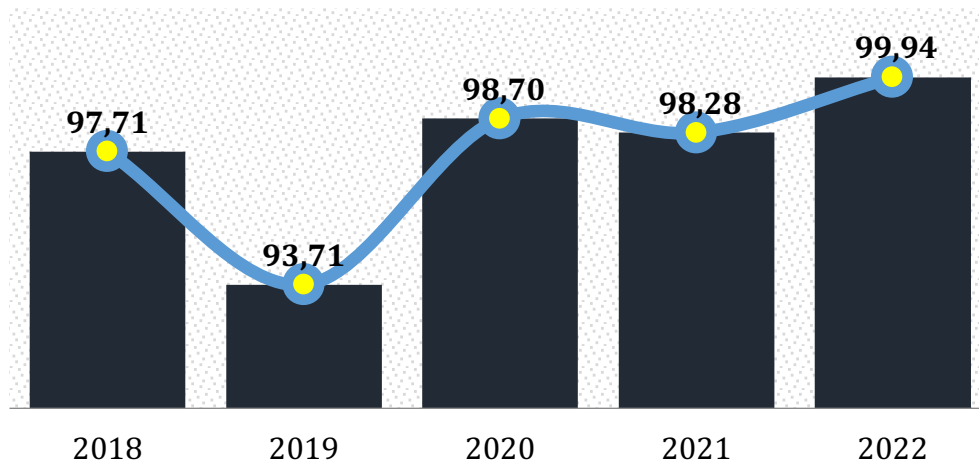
2.3.3.4 Energi dan Sumberdaya Mineral

Kinerja urusan energi dan sumberdaya mineral dapat dikaji melalui dua parameter yakni persentase rumah tangga pengguna listrik dan ketersediaan daya listrik.

a. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Selama periode 2018-2022, pada Tahun 2018, proporsi rumah tangga pengguna listrik mencapai 97,71, namun menurun di Tahun

2019 menjadi 93,71 persen dan ditahun 2020 sebesar 98,70 persen, ditahun 2021 sebesar 98,28 persen, dan meningkat ditahun 2022 menjadi 99,94 persen. Artinya hanya tersisa 0,06 persen penduduk Kabupaten Morowali yang belum dapat mengakses listrik, data terkait terdapat pada Gambar 2.112 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.112
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Ketersediaan Energi Listrik menjadi tantangan pembangunan wilayah di Kabupaten Morowali utama di wilayah pesisir kepulauan dan terpencil seperti di Kepulauan Salabangka dan Menui Kepulauan karena menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk menggerakkan ekonomi kepulauan. Di samping itu, adanya energi listrik sangat menunjang layanan publik terutama bila Rumah Sakit Pratama di Pulau Paku beroperasi menjadi satu-satunya rumah sakit yang melayani masyarakat kepulauan di luar Puskesmas Kaleroang dan Menui Kepulauan. Selanjutnya, menunjukan Kecamatan dengan rasio elektrifikasi terendah Bungku Pesisir sebesar 92,80 persen, dan Kecamatan Bumi Raya sebesar 96,32 persen. Rasio elektrifikasi setiap Kecamatan di Kabupaten Morowali terdapat pada Tabel 2.111 sebagai berikut ini.

Tabel 2.111
Rasio Elektrifikasi Menurut Kecamatan
Kabupaten Morowali Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)	JUMLAH KELUARGA		RASIO ELEKTRIFIKASI (%)				
			BERLISTRIK		BELUM BERLISTRIK	PLN	NON PLN	BELUM BERLISTRIK	TOTAL RASIO ELEKTRIFIKASI
			PLN	NON PLN					
1	MENUI KEPULAUAN	4.540	2.303	2.215	22	50,73	48,79	0,48	99,52
2	BUNGKU	4.441	1.645	2.643	153	37,04	59,51	3,45	96,55

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)	JUMLAH KELUARGA			RASIO ELEKTRIFIKASI (%)			
			BERLISTRIK		BELUM BERLISTRIK	PLN	NON PLN	BELUM BERLISTRIK	TOTAL RASIO ELEKTRIFIKASI
			PLN	NON PLN					
	SELATAN								
3	BAHODOPI	19.297	19.057	0	240	98,76	0,00	1,24	98,76
4	BUNGKU PESISIR	2.222	1.596	466	160	71,83	20,97	7,20	92,80
5	BUNGKU TENGAH	10.818	10.516	195	107	97,21	1,80	0,99	99,01
6	BUNGKU TIMUR	4.381	4.376	0	5	99,89	0,00	0,11	99,89
7	BUNGKU BARAT	4.927	4.639	181	107	94,15	3,67	2,17	97,83
8	BUMI RAYA	5.031	4.846	0	185	96,32	0,00	3,68	96,32
9	WITA PONDA	7.155	6.961	25	169	97,29	0,35	2,36	97,64
TOTAL		62.812	55.939	5.725	1.148	89,06	9,11	1,83	98,17

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

b. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Selama periode 2018-2022, daya listrik terpasang dari 28.898.000,00 watt di Tahun 2019. Dan pada Tahun 2020 daya terpasang mencapai 43.966.450,00, kemudian di tahun 2021 sebesar 43.966.450,00 kilo watt, dan ditahun 2022 mencapai 43.968.432 kilo watt yang tersaji pada Tabel 2.112 sebagai berikut.

Tabel 2.112

Daya Terpasang Listrik (kw) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Daya Terpasang (Kwh)	-	28.898.000,00	43.966.450,00	43.966.450,00	43.968.432,00

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

2.3.3.5 Perdagangan

A. Ekspor bersih Perdagangan

Ekspor (export) adalah berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri lalu dijual di luar negeri (Mankiw, 2006). Ditinjau dari sudut pengeluaran, ekspor merupakan salah satu faktor terpenting dari Gross Nasional Product (GNP), sehingga dengan berubahnya nilai ekspor, maka pendapatan masyarakat secara langsung juga akan mengalami perubahan. Di lain pihak, tingginya ekspor suatu negara akan menyebabkan perekonomian tersebut akan sangat sensitif terhadap guncangan-guncangan atau fluktuasi yang terjadi di pasaran internasional maupun di perekonomian dunia.

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan

jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk di antara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu Tahun tertentu. Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat output yang lebih tinggi, lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan (Jhingan, 2000). Selain menambah peningkatan produksi barang untuk dikirim ke luar negeri, ekspor juga menambah permintaan dalam negeri, sehingga secara langsung ekspor memperbesar output industri-industri itu sendiri, dan secara tidak langsung permintaan luar negeri mempengaruhi industri untuk mempergunakan faktor produksinya, misalnya modal, dan juga menggunakan metode-metode produksi yang lebih murah dan efisien sehingga harga dan mutu dapat bersaing di pasar perdagangan internasional.

Dalam konteks daerah, ekspor adalah penjualan barang dan jasa dari daerah yang bersangkutan kepada daerah lain, baik dalam negara yang sama maupun pada negara yang lain. Hal yang sebaliknya tentang pengertian impor. Ekspor berarti tambahan permintaan atas barang dan jasa daerah yang bersangkutan yang dengan demikian mendorong meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah pengekspor. Ekspor barang dan jasa ke daerah lain dalam negara yang sama tidak menambah devisa bagi negara. Di lain pihak, ekspor barang dan jasa ke negara lain akan menambah devisa bagi negara dari daerah pengekspor. Makna lain dari semakin terbukanya ekonomi suatu daerah adalah bahwa pengaruh eksternal (daerah lain, dalam negara yang sama dan atau negara lain) terhadap ekonomi lokal semakin besar. Data Ekspor Perdagangan Menurut PDRB ADH Konstan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 tersaji pada Tabel 2.113 sebagai berikut.

Tabel 2.113

**Ekspor Perdagangan Menurut PDRB ADH Konstan Kabupaten
Morowali Tahun 2018-2022 (Miliar)**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor Bersih Perdagangan (Miliar Rp)	15.458	18.712	30.229	39.453,40	37.654,87

Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Ekspor perdagangan bersih Kabupaten Morowali dalam periode Tahun 2018-2022 selalu surplus yang artinya nilai ekspor lebih besar ketimbang import yang terjadi di Kabupaten Morowali. Mayoritas ekspor di Kabupaten Morowali yaitu Nikel dan lainnya. Pada Tahun 2018

menjadi Rp15.458 Miliar, setelah itu meningkat 2 Tahun berturut-turut hingga Tahun 2018 sebesar Rp15.458 Miliar. Namun di Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp30.229 Miliar. Kembali meningkat ditahun 2021 sebesar Rp39.453,40 miliar dan ditahun 2022 sebesar Rp37.654,87 miliar.

2.3.3.6 Perindustrian

Kabupaten Morowali memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Potensi ini telah menarik banyak investor. Kondisi tersebut telah memajukan Kabupaten Morowali sebagai kawasan industri. Kabupaten Morowali telah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Morowali (RPIK) Tahun 2021-2041 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Morowali Tahun 2021-2041 dengan prioritas atau industri Unggulan yang tersaji pada Tabel 2.114 sebagai berikut:

**Tabel 2.114
Industri Prioritas Morowali**

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2019-2023	2024 – 2028	2029-2039	
1.	Industri Pangan	Industri Pengolahan Berbahan Baku Hasil Pertanian dan Perikanan			
		A. Pengolahan Makanan			
		• Pengolahan Makanan dan cemilan/ keripik berbahan baku Rumput Laut • Pengolahan Ubi (Tortila) • Pengolahan Ranggina Kacang Khas Morowali • Pengolahan Sambel Ikan Roa • Pembuatan Abon Ikan • Pengolahan Ikan Asap (Ikan Fufu) • Penambahan fasilitas Sentra Pangan Wosu • Pembangunan Sentra Ranggina Desa Lanona • Pembangunan	• Budidaya cacing Laut • Pengeringan Ikan Teri kualitas Ekspor di Desa Kaleroang • Revitalisasi Rumah Produksi Pengolahan Cacing Laut Kelurahan Ulunambo • Revitalisasi Rumah Produksi Pengeringan Ikan Teri Desa Kaleroang	• Pengolahan Ikan Asap/Ikan Kayu kualitas Ekspor • Pembentukan UPT Sentra IKM sebagai Pengelola Teknis	Seluruh Kecamatan, (Kecamatan Wita Ponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bahodopi, Bungku Pesisir, Bungku Selatan dan Menui Kepulauan)



No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2019-2023	2024 - 2028	2029-2039	
		Sentra Ikan di Desa Umbele • Pengembangan industri Tahu dan Tempe			
		B. Industri Pengolahan Gula Aren			
		• Gula Merah • Gula semut		• Minuman Sirup berbahan baku Gula aren	Kecamatan Wita Ponda, Bungku Tengah
		C. Industri Air Minum Dalam Kemasan			
		• Industri Air Minum Dalam Kemasan Gelas	• AMDK Botol		Kecamatan Wita Ponda dan Kecamatan Bungku Tengah
2.	Industri Hulu Agro	A. Industri Pengolahan Kelapa Terpadu			
		• Air kelapa dalam kemasan • Briket arang • Nata de coco	• Santan bubuk dan cair • Tepung kelapa • Asap cair	• Carbon aktif	Kecamatan Bungku Barat, Bungku Tengah dan Bungku Pesisir,
		B. Industri Pengolahan Kelapa Sawit			
		• Industri margarine • Olein • Dan produk turunan berbahan baku kelapa sawit	• Asam lemak Nabati	• Industri margarine • Olein • Plastik bio berbasis limbah industri sawit • Polimer turunan minyak sawit	Kecamatan Wita Ponda, Bumi Raya dan Bungku Barat
3.	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka (Kayu, Rotan dan Daur Ulang)	A. Industri Furniture dan pengolahan Kayu			
		• Furniture kayu dan aluminium • Penambahan Rumah Produksi pada Sikim Furniture Bungku Tengah • Industri penggergajian kayu • Peningkatan Sarana dan Prasarana Sikim Furnitur	• Furniture kayu. • Industri penggergajian kayu • Vokasi SDM ke Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu di Kendal.	• Furniture kayu dan kerajinan lainnya	Kecamatan Bungku Tengah, Wita Ponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Timur dan Bahodopi
		B. Industri Kerajinan kayu, Rotan dan Daur Ulang			
		• Kerajinan furniture	• Kerajinan dan Meubel	• Kerajinan berbahan baku	camatan Bungku Barat, Bungku



No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2019-2023	2024 - 2028	2029-2039	
		bebahan baku Rotan • Pemanfaatan Mesin Peralatan Rotan pada Sikim Furniture • Kerajinan Daur ulang dari kerang-kerangan, Koran bekas dan Botol AMDK Bekas	Rotan • Kerajinan anyaman Rotan yang memiliki nilai tinggi	limbah industri pengolahan Rotan dan daur ulang • Kerajinan Rotan dan daur ulang yang memiliki nilai tinggi	Tengah, Bungku Pesisir
		C. Industri Bahan Bangunan dan Umum			
		• Industri Pembuatan Batako • Industri pembuatan pot dan kerajinan lainnya berbahan baku pasir local • Industri Batako standar nasional	• Industri Batako berkualitas tinggi • Industri Kerajinan berbahan baku tanah liat (Gerabah)	• Industri Batako berkualitas tinggi • Industri Kerajinan berbahan baku tanah liat (Gerabah)	camatan Wita Ponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bahodopi, Bungku Pesisir
4.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	A. Industri Besi			
		Industri Biji Besi Dan stainless	Industri Besi dan Stainless steel	Industri Besi dan Stainless steel dan turunannya	camatan Bungku Timur, Bahodopi dan Bungku Pesisir
		B. Industri Nikel			
		• Industri Nikel (Feronikel, Nikel Mate, dan Nikel Murni) • Industri Kokas • Industri Baterai Litium	• Industri Nikel (Feronikel, Nikel Mate, dan Nikel Murni) • Industri Kokas • Industri Baterai Litium	Industri Stainlees steel untuk bahan kontruksi, perabotan, peralatan kesehatan, kawat, peralatan listrik/elektonika dan produk turunannya lainnya	camatan Bungku Timur, Bahodopi dan Bungku Pesisir
		C. Industri Bahan Galian Bukan Logam			
		• Industri Batu Kapur • Galian C	• Industri Batu Kapur • Galian C	• Industri Pengolahan Batu Kapur	camatan Bungku Barat, Bungku Tengah,

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2019-2023	2024 - 2028	2029-2039	
		• Industri pengolahan sirtu	• Industri pengolahan sirtu	• Industri pengolahan sirtu	Bahodopi dan Bungku Pesisir.

Sumber: RPIK, Morowali 2021-2041

2.3.3.7 Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Morowali memiliki daerah perairan yang mempunyai potensi perikanan baik perikanan laut dan perikanan darat. Di sepanjang daerah pesisir Teluk Tolo, mata pencaharian penduduk umumnya nelayan dan pedagang. Pekerjaan sebagai nelayan dipilih karena sesuai dengan keterampilan masyarakat setempat, sementara sumber daya yang tersedia hanya laut beserta isinya yang mempunyai nilai ekonomi sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir laut selain menjadi nelayan atau pedagang yang berhubungan dengan laut. Indikator kinerja pada urusan perikanan dan kelautan di Kabupaten Morowali menyangkut Produksi perikanan (Produksi perikanan laut, Produksi perikanan darat), Konsumsi ikan, Cakupan bina kelompok nelayan, Produksi perikanan kelompok nelayan, Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial, dan Nilai tukar nelayan.

a. Produksi Perikanan (ton)

Produksi perikanan di Kabupaten Morowali berasal dari kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, baik itu di wilayah perairan laut, perairan darat maupun perairan umum. Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen jumlah produksi ikan pertahun terhadap target daerah. Indikator ini dihitung dengan cara membagi jumlah produksi ikan dengan target produksi ikan daerah. Data produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya disajikan pada Tabel 2.115 sebagai berikut ini.

Tabel 2.115
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenisnya (ton) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Perikanan Laut (ton)	34.126,00	38.573,00	32.203,20	33.309,30	33.420,80
2	Produksi Perikanan Darat (Ton)	27,88	305,00	618,90	2.993,00	2.981,00

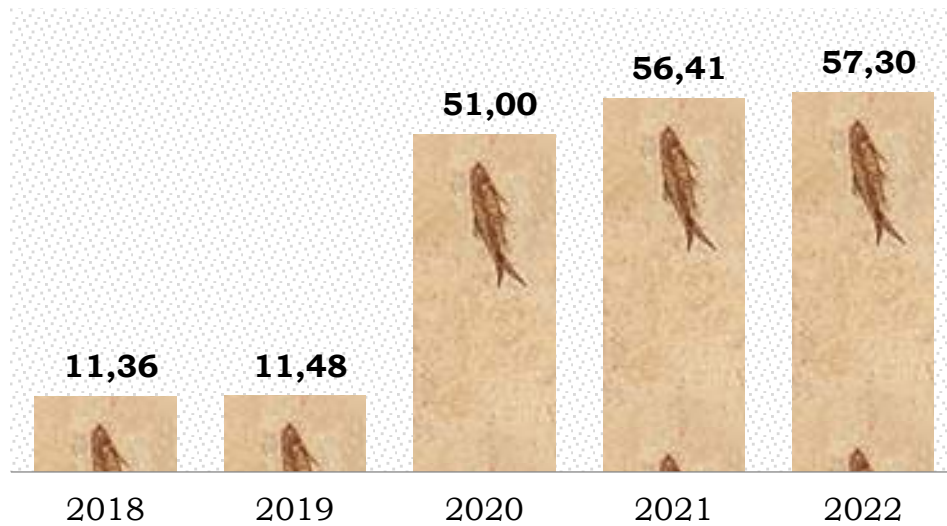
No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	451,19	20.372,00	18.260,00	58.414,00	2.220,32

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023

Produksi perikanan Kabupaten Morowali masih didominasi oleh produksi perikanan laut. Produksinya cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2018-2022, namun pada perkembangan setiap Tahunnya berfluktuatif, dimana hingga Tahun 2023 untuk produksi perikanan laut sebesar 33.420,80 ton, kemudian untuk produksi perikanan darat sebesar 2.981,00 ton dan untuk produksi perikanan budidaya sebesar 2.220,32 ton.

b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan pangan oleh individu guna memenuhi kebutuhan gizi manusia. Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen jumlah ikan yang dikonsumsi terhadap target daerah setiap Tahunnya. Berdasarkan perilaku pengeluaran pangan rumah tangga telah menunjukkan pergeseran dari perilaku pangan ikan di dalam rumah ke perilaku pangan ikan di luar rumah. Konsumsi langsung di dalam rumah tangga turut berubah sesuai dengan pertambahan jumlah anggota rumah tangga yang serumah dan pendapatan. Khusus perilaku pangan ikan di luar rumah tangga semakin beragam bentuk dan menu sajiannya, baik yang disediakan oleh hotel, restoran, rumah makan, dan warung tenda. Nilai persentase konsumsi ikan perkapita diperoleh dari rasio konsumsi ikan perkapita dengan target konsumsi ikan perkapita pada RPD Morowali yang disajikan pada Gambar 2.113 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2.113
Konsumsi Ikan Perkapita
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa konsumsi ikan perkapita perTahun di Kabupaten Morowali perkembangannya berfluktuatif di Tahun 2018 konsumsi ikan perkapita sebesar 11,36 kg/Tahun, meningkat s/d Tahun 2019 menjadi 11,48 ton/Tahun. Meningkat signifikan Tahun 2020 sebesar 51 ton/Tahun. Meningkat kembali ditahun 2021 sebesar 56,41 ton/tahun dan ditahun 2022 sebesar 57,30 kg/tahun.

c. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Indikator rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial dimaksudkan untuk meningkatkan kelestarian ekosistem sumberdaya perairan melalui peningkatan luas kawasan lindung guna meningkatkan populasi sumberdaya ikan. Rasio kawasan lindung perairan diperoleh dari rasio/perbandingan antara luas kawasan lindung perairan dengan total luas perairan territorial Kabupaten Morowali yang disajikan pada Tabel 2.116 sebagai berikut ini.

Tabel 2.116
Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan
Territorial Tahun 2018-2022 di Kabupaten Morowali

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas kawasan	114.322,01	114.322,01	114.322,01	114.322,01	114.322,01

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
	Lindung (ha)					
2	Luas Perairan Territorial (ha)	2.996.288	2.996.288	2.996.288	2.996.288	2.996.288
	Rasio	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Sumber: Dinas Perikanan Daerah Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan luas kawasan lindung terhadap luas teritorial perairan Kabupaten Morowali. Makin kecil nilai perbandingan tersebut makin luas wilayah perairan yang dilindungi. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan pada Tahun 2018 sebesar 0,04 dan Tahun 2020 sebesar 0,04.

2.3.4 Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan

2.3.4.1 Urusan Perencanaan

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan disusunnya dokumen perencanaan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 Tahun.

Dalam kaitan tersebut seluruh produk perencanaan pembangunan di Kabupaten Morowali telah menyusun dokumen RPJPD pada Tahun 2008 dan berlaku s/d Tahun 2028 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0136) yang tersaji datanya pada Tabel 2.117 sebagai berikut ini.

Tabel 2.117

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Morowali, 2023.

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) Tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali telah tersedia dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali (RPJMD) Periode 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 01); sedangkan sebelumnya pada periode 2013-2018 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali 2008-2012. RPJMD kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 dilakukan perubahan pada tahun 2021 melalui Peraturan Daerah Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022. Secara lengkap datanya tersaji pada Tabel 2.118 sebagai berikut.

Tabel 2.118

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Morowali, 2023.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan keikutsertaan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. Setiap tahun pemerintah daerah Kabupaten Morowali menyusun dokumen RKPD oleh Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali yang datanya tersaji pada Tabel 2.119 sebagai berikut.

Tabel 2.119

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Morowali, 2023.

4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Dokumen RTRW kabupaten Morowali telah disusun pada Tahun 2016 dan telah dilakukan perubahan serta ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2019–2039 yang datanya tersaji pada Tabel 2.120 sebagai berikut.

Tabel 2.120

Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Morowali, 2023.

2.3.4.2 Keuangan

1. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Data opini audit BPK atas LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.121 sebagai berikut.

Tabel 2.121
Opini Audit BPK Atas LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

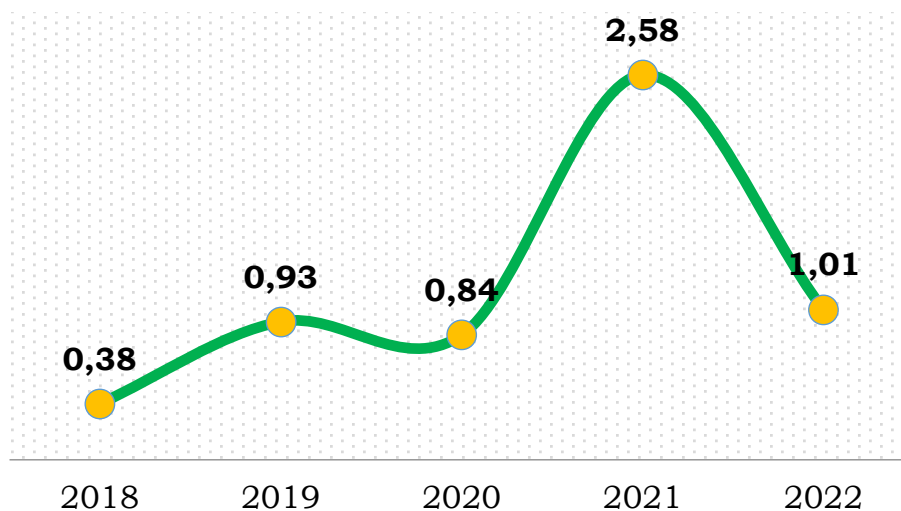
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Menunggu hasil pemeriksaan BPK

Sumber: BPK Perwakilan Sulawesi Tengah 2018-2022

Kabupaten Morowali berhasil dengan meraih opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selamat tahun 2018-2021 meraih opini WTP, untuk tahun 2022 masih dalam proses pemeriksaan BPK. Pemerintah Kabupaten Morowali dapat menjadikan informasi LKPD sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan putusan pengelolaan keuangan.

2. Persentase SILPA terhadap APBD

Kondisi ideal SILPA dalam struktur APBD adalah 0 persen. Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Tahun 2018 sebesar 0,38 persen, di Tahun 2019 sebesar 0,93 persen, dan ditahun 2020 menurun sebesar 0,84 persen, meningkat cukup signifikan tahun 2021 sebesar 2,58 persen dan ditahun 2021 sebesar 1,01 persen, secara lengkap terdapat pada Gambar 2.114 sebagai berikut ini.

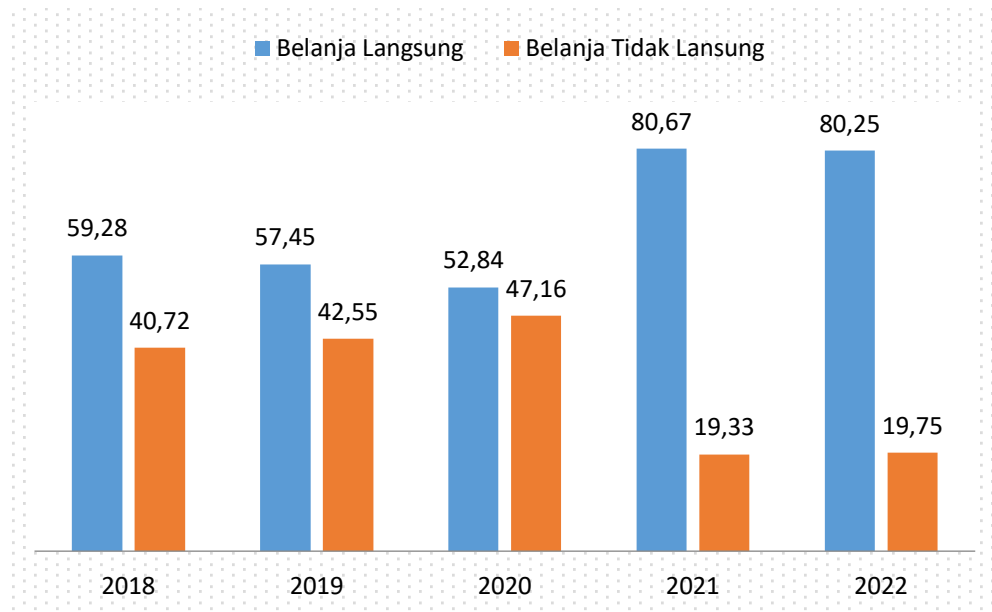


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Morowali 2018-2022

Gambar 2.114
Persentase SILPA Terhadap APBD
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

3. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung

Belanja Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Alokasi belanja langsung di Kabupaten Morowali lebih besar dari anggaran belanja tidak langsung. Dimana hingga Tahun 2022 besaran anggaran belanja langsung sebesar 80,25 persen, sedangkan untuk anggaran tidak langsung sebesar 19,75 persen yang disajikan pada Gambar 2.115 sebagai berikut ini.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Morowali 2018-2022

Gambar 2.115
Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

4. Penetapan APBD

Penetapan APBD Kabupaten Morowali dari Tahun 2018-2022 selalu ditetapkan tepat waktu, merujuk pada peraturan yang berlaku. Data penetapan APBD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Tabel 2.122 sebagai berikut.

Tabel 2.122
Penetapan APBD Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2023

2.3.4.3 Sekretariat Dewan

Kondisi daerah terkait dengan urusan Sekretariat Dewan salah satunya dapat dilihat dari indikator seperti 1) Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten; 2) Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD); dan 3) Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. Data capaian urusan Sekretariat Dewan terdapat pada Tabel 2.123 berikut ini.

Tabel 2.123
Gambaran Capaian Indikator Sekretariat Dewan
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Morowali	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Morowali, 2023

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat diukur melalui rata-rata Konsumsi pengeluaran rumah tangga perkapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, nilai tukar petani dan produktivitas total daerah.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Angka konsumsi RT (Rumah Tangga) per kapita adalah rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per orang. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya. Pola konsumsi rumah tangga adalah satu dari beberapa indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian, bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluapran rumah tangga, dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan adalah rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa rumah tangga atau keluarga diidentifikasi semakin sejahtera, apabila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Indikator ini mengukur rata-rata pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga yang bersangkutan. Semakin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemampuan ekonomi suatu daerah, dan semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan otonomi. Hasil analisis konsumsi RT perkapita disajikan pada Tabel 2.124 sebagai berikut.

Tabel 2.124
Pengeluaran Per Kapita Rumah tangga
Kabupaten Morowali 2018 - 2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	ADHB	37,78	121,28	115,23	116,33
2.	ADHK 2010	24,79	75,83	71,76	70,40

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Morowali Menurut Pengeluaran 2023

Pada Tabel 2.124 di atas menunjukkan bahwa selama periode

2018-2021 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Dimana untuk pengeluaran perkapita PDRB ADHB dari 37,78 juta ditahun 2018, signifikan meningkat hingga tahun 2021 sebesar Rp116,33. Sedangkan untuk pengeluaran perkapita RT menurut PDBR Pengeluaran ADHK 2010 di tahun 2018 sebesar 24,79, hingga tahun 2022 sebesar 70,40. Pengeluaran Per Kapita Rumah tangga cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas).

Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas daerah per sektor (17 sektor) merupakan hasil dari Nilai Tambah Bruto tiap Sektor dibagi dengan jumlah orang yang bekerja dalam sektor yang bersangkutan. Dengan demikian, produktivitas total daerah merupakan hasil dari Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah orang yang bekerja dalam Tahun yang bersangkutan. Produktivitas total daerah Kabupaten Morowali meningkat setiap Tahun. Hal ini menunjukkan kondisi ekonomi daerah yang semakin membaik. Tahun 2018 produksi total daerah sebesar 235,48, meningkat hingga Tahun 2019 menjadi 651,06. Ditahun 2020 produksi total daerah Kabupaten Morowali meningkat sebesar 152,06 menjadi 803,12, sampai dengan tahun 2022 mencapai angka 1.297,22. Lebih lanjut diketahui bahwa Tahun 2022 sektor dengan produktivitas total terbesar adalah Industri Pengolahan dan sektor Pertambangan dan penggalian (873,16) terdapat pada Tabel 2.125 sebagai berikut ini.

Tabel 2.125
Produktivitas Total Daerah Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,04	26,62	25,79	26,23	27,02
B	Pertambangan dan Penggalian	73,48	80,94	117,12	230,94	273,90
C	Industri Pengolahan	75,07	86,95	313,75	654,23	873,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04

Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
F	Konstruksi	35,08	35,60	36,20	59,39	80,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,79	10,89	11,02	11,69	19,18
H	Transportasi dan Pergudangan	0,97	0,98	0,97	0,78	5,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	0,28	0,26	0,27	0,43
J	Informasi dan Komunikasi	2,79	2,89	3,12	3,90	4,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,90	1,94	1,95	2,38	2,55
L	Real Estat	2,03	1,98	1,94	2,02	2,63
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,64	2,69	2,65	2,93	2,87
P	Jasa Pendidikan	1,56	1,56	1,51	1,56	1,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,01	1,06	1,07	1,29	1,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,71	0,73	0,73	0,76	0,94
Produk Domestik Regional Bruto		235,48	255,26	518,24	998,51	1.297,22

Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut.

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan. Ketersediaan sarana jalan memberikan kemudahan/akses bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial dan ekonomi serta aktivitas lainnya. Meningkatnya kebutuhan perhubungan atau transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan). Secara lebih jelasnya Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Morowali, Tahun 2018-2022 terdapat pada Tabel 2.126 sebagai berikut.

Tabel 2.126
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1:7	1:7	1:5	1:7	1:9

Sumber: BPS Tahun 2023 (diolah Kembali)

Berdasarkan Tabel 2.126 di atas, diketahui bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Morowali dari Tahun 2018-2022 berada pada rasio 1:7, 1:5 ditahun 2020. Kemudian pada Tahun 2021 sedikit meningkat sebesar 1:7, sampai dengan tahun 2022 sebesar 1:9.

2. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per Tahun

Jumlah penumpang turun di Kabupaten Morowali mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni 8.564 di Tahun 2018 menjadi 9.677 pada Tahun 2022. Sedangkan untuk jumlah penumpang naik juga meningkat sangat signifikan dari 8.419 penumpang di Tahun 2019 menjadi 9.719 Tahun 2022. Selanjutnya untuk jumlah barang yang di bongkar mengalami penurunan dari 197.027 ton di tahun 2018 menjadi 214.034 ton pada tahun 2022. Untuk Jumlah barang muat (ton) sebesar 439.419 ton pada Tahun 2018 meningkat sangat signifikan sebesar 500.409 ton pada Tahun 2022.

Sejak Tahun 2018 bandar udara Morowali beroperasi, dimana Tahun 2018 jumlah penumpang yang datang sebanyak 70.035 orang, menurun pada Tahun 2019 menjadi 32.301 penumpang. Sedangkan untuk penumpang yang berangkat sebanyak 45.977 orang Tahun 2018, juga menurun di Tahun 2019 sebanyak 33.266 penumpang. Pada Tahun 2019 sebesar 7.340 di Bandara Morowali sebesar 107.487 ton dan Jumlah barang muat (ton) sebesar 77.498 ton. Selanjutnya pada tahun 2020 arus penumpang dan barang di bandara Udara Morowali tetap meningkat meskipun di tahun pandemic Covid-19, dimana larangan penerbangan, pembatasan jumlah penerbangan dan berbagai macam protokol kesehatan dilakukan. Jumlah penumpang yang datang sebanyak 58.447 orang sedangkan Jumlah Penumpang Berangkat sebanyak 15.247. Sampai dengan tahun 2022 jumlah penumpang yang datang sebanyak 31.271 dan berangkat sebanyak 21.973 orang.

Kemudian untuk Jumlah Barang Bongkar sampai dengan tahun

2022 sebesar 244.256 (Ton) dan Jumlah barang muat (ton) sebesar 99.202. Data terkait disajikan pada Tabel 2.127 sebagai berikut.

Tabel 2.127

**Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per Tahun
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2019	2020
Angkutan Laut						
1	Jumlah Penumpang Turun	8.564	8.726	8.726	9.557	9.677
2	Jumlah Penumpang Naik	NA	8.419	8.419	9.195	9.719
3	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	197.027	200.751	200.751	210.789	214.034
4	Jumlah barang muat (ton)	439.419	447.724	447.724	470.110	500.409
Angkutan Udara						
5	Jumlah Penumpang Datang	70.035	32.301	58.447	31.271	31.271
6	Jumlah Penumpang Berangkat	45.977	33.266	15.247	21.973	21.973
7	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	NA	107.487	122.089	270.442	244.256
8	Jumlah barang muat (ton)	NA	77.498	39.268	100.059	99.202

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

3. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan rangkuman hasil pembahasan analisis yang dilakukan sebelumnya (*dalam Dokumen RPI2JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Morowali*) maka dalam upaya pengembangan kegiatan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali ini terdapat potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh wilayah perencanaan. Selain itu terdapat juga kendala yang dimiliki wilayah perencanaan yang harus menjadi bahan pertimbangan. Potensi biasa dijadikan modal dalam upaya pembangunan, sedangkan permasalahan harus ditanggulangi, sehingga harus dicari pemecahan permasalahannya.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kab. Morowali 2018-2033, telah menetapkan kawasan sekitar IMIP sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan kepentingan ekonomi. Diperkirakan hingga 222, KI IMIP telah menyerap kurang lebih 30.000 s/d 80.000 tenaga kerja. (*morowalikab.go.id*).

Hal tersebut telah berdampak langsung pada kawasan itu sendiri. Jumlah penduduk yang bertambah dengan pindah datang penduduk mengakibatkan kepadatan kawasan permukiman menjadi

permasalahan. Tanpa disadari, hal ini berdampak pada persoalan sampah, kumuhnya kawasan, lalu lintas kendaraan yang macet pada jam tertentu, dan lain-lain. Akan tetapi, hingga akhir 2022, RTRW KI Morowali belum juga dikeluarkan, sehingga terkesan diabaikan saja. Semakin lama hal ini diabaikan, maka dampak negatif dari perubahan kawasan menjadi KI akan nyata di depan mata, dan masyarakat yang pasti menjadi korbannya.

4. Jenis dan jumlah bank dan cabang

Ketersediaan lembaga keuangan seperti Bank pada suatu daerah, menjadi pertimbangan penting dalam keputusan investasi pada suatu daerah. Dikabupaten Morowali untuk jenis Bank Umum terdapat 3 kantor cabang dan 16 kantor cabang pembantu pada Tahun 2022, berkurang dari data tahun sebelumnya. Sedangkan untuk bank perkreditan rakyat sebanyak 3 kantor cabang di Tahun 2022 juga berkurang dari tahun sebelumnya, data terkait dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.128 sebagai berikut.

Tabel 2.128
Jumlah Bank dan Jenisnya
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bank Umum	14	17	11	19	19
Kantor Cabang	2	3	2	3	3
Kantor Cabang Pembantu	12	14	9	16	16
Bank Perkreditan Rakyat					
Kantor Cabang	4	4	3	3	3

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

5. Jenis, kelas, dan jumlah restoran;

Jumlah restoran yang ada di Kabupaten Morowali perkembangan berfluktuatif periode Tahun 2018-2022. Hal ini menunjukkan tingkat ekonomi juga semakin membaik. Pada Tahun 2018 jumlah restoran di kabupaten Morowali sebanyak 16 restoran kemudian sampai dengan Tahun 2020 terdapat 62 restoran, dan ditahun 2022 meningkat menjadi 75 restoran/rumah makan. Namun restoran yang ada di Kabupaten Morowali masih dalam skala mikro/rumah makan yang dikelola oleh masyarakat. Data jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Morowali terdapat pada Tabel 2.129 sebagai berikut ini.

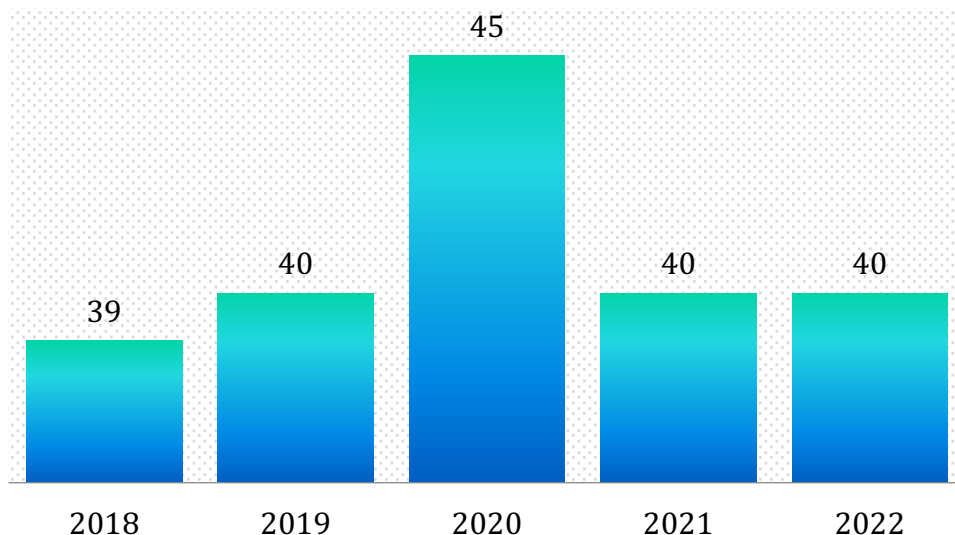
Tabel 2.129
Jumlah Rumah Makan/Restoran
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Restoran	16	62	62	62	75

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

6. Jenis, Kelas, Dan Jumlah Penginapan/Hotel

Meningkatkan jumlah penginapan/hotel dan tingkat hunian menunjukkan meningkatnya aktivitas orang masuk di wilayah tersebut. Ketersediaan penginapan/hotel sangat diperlukan mengingat Kabupaten Morowali sebagai wilayah industri yang mengundang beragam orang dan profesi untuk datang Morowali. Jumlah penginapan di Kabupaten Morowali pada Tahun 2018 sebanyak 39 penginapan, pada Tahun 2020 jumlah penginapan di Kabupaten Morowali sebanyak 45 penginapan, ditahun 2021 dan 2022 terdapat 40 penginapan, berkurang dari tahun sebelumnya. Data Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.116 sebagai berikut.



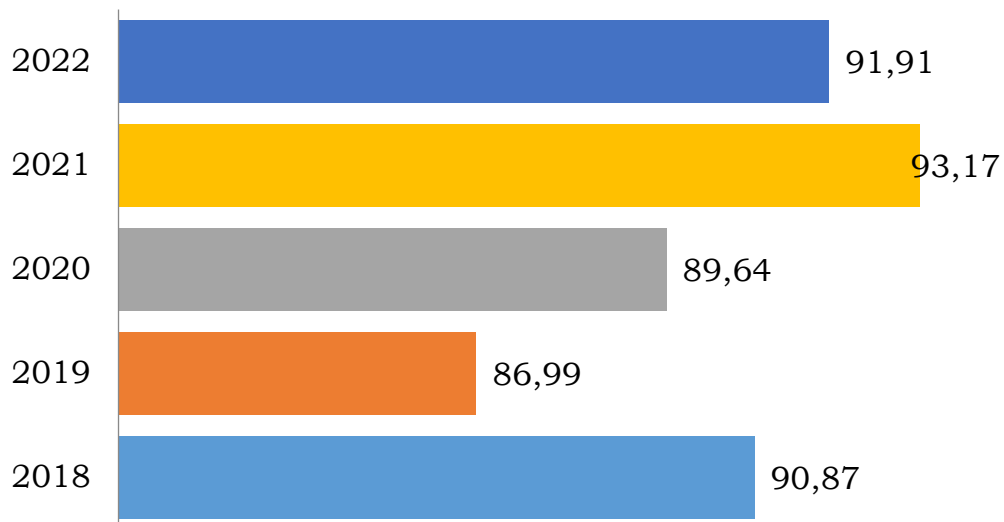
Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.116
Jumlah Penginapan/Hotel
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

7. Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Berdasarkan data, persentase penduduk berakses air minum dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 mengalami perkembangan yang

fluktuatif dari sebesar 90,87 persen pada Tahun 2018, turun di tahun 2019 menjadi 86,99 persen. Dan ditahun 2020 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Morowali sebesar 89,64 persen, lebih besar dari tahun sebelumnya. Meningkatkan sekitar 3,53 persen menjadi 93,17 persen, namun di tahun 2022 kembali menurun sebesar 91,91 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa akses penduduk untuk mendapatkan air minum yang layak mengalami peningkatan. Data Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2018–2022 terdapat pada Gambar 2.117 sebagai berikut ini.

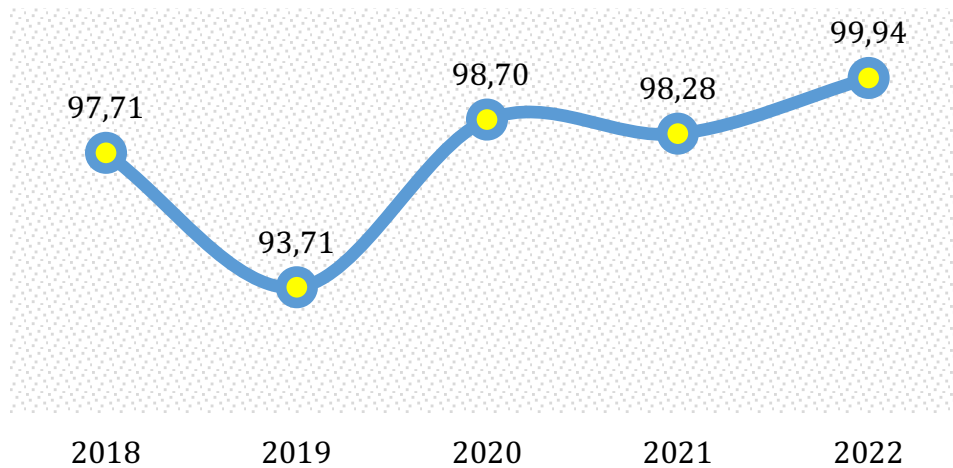


Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.117
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2018–2022

8. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik;

Selama periode 2018-2022, pada Tahun 2018, proporsi rumah tangga pengguna listrik mencapai 97,71 persen menurun di Tahun 2019 menjadi 93,71 persen, selanjutnya di tahun 2020 meningkat menjadi 98,70 persen, dan sampai pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 99,94 persen. Data terkait terdapat pada Gambar 2.118 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.118
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

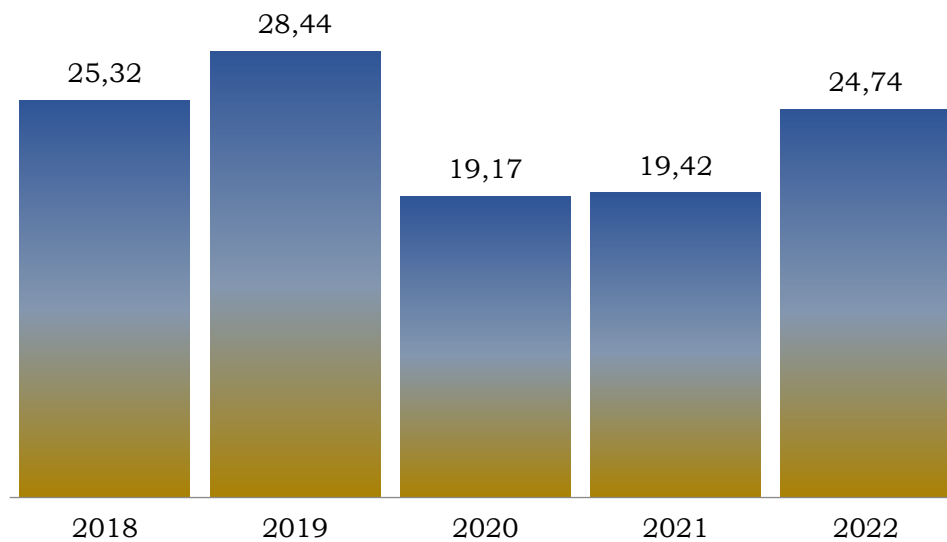
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator:

a. Angka Kriminalitas

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Data Angka Kriminalitas di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.119 Sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Morowali Tahun Dalam Angka 2019-2023

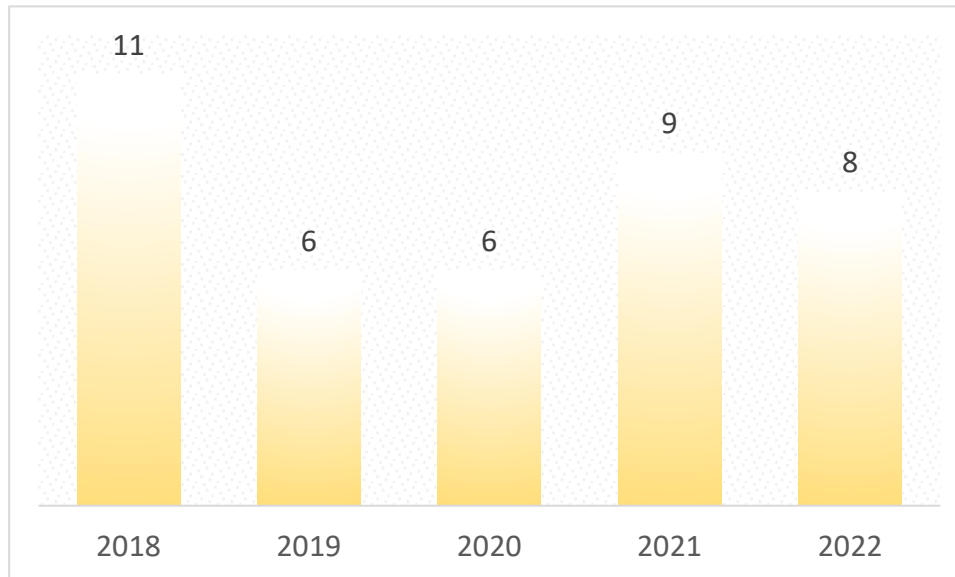
Gambar 2.119
Angka Kriminalitas Di Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

Berdasarkan Gambar 2.119 di atas jumlah tindak kriminal hingga 2022 cenderung berfluktuatif seiring dengan jumlah penduduk semakin meningkat. Pada Tahun 2018 sebanyak 0,0025, Tahun 2019 sebanyak 0,0028 dan pada Tahun 2020 sebanyak 0,0019. Ditahun 2022 angka kriminalitas sebesar 24,74 per 100.000 penduduk. Angka ini semakin kecil semakin baik. Penyebab kejahatan antara lain disebabkan karena masih banyaknya pengangguran, dan faktor kemiskinan. Berdasarkan data Kabupaten Morowali memiliki tingkat pengangguran terbuka sebanyak 5,86 persen pada Tahun 2022 sesuai dengan data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Morowali dan berdasarkan data statistik, angka kemiskinan Kabupaten Morowali menurun menjadi 13,43 persen yang sebelumnya 13,75 persen.

b. Jumlah Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Morowali cenderung meningkat dalam 5 Tahun terakhir Tahun 2018-2022. Demonstrasi terbanyak terjadi pada Tahun 2018 yakni 11 demonstrasi. Dan Tahun 2019 jumlah demonstrasi menurun sebanyak 6 demonstrasi

yang terdiri dari demonstrasi politik, ekonomi dan pemogokan kerja. Pada tahun 2020 terdapat 6 demonstrasi, kemudian tahun 2021 ada 9 demonstrasi, dan di tahun 2022 sebanyak 8 demonstrasi. Data mengenai jumlah demonstrasi di Kabupaten Morowali pada Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.120 sebagai berikut ini.



Sumber: Data SIPD Kabupaten Morowali Tahun 2023

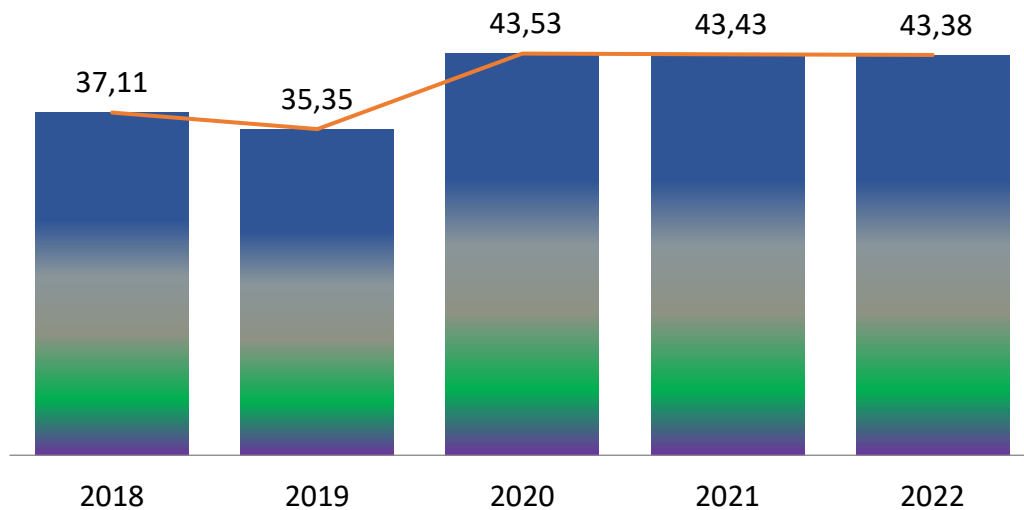
Gambar 2.120
Jumlah Demonstrasi Di Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

a. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 Tahun dan > 64 Tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 Tahun. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 Tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 Tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 Tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Data Perkembangan Rasio Ketergantungan Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

terdapat pada Gambar 2.121 sebagai berikut.



Sumber: Data SIPD Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023

Gambar 2.121
Perkembangan Rasio Ketergantungan
Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 Tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 Tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 Tahun. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua. Pada kurun waktu Tahun 2018-2022, *Dependency Ratio* di Kabupaten Morowali di bawah 50 persen. Pada Tahun 2021, rasio ketergantungan 35,35 persen dari jumlah penduduk, angka ini makin kecil makin baik. Namun pada tahun 2020 rasio ketergantungan di Kabupaten Morowali sedikit mengalami peningkatan menjadi 43,43 persen. Kemudian ditahun 2022 sebesar 43,38, lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Sedangkan jika dilihat dari sisi rasio ketergantungan muda dan rasio ketergantungan tua, untuk kasus Kabupaten Morowali kurun waktu 2018-2022 lebih besar angka ketergantungan muda dari pada angka ketergantungan tua. Hal ini dapat berimplikasi kepada kebijakan pemerintah tentang penyediaan fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana olah raga. Sangat diharapkan sarana dan prasarana digunakan sebagai saluran minat dan bakat generasi muda serta mengoptimalkan kualitas diri generasi penerus di Kabupaten Morowali dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan semangat untuk *survive* dalam menyambut era keterbukaan ekonomi.



Tabel 2.130
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan
Tingkat Sasaran (dampak/impact) Kabupaten Morowali, Tahun 2018-2022

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1.1	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (%)	20,38	20,26	28,93	25,31	28,21
1.1.2	Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan dengan Migas (%)	112,20	20,20	28,93	25,31	48,20
1.1.3	PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (Juta Rp)	20.507,48	45.244,73	62.028,34	98.779,81	146.599,32
1.1.4	PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas (Juta Rp)	20.507,48	45.244,73	62.028,34	98.779,81	146.599,32
1.1.5	PDRB-ADH Konstan dengan Migas (Juta Rp)	15.020,62	34.085,70	43.824,300	54.916,24	70.515,62
1.1.6	PDRB-ADH Konstan tanpa Migas (Juta Rp)	15.020,62	34.085,70	43.947,50	54.916,24	70.515,62
1.1.7	Laju inflasi (Persen)	5,30	5,10	3,00	3,00	3,00
1.1.8	Perkembangan PDRB Perkapita (%)	-	-			



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	- PDRB Perkapita ADH Berlaku (Rp)	313,16	373,00	383,27	588,29	831,80
	- PDRB Perkapita ADH Konstan 2010 (Rp)	237,72	281,01	356,20	327,06	400,10
	- Perkembangan PDRB Konstan 2010 Perkapita (%)	10,55	12,62	26,76	-8,18	22,14
1.1.9	Indeks Gini	0,30	0,304	0,290	0,297	0,285
1.1.10	Persentase Penduduk Miskin	-	-			
	- Garis Kemiskinan (000)	402.292,00	428.744,00	463.140,00	478.409,00	507.523,00
	- Jumlah Masyarakat Miskin (000)	17,03	16,61	16,50	17,07	15,86
	- Persentase Kemiskinan (%)	14,34	13,75	13,43	13,75	12,58
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,05	2,12	0,67	2,11	2,03
	- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,93	0,50	0,67	0,54	0,54
1.1.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,02	72,21	72,21	72,29	72,55
1.1.11	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	85,66	86,25	86,57	86,25	87,42
1.2.	Kesejahteraan Sosial					
1.2.1	Angka Melek Huruf	98,99	100,00	100,00	100,00	100,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.2.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,11	9,33	9,33	9,34	9,35
1.2.3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,14	13,17	13,17	13,35	13,36
1.2.4	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	68,77	69,18	69,18	69,23	69,23
1.2.5	Balita Gizi Buruk	9,00	4,00	4,00	2,00	2,00
1.2.6	Prevalensi Angka Stunting	12,00	7,61	7,61	7,80	5,20
1.2.7	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	62,80	50,01	50,01	46,92	41,83
1.2.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	62,60	64,70	64,70	63,75	60,74
1.2.9	Tingkat pengangguran terbuka	3,03	3,03	5,21	5,08	3,20
1.2.10	Rasio Penduduk yang Bekerja	96,97	94,79	94,79	94,92	96,80
1.2.11	PDRB per tenaga kerja Laju pertumbuhan	-	-			
	- PDRB ADHB	86.420,76	113.275,77	113.275,77	179.606,19	269.687,30
	- PDRB ADHK	65.106,21	80.311,95	80.311,95	99.851,34	129722,07
1.2.11	Persentase PAD terhadap pendapatan	19,04	23,18	23,18	22,33	26,93
1.2.12	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.2.13	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten	-	-			
	- PDRB ADHB	4,56	3,27	3,27	2,17	1,46
	- PDRB ADHK	4,22	3,18	3,18	2,63	2,05



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.2.14	Kontribusi sektor Pertanian (Holtikultura) terhadap PDRB Kabupaten	-	-			
	- PDRB ADHB	0,27	0,21	0,21	0,01	0,00
	- PDRB ADHK	0,23	0,18	0,18	0,15	0,11
1.2.15	Produksi Tanaman Pertanian	-	-			
	Padi	44.672,00	42.068,22	42.068,22	46.221,70	39.507,32
	Jagung	5.283,00	1.865,00	1.865,00	4.368,42	1.865,00
	Ubi Kayu	4.186,00	4.186,00	4.186,00	6.259,73	4.186,00
	Ubi Jalar	775,00	775,00	775,00	1.378,25	775,00
	Kacang Tanah	56,00	56,00	56,00	78,43	56,00
	Kacang Kedelai	46,00	127,00	127,00	190,00	127,00
	Kacang Hijau	4,00	4,00	4,00	45,43	4,00
1.2.16	Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan terhadap PDRB	-	-			
	- PDRB ADHB	1,41	1,05	1,05	0,66	0,45
	- PDRB ADHK	1,36	1,06	1,06	0,85	0,66
1.2.17	Produksi Tanaman Perkebunan	-	-			
	Kelapa	1.239,35	1.163,23	1.163,23	1.207,30	733,49
	Kelapa Sawit	78.362,45	80.148,90	80.148,90	74.092,52	76.096,25
	Kopi	35.780,00	23.477,00	23.477,00	35.200,00	33.626,00
	Kakao	1.554,21	6.971,70	6.971,70	2.400,00	1.727,75



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Karet	-	-	-	-	2.400,00
1.2.18	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		-			
	- PDRB ADHB	0,15	0,12	0,12	0,07	0,05
	- PDRB ADHK	0,16	0,13	0,13	0,10	0,08
1.2.19	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	-	-			
	- PDRB ADHB	18,22	18,33	18,33	18,63	17,29
	- PDRB ADHK	22,52	23,48	23,48	23,13	21,11
1.2.20	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	-	-			
	- PDRB ADHB	0,18	0,13	0,13	0,08	0,06
	- PDRB ADHK	0,16	0,12	0,12	0,08	0,07
1.2.21	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	-	-			
	- PDRB ADHB	2,11	1,66	1,66	1,04	0,70
	- PDRB ADHK	1,67	1,30	1,30	1,04	0,81
1.2.22	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	-	-			
	- PDRB ADHB	2,12	1,53	1,53	1,08	1,25
	- PDRB ADHK	1,82	1,34	1,34	1,17	1,48
1.2.23	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	-	-			
	- PDRB ADHB	64,86	69,98	69,98	71,23	73,19



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	- PDRB ADHK	62,46	65,74	65,74	65,52	67,31
1.2.24	Kontribusi Sektor Industri RT Terhadap PDRB	-	-			
	- PDRB ADHB	3,48	3,48	NA	NA	NA
	- PDRB ADHK	2,56	2,56	NA	NA	NA
1.2.25	Pertumbuhan Industri	8,26	0,30	(0,37)	NA	NA
1.2.26	Nilai ICOR	5,88	5,88	1,03	4,99	3,51
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	-				
1.3.1	Seni Budaya	-	-			
	- Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	- Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 Penduduk	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3.2	Olahraga	-	-			
	Jumlah Klub Olah Raga Per 10.000 Penduduk	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00
2.	ASPEK PELAYANAN UMUM	-				
2.1.	Urusan pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	-				
2.1.1	Pendidikan	-				



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini	-				
	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Murid TK	37,35	37,35	40,83	38,29	43,86
	Rasio Ketersediaan Guru Per Murid TK	16,04	14,68	13,92	12,87	13,75
2.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)	-	-			
	- Angka Partisipasi Kasar SD/MI	106,66	121,33	108,95	109,42	109,40
	- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	94,76	105,13	103,84	102,31	99,41
	- Angka Partisipasi Kasar SMU/MA/SMK	82,52	103,50	81,03	0,00	98,22
2.1.1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)	-	-			
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMU/MA/SMK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)	-	-			
	- Angka Partisipasi Murni SD/MI	94,66	94,79	94,72	95,07	93,67
	- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	70,96	72,73	73,49	73,23	73,13



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	- Angka Partisipasi Murni SMU/MA/SMK	68,43	67,59	67,54	69,71	70,62
2.1.1.5	Angka Partisipasi Sekolah	-	-			
	- Tingkat SD/MI	98,73	98,73	98,84	97,06	97,78
	- Tingkat SMP/MTs	94,20	94,20	94,97	94,40	94,51
	- Tingkat SMA/SMK/MA	89,66	84,70	89,35	89,75	90,06
2.1.1.6	Angka Putus Sekolah	-	-			
	- Tingkat SD/MI	0,30	0,45	-	0,38	0,29
	- Tingkat SMP/MTs	4,34	3,65	-	0,20	0,18
	- Tingkat SMA/SMK/MA	10,17	10,34	0,44	0,45	0,48
2.1.1.7	Angka Kelulusan	-	-			
	- Tingkat SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Tingkat SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Tingkat SMA/SMK/MA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.8	Angka Yang Melanjutkan	-	-			
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,80	100,00	100,00	100,00	100,00
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,00	100,00	100,00	98,90	99,71
	Angka Lulusan SMA/SMK/MA Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi	70,00	70,00	73,18	76,80	76,41



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.1.1.9	Fasilitas Pendidikan	-	-			
	- Tingkat SD/MI	148,00	148,00	153,00	159	162,00
	- Tingkat SMP/MTs	48,00	49,00	49,00	51	51,00
	- Tingkat SMA/SMK/MA	26,00	26,00	26,00	26	26,00
2.1.1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah	-	-			
	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI	0,13	0,11	0,13	0,12	0,10
	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs	0,15	0,17	0,15	0,16	0,07
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MI	0,16	0,20	0,22	0,03	0,03
2.1.1.11	Rasio Guru/Murid jenjang Pendidikan Dasar	12,99	12,95	10,20	11,55	11,39
2.1.1.12	Rasio Guru/Murid Jenjang pendidikan Menengah	12,21	9,24	12,29	11,81	12,73
2.1.1.13	Rasio guru/murid per kelas	-	-			
	- Tingkat SD/MI	0,06	0,05	0,05	0,05	0,13
	- Tingkat SMP/MTs	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03
	- Tingkat SMA/SMK/MA	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2.1.2.	Kesehatan	-	-			



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.1.2.1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	1,20	0,87	0,01	0,01	0,611
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	12,75	0,71	0,50	0,64	1,527
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	1,75	13,43	11,96	12,50	0,611
2.1.2.2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	79,72	-	0,00	0,35	0,299
2.1.2.3	Rasio posyandu per satuan balita	15,42	14,36	8,56	8,31	8,13
2.1.2.4	Rasio puskesmas, poliklinik, Poskesdes dan pustu per satuan penduduk	-	-	-	-	
	Rasio Sarana Kesehatan	0,34	0,360	0,266	0,268	0,255
	Rasio Puskesmas	0,08	0,070	0,056	0,077	0,074
	Rasio Poliklinik	0,01	0,040	0,025	0,048	0,045
	Rasio Pustu	0,25	0,247	0,161	0,143	0,136
2.1.2.5	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (Per 1.000)	0,02	0,020	0,012	0,012	0,017
2.1.2.6	Rasio Dokter per satuan penduduk (Per 1.000)	0,32	0,60	0,40	0,51	0,437
2.1.2.7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Per 1.000)	5,17	4,81	4,20	4,42	5,96



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.1.2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94,41	94,10	100,00	100,00	100,00
2.1.2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.10	Persentase Balita Yang Pernah diimunisasi campak	118,00	135,00	145,00	140,90	155,50
2.1.2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Jumlah)	232,00	452,00	386,00	356,00	197,00
2.1.2.12	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	372,64	372,64	238,67	133,40	969,11
2.1.2.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	106,00	106,00	77,00	59,00	176,00
2.1.2.14	Penderita Diare Yang Ditangani	1.730,00	1.730,00	1.795,00	2304,00	2911,00
2.1.2.15	Angka kejadian Malaria (Per 100.000 Penduduk)	12,37	12,37	6,18	5,96	10,78
2.1.2.16	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,01	0,01	0,01	0,003	0,02
2.1.2.17	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	-	-	-	-	0,00
2.1.2.18	Cakupan puskesmas	9,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.19	Cakupan Puskesmas Pembantu	26,32	26,32	19,55	18,05	18,05



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.1.2.20	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	79,93	79,93	80,49	78,33	82,18
2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-			
2.1.3.1	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	0,31	0,13	0,15	0,19	0,18
2.1.3.2	Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.1.3.3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	41,97	17,60	19,15	26,82	24,30
2.1.3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	76,29	79,61	82,80	78,34	71,80
2.1.3.5	Rasio jaringan Irigasi	0,95	0,82	0,70	0,72	0,87
2.1.3.6	Persentase penduduk berakses air minum	90,87	86,99	89,64	93,17	91,91
2.1.3.7	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	2,64	4,22	2,05	1,98	1,91
2.1.4.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;	-	-			
2.1.4.1	Rumah layak huni	134,29	90,00	72,64	78,25	81,71
2.1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat;	-	-			
2.1.5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	951,00	975,00	975,00	975,00	825,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.1.5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	12,00	8,00	8,00	8,00	5,00
2.1.5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	4,00	5,00	7,00	7,00	7,00
2.1.6.	Sosial	-	-			
2.1.6.1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	47.124,00	49.012,00	50.680,24	50.680,24	51.030,48
2.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	34,58	45,00	107,67	107,67	116,34
2.1.6.3	Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	-	7,00	7,00	7,00	7,00
2.1.6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	-	-			
2.2.1.	Tenaga Kerja	-	-			
2.2.2.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (orang)	56,00	56,00	28,00	32,00	35,00
2.2.2.2	Rasio Lulusan S1/S2/S3	9,92	9,16	14,27	14,87	15,12
2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-			



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	11,46	10,19	8,59	9,99	11,74
2.2.2.2	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Rasio KDRT	0,50	0,45	0,21	0,15	0,15
2.2.2.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	35,07	40,60	36,48	44,42	36,34
2.2.2.4	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	0,95	0,99	1,03	1,03	1,06
2.2.2.5	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	1,13	1,08	0,93	0,93	0,87
2.2.2.6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	0,90	1,31	1,09	1,09	1,01
2.2.3.	Ketahanan Pangan	-	-			
2.2.3.1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	199,26	216,27	152,75	158,90	132,32
2.2.3.2	Ketersediaan Energi	3.468,00	3.071,00	3.071,00	3.947,00	4.014,00
2.2.3.3	Ketersediaan protein perkapita	42,51	86,19	73,80	83,80	82,13
2.2.5.	Lingkungan Hidup	-	-			
2.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.5.4	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2.5.5	Penetapan MHA	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2.5.6	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2.6.	Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-			
2.2.6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	103.393,00	130.014,21	114.041,00	125.361,27	132.824,27
2.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	8.146,00	11.748,37	17.872,00	20.223,00	23.497,00
2.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah	92,00	138,47	100,00	100,00	179,00
2.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-			
2.2.7.1	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
2.2.7.3	Persentase PKK Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.4	Posyandu aktif	154,00	154,00	154,00	153,00	153,00
2.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-			
2.2.8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,68	1,64	33,33	4,54	4,96
2.2.8.2	Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali	80,05	79,08	80,08	88,54	87,34
2.2.8.3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	69,51	65,78	85,09	57,15	68,71
2.2.8.4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12,64	15,33	39,16	15,90	17,54
2.2.8.5	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.9.	Perhubungan	-	-			
2.2.9.1.	Jumlah Arus Penumpang (Orang)	17.000,00	17.000,00	17.145,00	18.241,00	18.851,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.2.9.2	Rasio ijin trayek	17,00	17,00	20,00	10,00	12,00
2.2.9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3,00	3,00	3,00	10,00	10,00
2.2.9.4	Pemasangan Rambu-rambu	350,00	310,00	310,00	45,00	57,00
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,05	0,05	0,05	0,08	0,33
2.2.9.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	-	-			
	Angkutan Laut	-	-			
	Jumlah Penumpang Turun	8.564,00	8.726,00	8.726,00	9.556,72	9.676,72
	Jumlah Penumpang Naik	-	8.419,00	8.726,00	9.194,62	9.718,62
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	197.027,00	200.751,00	8.419,00	210.788,55	214.033,55
	Jumlah barang muat (ton)	439.419,00	447.724,00	200.751,00	470.110,20	500.409,20
	Angkutan Udara	-	-			
	Jumlah Penumpang Datang	70.035,00	32.301,00	32.301,00	31.271,00	31.271,00
	Jumlah Penumpang Berangkat	45.977,00	33.266,00	58.447,00	21.973,00	21.973,00
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	-	107.487,00	15.247,00	270.442,00	244.256,00
	Jumlah barang muat (ton)	-	77.498,00	122.089,00	100.059,00	99.202,00
2.2.10.	Komunikasi dan Informatika	-	-			
2.2.11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	-			
2.2.11.1	Persentase koperasi aktif	30,77	22,56	36,36	36,66	39,10



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.2.12.	Penanaman Modal	-	-			
2.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	111,00	57,00	67,00	87,00	87,00
2.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	89.608.672,10	25.862.850,46	32.786.800.000.000,00	52.060.945.480.000,00	101.146.180.000.000,00
2.2.13	Kepemudaan dan Olahraga	-	-			
2.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda).	97,90	97,20	95,04	95,04	95,04
2.2.14.	Statistik	-	-			
2.2.14.1	Terintegrasinya Sistem Data statistik data terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.14.3	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.15.	Persandian	-	-			
2.2.16.	Kebudayaan	-	-			
2.2.17.	Perpustakaan	-	-			
2.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	10.244,00	3.510,00	2.286,00	2.628,00	2.508,00
2.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan yang Berkaitan Pelayanan Dasar	-	-			
2.3.1.	Pariwisata	-	-			
2.3.1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	2.168,00	5.016,00	5.495,00	6.416,00	3.624,0



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.3.1.2	Lama kunjungan Wisata (Hari)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2.3.2.	Pertanian	-	-			
2.3.2.1	Kontribusi Sektor Pertanaian	-	-			
	- PDRB ADHB	4,56	3,27	3,27	2,17	1,98
	- PDRB ADHK	4,22	3,18	3,18	2,63	2,01
2.3.2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	-	-			
	- PDRB ADHB	0,27	0,21	0,21	0,01	0,00
	- PDRB ADHK	0,23	0,18	0,18	0,15	0,11
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	-	-			
	- PDRB ADHB	1,41	1,05	1,05	0,66	0,45
	- PDRB ADHK	1,36	1,06	1,06	0,85	0,66
2.3.2.3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	-	-			
	Padi	52,15	49,26	45,60	51,11	45,67
	Jagung	46,28	44,78	15,81	15,81	15,81
	Ubi Kayu	263,67	289,69	290,69	290,69	290,69
	Ubi Jalar	135,60	201,35	203,95	203,95	203,95
	Kacang Tanah	12,01	10,75	10,77	10,77	10,77
	Kacang Kedelai	12,22	7,46	20,82	20,82	20,82



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Kacang Hijau	8,20	0,67	0,66	0,66	0,66
2.3.3.	Kehutanan	-	-			
2.3.3.1	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20
2.3.4.	Energi dan Sumberdaya Mineral	-	-			
2.3.4.1	Rumah tangga pengguna listrik	97,71	93,71	98,70	98,28	99,94
2.3.4.2	Daya Terpasang (Kwh)	-	43.966.450,00	43.966.450,00	43.966.450,00	43.968.432,00
2.3.5.	Perdagangan	-	-			
2.3.4.1	Ekspor Bersih Perdagangan	15.458,00	18.712,00	30.229,00	39.453,40	37.654,87
2.3.6.	Kelautan dan Perikanan	-	-			
2.3.5.1	Produksi Perikanan (ton)	-	-			
	Produksi Perikanan Laut (ton)	34.126,00	38.573,00	32.203,20	33.309,30	33.420,80
	Produksi Perikanan Darat (Ton)	27,88	305,00	618,90	2.993,00	2.981,00
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	451,19	20.372,00	18.260,00	58.414,00	2.220,32
2.3.5.2	Konsumsi Ikan Perkapita	11,36	11,48	51,00	56,41	57,30
2.3.5.3	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	0,04	0,04	1,04	1,04	1,04



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.4.	Fokus Layanan Urusan Penunjang	-	-			
2.4.1	Perencanaan Pembangunan	-	-			
2.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.2	Keuangan	-	-			
2.4.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.4.2.2	Persentase SILPA	0,38	0,93	0,84	2,58	1,01
2.4.2.3	Persentase belanja langsung	59,28	57,45	52,84	80,67	80,25



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.4.2.4	Persentase belanja belanja tidak langsung	40,72	42,55	47,16	19,33	19,75
2.4.2.5	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.4.3	Kepegawan serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-			
2.4.4	Penelitian dan Pengembangan	-	-			
2.4.5	Pengawasan	-	-			
2.4.6	Sekretariat Dewan	-	-			
2.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Morowali	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.4.6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	DAYA SAING DAERAH	-	-			
3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	-	-			
3.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	24,79	25,93	NA	NA	NA
3.1.2	Produktivitas Total Daerah	570,05	651,06	803,12	998,51	1.204,02
3.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	-	-			
3.2.1	Panjang Ruas Jalan Kabupaten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3.2.2	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	-	-	-	-	
	Angkutan Laut	-	-	-	-	
	Jumlah Penumpang Turun	8.564,00	8.726,00	8.726,00	13.080,00	10.387,45
	Jumlah Penumpang Naik	-	8.419,00	8.419,00	11.100,00	9.970,24



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	197.027,00	200.751,00	200.751,00	10.640,00	220.826,10
	Jumlah barang muat (ton)	439.419,00	447.724,00	447.724,00	9.120,00	492.496,40
	Angkutan Udara					
	Jumlah Penumpang Datang	70.035,00	32.301,00	58.447,00	58.447,00	59.739,04
	Jumlah Penumpang Berangkat	45.977,00	33.266,00	15.247,00	15.247,00	16.577,64
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	-	107.487,00	122.089,00	122.089,00	126.388,48
	Jumlah barang muat (ton)	-	77.498,00	39.268,00	100.059,00	42.367,92
3.2.3	Jenis dan jumlah bank dan cabang	-	-			
	Bank Umum	14,00	17,00	11,00	19,00	19,00
	Bank Perkreditan Rakyat	4,00	4-5	3,00	3,00	4,00
3.2.4	Jumlah Restoran/Rumah Makan	-	-			
	- Jumlah Rumah Makan	16,00	16,00	16,00	62,00	75,00
3.2.5	Jumlah Penginapan/Hotel	39,00	40,00	45,00	40,00	40,00
3.2.6	Persentase RT Berakses Air bersih	90,87	86,99	89,64	93,17	91,91
3.2.7	Rumah tangga pengguna listrik	97,71	93,71	98,70	98,28	99,94
3.3.	Fokus Iklim Berinvestasi	-				
3.3.1	Angka Kriminalitas	18,00	13,00	13,00	19,42	24,74
3.3.2	Jumlah Demonstrasi	11,00	6,00	6,00	6,00	8,00
3.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	-	-			
3.4.1	Tingkat Ketergantungan	-	-			



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	- Rasio Ketergantungan	37,11	35,35	43,53	43,43	43,38

BAB 3

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa gambaran keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas, atau kemampuan keuangan daerah (*regional financial*) dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah (*regional development*). Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah untuk mengukur kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah. Dimana, pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang menjadi landasan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan kewenangan pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Berbagai usaha mendorong kemampuan dan kemandirian pengelolaan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah dititikberatkan pada kemandirian pemanfaatan sumberdaya daerah secara optimal, efisien, dan efektif guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah. Kondisi keuangan daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target

penerimaan daerah, hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui pengeluaran daerah (belanja daerah).

Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Morowali dapat dilihat dari pelaksanaan APBD pada periode sebelumnya.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah, yang menjelaskan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sesuai ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan pasal 23 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain:

1. *Fungsi otorisasi*, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. *Fungsi perencanaan*, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. *Fungsi pengawasan*, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. *Fungsi alokasi*, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. *Fungsi distribusi*, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. *Fungsi stabilisasi*, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018-2022, menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Morowali, sesuai yang



ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022. Gambaran mengenai kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 dapat dilihat tabel 3.1 berikut ini.



Tabel 3.1
**Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022**

Kode	Uraian		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Rata-Rata Pertum- buhan (%)
			2018	2019	2020	2021	2022	
4	PENDAPATAN DAERAH		1.094.918.270.074,03	1.165.577.249.984,07	1.292.602.327.666,77	1.533.666.041.753,69	1.466.842.480.886,00	10,53
4.1	Pendapatan Asli Daerah		181.232.941.457,03	221.956.951.317,07	310.035.234.830,19	342.477.281.405,69	394.951.348.983,00	40,81
4.1.1		Pajak Daerah;	45.496.062.194,16	67.145.103.499,60	82.813.847.865,46	132.759.060.016,73	128.871.116.864,00	31,29
4.1.2		Retribusi Daerah;	74.914.511.058,00	103.687.253.544,00	168.342.058.094,00	149.588.246.206,00	170.199.000.000,00	89,34
4.1.3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;	1.521.871.716,00	1.679.957.568,00	1.810.921.029,00	2.310.289.229,27	1.810.921.029,00	-0,18
4.1.4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.	59.300.496.488,87	49.444.636.705,47	57.068.407.841,73	57.819.685.953,69	94.070.311.090,00	29,67
4.2	Pendapatan Transfer		913.508.328.617,00	924.625.738.802,00	950.310.721.772,00	1.163.244.070.798,00	1.071.891.131.903,00	4,40
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat		889.859.811.007,00	898.778.614.991,00	923.301.407.913,00	1.129.006.149.009,00	1.033.729.748.413,00	4,19
4.2.1.1		Dana Perimbangan	766.396.332.007,00	795.684.413.991,00	736.434.063.913,00	967.424.455.559,00	937.221.851.413,00	4,44
4.2.1.2		Dana Insentif Daerah;	33.250.000.000,00	-	82.372.515.000,00	57.280.042.000,00	0	-13,26
4.2.1.6		Dana Desa	90.213.479.000,00	103.094.201.000,00	104.494.829.000,00	104.301.651.450,00	96.507.897.000,00	4,73
4.2.2	Transfer Antar-Daerah		23.648.517.610,00	25.847.123.811,00	27.009.313.859,00	34.237.921.789,00	38.161.383.490,00	12,21
4.2.2.1		Pendapatan Bagi Hasil; dan	23.131.417.610,00	25.712.123.811,00	25.781.553.859,00	34.237.921.789,00	38.161.383.490,00	12,85
4.2.2.2		Bantuan Keuangan	517.100.000,00	135.000.000,00	1.227.760.000,00	-	-	129,19
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		177.000.000,00	18.994.559.865,00	32.256.371.064,58	27.944.689.550,00	-	1753,92
4.3.1		Hibah;	-	18.988.360.000,00	32.256.371.064,58	3.860.329.550,00	-	-19,69
4.3.2		Dana Darurat;	-	-	0	-	-	0,00
4.3.3		Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	177.000.000,00	6.199.865,00	-	24.084.360.000,00	-	-43,47
5	BELANJA DAERAH		1.090.373.004.109,93	1.159.453.805.161,81	1.234.782.732.475,70	1.391.029.815.992,71	1.475.300.370.937,00	
5.1	Belanja Operasi		642.810.649.325,93	674.901.099.412,78	746.071.783.487,80	877.397.367.922,96	995.125.193.549,00	13,88
5.1.1		Belanja Pegawai;	346.577.331.939,01	406.374.384.599,00	302.659.492.103,60	367.209.346.475,00	390.251.612.218,00	5,28



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Uraian		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Rata-Rata Pertum- buhan (%)
			2018	2019	2020	2021	2022	
5.1.2		Belanja Barang dan Jasa	248.881.909.796,00	265.064.478.977,17	419.018.885.812,00	471.409.042.918,47	532.532.453.065,00	26,29
5.1.3		Belanja Bunga	1.538.345.197,92	1.389.235.836,61	1.265.160.306,20	854.538.703,49	1.600.000.000,00	(2,00)
5.1.4		Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	(16,67)
5.1.5		Belanja Hibah; dan	44.890.252.393,00	1.535.000.000,00	15.047.395.266,00	34.844.870.926,00	67.609.128.266,00	169,70
5.1.6		Belanja Bantuan Sosial	922.810.000,00	538.000.000,00	8.080.850.000,00	3.079.568.900,00	3.132.000.000,00	201,99
5.2		Belanja Modal	307.690.148.308,00	280.144.328.091,11	281.977.622.416,40	265.271.692.859,15	267.196.702.301,00	(0,41)
5.3		Belanja Tidak Terduga	3.033.899.500,00	249.250.000,00	29.559.824.590,00	17.114.835.478,93	8.766.707.367,00	2.446,17
5.3.1		Belanja Tidak Terduga	3.033.899.500,00	249.250.000,00	29.559.824.590,00	17.114.835.478,93	8.766.707.367,00	2.446,17
5.4		Belanja Transfer	136.838.306.976,00	204.159.127.657,92	177.173.501.981,50	231.245.919.731,67	204.211.767.720,00	9,01
5.4.1		Belanja Bagi Hasil	-	17.587.373.137,92	16.086.356.666,52	41.008.583.441,67	48.985.664.720,00	27,64
5.4.2		Belanja Bantuan Keuangan	136.838.306.976,00	186.571.754.520,00	161.087.145.314,98	190.237.336.290,00	155.226.103.000,00	3,60
		SURPLUS / (DEFISIT)	4.545.265.964,10	6.123.444.822,26	57.819.595.191,07	142.636.225.760,98	(8.457.890.051,00)	
6		PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1		Penerimaan Pembiayaan	4.119.218.945,40	6.974.557.162,92	10.785.438.665,30	67.849.651.981,51	23.271.867.873,00	137,67
6.1.1		SiLPA	4.119.218.945,40	6.974.557.162,92	10.785.438.665,30	67.849.651.981,51	23.271.867.873,00	137,67
6.1.2		Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.1.3		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.4		Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.5		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-	-	-	-
6.1.6		Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
6.2		Pengeluaran Pembiayaan	1.798.898.025,34	1.270.966.733,34	1.270.966.733,34	11.270.966.733,34	14.813.977.822,00	151,54
6.2.1		Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	1.270.966.733,34	1.270.966.733,34	1.270.966.733,34	1.270.966.733,34	1.313.977.822,00	0,56
6.2.2		Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	10.000.000.000,00	13.500.000.000,00	5,83



Kode	Uraian		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Rata-Rata Pertum- buhan (%)
			2018	2019	2020	2021	2022	
6.2.3		Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.2.4		Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-	-	-	-
6.2.5		Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	527.931.292,00	-	-	-	-	-
		PEMBIAYAAN NETTO	2.320.320.920,06	5.703.590.429,58	9.514.471.931,96	56.578.685.248,17	8.457.890.051,00	120,16
6.3		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	6.865.586.884,16	11.827.035.251,84	67.334.067.123,03	199.214.911.009,15	-	

Sumber: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2018 sampai dengan 2022

A. Pendapatan

Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Morowali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana transfer meliputi Dana Perimbangan, Dana Insentif daerah dan Dana Desa. Sedangkan lain-lain PAD yang sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari PAD dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

Pada Tabel 3.1 di atas ditampilkan data realisasi pendapatan Kabupaten Morowali dan pada Tabel 3.2 disajikan data pertumbuhan pendapatan Kabupaten Morowali dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 beserta tabel analisis Data. Tabel laju pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 Dalam Persen (%) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022 Dalam Persen (%)

Kode	Uraian	Pertumbuhan					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
4	PENDAPATAN DAERAH	(4,36)	6,45	10,90	18,65	(4,36)	10,53
4.1	Pendapatan Asli Daerah	(4,90)	22,47	39,68	10,46	15,32	40,81
4.1.1	Pajak Daerah;	23,37	47,58	23,34	60,31	(2,93)	31,29
4.1.2	Retribusi Daerah;	(26,01)	38,41	62,36	(11,14)	13,78	89,34
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;	(12,87)	10,39	7,80	27,58	(21,61)	-0,18
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.	16,98	(16,62)	15,42	1,32	62,70	29,67
4.2	Pendapatan Transfer	(0,63)	1,22	2,78	22,41	(7,85)	4,40
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	(1,04)	1,00	2,73	22,28	(8,44)	4,19
4.2.1.1	Dana Perimbangan	4,04	3,82	(7,45)	31,37	(3,12)	4,44
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah;	(49,11)	(100,00)	100,00	(30,46)	(100,00)	-13,26
4.2.1.6	Dana Desa	(7,21)	14,28	1,36	(0,18)	(7,47)	4,73
4.2.2	Transfer Antar-	17,51	9,30	4,50	26,76	11,46	12,21

Kode	Uraian		Pertumbuhan					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2018	2019	2020	2021	2022	
		Daerah						
4.2.2.1		Pendapatan Bagi Hasil; dan	15,92	11,16	0,27	32,80	11,46	12,85
4.2.2.2		Bantuan Keuangan	204,18	(73,89)	809,45	(100,00)	-	129,19
4.3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(99,49)	10.631,39	69,82	(13,37)	(100,00)	1753,92
4.3.1		Hibah;	-	-	69,87	(88,03)	(100,00)	-19,69
4.3.2		Dana Darurat;	-	-	-	-	-	0,00
4.3.3		Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(99,49)	(96,50)	(100,00)	100,00	(100,00)	-43,47

Sumber: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, (diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, beberapa poin yang dapat di jelaskan sebagai berikut.

1. **Pendapatan Daerah.** Dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 meningkat dari Rp1.094.918.270.074,03 pada Tahun 2018 menjadi Rp1.466.842.480.886,00 pada Tahun 2022, meningkat dengan rata rata pertahun sebesar 10,53 persen pertahun. Pendapatan daerah dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021, dengan pertumbuhan mencapai 18,65 persen. Namun di tahun 2022 akibat pertumbuhan pendapatan daerah negatif sebesar 4,36 persen.
2. **Pendapatan Asli Daerah.** Dalam kurun waktu Tahun 2018-2022, dimana PAD meningkat dari Rp181.232.941.457,03 pada Tahun 2018 menjadi Rp394.951.348.983,00 miliar pada Tahun 2022, atau meningkat rata-rata sebesar 40,81 persen pertahun. Dari Tahun 2018 ke Tahun 2019, PAD meningkat menjadi Rp221.956.951.317,07 atau sebesar 22,47 persen. Peningkatan PAD Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebagai akibat dari meningkatnya dua sumber PAD, yaitu: pajak dan retribusi. Pajak daerah meningkat Rp21.649.041.305,44 Tahun 2019 dari tahun sebelumnya, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp49.945.212.151,27 atau sebesar 60,31 persen, sedangkan retribusi daerah meningkat sebesar Rp28.772.742.486,00 ditahun 2019, dan pada tahun 2020 meningkat lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar Rp64.654.804.550,00 atau sebesar 47,58 persen. Lain-lain PAD yang sah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan tumbuh negative di Tahun 2019 sebesar (Rp 9.855.859.783,40), pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar Rp36.250.625.136,31. Rata-rata pertumbuhan PAD dalam kurun waktu 2018-2022 yang lebih tinggi dari pada rata-rata laju pertumbuhan pendapatan, sehingga meningkatkan rasio PAD terhadap pendapatan yang merupakan indikator terjadinya tren

peningkatkan kemandirian fiskal daerah. Rasio PAD terhadap pendapatan Kabupaten Morowali sampai dengan tahun 2022 sebesar 26,93 persen, capaian ini rata-rata lebih rendah dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

3. **Pendapatan Transfer.** Dalam kurun waktu Tahun 2018-2022, dimana pendapatan transfer pada Tahun 2018 sebesar Rp913.508.328.617,00, kemudian meningkat sampai dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1.071.891.131.903,00. Pertumbuhan pendapatan transfer lebih rendah di tahun 2020 dan tahun 2022, akibat pandemi Covid-19. Selanjutnya dilihat dari proporsi pendapatan transfer menurun secara konsisten dari sebesar 83,43 persen Pada Tahun 2018 menjadi sebesar 73,03 persen pada Tahun 2022. Pendapatan transfer daerah Kabupaten Morowali dominan bersumber dari transfer pemerintah pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana desa, dan lainnya. Sedangkan transfer antar daerah sangat rendah;
4. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.** Dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan yang sangat tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.753,92 persen, yaitu dari sebesar Rp177.000.000,00 pada Tahun 2018 meningkat secara konsisten menjadi Rp27.944.689.550,00 pada Tahun 202, namun pada tahun 2022 tidak terdapat lain-lain pendapatan daerah yang sah atau sebesar Rp0. Oleh karena itu, proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap keseluruhan Pendapatan menurun dari sebesar 0,22 persen pada Tahun 2018 menjadi sebesar 1,82 persen pada Tahun 2021 dan ditahun 2022 sebesar nol persen.

Selanjutnya, merujuk pada Tabel 3.2 di atas, dapat dijelaskan struktur pendapatan secara lengkap. Struktur Pendapatan menunjukkan terjadinya pertumbuhan proporsi masing-masing sumber utama pendapatan (PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah) terhadap Pendapatan selama periode Tahun 2018-2022 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2, beberapa poin yang dapat di jelaskan sebagai berikut.

1. **Pendapatan Daerah.** Dalam periode Tahun 2018-2022, laju pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Morowali mengalami fluktuasi, dimana pada Tahun 2018 tumbuh sebesar minus (-4,36) persen. Pada Tahun 2019 meningkat sangat tajam sebesar 22,47 persen, setelah Tahun 2019 seelau tumbuh positif, laju pertumbuhan pendapatan tertinggi terjadi Tahun 2020 yaitu minus 39,68 persen. Cukup tinginya laju pertumbuhan pendapatan dalam kurun Tahun 2018 sampai Tahun 2022, akibat aktivitas pendapatan daerah Kabupaten Morowali dari Sektor Pertambangan. Meski berfluktuasi laju pertumbuhan pendapatan Kabupaten Morowali

selama Tahun 2018-2022 masih sangat tinggi yaitu sebesar 40,81 persen pertahun. Dalam 5 tahun ke depan dengan mengoptimalkan pertumbuhan semua sumber-sumber utama pendapatan khususnya PAD. Selanjutnya proporsi PAD dalam Pendapatan meningkat dari sebesar 16,55 persen Tahun 2018 menjadi sebesar 26,93 persen Tahun 2022. Meningkatnya proporsi PAD dalam pendapatan daerah menunjukkan prestasi dalam kemandirian fiskal daerah Kabupaten Morowali. Untuk meningkatnya kemandirian fiskal menjadi lebih tinggi dalam lima tahun ke depan diharapkan sumber-sumber PAD, bukan hanya bertumpu pada pendapatan dari Sektor Pertambangan, tetapi juga mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor lain, seperti Sektor Industri dan Sektor-sektor Jasa;

2. **Pendapatan Transfer.** Proporsi pendapatan Transfer dalam Pendapatan pada Tahun 2018 sebesar 83,43 persen menurun hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 73,07 persen. Penurunan proporsi pendapatan transfer dikompensasi dengan meningkatnya proporsi pendapatan dari sumber PAD, sehingga memperbaiki struktur pendapatan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer dalam periode Tahun 2018 sampai Tahun 2022 sebesar 4,40 persen;
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.** Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berfluktuasi dari sebesar 0,22 persen pada Tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 1,63 persen pada Tahun 2019 hingga, kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 2,50 persen, ditahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,82 persen. Rata-rata pertumbuhan sebesar 1.753,92 persen.

Oleh karena itu, tantangan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: (1). Optimalisasi PAD; (2). Mendukung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengoptimalisasikan pendapatan Pajak, dan Bukan Pajak Pusat dan Provinsi, sehingga meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Morowali secara nyata dalam bentuk Dana Bagi Hasil; (2). Memanfaatkan posisi strategis daerah Kabupaten Morowali sebagai lokasi Kawasan Industri Strategis Nasional (*Indonesia Morowali Industrial Park*) untuk dapat memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menunjang peningkatan pendapatan secara berkelanjutan.

Pajak daerah dalam struktur PAD belum menjadi sumber utama pendapatan daerah, disebabkan masih kecilnya nilai transaksi ekonomi yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan potensi pajak daerah, terbatasnya wajib pajak dan belum berkembangnya sistem pengelolaan pajak daerah yang moderen. Selain itu, juga disebabkan kurang berkembangnya penerimaan dari retribusi daerah, belum berjalannya retribusi di beberapa sektor, dan belum tersusunnya kerangka regulasi daerah yang berhubungan dengan optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

B. Belanja

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal, serta berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Sementara itu, untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 55 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, menetapkan belanja diklasifikasikan dalam bentuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD, untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah secara bertahap didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi efektivitas, serta dilengkapi dengan prinsip keadilan (*equity*) bagi semua, agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat. Pada Tabel 3.1 ditunjukkan realisasi belanja daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022. Selanjutnya, pada Tabel 3.3 ditunjukkan laju pertumbuhan dan proporsi belanja daerah Kabupaten Morowali.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Beanja Daerah Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022 Dalam Persen (%)

Kode	Uraian	Pertumbuhan (%)					Rata-Rata Pertum- buhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
5	BELANJA DAERAH	6,73	6,34	6,50	12,65	6,06	
5.1	Belanja Operasi	17,51	4,99	10,55	17,60	13,42	13,88
5.1.1	Belanja Pegawai;	9,01	17,25	(25,52)	21,33	6,27	5,28
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23,87	6,50	58,08	12,50	12,97	26,29
5.1.3	Belanja Bunga	(3,29)	(9,69)	(8,93)	(32,46)	87,24	(2,00)
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	(100,00)	-	(16,67)
5.1.5	Belanja Hibah; dan	164,14	(96,58)	426,44	331,20	94,03	169,70
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	(88,18)	(41,70)	1.402,02	(61,89)	1,70	201,99
5.2	Belanja Modal	(6,27)	(8,95)	0,65	(5,92)	0,73	(0,41)
5.3	Belanja Tidak Terduga	(5,37)	(91,78)	11.759,51	(42,10)	(48,78)	2.446,17
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	(5,37)	(91,78)	11.759,51	(42,10)	(48,78)	2.446,17
5.4	Belanja Transfer	(4,41)	49,20	(13,22)	30,52	(11,69)	9,01
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	(8,53)	154,93	19,45	27,64
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	(4,41)	36,34	(13,66)	18,10	(18,40)	3,60

Sumber: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2018 sampai dengan 2022, (diolah kembali)

Merujuk pada Tabel 3.1 di atas, dimana belanja daerah Kabupaten Morowali pada periode Tahun 2018 sampai Tahun 2022 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018, realisasi belanja daerah sebesar Rp1.090.373.004.109,93 dan hingga Tahun 2022 meningkat menjadi Rp1.475.300.370.937,00. Proporsi belanja daerah terbesar adalah belanja operasi sebesar Rp347,36 miliar meningkat sampai dengan Tahun 2022 menjadi sebesar Rp995.125.193.549,00, namun proporsi belanja operasi terhadap belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dimana Tahun 2018 sebesar 58,95 persen menjadi sebesar 67,45 persen ditahun 2022. Selanjutnya, belanja modal dengan proporsi terbesar kedua dengan realisasi belanja modal pada Tahun 2018 sebesar Rp307.690.148.308,00 atau sebesar 22,82 persen dari belanja daerah, hingga Tahun 2022 menurun menjadi sebesar Rp267.196.702.301,00 atau sebesar 18,11 persen. Selanjutnya, untuk belanja tak terduga dan belanja transfer masing-masing sebesar Rp3.033.899.500,00 tahun 2018 dan sebesar Rp 8.766.707.367,00 Tahun 2022.

Selanjutnya dilihat dari pertumbuhannya, rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Morowali dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 sebesar 13,88 persen. Pertumbuhan tertinggi yakni belanja tak terduga dengan pertumbuhan sebesar 2.314,30 persen, belanja transfer sebesar

9,01 persen, dan belanja modal sebesar (0,41) persen serta belanja operasi sebesar 13,88 persen.

C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan sebaiknya mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, penggunaan SiLPA dilakukan secara cermat untuk mempertahankan kesinambungan fiskal dan menjaga keberlanjutan pelayanan umum.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap APBD Kabupaten Morowali Tahun 2018 sampai Tahun 2022 untuk penerimaan pembiayaan 100 persen masih berasal dari SiLPA. Realisasi APBD Tahun 2018-2022 masih menyisihkan SiLPA. Hal ini mengindikasikan pengelolaan keuangan yang tidak efektif, karena masih menyisihkan SiLPA yang cukup besar. SiLPA pada tahun 2018 sebesar Rp6.865.586.884,16 dan hingga Tahun 2019 terdapat SiLPA sebesar Rp199.214.911.009,15. Merujuk pada Pasal 71 Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa kondisi sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Morowali sebaiknya:

- (1). Mendorong percepatan pengembangan ekonomi daerah melalui

pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal; (2). Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran; (3). Mendukung penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat terjadi surplus anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal daerah, dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya terdapat pengeluaran pembiayaan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo mulai dari Tahun 2022 sebesar Rp1.313.977.822,00. Selain itu, untuk penyertaan modal sebesar Rp13.500.000.000,00.

3.1.2 Neraca Daerah

Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Substansi dari Neraca Daerah adalah memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan, memberikan informasi mengenai fleksibilitas keuangan dan menciptakan tata pemerintahan yang baik. Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan daerah yang menyajikan informasi mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kondisi Aset daerah juga memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Pemerintah Kabupaten Morowali menyusun neraca dengan mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran, dan realisasinya ke dalam pos-pos neraca. Neraca Daerah Kabupaten Morowali selama periode Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.4. Selama periode Tahun 2018-2022 total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali mengalami peningkatan yaitu dari Rp1.923.409.333.413,47

pada Tahun 2018 menjadi Rp2.621.914.579.181,98 pada Tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan Aset pada periode Tahun 2018 sampai Tahun 2022 sebesar 8,08 persen. Sedangkan, untuk total passiva sebesar Rp1.923.409.333.413,47 pada Tahun 2018, yang terdiri atas kewajiban sebesar Rp230.821.586.870,16, dan ekuitas sebesar Rp1.692.587.746.543,31. Selanjutnya, pada Tahun 2022 nilai kewajiban sebesar Rp37.389.241.934,48, dan untuk ekuitas sebesar Rp2.584.525.337.247,50. Rata-rata pertumbuhan kewajiban sebesar (-28,39) persen dan ekuitas sebesar 11,17 persen.

Selanjutnya dilakukan analisis keuangan yang terdiri atas Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas (*leverage*). Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio lancar (rasio antara aset lancar terhadap hutang lancar) neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali pada Tahun 2018 sebesar 0,18; Tahun 2019 sebesar 0,22; Tahun 2020 sebesar 0,82; Tahun 2021 sebesar 1,58; dan Tahun 2022 sebesar 9,37. Nilai rasio lancar ini mengindikasikan bahwa aset lancar yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali sangat cukup untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan daerah untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Hasil perhitungan, nilai rasio cepat (rasio antara aset lancar dikurangi persediaan, terhadap hutang lancar) pada Tahun 2018 sebesar 0,12; Tahun 2019 sebesar 0,16; Tahun 2020 sebesar 0,58; dan Tahun 2021 sebesar 1,38; dan Tahun 2022 sebesar 8,74. Hasil perhitungan ini menggambarkan kemampuan aset lancar dalam menyelesaikan hutang secara cepat cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan daerah untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Selain itu, Peningkatan nilai rasio berarti pemerintah Kabupaten Morowali memiliki aset yang cukup untuk membayar utang.

3. Rasio Utang terhadap Total Aset (*Total Debt to Total Assets Ratio*)

Hasil perhitungan rasio total utang terhadap total aset menunjukkan bahwa Tahun 2018 sebesar 0,12 persen; Tahun 2019 sebesar 0,10 persen; Tahun 2020 sebesar 0,03 persen; Tahun 2021 sebesar 0,03

persen; dan Tahun 2022 sebesar 0,01. Rasio total hutang terhadap total aset selama periode tersebut menunjukkan nilai yang relatif kecil, sehingga Pemerintah Kabupaten Morowali mempunyai kemampuan untuk melunasi utang jika melakukan pinjaman kepada kreditur.

4. Rasio Utang terhadap Ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*)

Hasil perhitungan rasio hutang terhadap ekuitas selama periode 2018-2022 menunjukkan bahwa Tahun 2018 sebesar 0,14 persen; Tahun 2019 sebesar 0,11 persen; Tahun 2020 sebesar 0,03 persen; dan Tahun 2021 sebesar 0,03 persen, dan ditahun 2022 sebesar 0,01 persen. Rasio total hutang terhadap ekuitas selama periode tersebut juga menunjukkan nilai yang relatif kecil, sehingga Pemerintah Kabupaten Morowali mempunyai kemampuan untuk melunasi utang jika melakukan pinjaman kepada kreditur.

Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali selama kurun waktu 2018-2022 terdapat pada Tabel 3.4 sebagai berikut.



Tabel 3.4
**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022**

NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
1	ASET						
2	ASET LANCAR						
	Kas di Kas Daerah	897.467.989,40	4.674.306.727,16	8.066.616.700,08	48.163.148.963,51	182.537.795.819,79	317,37
4	Kas di Bendahara Penerimaan	270.116.822,00	217.238.648,00	1.068.765.105,00	1.109.455.551,00	936.422.035,00	90,15
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	555.378.293,00	316.806.486,00	60.162.094,00	329.713.413,04	1.293.291,24	56,12
6	Kas di BLUD	966.404.815,00	913.719.732,00	842.084.237,46	12.157.626.213,72	15.784.487.743,36	340,07
7	Kas BOS		185.506.809,76	78.879.215,76	5.500.134.538,76	137.369.942,76	(24,38)
8	Kas di Bendahara FKTP		1.017.635.660,00	926.970.025,00	858.446.355,00	75.485.009,00	(22,80)
	Kas di Puskesmas/FKTP	874.903.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25,00)
9	Kas Lainnya	974.303.049,69	0,00	44.552.209,00	7.972.505.962,00	12.615.825.478,00	4.448,69
10	Piutang Pajak	9.671.579.926,72	15.046.102.659,05	12.083.730.179,63	11.348.839.795,98	13.934.944.404,68	13,15
12	Piutang Retribusi	4.575.346.400,00	111.540.000,00	317.325.000,00	443.300.000,00	426.725.000,00	30,72
13	Penyisihan Piutang Retribusi	(480.040.240,00)	(111.540.000,00)	(84.165.275,00)	-	-	(50,33)
14	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.521.871.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25,00)
15	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	1.521.871.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25,00)
17	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	14.151.193.663,51	17.809.975.728,84	20.713.680.862,84	12.945.620.647,27	24.668.892.499,84	23,80
18	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(4.542.017.915,12)	(6.068.173.438,80)	(9.679.244.534,63)	0,00	-	(1,72)
19	Piutang Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto	9.609.175.748,39	11.741.802.290,04	11.034.436.328,21	0,00	0,00	(20,96)
20	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026**

NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
	Dana Perimbangan						
22	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
23	Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	1.595.941.863,00	1.599.766.103,00	2.131.955.120,00	3.846.457.112,00	2.844.648.380,00	21,97
24	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25	Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Netto	1.595.941.863,00	1.599.766.103,00	2.131.955.120,00	0,00	0,00	(16,62)
26	Piutang Kepada Pihak Ke III	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.033.509.399,00	4.033.509.399,00	0,21
27	Penyisihan Piutang Kepada Pihak Ke III	(4.000.000.000,00)	(4.000.000.000,00)	(4.000.000.000,00)	-	-	(25,00)
28	Piutang Kepada Pihak Ke III Netto	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
29	Piutang UUDP	58.124.842,00	33.509.399,00	33.509.399,00	-	0,00	(25,00)
30	Penyisihan Piutang UUDP	(58.124.842,00)	(33.509.399,00)	(33.509.399,00)	-	-	(35,59)
31	Piutang UUDP Netto	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
32	Piutang Return Obat	23.600.561,00	23.600.561,00	23.600.561,00	-	0,00	(25,00)
33	Penyisihan Piutang Return Obat	(23.600.561,00)	(23.600.561,00)	(23.600.561,00)	-	-	(25,00)
34	Piutang Return Obat Netto	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
35	Penyisihan Piutang				(18.868.211.323,04)	(20.125.352.251,35)	1,67
35	Persediaan	12.578.953.023,66	10.912.357.379,26	12.339.230.479,92	13.609.289.549,01	17.137.278.892,96	9,01
36	JUMLAH ASET LANCAR	38.945.824.910,99	40.717.863.218,84	42.050.576.931,14	103.449.836.177,25	255.009.325.644,28	75,09
37	INVESTASI JANGKA PANJANG					-	-
38	Investasi Non Permanen					-	-
39	Dana Bergulir	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	-
40	Penyisihan Dana Bergulir	(310.000.000,00)	(310.000.000,00)	(310.000.000,00)	(310.000.000,00)	(310.000.000,00)	-
41	JUMLAH Investasi Nonpermanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	Investasi Permanen					0	-
43	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.451.847.476,95	12.451.847.476,95	12.108.274.213,95	14.849.873.532,95	24.419.567.139,95	21,08
44	JUMLAH Investasi Permanen	12.451.847.476,95	12.451.847.476,95	12.108.274.213,95	14.849.873.532,95	24.419.567.139,95	21,08



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026**

NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
45	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	12.451.847.476,95	12.451.847.476,95	12.108.274.213,95	14.849.873.532,95	24.419.567.139,95	21,08
46	ASET TETAP					0	-
47	Tanah	260.650.495.466,79	268.891.143.744,79	274.494.836.964,79	273.853.799.196,83	280.471.117.648,83	1,86
48	Peralatan dan Mesin	334.491.346.220,67	277.222.567.940,02	329.534.855.818,95	378.681.625.912,22	453.665.213.728,49	9,12
49	Gedung dan Bangunan	601.347.719.566,52	669.230.807.188,34	742.769.021.086,70	834.492.053.242,81	922.628.818.874,43	11,30
50	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.058.868.563.029,78	1.136.360.489.975,79	1.277.562.294.985,83	1.389.084.485.666,31	1.539.376.138.955,95	9,82
51	Aset Tetap Lainnya	14.700.387.372,00	12.798.594.999,00	17.855.004.143,00	19.472.812.574,00	20.179.893.324,00	9,82
52	Konstruksi Dalam Pengerjaan	141.675.286.000,00	132.285.035.108,00	70.643.424.255,91	76.743.837.185,31	35.774.420.207,23	(24,49)
53	Akumulasi Penyusutan	(559.462.857.227,11)	(574.296.829.174,00)	(692.603.032.166,21)	(801.502.577.178,04)	(979.005.109.564,69)	15,28
54	JUMLAH ASET TETAP	1.852.270.940.428,65	1.922.491.809.781,94	2.020.256.405.088,97	2.170.826.036.599,44	2.273.090.493.174,24	5,26
55	DANA CADANGAN						
56	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
57	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	ASET LAINNYA						
59	Tagihan Jangka Panjang	13.621.783,33	859.519.500,00	69.301.740,52	1.054.969,09	276.700,52	1.486,43
60	Aset Tak Berwujud	1.135.797.974,30	2.103.625.414,00	2.219.305.414,00	2.242.833.614,00	2.372.753.614,00	24,39
61	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(1.111.934.772,50)	(1.536.325.855,30)	(1.920.091.518,12)	(2.076.392.600,68)	(25,64)
62	Aset Lain-Lain	50.604.920.445,92	93.526.391.401,08	80.323.213.097,10	80.837.455.112,90	69.098.555.509,67	14,20
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(32.013.619.606,67)	0	0	0	0	(25,00)
	Aset Lain-Lain Netto	18.591.300.839,25	0	0	0	0	(25,00)
67	JUMLAH ASET LAINNYA	19.740.720.596,88	95.377.601.542,58	81.075.494.396,32	81.161.252.177,87	69.395.193.223,51	88,44
68	JUMLAH ASET	1.923.409.333.413,47	2.071.039.122.020,31	2.155.490.750.630,38	2.370.286.998.487,51	2.621.914.579.181,98	8,08
69	KEWAJIBAN						
70	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
71	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	209.512.269,00	350.656.900,00	302.590.921,00	624.837.016,00	392.951.367,00	30,76
72	Utang Bunga	182.094.443,32	167.452.520,78	154.346.200,10	139.543.767,32	126.160.472,10	(8,76)
73	Bagian Lancar Utang Jangka	1.270.966.733,34	1.270.966.733,34	1.270.966.733,34	1.270.966.733,34	1.270.966.733,34	-



NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
	Panjang						
74	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75	Utang Beban	111.115.589.278,52	109.466.969.581,51	35.722.614.705,20	60.441.956.924,51	25.400.638.509,42	(14,41)
76	Utang Jangka Pendek Lainnya	102.791.823.346,00	72.099.993.323,00	13.917.209.906,13	2.809.516.667,00	30.790.986,00	(72,32)
77	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	215.569.986.070,18	183.356.039.058,63	51.367.728.465,77	65.286.821.108,17	27.221.508.067,86	(29,53)
78	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
79	Utang Pemerintah Pusat	15.251.600.799,98	13.980.634.066,64	12.709.667.333,30	11.438.700.599,96	10.167.733.866,62	(9,63)
80	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	15.251.600.799,98	13.980.634.066,64	12.709.667.333,30	11.438.700.599,96	10.167.733.866,62	(9,63)
81	JUMLAH KEWAJIBAN	230.821.586.870,16	197.336.673.125,27	64.077.395.799,07	76.725.521.708,13	37.389.241.934,48	(28,39)
82	EKUITAS						-
83	JUMLAH EKUITAS	1.692.587.746.543,31	1.873.702.448.895,04	2.091.413.354.831,31	2.293.561.476.779,38	2.584.525.337.247,50	11,17
84	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.923.409.333.413,47	2.071.039.122.020,31	2.155.490.750.630,38	2.370.286.998.487,51	2.621.914.579.181,98	8,08

Sumber: Neraca Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi, dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah tersebut.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi dari kebijakan belanja daerah Kabupaten Morowali pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan pertimbangan, untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa mendatang dalam upaya melaksanakan pembangunan daerah. Realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Morowali Tahun 2018 sampai Tahun 2022. Rincian belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terdapat pada Tabel 3.5 sebagai berikut.

Tabel 3.5

**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (%)
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	Tahun Anggaran 2018	346.577.331.939,01	1.092.171.902.135,27	31,73
2.	Tahun Anggaran 2019	406.374.384.599,00	1.160.724.771.895,15	35,01
3.	Tahun Anggaran 2020	302.659.492.103,60	1.236.053.699.209,04	24,49
4.	Tahun Anggaran 2021	367.209.346.475,00	1.402.300.782.726,05	26,19
5.	Tahun Anggaran 2022	390.251.612.218,00	1.490.114.348.759,00	26,19

Sumber: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2018 sampai Tahun 2022

Alokasi anggaran belanja aparatur perlu diperhatikan dan harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dalam satu tahun anggaran, sehingga diperlukan antisipasi dan perencanaan kebutuhan untuk meningkatkan ketepatan target dan realisasi belanja. Pada Tabel 3.5 ditunjukkan bahwa selama periode Tahun 2018 sampai Tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada Tahun 2018, belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp346.577.331.939,01 atau sebesar 31,73 persen dari total pengeluaran daerah. Selanjutnya, meningkat hingga Tahun 2022 menjadi Rp390.251.612.218,00 atau sebesar 26,19 persen. Alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur meningkat setiap tahun, namun jika dilihat proporsi terhadap total pengeluaran daerah setiap tahun justru mengalami penurunan.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat selisih pendapatan dengan alokasi belanja. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

A. Analisis Defisit Riil Anggaran

Untuk menganalisis pembiayaan, maka terlebih dahulu disajikan data Defisit Riil Anggaran Daerah. Hal ini menunjukkan kebutuhan riil defisit anggaran yang tidak hanya dicerminkan oleh selisih antara Sisi Pendapatan dengan Sisi Belanja, namun juga disajikan perbandingan antara kemampuan fiskal Sisi Pendapatan dengan Sisi Belanja di tambahkan dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun berjalan. Kurun waktu Tahun 2018-2022, dimana realisasi Pendapatan Daerah terus menunjukkan peningkatan demikian juga dengan belanja daerah, sebagai konsekuensinya maka defisit riil anggaran juga mengalami peningkatan yang terdapat pada Tabel 3.6 sebagai berikut.

Tabel 3.6
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata rata partumbuhan (%)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.094.918.270.074,03	1.165.577.249.984,07	1.292.602.327.666,77	1.533.666.041.753,69	1.466.842.480.886,00	7,91

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata rata partumbuhan (%)
	Dikurangi Realisasi :						
2	Belanja daerah	1.090.373.004.109,93	1.159.453.805.161,81	1.234.782.732.475,70	1.391.029.815.992,71	1.475.300.370.937,00	7,89
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.798.898.025,34	1.270.966.733,34	1.270.966.733,34	11.270.966.733,34	14.813.977.822,00	197,22
	Defisit riil	2.746.367.938,76	4.852.478.088,92	56.548.628.457,73	131.365.259.027,64	(23.271.867.873,00)	289,16

Sumber: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2018 s/d 2022

Berdasarkan data pada Tabel 3.6 di atas, ditunjukkan terjadi defisit riil anggaran Kabupaten Morowali hanya pada Tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 tidak terdapat defisit riil anggaran, karena pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah, dan pengeluaran pembiayaan.

B. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Komposisi penutup defisit riil Kabupaten Morowali tahun 2018-2022 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA). Seperti yang disajikan pada Tabel 3.7 sebagai berikut.

Tabel 3.7
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun					Rata rata partumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya	4.119.218.945,40	6.974.557.162,92	10.785.438.665,30	67.849.651.981,51	23.271.867.873,00	1,38
2	Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	19.460.419.818,25	0,00	0,00	-
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	6.865.586.884,16	11.827.035.251,84	40.391.302.407,04	0,00	0,00	0,78

Sumber: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2018 s/d 2022



C. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis SILPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber-sumber perolehan SILPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sumber tersebut. Gambaran perolehan SILPA selama Tahun 2018 hingga Tahun 2022, dimana perolehan SILPA selama Tahun 2018 sampai Tahun 2022 diperoleh dari surplus pembiayaan daerah.



Tabel 3.8

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022		Rata rata partumbuhan (%)
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	Jumlah SiLPA	4.119.218.945,40	100	6.974.557.162,92	100	10.785.438.665,30	100,00	67.849.651.981,51	100,00	23.271.867.873,00	100,00	(14,79)
2	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-
6	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-
7	Kegiatan Lanjutan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-

Sumber: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2018 s/d 2022

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas yaitu:

1. **Prioritas Pertama**, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. **Prioritas Kedua**, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah;
3. **Prioritas Ketiga**, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow program*). Penyusunan kerangka pendanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 diproyeksikan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan daerah. Selain itu, kerangka pendanaan Kabupaten Morowali untuk tahun 2024-2026 dalam melakukan perencanaan dan penganggaran tahun melakukan sinergi antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dengan berpedoman pada regulasi terkait.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan daerah berdasarkan data pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang direncanakan untuk dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Proyeksi pendapatan Daerah untuk tahun 2024-2026 secara umum didasarkan pada perkembangan penerimaan pendapatan ini pada tahun-tahun yaitu kurun waktu 2018-2022. Trend pertumbuhan anggaran dalam kurun waktu yang semakin panjang secara konseptual merefleksikan bagaimana kemampuan pencapaian penerimaan pendapatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan dari berbagai sumber yang ada. Namun demikian, penentuan anggaran ini juga mempertimbangkan karakteristik pendapatan daerah, sehingga penentuan anggaran berdasarkan trend relatif kurang tepat; sebagai contoh terkait dengan dana perimbangan, yang penentuan besarnya sangat bergantung pada kebijakan

pemerintah pusat. Mengingat karakteristik pendapatan yang berbeda, proyeksi pendapatan diperhitungkan dari perkembangan masing-masing sumber pendapatan daerah dan berbagai asumsi yang diperkirakan akan mempengaruhi penerimaan dimasa mendatang. Sebagai contoh perkembangan yang terjadi pada penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya penerimaan pajak-pajak daerah tidak akan lepas dari pertimbangan pertumbuhan ekonomi. Pandemi Covid-19, yang mempengaruhi hampir sebagian besar sektor ekonomi, memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam penerimaan pajak-pajak terkait, misal penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan

Pada Tahun 2024, pendapatan daerah Kabupaten Morowali diproyeksikan sebesar Rp1.703.936.016.159; dan Tahun 2025 sebesar Rp1.717.278.770.012 dan pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp1.735.904.150.611. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Morowali tahun 2024-2026 di proyeksikan tumbuh sebesar 0,98 persen. Proyeksi komponen pendapatan masing-masing untuk pendapatan Asli Daerah diproyeksikan pada Tahun 2024 sebesar Rp411.082.214.100 dan Tahun 2025 sebesar Rp417.004.213.707 dan pada tahun 2026 mencapai Rp428.148.135.060. Untuk pendapatan transfer diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,57 persen yang mencapai Rp1.307.756.015.550 ditahun 2026. Selanjutnya untuk pendapatan lain-lain yang sah di proyeksikan Nol rupiah. Proyeksi pendapatan pendapatan daerah tahun 2024-2026 sebagian besar masih bersumber dari pendatan transfer khususnya transfer dari pemerintah pusat.

Proyeksi belanja daerah disajikan pada Tabel 3.9 di bawah ini, dimana pada Tahun 2024 belanja daerah di proyeksikan sebesar Rp1.962.476.243.558. Proyeksi belanja daerah pada tahun 2024 memperhatikan kondisi tahun pemilu yang dimana dialokasikan dana hibah lebih besar dari tahun sebelumnya untuk anggaran pelaksanaan pemilihan umum. Selanjtnya pada tahun 2025 belanja daerah di proyeksikan sebesar Rp1.977.249.346.335, dan pada tahun 2026 belanja daerah proyeksikan sebesar Rp1.997.364.008.931.

Selanjutnya komponen pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan pada Tahun 2024 sebesar Rp261.690.345.950, sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp264.800.587.113. Silpa yang direncanakan pada tahun tersebut adalah Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer dan Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selanjutnya, dari sisi pengeluaran pembiayaan dari tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp3.150.118.550 untuk pengeluaran pembiayaan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebesar Rp1.562.618.550 dan Penyertaan Modal Daerah Rp1.587.500.000.



Selanjutnya pada tahun 2026 pengeluaran pembiayaan mencapai Rp3.340.728.793 yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebesar Rp1.562.618.550 dan Penyertaan Modal Daerah Rp1.778.110.243. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Morowali pada periode Tahun 2024-2026 terdapat pada Tabel 3.9 sebagai berikut.



Tabel 3.9

**Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2024 s/d Tahun 2026 Kabupaten Morowali**

Kode	Uraian		Proyeksi		
			2024	2025	2026
1	2		3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH		1.703.936.016.159	1.717.278.770.012	1.735.904.150.611
4.1	Pendapatan Asli Daerah		411.082.214.100	417.004.213.707	428.148.135.060
4.1.1		Pajak Daerah;	136.577.393.855	138.412.232.773	142.349.262.273
4.1.2		Retribusi Daerah;	175.871.743.018	179.190.858.100	185.119.793.624
4.1.3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;	1.820.352.093	1.829.832.273	1.839.361.825
4.1.4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.	96.812.725.134	97.571.290.561	98.839.717.338
4.2	Pendapatan Transfer		1.292.853.802.059	1.300.274.556.305	1.307.756.015.550
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat		1.253.715.326.776	1.260.609.082.804	1.267.556.447.819
4.2.1.1		Dana Perimbangan	1.139.287.829.547	1.144.332.802.661	1.149.400.115.830
4.2.1.2		Dana Insentif Daerah;	10.230.750.255	10.281.904.006	10.333.313.526
4.2.1.6		Dana Desa	104.196.746.974	105.994.376.137	107.823.018.462
4.2.2	Transfer Antar-Daerah		39.138.475.282	39.665.473.501	40.199.567.732
4.2.2.1		Pendapatan Bagi Hasil; dan	39.138.475.282	39.665.473.501	40.199.567.732
4.2.2.2		Bantuan Keuangan	-	-	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
4.3.1		Hibah;	-	-	-
4.3.2		Dana Darurat;	-	-	-
4.3.3		Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 30eraturan perundang-undangan.	-	-	-
5	BELANJA DAERAH		1.962.476.243.558	1.977.249.346.335	1.997.364.008.931
5.1	Belanja Operasi		1.214.378.179.729	1.198.071.290.611	1.212.188.335.679
5.1.1		Belanja Pegawai;	479.623.303.693	491.613.886.286	503.904.233.443
5.1.2		Belanja Barang dan Jasa	605.288.494.037	642.994.282.383	653.676.454.779



Kode	Uraian		Proyeksi		
			2024	2025	2026
1	2		3	4	5
5.1.3		Belanja Bunga	1.664.000.000	1.664.000.000	1.664.000.000
5.1.4		Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.5		Belanja Hibah; dan	122.000.000.000	55.000.000.000	45.000.000.000
5.1.6		Belanja Bantuan Sosial	5.802.381.999	6.799.121.942	7.943.647.457
5.2		Belanja Modal	487.750.342.768	515.689.094.482	518.267.539.955
5.3		Belanja Tidak Terduga	26.050.000.000	27.562.900.000	29.340.625.000
5.3.1		Belanja Tidak Terduga	26.250.000.000	27.562.500.000	29.340.625.000
5.4		Belanja Transfer	234.297.721.061	235.926.061.242	237.567.508.297
5.4.1		Belanja Bagi Hasil	32.000.000.000	32.000.000.000	32.000.000.000
5.4.2		Belanja Bantuan Keuangan	202.297.721.061	203.926.061.242	205.567.508.303
		SURPLUS / (DEFISIT)	(258.540.227.400)	(259.970.576.324)	(261.459.858.320)
6		PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1		Penerimaan Pembiayaan	261.690.345.950	263.213.299.040	264.800.587.113
6.1.1		SiLPA	261.690.345.950	263.213.299.040	264.800.587.113
6.1.1.2		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	251.718.635.260,81	253.163.456.112,51	254.620.096.227,61
6.1.1.3		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.971.710.689	10.049.842.928	10.180.490.886
6.1.2		Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.1.3		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
6.1.4		Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.5		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-
6.1.6		Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 31eraturan perundang-undangan	-	-	-
6.2		Pengeluaran Pembiayaan	3.150.118.550	3.242.722.717	3.340.728.793



Kode	Uraian		Proyeksi		
			2024	2025	2026
1	2		3	4	5
6.2.1		Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	1.562.618.550	1.562.618.550	1.562.618.550
6.2.2		Penyertaan Modal Daerah	1.587.500.000	1.680.104.167	1.778.110.243
6.2.3		Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.4		Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-
6.2.5		Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 32eraturan perundang-undangan	-	-	-
		PEMBIAYAAN NETTO	258.540.227.400	259.970.576.324	261.459.858.320
6.3		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2023

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Seperti telah diuraikan sebelumnya, penghitungan kerangka pendanaan pembangunan dalam 3 (tiga) tahun mendatang dilakukan dengan menghitung kapasitas riil keuangan daerah. Komponen penghitungan kapasitas riil adalah penerimaan daerah, serta pengeluaran daerah. Penerimaan daerah meliputi pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain PAD yang sah), serta penerimaan pembiayaan daerah (pencairan dana cadangan dan perhitungan perkiraan awal SiLPA). Sementara itu, pengeluaran daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk memenuhi ketiga prioritas tersebut.

Gambaran Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026, adalah penghitungan kerangka pendanaan yang diproyeksikan ke depan, yang terdapat pada Tabel 3.10 sebagai berikut.



Tabel 3.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali
Tahun 2024-2026

No.	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.703.936.016.158,76	1.717.278.770.011,73	1.735.904.150.610,62
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	261.690.345.949,63	263.213.299.040,28	264.800.587.113,44
	Total Penerimaan	1.965.626.362.108,39	1.980.492.069.052,00	2.000.704.737.724,06
	Dikurangi:			
4	Hibah, Bansos, Transfer dan BTT	649.929.283.779,15	588.642.429.134,32	584.729.079.794,41
5	Pengeluaran Pembiayaan	3.150.118.550,00	3.242.722.716,67	3.340.728.793,06
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.050.856.613.829,61	1.125.393.618.160,74	1.147.834.342.023,16

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2023

Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Morowali terdapat pada Tabel 3.10 di atas, dimana Kapasitas riil Pemerintah Kabupaten Morowali periode Tahun 2024-2026, dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) prioritas sebagai berikut.

1. Prioritas Pertama

Untuk membiayai belanja wajib berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam peraturan Perundang-Undangan, yakni:

- a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan untuk penggunaan pada belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia;
- d. Belanja Fungsi Pengawasan, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 903/7236/SJ tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diarahkan pengalokasian sebesar 0,75 persen-1 persen.

2. Prioritas Kedua

Kapasitar riil kemampuan keuangan daerah digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Morowali.

3. Prioritas Ketiga

Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.



Tabel 3.11
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Morowali

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2025
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.050.856.613.829,61	1.125.393.618.160,74	1.147.834.342.023,16
2	Prioritas I	588.479.703.744,58	630.220.426.170,01	642.787.231.532,97
3	Prioritas II	420.342.645.531,84	450.157.447.264,30	459.133.736.809,26
3	Prioritas III	42.034.264.553,18	45.015.744.726,43	45.913.373.680,93

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2023

BAB 4

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



N KOTA FONUN

Permasalahan pembangunan daerah (*problems of regional development*) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode tahun sebelumnya. Disisi yang lain, mandatori pembangunan dari nasional maupun lingkungan global sebagai tantangan (*threats*) dan peluang (*opportunities*) yang perlu dikelola. Kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang disuatu daerah dimasa mendatang ini disebut sebagai Isu Strategis Daerah. Isu strategis dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan semestinya dan jika dapat dikelola secara tepat akan menjadi potensi pembangunan yang signifikan. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif atas berbagai kondisi yang tidak ideal atau permasalahan di masa depan sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

4.1.1 Permasalahan Pokok Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali selama beberapa tahun terakhir yang disajikan di Bab II dokumen RPD ini, maka permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Morowali selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) permasalahan pokok sebagai berikut:

- 1) Masih tingginya angka kemiskinan;

- 2) Masih Rendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- 3) Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia;
- 4) Rendahnya Ketimpangan Infrastruktur Dasar Antar Kecamatan;
- 5) Penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup serta upaya mitigasi kebencanaan belum optimal;
- 6) Kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Beberapa masalah pokok daerah tersebut diatas dapat dipilih berdasarkan masalah utama dan akar masalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Masalah Pokok Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingkat kemiskinan sangat tinggi 13,75 persen diatas provinsi dan nasional, juga sebaran kemiskinan di Morowali Sebagian berada pada wilayah pulau dan pesisir	Garis kemiskinan di Kabupaten Morowali masih tinggi	1. Garis kemiskinan di Kabupaten Morowali dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya, Tahun 2021 Rp. 478.409 per orang, meningkat pada tahun 2022 sebanyak Rp.507.523 per orang. 2. Tingginya Harga Kebutuhan Pokok (<i>basic needs</i>); 3. Terbatasnya ketersediaan produksi kebutuhan pokok dibandingkan dengan permintaan.
		Bantuan sosial belum semuanya tepat sasaran	1. Belum optimalnya verifikasi dan validasi PKH bagi rumah tangga miskin; 2. Adanya data Inklusi dan eksklusi salah (<i>error</i>) bagi rumah tangga miskin.
		Kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin	1. Kondisi pendidikan dan Kesehatan keluarga miskin rendah 2. Masyarakat miskin tidak memiliki <i>asset liability</i> 3. Banyaknya rumah tidak layak huni rumah tangga miskin 4. Rendahnya akses atas infrastruktur dasar bagi rumah tangga miskin (Air Bersih, Listrik, Sanitasi) khususnya di wilayah Kecamatan Bungku Selatan dan Menui Kepulauan.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kantong Kemiskinan yang sulit diakses	1. Adanya kendala Geografis dan Topografi, dimana kantong-kantong utama kemiskinan terutama berada di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan; 2. Jumlah Desa Sangat Tertinggal sebanyak 2 Desa dan Desa tertinggal masih tinggi yaitu 62 desa pada Tahun 2022.
2	Masih rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia	Tingginya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2022 meningkat menjadi 9,35.	1. Minat anak Usia Sekolah Untuk Melanjutkan Rendah 2. Kurangnya jumlah Guru sesuai kompetensi yang dibutuhkan 3. Belum meratanya distribusi Guru
		Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS)	1. Angka putus sekolah masih tinggi dan meningkat pada jenjang SMA 2. Bantuan beasiswa pendidikan pemerintah dan CSR untuk antisipasi angka putus sekolah belum optimal 3. Pembelajaran kebencanaan belum menjadi bagian dari sistem pembelajaran yang dibutuhkan dari kurikulum lokal
		Sarana Prasarana pendidikan dasar belum memadai	1. Sarana Prasarana sekolah masih belum memadai; 2. Pemeliharaan gedung sekolah yang belum memadai; 3. Teknologi pembelajaran masih lemah dan belum mendukung model/sistem belajar berbasis <i>daring (online)</i> dan <i>pelaksanaan Pembelajaran jarak jauh (PJJ)</i>; 4. Ekosistem digital belum berkembang sebagai pembelajaran karena terbatasnya sarana prasarana.
		Kuantitas dan kualitas Guru belum memadai	1. Pemerataan dan distribusi guru secara geografis maupun secara keahlian berdasarkan mata pelajaran yang belum optimal 2. Perlindungan jaminan sosial bagi tenaga pendidik (guru) dan tenaga honorer yang belum ada

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Masih Tingginya Ketimpangan Infrastruktur Dasar Antar Wilayah	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik masih Rendah	3. Tingkat kesejahteraan guru belum maksimal 1. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Morowali masih rendah, hingga Tahun 2022 sebesar 77,57 persen 2. Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) dari 26,82 persen Tahun 2021 menurun menjadi 24,30 persen pada Tahun 2022 3. Kualitas jalan antar desa yang kurang baik, termasuk beberapa desa yang memerlukan akses jalan baru khususnya pada wilayah menui kepulauan dan Bungku Selatan. 4. Jalan menuju kantong produksi yang belum optimal, bahkan sebagai kantong produksi memiliki akses yang buruk
		Menurunnya persentase sarana Sanitasi	• Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Morowali sebesar 82,80 persen pada tahun 2021, menurun menjadi menjadi 78,34 persen tahun 2022.
		Cakupan Layanan Telekomunikasi Belum memadai	1. Sebagian wilayah sulit diakses layanan telekomunikasi 2. Masih adanya wilayah desa <i>blank-spot</i> jaringan komunikasi khususnya di wilayah pegunungan dan pulau-pulau.
		Ketersediaan Air Bersih terjadi peningkatan namun masih Rendah	3. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Morowali periode waktu 2018-2022, mengalami perkembangan berfluktuasi sampai Tahun 2022 sebesar 103,52 persen lebih rendah dari capaian tahun 2018.
		Jaringan Irigasi masih rendah	1. Sarana Pengairan yang ada, jumlahnya belum memadai, termasuk pengelolaan yang masih buruk. 2. Banyaknya irigasi teknis yang mengalami kerusakan.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Kualitas Layanan Kesehatan belum optimal	Usia Harapan Hidup (UHH) Masih rendah	1. Manajemen pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu belum optimal 2. Akses masyarakat terhadap Rumah Sakit khususnya di wilayah kecamatan menui Kepulauan dan Bungku Selatan sulit dijangkau. 3. Belum optimalnya pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. 4. Rujukan bagi pengguna BPJS masih memberatkan pasien
		Tenaga Medis dan non medis masih minim	1. Jumlah medis dan non medis perawat yang terbatas 2. Jumlah tenaga dokter terbatas, khususnya Dokter Spesialis masih diperlukan
		Sarana Prasarana Kesehatan Belum Memadai	1. Sarana Prasarana RSUD Morowali (Bungku) masih perlu peningkatan 2. Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu
5	Belum Optimal Pengembangan Sektor Pertanian dan Perikanan kelautan	Menurunnya produksi Pertanian (Padi, Jagung, Ubi dan kacang) Menurunnya hasil tangkapan ikan laut dan menurunnya budidaya ikan air tawar	1. Nilai Tukar Petani (NTP) Rendah 2. Kualitas-Produk pertanian masih rendah; 3. Terbatasnya Sarana Prasarana Produksi Petani Seperti Modal Usaha, Alsinta, Pupuk/Obat-obatan Terbatas; 4. Nilai Tambah Produk Pertanian Rendah; 5. Kegagalan budidaya rumput laut 6. menurunnya hasil perikanan tangkap; 7. Terbatasnya wilayah penangkapan ikan di laut, karena pencemaran ataupun lalu lintas transportasi dari kapal/tongkang perusahaan pertambangan. 8. Lemah daya tawar nelayan; 9. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, permukiman dan niaga;



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			10. Rendahnya penyediaan irigasi pada daerah baru.
6	Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Menurun	Rendahnya Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup	1. Sering terjadinya Bencana Banjir di beberapa tempat khususnya pada wilayah pertambangan. 2. Degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang mencemari sungai dan laut; 3. Meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca akibat berkurangnya daerah tangkapan air; 4. Belum tertatanya pengelolaan limbah berbahaya khususnya pada pengolahan hasil tambang. 5. Terbatasnya Prasarana TPA 6. Belum berjalannya mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga 7. Menurunnya kualitas sumber air tanah dan pencemaran air 8. Pencemaran air laut di kawasan wilayah pertambangan.
		Kerusakan Hutan dan ekosistem laut Meningkat	1. Tingkat kerusakan hutan tinggi 2. Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan daratan terutama hutan dan ekosistem laut; 3. Menurunnya tutupan terumbu karang. 4. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang kerusakan hutan 5. Adanya kasus pembabatan hutan dan pembalakan liar (<i>illegal logging</i>) 6. Belum optimalnya sistem pengelolaan pertambangan, sebagai penyebab hutan gundul dan degradasi kondisi hutan
		Mitigasi Bencana	1. Belum memiliki IRB (indeks Risiko Bencana); 2. Meningkatnya resiko bencana pasca tambang; 3. Banjir bandang dan gempa bumi mengalami peningkatan pada

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			beberapa tahun terakhir di wilayah Kabupaten Morowali; 4. Adanya Sesar Matano yang aktif; 5. Masih Kurangnya Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana; 6. Masih Rendahnya Kualitas SDM Penanganan Bencana; 7. Pemetaan risiko bencana, mitigasi dan sistem informasi kebencanaan; 8. Masih Rendahnya Penanganan Daerah Pasca Bencana; 9. Tidak adanya target cakupan wilayah rawan bencana yang mendapat penyuluhan dan pelatihan simulasi penanganan bencana; 10. Terbatasnya anggaran penanggulangan bencana daerah
7	Masih Rendahnya Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik	Rendahnya Kinerja Aparatur Rendahnya Kinerja Pelayanan Publik	1. Rendahnya Nilai SAKIP; 2. Belum Optimalnya Penerapan Kerja Aparatur Berbasis Kinerja 1. Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik. 2. Masih ditemukan keluhan-keluhan pada sektor pelayanan publik 3. Masih kurangnya sektor layanan publik yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sumber: diolah berdasarkan hasil konsultasi dan temuan akar masalah, 2023

4.1.2 Permasalahan Daerah Berdasarkan Urusan

Berdasarkan kajian normatif, analisis berbagai dokumen rencana sampai dengan analisis gambaran umum Kabupaten Morowali, sehingga menghasilkan beberapa rumusan permasalahan pembangunan Kabupaten Morowali.

Berkaitan dengan hal tersebut gambaran kondisi Pelayanan umum Kabupaten Morowali yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan serta Sekretaris Dewan, Sekretaris Daerah, Inspektorat, Pemerintahan Umum dan Kewilayahan. Adapun beberapa permasalahan pembangunan tersebut berdasarkan urusan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan

Kode	Urusan	Permasalahan
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1.01	PENDIDIKAN	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2022 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 109,40, jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 99,41 jenjang pendidikan SMU/MA/ SMK sebesar 98,22; 2. Angka Partisipasi Murni (APM)) tahun 2022 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 93,67. Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 73,13. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/ SMK sebesar 70,62. Hal ini menjelaskan penyelenggaraan wajib pendidikan 9 tahun belum berhasil dengan baik; 3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2022 untuk Tingkat SD/MI sebesar 97,78. Tingkat SMP/MT sebesar 94,51. Tingkat SMU/MA/ SMK sebesar 90,06. 4. Angka Putus Sekolah tahun 2022 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,29 relatif kecil, Pada jenjang pendidikan SMP/ MT sebesar 0,18. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/ SMK relatif besar yaitu sebesar 0,48; 5. Rasio Ketersediaan Sekolah tahun 2022 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,10, Pada jenjang pendidikan SMP/ MT sebesar 0,07. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/ SMK sebesar 0,03; 6. Angka Lulusan SMA/SMK/MA sebesar telah mencapai 100 persen pada tahun 2022. Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi pada tahun 2022 masih mencaia 76,41 persen,

Kode	Urusan	Permasalahan
		diperlukan usaha dan kerja keras pemerintah, untuk mendorong lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi, 7. Di Kabupaten Morowali, Rasio guru/murid per kelas tahun 2022 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,13 Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 0,03. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/SMK sebesar 0,05.
1.02	KESEHATAN	1. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2022 mencapai 1,526 2. Hingga Tahun 2022, angka kematian neonatal mencapai 0,611 atau 1 balita kurang dari setahun yang meninggal. Angka ini merupakan indikasi belum optimalnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali di sisi ibu hamil sampai ke wilayah terpencil, proses kelahiran dan pasca kelahiran; 3. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Tahun 2022 mencapai 0,299 jiwa dimana terjadi peningkatan dari Tahun 2021 angka kematian ibu 0,35 persen; 4. Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Morowali tahun 2022 mencapai 69,23. 5. Setiap puskesmas pembantu melayani 28 desa pada Tahun 2018 menjadi 26 desa tahun 2021. Jumlah desa sebanyak 133 desa cakupan Pustu juga tetap dengan 18,05. Rasio ini semakin baik namun, karena dua kecamatan di kepulauan yakni Kecamatan Bungku Selatan dan Menui Kepulauan, maka daya jangkau pustu menjadi terbatas; 6. Ada ibu hamil yang belum mendapat suplemen bumil

Kode	Urusan	Permasalahan
		karena tidak melakukan kunjungan bumil K4
1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Morowali masih rendah, hingga Tahun 2022 sebesar 0,18 persen 2. Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) Dari 26,82 persen Tahun 2021 menurun menjadi 24,30 persen pada tahun 2022 3. Kualitas jalan antar desa yang kurang baik, termasuk beberapa desa yang memerlukan akses jalan baru khususnya pada wilayah menui kepulauan dan Bungku Selatan. 4. Jalan menuju kantong produksi yang belum optimal, bahkan sebagai kantong produksi memiliki akses yang buruk
1.04	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Morowali periode waktu 2018-2021, mengalami perkembangan meningkat sampai Tahun 2021 93,17 persen, tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 91,91 persen. Penduduk Kabupaten Morowali belum dapat menjangkau air bersih terutama di wilayah Kepulauan Salabangka dan Menui Kepulauan; 2. Rasio Rumah Layak Huni (RLH) pada Tahun 2021 sebesar 78,25 persen. Pada tahun 2022 sebesar 81,71 persen; 3. Rasio elektrifikasi baik PLN maupun non PLN meningkat dari 92,05 persen di Tahun 2017, Tahun 2019 meningkat menjadi 96,20 persen, dan tahun 2020 sebesar 98,70 persen namun sering mengalami pemadaman setiap hari.



Kode	Urusan	Permasalahan
1.05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat masih menjadi masalah umum di Kabupaten Morowali; 2. Demonstrasi dan tuntutan pekerja terhadap perusahaan meningkat, sehingga mengganggu ketertiban umum. 3. Tindakan pengeboman ikan, pembiusan masih menjadi masalah di Kepulauan Salabangka dan Kecamatan Menui Kepulauan; 4. Kejahatan siber patut diantisipasi; 5. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada tahun 2018 sebesar 975,99. Sementara di Tahun 2022 menurun sebesar 825. Selanjutnya untuk Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) justru mengalami penurunan dari 12 di Tahun 2018 dan Tahun 2022 sebesar 5. Untuk indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota sampai dengan Tahun 2022 sebesar 7 meningkat dari Tahun sebelumnya; 6. Sarana dan Prasarana pendukung dan operasional Satpol PP dan Damkar belum memadai dan jauh cukup.
1.06	BIDANG SOSIAL	1. PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa) pada tahun 2018 sebesar 47.124 PMKS, mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 51.030,48 PMKS; 2. Persentase PMKS yang tertangani tahun 2018 sebesar 35 persen dan tahun 2022 sebesar 116,34 persen. Dengan demikian masih banyak PMKS yang belum tertangani; 3. Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui

Kode	Urusan	Permasalahan
		kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya tahun 2022 sebanyak 7 Kelompok; 4. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat tahun 2022 sebanyak 100 persen; 5. Korban bencana bencana alam (Jiwa/KK) tahun 2018 sebanyak 257 KK dan tahun 2019 sebanyak 383 KK dan tahun 2018 sebanyak 136 KK., terjadi penurunan korban namun masih tergolong tinggi.
2	BIDANG URUSAN TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR	
2.07	BIDANG TENAGA KERJA	1. Pada Tahun 2019 Angka Pengangguran terbuka Morowali sebesar 3,03 persen. dan Tahun 2020, persentase TPT Kabupaten Morowali meningkat cukup besar menjadi 5,21 persen, Provinsi Sulawesi Tengah meningkat menjadi 3,77 persen dan Nasional meningkat sebesar 7,07 persen; 2. Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun (orang) sebanyak 30 Orang tahun 2018, pada tahun 2022 sebesar 35 Orang; 3. Rasio Lulusan S1/S2/S3 tahun 2018 sebesar 9,92, mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 15,12; 4. Belum adanya <i>link and match</i> antara pendidikan Tenaga Kerja dan kebutuhan dalam bursa kerja dan industry yang berkembang; 5. Informasi bursa kerja terbatas; 6. Tingkat pendidikan tenaga kerja lokal masih rendah rata-rata berpendidikan SMP/MTs; 7. Adanya <i>bottleneck</i> antara jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan pendidikan dan skill yang dimiliki calon tenaga kerja



Kode	Urusan	Permasalahan
2.08	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2018 sebesar 11,46, mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 11,74. 2. Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD tahun 2022 sebesar 4 persen masih sangat kecil. 3. Rasio KDRT pada tahun 2018 sebesar 0,50, mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 0,15 4. Masyarakat masih melakukan <i>doing gender</i> karena belum memahami secara jelas konsep gender
2.09	BIDANG PANGAN	1. Rasio Ketersediaan Pangan Utama pada tahun 2018 sebesar 199,26, mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 132,32. 2. Ketersediaan protein perkapita pada tahun 2018 sebesar 42,51, mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 83,80, dan terjadi penurunan pada tahun 2022 sebesar 82,13. 3. Permintaan pangan khususnya beras meningkat seiring pesatnya peningkatan jumlah penduduk akibat masuknya tenaga kerja dari daerah lain; 4. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, permukiman dan komersial; 5. Rendahnya pertumbuhan penyediaan prasarana irigasi pada wilayah-wilayah baru dan potensial bagi peningkatan ketersediaan pangan terutama padi; 6. Keberlanjutan sistem produksi padi akibat degradasi hutan dan lahan khususnya di kawasan <i>upstream</i> (DAS Hulu) yang berdampak kepada rapuhnya fungsi hidrologi kawasan DAS;



Kode	Urusan	Permasalahan
2.10	BIDANG PERTANAHAN	1. Tumpang tindih (<i>overlapping</i>) antar penggunaan lahan terutama antara lahan pertanian masyarakat dengan penggunaan untuk pertambangan; 2. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal; 3. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten belum optimal; 4. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> lintas desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten belum optimal; 5. Penyelesaian Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal.
2.11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1. Tidak adanya target cakupan wilayah rawan bencana yang mendapat penyuluhan dan pelatihan simulasi penanganan bencana; 2. Terjadinya degradasi lingkungan akibat meningkatnya kegiatan pertambangan yang mencemari air sungai dan laut untuk kegiatan perikanan; 3. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan daratan (terutama hutan) dan ekosistem perairan laut; 4. Meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca akibat berkurangnya daerah tangkapan air; 5. Meningkatnya timbunan sampah di wilayah perkotaan dan kawasan cepat tumbuh yang tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang

Kode	Urusan	Permasalahan
		memadai; 6. Semakin menurunnya tutupan terumbu karang akibat pemanfaatan sumberdaya ikan yang tidak sesuai anjuran. 7. Kabupaten Morowali merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Tengah yang dilalui oleh patahan (sesar) aktif yaitu sesar Matano sehingga termasuk daerah rawan gempa;
2.12	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Kurangnya penduduk yang memiliki e-KTP, walaupun penduduk yang memiliki KTP meningkat penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2022 sebesar 132.824,27; 2. Kurangnya penduduk yang memiliki Kartu Keluarga; 3. Kurangnya bayi yang memiliki akta kelahiran Tahun 2019 sebanyak 11.748,37 bayi, kemudian Tahun 2022 sebesar 23.497 bayi.
2.13	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. <i>Span of control dan span of management</i> wilayah pembinaan sangat luas Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) belum sebanding dengan minimnya pembiayaan; 2. Data kelompok binaan belum dimuktahirkan sehingga menyulitkan pembinaan oleh Tim Penggerak PKK; 3. Fasilitas pembinaan PKK di tingkat kecamatan masih terbatas; 4. Masyarakat mempunyai pola pikir bahwa posyandu adalah milik Dinas Kesehatan, bukan milik masyarakat sehingga tanggung jawab operasionalnya diserahkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali
2.14	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1. Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali pada tahun 2018 sebesar 80,05 persen, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 88,54

Kode	Urusan	Permasalahan
		persen, dan penurunan pada tahun 2022 sebesar 87,34. 2. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2018 sebesar 69,51 persen, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 57,15 persen, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 68,71. 3. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2018 sebesar 12,64 persen, namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 15,90 persen, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 17,54. 4. Minimnya pemahaman penduduk atas makna program Keluarga Berencana; 5. Terbatasnya Tenaga Penyuluh KB di wilayah terpencil dan kepulauan pada Kecamatan Bungku Selatan dan Menui Kepulauan; 6. Terbatas akses masyarakat miskin dan di wilayah terpencil pada Program KB.
2.15	BIDANG PERHUBUNGAN	1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dan Peralatan Uji KIR; 2. Minimnya fasilitas pelabuhan laut, terminal bus, bandara Morowali; 3. Terbatasnya rambu-rambu lalu-lintas pada daerah rawan lakalantas; 4. Rasio izin trayek di bawah target yakni mencapai 17 poin di Tahun 2018 pada tahun 2022 menurun menjadi 12 poin.

Kode	Urusan	Permasalahan
2.16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Sebagian wilayah sulit diakses layanan telekomunikasi 2. Masih adanya wilayah desa <i>blank-spot</i> Jaringan Komunikasi khususnya di wilayah pegunungan dan pulau-pulau. 3. Belum optimalnya penggunaan website sebagai sarana dan prasarana komunikasi dan informasi. 4. Anggaran yang terbatas didalam penyiapan infrastruktur tower BTS dan akses jaringan internet pada wilayah terpencil.
2.17	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1. Persentase koperasi aktif terjadi fluktuasi setiap tahunnya dimana capaiannya pada tahun 2018 meningkat sebesar 30,77 persen, namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 36,66 persen, pada tahun 2022 meningkat sebesar 39,10. 2. Minimnya pendampingan terhadap pengembangan koperasi; 3. Minimnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; 4. Terbatasnya akses modal bagi UKM; 5. Terbatasnya akses informasi pasar bagi UKM; 6. Terbatasnya interkoneksi dengan Kawasan Industri yang ada
2.18	BIDANG PENANAMAN MODAL	1. Infrastruktur baik transportasi maupun energi dalam mendukung penanaman modal masih terbatas; 2. Sektor penanaman modal masih terfokus pada industri ekstraksi berbasis sumber daya alam khususnya pertambangan; 3. Promosi investasi belum memadai; 4. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta) pada tahun 2018 sebanyak 111

Kode	Urusan	Permasalahan
		investor, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 87,00 Investor; 5. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2018 realisasi investasi sebesar US\$ 89,6 Milyar, pada tahun 2021 terjadi penurunan nilai investasi menjadi US\$ 101,1 Triliun.
2.19	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1. Data jumlah organisasi kepemudaan, kegiatan organisasi kepemudaan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepemudaan masih terbatas; 2. Kontribusi organisasi kepemudaan serta koordinasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah masih terbatas; 3. Jumlah prasarana olah raga belum memadai; 4. Sinkronisasi perencanaan kegiatan olah raga belum memadai.
2.20	BIDANG STATISTIK	1. Beberapa publikasi penting bagi Kabupaten Morowali belum ada dan belum dijadikan kegiatan rutin yang dikerjasamakan dengan pihak badan Pusat Statistik seperti PDRB sembilan Kecamatan baik pendekatan lapangan usaha maupun penggunaan, Indeks Gini, NTP (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), NTP Nelayan, dan lain-lain. 2. Terintegrasinya Sistem Data statistik belum terintegrasi dan dimanfaatkan dengan baik didalam pengambilan keputusan.
2.21	BIDANG PERSANDIAN	1. Anggaran mendukung persandian sangat terbatas. 2. Sampai dengan tahun 2020 belum adanya tenaga sandiman di kabupaten Morowali 3. Keamanan data dan informasi daerah sangat diperlukan didalam menjalankan



Kode	Urusan	Permasalahan
		pemerintahan termasuk keamanan tanda tangan pejabat daerah menghindari pemalsuan.
2.22	BIDANG KEBUDAYAAN	1. Alokasi anggaran bagi kegiatan kebudayaan masih minim; 2. Sumber Daya Manusia dan sarana-prasarana kegiatan kebudayaan baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan masih minim; 3. Identifikasi dan riset situs kebudayaan belum dilakukan
2.23	BIDANG PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan pada tahun 2018 realisasi sebanyak 10.244 pengunjung, pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah pengunjung menjadi 2.628 pengunjung.
2.24	BIDANG KEARSIPAN	1. Minat baca masyarakat masih minim yang disebabkan minimnya koleksi buku di perpustakaan; 2. Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan masih belum memadai; 3. Belum dilakukannya identifikasi perpustakaan tingkat komunitas; 4. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kearsipan masih belum memadai; 5. Pengelola kearsipan masih terbatas; 6. Tradisi Tata Kelola arsip daerah belum dibudayakan
3	URUSAN PILIHAN	
3.27	PERTANIAN	1. NTP belum mencapai nilai 100; 2. Menurunnya kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB; 3. Masih rendahnya kemampuan kelompok tani; 4. Belum optimalnya peran PPL Pertanian dalam peningkatan SDM petani, produksi dan pemasaran hasil pertanian; 5. Kualitas-Produk pertanian masih rendah; 6. Terbatasnya Sarana Prasarana Produksi Petani Seperti Modal

Kode	Urusan	Permasalahan
		Usaha, Alsinta, Pupuk/Obat-obatan Terbatas; 7. Nilai Tambah Produk Pertanian Rendah; 8. Kegagalan budidaya rumput laut, 9. menurunnya hasil perikanan tangkap, 10. Lemah daya tawar nelayan, 11. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, permukiman dan niaga; 12. Rendahnya penyediaan irigasi pada daerah baru;
3.25	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Masih rendahnya kesejahteraan nelayan; 2. Kewenangan kabupaten didalam pengelolaan kelautan dan perikanan sangat terbatas; 3. Sarana dan prasarana alat tangkap ikan bagi nelayan terbatas; 4. Anggaran didalam mendukung pengembangan perikanan terbatas; 5. Pengembangan rumput laut masih belum optimal. 6. Potensi perikanan tangkap Kabupaten Morowali cukup besar; 7. Kurangnya optimalnya pelestarian dan pengawasan lingkungan perikanan.
3.26	BIDANG PARIWISATA	1. Masih rendahnya kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap APBD Kabupaten; 2. Belum optimalnya penataan daya Tarik Wisata (DTW); 3. Belum terintegrasi pemasaran destinasi pariwisata antar daerah sesuai potensi.
3.30	BIDANG PERDAGANGAN	1. Masih rendahnya akses permodalan bagi Pedagang/Usaha Mikro/informal 2. Program Pengembangan UMKM.
3.31	BIDANG PERINDUSTRIAN	1. Pada tahun 2020 pertumbuhan industri di Kabupaten Morowali mengalami penurunan atau bahkan berkurang dari tahun



Kode	Urusan	Permasalahan
		sebelumnya yakni sebesar 0,37%. Ditahun 2022 industri di Kabupaten Morowali meningkat sebesar 37,44 persen. 2. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB ADHB sebesar 1,39 persen menurun dari Tahun sebelumnya dan untuk kontribusi sektor industri PDRB ADH Konstan 2010 sebesar 1,43 persen.
3.32	BIDANG TRANSMIGRASI	1. Tidak adanya pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru dari Tahun 2014–2022; 2. Diperlukan Penyiapan Pembangunan dan Pembinaan Kawasan Permukiman Transmigrasi baru.
4	URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	1. Reformasi Birokrasi belum berjalan maksimal; 2. Nilai SAKIP Pemerintah Masih dalam Kategori Rendah; 3. Perlu adanya peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan Administrasi Kewilayahan; 4. Belum terbangunnya Fasilitasi Kerjasama Daerah; 5. Masih terbatasnya aparatur UKPBJ; 6. Terbatasnya Aparatur Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (JF-PPBJ); 7. Masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam mengelola pengadaan barang/jasa; 8. Belum stabilnya harga komoditi pertanian dan kebutuhan pokok masyarakat; 9. Perlu adanya pengembangan Aparatur yang Profesional, Adaptif dan responsive; 10. Perlu adanya peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, penyusunan SOP dan

Kode	Urusan	Permasalahan
		Penerapan Standar Pelayanan minimal.
		11. Belum optimalnya kordinasi penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah
4.02	SEKRETARIAT DPRD	Belum optimalnya capaian Ranperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi Perda.
5.01	PERENCANAAN	- Masih rendahnya ASN yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan; - Dokumen perencanaan belum sinkron; - Pengolahan data dan informasi pembnagunan daerah belum optimal; - Koordinasi perencanaan masih perlu ditingkatkan.
5.02	KEUANGAN	- Kurang optimalnya capaian pendapatan PAD; - Alokasi anggaran untuk pencapaian target pembangunan sulit tercapai karena situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan refocusing anggaran.
5.03	KEPEGAWAIAN	Belum optimalnya penegakan hukuman disiplin ASN
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Belum optimalnya capaian aparatur yang mengikuti diklat struktural fungsional dan teknis
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Masih rendahnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	- Masih kurangnya tindak lanjut temuan pemeriksaan internal - Kurangnya aparatur pemeriksa yang profesional dan berkualitas auditor
7.01	KECAMATAN	- Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kecamatan. - Infrastruktur pendukung pelayanan publik di kecamatan belum memadai



Kode	Urusan	Permasalahan
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Kurangnya Cakupan Sekolah, Ormas, dan keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan; 2. Belum optimalnya cakupan Pendidikan politik masyarakat; 3. Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan; 4. Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa.

Sumber: Hasil pengolahan evaluasi Capaian pembangunan, 2023



Tabel 4.3

Kondisi Capaian Urusan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi													
1.1.1	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (%)	21,12	8-13	12-18	12-18	12-18	20,26	28,93	25,31	28,21	95,93	222,54	140,61	156,72
1.1.2	Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan dengan Migas (%)	20,20	5-10	10-15	10-15	10-15	20,20	28,93	25,31	48,20	100,00	289,30	168,73	321,36
1.1.3	PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (Juta Rp)	45.244. 727,10	61.985. 633,20	67.415. 000,45	72.844. 367,70	78.273. 734,96	45.244.7 27,10	62.028, 34	98.779, 81	146.599, 32	100,00	100,07	146,52	201,25
1.1.4	PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas (Juta Rp)	45.244. 727,10	61.985. 633,20	67.415. 000,45	72.844. 367,70	78.273. 734,96	45.244.7 27,10	62.028, 34	98.779, 81	146.599, 32	100,00	100,07	146,52	201,25
1.1.5	PDRB-ADH Konstan dengan Migas (Juta Rp)	34.085. 704,80	43.947. 504,40	49.376. 871,65	54.806. 238,90	60.235. 606,16	34.085.7 04,80	43.824, 300	54.916, 24	70.515,6 2	100,00	99,72	111,22	128,66
1.1.6	PDRB-ADH Konstan tanpa Migas (Juta Rp)	34.085. 704,80	43.947. 504,40	49.376. 871,65	54.806. 238,90	60.235. 606,16	34.085.7 04,80	43.947, 50	54.916, 24	70.515,6 2	100,00	100,00	111,22	128,66
1.1.7	Laju inflasi (Persen)	5,10	3-5	3-5	3-5	3-5	5,10	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.8	Perkembangan PDRB Perkapita (%)	-					-							
	- PDRB Perkapita ADH Berlaku (Rp)	373,00	383,27	411,41	438,84	465,57	373,00	383,27	588,29	831,80	97,32	93,16	134,06	178,66
	- PDRB Perkapita ADH Konstan 2010 (Rp)	281,01	271,73	301,33	330,17	358,28	281,01	356,20	327,06	400,10	103,42	118,21	99,06	111,67
	- Perkembangan PDRB Konstan 2010 Perkapita (%)	12,62	91,63	10,89	9,57	8,51	12,62	26,76	-8,18	22,14	13,77	245,73	(85,49)	260,22
1.1.9	Indeks Gini	0,30	0,29	0,27	0,26	0,24	0,304	0,290	0,297	0,285	100,00	100,35	108,79	110,47
1.1.10	Persentase Penduduk Miskin	-					-							
	- Garis Kemiskinan (000)	428.74 4,00	441.60 6,32	454.46 8,64	467.33 0,96	480.19 3,28	428.744, 00	463.14 0,00	478.40 9,00	507.523, 00	0,00	4,88	5,27	8,60
	- Jumlah Masyarakat Miskin (000)	16,61	21,48	21,00	20,49	19,97	16,61	16,50	17,07	15,86	0,00	-23,18	-18,71	-22,60



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	- Persentase Kemiskinan (%)	13,75	13,28	12,81	12,34	11,88	13,75	13,43	13,75	12,58	0,00	1,13	7,34	1,94
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,12	1,97	1,82	1,67	1,53	2,12	0,67	2,11	2,03	0,00	-65,99	15,93	21,56
	- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,50	0,48	0,47	0,45	0,44	0,50	0,67	0,54	0,54	0,00	39,58	14,89	20,00
1.1.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,21	72,21	72,85	73,50	74,14	72,21	72,21	72,29	72,55	100,00	100,00	99,23	98,71
1.1.11	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	86,25	86,72	87,19	87,66	88,12	86,25	86,57	86,25	87,42	100,00	99,83	98,92	99,73
1.2.	Kesejahteraan Sosial													
1.2.1	Angka Melek Huruf	100,00	100,00	98-99	98-99	98-99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	101,01	101,01
1.2.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,33	9,33	9,55	9,78	10,00	9,33	9,33	9,34	9,35	100,00	100,00	97,80	95,60
1.2.3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,17	13,17	13,23	13,30	13,36	13,17	13,17	13,35	13,36	100,00	100,00	100,91	100,45
1.2.4	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	69,18	69,18	69,46	69,75	70,03	69,18	69,18	69,23	69,23	100,00	100,00	99,67	99,25
1.2.5	Balita Gizi Buruk	4,00	8-6	6-4	6-4	6-4	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	-99,99	-100,00	-100,00
1.2.6	Prevalensi Angka Stunting	7,61	7,61	5,72	3,82	1,92	7,61	7,61	7,80	5,20	0,00	0,00	36,36	36,13
1.2.7	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	50,01	50,01	48,05	46,09	44,13	50,01	50,01	46,92	41,83	100,00	100,00	97,64	90,76
1.2.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,70	64,70	65,55	66,39	67,23	64,70	64,70	63,75	60,74	100,00	100,00	97,25	91,49
1.2.9	Tingkat pengangguran terbuka	5,21	5,21	4,01	3,00	2,00	3,03	5,21	5,08	3,20	-41,84	0,00	26,68	6,67
1.2.10	Rasio Penduduk yang Bekerja	94,79	94,79	95,99	97,00	98,00	94,79	94,79	94,92	96,80	100,00	100,00	98,89	99,79
1.2.11	PDRB per tenaga kerja Laju pertumbuhan	-	-				-							
	- PDRB ADHB	113.27 5,77	113.27 5,77	159.92 2,30	206.56 8,84	253.21 5,37	113.275, 77	113.27 5,77	179.60 6,19	269.687, 30	100,00	100,00	112,31	130,56
	- PDRB ADHK	80.311, 95	80.311, 95	109.64 2,51	138.97 3,07	168.30 3,63	80.311,9 5	80.311, 95	99.851, 34	129722,0 7	100,00	100,00	91,07	93,34
1.2.11	Persentase PAD terhadap pendapatan	23,18	23,18	26,67	28,84	31,26	23,18	23,18	22,33	26,93	100,00	100,00	83,73	93,36
1.2.12	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.13	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten	-	-				-							



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	- PDRB ADHB	3,27	3,27	2,62	1,98	1,34	3,27	3,27	2,17	1,46	100,00	100,00	82,98	73,98
	- PDRB ADHK	3,18	3,18	2,60	2,01	1,43	3,18	3,18	2,63	2,05	100,00	100,00	101,03	101,77
1.2.14	Kontribusi sektor Pertanian (Holtikultura) terhadap PDRB Kabupaten	-	-				-							
	- PDRB ADHB	0,21	0,21	0,17	0,12	0,07	0,21	0,21	0,01	0,00	100,00	100,00	7,93	0,76
	- PDRB ADHK	0,18	0,18	0,14	0,10	0,06	0,18	0,18	0,15	0,11	100,00	100,00	104,98	114,47
1.2.15	Produksi Tanaman Pertanian	-	-				-							
	Padi	42.068,22	42.068,22	40.250,02	38.431,83	36.613,63	42.068,22	42.068,22	46.221,70	39.507,32	100,00	100,00	114,84	102,80
	Jagung	1.865,00	1.865,00	1.171,89	1.171,89	1.171,89	1.865,00	1.865,00	4.368,42	1.865,00	100,00	100,00	372,77	159,14
	Ubi Kayu	4.186,00	4.186,00	5.114,32	6.042,64	6.970,96	4.186,00	4.186,00	6.259,73	4.186,00	100,00	100,00	122,40	69,27
	Ubi Jalar	775,00	775,00	882,63	990,26	1.097,89	775,00	775,00	1.378,25	775,00	100,00	100,00	156,15	78,26
	Kacang Tanah	56,00	56,00	60,20	64,39	68,59	56,00	56,00	78,43	56,00	100,00	100,00	130,28	86,97
	Kacang Kedelai	127,00	127,00	339,69	552,37	765,06	127,00	127,00	190,00	127,00	100,00	100,00	55,93	22,99
	Kacang Hijau	4,00	4,00	4,14	4,28	4,42	4,00	4,00	45,43	4,00	100,00	100,00	1097,34	93,46
1.2.16	Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan terhadap PDRB	-	-				-							
	- PDRB ADHB	1,05	1,05	0,86	0,66	0,47	1,05	1,05	0,66	0,45	100,00	100,00	76,86	67,48
	- PDRB ADHK	1,06	1,06	0,87	0,68	0,49	1,06	1,06	0,85	0,66	100,00	100,00	97,33	96,98
1.2.17	Produksi Tanaman Perkebunan	-	-				-							
	Kelapa	1.163,23	1.163,23	1.158,11	1.153,00	1.147,88	1.163,23	1.163,23	1.207,30	733,49	100,00	100,00	104,25	63,62
	Kelapa Sawit	80.148,90	80.148,90	100.885,31	121.621,71	142.358,12	80.148,90	80.148,90	74.092,52	76.096,25	100,00	100,00	73,44	62,57
	Kopi	23.477,00	23.477,00	21.904,67	20.332,34	18.760,01	23.477,00	23.477,00	35.200,00	33.626,00	100,00	100,00	160,70	165,38



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Kakao	6.971,7 0	6.971,7 0	12.472, 99	17.974, 27	23.475, 56	6.971,70	6.971,7 0	2.400,0 0	1.727,75	100,00	100,00	19,24	9,61
	Karet	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.18	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		-				-							
	- PDRB ADHB	0,12	0,12	0,09	0,06	0,03	0,12	0,12	0,07	0,05	100,00	100,00	82,76	83,66
	- PDRB ADHK	0,13	0,13	0,10	0,07	0,03	0,13	0,13	0,10	0,08	100,00	100,00	101,18	112,58
1.2.19	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	-	-				-							
	- PDRB ADHB	18,33	18,33	16,89	15,44	13,99	18,33	18,33	18,63	17,29	100,00	100,00	110,32	111,99
	- PDRB ADHK	23,48	23,48	22,11	20,75	19,39	23,48	23,48	23,13	21,11	100,00	100,00	104,61	101,76
1.2.20	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	-	-				-							
	- PDRB ADHB	0,13	0,13	0,11	0,09	0,07	0,13	0,13	0,08	0,06	100,00	100,00	73,40	67,81
	- PDRB ADHK	0,12	0,12	0,10	0,09	0,07	0,12	0,12	0,08	0,07	100,00	100,00	84,81	80,78
1.2.21	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	-	-				-							
	- PDRB ADHB	1,66	1,66	1,36	1,06	0,77	1,66	1,66	1,04	0,70	100,00	100,00	76,37	66,03
	- PDRB ADHK	1,30	1,30	1,05	0,79	0,54	1,30	1,30	1,04	0,81	100,00	100,00	99,01	102,48
1.2.22	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	-	-				-							
	- PDRB ADHB	1,53	1,53	1,24	0,94	0,65	1,53	1,53	1,08	1,25	100,00	100,00	86,98	132,96
	- PDRB ADHK	1,34	1,34	1,08	0,82	0,56	1,34	1,34	1,17	1,48	100,00	100,00	108,39	180,35
1.2.23	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	-	-				-							
	- PDRB ADHB	69,98	69,98	86,67	103,35	120,03	69,98	69,98	71,23	73,19	100,00	100,00	82,18	70,82
	- PDRB ADHK	65,74	65,74	81,03	96,32	111,61	65,74	65,74	65,52	67,31	100,00	100,00	80,86	69,88
1.2.24	Kontribusi Sektor Industri RT Terhadap PDRB	-	-				-							



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	- PDRB ADHB	3,48	3,48	2,91	2,34	1,77	3,48	NA	NA	NA	100,00	NA	NA	NA
	- PDRB ADHK	2,56	2,56	2,11	1,66	1,20	2,56	NA	NA	NA	100,00	NA	NA	NA
1.2.25	Pertumbuhan Industri	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2	0,30	(0,37)	NA	NA	30,00	-37,00	NA	NA
1.2.26	Nilai ICOR	5,88	5,35	4,81	4,28	3,75	5,88	1,03	4,99	3,51	0,00	-80,70	3,60	-18,10
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	-												
1.3.1	Seni Budaya	-					-							
	- Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	17,00	17-20	17-20	17-20	17-20	17,00	17,00	17,00	17,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 Penduduk	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2	Olahraga	-					-							
	Jumlah Klub Olah Raga Per 10.000 Penduduk	14,00	14-18	14-18	14-18	14-18	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk	391,00	391-395	391-395	391-395	391-395	391,00	391,00	391,00	391,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	ASPEK PELAYANAN UMUM	-												
2.1.	Urusan pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	-												
2.1.1	Pendidikan	-												
2.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini	-												
	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Murid TK	37,35	40,83	40,16	39,48	38,80	37,35	40,83	38,29	43,86	100,00	100,00	95,34	111,09
	Rasio Ketersediaan Guru Per Murid TK	14,68	13,92	13,54	13,17	12,80	14,68	13,92	12,87	13,75	100,00	100,00	95,05	104,43
2.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)	-	-				-							
	- Angka Partisipasi Kasar SD/MI	121,33	108,95	107,55	106,16	104,76	121,33	108,95	109,42	109,40	100,00	100,00	101,74	103,05
	- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	105,13	103,84	102,60	101,35	100,11	105,13	103,84	102,31	99,41	100,00	100,00	99,72	98,09
	- Angka Partisipasi Kasar SMU/MA/SMK	103,50	81,03	80,89	80,75	80,61	103,50	81,03	0,00	98,22	100,00	100,00	0,00	121,63



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
2.1.1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)	-	-				-							
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMU/MA/SMK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)	-	-				-							
	- Angka Partisipasi Murni SD/MI	94,79	94,72	95,55	96,39	97,22	94,79	94,72	95,07	93,67	100,00	100,00	99,50	97,18
	- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	72,73	73,49	74,86	76,23	77,60	72,73	73,49	73,23	73,13	100,00	100,00	97,82	95,93
	- Angka Partisipasi Murni SMU/MA/SMK	67,59	67,54	69,02	70,50	71,98	67,59	67,54	69,71	70,62	100,00	100,00	101,00	100,17
2.1.1.5	Angka Partisipasi Sekolah	-	-				-							
	- Tingkat SD/MI	98,73	98,84	98,92	99,00	99,09	98,73	98,84	97,06	97,78	100,00	100,00	98,12	98,77
	- Tingkat SMP/MTs	94,20	94,97	95,69	96,42	97,14	94,20	94,97	94,40	94,51	100,00	100,00	98,65	98,02
	- Tingkat SMA/SMK/MA	84,70	89,35	90,40	91,44	92,49	84,70	89,35	89,75	90,06	100,00	100,00	99,28	98,49
2.1.1.6	Angka Putus Sekolah	-	-				-							
	- Tingkat SD/MI	0,45	-	0,5-0,3	0,5-0,3	0,5-0,3	0,45	-	0,38	0,29	0,00	-100,00	-24,00	-42,00
	- Tingkat SMP/MTs	3,65	-	0-2	0-2	0-2	3,65	-	0,20	0,18	0,00	-100,00	-90,00	-91,00
	- Tingkat SMA/SMK/MA	10,34	0,44	0,50	0,50	0,50	10,34	0,44	0,45	0,48	0,00	0,00	-10,00	-4,00
2.1.1.7	Angka Kelulusan	-	-				-							
	- Tingkat SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Tingkat SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Tingkat SMA/SMK/MA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.8	Angka Yang Melanjutkan	-	-				-							



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,90	99,71	100,00	100,00	98,90	99,71
	Angka Lulusan SMA/SMK/MA Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi	70,00	73,18	75-77	77-79	79-81	70,00	73,18	76,80	76,41	100,00	100,00	102,40	99,23
2.1.1.9	Fasilitas Pendidikan	-	-				-							
	- Tingkat SD/MI	148,00	153,00	148-150	148-150	148-150	148,00	153,00	159	162,00	100,00	100,00	107,43	109,46
	- Tingkat SMP/MTs	49,00	49,00	57-59	57-59	57-59	49,00	49,00	51	51,00	100,00	100,00	89,47	89,47
	- Tingkat SMA/SMK/MA	26,00	26,00	26-27	26-27	26-27	26,00	26,00	26	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah	-	-				-							
	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI	0,11	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11	0,13	0,12	0,10	100,00	100,00	111,48	92,51
	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs	0,17	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,15	0,16	0,07	100,00	100,00	98,04	43,47
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MI	0,20	0,22	0,18	0,18	0,18	0,20	0,22	0,03	0,03	100,00	100,00	15,27	14,91
2.1.1.11	Rasio Guru/Murid jenjang Pendidikan Dasar	12,95	10,20	10,14	10,07	10,01	12,95	10,20	11,55	11,39	100,00	100,00	113,92	113,09
2.1.1.12	Rasio Guru/Murid Jenjang pendidikan Menengah	9,24	12,29	11,85	11,40	10,96	9,24	12,29	11,81	12,73	100,00	100,00	99,63	111,70
2.1.1.13	Rasio guru/murid per kelas	-	-				-							
	- Tingkat SD/MI	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,13	100,00	100,00	100,00	252,97
	- Tingkat SMP/MTs	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	100,00	100,00	100,00	64,00
	- Tingkat SMA/SMK/MA	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.	Kesehatan						-							



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
2.1.2.1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	0,87	0,01	0,01- 0,2	0,01- 0,2	0,01- 0,2	0,87	0,01	0,01	0,611	0,00	30,00	45,00	6.008,7 4
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,71	0,50	0,43	0,36	0,29	0,71	0,50	0,64	1,527	0,00	0,00	48,84	324,22
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	13,43	11,96	16,07	20,18	24,28	13,43	11,96	12,50	0,611	0,00	0,00	-22,22	-96,97
2.1.2.2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	-	-	0-0,25	0-0,25	0-0,25	-	0,00	0,35	0,299	0,00	0,00	41,20	19,80
2.1.2.3	Rasio posyandu per satuan balita	14,36	8,56	7,98	7,39	6,81	14,36	8,56	8,31	8,13	100,00	100,00	104,18	110,04
2.1.2.4	Rasio puskesmas, poliklinik, Poskesdes dan pustu per satuan penduduk	-	-				-	-	-					
	Rasio Sarana Kesehatan	0,36	0,27	0,27	0,27	0,27	0,360	0,266	0,268	0,255	100,00	98,52	99,26	94,57
	Rasio Puskesmas	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,070	0,056	0,077	0,074	100,00	93,33	154,84	147,52
	Rasio Poliklinik	0,04	0,02	0,06	0,09	0,13	0,040	0,025	0,048	0,045	100,00	125,00	79,41	50,44
	Rasio Pustu	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,247	0,161	0,143	0,136	98,93	64,31	57,17	54,47
2.1.2.5	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (Per 1.000)	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,020	0,012	0,012	0,017	100,00	120,00	59,56	85,11
2.1.2.6	Rasio Dokter per satuan penduduk (Per 1.000)	0,60	0,40	0,54	0,69	0,84	0,60	0,40	0,51	0,437	100,00	99,00	93,75	63,32
2.1.2.7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Per 1.000)	4,81	4,20	5,73	7,27	8,80	4,81	4,20	4,42	5,96	100,00	99,95	77,22	82,03
2.1.2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94,10	100,00	94-97	94-97	94-97	94,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	103,09	103,09
2.1.2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.10	Persentase Balita Yang Pernah diimunisasi campak	135,00	145,00	100,00	100,00	100,00	135,00	145,00	140,90	155,50	100,00	100,00	140,90	155,50



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
2.1.2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Jumlah)	452,00	386,00	356,00	326,00	296,00	452,00	386,00	356,00	197,00	100,00	100,00	100,00	60,43
2.1.2.12	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	372,64	238,67	213,67	188,67	163,67	372,64	238,67	133,40	969,11	100,00	100,00	62,43	513,65
2.1.2.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	106,00	77,00	72,00	67,00	62,00	106,00	77,00	59,00	176,00	100,00	100,00	81,94	262,69
2.1.2.14	Penderita Diare Yang Ditangani	1.730,0 0	1.795,0 0	1.588,3 9	1.381,7 8	1.175,1 7	1.730,00	1.795,0 0	2304,0 0	2911,00	100,00	100,00	145,05	210,67
2.1.2.15	Angka kejadian Malaria (Per 100.000 Penduduk)	12,37	6,18	6,40	6,62	6,84	12,37	6,18	5,96	10,78	0,00	0,00	-6,94	62,85
2.1.2.16	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,01	0,01	0-0,2	0-0,2	0-0,2	0,01	0,01	0,003	0,02	0,00	-30,00	-98,51	-89,79
2.1.2.17	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	-	-				-	-	-	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.18	Cakupan puskesmas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.19	Cakupan Puskesmas Pembantu	26,32	19,55	19,55	19,55	19,55	26,32	19,55	18,05	18,05	100,00	100,00	92,33	92,30
2.1.2.20	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	79,93	80,49	86,16	91,83	97,50	79,93	80,49	78,33	82,18	100,00	100,00	90,91	89,49
2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-					-							
2.1.3.1	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	0,13	0,14	0,18	0,23	0,27	0,13	0,15	0,19	0,18	100,00	103,57	105,56	80,02
2.1.3.2	Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,00	60,00	94,18	89,59
2.1.3.3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	17,60	19,15	19,15	19,15	19,15	17,60	19,15	26,82	24,30	100,00	100,00	140,05	126,91
2.1.3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	79,61	82,80	82,84	82,88	82,92	79,61	82,80	78,34	71,80	100,00	100,00	94,57	86,63
2.1.3.5	Rasio jaringan Irigasi	0,82	0,70	0,72	0,74	0,76	0,82	0,70	0,72	0,87	100,00	100,00	100,00	117,32
2.1.3.6	Persentase penduduk berakses air minum	86,99	89,64	89,68	89,73	89,77	86,99	89,64	93,17	91,91	100,00	100,00	103,89	102,43



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
2.1.3.7	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	4,22	2,05	2,17	2,29	2,40	4,22	2,05	1,98	1,91	100,00	100,00	91,39	83,50
2.1.4.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;	-					-							
2.1.4.1	Rumah layak huni	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	72,64	78,25	81,71	100,00	80,71	86,94	90,79
2.1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat;	-					-							
2.1.5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	975,00	975,00	975,33	975,66	975,99	975,00	975,00	975,00	825,00	100,00	100,00	99,97	84,56
2.1.5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	5,00	100,00	100,00	100,00	62,50
2.1.5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	5,00	7,00	7,73	8,46	9,19	5,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00	90,56	82,74
2.1.6.	Sosial	-					-							
2.1.6.1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	49.012,00	50.330,00	50.680,24	51.030,48	51.380,71	49.012,00	50.680,24	50.680,24	51.030,48	100,00	100,70	100,00	100,00
2.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	45,00	99,00	107,67	116,34	125,01	45,00	107,67	107,67	116,34	100,00	108,76	100,00	100,00
2.1.6.3	Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	-					-							
2.2.1.	Tenaga Kerja	-					-							
2.2.2.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (orang)	56,00	43,00	30,00	17,00	4,00	56,00	28,00	32,00	35,00	100,00	65,12	106,67	205,88
2.2.2.2	Rasio Lulusan S1/S2/S3	9,16	9,44	9,73	10,01	10,29	9,16	14,27	14,87	15,12	100,00	151,12	152,90	151,08



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-					-							
2.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	10,19	10,29	10,39	10,49	10,59	10,19	8,59	9,99	11,74	100,00	83,50	96,19	111,94
2.2.2.2	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rasio KDRT	0,45	0,43	0,41	0,40	0,38	0,45	0,21	0,15	0,15	100,00	48,94	36,37	37,90
2.2.2.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	40,60	41,24	41,87	42,51	43,15	40,60	36,48	44,42	36,34	100,00	88,46	106,09	85,47
2.2.2.4	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	0,99	1,00	1,01	1,02	1,03	0,99	1,03	1,03	1,06	100,00	103,12	102,18	104,21
2.2.2.5	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	1,08	1,06	1,05	1,04	1,03	1,08	0,93	0,93	0,87	100,00	87,47	88,48	83,74
2.2.2.6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	1,31	1,27	1,24	1,21	1,18	1,31	1,09	1,09	1,01	100,00	85,54	87,80	83,64
2.2.3.	Ketahanan Pangan	-					-							
2.2.3.1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	216,27	152,75	163,77	174,78	185,80	216,27	152,75	158,90	132,32	100,00	100,00	97,03	75,71
2.2.3.2	Ketersediaan Energi	3.071,00	3.071,00	3.076,76	3.082,51	3.088,27	3.071,00	3.071,00	3.947,00	4.014,00	100,00	100,00	128,28	130,22
2.2.3.3	Ketersediaan protein perkapita	86,19	86,19	91,96	97,74	103,51	86,19	73,80	83,80	82,13	100,00	85,62	91,13	84,03
2.2.5.	Lingkungan Hidup	-					-							
2.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.5.4	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100,00	100,00	100,00	0,00
2.2.5.5	Penetapan MHA	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100,00	100,00	100,00	0,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
2.2.5.6	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100,00	100,00	100,00	0,00
2.2.6.	Kependudukan dan Catatan Sipil	-					-							
2.2.6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	130.01 4,21	114.04 1,27	140.66 2,47	167.28 3,68	193.90 4,89	130.014, 21	114.04 1,00	125.36 1,27	132.824, 27	100,00	100,00	89,12	79,40
2.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	11.748, 37	17.872, 00	21.474, 37	25.076, 75	28.679, 12	11.748,3 7	17.872, 00	20.223, 00	23.497,0 0	100,00	100,00	94,17	93,70
2.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah	138,47	100,00	146,47	192,94	239,41	138,47	100,00	100,00	179,00	100,00	100,00	68,27	92,77
2.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-					-							
2.2.7.1	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.3	Persentase PKK Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.4	Posyandu aktif	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	153,00	153,00	100,00	100,00	99,35	99,35
2.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-					-							
2.2.8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,64	1,59	1,55	1,51	1,51	1,64	33,33	4,54	4,96	0,00	1990,6 1	192,63	229,00
2.2.8.2	Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali	79,08	80,08	81,43	82,78	84,14	79,08	80,08	88,54	87,34	100,00	100,00	108,73	105,51
2.2.8.3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	65,78	85,09	85,88	86,66	87,44	65,78	85,09	57,15	68,71	100,00	100,00	66,55	79,29



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
2.2.8.4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15,33	39,16	40,95	42,75	44,54	15,33	39,16	15,90	17,54	100,00	100,00	38,83	41,04
2.2.8.5	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.9.	Perhubungan	-					-							
2.2.9.1.	Jumlah Arus Penumpang (Orang)	17.000,00	17.145,00	18.445,63	19.746,25	21.046,88	17.000,00	17.145,00	18.241,00	18.851,00	100,00	100,00	98,89	95,47
2.2.9.2	Rasio ijin trayek	17,00	20,00	21,72	23,44	25,15	17,00	20,00	10,00	12,00	100,00	100,00	46,04	51,19
2.2.9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	10,00	10,00	100,00	100,00	333,33	333,33
2.2.9.4	Pemasangan Rambu-rambu	310,00	310,00	400,00	425,00	450,00	310,00	310,00	45,00	57,00	100,00	100,00	11,25	13,41
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,08	0,33	100,00	100,00	166,96	669,30
2.2.9.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	-	-				-							
	Angkutan Laut	-	-				-							
	Jumlah Penumpang Turun	8.726,00	8.726,00	9.556,72	10.387,45	11.218,17	8.726,00	8.726,00	9.556,72	9.676,72	100,00	100,00	100,00	93,16
	Jumlah Penumpang Naik	8.419,00	8.419,00	9.194,62	9.970,24	10.745,86	8.419,00	8.726,00	9.194,62	9.718,62	100,00	103,65	100,00	97,48
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	200.751,00	200.751,00	210.788,55	220.826,10	230.863,65	200.751,00	8.419,00	210.788,55	214.033,55	100,00	4,19	100,00	96,92
	Jumlah barang muat (ton)	447.724,00	447.724,00	470.110,20	492.496,40	514.882,60	447.724,00	200.751,00	470.110,20	500.409,20	100,00	44,84	100,00	101,61
	Angkutan Udara	-	-				-							
	Jumlah Penumpang Datang	32.301,00	58.447,00	59.093,00	59.739,00	60.385,00	32.301,00	32.301,00	31.271,00	31.271,00	100,00	55,27	52,92	52,35
	Jumlah Penumpang Berangkat	33.266,00	15.247,00	15.912,00	16.578,00	17.243,00	33.266,00	58.447,00	21.973,00	21.973,00	100,00	383,33	138,09	132,54
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	107.487,00	122.089,00	124.238,74	126.388,48	128.538,22	107.487,00	15.247,00	270.442,00	244.256,00	100,00	12,49	217,68	193,26



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Jumlah barang muat (ton)	77.498,00	39.268,00	40.817,96	42.367,92	43.917,88	77.498,00	122.089,00	100.059,00	99.202,00	100,00	310,91	245,13	234,14
2.2.10.	Komunikasi dan Informatika	-					-							
2.2.11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-					-							
2.2.11.1	Persentase koperasi aktif	22,56	24,63	26,71	28,78	30,86	22,56	36,36	36,66	39,10	100,00	147,62	137,25	135,87
2.2.12.	Penanaman Modal	-					-							
2.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	57,00	67,00	30-50	30-50	30-50	57,00	67,00	87,00	87,00	100,00	100,00	174,00	174,00
2.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	25.862.850,46	32.786.800.000,00	20-30 Triliun	20-30 Triliun	20-30 Triliun	25.862.850,46	32.786.800.000,00	52.060.945.480.000,00	101.146.180.000.000,00	100,00	100,00	173,33	336,67
2.2.13	Kepemudaan dan Olahraga	-					-							
2.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda).	97,20	95,04	95,59	96,15	96,70	97,20	95,04	95,04	95,04	100,00	100,00	99,42	98,85
2.2.14.	Statistik	-					-							
2.2.14.1	Terintegrasinya Sistem Data statistik data terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.14.3	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.15.	Persandian	-					-							
2.2.16.	Kebudayaan	-					-							
2.2.17.	Perpustakaan	-					-							
2.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	3.510,00	3.510,00	4.131,00	4.752,00	5.373,00	3.510,00	2.286,00	2.628,00	2.508,00	100,00	65,13	63,62	52,78
2.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan yang Berkaitan Pelayanan Dasar	-					-							
2.3.1.	Pariwisata	-					-							



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
2.3.1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	5.016,00	5.495,00	5.895,00	6.295,00	6.695,00	5.016,00	5.495,00	6.416,00	3.624,00	100,00	100,00	108,84	57,57
2.3.1.2	Lama kunjungan Wisata (Hari)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.2.	Pertanian	-					-							
2.3.2.1	Kontribusi Sektor Pertanaian	-					-							
	- PDRB ADHB	3,27	3,27	2,62	1,98	1,34	3,27	3,27	2,17	1,98	100,00	100,00	82,98	100,00
	- PDRB ADHK	3,18	3,18	2,60	2,01	1,43	3,18	3,18	2,63	2,01	100,00	100,00	101,03	100,00
2.3.2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	-					-							
	- PDRB ADHB	0,21	0,21	0,17	0,12	0,07	0,21	0,21	0,01	0,00	100,00	100,00	7,93	0,76
	- PDRB ADHK	0,18	0,18	0,14	0,10	0,06	0,18	0,18	0,15	0,11	100,00	100,00	104,98	114,47
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	-					-							
	- PDRB ADHB	1,05	1,05	0,86	0,66	0,47	1,05	1,05	0,66	0,45	100,00	100,00	76,86	67,48
	- PDRB ADHK	1,06	1,06	0,87	0,68	0,49	1,06	1,06	0,85	0,66	100,00	100,00	97,33	96,98
2.3.2.3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	-					-							
	Padi	49,26	49,73	50,21	50,68	51,16	49,26	45,60	51,11	45,67	100,00	91,70	101,79	90,11
	Jagung	44,78	57,40	70,01	82,63	95,24	44,78	15,81	15,81	15,81	100,00	27,54	22,58	19,13
	Ubi Kayu	289,69	307,43	325,18	342,92	360,66	289,69	290,69	290,69	290,69	100,00	94,55	89,39	84,77
	Ubi Jalar	201,35	216,63	231,91	247,20	262,48	201,35	203,95	203,95	203,95	100,00	94,15	87,94	82,50
	Kacang Tanah	10,75	11,26	11,76	12,27	12,77	10,75	10,77	10,77	10,77	100,00	95,65	91,58	87,78
	Kacang Kedelai	7,46	11,67	15,88	20,09	24,30	7,46	20,82	20,82	20,82	100,00	178,41	131,11	103,63
	Kacang Hijau	0,67	0,89	1,12	1,34	1,57	0,67	0,66	0,66	0,66	100,00	74,16	58,93	49,25
2.3.3.	Kehutanan	-					-							



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
2.3.3.1	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.4.	Energi dan Sumberdaya Mineral	-					-							
2.3.4.1	Rumah tangga pengguna listrik	93,71	98,70	93-95	93-95	93-95	93,71	98,70	98,28	99,94	100,00	100,00	103,45	105,20
2.3.4.2	Daya Terpasang (Kwh)	43.966.450,00	43.966.450,00	40-43 Jt Kwh	40-43 Jt Kwh	40-43 Jt Kwh	43.966.450,00	43.966.450,00	43.966.450,00	43.968.432,00	100,00	100,00	102,25	102,25
2.3.5.	Perdagangan	-					-							
2.3.4.1	Ekspor Bersih Perdagangan	18.712,00	30.229,00	37.713,80	45.198,60	52.683,40	18.712,00	30.229,00	39.453,40	37.654,87	100,00	100,00	104,61	83,31
2.3.6.	Kelautan dan Perikanan	-					-							
2.3.5.1	Produksi Perikanan (ton)	-	-				-							
	Produksi Perikanan Laut (ton)	38.573,00	32.203,20	35.045,07	37.886,95	40.728,82	38.573,00	32.203,20	33.309,30	33.420,80	100,00	100,00	95,05	88,21
	Produksi Perikanan Darat (Ton)	305,00	618,90	1.194,03	1.769,17	2.344,30	305,00	618,90	2.993,00	2.981,00	100,00	100,00	250,66	168,50
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	20.372,00	18.260,00	18.913,50	19.567,01	20.220,51	20.372,00	18.260,00	58.414,00	2.220,32	100,00	100,00	308,85	11,35
2.3.5.2	Konsumsi Ikan Perkapita	11,48	51,00	51,44	51,88	52,33	11,48	51,00	56,41	57,30	100,00	100,00	109,66	110,45
2.3.5.3	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	0,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,04	1,04	1,04	1,04	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.	Fokus Layanan Urusan Penunjang	-					-							
2.4.1	Perencanaan Pembangunan	-					-							
2.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
2.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.2	Keuangan	-					-							
2.4.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.2.2	Persentase SILPA	0,93	0,84	0,64	-	-	0,93	0,84	2,58	1,01	0,00	0,00	303,06	100,00
2.4.2.3	Persentase belanja langsung	57,45	52,84	52,95	52,32	52,15	57,45	52,84	80,67	80,25	100,00	100,00	152,35	153,39
2.4.2.4	Persentase belanja belanja tidak langsung	42,55	47,16	47,05	47,68	47,85	42,55	47,16	19,33	19,75	100,00	100,00	41,08	41,42
2.4.2.5	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.3	Kepegawain serta Pendidikan dan Pelatihan	-					-							
2.4.4	Penelitian dan Pengembangan	-					-							
2.4.5	Pengawasan	-					-							
2.4.6	Sekretariat Dewan	-					-							
2.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Morowali	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
2.4.6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00
3	DAYA SAING DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	25,93	25,93	27,14	28,35	29,56	25,93	NA	NA	NA	100,00	NA	NA	NA
3.1.2	Produktivitas Total Daerah	651,06	803,12	1.003,5 7	1.204,0 2	1.404,4 7	651,06	803,12	998,51	1.204,02	100,00	100,00	99,50	100,00
3.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Panjang Ruas Jalan Kabupaten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.2	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Angkutan Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penumpang Turun	8.726,0 0	8.726,0 0	9.556,7 2	10.387, 45	11.218, 17	8.726,00	8.726,0 0	13.080, 00	10.387,4 5	100,00	100,00	136,87	100,00
	Jumlah Penumpang Naik	8.419,0 0	8.419,0 0	9.194,6 2	9.970,2 4	10.745, 86	8.419,00	8.419,0 0	11.100, 00	9.970,24	100,00	100,00	120,72	100,00
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	200.75 1,00	200.75 1,00	210.78 8,55	220.82 6,10	230.86 3,65	200.751, 00	200.75 1,00	10.640, 00	220.826, 10	100,00	100,00	5,05	100,00
	Jumlah barang muat (ton)	447.72 4,00	447.72 4,00	470.11 0,20	492.49 6,40	514.88 2,60	447.724, 00	447.72 4,00	9.120,0 0	492.496, 40	100,00	100,00	1,94	100,00
	Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penumpang Datang	32.301, 00	58.447, 00	59.093, 02	59.739, 04	60.385, 06	32.301,0 0	58.447, 00	58.447, 00	59.739,0 4	100,00	100,00	98,91	100,00
	Jumlah Penumpang Berangkat	33.266, 00	15.247, 00	15.912, 32	16.577, 64	17.242, 96	33.266,0 0	15.247, 00	15.247, 00	16.577,6 4	100,00	100,00	95,82	100,00
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	107.48 7,00	122.08 9,00	124.23 8,74	126.38 8,48	128.53 8,22	107.487, 00	122.08 9,00	122.08 9,00	126.388, 48	100,00	100,00	98,27	100,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian				Persentase Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Jumlah barang muat (ton)	77.498,00	39.268,00	40.817,96	42.367,92	43.917,88	77.498,00	39.268,00	100.059,00	42.367,92	100,00	100,00	245,13	100,00
3.2.3	Jenis dan jumlah bank dan cabang	-	-				-							
	Bank Umum	17,00	17,00	17-20	17-20	17-20	17,00	11,00	19,00	19,00	100,00	64,71	111,76	111,76
	Bank Perkreditan Rakyat	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3,00	3,00	4,00	100,00	75,00	75,00	100,00
3.2.4	Jumlah Restoran/Rumah Makan	-	-				-							
	- Jumlah Rumah Makan	16,00	16,00	20-25	25-30	35-40	16,00	16,00	62,00	75,00	100,00	100,00	206,67	250,00
3.2.5	Jumlah Penginapan/Hotel	40,00	45,00	40-45	40-45	40-45	40,00	45,00	40,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.6	Persentase RT Berakses Air bersih	86,99	89,64	89,68	89,73	89,77	86,99	89,64	93,17	91,91	100,00	100,00	103,89	102,43
3.2.7	Rumah tangga pengguna listrik	93,71	98,70	93-95	93-95	93-95	93,71	98,70	98,28	99,94	100,00	100,00	103,45	105,20
3.3.	Fokus Iklim Berinvestasi	-												
3.3.1	Angka Kriminalitas	13,00	13,00	10-13	10-13	10-13	13,00	13,00	19,42	24,74	0,00	0,00	49,35	90,30
3.3.2	Jumlah Demonstrasi	6,00	6,00	6-10	6-10	6-10	6,00	6,00	6,00	8,00	0,00	0,00	-53,85	-38,46
3.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	-					-							
3.4.1	Tingkat Ketergantungan	-					-							
	- Rasio Ketergantungan	35,35	43,53	43,47	43,41	43,34	35,35	43,53	43,43	43,38	100,00	100,00	99,90	99,93

4.2 ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis (*strategic issues*) adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dalam penyusunan RPD mengikuti model penyusunan RPJMD, dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional, Provinsi dan daerah, serta pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Sementara penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan khususnya Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Morowali. Melengkapi penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya, pada proses penyusunan RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 dilakukan juga penelaahan terhadap isu strategis Global yang mempengaruhi Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dihasilkan komprehensif dengan mempertimbangan kondisi eksternal yang ada sebagai dinamika internasional, nasional dan regional.

4.2.1 Isu Strategis Global

4.2.1.1 Krisis Perekonomian Global

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Betapa mengglobalnya dunia saat ini khususnya mengenai pergerakan orang, barang dan jasa semakin tanpa mengenal batas wilayah, pertimbangan ekonomi adalah alasannya. Perekonomian global sampai akhir tahun 2022 ditandai ketidakpastian dan menuju pada krisis ekonomi global berbagai kejutan telah menghantam dunia yang terjadi sejak tahun 2020.

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2022 mencapai 3,4 persen dan tumbuh melambat menjadi 2,9 persen pada 2023. Kemudian meningkat menjadi 3,1 persen pada 2024. Berbagai negara mengalami kelesuan ekonomi. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia yang berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah-daerah. Beberapa faktor pemicu resesi ekonomi global yang dikhawatirkan akan terjadi tahun depan, yaitu:

1. Kondisi Pasca Pandemi Covid-19, walaupun sudah mulai mereda dan banyak negara yang telah membebaskan warganya untuk beraktivitas seperti biasa. Namun pada saat meluasnya wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2023, aktivitas ekonomi global menurun drastis. Setiap negara lebih fokus untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19 dan menerapkan pembatasan aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi secara global pun mengalami kontraksi. Pada saat yang sama, banyak negara melakukan proteksi atas hasil pangan untuk mengantisipasi wabah Covid-19 yang berkepanjangan dan berakibat pada meningkatnya harga pangan karena kurangnya suplai. Indonesia juga sempat mengalami resesi ekonomi pada akhir tahun 2020 berlanjut sampai akhir tahun 2022.
2. Perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak bulan Februari lalu, telah menghilangkan PDB global hingga USD2,8 triliun. Perang Rusia- Ukraina mengganggu rantai pasok global sehingga menimbulkan krisis terutama di sektor pangan dan energi, yang pada akhirnya mengakselerasi laju inflasi. Perang Rusia-Ukraina merupakan factor utama penyebab terjadinya resesi ekonomi global yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023-2024 mendatang.
3. Tingginya tingkat inflasi. Dalam laporan *World Economic Outlook* edisi Oktober 2022, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan laju inflasi global mencapai 8,8% pada 2022 dan akan menurun pada tahun 2023 yaitu menjadi 6,5%. Inflasi Indonesia menurut Bank Indonesia diproyeksikan menurun dan kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5 \pm 1\%$ pada 2024. Menyikapi hal ini, beberapa negara sudah menarik insentif moneter dan fiskalnya sebagai upaya mengatasi risiko dari inflasi yang terus meningkat.
4. Kenaikan suku bunga acuan. Bank sentral di seluruh dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga acuan sejak semester kedua tahun ini, seperti Bank of England dan the Federal Reserve (The Fed).

Tekanan inflasi di negara Barat dan AS membuat bank sentral terus menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Demikian halnya kenaikan suku bunga acuan di negara-negara anggota G20 seperti Brasil, India, dan Indonesia. Selama tahun 2022 ini, Bank of England telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 200 basis poin. Sementara The Fed telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 300 basis poin. Merespons hal tersebut, Bank Indonesia ikut menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% pada bulan November 2022. Kenaikan suku bunga acuan secara bersamaan yang dilakukan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat menyebabkan terjadinya resesi ekonomi global.

Di negara berkembang, tantangan terbesar dalam kebijakan ekonomi adalah dalam mengoptimalkan populasi. Kerja sama internasional juga diperkuat baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Kerjasama internasional ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berimbang, dan berkesinambungan, dengan tetap menjaga resiliensi perekonomian. Ketidakpastian global tahun 2023 sangat mengkhawatirkan banyak negara, termasuk Indonesia. Akibat kenaikan harga energi hingga suku bunga acuan di berbagai negara, inflasi menjadi melonjak. Dimana oleh Bank Dunia terdapat 5 negara dengan lonjakan inflasi hingga di atas 80 persen. Sementara inflasi Indonesia per November 2022 mencapai 5,42 persen. Bahwa ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023-2024 bukanlah tantangan yang mudah, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global berpotensi berimbas pada perekonomian domestik. Disamping tantangan geopolitik dan resesi ekonomi tersebut, beliau mengatakan dunia juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.

4.2.1.2 Sustainable Development Goals (SDG's)

Isu strategis global mengambil sumber salah satunya dari *Sustainable Development Goal's (SDG's)* sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun TPB dimaksud memberikan panduan dalam pembangunan secara global yang berkelanjutan yang mencakup 4 (empat) dimensi (ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola pemerintahan) yang terdiri dari:

1. Tujuan 1 tanpa kemiskinan;
2. Tujuan 2 tanpa kelaparan;
3. Tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera;
4. Tujuan 4 pendidikan berkualitas;
5. Tujuan 5 kesetaraan gender;
6. Tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak;
7. Tujuan 7 energi bersih dan terjangkau;
8. Tujuan 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. Tujuan 9 industri, inovasi dan infrastruktur;
10. Tujuan 10 berkurangnya kesenjangan;
11. Tujuan 11 kota dan permukiman yang berkelanjutan;
12. Tujuan 12 konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13. Tujuan 13 penanganan perubahan iklim.

Pembangunan dan aktivitas masyarakat juga telah mengakibatkan berbagai masalah lingkungan (*environmental problems*) dan berbagai gangguan kesehatan yang diakibatkan buruknya kondisi dan kualitas lingkungan. Perkembangan produksi kemudian dipicu oleh peningkatan dan gaya hidup konsumsi masyarakat telah mengakibatkan produksi sampah melimpah di berbagai negara. Produksi sampah yang melimpah ini tanpa diikuti oleh pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sampah menumpuk dan berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang (*developing countries*).

Perilaku manusia dan kegiatan ekonomi juga telah menghasilkan emisi yang terus meningkat di berbagai negara. Polusi udara dan air telah mengakibatkan merebaknya berbagai penyakit, bahkan kematian. Penurunan kondisi sanitasi dan makanan yang tidak sehat telah mengakibatkan kematian sebanyak 1,7 miliar manusia setiap tahunnya. Polusi udara di perkotaan telah mengakibatkan kematian sekitar 800 ribu orang setiap tahunnya. Pencemaran tembaga (*lead*) telah mengakibatkan 13 juta manusia cacat, dalam bentuk keterbelakangan mental, dan penyakit kardiovaskular

Upaya mengintegrasikan pencapaian SDGs di Indonesia dimulai dengan diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan tersusunnya Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan berkelanjutan (RAN-TPB).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Perpres tersebut menekankan

keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda SDGs. Perpres tersebut juga menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi pelaksanaan agenda SDGs di Indonesia ke depannya.

Presiden RI Kembali menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan TPB.

Melalui Perpres 111/2022, presiden telah menetapkan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024. TPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perpres 111/2022 bertujuan untuk:

- a) Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
- b) Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
- c) Menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
- d) Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dengan telah ditetapkannya Perpres 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diharapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional Tahun 2024 dapat tercapai dengan lebih cepat dan lebih terarah sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Pelaksanaan SDG's berarti juga melaksanakan tujuan pembangunan nasional dan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Untuk keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi Indonesia, SDG's tidak hanya relevan bagi komitmen global, tapi juga merupakan panduan untuk menjadi negara maju. Hal ini juga menunjukkan pemerintah mengambil tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan agenda SDG's.

SDGs sudah mengkomodasi secara holistik berbagai pilar pembangunan, tidak hanya pilar ekonomi dan sosial, namun juga pilar lingkungan serta hukum dan tata kelola. Dengan adanya pandemi covid

19 yang mulai dirasakan masyarakat global pada akhir tahun 2019 dan berlanjut sampai akhir 2020 namun sampai akhir tahun 2022 masih dirasakan dampaknya, maka tentunya tidak dapat dihindari lagi akan mempengaruhi berbagai skema pembangunan global dan nasional. Sumber daya yang ada sekarang ini akan lebih banyak diprioritaskan upaya pemulihan akan mempengaruhi pencapaian 14 tujuan pembangunan sampai tahun 2024.

4.2.1.3 Degradasi Lingkungan Hidup

Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk di dalamnya, sehingga perlu langkah terpadu yang di penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya. Perlindungan lapisan ozon dan perubahan iklim (*Kyoto Protocol*), keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), polusi dari kapal, dan perlindungan kehidupan laut.

Isu internasional tentang lingkungan hidup adalah perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*), sebagai akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), kenaikan temperatur serta terjadi pergeseran musim. Perubahan iklim menjadi agenda global akhir-akhir ini karena kegiatan manusia semakin banyak menggunakan energi yang terkait dengan bahan bakar yang berasal dari fosil dan alih guna lahan dari hutan menjadi permukiman. Perubahan iklim yang dikhawatirkan sejumlah pihak, terutama yang berasal dari kegiatan manusia (*man-made/anthropogenic*), bukan karena adanya fenomena alam seperti letusan gunung berapi dan sebagainya.

Masih banyak sejumlah pihak, baik dari kalangan pemerintah, pelaku bisnis dan industri, maupun masyarakat, yang belum menyadari bahwa fenomena degradasi lingkungan hidup telah terjadi seiring dengan intensitas kegiatan manusia di berbagai aspek kehidupan. Pengabaian *ecological/environmental truth* sebagai fakta bahwa dunia alam semesta tempat kita bermukim akan rusak dan menimbulkan dampak bencana bagi kelangsungan kehidupan di muka bumi ini karena ulah manusia sendiri terus terjadi. Kegiatan-kegiatan manusia

tersebut, yang berakibat meningkatnya efek gas rumah kaca, diakibatkan karena adanya emisi gas-gas CO (*karbon dioksida*), CH (*metana*), NO (*nitrogen oksida*), PFC (*perflourokarbon*), HFC (*hidroflourokarbon*), dan SF (*sulfur heksaflorida*). Gas-gas tersebut dapat mengakibatkan peningkatan suhu bumi karena bersifat menahan radiasi gelombang panjang yang bersifat panas.

Fakta yang ditunjukkan Panel Ahli Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) terjadi anomali kenaikan suhu akibat adanya efek rumah kaca pada akhir abad ke-21, ada tren kenaikan 2-4,5 derajat celsius. Bila hal ini dibiarkan saja tanpa ada perubahan perilaku manusia, berbagai bencana besar akan terjadi karena anomali perubahan iklim akan memicu kekacauan pada keberlanjutan industri pangan, pertanian, dan kenaikan air permukaan laut karena mencairnya es di kutub. Oleh karena itu perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik

Berbagai kerusakan lingkungan yang dirasakan saat ini ternyata memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masa kini, lalu kemudian muncul keinginan untuk memperbaiki. Hal ini terjadi silih berganti sesuai dengan zamannya yang merupakan siklus hidup dari masa ke masa, dari zaman ke zaman dan dari peradaban ke peradaban. Kondisi memasuki peralihan dari fase buruknya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan menjadi fase positif terhadap lingkungan. Sekarang ini umumnya manusia telah menyadari pentingnya alam untuk kelangsungan hidup. Perlahan manusia memperbaiki alam yang telah rusak dan mengurangi hal-hal yang merugikan alam. Manusia melakukan upaya penyelamatan hutan dan makhluk hidup lain yang menggantungkan kehidupannya pada alam. Namun, banyak pula manusia yang terus mencemari alam tanpa memikirkan risiko yang ditimbulkan ke depan. Meski memang tidak dapat dipungkiri bahwa mengembalikan keseimbangan alam merupakan pekerjaan yang sulit dan terkadang butuh biaya tidak sedikit, namun jika ada tekad dan komitmen, maka insya Allah pasti dapat dilakukan untuk tujuan dan keinginan terciptanya lingkungan hidup yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan.

Untuk membatasi peningkatan suhu global dilakukan berbagai upaya untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara berkembang harus sesuai

dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan. Upaya mempertahankan lingkungan hidup agar kondisi lingkungan hidup yang baik dapat dinikmati oleh generasi saat ini hingga generasi mendatang. Oleh karena itu, isu lingkungan hidup menjadi isu utama dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).

4.2.1.4 Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas negara. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Kedepannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

Percepatan transformasi digital menjadi suatu keniscayaan dalam pembangunan di daerah. Adanya revolusi industri 4.0 dan *society 5.0* merubah paradigma kita dalam berinteraksi dengan masyarakat dunia

(*netizen*) melalui wahana internet ataupun media teknologi komunikasi dan informasi yang sampai dengan saat ini masih terus berkembang dengan pesat. Revolusi industri ini sendiri lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi tinggi (*high tech*) dalam penyelesaian terhadap suatu pekerjaan, seperti: penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligent*), komputasi awan (*cloud computing*), *internet of things* (IoT), pemanfaatan *big data* maupun *augmented reality* (AR) dan *virtual reality* (VR). Begitu pula dari sisi keuangan, dimana penggunaan *virtual account* dalam transaksi pembayaran juga sudah jamak dimanfaatkan di saat ini. Ditambah lagi dengan adanya transaksi keuangan dengan menggunakan *cryptocurrency* yang saat ini telah mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang di Indonesia untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Adapun untuk *society 5.0* lebih berfokus pada komponen manusia selaku pelaku maupun pemanfaat dari revolusi industri 4.0. Sehingga, hal ini menuntut tersedianya sumberdaya manusia yang kreatif, inovatif dan melek teknologi guna mampu berkompetisi dan unggul secara global (*compete and win globally*).

Selain itu, bagaimana mengantisipasi telah berjalannya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasi awan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada industri pangan, makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional, Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Morowali serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru.

Terdapat beberapa isu strategi global yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi atau digitalisasi pada periode 2023-2026, di antaranya adalah:

1. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) terus memperoleh perhatian dan investasi yang besar dari berbagai sektor. Pada periode 2023-2026, diperkirakan bahwa AI akan semakin terintegrasi dan menjadi bagian penting dari berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang Ilmu pengetahuan, pendidikan, industri, kesehatan, dan pemerintahan. Namun, hal ini juga akan menimbulkan tantangan seperti hilangnya banyak pekerjaan akibat otomatisasi, berkembangnya asisten pintar dan kekhawatiran akan keamanan data yang dihasilkan oleh AI.
2. Internet of Things (IoT) Internet of Things (IoT) atau jaringan perangkat yang terhubung satu sama lain terus berkembang dan semakin meluas di seluruh dunia. Akan ada peningkatan jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan IoT, termasuk perangkat wearable, kendaraan terhubung, dan rumah pintar. Namun, dengan

- semakin banyaknya perangkat yang terhubung, masalah privasi dan keamanan data menjadi semakin kritis. Selain itu, standar pengembangan dan interoperabilitas akan menjadi kunci dalam menjaga keberhasilan IoT.
3. Perkembangan telekomunikasi sampai pada 5G dan Internet Cepat Pada periode 2023-2026, teknologi jaringan 5G akan semakin berkembang dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Teknologi ini akan memungkinkan konektivitas yang lebih cepat dan lebih handal, serta memungkinkan penggunaan teknologi yang lebih canggih seperti AR/VR dan IoT. Namun, peningkatan konektivitas yang lebih cepat juga akan mempercepat laju pertumbuhan konten digital, yang memicu kebutuhan akan solusi keamanan digital yang lebih kuat.
 4. Blockchain Teknologi blockchain juga akan terus berkembang pada periode 2023-2026. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi ini telah menjadi pusat perhatian karena kemampuannya memfasilitasi transaksi keuangan dan non-keuangan yang aman dan transparan. Pada periode tersebut, teknologi blockchain diperkirakan akan semakin digunakan dalam industri keuangan, logistik, dan lain-lain. Namun, tantangan terkait regulasi dan adopsi massal masih menjadi kendala bagi pengembangan teknologi ini.

Adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat. Keamanan dan Privasi Data Tantangan keamanan dan privasi data akan tetap menjadi isu strategi global pada periode 2023-2026. Semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke internet dan penggunaan teknologi yang semakin canggih menimbulkan risiko ancaman keamanan dan privasi data. Peningkatan pemahaman dan peraturan yang lebih ketat tentang pengelolaan data dan privasi akan menjadi semakin penting di masa depan.

Dalam rangka menghadapi isu strategis global yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi atau digitalisasi pada periode 2024-2026, diperlukan kerjasama dan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat.

4.2.1.5 Ketahanan Pangan

Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat yang diikuti oleh semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian telah berdampak pada semakin terbatasnya ketersediaan pangan dunia, sehingga perlu upaya-upaya yang berkekanjutan untuk memperbaiki struktur produksi pangan yang diikuti dengan menekan laju pertumbuhan penduduk.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996).

Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, bahkan dapat bejolok secara sosial dan politik apabila ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.

Menurut *FAO Agricultural and Development Economics Division* (June 2006) tentang “*Food Security*”, ketahanan pangan dimaknai sebagai ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan juga merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Penilaian ketahanan dapat dilihat dari kacamata keswadayaan atau keswasembadaan perorangan (*self-sufficiency*) dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko yang dihadapi oleh suatu negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa hari ini masih banyak orang lapar. Salah satu ancaman serius dan ditakuti oleh umat manusia di muka bumi ini adalah terjadinya kelangkaan akan kecukupan pangan. Kelangkaan pangan ini telah menimbulkan persoalan-persoalan sosial dan politik yang serius. Di negara-negara Timur Tengah dan Afrika menjadi pengalaman yang berharga. Tingginya harga pangan menjadi salah satu sebab munculnya gerakan reformasi yang radikal. Mozambique adalah salah satu negara contoh yang mengalami persoalan pangan dan berakhir pada ketidakstabilan politik.

Adanya dampak sosial yang cukup memprihatinkan dari meroketnya harga pangan dunia menciptakan kerusuhan-kerusuhan horizontal dan sekaligus mengancam stabilitas keamanan negara itu. Tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pangan yang semakin mahal mendorong permintaan akan peningkatan pendapatan demi bertahan dalam situasi ekonomi dan politik yang sulit. Berdasarkan laporan *Food Security Information Network* (FSIN), kemungkinan krisis pangan dunia semakin memburuk, dan tampaknya

keadaan ini akan bertambah parah di sejumlah tempat di dunia, khususnya di beberapa negara yang ketahanan pangannya rendah, sehingga berpotensi menghadapi tingginya risiko kelaparan.

Masalah ketahanan pangan global merujuk pada tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh dunia dalam memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang cukup dan berkelanjutan terhadap pangan yang aman, terjangkau, dan terjangkau. Berikut adalah beberapa masalah utama yang menyebabkan ketidakamanan pangan global:

1. Ketergantungan pada sistem pangan global: Sistem pangan global saat ini sangat bergantung pada ekonomi pasar, teknologi modern, dan globalisasi. Hal ini memicu ketergantungan pada beberapa negara dan perusahaan untuk memproduksi, mengimpor dan mengekspor bahan makanan tertentu. Ketergantungan ini dapat membuat negara-negara yang lebih miskin terlalu tergantung pada impor pangan yang mahal dan dapat membuat mereka lebih rentan terhadap fluktuasi harga.
2. Perubahan iklim mempengaruhi produksi pangan di seluruh dunia melalui perubahan curah hujan, suhu dan pola cuaca yang tidak terduga. Perubahan ini dapat mengurangi produktivitas pertanian dan dapat memengaruhi ketersediaan pangan di seluruh dunia.
3. Penurunan produktivitas pertanian disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya teknologi modern, masalah sanitasi dan kesehatan hewan, penggunaan pupuk yang tidak tepat, dan ketidakmampuan petani untuk mengakses pasar yang lebih luas.
4. Konflik dan krisis politik di beberapa negara dapat mengganggu produksi dan distribusi pangan, serta dapat mengurangi akses pangan bagi populasi yang terkena dampaknya.
5. Kesenjangan sosial dan ekonomi: Kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan terjangkau. Ketidaksetaraan ini dapat merusak masalah ketahanan pangan di seluruh dunia dan dapat menyebabkan malnutrisi dan kelaparan yang lebih besar di kalangan kelompok miskin.

4.2.1.6 Keterbatasan Energi

Isu global terkait keterbatasan energi adalah kekhawatiran dunia atas yang semakin menipisnya sumber daya energi yang dapat memperbesar seperti minyak, gas alam, dan batu bara. Permasalahan ini semakin kompleks karena konsumsi energi global yang semakin meningkat, terutama di negara-negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat.

Isu internasional energi dan sumberdaya mineral terkait ketahanan energi (*energy security*), transisi energi (*energy transitions*), dan kerja sama (*partnership*). juga pengembangan energi baru terbarukan, pertambangan ilegal dan pertambangan berkelanjutan. Minyak merupakan salah satu energi yang masih tetap dipertahankan dan dibutuhkan, namun saat ini dunia dihadapkan pada produksi minyak yang terus menurun dan sebaliknya kebutuhan akan konsumsi minyak terus meningkat sebanding dengan jumlah populasi penduduk. Berangkat dari peningkatan tajam harga minyak dunia yang pernah terjadi waktu lalu, telah memunculkan adanya isu keamanan energi kini telah menjadi salah satu isu terhangat dalam agenda keamanan global dan hubungan internasional.

Keterbatasan energi memiliki dampak yang sangat besar pada keberlanjutan ekonomi global, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Ketergantungan yang tinggi pada sumber daya energi fosil juga berdampak pada perubahan iklim, dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca dan efek pemanasan global yang berdampak pada kerusakan lingkungan, peningkatan tingkat udara laut, perubahan pola cuaca, dan bencana alam yang semakin sering terjadi.

Untuk mengatasi isu global ini, banyak upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk pengembangan teknologi energi alternatif seperti energi surya, angin, dan udara yang dapat digunakan sebagai alternatif dari sumber daya energi fosil. Selain itu, negara-negara juga melakukan penghematan energi dan mengembangkan kebijakan energi yang berkelanjutan untuk mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi energi dalam industri, transportasi, dan rumah tangga.

Namun, tantangan utama dalam mengatasi keterbatasan energi tergantung pada kebijakan dan aksi bersama dari seluruh dunia. Sebagai isu global, keterbatasan energi membutuhkan kerjasama internasional dan pengembangan solusi yang dapat diadopsi secara luas untuk memastikan ketersediaan energi yang berkelanjutan di masa depan.

4.2.1.7 Dunia menghadapi ancaman Bencana Alam Global

Sejak masa lalu manusia telah menghadapi bencana alam yang berulang kali melenyapkan populasi mereka. Pada zaman dahulu, manusia sangat rentan akan dampak bencana alam dikarenakan keyakinan bahwa bencana alam adalah hukuman dan simbol kemarahan sang maha pencipta. Semua peradaban kuno menghubungkan lingkungan tempat tinggal mereka dengan dewa atau tuhan yang dianggap manusia dapat memberikan kemakmuran maupun

kehancuran. Kata bencana dalam Bahasa Inggris "disaster" berasal dari kata Bahasa Latin "dis" yang bermakna "buruk" atau "kemalangan" dan "aster" yang bermakna "dari bintang-bintang". Kedua kata tersebut jika dikombinasikan akan menghasilkan arti "kemalangan yang terjadi di bawah bintang", yang berasal dari keyakinan bahwa bintang dapat memprediksi suatu kejadian termasuk peristiwa yang buruk.

Menjelang akhir abad ini, banyak bagian dunia akan menghadapi berbagai bencana alam sekaligus, yang disebabkan perubahan iklim. Menurut para ahli, bencana yang dimaksud mulai dari gelombang panas dan kebakaran, sampai hujan lebat dan ombak besar bahkan tsunami yang akan menghantam kawasan pantai. Manusia akan menghadapi bencana besar yang disebabkan oleh interaksi berbagai peristiwa alam yang disebabkan peningkatan suhu bumi. Tingkat karbon dioksida, gas methana dan gas-gas rumah kaca lainnya yang dihamburkan ke atmosfer telah memicu berbagai bencana alam yang menimbulkan kesengsaraan pada manusia, akibat Perubahan Iklim Peningkatan suhu bumi memicu musim hujan yang sulit diprediksi, kemarau panjang, gelombang panas, dan kebakaran hutan seperti yang kini sedang terjadi di negara bagian USA, wilayah Eropa dan Asia. Sebaliknya, di kawasan yang biasanya lebih basah, justru terjadi hujan lebat dan banjir. Di laut, peningkatan suhu memicu badai yang semakin besar yang menimbulkan bencana karena permukaan air laut yang terus naik. Sampai saat ini para pakar hanya mempelajari dampak perubahan iklim ini satu per satu. Mereka belum mempertimbangkan kemungkinan bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim ini terjadi sekaligus.

Perjanjian iklim yang ditandatangani di Paris tahun 2015 oleh 195 negara menyerukan supaya dilakukan usaha terkoordinir untuk mencegah kenaikan suhu bumi diatas dua derajat Celsius menjelang akhir abad ini. Kalau emisi gas karbon dioksida berlanjut pada tingkat yang sekarang, kota-kota didunia kemungkinan akan dilanda empat jenis bencana alam sekaligus. Termasuk di antaranya adalah hujan lebat, kenaikan permukaan laut, dan ombak besar yang akan menghantam kota itu. Kalau itu terjadi maka kawasan-kawasan pantai di daerah tropis akan menghadapi bencana paling besar.

Cuaca ekstrem, angin topan, dan tornado adalah beberapa bencana alam yang sering terjadi pada tahun 2019-2022 diperkirakan akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana-bencana ini sering kali dikaitkan dengan perubahan iklim global. Oleh karena bencana alam adalah sesuatu yang kompleks, dan perubahan iklim dapat memperparah kondisinya. Pemanasan global yang terjadi sebagai salah satu efek perubahan iklim menyebabkan kandungan uap air di atmosfer semakin meningkat. Semakin tingginya

kadar uap air akan mempengaruhi tingkat kelembapan di atmosfer. Kondisi atmosfer yang lembap akan memicu terjadinya badai besar yang terjadi. Ancaman badai semakin diperparah oleh berkurangnya perbedaan suhu antara ekuator dengan kutub. Akibat adanya *global warming*, temperatur di kutub mengalami lebih banyak peningkatan jika dibandingkan dengan perubahan temperatur yang terjadi di ekuator. Peningkatan suhu yang sangat drastis di kutub membuat perbedaan suhu antara ekuator dengan kutub menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini sebenarnya membuat potensi kejadian badai dengan intensitas kecil semakin jarang terjadi. Namun, secara bersamaan, hal tersebut ternyata meningkatkan ancaman terbentuknya badai berintensitas tinggi di atmosfer bumi.

Gempa bumi dan likuifaksi yang maha dasyat terjadi di Palu-Sulawesi Tengah dan di Turki dan Suriah merupakan contoh nyata dari ancaman bencana alam global yang dihadapi dunia saat ini. Isu ini sangat penting karena bencana alam dapat berdampak besar pada kehidupan manusia, ekonomi, lingkungan, dan keberlangsungan hidup planet bumi.

Beberapa ancaman bencana alam pasca gempa bumi dan bencana lainnya yang sering terjadi antara lain a) Kerusakan lingkungan dan kehilangan habitat menyangkut Bencana alam seperti gempa bumi menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, dan kehilangan habitat bagi makhluk hidup. Dampak ini dapat mengancam mempertahankan spesies tertentu dan menyebabkan efek domino pada ekosistem secara keseluruhan; b) Kesehatan dan kesejahteraan manusia yaitu Bencana alam global seperti gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Hal ini dapat mengakibatkan penyebaran penyakit, kekurangan pangan dan air, serta kondisi sanitasi yang buruk; c) Gangguan ekonomi menyangkut pasca Bencana alam dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara atau wilayah secara signifikan. Kerusakan infrastruktur, perkebunan, dan fasilitas produksi dapat mempengaruhi produksi dan distribusi barang dan jasa. Hal ini dapat memicu kenaikan harga dan inflasi, serta mengurangi pendapatan dan lapangan kerja; d) Konflik dan keamanan yaitu Bencana alam dapat memicu konflik dan keamanan. Ketika masyarakat merasa tidak diuntungkan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini dapat memicu ketegangan sosial dan konflik antarkelompok. Selain itu, situasi darurat seperti ini juga dapat memungkinkan kelompok-kelompok ekstrimis untuk memperluas pengaruh mereka; e) Perubahan iklim dimana Bencana alam global seperti gempa bumi berkontribusi pada perubahan iklim. Dimana, gempa bumi dapat menyebabkan

aktivitas vulkanik, yang dapat melepaskan efek rumah kaca ke atmosfer dan mempercepat pemanasan global.

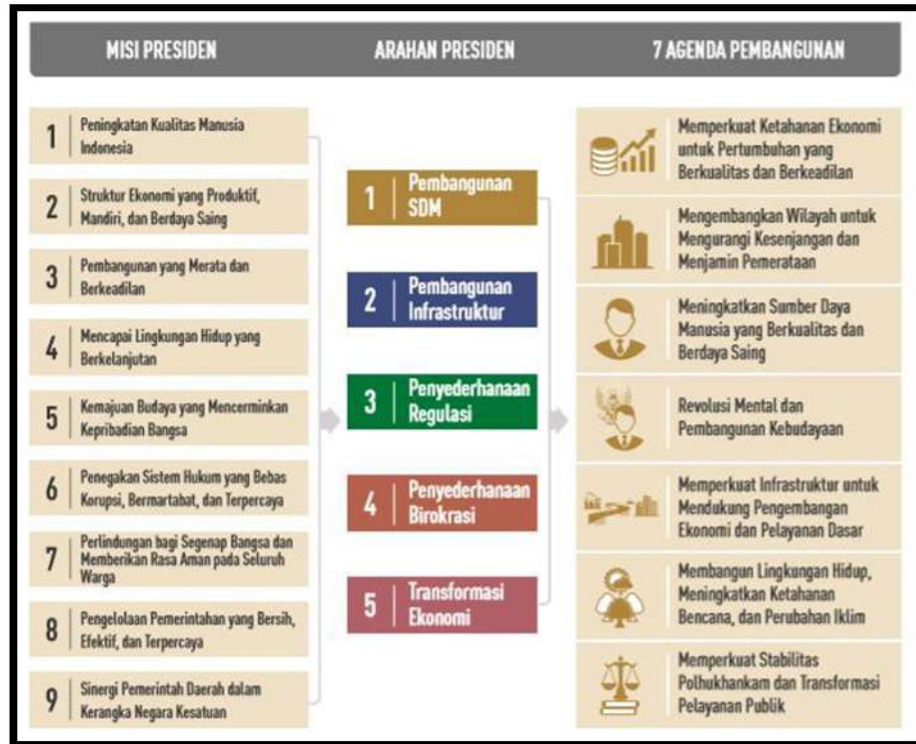
Oleh karena itu, penting bagi dunia secara global untuk meningkatkan kesiapan dan ketahanan wilayah dalam menghadapi ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, Likuifaksi, tanah longsor, banjir bandang, gunung berapi dan lain-lain baik melalui upaya penanggulangan, adaptasi, maupun penanganan darurat. Upaya ini harus dilakukan secara kolaboratif antar negara, antar wilayah provinsi, Kabupaten/Kota dan antar sektor untuk memastikan keberlangsungan hidup planet kita dan kesejahteraan umat manusia di masa depan.

4.2.2 Telaahan Kebijakan Nasional

4.2.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah. Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah. Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi prioritas nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional.



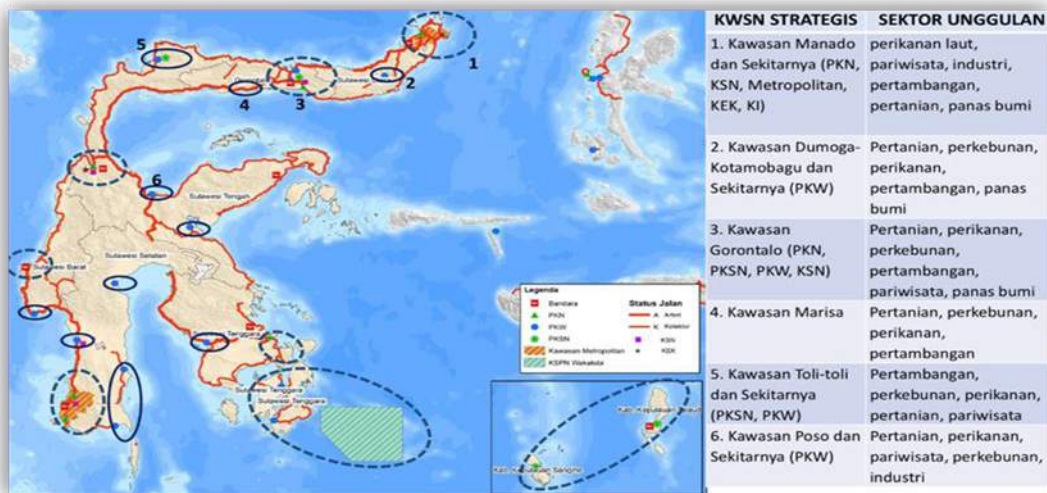
Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Gambar 4.1

Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Dalam 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Kabupaten Morowali diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 juga memuat skenario rencana pembangunan wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024 dimana tema pembangunan wilayah yaitu “Pusat lumbung pangan (padi dan jagung) nasional, perkebunan kakao, serta pengembangan industri pengolahan” dimana sektor utama pendukung pembangunan wilayah difokuskan pada pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan konstruksi.



Gambar 4.2

Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pulau Sulawesi

Berdasarkan tema pembangunan wilayah Sulawesi tersebut, skenario pengembangan wilayah Sulawesi Tengah khususnya Kawasan Tolitoli dan sekitarnya serta Kawasan Morowali merupakan wilayah yang berada pada PKW Poso dan sekitarnya dititik beratkan pada sektor pertambangan, perkebunan, perikanan peternakan, pariwisata dan pertambangan.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional karena terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia. Selain itu, Sulawesi Tengah juga memiliki akses ke laut dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti tambang, perkebunan, dan pariwisata. Dalam pembangunan nasional, Sulawesi Tengah diharapkan dapat berperan sebagai pusat pembangunan ekonomi dan industri di wilayah Indonesia bagian timur.

Kabupaten Morowali bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional karena wilayahnya menjadi pusat pertambangan industri dan pengolahan bijih nikel. Kabupaten Morowali memiliki tambang nikel salah satu terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Selain itu, kabupaten ini juga memiliki pelabuhan laut yang cukup besar, sehingga memudahkan proses ekspor-impor barang. Dalam pembangunan nasional, Kabupaten Morowali diharapkan dapat menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Pemerintah pusat juga telah menetapkan beberapa proyek strategis nasional di provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali yang berkaitan dengan pengembangan industri hilirisasi atau pengolahan

sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah tinggi. Salah satunya adalah proyek penambangan dan pengolahan nikel berbasis rendah karbon dan terintegrasi yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia dan IMIP.

Disamping itu Kabupaten Morowali juga memiliki potensi pariwisata yang menarik untuk dikembangkan seperti **pulau sembori** yang belum dikembangkan secara baik sebagai suatu Kawasan Pariwisata Nasional.

4.2.2.2 Krisis Ekonomi Nasional

Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul “*Is a Global Recession Imminent?*” memprediksi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2023-2024 mendatang. Prediksi tersebut, terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi diawal tahun 2023, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi.

Resesi adalah suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk, yang terlihat dari produk domestik bruto (PDB) negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Sedangkan melansir Forbes, resesi adalah penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun

Ketidakpastian global saat ini sangat mengkhawatirkan banyak negara, termasuk Indonesia. Akibat kenaikan harga energi hingga suku bunga acuan di berbagai negara, inflasi menjadi melonjak. Sekurangnya diakhir tahun 2022 sudah terdapat 5 negara dengan lonjakan inflasi hingga di atas 80%. Sementara inflasi Indonesia per November 2022 mencapai 5,42% dan diprediksi tembus 6 persen di akhir tahun ini. Pemerintah Indonesia melalui pernyataan Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 bukanlah tantangan yang mudah, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global berpotensi berimbas pada perekonomian domestik. Disamping tantangan geopolitik dan resesi ekonomi tersebut, diprediksi dunia juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.

4.2.2.3 Situasi Pangan Nasional

Ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi (*basic needs*) dan kesejahteraan masyarakat (*people welfare*), karena hal tersebut akan ikut menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang

merupakan negara kepulauan. Letak geografis dan luas wilayah Indonesia menjadi penyebab adanya perbedaan kondisi tanah dan kecocokan terhadap jenis-jenis tanaman termasuk sumber pangan yang dihasilkan. Perbedaan budaya bercocok tanam dan makanan pokok antar daerah juga ikut andil mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih komoditas pangan yang akan di konsumsi.

Secara umum potensi sumber pangan yang dimiliki Indonesia sebagai pilihan konsumsi masyarakat terbilang cukup banyak, yaitu ada 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayur-sayuran, 110 jenis rempah-rempahan dan bumbu-bumbuan, 40 jenis bahan minuman serta 1.260 jenis tanaman obat. Hal ini membuktikan bahwa bangsa kita sebenarnya merupakan negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme, serta ekosistem dengan proses ekologi yang berlangsung.

Akibat belum maksimalnya pengelolaan hasil komoditas pangan menyebabkan kondisi ketahanan pangan nasional saat ini dirasakan masih jauh dari yang diharapkan. Meskipun setiap tahunnya angka produktivitas padi Indonesia selalu ada peningkatan antara 1-3 persen atau selama 30 tahun terakhir produksi panen padi telah meningkat dua kali lipat, bahkan untuk produksi jagung bisa meningkat sampai empat kali lipat. Sehingga pencapaian prestasi tersebut masih dirasakan belum signifikan, mengingat berdasarkan hitungan angka yang dihasilkan dari impor beberapa komoditas bahan pangan yang masuk ke Indonesia, tercatat cukup tinggi angka peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bangsa kita masih mengalami permasalahan di sektor ketahanan pangan.

4.2.2.4 Ketimpangan Infrastruktur

Buruknya infrastruktur di Indonesia mengakibatkan daya saing (*competitiveness*) bangsa secara keseluruhan masih rendah. Infrastruktur berada di posisi ketiga sebagai masalah utama yang mengganggu kemudahan berbisnis (*doing business*) di samping birokrasi yang tak efisien dan korupsi. Meskipun demikian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur. Infrastruktur Indonesia berada di peringkat 82, dibandingkan Cina urutan 74, Thailand urutan 61 dan Malaysia urutan 25. Indonesia pun jauh dari negeri jiran Singapura yang berada urutan 5.

Kendala dan permasalahan pembangunan infrastruktur di Tanah Air yakni Pertama, tingkat elektrifikasi nasional baru mencapai 72,95 persen dengan rasio jumlah desa berlistrik baru mencapai 92,58 persen. Ke-dua, terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah

terhadap penguasaan, legalitas lahan, dan pembiayaan perumahan. Ke-tiga, aksesibilitas dan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi yang belum memadai. Ke-empat, rehabilitasi jaringan irigasi belum mampu mengimbangi degradasi kondisi jaringan yang mencapai 340 ribu ha/tahun. Ke-lima, tingginya laju konversi lahan pertanian menjadi lahan perkotaan dan Industri serta perkebunan terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Ke-enam, ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika belum memadai yang ditandai dengan terbatasnya infrastruktur broadband dan belum terhubungnya Pulau Maluku dan Papua dalam jaringan *backbone* serat optik nasional. Ke-tujuh, urbanisasi masih tinggi, sekitar 53 persen penduduk menetap di wilayah perkotaan. Padahal daya dukung infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya di perkotaan semakin sempit, lantaran penambahan jumlah penduduk.

Pembangunan infrastruktur dianggap akan meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antar daerah di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur konektivitas dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha. Pemerintah berpandangan, selain untuk pemerataan distribusi barang/jasa, pembangunan ini juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing.

4.2.2.5 Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup secara nasional meliputi meningkatnya kerusakan/kebakaran hutan, terjadinya banjir/tanah longsor, musim kemarau yang panjang, terjadinya perburuan/perdagangan hewan dilindungi, aktivitas penghancuran terumbu karang, polusi air dari limbah industri, polusi udara, limbah B3, pembuangan sampah tanpa pengolahan, serta RAN GRK sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim (*climate change*). RAN GRK merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan mencapai 41 persen jika mendapat dukungan internasional pada tahun 2020.

Tutupan hutan Indonesia cenderung selalu mengalami pengurangan setiap tahunnya. Rata-rata laju deforestasi yang terjadi pada tahun 1990-2017 mencapai 1 juta hektar per tahun. Meskipun laju deforestasi turun hingga menjadi 480 ribu hektar di tahun 2017, namun tanpa kendali yang berarti, pengurangan tutupan hutan akan terus terjadi akibat tekanan pembangunan. Tutupan hutan diperkirakan berkurang dari 50 persen luas lahan total Indonesia di tahun 2017 menjadi sekitar 45 persen di tahun 2045. Penurunan tutupan hutan

akan semakin memicu terjadinya kelangkaan air, khususnya pada wilayah dengan tutupan hutan sangat rendah, seperti Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Berkurangnya tutupan hutan juga memicu penyusutan luas habitat spesies langka di sebelah barat garis Wallacea dari 80,3 persen di tahun 2000 menjadi 49,7 persen di tahun 2045. Kondisi yang sama diperkirakan akan terjadi di sebelah timur garis *Wallacea* khususnya wilayah Papua. Hal ini antara lain didorong oleh peningkatan luas perkebunan monokultur khususnya kelapa sawit yang semakin menekan tutupan hutan dan dapat mengakibatkan peningkatan kehilangan keanekaragaman hayati apabila tidak segera dilakukan penanganan.

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi mempunyai peluang besar untuk mengembangkan produk dari keragaman hayatinya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui kegiatan bioprospeking dapat memenuhi kebutuhan bahan baku obat, sandang, pangan, rempah, pakan ternak, penghasil resin, pewarna dan lain-lain. LIPI (2014) mencatat sebanyak 410 spesies mikroba telah diketahui berdasarkan data koleksi mikroba pada berbagai koleksi jaringan Indonesia dan hasil penelitian eksplorasi-bioprospeksi. Selain itu, hasil pengujian spons dan makroalgae menunjukkan potensi sebagai antitumor, antioksidan, antikanker dan antibakteri. Di samping itu, diversifikasi produk primer tumbuhan obat menjadi produk sekunder memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi

Walaupun cadangan air nasional secara keseluruhan masih dalam kategori aman, namun masih terdapat permasalahan dalam hal aksesibilitas, kontinuitas, dan juga kualitas yang belum memenuhi standar. Proporsi luas wilayah krisis air secara nasional diproyeksikan akan meningkat dari 6,0 persen di tahun 2000 menjadi 9,6 persen di tahun 2045. Hal ini akibat ketidakseimbangan neraca air akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang semakin kritis serta eksplorasi air tanah yang berlebihan terutama di daerah perkotaan. Beberapa wilayah seperti Pulau Jawa yang nilai ketersediaan air per kapitanya sudah berstatus langka, dan Bali-Nusa Tenggara yang berstatus tertekan membutuhkan perhatian khusus.

Kualitas air diperkirakan terus menurun signifikan akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang kritis dan pencemaran air yang berasal dari permukiman, industri, pertanian serta kegiatan pertambangan. Kajian Bappenas (2018) menunjukkan kandungan Biological.

**Tutupan Hutan**

berkurang dari 50% (93,4 juta ha) tahun 2017 hingga tinggal 45% (84,7 juta ha) dari total lahan Indonesia (188 juta ha) di tahun 2045.

**Kelangkaan air**

di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara meningkat hingga 2030. Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6,0% di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Kualitas air diperkirakan juga menurun signifikan.

**Luas habitat ideal**

satwa langka terancam punah di empat pulau besar (Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi) berkurang dari 80,3% di tahun 2000 menjadi 49,7 % di tahun 2045.

Sumber: Kajian Ilmiah Tim KLHS, 2018

4.2.2.6 Potensi dan Ancaman Bencana Alam

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (*natural disaster*) maupun oleh ulah manusia (*man-made disaster*). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain: Bahaya alam (*natural hazards*) dan bahaya karena ulah manusia (*man-made hazards*) yang menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction* (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya teknologi (*technological hazards*) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*), kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana, kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian Selatan dan Timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa-Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986). Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah

subduksi dan daerah seismik aktif lainnya (Puspito, 1994). Selama kurun waktu 1600-2000 terdapat 105 kejadian tsunami yang 90 persen di antaranya disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen oleh letusan gunung berapi dan 1 persen oleh tanah longsor (Latief dkk., 2000). Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera, pantai Selatan Pulau Jawa, pantai Utara dan Selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Laut Maluku adalah daerah yang paling rawan tsunami. Dalam kurun waktu tahun 1600-2000, di daerah ini telah terjadi 32 tsunami yang 28 di antaranya diakibatkan oleh gempa bumi dan 4 oleh meletusnya gunung berapi di bawah laut.

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia. Pada tahun 2006 saja terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek dan beberapa daerah lainnya. Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian rupa dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan tetap menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar) menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang, sementara itu pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana.

Pada sisi lain, laju pembangunan mengakibatkan peningkatan akses masyarakat terhadap ilmu dan teknologi. Namun, karena kurang tepatnya kebijakan penerapan teknologi, sering terjadi kegagalan teknologi yang berakibat fatal seperti kecelakaan transportasi, industri dan terjadinya wabah penyakit akibat mobilitasi manusia yang semakin

tinggi. Potensi bencana lain yang tidak kalah seriusnya adalah faktor keragaman demografi di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2004 mencapai 220 juta jiwa yang terdiri dari beragam etnis, kelompok, agama dan adat-istiadat. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Namun karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan kebijakan dan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur yang merata dan memadai, terjadi kesenjangan pada beberapa aspek dan terkadang muncul kecemburuan sosial. Kondisi ini potensial menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat yang dapat berkembang menjadi bencana nasional.

Sepanjang tahun 2018, terjadi lebih dari 3.397 bencana alam di Indonesia. Dampaknya lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tren bencana 2018 masih didominasi oleh angin puting beliung (799 kasus), banjir (677 kasus), dan longsor (472 kasus). Ketiga bencana tersebut kerap disebut bencana hidrometeorologi dan menyumbang 97 persen dari total bencana alam keseluruhan. Tiga persen sisanya adalah bencana geologis. Meski begitu, bencana geologis berdampak lebih besar, terutama bencana geologis yang dipicu Tsunami dan gempa bumi. Hasil rekapitulasi data bencana yang terjadi sepanjang 2019, total bencana yang melanda berbagai daerah di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencapai 3.768 peristiwa). Bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia yakni puting beliung sebanyak 1.370 kejadian, kebakaran hutan dan lahan sebanyak 746 kejadian, dan banjir sebanyak 764 kejadian. Secara umum tren ini meningkat sebesar 12 persen atau 371 peristiwa dibandingkan jumlah bencana pada 2018 yang mencapai 3.397 peristiwa.

Diperkirakan pada tahun 2020-2024 akan datang, bencana hidrometeorologi masih mendominasi 95 persen dari total bencana keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh luasnya kerusakan daerah aliran sungai (DAS), lahan kritis, kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, dan perubahan penggunaan lahan. BNPB melaporkan sekitar 110.000 hektar lahan pertanian berubah menjadi lahan non pertanian sedang lahan kritis mencapai 14 juta hektar. Tidak ada potensi El Nino dan La Nina yang menguat, musim akan berjalan seperti normal baik musim penghujan juga musim kemarau. Puncak musim penghujan adalah Januari 2019, dengan potensi tinggi banjir besar di Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara.

Gempa juga diprediksi akan terjadi sepanjang tahun 2020-2024. BNPB memperkirakan sekitar 500 gempa akan terjadi setiap bulannya di Indonesia. Ini berkaitan dengan posisi geologis Indonesia

yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik (*ring of fire*) dan pertemuan beberapa lempeng tektonik. Se jauh ini gempa bumi belum dapat diprediksi secara pasti dimana dan kapan akan terjadi. Namun ditekankan, Indonesia bagian timur perlu mewaspadaai gempa karena kondisi geologisnya yang tergolong rumit. Potensi tsunami disebutkan, tergantung pada gempa dan lokasi episentrumnya. Jika terjadi gempa berskala 7 SR atau lebih, dengan episentrum di kawasan laut atau samudra, maka potensi tsunami patut diwaspadai. Hampir seluruh tsunami diawali atau dipicu gempa kuat. Namun Tsunami Selat Sunda disebabkan oleh longsor material yang dipicu Erupsi Gunung Anak Krakatau. Erupsi ini tidaklah memicu monitor gempa secara signifikan.

Mitigasi bencana atau rangkaian pengurangan risiko bencana bisa dilakukan dengan dua hal, yakni dengan pembangunan struktural maupun non struktural. Pembangunan struktural dimulai dengan pembangunan konstruksi tahan gempa, sistem peringatan dini, shelter tsunami, sumur resapan, bendungan, dan lainnya. Sedangkan pembangunan non struktural dimulai melalui lembaga, legislasi, penataan ruang, sosialisasi, diklat, penelitian, dan lainnya.

Indonesia juga tergolong sebagai negara yang rawan tsunami, karena merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yakni Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik. Catatan sejarah tsunami di Indonesia menunjukkan bahwa kurang lebih 172 tsunami yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1600–2012. Sejumlah daerah di pulau-pulau yang berhadapan langsung dengan zona penunjaman antar lempeng ini, seperti bagian barat Pulau Sumatra, selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, bagian utara Papua, serta Sulawesi dan Maluku merupakan kawasan yang sangat rawan tsunami.

Hampir seluruh kabupaten/kota di garis pantai masuk dalam tingkat risiko Sangat Tinggi dan Tinggi karena perkiraan tinggi gelombang di atas tiga meter. Ada empat kawasan utama yang memiliki risiko dan probabilitas tsunami tinggi, antara lain: Megathrust Mentawai, Megathrust Selat Sunda dan Jawa bagian selatan, Megathrust selatan Bali dan Nusa Tenggara, serta Kawasan Papua bagian utara. Penduduk yang terdampak bahaya bencana tsunami pada tahun 2015 berjumlah 3,7 juta jiwa dan pada tahun 2030 diproyeksikan berpotensi bertambah menjadi 4,4 juta jiwa atau naik 19 persen (BNPB 2019).

Pemahaman informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di masyarakat masih belum optimal, sehingga menyebabkan tingginya potensi dampak akibat ancaman gempa bumi dan tsunami. Kurang optimalnya pemahaman masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah masih kurangnya sosialisasi produk informasi gempa

bumi dan peringatan dini tsunami kepada masyarakat serta masih kurangnya penelitian ‘prekursor’ (pratanda) untuk peramalan kejadian gempa bumi pada sesar aktif di sekitar kota besar dengan penduduk dan infrastruktur yang padat. Jangkauan pelayanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami belum dapat menjangkau seluruh daerah yang rawan terhadap gempa bumi dan tsunami. Peningkatan frekuensi kejadian gempa bumi termasuk yang berpotensi tsunami menjadi peringatan bahwa keterpaparan masyarakat akan bencana tersebut masih tinggi.

4.2.2.7 Korupsi

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi isu nasional dan menjadi komitmen RPJM nasional 2020-2024 hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang. *Transparency International* (TI) menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi terganggu dan upaya pemberantasan korupsi akan melemah, ketika penguasa dan para pejabat tinggi menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dengan dana publik, Terutama negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat makin rentan korupsi khususnya Indonesia. Laporan TI menyebutkan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang menolak transparansi dan menoleransi korupsi, menciptakan kebudayaan impunitas yang pada gilirannya mendorong meluasnya korupsi. Korupsi tidak hanya merampok hak asasi masyarakat miskin, melainkan juga menciptakan masalah pemerintahan dan instabilitas. Di Indonesia, pemerintahan kini sedang berusaha membenahi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Revolusi mental. TI mengalang kampanye "*unmask the corrupt*" yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan membeberkan tindakan-tindakan korupsi yang selama ini terselubung.

4.2.3 Isu Regional Sulawesi

Isu mengenai pembangunan kawasan Kepulauan Sulawesi menjadi salah satu acuan penting bagi pengembangan wilayah Kabupaten Morowali. Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit 40 persen (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional. Dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 juga memuat skenario rencana pembangunan wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024 dimana tema pembangunan wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi Pusat

lumbung pangan (padi dan jagung) nasional, perkebunan kakao, serta pengembangan industri pengolahan. Dimana sektor utama pendukung pembangunan wilayah difokuskan pada pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan konstruksi.

Pulau Sulawesi masih menjadi penopang pertumbuhan di Kawasan Indonesia Timur dengan didorong oleh investasi untuk hilirisasi sumber daya alam, peningkatan konektivitas sentra industri, dan sebagai pusat perdagangan Kawasan Timur Indonesia. Isu strategis utama kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antara wilayah yang ditantai dengan masih tingginya angka kemiskinan di Kawasan timur Indonesia (KTI) sebesar 18,0 persen, hamper du kali lipat dari rata-rata Kawasan barat Indonesia (KBI) sebesar 10,30 persen; terbatasnya sarana parasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan kawasan perbatasan di wilayah Sulawesi : juga belum optimalnya pengembangan ekonomi local didaerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, transmigrasi dan kawasan perbatasan. Pembangunan wilayah Sulawesi masih mengalami permasalahan menyangkut:

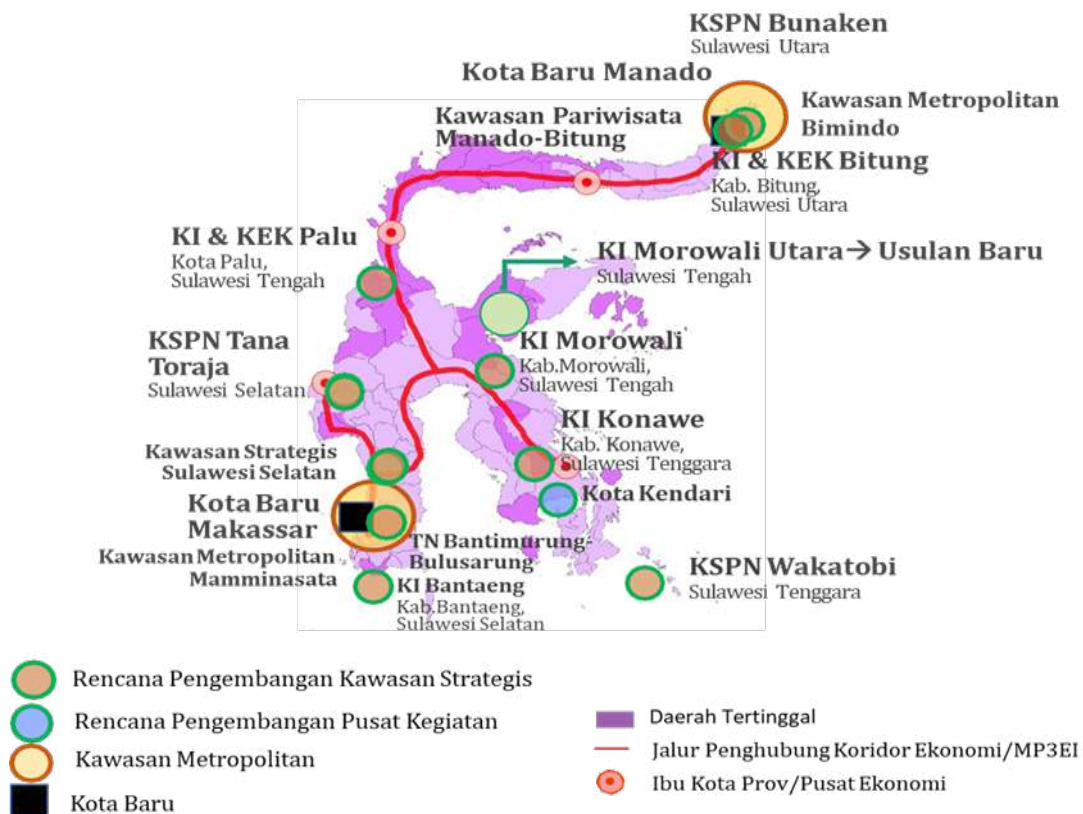
- 1) Belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam;
- 2) Belum terwujudnya pengembangan hubungan internasional untuk kawasan timur Indonesia;
- 3) Masih lemahnya upaya kesiapsiagaan, Mitigasi dan adaptasi bencana;
- 4) Masih terbatasnya akses dan mutu layanan dasar;
- 5) Belum optimalnya peningkatan produktivitas sektor tanaman pangan untuk mendukung peran Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional;
- 6) Belum optimalnya tatakelola dan kelembagaan pengelola Kawasan metropolitan;
- 7) Masih rentannya ketahanan fisik dan social atas perubahan iklim, bencana, populasi dan abrasi pantai serta rentan terhadap kesenjangan social dan kemiskinan masih menjadi masalah utama.

Kebijakan pembangunan Wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; pengembangan industri berbasis logistik; lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi; percepatan pembangunan ekonomi berbasis

maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari. Transformasi ekonomi di Wilayah Sulawesi diarahkan untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan akhir. Wilayah Sulawesi memiliki potensi bencana alam yang beragam dan tinggi, maka pembangunan wilayah Sulawesi perlu mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana. Strategi pembangunan Wilayah Sulawesi akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana; (c) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022); (d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (e) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan (f) pelaksanaan pembangunan afirmatif.
- 2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sulawesi yaitu kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap dan perikanan budidaya; (b) pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP; (c) pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN; (d) revitalisasi kawasan transmigrasi; (e) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (f) pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada KEK dan KI; dan (g) pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); (h) pengembangan kawasan perkotaan termasuk WM sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi dan pembangunan kota baru serta pengembangan

- kota lainnya; dan (i) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah;
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah; dan (d) peningkatan kerja sama antardaerah otonom di wilayah metropolitan, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri dan kepulauan;
 - 4) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi; dan (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
 - 5) Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - 6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat, (b) peningkatan ketahanan kawasan Sulawesi Tengah dan pemantapan pemulihan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan;
 - 7) Pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; serta pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa.



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Gambar 4.3

**Peta pengembangan Wilayah Sulawesi dalam RPJMNas 2020-2024
khususnya Morowali sebagai Kawasan Industri (KI) Prioritass Nasional**

4.2.4 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tengah

Isu strategis Sulawesi Tengah diperlukan sekali sebagai sumber bahan perencanaan yang bersifat *top down* tetapi juga bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan Kabupaten Morowali dengan Propinsi Sulawesi Tengah. Sifat holistik dari perencanaan pembangunan hendaknya juga memperhatikan aktifitas daerah lain baik sebagai mitra maupun sebagai pesaing dalam peningkatan daya saing daerah. Isu isu tersebut juga menjadi bahan penting bagi kerja sama antara daerah.

Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah mengambil sumber dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Isu strategis Sulawesi Tengah meliputi isu kemiskinan, Dilema Industrialisasi Tambang dan Lingkungan Hidup, Penanganan Pasca Gempa Bumi, Tsunami dan Liquefaksi, Revisi Tata ruang Provinsi Sulawesi Tengah dan Mitigasi Bencana, Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah, Kesenjangan antar

Wilayah Kepulauan dengan Wilayah Daratan, Inkoneksitas antara Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan Industri, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Inkoneksitas antara Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan Industri, Potensi Geopark Sulawesi Tengah, Isu Disabilitas, Kekerasan pada Perempuan dan Perlindungan Anak, Reformasi Birokrasi di Provinsi Sulteng, Isu Kebudayaan, Isu Stunting, Daerah Tertinggal dan Kinerja Dana Desa. Adapun isu-isu Strategis di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

a. Kemiskinan di Provinsi Sulteng

Berdasarkan data BPS (2021), Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 12,30 persen, menurun sebesar 0,03 persen poin terhadap Maret 2022, dan meningkat sebesar 0,12 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 389,71 ribu orang, meningkat masing-masing sebesar 1,36 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2022, dan 8,50 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2021.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2022 sebesar 9,03 persen, naik menjadi 9,13 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2022 sebesar 13,87 persen, turun menjadi 13,79 persen pada September 2022. Per Maret 2022, jumlah penduduk miskin pada September 2022 di daerah perkotaan naik sebanyak 2,67 ribu orang (dari 90,26 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 92,93 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun sebanyak 1,32 ribu orang (dari 298,09 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 296,77 ribu orang pada September 2022).

Sementara Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp. 557.183,-/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 423.390,- (75,99 persen), dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp. 133.793,- (24,01 persen). Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Sulawesi Tengah memiliki 5,11 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp. 2.847.205,-/rumah tangga miskin/bulan

Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan, adalah beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/cakalang, kue basah, gula pasir, telur ayam ras, cabe rawit, mie instan, dan bawang merah. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya

perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

b. Dilema Industrialisasi Tambang dan Lingkungan Hidup

Beberapa isu lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup;
2. Kerusakan hutan kawasan dari hutan *mangrove* di pesisir akibat kegiatan pertambangan dan pemukiman, pembalakan liar, (Illegal Logging), alih fungsi lahan dan pembukaan jalan oleh masyarakat, pemukiman penduduk di dalam kawasan;
3. Terjadinya kerusakan lahan di kawasan pertambangan, perkebunan, pertanian dan kehutanan yang berakibat sering terjadi banjir pada musim hujan dan kebakaran hutan/lahan pada musim kemarau serta hilangnya flora dan fauna tertentu yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati sebagai akibat alih fungsi lahan, pembukaan lahan dan *illegal logging*;
4. Menurunnya kemampuan daya dukung dan daya tampung (termasuk debit air) beberapa sungai yang disebabkan oleh semakin berkurangnya daerah tangkapan air di hulu dan penggunaan air oleh kegiatan pertambangan dan industri logam dasar;
5. Sedimentasi yang tinggi di muara sungai dan tingginya aliran permukaan akibat semakin berkurang hutan dan masuk ke wilayah perairan laut yang menyebabkan terjadi kekeruhan sehingga mengganggu pertumbuhan terumbu karang, rumput laut dan ikan;
6. Kerusakan terumbu karang yang tidak terkontrol pada wilayah kepulauan, yang disebabkan oleh penggunaan bahan peledak, potasium dan bius dalam penangkapan ikan, serta kurangnya pengawasan oleh masyarakat dan aparat berwajib;
7. Rendahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan sehingga berdampak pada terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggalian, kerusakan bentang alam dan bentang lahan, eksploitasi yang melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan, menurunnya kualitas tanah dan air, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca, meningkatnya debu, meningkatnya tingkat sedimentasi, bertambahnya limbah, terganggunya ekosistem darat dan perairan, degradasi hutan dan lahan, menurunnya populasi biota

darat dan perairan, terganggunya pasokan air bersih, terganggunya sistem air tanah, peningkatan alih fungsi lahan, memicu terjadinya bencana tanah longsor maupun banjir, dan sebagainya.

8. Meningkatnya kegiatan pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Kondisi lingkungan hidup juga terus memburuk seiring dengan terus di bukanya lahan-lahan baru untuk pembangunan kelapa sawit dan pertambangan. Krisis pangan dan air juga melanda di beberapa daerah belakangan ini akibat kondisi lingkungan yang terus memburuk. Kondisi ini tentu tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang mencapai dua digit itu.
9. Sampah masih menjadi permasalahan serius di ibu kota kabupaten dan Provinsi di Sulawesi Tengah. Selama Tahun 2020 saja, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu perharinya mencatat sampah dihasilkan kurang lebih sebanyak 228 ton atau 228 meter kubik. Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, volume sampah selalu mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2019 hanya menghasilkan 117 ton sampah perharinya. Angka itu didapat dari total sampah yang diangkut 38 armada dalam sehari. Data itu menurutnya menunjukkan bahwa ada satu sistem persampahan yang harus dibenahi yakni dari pemukiman warga sebagai tempat produsen sampah. Terlebih di Tahun 2019, tiap hari 30 persen sampah merupakan sampah plastik yang susah terurai. Belum lagi perilaku buruk masyarakat diperparah dengan kehidupan masyarakat yang cenderung konsumtif. Permasalahan lain adalah kurangnya inisiasi pemerintah untuk menambah sumberdaya/fasilitas Armada angkutan sampah yang dimiliki DLH tidak sebanding dengan cakupan wilayah yang harus mengangkut sampah di total 245 TPS. Kota Palu sudah seharusnya terus berupaya melakukan perubahan seperti daerah atau perkotaan lain di Indonesia. Dicontohkan di Kota Surabaya yang sudah mendorong badan khusus yang juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan sampah. Inovasi sangat dibutuhkan dalam hal pengelolaan sampah. Jangan hanya memakai metode lama sistem kumpul-angkut-buang. Apalagi masyarakat sangat jarang yang mengikuti anjuran program Reduce, Reuse, Recycle (3R).
10. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungn Hidup dan Kehutanan Nomor sk.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tercatat seluas 264.874 Ha lahan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan di Sulawesi Tengah dalam kategori kritis. Kondisi

lahan-lahan yang kritis itu sangat berpengaruh terhadap daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan ancaman bencana hidrometeorologi di masa yang akan datang jika tidak secepatnya diatasi. Penanganan lahan kritis harus dilakukan secara komprehensif dengan prinsip keterpaduan pekerjaan penanaman, sipil teknis dan teknik pembibitan serta mengaktifkan semua unsur/elemen dengan melibatkan masyarakat. Terjadinya lahan kritis tersebut terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akibat meningkatnya jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk memiliki arti pertumbuhan kawasan urban dan juga kebutuhan tambahan produksi pangan. Belum lagi ada peningkatan kebutuhan energi. Pada masing-masing kebutuhan ini ada implikasi pada lingkungan. Kebutuhan lahan urban dan lahan pertanian akan meminta konversi lahan hutan. Semakin lama daerah-daerah resapan air makin berkurang, akibatnya terjadi krisis air tanah. Di sisi lain di beberapa kawasan berkemiringan cukup tajam menjadi rawan longsor, karena pepohonan yang tadinya menyangga sistem kekuatan tanah semakin berkurang. Kemudian karena resapan air ke tanah berkurang, terjadilah *over-flow* pada air permukaan. Ketika kondisi ini beresonansi dengan sistem drainase yang buruk di perkotaan terjadilah banjir. Banjir akan membawa berbagai penderitaan.

Permasalahan utama industrialisasi berbasis tambang juga terkait langsung dengan mata pencaharian yang “tergusur” terutama lingkungan pertanian. Hadirnya perusahaan tambang ini kemudian sering menjadi topik utama dampak pertambangan. Misalnya, 1) petani yang kini beralih profesi sebagai pekerja (buruh) tambang, hal ini terjadi karena problem kesuburan tanah yang berdampak pada kurangnya hasil pertanian. Begitu pula, terdapat persoalan minimnya perhatian pemerintah dalam hal peningkatan mutu pertanian seperti dengan pembuatan akses jalan tani, irigasi penunjang persawahan serta introduksi teknologi pertanian. Harga pasca panen juga menjadi bagian problem mendasar. Setelah musim panen tiba, harga turun, namun ketika musim tanam, penawaran harga naik. Sehingga dengan hasil panen rendah dan harga hasil panen murah, petani terus mengalami kekurangan. Topik lain yang menjadi perbincangan adalah 2) petani yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi pekerja di perusahaan tambang; 3) upah yang tidak layak bagi para pekerja; 4) perekrutan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Indonesia (lokal), dll. Selain apa yang telah disebutkan di atas, ada topik reklamasi

pasca tambang yang tidak dilakukan oleh perusahaan. Reklamasi pasca tambang pada dasarnya adalah usaha untuk memperbaiki kondisi tanah setelah aktivitas pertambangan selesai. Reklamasi pasca tambang penting menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak. Selain hal ini sudah pasti merusak lingkungan, ada hal-hal penting lainnya yang perlu dilihat lebih dalam. Misalnya, areal-areal bekas eksploitasi ketika kandungan mineralnya telah habis dikeruk, harus segera dilakukan kegiatan reklamasi untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang berdampak pada bencana lingkungan, banjir dan longsor yang membahayakan kehidupan masyarakat di sekitar tambang. Hadirnya perusahaan tambang di Kabupaten Morowali misalnya mungkin di satu sisi berdampak pada meningkatnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor sumber daya alam mineral.

Namun, di sisi lain juga perlu dilihat apakah kehadiran industri ekstraktif berbasis tambang ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, buruh dan masyarakat yang tinggal di sekitar tambang atau justru merugikan mereka. Sebelumnya, petani secara umum mengusahakan pertanian padi sawah basah, perkebunan merica dan pala. Setelah hadir dan beroperasinya perusahaan-perusahaan tambang, sebagian lahan yang tadinya merupakan sumber ekonomi petani kini telah menjadi areal eksploitasi perusahaan tambang. Hal ini terjadi karena sebelumnya petani (pemilik tanah) telah melakukan proses jual beli tanah dengan perusahaan tambang, yang dikenal dengan istilah “ganti rugi lahan”. Setelah petani kehilangan tanah dan mendapatkan harga ganti rugi lahan, hasilnya pun digunakan untuk membuat usaha-usaha kecil, misalnya pembangunan rumah kos-kosan, yang pada saat itu memang memenuhi kebutuhan tempat tinggal banyak para pekerja (buruh) tambang yang datang dari daerah lain. Selain itu, ada juga sebagian petani yang menggunakan hasil ganti rugi lahannya sebagai “uang muka” pembelian kendaraan berupa mobil serta kendaraan roda dua (sepeda motor), bahkan ada yang sampai memiliki dua kendaraan mobil dengan status angsuran setiap bulan berjalan. Pasca kehilangan tanah dan tidak lagi mengusahakan pertanian, banyak petani yang kemudian terintegrasi sebagai pekerja (buruh) tambang. Singkatnya, kehidupan mereka menjadi bergantung pada perusahaan tambang. Dalam skala makro, rezim Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara mesti menjadi payung regulasi Pemerintah Provinsi Sulteng Bersama Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM agar korporasi yang beroperasi di bidang pertambangan diharuskan melakukan divestasi atau melepas sahamnya hingga 51 persen kepada BUMN dan

BUMD agar terjadi pemberdayaan BUMD sehingga pendapatan asli daerah meningkat.

c. Penanganan Pasca Gempa Bumi, Tsunami dan Liquefaksi

Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah tepatnya di Palu, Donggala, dan Sigi, pada Jumat malam, 28 September 2018, benar-benar membuat kondisi daerah tersebut lumpuh. Betapa tidak gempa yang diiringi dengan tsunami yang berkekuatan magnitudo 7,4 membuat rusak dan hancur seluruh sarana dan prasarana seperti bangunan, jalan, dan jembatan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikeluarkan pada 21 Oktober lalu menunjukkan bencana alam di Palu menyebabkan 2.256 orang warga meninggal dunia, yang mengalami luka berat mencapai 4.612 orang, dan warga yang mengungsi sebanyak 223.751 orang. Untuk yang menghilang sebanyak 1.309 orang. Untuk bangunan yang terdampak bencana yakni sebanyak 68.451 rumah rusak, 265 sekolah rusak, 327 rumah ibadah rusak, dan 45 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan.

Terkait penanganan pasca bencana alam ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengamanatkan kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk membuat rencana tapak dan ikut membuat rencana induk relokasi penduduk bersama Kementerian/Lembaga terkait. Rencana tapak ini berisi rancangan permukiman warga yang dilengkapi dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Rancangan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembuatan rencana induk. Fasum dan fasos yang disediakan seperti gedung sekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga akan dibangun posyandu dan puskesmas. Selain itu akan dibangun tempat peribadatan, pertokoan, dan pasar lingkungan. Selanjutnya akan dibangun ruang terbuka hijau, jalan, dan permukiman. Untuk total rumah yang akan dibangun diperkirakan mencapai 14 ribu unit dan total luas kawasan relokasi ini diperkirakan 82.192 ha atau mencapai 821.920 m². Ke depan, penduduk akan direlokasi di empat tempat yang sudah di survei, yakni kawasan Duyu yang berada di Kota Palu, Talise dan Tondo yang berada di Kota Palu, dan Pombewe yang berada di Kabupaten Sigi. Satu lokasi lagi berada di Kelurahan Petobo. Penduduk yang diprioritaskan untuk direlokasi adalah yang terkena bencana alam tersebut. Pasca gempa bumi 28 September 2018, maka pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 di Provinsi Sulteng wajib merujuk pada Indeks Risiko Bencana di Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNBP) Tahun 2020. Kejadian Gempa Bumi, Tsunami dan Liquefaksi pada tiga tahun yang lalu terjadi sekitar 28 km

di Utara kabupaten Donggala atau 80 km di sebelah barat Kota Palu menghendaki perlunya memitigasi bencana. Provinsi Sulteng pada 2020 mempunyai IRBi sebesar 144,96 poin termasuk kategori tinggi. Di Tahun 2016, IRBi Sulteng mencapai 150,25 poin, pada 2017 mencapai 147,43 poin, pada 2018 dan 2019 masing-masing IRBi Sulteng mencapai 146,39 poin dan 144,96 poin. Hal ini berarti IRBi Sulteng pada 2019 dan 2020 mempunyai nilai yang sama. Bencana yang mengancam Sulteng meliputi gempa, Tsunami, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, abrasi, gelombang ekstrim. Pada 2020, sembilan daerah di Sulteng masuk kategori IRBi tinggi yakni Kabupaten Morowali Utara (177,20 poin), Morowali (173,80 poin), Banggai Kepulauan (163,42 poin), Banggai (163,20 poin), Banggai Laut (163,20), Kota Palu (162,70 poin), Tolitoli (159,20 poin), Donggala (157,12 poin), Buol (149,60 poin). Sedangkan empat daerah lainnya berada pada kategori IRBi sedang yakni Kabupaten Sigi (48,13 poin), Parigi Moutong (108,39 poin), Poso (121,14 poin), dan Kabupaten Tojo Una-Una (137,60 poin).

d. Revisi Tataruang Provinsi Sulawesi Tengah dan Mitigasi Bencana

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sedang giatnya menginisiasi revisi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033. Bukan tidak beralasan, inisiatif ini tentunya dilandasi oleh semangat untuk penyesuaian RTRW dengan situasi faktual terkait fenomena alam dengan tingkat kerentanan tinggi akan terjadinya bencana alam. Dalam kerangka revisi kebijakan RTRW ini, pemerintah provinsi kemudian melakukan kajian kebencanaan utamanya di wilayah Palu Donggala Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo). Tidak hanya itu, temuan-temuan dan hasil kajian dari tim ahli (konsultan) sebagai mitra Pemerintah semestinya diuji kualitas dan keakuratannya dan menyelaraskannya dengan bidang- bidang pembangunan yang lain guna mengarusutamakan aspek kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan secara umum dan secara khusus bagi kebijakan RTRW itu sendiri. Di samping untuk mendorong partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat luas, pemerintah perlu menerima masukan, saran kritik dari berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan mulai dari proses perumusan kebijakan, perencanaan, implementasi hingga proses monitoring dan evaluasi. Dalam konteks inilah peran aktif organisasi gerakan masyarakat sipil dibutuhkan. Dengan peran aktifnya diharapkan kebijakan RTRW yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan

implementatif serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Karena kita tidak ingin hasil revisi kebijakan RTRW ini hanya matang dikonsep, tetapi tidak aplikatif.

Dalam proses revisi RTRW tersebut beberapa pemangku kepentingan terutama pemerhati lingkungan seperti WALHI mempertanyakan penyesuaian wilayah pertambangan (WP) dengan zona rawan bencana (ZRB). Padahal hampir semua wilayah pertambangan di Kota Palu masuk dalam ZRB. Di samping itu, industri ekstraktif pertambangan memiliki risiko kerentanan bencana.

e. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di luar Jawa. Tahun ini ditargetkan dapat beroperasi delapan kawasan industri dan 10 kawasan industri lainnya masih tahap perencanaan terus dipacu agar dapat segera beroperasi. Berdasarkan catatan Kemenperin selama periode Tahun 2015-2017, sektor manufaktur yang telah menanamkan modalnya di seluruh kawasan industri di Indonesia mencapai Rp 126,5 triliun. Investasi selama tiga tahun tersebut terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 103 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) hingga Rp 23,5 triliun. Terdapat tiga kawasan industri (KI) di Indonesia timur ditargetkan mulai beroperasi Tahun 2017. Ketiga kawasan industri tersebut adalah Konawe di Sulawesi Tenggara, Bitung di Sulawesi Utara, dan Palu di Sulawesi Tengah. Pada akhir Tahun 2020, Pemerintah menetapkan sebanyak 18 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) masuk dalam sektor kawasan proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penetapan kawasan ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN yang diterbitkan pada 17 November 2020. Perlu diketahui, Pemerintah telah menetapkan 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor dengan total nilai investasi sebesar Rp 4.809,7 triliun sebagai PSN. Salah satu kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berada di Sulawesi Tengah adalah Kawasan Industri Morowali. Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah yang merupakan salah proyek kawasan industri strategis nasional yang diprioritaskan dalam program pengembangan basis industri logam dasar terus dipacu pembangunannya sebagai wujud implementasi arahan Pemerintah Pusat untuk memfokuskan agenda pemerintah di Tahun 2017 pada pemerataan industri di luar

Pulau Jawa yang berdampak positif bagi masyarakat. Selain itu, kawasan industri Morowali turut mendorong langkah pemerintah dalam program hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Dalam waktu efektif sejak 2013 sampai dengan sekarang perkembangan industri di Morowali sangat pesat sekali.

Saat ini kawasan industri berbasis nikel yang dikelola PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) di Kabupaten Morowali, merupakan satu-satunya yang terbesar di Indonesia. Selain kawasan industri yang dikelola oleh PT. IMIP ada tiga kawasan industri lainnya yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, yaitu kawasan industri yang dikelola oleh Transon Group/Transon Bumindo Resources di desa Laroenae Kecamatan Bungku Pesisir, serta Kawasan Industri PT. Stardust Estate Investment (SEI). Dengan fakta itu, peluang untuk menjadi kawasan industri berstatus obyek vital nasional terbuka lebar. Karenanya guna lebih memaksimalkan pengembangan industri di Morowali, maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) mumpuni. Penyiapan SDM yang terampil adalah faktor penting dalam memacu pertumbuhan industri, selain melalui pengembangan teknologi dan peningkatan investasi. SDM tersebut dapat diperoleh dari dibangunnya Politeknik industri Morowali yang baru berjalan 1 tahun dengan jurusan Teknik perawatan mesin, teknik listrik dan teknik kimia/material. Diharapkan lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang akan meneruskan perkuliahan di Politeknik tersebut umumnya berasal dari lulusan SMA daerah setempat. Lulusan dari politeknik ini nantinya akan diserap oleh pabrik-pabrik yang beroperasi di wilayah perindustrian Morowali.

Pengembangan kawasan industri merupakan upaya untuk mendorong tumbuhnya industri nasional sekaligus upaya untuk penyebaran industri. Harapannya Pulau Jawa bukan satu-satunya pusat ekonomi. Sebaliknya, industri nasional dapat tersebar ke pulau-pulau lain selain Pulau Jawa. Dengan pembangunan kawasan industri baru di luar Pulau Jawa, diharapkan peran wilayah di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri akan terus meningkat.

Selain itu, menurut Kementerian Perindustrian, Kawasan industri Palu difokuskan pada pengolahan karet dan minyak astiri, Konawe untuk *smelter* nikel, dan Bitung untuk industri farmasi berbasis herbal. Kawasan industri tersebut memiliki lokasi yang strategis seperti Kota Palu yang memiliki pelabuhan sendiri. Meski demikian, pembangunan kawasan industri tersebut masih terkendala pembangunan infrastruktur. Terutama untuk kawasan industri Bitung dan Palu yang masih minim infrastruktur dasar seperti jalan,

listrik, ataupun air baku.

Dibutuhkan investasi yang sangat besar untuk membangun sebuah kawasan industri, dan untuk kawasan di luar Jawa, belum banyak yang berminat. Untuk itu, Pemerintah pun harus memberikan insentif bagi industri yang mau berinvestasi di kawasan, baik sebagai *tenant* ataupun infrastruktur pendukung. Dengan begitu, pengembangan kawasan industri dapat berjalan dan menarik lebih banyak investasi. Insentif yang diberikan pemerintah seperti pembebasan bea masuk atas impor mesin dan atau barang dan bahan keperluan industri, PPh penanaman modal, pengurangan PPh Badan dan pembebasan PPN atas impor. Insentif tersebut diharapkan dapat melancarkan pembangunan 14 kawasan industri di luar pulau Jawa. Besarnya insentif diberlakukan berdasarkan wilayah pembangunan, semakin ke timur insentifnya juga makin besar. Ke-14 kawasan industri yang tengah dikembangkan adalah Sei Mangkei (CPO & Karet), Kuala Tanjung (Alumina), Landak (Feronikel), Palu (Rotan), Bitung (Agro & Logistik), Buli, Haltim (Feronikel), Teluk Bintuni (Petrokimia), Tanggamus (Perkapalan), Ketapang (Alumina), Jorong (Feronikel), Batulicin (Feronikel), Bantaeng (Feronikel), Konawe (Feronikel), dan Morowali (Feronikel). Dari 14 ini, yang sudah beroperasi di Sei Mangkei, Bantaeng, dan Morowali. Untuk tiga tahun ke depan, juga akan dipercepat pembangunan kawasan industri Tanjung Buton, Dumai, Berau (Kalimantan Timur), Tanah Kuning (Kalimantan Utara), JIPE (Gresik), Kendal, dan Kawasan Industri Terpadu Wilmar (Serang, Banten). Pembangunan kawasan-kawasan industri tersebut dilakukan dengan pendekatan Indonesia sentris dalam rangka mengurangi kesenjangan sekaligus membangun dari pinggiran.

Khusus untuk Kawasan industri Morowali pemerintah menargetkan kawasan industri ini mampu menarik investasi senilai Rp 78 triliun dan menciptakan tenaga kerja langsung sebanyak 20 ribu orang. Keberadaan industri di kawasan ini juga akan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah dan nasional, melalui hilirisasi mineral. Kawasan ini akan difokuskan pada pembangunan industri pengolahan dan pemurnian mineral logam dengan bahan dasar nikel. Penyerapan tenaga kerja yang dikelola PT. IMIP dapat direalisasikan apabila pabrik *stainless steel* berkapasitas 2 juta ton beroperasi. Kebutuhan tenaga kerja pelaksana di kawasan industri mencapai 11.257 orang dan tenaga kerja *level* supervisor sebanyak 1.577 orang. Pada tahap kedua 2017-2020 penambahan kebutuhan tenaga kerja pelaksana mencapai 10.800 orang dan tenaga kerja supervisor mencapai 1.620 orang.

f. Kesenjangan antar Wilayah Kepulauan dengan Wilayah Daratan

Gugusan pulau-pulau di Kepulauan Spermonde dan Kepulauan Menui yang secara administratif masing-masing merupakan wilayah Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan dalam berbagai hal (sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, transportasi, dan pelayanan pemerintahan lainnya) mengalami kesenjangan yang sangat nyata dibandingkan dengan wilayah daratan Sulawesi Kabupaten Morowali. Kesenjangan dalam berbagai hal tersebut bermuara kepada kesenjangan kesejahteraan masyarakatnya. Sangat terbatasnya sarana dan prasarana transportasi berakibat tingginya biaya transpor sehingga harga-harga bahan makanan, termasuk air minum yang pada banyak desa harus membeli air mineral yang justru didatangkan dari Kendari, barang-barang dan jasa kebutuhan pokok lainnya seperti pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan menjadi lebih mahal.

Demikian pula pada wilayah Kabupaten Banggai Laut, terutama di Kecamatan Boka Kepulauan dan Bangkurung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di lain pihak, sumber pendapatan keluarga yang utama bertumpu pada usaha di sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan sebagai nelayan dan budidaya rumput laut. Usaha perikanan pada umumnya masih dilaksanakan dengan peralatan sederhana dengan kapasitas yang sangat kecil yang hasilnya ditekan oleh biaya produksi/operasional yang tinggi dan harga jual hasil produksi yang rendah. Di gugusan Kepulauan Salabangka, usaha budidaya Rumput Laut yang sampai dengan Tahun 2012 masih merupakan sumber pendapatan yang cukup besar, terus mengalami penurunan luasan budidaya dan produksinya, satu sama lain ditengarai sebagai akibat dari rusaknya ekosistem perairan laut sekitar. Oleh karena itu, tidaklah aneh bila tingkat kemiskinan yang tinggi, angka putus sekolah yang tinggi, APK dan APM yang rendah, derajat kesehatan masyarakat yang rendah berada di wilayah kepulauan ini. Kesenjangan taraf hidup masyarakat antar kedua wilayah ini (kepulauan dan daratan) menjadi isu strategis yang harus dijawab secara komprehensif, serius dan berkelanjutan.

g. Inkoneksitas antara Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan Industri

Keberadaan kawasan industri dengan puluhan ribu pekerja sesungguhnya adalah sebuah potensi pasar yang besar bagi produk-produk lokal seperti bahan makanan, pakaian seragam pekerja, usaha pemondokan/kos-kosan, rumah makan, *cleaning service*, dan lain-

lainnya. Dari sekian banyak dan besar peluang pasar tersebut sebagian sudah termanfaatkan yaitu jasa rumah makan/*warteg*, kos-kosan, toko/kios barang kebutuhan sehari-hari yang pada umumnya dilakukan oleh pendatang secara tidak teratur. Ketidakteraturan ini menimbulkan masalah baru berupa kemacetan arus lalu lintas, kesehatan lingkungan, dan keamanan. Di lain pihak, ketidakteraturan tersebut berakibat hilangnya potensi PAD bagi Pemerintah Daerah. Peluang lainnya seperti kebutuhan bahan makanan, pakaian seragam, *cleaning service* masih belum termanfaatkan. Koneksitas antar Kawasan Industri dengan Pelaku Ekonomi Lokal (Petani, Nelayan, Peternak, Usaha Industri Garmen/Pejahitan dan lainnya) dalam memenuhi kebutuhan kawasan industri akan bahan makanan, dan lainnya yang belum terbangun secara baik harus segera diprogramkan secara baik dan berkelanjutan agar kawasan industri juga dapat berfungsi sebagai lokomotif ekonomi lokal secara nyata.

h. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Isu penting dalam ketahanan pangan di Sulawesi Tengah adalah harga pangan yang kurang kompetitif. Harga menjadi pertimbangan penting ketika konsumen membeli bahan pangan/makanan. Harga rata-rata pangan lokal saat ini tidak kompetitif dibandingkan dengan beras dan terigu karena masih relatif lebih mahal. Di wilayah sentra produksi, harga pangan lokal mentah/segar relatif murah, namun dapat meningkat 2 – 3 kali lipat harganya di perkotaan, apalagi untuk pangan lokal yang telah diolah. Hal ini terjadi karena jumlah produksi rendah dan masih terbatas di wilayah tertentu saja sehingga harga bahan baku cenderung mahal. Harga bahan baku yang mahal menyebabkan olahan pangan lokal menjadi tidak murah. Harga pangan lokal dapat lebih kompetitif apabila produksi dapat ditingkatkan hingga mencapai kapasitas produksi maksimumnya. Selain itu, biaya pengolahan produk pangan lokal juga cukup tinggi sehingga menyebabkan harga jual produk pangan lokal kurang kompetitif dibandingkan beras dan terigu.

Selain harga dan kemudahan akses, konsumsi juga dipengaruhi oleh selera dan preferensi masyarakat terhadap makanan. Preferensi masyarakat terhadap pangan lokal sebagai pangan pokok ternyata tidak setara dengan beras atau terigu. Walaupun di beberapa kabupaten seperti Donggala, Sigi, Tojo Una-Una, Buol dan Morowali, diversifikasi pangan antara beras, jagung, ubi kayu dan sagu berjalan cukup baik, sehingga tetap dipertahankan, dan jika perlu ditingkatkan seperti diperlukan upaya pengolahan untuk memperpanjang masa simpan dengan tetap menjaga nilai gizi.

Dari sisi ketersediaan pangan terutama beras, menurut laporan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, daerah ini masih surplus lebih kurang 90 ribu ton beras dengan asumsi konsumsi beras 118 kg per kapita pada Tahun 2020 atau saat pandemi covid-19 dimulai. Meskipun begitu ada beberapa wilayah di Sulteng karena kondisi lahannya yang kering sehingga tidak signifikan pada panen padi nanti seperti Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-Una. Kondisi itu selanjutnya, dapat disiasati petani dengan menanam komoditi pangan yang cocok dengan lahan kering seperti jagung atau dengan menerapkan sistem pertanian ladang. Pada akhir Tahun 2020 juga provinsi ini dihadapkan bencana alam seperti banjir di beberapa kabupaten. Berdasarkan data BPS (2021), luas panen padi pada 2020 sebesar 178,07 ribu hektar, mengalami penurunan sebanyak 8,03 ribu hektar atau 4,32 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 186,10 ribu hektar. Produksi padi pada 2020 sebesar 792,25 ribu ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 52,65 ribu ton atau 6,23 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 844,90 ribu ton GKG. Jika dilihat menurut *subround*, terjadi penurunan produksi padi pada seluruh subround yaitu Januari-April, Mei-Agustus dan September-Desember 2020, masing-masing sebesar 8,02 ribu ton GKG (3,14 persen), 1,15 ribu ton GKG (0,45 persen) dan 43,49 ribu ton GKG (12,92 persen) dibandingkan *subround* yang sama pada 2019. Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras pada 2020 sebesar 465,24 ribu ton, mengalami penurunan sebanyak 30,92 ribu ton atau 6,23 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 496,16 ribu ton. Potensi produksi padi pada *subround* Januari-April 2021 diperkirakan sebesar 301,83 ribu ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 54,33 ribu ton atau 21,95 persen dibandingkan *subround* yang sama pada 2020 yang sebesar 247,50 ribu ton GKG.

Kondisi ketahanan pangan di Provinsi Sulteng berada pada tingkat terendah di Pulau Sulawesi dengan nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 75,10 poin atau berada pada urutan ke 17 dari 34 provinsi di Indonesia. Sulteng memerlukan kebijakan pemanfaatan secara optimal ketersediaan lahan pangan pertanian dan berkelanjutan (LP2B) dengan upaya mendukung kebijakan pemerintah pusat berupa pembangunan Kawasan Pertanian Food Estate yang terintegrasi. Pemerintah Provinsi Sulteng menyiapkan lahan pertanian dalam Kawasan LP2B yang produktif untuk dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat petani dan swasta dengan mekanisme pola kerja yang saling menguntungkan.

Terkait kebijakan Kementerian Pertanian dan Pemerintah

Provinsi Sulteng selama pandemi virus corona dinilainya sudah sinkron, seperti memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dan bantuan-bantuan pertanian ke petani tetap lancar dan tidak terganggu meski berlaku kebijakan pembatasan akses keluar masuk antar wilayah. Adapun isu strategis dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Tengah menyangkut:

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
2. Ketersediaan Pangan
3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan.
4. Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat.
5. Penanganan kerawanan pangan/Cadangan Pangan Daerah.

i. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Sulawesi Tengah merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki potensi penangkapan cukup besar karena menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki empat wilayah pengelolana perikanan (WPP) yakni WPP NRI-713 Selat Makasar di sebelah barat, WPP NRI-716 Laut Sulawesi di sebelah Utara, WPP NRI-714 Teluk Tolo, dan Laut Banda sebelah Selatan, dan WPP NRI-715 Teluk Tomini Laut Maluku di di sebelah timur sehingga memiliki garis pantai yang panjang. Luas wilayah perairan laut Sulawesi Tengah diperkirakan 193.923,75 Km² terbagi atas 3 kelompok wilayah pengelolaan perikanan yang diistilahkan Cluster, yakni Cluster I (Selat Makasar/Laut Sulawesi meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Tolitoli dan Buol), Cluster II (Teluk Tomini meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una dan sebagian Banggai), dan Cluster III (Teluk Tolo meliputi Kabupaten Banggai, Baggai Kepulauan, Banggai Laut dan Morowali/Morowali Utara). Mengingat jumlah penduduk dan diikuti kebutuhan pangan ikan yang semakin meningkat, upaya untuk menumbuhkan kegiatan usaha perikanan guna peningkatan produktivitas usaha perikanan, pendapatan nelayan dan pembudidaya, kualitas gizi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta pengurangan angka kemiskinan di kawasan pesisir masih memiliki peluang yang cukup besar.

Terkait dengan keberadaan wilayah perairan tersebut, maka potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di provinsi ini sangat besar baik potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun bioteknologi kelautan. Selain itu, investasi Pemerintah di sektor kelautan perikanan dalam 10 tahun terakhir cukup signifikan mencapai Rp 200 miliar untuk pembangunan pelabuhan dan sarana, prasarana serta fasilitas untuk nelayan, belum termasuk pembangunan kapal-kapal penangkap ikan bertonase 30 GT. Namun

demikian, para nelayan yang menangkap ikan di laut Sulteng cenderung menjual hasil tangkapannya ke luar daerah, sehingga seolah-olah laut Sulteng ini tidak menghasilkan ikan? Salah satu sebabnya adalah harga ikan di daerah lain lebih menarik dibanding di Sulteng. Selain itu, sarana pendaratan ikan di Sulteng seperti dermaga yang menyediakan es balok, ruang pendingin dan pembekuan ikan masih sangat terbatas, apalagi di WPP Teluk Tolo. Gubernur Sulteng pernah mengeluarkan himbauan kepada nelayan agar membawa ikan hasil tangkapannya ke Sulteng karena hal itu penting untuk perekonomian daerah karena akan menjaga stabilitas harga ikan. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng sendiri akan membuat kebijakan tidak akan menerbitkan surat izin melaut kepada kapal-kapal penangkap ikan bila tidak berkomitmen membawa hasil tangkapannya ke daratan Sulawesi Tengah. Para nelayan Donggala misalnya, kebanyakan membawa hasil tangkapannya ke Kalimantan Timur karena harga ikan di sana lebih tinggi. Hal ini menyebabkan stok ikan di pasaran Kota Palu sering langka sehingga memicu terjadinya inflasi.

Namun, sejak mewabahnya virus corona (Covid-19) semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang positif covid, upaya peningkatan produksi perikanan dan perbaikan ekonomi nelayan berjalan lambat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan interaksi masyarakat (*social and physical Distancing*). Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah meninjau kembali pengalokasian anggarannya ke tujuan mempercepat pengentasan dampak corona, terutama dari sisi kesehatan masyarakat. Kebijakan penanganan covid dan pemulihan ekonomi di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, dilakukan dengan keluarga Surat Edaran Nomor 443/141/DIS-KES tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tengah, dimana salah satu poin penting di dalamnya adalah membatasi Pergerakan Arus Barang dengan Penumpang dengan mengeluarkan SE Kepada para Gubernur se Sulawesi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Adanya pembatasan interaksi masyarakat dan pergerakan arus barang dalam mencegah meluasnya penularan wabah berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil dan distribusi produk. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kondisi tersebut adalah: (1) menurunnya interaksi antar nelayan menyebabkan frekuensi penangkapan ikan yang berpengaruh pada penurunan pendapatan nelayan, dan dikhawatirkan akan menyebabkan penambahan masyarakat miskin baru pada tiga

kabupaten (Donggala, Tolitoli dan Buol) di Sulawesi Tengah, (2) menurunnya penghasilan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah terutama pusat konsumen di Kota Palu akibat terbatasnya lapangan pekerjaan berkonsekuensi pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga akses pangan terbatas termasuk pangan hewani dari jenis ikan. Penurunan permintaan ikan menyebabkan hasil tangkapan nelayan tidak terdistribusi lancar ke konsumen, akibatnya terjadi penurunan harga ikan, atau kerusakan sehingga nelayan menderita kerugian, dan (3) terbatasnya aliran barang dan jasa menyebabkan tersendatnya distribusi kebutuhan rumah tangga dan operasional nelayan seperti bahan bakar minyak, konsumsi melaut, dan penunjang lain.

Realitas menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah belum secara signifikan dapat mengatasi penularan wabah covid-19, sehingga Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membuka aktivitas ekonomi terutama daerah-daerah yang tingkat penularan covid-19 rendah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kebijakan ini ditujukan agar ketersediaan bahan pokok terjamin, dan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah (para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dan kecil). Kondisi ini seharusnya menjadi peluang bagi masyarakat nelayan untuk mengoptimalkan usahanya dan ditunjang oleh terjaminnya distribusi atau pasokan (*supply*) komoditi perikanan ke tangan konsumen.

Dari sisi kebijakan program pengembangan perikanan di daerah ini, terdapat empat poin yang menjadi penekanan dalam rapat koordinasi antar bidang terkait dengan pemasaran hasil perikanan daerah yakni: (1) pelaku usaha agar terus meningkatkan kualitas hasil tangkapan budidaya maupun pengolahan; (2) pelaku usaha perikanan agar memanfaatkan pintu ekspor Sulawesi Tengah secara maksimal baik lewat udara maupun laut; (3) instansi/lembaga yang terkait agar membantu pelaku usaha dalam peningkatan volume dan frekuensi ekspor perikanan Sulawesi Tengah ke mancanegara; dan (4) Pelaku usaha jasa pengangkutan baik itu maskapai penerbangan, perusahaan kapal pengangkut, ekspedisi dan kargo agar turut membantu ekspor perikanan dengan memastikan besaran harga jasa yang ditawarkan sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

j. Potensi Geopark Sulawesi Tengah

Geopark sendiri adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (Geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (Geoheritage),

Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya. Kondisi geologi Indonesia yang terletak pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik mengakibatkan Indonesia memiliki Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang bernilai, Keragaman Geologi (*Geodiversity*). Keragaman ini memiliki nilai Warisan Geologi (*Geoheritage*) yang terkait dengan Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*). Nilai-nilai inilah yang dapat dimanfaatkan melalui konsep pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) yang berkelanjutan, utamanya dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan Taman Bumi (*Geopark*).

Pengembangan taman bumi dilakukan melalui 3 (tiga) pilar meliputi konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata, diperlukan tata kelola pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Republik Indonesia menganggap pengembangan taman bumi ini menjadi sangat penting. Ini ditunjukkan oleh Presiden RI Joko Widodo dengan menandatangani Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi atau *Geopark*.

Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Taman Bumi, merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan pengembangan *Geopark* (Pasal 2). Tujuannya, seperti yang tertulis di Pasal 3, Melakukan tata kelola pengembangan *Geopark* guna mewujudkan pelestarian *Geoheritage*, *Biodiversity*, dan *Cultural Diversity* yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konversi, edukasi, dan pembangunan perekonomian secara berkelanjutan. Ada 110 potensi warisan geologi yang ada di Indonesia, 3 di antaranya ada di Sulawesi Tengah antara lain sesar Palu-koro, Danau Poso dan sekitarnya, Danau Kars Banggai Kepulauan. Danau Poso memiliki fenomena yang jarang ditemukan di Indonesia, di mana fenomena itu adalah adanya batu-batuan dasar kerak bumi. Selain itu, ia juga didukung oleh situs-situs megalitikum kelas dunia, serta didukung keberadaan sumberdaya hati ikan sidat. Keberadaan sidat *anguilla marmorata* atau dalam bahasa lokal kami

menyebutnya masapi yang melimpah dibandingkan tempat lain di seluruh Indonesia, menjadi salah satu alasan mengapa Danau Poso menjadi danau prioritas nasional untuk dilindungi. Namun, Danau Poso memiliki banyak hal lain yang perlu dilindungi selain sidat.

Danau Poso adalah danau tektonik. Sebagai danau tektonik, Danau Poso merupakan salah satu bukti sejarah peristiwa terbentuknya pulau Sulawesi. Danau Poso adalah salah satu danau purba di dunia. Sebagai danau purba, Danau Poso memiliki keanekaragaman hayati endemik yang dimiliki dunia. Pemerintah Kabupaten Poso hampir setiap tahunnya menerima para peneliti dari dalam dan luar negeri yang tertarik untuk menggali dan menulis tentang Danau Poso. Ini menunjukkan banyak orang memberikan perhatian ke Danau Poso karena memiliki keunikan dan kekhasan yang luar biasa. Selain bagi para peneliti dan akademisi, Danau Poso merupakan sumber kehidupan masyarakat Poso. Selama ratusan tahun, Danau Poso dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber air minum dan irigasi, menjadi sarana transportasi, menjadi obyek wisata, membuka lapangan pekerjaan yang menunjang perekonomian warga antara lain dengan menjadi nelayan, atau membuka usaha kecil. Di Danau Poso, ada kebudayaan warga yang berkembang. Beberapa kebudayaan danau yang berkembang adalah wayamasapi, sebuah cara menangkap ikan secara tradisional menggunakan pagar dari bambu; ada juga monyilo atau cara menangkap ikan menggunakan tombak dengan bantuan lampu petromaks pada malam hari, serta mosango. Sebagai aset kehidupan masyarakat, tentu saja Danau Poso perlu untuk dikelola dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Dalam setiap pemerintahan di Kabupaten Poso, telah mendengar banyak cerita dari masyarakat tentang makna Danau Poso bagi mereka. Salah satunya dari komunitas yang menamakan diri sebagai penjaga Danau Poso. Mereka menyebutkan bahwa Danau Poso bukan sekedar sekumpulan air, tetapi sebuah kehidupan. Pemahaman yang komprehensi mengenai *geopark* dan mengenai potensi *geopark* di Danau Poso yang sedang diusulkan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk model pembangunan berbasis danau dan sungai di Kabupaten Poso. Bukan hanya model pembangunan berkelanjutan yang melindungi alam, melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga sejarah dan kebudayaan tapi juga model pembangunan dimana pemerintah daerah berkolaborasi langsung dengan masyarakat serta para akademisi dalam mewujudkannya.

k. Isu Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang dapat menghambat partisipasi dan peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Penyandang disabilitas yang dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai orang cacat, sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai risiko untuk kecacatan. Konflik bersenjata berkepanjangan di Aceh dan Papua, konflik horizontal di kepulauan Maluku dan di berbagai daerah di seluruh Indonesia karena perebutan lahan, pekerjaan, atau pelanggaran adat tertentu, berbagai bencana alam yang datang bertubi-tubi di berbagai daerah sepanjang tahun, masih adanya insiden penyakit polio dan lepra, kekurangan vitamin A, tingginya insiden stroke, serta buruknya keselamatan pasien (*patient safety*) dalam praktek kedokteran.

Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah ikut ditandatangani oleh Indonesia mengamanahkan Negara untuk mengambil kebijakan yang diperlukan untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif gender, termasuk rehabilitasi kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. Disabilitas bukan merupakan kecacatan semata namun merupakan hasil interaksi dari keterbatasan yang dialami seseorang dengan lingkungannya, bukan hanya fisik atau jiwa, namun merupakan fenomena multi dimensi yang terdiri dari fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, hambatan partisipasi dan faktor lingkungan.

Salah satu kelompok yang paling rentan dalam situasi pandemik Covid 19 ini adalah penyandang disabilitas, dengan ragam disabilitasnya sebagian penyandang disabilitas tidak dapat menerapkan aturan untuk *social distancing* atau *physical distancing*, karena dalam kesehariannya mereka membutuhkan pendamping, artinya mereka harus selalu berinteraksi dengan pihak lain untuk melakukan aktivitasnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Isu penyandang disabilitas adalah masih ada stigma negatif di masyarakat bahwa penyandang disabilitas ini masih dianggap

masyarakat kelas dua, jadi tidak diperhatikan aksesibilitasnya, contoh bagaimana di banyak daerah di Indonesia, bahkan di kota besar seperti Jakarta, masih terdapat gedung yang tidak memiliki jalan akses untuk disabilitas seperti tangga ram untuk mereka yang kesulitan mobilitas. Penyandang disabilitas juga masih mengalami kesulitan untuk mengakses transportasi umum meski sudah ada beberapa yang menyediakan fasilitas untuk mempermudah akses bagi mereka, tetapi jumlahnya terbatas. Aksesibilitas juga belum diberikan dalam forum-forum seperti rapat yang melibatkan komunitas tuli, tetapi tidak menyediakan penerjemah bahasa isyarat atau alat *running text* untuk melibatkan mereka dalam diskusi. Pemerintah Indonesia sendiri telah menjamin kesempatan kepada kelompok disabilitas dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya termasuk mengatur kuota untuk mereka. Pemerintah Pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Sementara itu, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit satu persen penyandang disabilitas.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menyebutkan terdapat 15.790 penyandang disabilitas di Provinsi Sulteng dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai 3.925 jiwa, sebaliknya, jumlag tersedikit berada di Kabupaten Buol sebanyak 173 jiwa. Beberapa organisasi LSM yang bergerak dalam pemberdayaan Penyandang Disabilitas se-Sulteng (PPDI) telah bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dalam beberapa program yakni: BRSPDI Nipotowe di Palu, JBI dan beberapa NGO seperti PKBI-JMK- Oxfam, YEU dan ASB, DW Nipotowe serta Forum Komunitas Keren.

1. Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terdapat lima (5) isu prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A) adalah pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Kedua, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak. Ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, penurunan pekerja anak. Kelima, pencegahan perkawinan anak. Upaya yang tengah dilakukan Pembangunan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Sementara itu, pembangunan perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan,

eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Kemen PPPA terkait pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, yakni melakukan sinergi dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program MEKAAR (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), untuk menjangkau sekitar 5,5 juta perempuan Indonesia yang telah dibimbing dan 36 ribu pendamping yang mayoritas perempuan. Fungsi baru Kemen PPPA yaitu penyediaan layanan rujukan akhir komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), seluruhnya memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional. Layanan penanganan perempuan korban kekerasan dan setiap anak yang tergolong AMPK harus berjalan secara komprehensif dan tuntas dari hulu ke hilir. Peran berbagai pemangku kepentingan untuk berjejaring dalam penyediaan layanan ini juga sangat dibutuhkan. Menindaklanjuti tambahan fungsi layanan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut mendukung dan mendorong agar semua provinsi dan kabupaten/kota membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA). Namun hingga saat ini, baru ada 28 provinsi dan 93 kabupaten/kota yang sudah membentuk UPTD-PPA. Hal ini merupakan tantangan ke depan yang harus kita wujudkan, menambahkan jumlah UPTD PPA di seluruh daerah yang belum membentuk.

Pada 2021, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, sebesar Rp 101,7 Miliar bagi 34 Provinsi dan 216 Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan tindak lanjut atas Rapat Kabinet terbatas pada 9 Januari 2020 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan kewenangan daerah dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan cakupan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagai prioritas pembangunan nasional.

Bencana alam gempa bumi dengan kekuatan 7,4 SR disusul tsunami dan likuefaksi yang terjadi di Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong pada tanggal 28 September 2018, meninggalkan penderitaan dan trauma mendalam yang berkepanjangan bagi masyarakat setempat, khususnya pada perempuan dan anak. Berbagai masalah sosialpun bermunculan seperti meningkatnya kasus perkawinan anak, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, pelecehan dan kekerasan seksual, perempuan rentan terserang penyakit reproduksi, terganggunya hak Pendidikan anak, serta hak perempuan terkait sanitasi yang belum terpisah dengan laki-laki.

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan kasus anak sebanyak 246 kasus yang dihitung dari Januari hingga Oktober 2019. Dari 246 kasus tersebut, sebanyak 82 kasus atau sebesar 9,7 persen adalah kasus perkawinan anak di bawah umur. Pada awal Tahun 2019, jumlah perkawinan anak masih relatif kecil karena beberapa perkawinan dilaksanakan “di bawah tangan” sehingga belum semuanya terungkap. Akan tetapi pada Bulan Agustus hingga Oktober 2019 jumlah perkawinan anak meningkat disebabkan karena permasalahan ekonomi dan lingkungan. Selain perkawinan anak, kasus lain yang dialami para penyintas di hunian sementara (huntara) adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jumlah kasus KDRT pasca bencana selama satu tahun, terhitung sejak Oktober Tahun 2018 hingga Oktober 2019 sebanyak 76 kasus. Jenis kasus yang terjadi berupa kekerasan fisik, kekerasan non fisik seperti perselingkuhan, dan kekerasan ekonomi yaitu penelantaran anak dan istri.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk tim gerakan bersama jaga keluarga kita (Berjarak) yang berperan untuk melindungi perempuan dan anak dari wabah virus corona (COVID-19). Tim ini telah terbentuk dan telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 463/129/DP3A/2020 tentang tim gerakan Berjarak ini ditunjuk Kepala DP3A Sulteng sebagai ketua tim pelaksana, dan seluruh bidang dan sub bagian di lingkup OPD tersebut menjadi anggota dari susunan keanggotaan tim itu. Selain dari pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, juga melibatkan pihak non-pemerintah seperti lembaga kemanusiaan/LSM yang fokus dan peduli terhadap perempuan dan anak, serta komponen gender. Sasaran kegiatan ini, lanjut dia, keluarga terutama anggota keluarga, perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas, termasuk keluarga yang terdapat perempuan pelaku usaha kecil atau mikro yang terdampak Covid-19.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulteng selama periode 2016-2020 mengalami penurunan dari 91,97 poin pada 2016 menjadi menjadi 91,87 poin pada 2020. Demikian pula pada periode 2019-2020 menurun dari 92,01 poin menjadi 91,87 poin. Secara historis, penurunan IPG dimulai dari Tahun 2014 yakni sebesar 92,69 poin menjadi 92,25 poin atau terjadi penurunan terbesar yakni 0,44 poin pada periode tersebut. Lalu pada periode 2015-2016 menurun lagi menjadi 91,91 poin atau menurun 0,34 poin, lalu menurun lagi menjadi 91,66 poin atau mengalami penurunan sebesar 0,25 poin

pada periode 2016-2017, sebelum meningkat lagi sebesar 0,42 poin menjadi 92,08 pada 2018. Ada tiga dimensi komponen pembentuk IPG yakni Umur Harapan Hidup (UHH) laki-laki dan perempuan, Harapan Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) laki-laki dan perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan (RLS), Pengeluaran Perkapita Pertahun (Purchasing Power Parity, PPP). Pada Tahun 2020, komponen UHH, UHH laki-laki lebih singkat daripada perempuan masing-masing 66,77 tahun 70,72 tahun. Pada komponen HLS, laki-laki lebih singkat daripada perempuan masing-masing 13,07 tahun dan 13,51 tahun. Sebaliknya, pada komponen RLS, RLS laki-laki lebih lama daripada perempuan yakni masing-masing 9,07 tahun dan 8,58 tahun. Hal ini berarti kecenderungan perempuan bersekolah justru dikorbankan demi Pendidikan laki-laki di dalam setiap keluarga. Komponen terakhir yakni pengeluaran perkapita (PPP) laki-laki lebih besar daripada perempuan yakni masing-masing Rp 12,99 juta dan Rp 7,7 juta. Penurunan IPG menjadi tantangan bagi Provinsi Sulteng periode 2021-2026.

m. Reformasi Birokrasi di Provinsi Sulteng

Reformasi Birokrasi konteks daerah Sulawesi Tengah tetap mengacu pada Rood Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi yakni bertumpu pada masalah-masalah mendasar yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masalah-masalah mendasar yakni: Manajemen Perubahan Birokrasi, Organisasi yang gemuk, Peraturan Perundang-Undangan Overlapping, SDM Aparatur tidak Kompeten, Tumpang Tindih Kewenangan, Pelayanan Publik masih buruk, Pola pikir Rule-based dan Budaya kinerja belum terbangun.

Namun dalam konteks Daerah Sulawesi Tengah disesuaikan dengan kondisi karakter Daerah, situasi Sosial politik, budaya dan kondisi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu fokus Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengacu pada Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Tahun 2021-2024 menitik beratkan pada Reformasi Birokrasi yang dapat “bergerak cepat” melakukan perubahan-perubahan cepat dengan mempertimbangkan kemampuan mengantisipasi perubahan lingkungan Internasional, Nasional dan Daerah. Untuk itu Fokus Sentral Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah : Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, Perampingan-Pengabungan OPD sesuai Tugas dan Fungsi dan Penggunaan Teknologi Informasi serta *Big Data* dalam Pengambilan Keputusan dan Kebijakan.

Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024 bergerak cepat melakukan Perubahan bersendi pada Kualitas Pelayanan Prima dengan prinsip pelayanan lebih implementatif, melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan dan Regulasi (vertikal dan horisontal serta program didesain sampai ke tingkat unit kerja. Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2024 pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah asas yang akan dikedepankan adalah **Fokus** dan **Prioritas**. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah mengantisipasi juga Pemindahan Ibukota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur dengan mempersiapkan Birokrasi Pemerintah Sulawesi Tengah yang **Responsif** perubahan-perubahan dan mampu menjadi patner seimbang secara kualitatif dengan kebutuhan Ibukota Negara Baru.

n. Kebudayaan

Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Sulteng merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan. Dalam konteks ini, di Tahun 2021, telah disahkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah. Komitmen Pemerintah Provinsi Sulteng berusaha menyusun strategi bertumpu pada beberapa permasalahan (i) Belum tersedianya secara komprehensif, *by name by address dan by cases* data dan informasi lengkap, mutakhir tentang potensi dan khazanah kebudayaan daerah yang ada yang berorientasi pada *cultural evidence based policy*; (ii) Sumberdaya Manusia yang bekerja di sektor Kebudayaan baik dari kalangan instansi pemerintah maupun masyarakat relatif tingkat penghidupannya kurang memadai; (iii) Belum adanya titik temu pemahaman antara hubungan agama dan kegiatan budaya; (iv) Kegiatan dan Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah belum menjadi isu utama, baik dalam suksepsi politik maupun dalam isu perencanaan pembangunan, kebijakan pembangunan dan politik anggaran; (v) Peran Negara/pemerintah dalam penangan budaya masih bersifat intervesionist. pemerintah dalam upaya pemajuan kebudayaan sepatutunya berperan dalam posisi fasilitatif dan *enabling setting* sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang

Pemajuan Kebudayaan; (vi) Masalah desentralisasi dan jarak pengambilan keputusan tentang pemajuan kebudayaan cenderung terjadi *re-sentralisasi*, lemahnya upaya pemajuan cagar budaya di Sulawesi Tengah; (vii) Upaya Pelembagaan Nilai-nilai dan Pemajuan budaya daerah melalui lembaga pendidikan belum optimal, sehingga pemuatan nilai dan pemajuan kebudayaan daerah melalui lembaga pendidikan masih bersifat opsional dan sekunder baik secara kurikuler maupun kelembagaan pendidikan; (viii) Banyak produk budaya lokal, terutama produk hasil teknologi/pengetahuan lokal belum terlindungi oleh hukum secara memadai.

Dalam konteks ini, kinerja Pemerintah Provinsi Sulteng Periode 2021-2024 terletak pada tercapainya pelembagaan kebudayaan di Sulteng yang tercermin dari berdiri sendirinya Perangkat Daerah Kebudayaan yang berdiri sendiri sehingga secara kelembagaan pemajuan kebudayaan terintegrasi dan terwadahi dalam Lembaga Pemerintah yang saling sinergi dalam semangat Pentahelix Pemajuan Kebudayaan Sulteng.

o. Isu Stunting

Data elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng Tahun 2019-2020 menyebutkan bahwa Angka Stunting di Provinsi Sulteng menurun dari 29.205 balita pada 2019 atau proporsinya mencapai 21,3 persen menjadi 25.500 balita pada 2020 atau proporsinya mencapai 16,2 persen. Selama periode tersebut, jumlah balita *stunting* terbanyak di Kabupaten Donggala mencapai 6.977 jiwa pada 2019 atau proporsinya sebesar 34,9 persen dari 19.983 jiwa balita terentry menjadi 4.370 jiwa balita *stunting* di Kabupaten Donggala atau proporsinya mencapai 27,1 persen dari total balita terentry yakni sebesar 16.096 jiwa. Jumlah balita *stunting* kedua terbanyak berada di Kabupaten Parigi Moutong yakni 4.033 jiwa balita dari 18.733 jiwa balita terentry pada 2019 menjadi 3.805 jiwa balita atau proporsinya mencapai 11,4 persen pada 2020. Jumlah tersedikit balita *stunting* berada di Kabupaten Banggai Laut mencapai 541 jiwa balita pada 2019 dari 2.601 jiwa balita terentry. Sedangkan di Tahun 2020, jumlah balita *stunting* tersedikit berada di Kabupaten Morowali Utara mencapai 646 jiwa balita dari 3.706 jiwa balita terentry.

Dari hasil survei status Gizi tahun 2022 bahwa angka Stunting di Provinsi Sulawesi Tengah masih sangat tinggi yaitu 29,7% dan berada di urutan ke delapan tertinggi di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Kabupaten Parigi Moutong masih tetap yang terbesar yaitu 31,7% sedangkan target yang ingin dicapai secara Nasional sebesar

14% pada Tahun 2024. Provinsi Sulawesi Tengah sendiri target rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu sebesar 11%.

p. Daerah Tertinggal, Kawasan Desa dan Perdesaan, Kawasan Transmigrasi, serta Kinerja Dana Desa

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 menyatakan bahwa terdapat 62 daerah tertinggal di Indonesia. Dari 62 daerah tertinggal tersebut, satu-satunya provinsi di daratan Sulawesi yang masih memiliki daerah tertinggal adalah Provinsi Sulteng yakni Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una.

Di Tahun 2022, Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Sulteng mencapai 0.6705 poin berada pada posisi 21 nasional dan berada di bawah IDM nasional yang mencapai 0,6724 poin. pada Selama periode 2016-2020, di Tahun 2016, dari 1.842 desa di Provinsi Sulteng, 204 desa berada pada kategori “Sangat Tertinggal” atau proporsinya mencapai 11,07 persen, “Desa Tertinggal” mencapai 1.100 desa atau proporsinya mencapai 59,72 persen, 523 desa termasuk kategori “Berkembang” atau proporsinya 28,39 persen, 15 desa berada pada kategori “Maju” atau proporsinya 0,81 persen, serta belum ada desa kategori “Mandiri”. Di Tahun 2020, jumlah desa kategori “Sangat Tertinggal” menurun drastis sebesar 37,56 persen atau proporsinya tinggal 1,68 persen, sedangkan desa „Tertinggal” berkurang lebih dari separuhnya dari 1.100 desa menjadi 436 atau berkurang 20,65 persen atau proporsinya tinggal 23,67 persen selanjutnya desa “Berkembang” meningkat dari 523 desa menjadi 1.096 desa atau terjadi kenaikan sebesar 20,32 persen atau proporsinya di Tahun 2020 mencapai 59,50 persen, desa kategori “Maju” meningkat dari 15 desa menjadi 267 desa, mengalami kenaikan sebesar 105,40 persen. Selanjutnya, desa kategori “Mandiri” berjumlah 12 desa di Tahun 2020.

Berkurangnya desa kategori “Sangat Tertinggal” dan “Tertinggal” patut dipahami bahwa Pemerintah Provinsi Sulteng dengan 12 kabupaten masih mempunyai pekerjaan rumah dalam mendorong transformasi desa menuju “Mandiri”. Apalagi saat ini, Dana Desa (DD) yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meningkat dari Rp 500.301.180.000,- pada 2016 menjadi Rp 9.197.681.400.000,- atau terjadi kenaikan sebesar 107,07 persen belum sebandingkan dengan target membuat 1.842 desa berada dalam kategori “Mandiri”. Selain itu, dari 13.577 desa yang belum terakses signal internet di Indonesia, 465 desa di Provinsi Sulteng belum terakses internet sehingga akan berpengaruh bukan saja pada system pembelajaran jarak jauh (PJJ), tetapi *digital farming* juga terpengaruh.

Secara umum, permasalahan dan isu strategis di daerah tertinggal yang dimiliki oleh Provinsi Sulteng yakni Kabupaten Donggala, Tojo Una-Una, Parigi Moutong, dan Banggai kepulauan meliputi angka kemiskinan tinggi bahkan Kabupaten Donggala tahun 2022 memiliki angka kemiskinan tertinggi di Sulteng mencapai 16,30 persen, Kabupaten Tojo Una-Una mencapai 16,12 persen dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 14,43 persen dan banggai Kepulauan sebesar 13,34. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar 70,28, untuk IPM pada daerah tertinggal Sulteng. Kabupaten Tojo Una-Una merupakan daerah yang mempunyai IPM paling rendah di Sulteng mencapai 64,59 poin. Sedangkan IPM Kabupaten Donggala dan Sigi masing-masing 65,56 poin dan 68,12 poin. Sarana dan Prasarana di daerah tertinggal sangat terbatas. Kondisi jalan di Daerah Tertinggal Sulteng dalam kondisi Mantap 55,78 persen; Rasio Elektrifikasi di Daerah Tertinggal Sulteng 76,9 persen; Pengguna Air Bersih di Daerah Tertinggal Sulteng 55,58 persen; Signal Telpon Seluler di Daerah Tertinggal Sulteng 47,97 persen. Sedangkan Kondisi Jalan Rata-Rata Nasional Dalam Kondisi Mantap mencapai 48,78 persen; Rasio elektrifikasi Rata-Rata Nasional mencapai 83,18 persen; Pengguna Air Bersih Rata-Rata Nasional mencapai 66,55 persen; Desa-desa Rata-Rata Nasional yang belum terakses signal telepon tinggal 32,11 persen. Selain itu, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, faktor geografis juga menentukan ketertinggalan tersebut.

Provinsi Sulteng mempunyai 1.842 desa. Permasalahan di Kawasan desa dan perdesaan meliputi kurang berkembangnya dunia usaha, BUMDESA, dan BUMDESA Bersama, rendahnya akses modal dan usaha di desa, rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal sebagai produk unggulan desa, belum optimalnya penanganan *stunting* di desa, terbatasnya sarana dan prasarana dasar di desa, kurangnya aksesibilitas dan konektivitas antar desa dan antar Kawasan perdesaan, belum optimalnya infrastruktur digital di perdesaan. Ada 465 desa yang *blank spot*, masih belum optimalnya pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan prioritas.

Kawasan Transmigrasi menghadapi permasalahan yang hampir sama dengan Daerah Tertinggal dan Kawasan Desa dan Perdesaan yakni terbatasnya sarana dan prasarana dasar baik Pendidikan, kesehatan, ekonomi, telekomunikasi, konektivitas dan lain-lain, kurangnya kerjasama promosi dan kemitraan ekonomi dan investasi, rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM di daerah transmigrasi, belum optimalnya infrastruktur digital di Kawasan Transmigrasi, adanya potensi konflik pertanahan, terbatasnya lahan transmigrasi

yang *clear and clean*, serta sumber energi listrik terbatas.

q. Stabilitas dan Keamanan Daerah

Saat ini kita menghadapi dua isu strategis yang berkaitan dengan stabilitas keamanan nasional, yakni pertama: keragaman agama, suku, adat serta budaya yang dimiliki oleh Indonesia merupakan potensi dan aset yang sangat besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar dan maju, namun sebaliknya apabila kita sebagai anak bangsa tidak mampu membawa dan mengelolanya dengan bijak akan menjadi ancaman serta potensi kehancuran bangsa kita sendiri, masuknya paham radikalisme, terorisme serta gerakan intoleran tentunya berpotensi besar dalam mengganggu stabilitas nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, yakni keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional, tentunya tidak mudah apabila tidak mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia, minimnya wawasan serta pengetahuan tentang keamanan tentunya menjadi hambatan dalam membentuk masyarakat yang sadar akan keamanan itu sendiri. Diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan dapat mendukung target organisasi dalam upaya menciptakan situasi aman, efisien dan produktif di lingkungan kerja, menciptakan interaksi antara peserta sehingga organisasi, instansi atau perusahaan dapat saling bertukar informasi dan pengalaman yang berbeda, sehingga dapat mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan, dan mewaspadaikan segala kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas di lingkungan kerja.

Diperlukan koordinasi antar pihak-pihak terkait maupun *stakeholder* dalam rangka penerapan sistem manajemen pengamanan, peningkatan, perbaikan dan pembaharuan sistem manajemen pengamanan (SMP) secara periodik melalui analisis dan evaluasi sistem yang akurat, memperluas jaringan informasi dengan metode efektif melalui pengembangan *community policing* yang mendukung pelaksanaan tugas pengamanan, memberikan panduan dalam melakukan mitigasi resiko keamanan di area lingkungan kerja, mencegah dampak negatif dari penyebaran hoaks dan dapat menangkal radikalisme dan terorisme tumbuh di nusantara.

Dalam era globalisasi saat ini sudah menyebabkan begitu banyak perubahan diberbagai bidang kehidupan manusia, antara lain terciptanya kehidupan dengan arus informasi yang sangat canggih dan super cepat serta terbentuknya dunia yang tanpa batas (Borderless Word) yakni batas-batas politik, ekonomi dan budaya antar bangsa menjadi samar sehingga tidak jelas mana yang baik dan

mana yang buruk. Meningkatnya gangguan kamtibmas yang dapat menyebabkan terganggunya stabilitas nasional juga menjadi salah satu dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di era globalisasi saat ini, tentunya keadaan tersebut dapat memberikan dampak pada menurunnya produktifitas dan aktifitas industrialisasi nasional. Dalam upaya menurunkan tingkat gangguan kamtibmas, tentunya Polri dengan kewenangan tugasnya menjaga keamanan dalam negeri (Kamdagri) lebih meningkatkan profesionalitas serta menciptakan program-program masyarakat untuk dapat meminimalisir resiko terjadinya gangguan kamtibmas yang dapat menurunkan stabilitas keamanan nasional.

Salah satu syarat dalam membangun iklim investasi adalah ketersediaan suprastruktur atau kondisi non fisik yang terbangun di suatu daerah. Hal ini dapat dirasakan melalui rasa aman dan nyaman bagi para investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Penciptaan rasa aman dan nyaman bagi investor dapat dilihat dari kondisi keamanan daerah, suhu politik dan kepastian hukum yang berlaku. Khusus keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini masih tergolong kurang menguntungkan bagi investor. Isu konflik yang sering terjadi khususnya Kabupaten Poso, Sigi dan bahkan Kota Palu menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Stigma Sulawesi Tengah sebagai daerah yang belum aman sebagai konsekuensi dari konflik horizontal di Poso pada Tahun 2000 masih melekat setiap orang yang berasal dari luar Sulawesi Tengah ketika akan datang ke wilayah ini. Berita perkelahian antar desa yang sering terjadi di wilayah Sigi yang sering terjadi bahkan menimbulkan korban jiwa menjadikan penilaian negatif bagi investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu.

r. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 34A dan 34B serta regulasi turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, maka isu strategis terkait pengarusutamaan transformasi digital adalah pertama, infrastruktur digital. Selain infrastruktur terkait konektivitas antar penduduk secara fisik berupa jalan, jembatan, pelabuhan, bandara maupun infrastruktur fisik lainnya berupa irigasi maupun Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU), infrastruktur digital menjadi sarana dan prasarana yang menghubungkan antar penduduk sebagai wahana pembangunan berbasis pembangunan komunitas. Pemerintah Provinsi Sulteng wajib

mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa percepatan penetrasi pita lebar, dukungan Pemerintah Provinsi Sulteng dalam memfasilitasi penyelenggara telekomunikasi dalam melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, efisien. Infrastruktur dimaksud tidak hanya terbatas pada gorong-gorong (*ducting*), tetapi mencakup pula tiang telekomunikasi (*tower*) dan lubang kabel (*manhole*) untuk dapat digunakan secara Bersama dan terjangkau.

Kedua, Pemerintah Digital. Pemerintah Provinsi Sulteng perlu menyelenggarakan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) melalui layanan administrasi pemerintah secara elektronik yang diimplementasikan melalui layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan system penghubung layanan.

Ketiga, Ekonomi Digital. Satu dari beberapa pendorong daya saing ekonomi Sulteng adalah strategi memanfaatkan teknologi digital melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi, *digital farming* maupun system pembayaran digital melalui Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) seperti QR code Indonesia Standard (QRIS) dalam transaksi non tunai maupun di sisi hulu melalui melalui Drone Participatory Rural Appraisal dalam peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan termasuk memperkirakan potensi lestari perikanan dan kelautan sebagai implementasi *Maximum Sustainability Yield (MSY)*, serta di sektor lainnya seperti pariwisata dan transportasi maupun jasa pergudangan.

Keempat, Masyarakat Digital. Implementasi pengarusutamaan transformasi digital dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng. Selain itu, sesuai Misi 1 Pemerintah Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026, yakni Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar dan Misi 4 Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Misi 8 Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital dapat dilakukan melalui system Pendidikan untuk mendukung kesiapan tenaga kerja dalam era industri 4.0 melalui fasilitasi literasi digital pada masyarakat dan talenta digital.

s. Perkebunan dan Deforestasi

Subsektor perkebunan memainkan peran yang cukup penting dalam ekonomi nasional. Sekitar seperempat Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian disumbang oleh subsektor perkebunan.

Subsektor ini juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pemasukan devisa negara melalui ekspor produk-produk hasil pertanian. Hingga kini, subsektor perkebunan masih dihadapkan pada persoalan struktural seperti relatif rendahnya produktivitas tanaman perkebunan yang diusahakan perkebunan rakyat dibandingkan dengan perkebunan besar, baik yang dikelola perusahaan negara maupun swasta. Hal ini terlihat jelas pada komoditas kopi, kakao, dan tebu yang merupakan komoditas perkebunan strategis yang sebagian besar dibudidayakan oleh perkebunan rakyat. Selain itu, ketimpangan produktivitas lahan dan tenaga kerja yang cukup lebar juga terjadi antar wilayah. Pandemi COVID-19 masih berdampak nyata pada seluruh aspek kehidupan perekonomian nasional bahkan dunia. Penurunan terjadi pada sejumlah sektor ekonomi. Ketika sektor yang lain mengalami penurunan atau perlambatan, sektor Pertanian justru mengalami peningkatan pada kuartal 2 dan 3 tahun 2020. Salah satu penopang utama pertumbuhan positif PDB sektor pertanian kuartal lalu ialah subsektor perkebunan dengan kontribusi pada triwulan III sebesar 163,49 triliun rupiah atau 28,59%. Ini karena dorongan peningkatan permintaan komoditas perkebunan seperti kakao, karet, cengkeh dan tembakau serta peningkatan permintaan luar negeri untuk komoditas olahan kelapa sawit (CPO). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat ekspor perkebunan pada periode Januari-Oktober 2020 sebesar 359,5 Triliun Rupiah atau naik 11,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 322,1 triliun. Dengan nilai sebesar tersebut, sub sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 90,92 persen. Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada Januari-Oktober paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dan kopi. Ekspor perkebunan tertinggi terjadi di bulan Oktober yaitu sebesar 38,46 Triliun Rupiah dengan kenaikan sebesar 8,76 persen dari bulan sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa peluang ekspor komoditi perkebunan sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat meskipun ditengah wabah Covid 19 yang tengah melanda dunia. Selain peningkatan ekspor, sesuai data BPS bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) pertanian meningkat tajam dari 99,45 pada Juni 2020 menjadi 102,86 pada November 2020. NTP sub sektor tanaman perkebunan bahkan telah mencapai 110 pada bulan November 2020. Subsektor perkebunan pada November 2020 atau naik sebesar 2,25 persen dari Bulan Oktober. Kenaikan terutama terjadi pada kelompok kelapa sawit dan karet dimana terdapat kenaikan harga komoditas

tersebut di pasar internasional.

Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan ekspor pertanian hingga tiga kali lipat melalui program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks). Khusus untuk subsektor perkebunan, Kementan akan fokus pada komoditas strategis perkebunan seperti sawit, kopi, kakao, cengkeh, jambu mete, lada, pala, dan vanili, serta dengan tetap dengan komoditas andalan ekspor yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, teh, dan tembakau. Dalam pelaksanaannya Kementan tidak berkerja sendiri, Kementan akan merangkul berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, sehingga diharapkan nantinya terbangun Korporasi petani. Petani dan pekebun harus berada dan menjadi mitra Swasta dan BUMN, sehingga petani terangkat pendapatan dan kesejahteraannya. Impor Eropa pada tahun 2018 didominasi oleh biji kakao dengan volume mencapai 2,3 juta ton yang diikuti dengan cocoa butter, fat and oil dengan jumlah volume mencapai 604.529-ton, cocoa paste (excluding defatted) dengan volume mencapai 502.866 ton dan cocoa paste, wholly or partly defatted dengan volume mencapai 139.253 ton. Program BUN500 yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kakao nasional melalui penyediaan bibit kakao unggul. Ketersediaan benih unggul merupakan faktor penentu untuk meningkatkan produksi yang berdaya saing, dalam lima tahun ke depan BUN 500 diharapkan dapat menggenjot capaian ekspor perkebunan lebih agresif.

Jika dilihat dari sisi kontribusi ekonomi, Pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kuartal II 2021 tumbuh sebesar 7,07% (yoy) dan ekspor tumbuh 31,78% (yoy). Tahun 2020, *share* pertanian terhadap PDB sebesar 13,70% (penyumbang terbesar kedua setelah sektor manufaktur). Sektor Pertanian tetap tangguh selama pandemi karena pertumbuhannya selalu positif. Pada Kuartal II-2021, sektor pertanian tumbuh sebesar 0,38% (yoy) setelah menjadi satu-satunya lapangan usaha utama yang tumbuh positif di Kuartal II tahun lalu. Salah satu bukti kinerja positif sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan yakni kakao, kopi dan kelapa sawit dari Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah.

Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah negara Pantai Gading dan Ghana. Tiga besar negara penghasil kakao sebagai berikut; Pantai Gading (1.276.000 ton), Ghana (586.000 ton), Indonesia (456.000 ton). Luas lahan tanaman kakao Indonesia lebih kurang 992.448 Ha dengan produksi biji kakao sekitar 456.000 ton per tahun, dan produktivitas rata-rata 900 Kg per ha. Daerah penghasil kakao Indonesia adalah sebagai berikut: Sulawesi Selatan 184.000 ton (28,26%), Sulawesi Tengah 137.000 ton (21,04%),

Sulawesi Tenggara 111.000 ton (17,05%), Sumatera Utara 51.000 ton (7,85%), Kalimantan Timur 25.000 ton (3,84%), Lampung 21.000 ton (3,23%) dan daerah lainnya 122.000 ton (18,74%). Pemerintah menetapkan empat provinsi di Sulawesi sebagai produsen utama kakao nasional. Keempat provinsi yang menjadi produsen utama kakao nasional adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Keempat provinsi itu sudah sejak lama bergelut dengan komoditas kakao sehingga lebih potensial dikembangkan sebagai sentra pengembangan kakao berikut industri pengolahannya. Selain itu juga didukung dengan kondisi alam beriklim tropis yang dibutuhkan bagi tanaman budidaya kakao.

Pada 2020, keempat provinsi tersebut masih tercatat sebagai provinsi penghasil kakao tertinggi yakni Sulawesi Tengah sebanyak 127,3 ribu ton, Sulawesi Tenggara sebanyak 114,9 ribu ton, Sulawesi Selatan sebanyak 103,5 ribu ton dan Sulawesi Barat sebanyak 71,3 ribu ton. Komoditi kakao menjadi primadona petani di Provinsi Sulawesi Tengah, utamanya di Kabupaten Sigi. Lima desa yang telah ditetapkan sebagai sentra pengembangan komoditas perkebunan khususnya kakao organik adalah Desa Berdikari, Desa Karunia, Desa Bahagia, Desa Sintuwu dan Desa Petimbe.

Isu strategis lainnya terkait dengan pengembangan tanaman perkebunan adalah deforestasi terutama dari kelapa sawit. Realitanya Industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. pada tahun 2021 ini Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan peremajaan (*replanting*) sebanyak 180 ribu hektar kebun kelapa sawit milik petani. Upaya ini dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat dengan umur tanaman tua yang produktivitasnya kurang dari 3-4 ton/ha. *Replanting* dilakukan dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), sehingga terjadi peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya secara optimal.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan keberterimaan minyak sawit Indonesia dengan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). ISPO menegaskan komitmen Indonesia dalam penurunan deforestasi dan emisi gas rumah kaca dari sektor kelapa sawit.

Salah satu data global yang digunakan untuk menjudge Indonesia adalah data yang baru-baru ini dirilis *Global Forest Watch* (GFW) yang merupakan data dari *global land analysis and discovery*, *University of Marryland* menyebutkan Indonesia berada pada posisi 10

teratas dengan laju deforestasi tertinggi. Dengan menggunakan informasi tutupan lahan, GFW mengkategorikan hutan primer sebagai area dengan kerapatan tutupan pohon minimum 30%. Konversi lahan perkebunan sawit di Indonesia bermula dari penanaman kelapa sawit pada lahan yang terlebih dahulu terdegradasi akibat kegiatan industri lain seperti kegiatan penebangan dan karet. Data yang disampaikan oleh Yanto Santosa (2018) mengungkapkan 22% lahan sawit berasal dari hutan sekunder dan 72% berasal dari semak belukar, rawa, lahan terbuka, bekas perkebunan lain, bahkan dari bekas lokasi penambangan.

Salah satu penyebab dari tingginya angka deforestasi tersebut dipengaruhi pemberian izin baik perkebunan maupun pertambangan. Terdapat 54 perusahaan yang mengantongi izin usaha perkebunan (IUP) dan izin lokasi (Inlok) dengan luas total mencapai 713.217 hektare, tersebar di Kabupaten Donggala, Buol, Morowali, Banggai, Tojo Unauna, Tolitoli dan Morowali Utara. Sedangkan untuk sector pertambangan terdapat kurang lebih 196 perusahaan tambang yang mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi dan operasi produksi dengan luasan total mencapai 469.965,81 hektar.

4.2.5 Isu Strategis Daerah Lainnya

Penyusunan RPD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perlunya suatu daerah menelaah dokumen perencanaan daerah lain karena alasan:

- 1) Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
- 2) Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
- 3) Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan;
- 4) Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Identifikasi kebijakan daerah lainnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Morowali terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.4.
Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
1	Tojo Una-Una	2021-2026	Konektivitas Pengembangan pariwisata Dukungan ketersediaan energi listrik
3	Morowali Utara	2021-2026	Dukungan ketersediaan energi listrik untuk kawasan industri di Morowali Utara Interkoneksi infrastruktur jalan
4	Banggai	2021-2026	Pengembangan Pariwisata dan industry daerah mendukung pengembangan ekonomi daerah.

4.2.6 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*)

Komitmen Indonesia untuk mewujudkan TPB bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh K/L dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu:

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
- 2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
- 6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;

- 8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
- 11) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
- 16) Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Studi Baseline Indikator TPB (SDGs) yang kemudian ditindaklanjuti Kabupaten Morowali dengan menyusun RAD SDG's Kabupaten Morowali. Tantangan terbesar yang dihadapi Sulawesi Tengah adalah angka kemiskinan di Sulawesi Tengah pada tahun 2022 masih berada pada angka 12,33 persen, sementara secara nasional 9,57 persen. Dalam kaitan dengan isu strategis Kabupaten Morowali menyangkut:

1. Masalah masih tingginya angka Kemiskinan Daerah dimana pada hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 12,58 persen. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin Tahun 2022 sebanyak 15,86 ribu jiwa atau urutan ke 9 tertinggi dari 13 Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Tengah.
2. Nilai Sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Morowali masih rendah dimana pada tahun 2022 berada pada level C, sementara target RPJMD akhir periode tahun 2022 pada Level BB.

4.2.7 Penelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali.

RPJPD merupakan dokumen yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJPD merupakan pedoman penyusunan RPJMD maupun RPD dan bahkan merupakan pedoman dalam perumusan Tujuan dan Sasaran RPD. Mengingat peran penting dari RPJPD, maka dalam penyusunan RPD Kabupaten Morowali 2024-2026, harus dilakukan telaahan terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Morowali 2005-2025. Rumusan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Morowali tahun 2005-2025 adalah ***“Morowali sejahtera bertumpu pada Agribisnis”***. Makna yang terkandung dalam muatan visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Agribisnis dikaitkan dengan pertanian dalam arti luas dan kegiatan atau sektor yang menunjang pengembangan sektor pertanian;
2. Agribisnis dikaitkan juga dengan menjadikan Kabupaten Morowali menjadi lumbung pangan (***“Si’E”***);
3. Agribisnis diartikan juga dengan kegiatan jasa termasuk pariwisata
4. Letak geografis potensi sumberdaya alam mendukung sebagai pusat pertumbuhan di bagian Timur Provinsi Sulawesi Tengah;

Potensi agribisnis, potensi sumberdaya manusia dan alam dan letak geografis dapat diartikan sebagai Wadah kemandirian lokal dimaksudkan sebagai kemandirian satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara hukum formal kita telah memiliki Daerah Otonom Kabupaten Morowali berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999. Sejalan dengan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan paradigma baru dari pola sentralisasi ke desentralisasi tentunya tidak dikehendaki adanya otonomi semu sebagaimana pada masa lampau, melainkan mewujudkan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Sesuai paradigma baru tersebut kemandirian lokal ini merupakan basis utama kekuatan dan ketahanan yang melahirkan stabilitas yang berakar dari kultur masyarakat dan wilayah ini. Kemandirian lokal ini akan melahirkan ketahanan lokal yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai perekat ketahanan regional dan nasional. Memperhatikan kondisi obyektif, tahap perkembangan yang

telah dicapai, dan prospek pengembangannya ke depan, maka rumusan Misi Morowali RPJPD Kabupaten Morowali tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Yang Lebih Berkeadilan;
- c. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pemerintahan dan Pemberdayaan Hukum;
- d. Melaksanakan Penataan Wilayah;
- e. Meningkatkan Stabilitas Keamanan (*Security*) wilayah

➤ **Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali 2005-2025.**

Dalam rangka pencapaian visi misi sebagaimana diuraikan diatas maka arah pembangunan Kabupaten Morowali di fokuskan pada beberapa hal yang meliputi:

- 1) Penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat;
- 2) Peningkatan optimalisasi pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam;
- 3) Revitalisasi pertanian;
- 4) Peningkatan pembangunan infrastruktur fisik;
- 5) Peningkatan pengembangan wilayah;
- 6) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk.

1) *Penguatan Kelembagaan Pemerintahan dan Masyarakat*

Kelembagaan pemerintah dan masyarakat dirumuskan dengan terfokus pada:

- a. Memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah;
- b. Meningkatkan intensitas sosialisasi perubahan paradigma manajemen pemerintahan;
- c. Meningkatkan pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kolaborasi antara unsur pemerintah, masyarakat dan unsur non-pemerintah dalam program-program pembangunan; dan
- e. Menata sistem informasi sumberdaya aparat pemerintah daerah.

2) *Optimalisasi Pemanfaatan dan Konservasi Sumberdaya Alam*

Optimalisasi pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam dirumuskan dengan terfokus untuk:

- a. Mengembangkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam, kehutanan, pertanian dan pertambangan;
- b. Mengembangkan pemanfaatan lahan dengan konservasi,

- rehabilitasi, dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
- c. Mengembangkan industri hasil hutan, perkebunan, dan pertanian untuk menghasilkan komoditi yang berorientasi pasar modern;
 - d. Meningkatkan pengawasan agro-input hutan produksi dan sarana serta prasarana pendukung hasil hutan dan perkebunan;
 - e. Membangun kemitraanusaha pengelolaan potensi kehutanan, perkebunan, dan agribisnis yang saling menguntungkan dan saling menghidupi;
 - f. Optimalisasi produksi tanaman perkebunan sebagai bahan baku untuk pengembangan agroindustri;
 - g. Mengembangkan fasilitas sistem informasi pasar untuk komoditi hasil- hasil agroindustri;
 - h. Mengembangkan ekstraksi hasil-hasil agroindustri;
 - i. Mengembangkan ekstraksi dan pemanfaatan potensi tambang dan energi dengan teknologi ramah lingkungan.

3) *Revitalisasi Pertanian*

- a. Optimalisasi pemanfaatan dan manajemen lahan pertanian;
- b. Peningkatan nilai tambah rantai pasokan (*supply chain value added*) yang terintegrasi dengan sistem pengembangan pertanian Kabupaten Morowali;
- c. Pengembangan infrastruktur pertanian yang handal;
- d. Meningkatkan saling hubungan dan aksesibilitas petani kepada sumber permodalan;
- e. Optimalisasi lahan tidur melalui invesatasi dalam bidang agrobisnis.

4) *Pengembangan Infrastruktur Fisik*

Pembangunan fisik dirumuskan dengan fokus untuk :

- a. Mengembangkan infrastruktur sarana transportasi jalan, pelabuhan laut, dan bandara udara
- b. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan;
- c. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. Mengembangkan instalasi listrik pada desa-desa yang belum terjangkau pelayanan listrik; dan
- e. Mengembangkan jaringan telepon kabel seluler.

5) *Pengembangan Kawasan/ Wilayah*

Pengembangan wilayah dirumuskan dengan terfokus untuk:

- a. Mengembangkan keterkaitan antar wilayah sesuai dengan kesesuaian fungsi dan tujuan pengembangan;
- b. Membangun prasarana dan sarana yang menghubungkan wilayah pengembangan dengan wilayah lain;
- c. Membangun Kota Baru Terpadu sebagai pusat pelayanan;
- d. Membangun Bandara Morowali, Pelabuhan export mengantisipasi kecepatan pertumbuhan maupun sentral pertumbuhan di Kawasan Timur Provinsi Sulawesi Tengah.
- e. Membangun data pokok wilayah dalam bentuk peta kondisi wilayah sesuai dengan peruntukan wilayah;
- f. Melakukan kerjasama wilayah antar pemerintahan yang mempunyai wilayah pengembangan yang sama;
- g. Membangun koordinasi antar sektor dalam kerangka pengembangan wilayah.

6) *Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat*

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk dirumuskan dengan terfokus untuk:

- a. Meningkatkan skala ekonomi kerakyatan;
- b. Memfasilitasi sumber-sumber permodalan usaha baik yang bersumber dari lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan;
- c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- d. Mengembangkan industri dan perdagangan yang berbasis pada agroindustri;
- e. Meningkatkan pola kemitraan antara usaha kecil, menengah dan usaha yang berskala besar dan;
- f. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perwujudan Tujuan dan Sasaran yang di implementasikan dalam misi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD ini dilaksanakan secara beriringan terintegrasi dan berkesinambungan dan tetap menjadi skala prioritas dalam setiap tahapan pembangunan 3 (tiga) tahunan program prioritas dalam penyusunan RPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pentahapan tersebut didasarkan pada periode RPD namun tetap disesuaikan dengan tahap RPJPD khususnya tahun 2024 sampai tahun 2025.

4.2.8 Penelaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali termuat dalam peraturan daerah Kabupaten Morowali nomor 7 tahun 2019

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali tahun 2019-2039.

Rencana Tata Ruang Wilayah dibutuhkan untuk mengarahkan pembangunan yang produktif, terkendali, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Morowali Utara sebagai pemekaran dari Kabupaten Morowali maka terjadi perubahan besar terhadap batas-batas Wilayah Kabupaten Morowali yang berimplikasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali;

RTRW Kabupaten adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Morowali Tahun 2019-2039 yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam Struktur dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat perumahan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Morowali bertujuan untuk Mewujudkan Kabupaten Morowali yang Berdaya Saing, dengan konsep pengembangan Industri, Pariwisata, Minapolitan, dan Agropolitan dengan memperhatikan Asas Penataan Ruang. Kebijakan Penataan Ruang daerah terdiri atas:

- a. Pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi antara pusat kegiatan lokal PKL, pusat pelayanan kawasan PPK dan pusat pelayanan lingkungan PPL secara berjenjang dan merata antara Wilayah darat dan pulau-pulau kecil untuk mendukung investasi;
- b. Pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan;
- c. Pengembangan kawasan agropolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar;
- d. Pengembangan kawasan minapolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar;
- e. Pengembangan kawasan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam untuk pemenuhan target Indonesia sebagai negara industri tangguh;
- f. Pengembangan sektor pariwisata alam/bahari, sejarah dan budaya, dan pariwisata buatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
- g. Penetapan dan pengembangan kawasan Strategis Kabupaten dari

sudut kepentingan ekonomi dan sosial budaya.

- 1) Strategi untuk mewujudkan kebijakan pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi antara pusat kegiatan lokal PKL, pusat pelayanan kawasan PPK dan pusat pelayanan lingkungan PPL secara berjenjang dan merata antara Wilayah darat dan pulau- pulau kecil untuk mendukung investasi meliputi:
 - a. mengusulkan pusat kegiatan lokal PKL hingga pada Wilayah pulau-pulau kecil untuk mendorong kemandirian kawasan perkotaan;
 - b. menghubungkan antar pusat kegiatan lokal PKL, pusat pelayanan kawasan PPK dan pusat pelayanan lingkungan PPL melalui jaringan transportasi secara terpadu antara transportasi darat, laut, dan udara;
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan yang menjangkau hingga kawasan perdesaan dan pulau-pulau kecil;
 - d. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang menjangkau hingga kawasan perdesaan dan pulau-pulau kecil;
 - e. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana air baku hingga kawasan perdesaan dan pulau-pulau kecil; dan
 - f. mengembangkan sistem jaringan parasarana lingkungan yang meliputi sistem jaringan air limbah, persampahan, dan drainase khususnya pada kawasan permukiman perkotaan.
- 2) Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan meliputi:
 - a. mempertahankan kawasan hutan lindung diluar kawasan *outline* yang telah ditetapkan, dari kegiatan industri, pertambangan dan kegiatan budidaya lainnya yang dapat merubah fungsi alam, bentang alam dan ekosistem alami;
 - b. membatasi pertumbuhan permukiman pada kawasan perlindungan setempat;
 - c. menyediakan ruang terbuka hijau RTH *public* dan *privat* untuk kepentingan masyarakat di kawasan perkotaan;
 - d. membatasi pertumbuhan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya pada kawasan konservasi;
 - e. mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung geologi;
 - f. mengendalikan pertumbuhan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya pada kawasan rawan bencana;
 - g. mempertahankan dan menjaga kelestarian benda cagar budaya

- yang bernilai tinggi;
- h. mempertahankan dan menjaga kelestarian ekosistem mangrove; dan
 - i. merehabilitasi kawasan lindung yang telah berubah fungsi.
- 3) Strategi pengembangan kawasan agropolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan agropolitan;
 - b. mengembangkan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) pangan;
 - c. mengembangkan pasar sentra pengembangan agrobisnis (SPA) yang lebih representatif untuk meningkatkan daya tarik pembeli lokal dan regional;
 - d. mengembangkan sistem jaringan jalan usaha tani yang terkoneksi dari lahan pertanian, tempat pengolahan hasil pertanian dan tempat pemasaran.
 - e. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi teknis, irigasi semi teknis, irigasi sederhana dan irigasi desa untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya pertanian lahan basah; dan
 - f. menetapkan dan meningkatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- 4) Strategi pengembangan kawasan minapolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan perikanan budidaya dengan dukungan balai benih ikan;
 - b. mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan ikan; dan
 - d. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan pulau-pulau kecil dengan Wilayah darat sebagai jalur distribusi.
- 5) Strategi pengembangan kawasan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam untuk pemenuhan target Indonesia sebagai negara industri tangguh terdiri atas:
- a. menetapkan dan membangun kawasan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri.
- 6) Strategi pengembangan sektor pariwisata alam/bahari, sejarah dan budaya, dan pariwisata buatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan terdiri atas:
- a. mengembangkan wisata bahari seperti wisata pantai, wisata pulau-pulau kecil, ekowisata mangrove, dan wisata alam bawah laut, dengan eksotisme lokasi sebagai daya tarik wisata;

- b. mengembangkan kegiatan pariwisata di pulau-pulau kecil secara terbatas dan terkendali yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melibatkan masyarakat setempat;
 - c. mengembangkan wisata alam seperti wisata air terjun, wisata penangkaran/perlindungan satwa, wisata goa, dan wisata puncak, dengan eksotisme lokasi sebagai daya tarik wisata;
 - d. menjaga dan mengembangkan kelestarian kawasan dan/atau benda cagar budaya, serta kawasan lainnya yang memiliki nilai historis dan estetika tinggi sebagai daya tarik wisata sejarah dan budaya;
 - e. menjaga dan mengembangkan festival-festival budaya masyarakat lokal sebagai daya tarik wisata budaya; dan
 - f. mengembangkan wisata buatan untuk memberikan daya tarik yang berberbeda sebagai destinasi alternatif dalam menunjang sektor pariwisata yang unggul.
- 7) Strategi penetapan dan pengembangan kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- a. menata dan mengembangkan kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. menata dan mengembangkan kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya.

4.2.9 Isu Strategis Kabupaten Morowali.

4.2.9.1 Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Kemiskinan (*poverty*) adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau pun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lain memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Perkembangan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Morowali diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali mengalami penurunan kurun Tahun 2018-2022. Pada Tahun 2018 persentase penduduk miskin sebesar 14,34 persen, dan menurun hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 13,75 persen. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin Tahun 2015 sebanyak 17,79 ribu jiwa, dan Tahun 2019 sebanyak 16,61 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Morowali

juga menurun sebesar 16,50 ribu jiwa atau sebesar 13,43 persen. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 13,75 persen atau sebanyak 17,07 ribu jiwa. Peningkatan terjadi akibat pandemic covid-19 yang terjadi. Tahun 2022, pandemic sudah dapat dikendalikan, berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat yang juga meningkat, sehingga penduduk miskin menurun cukup signifikan menjadi 12,58 persen atau sebanyak 15,86 ribu jiwa.

Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya dengan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomian maupun pemerataan pembangunan, serta meningkatkan ketajaman dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Morowali antara lain yakni meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

4.2.9.2 Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan Serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Kabupaten Morowali dianugrahi dengan posensi sumberdaya alam yang melimpah diperkirakan lebih dari 200.000 hektar tambang nikel. Potensi pertambangan nikel Morowali terkenal hingga mancanegara, dengan kualitas nomor satu di Asia Tenggara. Pertambangan nikel menjadi andalan dari perekonomian Morowali. Ada 10 perusahaan pertambangan nikel besar di daerah ini yang menyerap tenaga kerja lokal hingga 19.000 orang. Dampak dari besarnya potensi sumberdaya alam tersebut terlihat Kemajuan perekonomian Kabupaten Morowali, di mana secara makro laju pertumbuhan pembangunan Kabupaten Morowali dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta peningkatan PDRB Perkapita.

Menjadikan pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas atau inklusif, jika pertumbuhan ekonomi berkontribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin dan terjadinya pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Tidak hanya daerah berkembang

dan emerging, seringkali di daerah maju juga memiliki tantangan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas penting karena secara empirik berkorelasi positif terhadap upaya nyata penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Morowali tata kelola pembangunan yang baik, sejatinya akan diukur dari pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi ultimate goal yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sebagai perwujudan pemerintah hadir di tengah masyarakat. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali berdasarkan ADHK 2010 kurun waktu 2018-2022. Perekonomian Kabupaten Morowali yang diukur melalui indikator pertumbuhan PDRB memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata per Tahun sebesar 42,94 persen yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah sebesar 11,72 persen. Selama kurun waktu tersebut, pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali cenderung berfluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 112,20 persen. Hingga Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi sebesar 20,20 persen. Selanjutnya di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tetap tumbuh positif dan sangat tinggi yakni sebesar 28,93%. Hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Morowali tidak terdampak pandemi Covid-19, yang mana berdampak di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Morowali mencapai 25,15 (lebih rendah dari tahun sebelumnya). Selanjutnya data pada tahun 2022 ekonomi Morowali masih dua digit diangka 28,21 meningkat dari tahun sebelumnya.

Terdapat 3 (tiga) sektor yang memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 62,22 persen, Sektor Konstruksi sebesar 151,77 persen dan Sektor Jasa Keuangan sebesar 34,62 persen. Sementara itu, sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan kecil dan negatif yakni sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (3,00%), sektor lainnya yakni Jasa Pendidikan (0,48%), Konstruksi (14,62) persen, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,81 persen. Sektor pertanian perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali, mengingat pertumbuhan yang semakin menurun setiap tahunnya. Diperlukan peningkatan produktivitas di Sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor Pertanian. Salah satu yang menyebabkan ekonomi Sulawesi

Tengah tetap tumbuh positif yakni berasal dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali yang tumbuh sangat besar dari Sektor Pertambangan dan Penggalian. Sampai dengan tahun 2022 ekonomi Morowali Tumbuh sebesar 28,21%, tumbuh jauh di atas rata-rata nasional (5,31%) dan Provinsi Sulawesi Tengah (15,17%).

Namun demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih menyisahkan masalah bagi kabupaten Morowali karena angka kemiskinan yang masih tinggi hingga Tahun 2022 sebesar 12,58 persen atau sebanyak 15,86 ribu jiwa. Penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Morowali hingga Tahun 2019, masih berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Dimana, persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 12,33 persen dan nasional sebesar 9,54 persen.

Capaian pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di Kabupaten Morowali ternyata belum sepenuhnya mampu memperbaiki taraf kehidupan masyarakat, mengingat masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam kemiskinan, dan cenderung melebar jarak pendapatan kemiskinan di antara penduduk miskin.

Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya dengan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomian maupun pemerataan pembangunan, serta meningkatkan ketajaman dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Morowali antara lain yakni meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Namun, pada Tahun 2020, terjadinya pandemi Covid-19 akan berdampak lebih berat terhadap penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi idealnya memberikan jaminan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat serta angka kemiskinan yang menurun. Kemiskinan merupakan masalah paling utama dalam pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan masyarakat tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya.

Kabupaten Morowali masih memiliki isu strategis berkaitan dengan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi penurunan angka kemiskinan belum berhasil (Pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif). Pada sisi lain Kabupaten Morowali merupakan salah satu Kabupaten yang

memiliki banyak potensi untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah khususnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, tetapi faktanya masih banyak masyarakat miskin atau golongan menengah kebawah yang berada terutama masyarakat miskin khususnya pada wilayah pegunungan dan pulau-pulau. Konsentrasi kemiskinan di kabupaten morowali Sebagian besar berada pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan.

Sejalan dengan hal itu Konsentrasi masalah sosial khususnya penanggulangan kemiskinan yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah kawasan 3T (terpencil, tertinggal, dan terdepan). Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah sudah melakukan sinergi antar sektor. Masalah Kemiskinan lebih cepat diatasi, apabila semua potensi daerah bersama-sama mengambil peran, selain pemerintah, juga dunia usaha harus digerakkan untuk percepatan penyelesaian kemiskinan khususnya di Kabupaten Morowali.

Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang Berlaku pada bulan Januari 2022 terdapat 91.623 orang. Sedangkan dalam kurun waktu Januari-Mei tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah TKA yang berlaku, yaitu sebanyak 96.574 orang pada bulan Mei 2022. (sumber Binapenta & PKK Kementerian Ketenagakerjaan RI). Isu Ribuan tenaga kerja asing atau TKA Cina memadati wilayah industri di kawasan Morowali sejak awal tahun 2018 sampai tahun 2022 menghangat namun tidak semuanya benar. Data tentang jumlah karyawan lokal (Indonesia) yang saat ini bekerja di kawasan Morowali Industrial Park (IMIP) pada tahun data yang tercatat di Kemenaker jumlah TKA di seluruh Indonesia pada 2019 sebanyak 109.546 orang, kemudian pada 2020 turun menjadi 93.761 orang, lalu di 2021 menjadi 88.271 orang dan pada 2022 turun lagi menjadi 70.571 orang. Para Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja secara bersama dengan pekerja lokal di wilayah kawasan pabrik, pelabuhan Jetty, dan central kitchen khususnya pekerja yang berasal dari Tiongkok. Pelibatan Para Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja untuk transfer teknologi kepada karyawan Indonesia sehingga setiap tahunnya jumlahnya akan berkurang setelah kemampuan dan skiil tenaga kerja dalam negeri khususnya di Kabupaten morowali mampu untuk mengoprasikan berbagai tehnologi pengolahan industry tambang nikel.

Pemerintah daerah Kabupaten Morowali pada tahun mendatang bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi tengah perlu menyiapkan strategi kedepan didalam menyiapkan calon tenaga kerja yang seusia dengan kebutuhan industry melalui penyelenggaran sekolah vokasi, pelatihan dan magang kerja sehingga dampak

keberadaan Industri dan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi mampu menyerap tenaga kerja local diwilayah remot area Kabupaten Morowali dan calon pekerja di Propinsi Sulawesi Tengah.

4.2.9.3 Era Industri 4,0 dan Tehnologi Digital

Saat ini merupakan era “*sharing & platform based*”. Kebangkitan era tersebut ditandai dengan: (1) data merupakan pelumas baru dalam kegiatan ekonomi (*internet of things, big data, cloud, OLT/blockchain, artificial intelligence, dan robotics*) dan, (2) model bisnis berbasis platform (*platform based*). Model bisnis *platform based* misalnya; (1) Perusahaan ‘transportasi’ tanpa kendaraan. (2) Penyedia “*breaking news*” tanpa menyusun berita. (3) Penyedia *photosharing* tanpa membuat foto. (4) Jasa komunikasi tanpa infrastruktur telekomunikasi. (5) Peritel bervaluasi tinggi tanpa memiliki *inventory*. (6) Penyedia akomodasi tanpa memiliki kamar. (7) Media populer tanpa membuat *content*. (8) Pertemuan, seminar, webinar, rapat virtual dan pengelolaan kantor dari jarak jauh, (9) pemberian pengajaran jarak jauh (PJJ)/kuliah daring menjadi model baru (PJJ/digitalisasi pendidikan).

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas negara. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Saat ini dunia berada pada Industri 4.0 dimana industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah “*smart factory*” akan menjadi hal yang lumrah kita dengar di era Industri 4.0 sebagaimana saat ini kita mendengar istilah *smartphone*, *smartcard* dan istilah-istilah lain yang ditambahkan prefiks *smart*. Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada industri pangan, makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional, Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Morowali serta bagaimana mengkombinasikan dengan

penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru dan dapat dipasarkan secara luas melalui penjualan secara online.

Pembatasan interaksi fisik antar manusia menyebabkan berbagai bentuk Layanan pemerintah berubah menjadi online, *Work from Home (WFH)* dan budaya rapat daring (online) menjadi sebuah kebiasaan baru didalam menyelesaikan berbagai tugas pemerintahan, transaksi ekonomi dilakukan secara jarak jauh atau daring dengan memanfaatkan teknologi digital. Tidaklah berlebihan kalau Pelayanan pemerintah dan transaksi ekonomi yang berbasis teknologi digital. pemberian pengajaran jarak jauh (PJJ) untuk layanan Pendidikan kedepan di Kabupaten Morowali akan berjalan seiring dengan adaptasi pada teknologi Pendidikan saat ini.

4.2.9.4 Cakupan Infrastruktur Wilayah

Kondisi wilayah geografis Kabupaten Morowali yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah wilayah perdesaan, daerah perdalam dan terpencil sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah kecamatan seperti Jalan dan Jembatan, transportasi, irigasi teknis dan non teknis, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi serta kelistrikan. Adanya kesenjangan Infrastruktur pada wilayah khususnya di Kecamatan Bungku Tengah dan Menui Kepulauan merupakan isu strategis utama yang dihadapi Kabupaten Morowali saat ini.

Infrastruktur yang baik adalah modal fisik (*physical capital*) bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur yang baik dan memadai. Dengan kata lain, Pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik.

Jaringan jalan yang baik, memiliki korelasi yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maupun terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal fisik (*physical capital*) bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Morowali dari Tahun 2018-2022 mengalami penurunan dan masih sangat rendah dari total panjang jalan yang ada. Secara keseluruhan tidak mencapai 50

persen dari Tahun 2018-2022. Tahun 2018 proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Morowali sebesar 0,31, menurun hingga Tahun 2019 menjadi 0,13, diakibatkan bencana alam yang terjadi berdampak pada banyaknya jalan yang mengalami kerusakan, sehingga proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Tahun tersebut menurun sangat signifikan menjadi 0,133 atau hanya sebesar 13,30 persen dari total panjang jalan yang ada, dan di tahun 2020 sebesar 0,14. Sampai dengan tahun 2022 sebesar 0,184.

Kinerja Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan, di mana Pembangunan sarana dan Prasarana Pelayanan publik dan listrik, air bersih dan jaringan telekomunikasi juga masih diperlukan dimasa yang akan datang guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat Kabupaten Morowali baik di tingkat Kabupaten, kecamatan maupun di desa.

4.2.9.5 Tatakelola Pemerintahan yang baik dan Berkualitas

Perbaikan tatakelola pemerintahan yang baik melalui institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima (*public services*). Dimana, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali adalah subjek dan objek dari reformasi birokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu, saat ini setiap perangkat daerah diwajibkan melakukan penilaian mandiri, atas prakarsa dan praktik reformasi birokrasi yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Langkah strategis ini diharapkan dapat menopang implementasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya pada Pemerintah Kabupaten Morowali di masa mendatang.

Pelimpahan wewenang dan penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) pada Perangkat Daerah yang terkait pelayanan, sangat diharapkan agar penyelenggaraan pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan investasi dan melakukan inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu budaya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, menjadi isu utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Morowali dalam periode akhir RPD Tahun 2024-2026.

Pelayanan publik sebagai dampak perubahan orientasi layanan dari birokrasi daerah memerlukan: 1). standardisasi pelayanan yang bertumpu pada pelibatan masyarakat di dalam proses dan penilaian kinerjanya. Masalahnya, akar persoalan menyatu dengan kapasitas

administratif Perangkat Daerah itu sendiri; 2). rasionalisasi penataan organisasi sudah dilakukan, namun tetap diperlukan untuk pengembangannya ke arah birokrasi yang dinamis, responsif, dan efisien. Adanya unsur dalam birokrasi yang tersusun dan bekerja dalam hubungannya yang *fragmented* dan mengedepankan ego-sektoral; 3). mengintegrasikan administrasi pelayanan perizinan bagi dunia bisnis/pelaku swasta yang cepat sesuai dengan arahan undang-undang cipta kerja; 4). pengembangan penatalaksanaan diperlukan untuk mencapai target-target kerja administrasi dengan menghilangkan berbagai duplikasi dan inefisiensi prosedural 5). aplikasi layanan *online* baik dari perencanaan, penganggaran, pelayanan publik tak terelakkan untuk merespon tuntutan industri 4.0 dewasa ini.

Di samping itu perubahan kewenangan dan organisasi pemerintah daerah akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memerlukan berbagai penyesuaian (*adjustment*) termasuk penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

4.2.9.6 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kompetensi ASN

Kualitas Sumberdaya Manusia merupakan salah satu modal pembangunan, maka kebijakan yang tepat untuk peningkatan kualitasnya pun sangat dibutuhkan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pembangunan secara nasional menempatkan manusia sebagai titik sentral. Dalam konteks ini, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektual (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (daya beli). IPM adalah indeks komposit diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga dapat

dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama IPM adalah sebagai alat banding sejalan dengan fungsi Indeks Mutu Hidup (IMH), yaitu indeks komposit yang disusun dari tiga komponen: (1) kesehatan; (2) Pendidikan; dan (3) ekonomi. SDM berkualitas ditandai dengan semakin meningkatnya IPM.

IPM Kabupaten Morowali sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari peningkatannya, ternyata indeks pembangunan manusia dari komponen angka harapan hidup, daya beli, pendidikan terjadi peningkatan, Peningkatan tertinggi dicapai indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Dari indikator (indeks) tersebut menjelaskan telah terjadi perbaikan besar-besaran pada aspek ekonomi dan kesehatan di Kabupaten Morowali, perbaikan ini dalam jangka panjang berdampak pula pada peningkatan angka pendidikan dan kesehatan.

Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Morowali ditunjukkan melalui IPM mengalami peningkatan periode Tahun 2018-2022. Kondisi ini ditunjukkan Tahun 2018 dimana IPM sebesar 71,14, terus meningkat hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 72,55. IPM Kabupaten Morowali Tahun 2022 masuk kategori **tinggi**. Dimana, capaian IPM ini, tidak lebih baik dari rata-rata capaian Nasional sebesar 72,91, sedangkan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 70,28. walaupun dampak dari COVID-19 telah mempengaruhi terhadap sasaran pembangunan kemungkinan terkoreksi, termasuk juga Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Morowali. Juga pencapaian IPM Kabupaten Morowali yang tinggi saat ini hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah Kecamatan daratan yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dan Kesehatan serta ekonomi yang lebih baik dibandingkan pada kecamatan berbasis pulau yaitu pada Kecamatan Menui Kepulauan yang mengalami ketertinggalan aspek sosial ekonomi.

Aspek manajemen sumberdaya aparatur Kabupaten Morowali juga tak tertinggal dari agenda perubahan yang mesti dielaborasi secara praktis dan aplikatif dalam bentuk pengembangan SDM aparatur yang mampu menjawab tantangan era disrupsi dan industri 4.0. Berangkat dari kesadaran bahwa masalah kepegawaian mesti diatasi jika memperbaiki dan mereformasi birokrasi dimana perbaikan kesejahteraan melalui perbaikan remunerasi untuk menunjang kinerjanya yang optimal. Pengembangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manajemen dalam lingkungan birokrasi mesti difasilitasi secara komprehensif, simultan, dan berkesinambungan melalui mekanisme yang tepat dan efisien.

4.2.9.7 Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakter fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi daerah tersebut.

Kabupaten Morowali terdiri dari 9 kecamatan yang terdiri dari 7 kelurahan dan 126 desa yang tersebar di bagian tenggara Pulau Sulawesi sehingga jika dilihat dari posisi di permukaan bumi, wilayah Kabupaten Morowali umumnya terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan hutan dan lereng pegunungan. Kondisi geografis ini berpengaruh pada kemiringan dan ketinggian lahan dari permukaan laut (dpl). Kabupaten Morowali rentan terhadap proses-proses tektonik aktif karena dilewati oleh sesar aktif Matano. Oleh karena itu, kabupaten ini sangat rentan terhadap gempa bumi besar, tsunami, dan banjir. Perubahan iklim di masa mendatang cenderung memperbesar intensitas badai ekstrem yang mengakibatkan banjir besar. Selain itu, intensitas dan curah hujan yang tinggi dan semakin berkurangnya daerah tangkapan hujan akibat kegiatan pertambangan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Morowali berpotensi untuk lebih meningkatkan terjadinya banjir dan longsor.

Kondisi Topografi di Kabupaten Morowali yang merupakan perbukitan dan pegunungan, membuat kabupaten ini rawan longsor, aliran debris, dan erosi. Potensi-potensi bahaya ini menghasilkan sejumlah besar sedimen yang mengisi dasar sungai dan menyebabkan lebih banyak terjadi banjir dan penambahan sedimen di daerah pesisir. Di daerah pesisir, hilangnya hutan bakau juga telah menyebabkan meningkatnya abrasi pantai. Daerah dataran rendah di pantai juga berisiko terkena intrusi air laut akibat gelombang pasang dan tsunami. Banjir sering terjadi di Kabupaten Morowali selama musim hujan, sedangkan kekeringan sering terjadi di musim kemarau. Perkiraan adanya perubahan iklim di masa depan, diperkirakan akan meningkatkan intensitas bencana banjir dan kekeringan.

Terjadinya penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan, serta konversi hutan menjadi perkebunan di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan.

Beberapa Tahun terakhir terdapat bencana Alam yang melanda

Kabupaten Morowali banjir bandang, Gempa Bumi dan Longsor yang terjadi pada kurun Tahun 2019 s/d 2022. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Akibat dari fenomena iklim yang ekstrim dan semakin berkurangnya daerah tangkapan air di kawasan hutan Kecamatan Bungku Tengah.

- a. Kawasan rawan bencana dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut.
- b. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Pesisir
- c. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi.
- d. Kawasan rawan bencana gempa bumi berupa kawasan sempadan sesar aktif terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur.
- e. Kawasan rawan bencana gelombang pasang, terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan sebagian Kecamatan Bungku Timur.

4.2.9.8 Pelaksanaan dan Pencapaian Target Sustainable Development Goals (SDG's).

SDGs merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. SDGs dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan keberlanjutan MDGs. Ada banyak tujuan dari konsep SDGs. Namun ada tiga tujuan utama. *Pertama*, SDGs diharapkan bisa mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara manapun. *Kedua*, SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan. *Ketiga*, target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia.

Konsep Pembangunan yang berkelanjutan ini memiliki aspek-aspek yang perlu diselesaikan secara bersama oleh dunia global antara lain: *thriving lives and livelihoods* (kehidupan yang sehat dan layak), *sustainable food security* (keamanan dan ketahanan pangan), *sustainable water* (sumber air bersih), *universal clean energy* (energi yang aman), *healthty and productive ecosystems* (ekosistem yang produktif dan sehat), *governance for sustainable Societies* (kebijakan

yang berpihak terhadap komunitas). Untuk mencapai tujuan SDGs diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali pada khususnya.

Metode dan cara pelaksanaan SDGs menuntut partisipasi warga. Salah satu cara memastikan tercapainya seluruh tujuan dan target SDGs ialah dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Pemerintah bertanggung jawab membentuk kelembagaan panitia bersama atau sekretariat bersama untuk pembangunan berkelanjutan di Tanah Air. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan agenda SDGs dibangun berdasarkan pengalaman pemerintah melaksanakan agenda MDGs. Indonesia sangat serius dalam upaya mencapai indikator-indikator SDGs. Hal ini dimulai dengan diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam RPJM Nasional 2020-2024 dan tersusunnya Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan berkelanjutan (RAN-TPB).

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Aturan tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda SDGs. Regulasi tersebut juga menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi pelaksanaan agenda SDGs di Indonesia ke depannya. Pelaksanaan SDGs berarti juga melaksanakan tujuan pembangunan nasional dan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Ia juga menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi Indonesia, SDGs tidak hanya relevan bagi komitmen global, tapi juga merupakan panduan untuk menjadi negara maju. Hal ini juga menunjukkan pemerintah mengambil tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan agenda MDGs di Indonesia.

Dalam rangka percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional yang mengacu pada target dan sasaran global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional periode berjalan, serta sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, Presiden RI Kembali menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan TPB.

Melalui Perpres 111/2022, presiden telah menetapkan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024. TPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perpres 111/2022 bertujuan untuk:

- e) Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
- f) Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
- g) Menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
- h) Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah membentuk tim koordinasi nasional yang terdiri atas dewan pengarah nasional, tim pelaksana nasional, kelompok kerja nasional, dan tim pakar dalam rangka pencapaian sasaran TPB nasional Tahun 2024. Dengan telah ditetapkannya Perpres 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diharapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional Tahun 2024 dapat tercapai dengan lebih cepat dan lebih terarah sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*

Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali, menjadikan pencapaian tujuan SDGs sebagai salah satu tantangan sekaligus Isu strategis jangka menengah yang harus dijawab dengan kerja keras seluruh unsur pemerintah, legislatif dan masyarakat serta filantropi. Beberapa indikator yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Kabupaten Morowali guna mendukung Pencapaian RAD SDGs Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari kajian terhadap permasalahan yang telah digambarkan pada uraian sebelumnya serta memperhatikan lingkungan strategis global, nasional, provinsi dan daerah, teridentifikasi isu strategis daerah yang

dihadapi oleh Kabupaten Morowali untuk periode waktu 2024-2026 pada gambar Berikut.



Gambar 4.4
Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Morowali tahun 2024-2026

Keterkaitan Isu Strategis berdasarkan identifikasi lingkungan strategis global, nasional, provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali dapat dipetakan sebagaimana dalam Gambar 4.5 berikut.



Gambar 4.5
Keterkaitan Isu Strategis Global, Nasional,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali

BAB 5

TUJUAN DAN SASARAN





Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB). Maka, dengan berakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2023 dan dilaksanakan Pemilu Serentak Tahun 2024, serta berakhir periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023, maka Pemerintah Kabupaten Morowali wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan selama 3 (tiga) tahun ke depan guna mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan dokumen RPD tersebut harus memperhatikan adanya penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian visi misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025. Selain hal tersebut, juga memperhatikan hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018- 2023, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026, dan Isu-isu strategis yang berkembang dinamis pada level global, nasional, dan Provinsi Sulawesi Tengah yang berkaitan atau berpengaruh langsung (*direct impact*) dengan kondisi Kabupaten Morowali saat RPD disusun.

Hal prinsip dan substansi dalam Bab 5 dokumen RPD ini, tidak memuat visi dan misi pembangunan daerah, karena dokumen RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah di masa transisi, sampai tersusunnya dokumen RPJMD setelah pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024. Uraian Bab 5 RPD ini memuat tentang rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada periode tahun 2024-2026 atau selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran yang disusun mengacu pada visi misi RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025. RPD ini menjadi pedoman dasar (*guideline*) dalam menjalankan pembangunan selama tiga tahun sampai terpilih Kepala Daerah definitif, sekaligus menuntaskan agenda Program dalam RPJPD Kabupaten Morowali yang akan berakhir Tahun 2025.

Rumusan tujuan dan sasaran tersebut menjadi prioritas pembangunan daerah yang diformulasikan berdasarkan visi misi RPJPD Morowali 2005-2025, dan memperhatikan atas telaahan dokumen perencanaan pembangunan yakni: RPJPN dan RPJMN, RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk hasil kajian atas dokumen-dokumen kebijakan pembangunan nasional lainnya, RTRW Kabupaten Morowali, arahan Presiden Republik Indonesia, serta isu global dan

nasional. Visi RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025:

“ Morowali Sejahtera Bertumpu Pada Agribisnis ”

Dengan rumusan Misi sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat;**
- 2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Yang Lebih Berkeadilan;**
- 3. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pemerintahan Dan Pemberdayaan Hukum;**
- 4. Melaksanakan Penataan Wilayah;**
- 5. Meningkatkan Stabilitas Keamanan (*Security*) Wilayah.**

5.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam masa transisi. rumusan tujuan dalam setiap misi menggambarkan pula kondisi yang akan dicapai dalam merespon isu strategis perencanaan, berpijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi misi pembangunan jangka panjang kabupaten morowali, serta dalam rangka menjawab isu strategis aktual yang keberlanjutan dalam pembangunan, maka dirumuskan tujuan perencanaan pembangunan daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Rumusan **Tujuan Pembangunan** selama tiga tahun ke depan dalam dokumen RPD Kabupaten Morowali tahun 2024-2026 yang dikonstruksikan dan disinergikan dari lima Misi RPJPD sebagai berikut.

5.1.1. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata

Ketahanan sosial dan jaminan sosial dicapai dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi perubahan sosial, ekonomi dan politik serta memperkuat daya tahan masyarakat dari goncangan krisis multi dimensi. Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan jaminan sosial yang merata dan program pengentasan kemiskinan ekstrem yang tepat sasaran dan berfokus pada pengurangan jumlah dan presentase kemiskinan di kabupaten Morowali tiga tahun mendatang dan dalam usaha mendukung mewujudkan prioritas pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air dapat mencapai nol persen pada tahun 2024, dimana angka kemiskinan di Kabupaten Morowali masih sangat tinggi diatas dua digit sehingga ditargetkan pada tahun 2026 bisa mencapai angka satu digit kemiskinan melalui sinergi program dan kegiatan yang direncanakan dengan baik pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Morowali Tahun 2024-2026.

5.1.2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Upaya mendorong perkembangan ekonomi dan daya saing daerah Kabupaten Morowali. Konsep ini mencakup upaya untuk mengembangkan dan memperkuat sektor ekonomi yang ada, serta meningkatkan akses masyarakat pada layanan dasar pendidikan dan kesehatan serta memastikan tumbuhnya sumber daya manusia di daerah setempat yang ada bebas *stunting*.

Pemerintah daerah Kabupaten Morowali terus memprioritaskan pengembangan sektor unggulan daerah yang tidak hanya bertumpu pada Sektor Pertambangan semata, namun juga mendorong kontribusi Sektor Pariwisata, Sektor Pertanian, Sektor Perikanan, dan sektor non migas lainnya. Hal ini ditempuh untuk meningkatkan produksi dan daya saing produk lokal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif berbasis potensi yang dikelola langsung masyarakat. Pada sisi lain, meningkatkan daya saing daerah dimaksudkan guna mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, unggul, berprestasi dan kreatif serta mempersiapkan mampu mengolah potensi sumberdaya alam Kabupaten Morowali secara mandiri. Pembangunan daerah juga diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang melingkupi cakupan kesehatan semesta, peningkatan layanan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas, penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, serta peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia. Pemerintah daerah juga berkomitmen menjamin hak-hak masyarakat atas kepemilikan asset ditengah adanya permasalahan tumpang tindih lahan (*overlapping*) dalam eksplotasi pertambangan di Kabupaten Morowali.

5.1.3. Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Tujuan pembangunan ketiga diharapkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional. Tata kelola pemerintahan yang dimaksud adalah tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, adaptif terhadap digital era, responsif, kolaboratif lintas sektor, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*inter-networked government*). Perwujudan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas, serta efisiensi manajemen pemerintahan dan manajemen ASN.

5.1.4. Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah Dan Infrastruktur Dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata.

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penataan wilayah dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata, melalui Pengembangan infrastruktur wilayah kecamatan guna meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilitas orang dan barang, menyiapkan infrastruktur yang mendukung kebutuhan Investasi. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang relatif tertinggal infrastruktur fisiknya seperti kecamatan Menui Kepulauan, kecamatan Sembori kepulauan dan Bungku Selatan. Juga mempercepat peningkatan akses internet Penyediaan akses internet yang cepat dan stabil dapat memperkuat konektivitas antar wilayah dan mempermudah akses informasi serta pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan baik infrastruktur fisik dan sosial dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

5.1.5. Menciptakan Tatahan Kehidupan Wilayah Yang Aman, Tentram Dan Tertib Serta Jauh Dari Risiko Bencana Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan Wilayah

Mewujudkan tatahan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari risiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah dilaksanakan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Hal ini akan memungkinkan masyarakat dan dunia usaha menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang dan damai, pemerintah menjamin perlindungan investasi dan rasa aman masyarakat terhadap berbagai gangguan serta menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, daya tampung, kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan serta pengurangan potensi, risiko dan intensitas serta cakupan bencana baik kalam maupun non alam. Serta Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis ditengah keragaman suku, agama dan pilihan politik masyarakat.

5.2. Sasaran

Hasil dari rumusan kelima tujuan di atas yang menjadi arah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali di Tahun

2024-2026 selanjutnya diterjemahkan ke dalam 12 (Duabelas) sasaran pembangunan yaitu:

5.2.1 Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin

Sasaran ini menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPD Kabupaten Morowali tahun 2026. Sasaran ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antara kelompok penduduk miskin dan non-miskin di Kabupaten Morowali. Sasaran ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh penduduk Kabupaten Morowali, sehingga kesenjangan antar penduduk makin kecil dan relatif merata.

Untuk mencapai sasaran ini, diperlukan program strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin secara berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui bantuan sosial yang tepat sasaran dan memadai bagi masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses layanan dasar. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar di wilayah kecamatan terpencil dan tertinggal khususnya Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Sombori kepulauan dan Bungku selatan sebagai wilayah dengan kantong kemiskinan tinggi, untuk meningkatkan konektivitas dan produktivitas masyarakat miskin serta mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor-sektor informal yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi lokal.

5.2.2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan utama dari pembangunan daerah Kabupaten Morowali adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*people welfare*) yang ditandai antara lain dengan meningkatnya pendapatan masyarakat (*people income*). Peningkatan pendapatan masyarakat menunjukkan terjadinya kenaikan kemampuan ekonomi yang dimiliki masyarakat melalui adanya peningkatan daya beli keluarga, untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga baik kebutuhan dasar (*basic needs*), dan kebutuhan sosial (*social needs*).

5.2.3. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja di Pasar Tenaga Kerja

Momentum Kabupaten Morowali untuk melakukan penataan dengan adanya keberhasilan perubahan struktural (*structural*

change), adalah peningkatan investasi sangat besar yang terjadi di Sektor Pertambangan dan pertumbuhan ekonomi daerah tinggi yang berdampak langsung pada peningkatan penyerapan tenaga kerja yang signifikan di pasar tenaga kerja (*labor market*). Adanya Undang-Undang Cipta Kerja diyakini dan dipercaya secara khusus akan makin meningkatkan masuknya investasi di daerah secara umum termasuk di Kabupaten Morowali, dimana target terbukanya berbagai industri manufaktur (*manufacture industry*) di Sektor Pertambangan yang masif bersinergi dengan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Upaya meningkatkan Kapabilitas tenaga kerja Kabupaten Morowali dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi para pencari kerja dan pekerja, juga mengoptimalkan belanja daerah, untuk program padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dalam waktu singkat dan memperluas kerjasama antara pemerintah daerah kabupaten Morowali dan pihak swasta dalam memfasilitasi penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan pekerja, serta melaksanakan program *up-skilling* (peningkatan keterampilan) dan *re-skilling* (perubahan keterampilan) kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Pusat, serta pihak Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Sasaran prioritas ini dilakukan untuk meningkatkan kesesuaian dan keseimbangan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) tenaga kerja di pasar tenaga kerja.

5.2.4. Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah

Hubungan meningkatnya investasi dan pendapatan daerah, adalah hubungan yang saling menguntungkan. Keduanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah secara simultan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali terus melakukan Langkah-langkah di dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan sumber-sumber PAD yang potensial daerah. Sasaran diakhir periode RPD diharapkan meningkatnya nilai investasi (*investment rate*) juga diikuti makin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

5.2.5. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan.

Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan adalah salah satu hal yang penting untuk dicapai dalam pembangunan sebagai urusan wajib pemerintah daerah. Layanan kesehatan yang

berkualitas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan perekonomian daerah. sasaran ini mewujudkan pada enam domain perbaikan layanan kesehatan, yaitu keamanan (*safety*), efektivitas (*effectiveness*), kesetaraan (*equity*), ketepatan waktu (*timeliness*), berpusat pada pasien (*patient-centeredness*), dan efisiensi (*efficiency*).

Sampai akhir periode RPD Tahun 2024-2026 fungsi utama yang diharapkan adanya layanan kesehatan yang lebih maju dan lebih moderen pada aspek *promotif* (pemeliharaan dan peningkatan kesehatan), *preventif* (pencegahan terhadap penyakit dan risiko kesehatan), dan *kuratif/rehabilitatif* (pengobatan dan pemulihan kondisi kesehatan) berjalan baik sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah di dalam pelayanan Kesehatan.

Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan adalah sasaran strategis kabupaten Morowali. Untuk mencapainya juga diperlukan kerjasama antar pemerintah baik dengan Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat juga masyarakat dan sektor swasta. Selain itu, diperlukan juga transformasi dan digitalisasi sistem kesehatan, agar lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.

5.2.6. Meningkatnya Kualitas Pendidikan.

Peningkatan Kualitas pendidikan wujud pelaksanaan pendidikan sebagai urusan wajib daerah, dimana mencapai suatu keberhasilan pembangunan daerah, salah satunya adalah proses pendidikan dan hasil pendidikan yang makin berkualitas. Peningkatan kualitas Pendidikan sangat penting bagi Kabupaten Morowali, sebab dengan pendidikan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai. Penyelenggaran pendidikan akan berarti meningkatkan kualitas sumber daya manusia bilamana pendidikan tersebut memiliki sistem yang berkualitas dan relevan dalam pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan merupakan kebijakan dan program yang harus dilaksanakan secara optimal sampai akhir periode pelaksanaan RPD melalui kewajiban pemenuhan alokasi anggaran Pendidikan 20 persen yang tepat sasaran. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang semakin tinggi dan merata.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia pada semua jenjang pendidikan menjadi ujung tombak dan mempunyai peran yang sangat strategis. Melalui bidang pengajaran, sekolah

membantu anak didik mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan kerja, sehingga anak didik memiliki keahlian untuk bekerja dan ikut membangun bangsa dan Negara. Mutu Pendidikan juga akan mencerminkan dari meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai *humanism* yang meliputi keteguhan dan ketakwaan serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani peserta didik.

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan kabupaten Morowali akan diarahkan kepada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) yang diterapkan pada semua jenjang Pendidikan dan meningkatnya literasi digital. Pada sisi lain, peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia aparatur pemerintah daerah kabupaten Morowali menjadi sasaran berikutnya melalui Pendidikan, pelatihan dan penjenjangan karir PNS. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah yang baik, hal ini menjadi penting karena aparatur yang handal dan berkualitas akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaannya, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja aparatur.

5.2.7. Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kualitas tatakelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaran pelayanan publik dilakukan dengan menyelenggarakan sistem, struktur dan budaya organisasi yang fleksibel dan adaptif atas perubahan lingkungan yang mengarah pada digitalisasi pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal. Transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adaptif dan koordinasi serta sinergitas antar pelaku dan stakeholder terkait merupakan aspek yang diprioritaskan dalam manajemen pemerintahan tersebut dan diimplementasikan melalui penguatan penerapan reformasi birokrasi.

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparturnya kepada *stakeholder* dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang mendiami wilayah Kabupaten Morowali sekaligus memberikan kepuasan kepada *masyarakat*

yang dilayani. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, sudah tentu suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh warga masyarakat yang membutuhkannya. menciptakan suatu pelayanan yang berkualitas dan melahirkan kepuasan *stakeholder* yang menerimanya bukanlah suatu hal yang mudah. Tidak sedikit kendala dan faktor-faktor lain yang mengakibatkan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dirasakan masih kurang dan cenderung tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati sehingga Kualitas tatakelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima menjadi sasaran utama.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SDM aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima (mudah, transparan, responsif, aksesibel, berkeadilan, tidak diskriminatif dan efektif) yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi/digital.

Pelayanan prima akan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan publik dan partisipasi pembangunan berkelanjutan. Pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis digital memberikan kemudahan proses dan akses bagi semua penduduk khususnya masyarakat rentan yang berhak mendapatkan keadilan dan bebas diskriminasi agar dapat terpenuhi hak-haknya.

5.2.8. Meningkatnya Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik

Sasaran pembangunan persentase wilayah dengan infrastruktur kondisi baik ini dilaksanakan melalui peningkatan akses air minum, peningkatan kualitas jalan dan jembatan kondisi baik dan sanitasi layak dan aman bagi seluruh masyarakat, Peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman yang dirasakan masih kurang.

Permasalahan yang melatarbelakangi sasaran ini adalah masih adanya kawasan atau wilayah kecamatan/desa dengan kondisi lingkungan, jalan dan jembatan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, ketersediaan sanitasi lingkungan dan sistem drainase lingkungan wilayah kecamatan yang perlu ditingkatkan serta meningkatnya kebutuhan sarana

prasarana infrastruktur air bersih yang memadai.

5.2.9. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

Penataan ruang yang berkualitas menjadi salah satu sasaran dari penataan tata ruang daerah Kabupaten Morowali ditengah berbagai permasalahan alih fungsi lahan, tumpang tindih lahan eksplorasi pertambangan, Hal ini menjadi salah satu sasaran dilakukan dengan penyelenggaraan penataan ruang yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang yang juga berkualitas. Namun sejauh ini penyelenggaraan penataan ruang belum mampu sepenuhnya memenuhi tujuan penataan ruang itu sendiri untuk menciptakan wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Berbagai isu strategis penyelenggaraan penataan ruang daerah bermunculan, seperti belum efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang, belum efektifnya kelembagaan penataan ruang, dan dokumen RTRW belum dijadikan sebagai acuan pembangunan sektor dan daerah. Untuk itu memperkuat kinerja penyelenggaraan penataan ruang kabupaten dan Penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas melalui pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik akan menjadi sasaran prioritas daerah ke depan.

5.2.10. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Sasaran pembangunan difokuskan pada Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara membangun wilayah dan memelihara kelestarian lingkungan. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan dilakukan dengan menjaga lingkungan dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut. Dalam prakteknya seluruh *stakeholder* memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan sampai akhir selesainya sebuah pembangunan.

Pelibatan masyarakat memegang peranan penting bagi lingkungan hidup yang memiliki peran strategis untuk keberlangsungan hidup manusia dan alam yang saling mendukung.

5.2.11. Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tentram Damai Dan Harmonis

Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis yang tercermin dari kehidupan masyarakat yang agamis, sosial dan politik masyarakat yang santun, serta memiliki rasa keyakinan yang tinggi terhadap amanah pembangunan kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualitas dengan nuansa yang demokratis dilandasi supremasi hukum dan HAM. Artinya, sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Morowali yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri sehingga berada pada tatanan kehidupan masyarakat yang mulia.

Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis adalah hidup yang saling hormat menghormati dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Hidup rukun, aman, tentram dan damai antar masyarakat akan membuat hubungan antar masyarakat menjadi harmonis. Suasana hidup rukun yang tercipta membuat kehidupan masyarakat menjadi tenteram dan damai karena antar masyarakat saling memahami. Kondisi kehidupan yang rukun akan tampak saling bahu membahu, saling tolong menolong, menjauhi perselisihan, serta menjauhi pertikaian.

5.2.12. Meningkatnya Wilayah Tangguh Bencana.

Sasaran mewujudkan wilayah Tangguh bencana Kabupaten Morowali adalah upaya menyiapkan wilayah desa/kelurahan dan kecamatan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Desa/kelurahan dan kecamatan diharapkan mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana. Sebuah wilayah disebut mempunyai ketangguhan terhadap bencana ketika desa tersebut memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

Sasaran ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Tujuan pengembangannya untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana termasuk dampak dan risiko eksplotasi pertambangan yang massif yang dapat mengakibatkan meningkatnya risiko bencana tinggi,



meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lain yang peduli pada pengurangan risiko bencana.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator dan target- targetnya dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 5.1.
Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026**

Tujuan			SASARAN RPD				Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Thn 2022	Target			Kondisi Akhir
No	Uraian	No	Indikator	No	Uraian	No	Indikator		2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata	1	Angka Kemiskinan					Persen	12.58	12,58-12,00	12,00-11,58	11,58-11,00
				1.1.1	Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin	1.1.1.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2.03	2,03-1,90	1,90-1,80	1,80-1,70
						1.1.1.2	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0.54	0,54-0,53	0,53-0,52	0,52-0,51
						1.1.1.3	Indeks Gini kabupaten	Indeks	0,285	0,284-0,280	0,279-0,275	0,274-0,270
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	2	Angka Pertumbuhan Ekonomi					Persen	28.21	25,00-30,00	25,00-30,00	25,00-30,00
				2.1.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2.1.1.1	Pendapatan Perkapita	Juta Rp	400.10	400,10-420,00	400,10-420,00	400,10-420,00
						2.1.1.2	Inflasi	Persen	3.00	3,00-2,00	3,00-2,00	3,00-2,00
				2.1.2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dipasar Tenaga Kerja	2.1.2.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3.2	3,2-3,00	3,00-2,00	3,00-2,00
				2.1.3	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	2.1.3.1	Persentase Kenaikan PAD	Persen	1.38	1,00-2,00	2,00-4,00	4,00-6,00
						2.1.3.2	Nilai Investasi	Rp	65 Triliun	65-70 Triliun	70-75 Triliun	75-80 Triliun
		2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					Indeks	72,55	72,55-72,75	72,75-73,00	73,00-73,50
				2.2.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	2.2.1.1	Indeks Kesehatan	Indeks	0.40	0,40-0,43	0,43-0,46	0,46-0,50
						2.2.2.2	Stunting (SSGI)	Persen	23,30	20-17	16-13	12-9
				2.2.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	2.2.2.1	Indeks Pendidikan	Indeks	55.00	55,00-57,00	57,00-59,00	59,00-61,00
3	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	5	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)					Predikat	CC	B	B	BB
				5.1.1	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	Persen	75.0	75,00-80,00	80,00-85,00	85,00-90,00



Tujuan				SASARAN RPD				Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Thn 2022	Target			Kondisi Akhir
No	Uraian	No	Indikator	No	Uraian	No	Indikator			2024	2025	2026	
						5.1.1.2	Nilai Sakip	Nilai	CC	B	BB	A	A
						5.1.1.3	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	73,56 (Rentan)	73,7-77,4 (Waspada)	73,7-77,4 (Waspada)	77,5-100 (Terjaga)	77,5-100 (Terjaga)
						5.1.1.4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	NA	32,50-37,50	37,50-42,50	42,50-47,50	42,50-47,50
						5.1.1.5	Nilai SPBE	Nilai	1.53	1,53-1,75	1,75-2,00	2,00-2,25	2,00-2,25
						5.1.1.6	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	60,97	68,96	77,00	84,00	84,00
				5.1.2	Meningkatnya Kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN	5.1.1.7	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	70	71-73	74-76	77-80	77-80
4	Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	4	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)					Indeks	NA	50-60 (Tidak Baik)	60-70- (Tidak Baik/Kurang Baik)	70-00- (Kurang Baik)	70-00- (Kurang Baik)
				4.1.1	Meningkatnya Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Baik	4.1.1.1	Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik	Persen	23.27	23,50-24,50	24,50-26,50	26,50-28,50	26,50-28,50
				4.1.2	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	4.1.2.1	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Persen	NA	50,00-55,00	55,00-60,00	60,00-65,00	60,00-65,00
				4.1.3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	4.1.3.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80.54	80,54-81,00	81,00-81,50	81,50-82,00	81,50-82,00
5	Menciptakan Tatanan kehidupan wilayah yang aman,	5	Indeks Rasa Aman					Indeks	NA	70,00-75,00	75,00-80,00	80,00-85,00	80,00-85,00
				5.1.1	Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang aman	5.1.1.1	Angka Kriminalitas	Persen	19.42	19,00-17,50	17,50-16,00	16,00-13,50	16,00-13,50



Tujuan				SASARAN RPD				Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Thn 2022	Target			Kondisi Akhir
No	Uraian	No	Indikator	No	Uraian	No	Indikator			2024	2025	2026	
	tentram dan tertib serta jauh dari risiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah	6	Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten		dan Tentram damai dan harmonis	5.1.1.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84.89	85,00-86,50	86,50-88,00	88,00-89,50	88,00-89,50
								Indeks	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 4
				5.2.1	Meningkatnya Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah dan Kemajuan Pembangunan Desa	5.2.1.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana	Indeks	174.82	174-173,50	173,50-172,00	172,00-171,00	172,00-171,00
						5.2.1.2	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6528	0,6528-0,6178	0,6178-0,6908	0,6908-0,7098	172,00-171,00

BAB 6

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

STRATEGI



Strategi (*strategy*) merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola (manajemen) setiap program dan kegiatan dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan, arah kebijakan (*policy direction*) merupakan pengejawantahan dari setiap strategi pembangunan daerah yang difokuskan dan diarahkan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program program dan kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun administrasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dengan efektif, efisien dan transparan. Dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan memberikan arah pencapaian perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali periode 2024-2026. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program dan kegiatan yang mendukung dan menciptakan layanan bagi masyarakat (*public services*) tersebut agar dapat dilakukan dengan baik, termasuk upaya untuk memperbaiki kinerja dan kapasitas pemerintah daerah, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi juga dimaksudkan sebagai pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diekplisitkan dengan serangkaian arah kebijakan.

Pada sisi lain, arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Arah Kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini menjelaskan tahapan pembagunan tahunan Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026.

Perumusan Strategi perlu memperhatikan arahan presiden dan strategi pemerintah pusat yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan strategi yang ditempuh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Kajian dan penelaah dari masing-masing dokumen dapat dijelaskan sebagai berikut.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

6.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMN 2020-2024

Sebelum melakukan perumusan strategi daerah, perlu menilik strategi dan arah kebijakan secara nasional, sehingga strategi daerah yang disusun tersebut dapat secara efektif dan langsung berkontribusi pada pencapaian pembangunan secara nasional. Terdapat 5 (lima) arahan Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN 2020–2024 sebagai panduan strategi dan arah kebijakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 6.1.

Arahan Presiden untuk Strategi Pembangunan Nasional 2020–2024

No	Arahan Presiden	Strategi	Sub Strategi
1	Pembangunan SDM	Layanan Dasar dan perlindungan Sosial	(1) Tata Kelola Kependudukan; (2) Perlindungan Sosial; (3) Kesehatan; (4) Pendidikan; (5) Pengentasan Kemiskinan; (6) Kualitas Anak, Perempuan, Pemuda
		Produktivitas	(1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; (2) Pendidikan Tinggi; (3) Iptek dan Inovasi; (4) Prestasi Olahraga
		Pembangunan Karakter	(1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila; (2) Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan; (3) Moderasi Beragama; (4) Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas



No	Arahan Presiden	Strategi	Sub Strategi
2	Pembangunan Infrastruktur	Infrastruktur pelayanan dasar	(1) Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau; (2) Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan; (3) Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; (4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi; (5) Ketahanan Kebencanaan; (6) Infrastruktur Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi
		Infrastruktur ekonomi: (i) konektivitas; (ii) sektor ekonomi	(1) Darat; Jalan Tol, Jalan Baru, Jalan Trans Pulau 3T, dan pelabuhan penyeberangan baru; (2) Kereta Api: KA kecepatan tinggi dan KA angkutan barang; (3) Laut: Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (4) Udara: Bandara Baru; (5) Industri Pengolahan; (6) Jasa dan Pariwisata; (7) Pertanian Perkebunan Kawasan
		Infrastruktur perkotaan	1. Transportasi Perkotaan
			2. Energi Berkelanjutan Perkotaan
			3. Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan
			4. Akses Air Minum Perpipaan dan Sanitasi Perkotaan yang Layak dan Aman
			5. Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan
		Energi dan ketenagalistrikan	(1) Keberlanjutan Penyediaan; (2) Akses dan Keterjangkauan; (3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan
		Teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital	(1) Penuntasan dan pemanfaatan Infrastruktur TIK; (2) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital
3	Penyederhanaan Regulasi	Pendekatan <i>omnibus law</i>	Penerapan pendekatan <i>Omnibus Law</i>

No	Arahan Presiden	Strategi	Sub Strategi
		Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun	(1) Analisis Dampak Regulasi (<i>Regulatory Impact Analysis/RIA</i>); (2) Analisis Biaya dan Manfaat (<i>Cost and Benefit Analysis/CBA</i>)
4	Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Prosedur	4 (empat) hari waktu memulai usaha (EoDB)
		Penyelenggaraan <i>e-government</i>	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): $\geq 2,6$ (baik)
		Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik	2,9-3,2 hari waktu rata-rata pengeluaran barang (<i>dwelling time</i>)
5	Transformasi ekonomi	Industrialisasi	Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global
		Pengembangan destinasi unggulan	Pengembangan Destinasi Unggulan, melalui: perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenities di Destinasi Pariwisata
		Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi Digital	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, pada sektor: kuliner, <i>fashion</i> , kriya, aplikasi dan konten digital, games, film, dan musik.

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Strategi utama (*main strategy*) merujuk pada arahan nasional yaitu: (1) Pembangunan SDM melalui: layanan dasar, peningkatan kemampuan produktivitas, dan pembangunan karakter unggul; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Tata kelola birokrasi dan pelayanan publik yang cepat dan tepat; (4) Tata kelola kebijakan regulasi yang meminimalisir dampak negatif; (5) Transformasi ekonomi : industrialisasi, menarik kunjungan ke destinasi unggulan, ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Proyek prioritas nasional RPJMN 2020-2024 untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat konektivitas daerah dan mendukung pemulihan infrastruktur dan sosial ekonomi pasca bencana gempa bumi, Tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Beberapa rencana usulan maupun yang sudah dilaksanakan proyek prioritas nasional di Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Pembangunan Bendungan Napu dan Bendungan Poso;
2. Pembangunan Jalan Tol Palu-Parigi;
3. Pembangunan Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu;

4. Pembangunan Pelabuhan Pantoloan;
5. Pembangunan Infrastruktur KEK Palu
6. Pembangunan Kawasan Industri (KI) Morowali;
7. Pembangunan Kawasan Industri Baja Sulawesi Tengah
8. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah;
9. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah;
10. Kawasan Pangan Nasional (KPN) atau *Food Estate* yang mendukung Ibu Kota Negara (IKN).

Proyek-proyek prioritas nasional ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan. Posisi strategis Kabupaten Morowali terhadap kontribusi nasional dimana Morowali salah satu wilayah yang memiliki cadangan biji nikel terbesar di dunia setelah Brasil. Biji nikel dari Morowali digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan *stainless steel* dan produk baja lainnya, serta *battery* mobil listrik.

Kegiatan penambangan nikel berskala besar telah dan sedang dilakukan bahkan dengan melakukan perubahan fungsi lahan di mana sebagian lahan permukiman dan lahan pertanian menjadi wilayah konsesi tambang sebagaimana terjadi di Kecamatan Petasia, Witaponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bahodopi dan Bungku Selatan. Selain biji nikel, Kabupaten Morowali juga memiliki potensi sumber daya alam lainnya seperti bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Sebagai kawasan strategis nasional Kabupaten Morowali telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi kawasan industri (KI) yang berfokus pada pengolahan nikel beserta turunannya. Dalam upaya membangun kawasan ini, pemerintah Pusat ikut telah melakukan berbagai program dan kebijakan, terkait pengembangan infrastruktur mendukung investasi, insentif investasi, dan pembebasan lahan. Pengembangan Kabupaten Morowali sebagai kawasan strategis nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah terutama dalam sektor industri dan energi.

6.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Sulawesi Tengah 2021-2026

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Tengah tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun Provinsi Sulawesi Tengah.

Strategi yang dipilih untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya periode RPJMD. Adapun strategi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2.
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Tujuan 1.1	Sasaran 1.1.1	Strategi 1.1.1.1
Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Provinsi melalui Reformasi Sistem Pendidikan berbasis Vokasi dan pelayanan Kesehatan Dasar yang merata	Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Pendidikan	Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan menengah umum, kejuruan, Vokasi dan pendidikan khusus
		Strategi 1.1.1.2
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
		Strategi 1.1.1.3
		Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
	Sasaran 1.1.2	Strategi 1.1.2.1
	Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Kesehatan masyarakat	Meningkatkan status gizi masyarakat dan jaminan kesehatan ibu hamil dan balita
		Strategi 1.1.2.2
		Meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
		Strategi 1.1.2.3
		Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
		Strategi 1.1.2.4
		Meningkatkan pelayan kesehatan secara merata
	Sasaran 1.1.3	Strategi 1.1.3.1
	Menigkatnya konsumsi perkapita	Meningkatkan nilai produksi olahan
Sasaran 1.1.4	Strategi 1.1.4.1	
Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Meningkatkan pelestarian nilai budaya lokal	
Sasaran 1.1.5 Meningkatnya peran pemuda dan daya saing keolahragaan	Strategi 1.1.3.1	
	Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga	
	Strategi 1.1.3.2	
	Meningkatkan pembinaan organisasi dan SDM Kepramukaan	
Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM		



Tujuan	Sasaran	Strategi	
Tujuan 2.1 Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>)	Sasaran 2.1.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan)	Strategi 2.1.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja administrasi pemerintah	
		Strategi 2.1.1.2 Menerapkan manajemen talenta dan manajemen kinerja aparatur	
		Strategi 2.1.1.3 Menerapkan pola karir ASN	
		Strategi 2.1.1.4 Memberikan reward and punishment terhadap ASN	
		Sasaran 2.1.2 Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	Strategi 2.1.2.1 Melaksanakan penyusunan produk hukum dan penyelesaian
		Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan	
	Tujuan 3.1 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan daerah	Strategi 3.1.1.1 Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan daerah
	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Strategi 3.1.2.1 Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	
	Sasaran 3.1.3 Meningkatnya nilai realisasi investasi	Strategi 3.1.3.1 Meningkatkan Nilai realisasi investasi	
	Sasaran 3.1.4 Meningkatnya pendapatan dan daya saing daerah	Strategi 3.1.4.1 Meningkatkan PAD terhadap total pendapatan	
		Strategi 3.1.4.2 Meningkatkan Daya Saing Daerah	
	Tujuan 3.2 Menurunkan kemiskinan	Sasaran 3.2.1 Menurunnya penduduk miskin perkotaan dan perdesaan	Strategi 3.2.1.1 Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja dan perencanaan tenaga kerja
Strategi 3.2.1.2 Meningkatkan produktivitas dan kapasitas tenaga kerja berbasis digital dan teknologi informasi			
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa			Strategi 3.2.2.1 Meningkatkan kinerja pembangunan desa
Sasaran 3.2.3 Meningkatnya kemandirian PMKS		Strategi 3.2.3.1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pemberdayaan	
Sasaran 3.2.4 Menurunnya daerah rawan pangan		Strategi 3.2.4.1 Meningkatkan ketersediaan pangan	



Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 3.3 Menurunkan pengangguran	Sasaran 3.3.1 Meningkatkan angka partisipasi kerja	Strategi 3.3.1.1 Meningkatkan partisipasi angkatan kerja
Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah		
Tujuan 4.1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan	Strategi 4.1.1.1 Meningkatkan penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas Strategi 4.1.1.2 Meningkatkan penyediaan infrastruktur perumahan dan keciptakarya Strategi 4.1.1.3 Meningkatkan penyediaan jaringan listrik bagi masyarakat Strategi 4.1.1.4 Meningkatkan penyediaan jaringan irigasi yang berkualitas
	Sasaran 4.1.2 Meningkatnya konektivitas dan laut	Strategi 4.1.2.1 Meningkatkan penyediaan perlengkapan transportasi darat dan laut Strategi 4.1.2.2 Meningkatkan koordinasi perizinan angkutan Laut dan pembangunan pelabuhan regional
Misi 5: Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan		
Tujuan 5.1 Mewujudkan pembangunan masyarakat dan wilayah secara merata dan berkeadilan	Sasaran 5.1.1 Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	Strategi 5.1.1.1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa Strategi 5.1.1.2 Mewujudkan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
	Sasaran 5.1.2 Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Strategi 5.1.2.1 Menguatkan peran perempuan dalam kesetaraan gender
Misi 6: Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan		
Tujuan 6.1 Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta Tangguh terhadap bencana	Sasaran 6.1.1 Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan	Strategi 6.1.1.1 Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Strategi 6.1.1.2 Meningkatkan pengelolaan hutan yang berkualitas
	Sasaran 6.1.2 Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Strategi 6.1.2.1 Mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana Strategi 6.1.2.2 Mewujudkan pencegahan dan penanggulangan bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 7: Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga		
Tujuan 7.1	Sasaran 7.1.1	Strategi 7.1.1.1
Mewujudkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan secara bersinergi dan terintegrasi	Meningkatnya kerja sama antar daerah	Meningkatkan kerja sama pembangunan antar daerah
Misi 8: Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital		
Tujuan 8.1	Sasaran 8.1.1	Strategi 8.1.1.1
Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan perpustakaan	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Meningkatkan standar pelayanan publik
Misi 9: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah		
Tujuan 9.1	Sasaran 9.1.1	Strategi 9.1.1.1
Mewujudkan persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru	Tersedianya kajian akademik persiapan DOB	Optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan otonomi daerah

Sumber: RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026

Rancangan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah didesain untuk dapat terukur dan diimplementasikan secara berkelanjutan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan dalam kurun waktu 2021–2026, sehingga dapat ditentukan alternatif solusi jika terjadi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan dirancang sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, dimana sedemikian rupa untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka strategi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 berpedoman dan mempertimbangkan rancangan strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran

pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

Tabel 6.3.
Desain Strategi dan Arah Kebijakan RPD
Kabupaten Morowali tahun 2024-2026

STRATEGI RPD	ARAH KEBIJAKAN RPD	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
Mengoptimalkan Koordinasi Upaya Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem	Peningkatan kinerja dan Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) Kabupaten dan TKPKD melalui mitigasi Garis Kemiskinan	SEKRETARIAT DAERAH	BAPPEDA, DINKES, PERUMAHAN, PU, PENDIDIKAN, PERIKANAN, PERTANIAN, CAPIL, KOPERASI, PERINDAG, KESRA
Mengoptimalkan Koordinasi Menekan Upaya Penurunan Kedalaman Kemiskinan	Peningkatan kinerja dan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten melalui Pemantauan Indeks Kedalaman	BAPELITBANGDA	BAPPEDA, DINKES, PERUMAHAN, PU, PENDIDIKAN, PERIKANAN, PERTANIAN, CAPIL, KOPERASI, PERINDAG, KESRA
Mengoptimalkan Koordinasi Menekan Upaya Penurunan Keparahan Kemiskinan	Peningkatan kinerja dan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten melalui Optimalisasi Pemantauan Indeks Keparahan Kemiskinan	BAPELITBANGDA	
Meningkatkan Kualitas Hidup PMKS	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program yang Sinergis dan Bantuan Tepat Sasaran bagi PMKS	DINSOS	SEMUA OPD
	Peningkatan Bantuan Sosial berbasis Komunitas Adat Terpencil (KAT)	DINSOS	SEMUA OPD
Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha komoditas unggulan Non Migas Pertanian, Perikanan-kelautan dan Pariwisata daerah	Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan menggerakkan Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan dan Pariwisata Yang Berkelanjutan	PERTANIAN, PERIKANAN, UMKM KOPERASI, PARIWISATA, PERINDAG	Swasta dan Stakholders
Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan dan penciptaan UMKM	Peningkatan kinerja dan peran Industri Kecil Dan Ekonomi Kreatif dalam meningkatkan nilai tambah sektor unggulan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	PERTANIAN, PERIKANAN, UMKM KOPERASI, PARIWISATA, PERINDAG	



STRATEGI RPD	ARAH KEBIJAKAN RPD	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
serta penyediaan infrastruktur ekonomi	Peningkatan pemerataan ekonomi wilayah melalui revitalisasi pasar rakyat	PERINDAG	
Mengoptimalkan Koordinasi Peningkatan pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatkan kinerja dan peran UMKM Dan Ekonomi Kreatif pada sektor Unggulan didalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta Padat Karya Desa	PERTANIAN, PERIKANAN, UMKM KOPERASI, PARIWISATA, PERINDAG	BAPPEDA
	Peningkatan kinerja Pengawasan distribusi Pupuk dan dukungan alsintan, Saprodi guna mendukung peningkatan pendapatan petani dan pengentasan kemiskinan	PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
Mengoptimalkan Koordinasi dalam Menjaga Stabilitas Inflasi Daerah	Peningkatan kinerja dalam menjaga stabilitas Inflasi daerah melalui optimalisasi peran TPID, UMKM Koperasi, PERINDAG dan BumDes	TIM TPID, Perindustrian Perdagangan	SEMUA OPD
Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Investasi	Peningkatan investasi daerah pada Sektor Unggulan dalam Membuka Lapangan Kerja Baru	DPMPTSP	
	Pemantapan program Padat Karya dalam penciptaan lapangan kerja Bagi Penduduk Miskin	SEKRETARIAT DAERAH	
	Pengembangan ekonomi desa yang menitik beratkan pada pemanfaatan potensi unggulan lokal desa dalam pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja Didesa	PEMDES, KECAMATAN DAN DESA	
	Peningkatan kinerja Pengembangan, Penempatan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	TRANSNAKER	
	Peningkatan Kerjasama dalam penyelenggaraan <i>up-skilling</i> (peningkatan keterampilan) dan <i>re-skilling</i> (perubahan keterampilan) Tenaga Kerja	TRANSNAKER	



STRATEGI RPD	ARAH KEBIJAKAN RPD	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
	dengan Pemerintah provinsi Sulteng,dan DUDI		
	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi UMKM melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses pembiayaan serta bantuan	UMKM dan KOPERASI	
Mengoptimalkan kinerja PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta penerapan pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis digital	Perbaikan Penatausahaan Pengelolaan pembayaran pajak & Retribusi yang Transparan dan Akuntabel	BPPD,	KECAMATAN, PU, DISPORA, PERIKANAN, DLHD, PERTANIAN, PERINDAG, PERHUBUNGAN
Mengoptimalkan pelayanan Investasi dengan mengedepankan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau	Peningkatan kualitas layanan melalui inovasi dan kolaborasi dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif	DPMPTSP	DLHD, PU, PERINDAG, PERTANIAN, UMKM, PERIKANAN
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata	Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan secara merata di seluruh wilayah	RSUD, RS PRATAMA, PUSKESMAS, DINKES	BAPPEDA
	Peningkatan kinerja dalam melakukan konsolidasi berbagai sumber daya kesehatan serta tetap menjaga kualitas pelayanan yang keberlanjutan Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu	DINKES, RSUD MOROWALI, RS PRATAMA PAKU, PUSKESMAS DAN PUSTU	
	Penguatan sarana prasarana, obat obatan dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan	DINKES, RSUD MOROWALI, RS PRATAMA PAKU, PUSKESMAS DAN PUSTU	
	Penguatan peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mengurangi angka stunting	DINKES, RSUD MOROWALI, RS PRATAMA PAKU, PUSKESMAS DAN PUSTU	



STRATEGI RPD	ARAH KEBIJAKAN RPD	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
Meningkatkan kualitas pendidikan yang memenuhi standar nasional	Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi digital	PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN, DISPORA	BAPPEDA
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan baik jalur formal maupun nonformal	PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN, DISPORA	
	Peningkatan Minat dan budaya baca dan peningkatan layanan perpustakaan berbasis teknologi Informasi	PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN, DISPORA	
Meningkatkan perluasan kesempatan pendidikan dan kualitas pendidik serta ketersediaan guru	Pemerataan distribusi guru dan peningkatan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan	PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN, DISPORA	
	Penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter	PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN, DISPORA	
	Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi siswa miskin	PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN, DISPORA	
Meningkatkan pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan pada semua OPD	Percepatan reformasi birokrasi melalui penerapan area perubahan secara sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH, BAPPEDA, INSPEKTORAT	SELURUH OPD
Meningkatkan kualitas Layanan Publik dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten (<i>Smart Governance</i>) melalui	Peningkatan pelayanan administrasi Kependudukan secara cepat dan mudah	CAPIL, KECAMATAN	SEMUA OPD
	Peningkatan peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat	KECAMATAN	



STRATEGI RPD	ARAH KEBIJAKAN RPD	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
	Peningkatan kinerja evaluasi terhadap OPD dan aparatur pelayanan publik melalui pengukuran indeks kepuasan Masyarakat	SEMUA OPD	
Mengoptimalkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Peningkatan kualitas dokumen Perencanaan dan penganggaran OPD	BAPPEDA, INSPEKTORAT, BPKAD	SEMUA OPD
	Percepatan pengelolaan satu data dan Persandian daerah berbasis Informasi teknologi serta peningkatan kualitas SDM IT dan persandian	DISKOMINFO	
	Peningkatan kinerja perencanaan, pengendalian dan penganggaran daerah yang terintegrasi berbasis IT	DISKOMINFO	
	Peningkatan pelayanan kearsipan daerah berbasis IT	PERPUSTAKAAN	
	Peningkatan kinerja dalam mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD	
Meningkatkan kinerja evaluasi daerah melalui pengukuran Survei Penilaian Integritas (SPI)	Pengembangan kinerja melalui pelatihan dan penguatan nilai-nilai etis dalam OPD	INSPEKTORAT	SEMUA OPD
Mengoptimalkan Kreativitas dan Inovasi OPD sesuai TUSI	Penguatan peran OPD dalam menciptakan dan mengembangkan produk, layanan dan proses baru yang inovatif	BAPPEDA	SEMUA OPD
Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada perencanaan dan penganggaran serta semua jenis pelayanan yang diselenggarakan Pemda	Meningkatkan kinerja tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan sepenuhnya oleh semua OPD	KOMINFO	SEMUA OPD
	Penataan kinerja arsitektur SPBE Pemda Morowali diarahkan untuk mengatur Proses Bisnis kinerja, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE Kabupaten	KOMINFO	SEMUA OPD



STRATEGI RPD	ARAH KEBIJAKAN RPD	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana Infrastruktur daerah sesuai kebutuhan masyarakat	Peningkatan kualitas output dan <i>outcome</i> dari pembangunan infrastruktur daerah	PU, PERUMAHAN, PERHUBUNGAN,	
Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan	PU	
	Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan, talud dan drainase	PU	
	Penataan Perhubungan darat, udara dan Laut	DISHUB	
	Peningkatan pelayanan sarana transportasi dalam rangka untuk mendukung iklim investasi dan pengembangan wilayah.	DISHUB	
	Peningkatan aksesibilitas Jaringan Telekomunikasi pada seluruh wilayah	DISKOMINFO	
	Penyusunan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berkualitas	PERKIM	
	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih	PERKIM	
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan terhadap tata ruang wilayah	Penguatan sinkronisasi dan penetapan kebijakan tata ruang sesuai ketentuan	PU	SEMUA OPD
Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Peningkatan manajemen dan peranserta masyarakat dalam menjaga kualitas air tawar, Udara dan Laut	DLHD	SEMUA OPD
	Peningkatan kebersihan dan keindahan Ibukota Kabupaten melalui layanan persampahan yang terintegrasi serta Penataan system persampahan Kota Bungku	DLHD, PERKIM	



STRATEGI RPD	ARAH KEBIJAKAN RPD	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
	Pengembangan dan peningkatan tata bangunan dan lingkungan hidup	DLHD, PERKIM	
	Peningkatan pengendalian pencegahan pencemaran pesisir dan laut serta lingkungan kerjasama swasta dan pengelola industri pertambangan	DLHD	
Meningkatkan pemenuhan rasa aman masyarakat melalui koordinasi yang intens bersama instansi vertikal	Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban melalui koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait serta penegakan Perda	KESBANGPOL, POLPP	PT, TNI-POLRI, NGo, SWASTA DLL
	Pemantapan kondisi sosial dan politik serta keamanan melalui pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa serta upaya dini pencegahan konflik	KESBANGPOL, POLPP	PT, TNI-POLRI, NGo, SWASTA DLL
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memlihara situasi kondusif kabupaten	Pengembangan budaya anti kriminal dan anti korupsi di kalangan masyarakat dan aparat	KESBANGPOL, POLPP	PT, TNI-POLRI, NGo, SWASTA DLL
	Peningkatan Pendidikan dan pelatihan kesatuan bangsa dan politik	KESBANGPOL	PT, TNI-POLRI, NGo, SWASTA DLL
	Penegakan perda dan pemulihan keamanan wilayah secara kontinu mendukung penyelenggaraan Pesta demokrasi	SAT POLPP	PT, TNI-POLRI, NGo, SWASTA DLL
	Peningkatan kinerja cegah tangkal kriminal melalui Peran dan kepeloporan pemuda dalam mengisi pembangunan serta peningkatan prestasi keolahragaan	DISPORA	PT, TNI-POLRI, NGo, SWASTA DLL
Meningkatkan Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi peran perempuan dalam pemb. Morowali	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	DP3A	SEMUA OPD



STRATEGI RPD	ARAH KEBIJAKAN RPD	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
Meningkatkan kinerja dan optimalisasi Pencapaian efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	BPBD, DINSOS, PERUMAHAN, PU, POLPP	KECAMATAN, DESA
	Penigkatan peran serta masyarakat Desa didalam menghadapi bencana	PEMDES	KECAMATAN, DESA
	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran daerah	BPBD	KECAMATAN, DESA



Tabel 6.4.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Morowali Tahun 2023-2026

TUJUAN RPD			SASARAN RPD	STRATEGI RPD	ARAH KEBIJAKAN RPD	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
1	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata			Mengoptimalkan Koordinasi Upaya Penurunan Angka Kemiskinan Ekstream	Peningkatan kinerja dan Peran Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) Kabupaten & TKPKD melalui mitigasi Garis Kemiskinan	SEKRETARIAT DAERAH	BAPELITBANGDA, DINKES, PERUMAHAN, PU, PENDIDIKAN, PERIKANAN, PERTANIAN, CAPIL, KOPERASI, PERINDAG, KESRA
		1.1	Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin	Mengoptimalkan Koordinasi Menekan Upaya Penurunan Kedalaman Kemiskinan	Peningkatan kinerja dan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten melalui Pemantauan Indeks Kedalaman Kemiskinan	BAPELITBANGDA	BAPELITBANGDA, DINKES, PERUMAHAN, PU, PENDIDIKAN, PERIKANAN, PERTANIAN, CAPIL, KOPERASI, PERINDAG, KESRA
				Mengoptimalkan Koordinasi Menekan Upaya Penurunan Keparahan Kemiskinan	Peningkatan kinerja dan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten melalui Pemantauan Indeks Keparahan Kemiskinan	BAPELITBANGDA	
				Meningkatkan Kualitas Hidup PMKS	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program yang Sinergis dan Bantuan Tepat Sasaran bagi PMKS	DINSOS	SEMUA OPD
					Peningkatan Bantuan Sosial berbasis Komunitas Adat Terpencil (KAT)	DINSOS	SEMUA OPD
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah			Meningkatan produktivitas dan Daya Saing usaha komoditas unggulan Non Migas Pertanian, Perikanan kelautan dan Pariwisata daerah	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan menggerakkan Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan dan Pariwisata Yang Berkelanjutan.	PERTANIAN, PERIKANAN, UMKM KOPERASI, PARIWISATA, PERINDAG	Swasta dan Stakholders
					Percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Sombori	BAPPELITBANGDA, DINAS PERMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
				Menjaga Kualitas Pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan dan penciptaan	Peningkatkan kinerja dan peran Industri Kecil Dan Ekonomi Kreatif didalam meningkatkan nilai tambah sektor unggulan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	PERTANIAN, PERIKANAN, UMKM KOPERASI, PARIWISATA, PERINDAG	



TUJUAN RPD		SASARAN RPD	STRATEGI RPD	ARAH KEBIJAKAN RPD	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
		2.1.1 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM serta penyediaan infrastruktur ekonomi	Pemerataan ekonomi wilayah melalui revitalisasi pasar rakyat	PERINDAG	
			Mengoptimalkan Koordinasi Peningkatan pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kinerja dan peran UMKM Dan Ekonomi Kreatif pada sektor Unggulan didalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta Padat Karya Desa	PERTANIAN, PERIKANAN, UMKM KOPERASI, PARIWISATA, PERINDAG	BAPELITBANGDA
				Pengawasan distribusi Pupuk dan dukungan alsintan, Saprodi guna mendukung peningkatan pendapatan petani dan pengentasan kemiskinan	PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Mengoptimalkan Koordinasi Menjaga Stabilitas Inflasi Daerah	Peningkatan stabilitas Inflasi daerah melalui optimalisasi peran TPID, UMKM Koperasi, PERINDAG dan BumDes	TIM TPID, Perindustrian Perdagangan	SEMUA OPD
		2.1.2 Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dipasar Tenaga Kerja	Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Investasi	Peningkatan Investasi Daerah pada Sektor Unggulan dalam Membuka Lapangan Kerja Baru	DPMPTSP	
				Pemantapan program Padat Karya dalam penciptaan lapangan kerja Bagi Penduduk Miskin	SEKRETARIAT DAERAH	
				Pengembangan ekonomi desa yang menitik beratkan pada pemanfaatan potensi unggulan lokal desa dalam pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja Didesa	PEMDES, KECAMATAN DAN DESA	
				Pengembangan, Penempatan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	TRANSNAKER	
				Peningkatan Kerjama dalam penyelenggaraan <i>up-skilling</i> (peningkatan keterampilan) dan <i>re-skilling</i> (perubahan keterampilan) Tenaga Kerja dengan Pemerintah provinsi Sulteng,dan DUDI	TRANSNAKER	



TUJUAN RPD			SASARAN RPD	STRATEGI RPD	ARAH KEBIJAKAN RPD	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
					Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi UMKM melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses pembiayaan serta bantuan	UMKM dan KOPERASI	
		2.1.3	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Meingkaktan kinerja PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta penerapan pembayaran pajak dan restribusi daerah berbasis digital	Perbaikan Penatausahaan Pengelolaan pembayaran pajak & Retribusi yang Transparan dan Akuntabel	BPPD,	KECAMATAN, PU, DISPORA, PERIKANAN, DLHD, PERTANIAN, PERINDAG, PERHUBUNGAN
				Mengoptimalkan pelayanan Investasi dengan mengedepankan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau	Peningkatan kualitas layanan melalui inovasi dan kolaborasi dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif	DPMPSTP	DLHD, PU, PERINDAG, PERTANIAN, UMKM, PERIKANAN
		2.2.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata	Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan secara merata di seluruh wilayah	DINKES, RSUD MOROWALI, RS PRATAMA PAKU, PUSKESMAS DAN PUSTU	BAPELITBANGDA
					Penguatan Konsolidasi berbagai sumber daya kesehatan serta tetap menjaga kualitas pelayanan yang keberlanjutan RS, Puskesmas dan Pustu	DINKES, RSUD MOROWALI, RS PRATAMA PAKU, PUSKESMAS DAN PUSTU	
					Penguatan sarana prasarana, obat obatan dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan	DINKES, RSUD MOROWALI, RS PRATAMA PAKU, PUSKESMAS DAN PUSTU	
					Penguatan peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mengurangi angka stunting	DINKES, RSUD MOROWALI, RS PRATAMA PAKU, PUSKESMAS DAN PUSTU	



TUJUAN RPD			SASARAN RPD	STRATEGI RPD	ARAH KEBIJAKAN RPD	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
		2.2.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan yang memenuhi standar nasional	Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi digital	PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN, DISPORA	BAPELITBANGDA
					Peningkatan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan baik jalur formal maupun nonformal	PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN, DISPORA	
					Peningkatan Minat dan budaya baca dan peningkatan layanan kepastakaan berbasis tehnologi Informasi	PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN, DISPORA	
				Meningkatkan perluasan kesempatan pendidikan dan kualitas pendidik serta ketersediaan guru	Pemerataan distribusi guru dan peningkatan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan	PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN, DISPORA	
					Penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter	PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN, DISPORA	
					Peningkatan Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi siswa miskin	PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN, DISPORA	
					Penguatan nilai-nilai Seni dan budaya lokal dalam meningkatkan kualitas pendidikan	PENDIDIKAN	
3	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah			Meningkaktan pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan pada semua OPD	Percepatan reformasi birokrasi melalui penerapan area perubahan secara sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH, BAPELITBANGDA, INSPEKTORAT	SELURUH OPD
				5.1.1 Meningkatkan Kualitas Tata kelola	Meningkatkan kualitas Layanan Publik dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten	CAPIL, KECAMATAN	



TUJUAN RPD			SASARAN RPD	STRATEGI RPD	ARAH KEBIJAKAN RPD	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
			Pemerintahan dan Pelayanan Publik	(Smart Governance) melalui melalui	Peningkatan peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat	KECAMATAN	
					Peningkan kinerja Evaluasi terhadap OPD dan aparatur pelayanan publik melalui pengukuran indeks kepuasan Masyarakat.	BKPSDM, SEMUA OPD	
				Mengoptimalkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Peningkatan kualitas dok. Perencanaan & penganggaran OPD	BAPELITBANGDA, INSPEKTORAT, BPKAD	SEMUA OPD
					Percepatan pengelolaan satu data dan Persandian daerah berbasis Informasi tehnologi serta peningkatan kualitas SDM IT dan persandian	DISKOMINFO	
					Penguatan perencanaan, pengendalian dan penganggaran daerah yang terintegrasi berbasis IT.	DISKOMINFO	
					Peningkatan pelayanan kearsipan daerah berbasis IT	PERPUSTAKAAN	
					Peningkatkan kinerja dalam mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD	
				Meningkatkan kinerja Evaluasi daerah melalui pengukuran Survey Penilaian Integritas (SPI)	Pengembangan pelatihan dan penguatan nilai-nilai etis dalam OPD	INSPEKTORAT, BKPSDM	SEMUA OPD
				Mengoptimalkan Kretvitas dan Inovasi OPD sesuai TUSI	Peningkatan kinerja OPD dalam menciptakan dan mengembangkan produk, layanan dan proses baru yang inovatif	BAPELITBANGDA, BKPSDM	SEMUA OPD
				Mengoptimalikan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penguatan Tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan sepenuhnya oleh semua OPD	KOMINFO	SEMUA OPD



TUJUAN RPD			SASARAN RPD	STRATEGI RPD	ARAH KEBIJAKAN RPD	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
				pada perencanaan dan penganggaran serta semua jenis pelayanan yang diselenggarakan Pemda	Peningkatan kinerja Arsitektur SPBE Pemda Morowali diarahkan mengatur Proses Bisnis kinerja, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE Kabupaten	KOMINFO, INSPEKTORAT, BAPELITBANGDA	SEMUA OPD
4	Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata			Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana Infrastruktur daerah sesuai kebutuhan masyarakat	Peningkatan kualitas output dan outcome dari pembangunan infrastruktur daerah	PU, PERUMAHAN, PERHUBUNGAN,	
		4.1.1	Meningkatnya Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Baik	Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan	PU	
					Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan, talud dan drainase	PU	
					Penataan Perhubungan darat, udara dan Laut	DISHUB	
					Peningkatan pelayanan sarana transportasi dalam rangka untuk mendukung iklim investasi dan pengembangan wilayah.	DISHUB	
					Peningkatan aksesibilitas Jaringan Telekomunikasi pada seluruh wilayah.	DISKOMINFO	
					Penyusunan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berkualitas	PERKIM	
					Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih	PERKIM	
		4.1.2	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan terhadap tata ruang wilayah	Peningkatan sinkronisasi dan penetapan kebijakan tataruang sesuai ketentuan	PU	SEMUA OPD
		4.1.3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Peningkatan manajemen dan peranserta masyarakat dalam menjaga kualitas air tawar, Udara dan Laut	DLHD	SEMUA OPD



TUJUAN RPD			SASARAN RPD	STRATEGI RPD	ARAH KEBIJAKAN RPD	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
			pembangunan berkelanjutan		Peningkatan kebersihan dan keindahan Ibukota Kabupaten melalui layanan persampahan yang terintegrasi serta Penataan system persampahan Kota Bungku	DLHD, PERKIM	
					Pengembangan dan Peningkatan kinerja tata bangunan dan lingkungan hidup	DLHD, PERKIM	
					Peningkatan pengendalian pencegahan pencemaran pesisir dan laut serta lingkungan kerjasama swasta dan pengelola industri pertambangan	DLHD	
5	Menciptakan Tatahan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah			Meningkatkan pemenuhan rasa aman masyarakat melalui koordinasi yang intens bersama instansi vertikal	Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban melalui koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait serta penegakan Perda	KESBANGPOL, POLPP	PT, TNI-POLRI, NGo, SWASTA DLL
					Pemantapan kondisi sosial dan politik serta keamanan melalui pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa serta upaya dini pencegahan konflik	KESBANGPOL, POLPP	PT, TNI-POLRI, NGo, SWASTA DLL
		5.1.1	Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memlihara situasi kondusif kabupaten	Pengembangan budaya anti kriminal dan anti korupsi di kalangan masyarakat dan aparatur	KESBANGPOL, POLPP	PT, TNI-POLRI, NGo, SWASTA DLL
					Peningkatan Pendidikan dan pelatihan kesatuan bangsa & politik	KESBANGPOL	PT, TNI-POLRI, NGo, SWASTA DLL
					Penegakan perda dan pemulihan keamanan wilayah secara kontinyu mendukung penyelenggaraan Pesta demokrasi	SAT POLPP	PT, TNI-POLRI, NGo, SWASTA DLL
					Cegah tangkal kriminal melalui Peran dan kepeloporan pemuda dalam mengisi pembangunan serta peningkatan prestasi keolahragaan	DISPORA	PT, TNI-POLRI, NGo, SWASTA DLL



TUJUAN RPD			SASARAN RPD	STRATEGI RPD	ARAH KEBIJAKAN RPD	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
				Meningkatkan kinerja Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan Morowali	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	DP3A	SEMUA OPD
		5.2.1	Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah dan Kemajuan Pembangunan Desa	Mengoptimalkan Pencapaian efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	BPBD, DINSOS, PERUMAHAN, PU, POLPP	KECAMATAN, DESA
					Peningkatan peran serta masyarakat Desa didalam menghadapi bencana	PEMDES	KECAMATAN, DESA
					Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran daerah	BPBD	KECAMATAN, DESA
				Mengoptimalkan Dana Desa dalam rangka meningkatkan pencapaian SDGs Desa dan peningkatan status kemajuan desa	Peningkatan kemajuan desa Melalui penyerapan APBDes tepat waktu dan fokus pada pencapaian SDGs Desa	PEMDES	KECAMATAN, DESA
					Penguatan harmonisasi dan integrasi Perencanaan dan penganggaran desa dengan arah pembangunan Kabupaten	PEMDES	KECAMATAN, DESA

Selanjutnya, arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sebagai berikut:

6.2.1 Arah Kebijakan Tahunan

6.2.1.2 Arah Kebijakan Tahun 2024

Tema Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk ***“Meningkatkan kesejahteraan untuk memperkuat Ketahanan Sosial Politik, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Berkelanjutan”***, dengan arah kebijakan meliputi:

- a. Optimalisasi bantuan Sosial pengetasan kemiskinan Ekstream dan Pemantauan Garis Kemiskinan Melalui Peran Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) Kabupaten dan TKPKD;
- b. Percepatan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program yang Sinergis dan Bantuan Tepat Sasaran bagi PMKS;
- c. optimalisasi Pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menggerakkan Sektor Pertanian, Perikanan-Kelautan dan Pariwisata Yang Berkelanjutan;
- d. Meningkatkan peran UMKM Dan Ekonomi Kreatif pada sektor Unggulan didalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta Padat Karya Desa;
- e. Menjaga stabilitas Inflasi daerah melalui optimalisasi peran TPID, UMKM Koperasi, PERINDAG dan BumDes;
- f. Mendorong Investasi pada Sektor Unggulan dalam Membuka Lapangan Kerja Baru;
- g. Percepatan reformasi birokrasi melalui penerapan area perubahan secara sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya Organisasi;
- h. Peningkatan peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat;
- i. Evaluasi kinerja OPD dan aparatur pelayanan publik melalui pengukuran indeks kepuasan Masyarakat.
- j. Peningkatan kualitas dok. Perencanaan dan penganggaran OPD;
- k. Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan penganggaran daerah yang terintegrasi berbasis IT;
- l. Mengoptimalkan pelayanan administrasi Kependudukan secara cepat dan mudah mendukung Penyelenggaraan PEMILU;
- m. Meningkatkan dan mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- n. Mendorong OPD dalam menciptakan dan mengembangkan produk,

- layanan dan proses baru yang inovatif;
- o. Meningkatkan kualitas output dan *outcome* dari pembangunan infrastruktur daerah;
 - p. Peningkatan Tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan sepenuhnya oleh semua OPD;
 - q. Arsitektur SPBE Pemda Morowali diarahkan mengatur Proses Bisnis kinerja, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE Kabupaten;
 - r. Peningkatan manajemen dan peranserta masyarakat dalam menjaga kualitas air tawar, udara dan laut;
 - s. Peningkatan kebersihan dan keindahan Ibukota Kabupaten melalui layanan persampahan yang terintegrasi serta Penataan system persampahan Kota Bungku;
 - t. Mengembangkan dan meningkatkan tata bangunan dan lingkungan hidup;
 - u. Peningkatan pengendalian pencegahan pencemaran pesisir dan laut serta lingkungan kerjasama swasta dan pengelola industri pertambangan;
 - v. Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan;
 - w. Meningkatkan ketersediaan sarana transportasi dalam rangka untuk mendukung iklim investasi dan pengembangan wilayah;
 - x. Optimalisasi Pendidikan dan pelatihan kesatuan bangsa dan politik.
 - y. Penegakan perda dan pemulihan keamanan wilayah secara kontinyu mendukung penyelenggaraan Pesta demokrasi.

6.2.1.3 Arah Kebijakan Tahun 2025

Tema Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk **Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan wilayah** dengan arah kebijakan meliputi:

- a. Optimalisasi bantuan Sosial pengetasan kemiskinan Ekstream dan Pemantauan Garis Kemiskinan Melalui Peran Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) Kabupaten dan TKPKD;
- b. Percepatan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program yang Sinergis dan Bantuan Tepat Sasaran bagi PMKS;
- c. optimalisasi Pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menggerakkan Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan dan Pariwisata Yang Berkelanjutan;
- d. Meningkatkan peran UMKM Dan Ekonomi Kreatif pada sektor Unggulan didalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta Padat Karya Desa
- e. Menjaga stabilitas Inflasi daerah melalui optimalisasi peran TPID, UMKM Koperasi, PERINDAG dan BumDes;

- f. Mendorong Investasi pada Sektor Unggulan dalam Membuka Lapangan Kerja Baru;
- g. Percepatan reformasi birokrasi melalui penerapan area perubahan secara sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya Organisasi;
- h. Peningkatan peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat;
- i. Evaluasi kinerja OPD dan aparatur pelayanan publik melalui pengukuran indeks kepuasan Masyarakat;
- j. Peningkatan kualitas dok. Perencanaan dan penganggaran OPD;
- k. Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan penganggaran daerah yang terintegrasi berbasis IT;
- l. Meningkatkan dan mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- m. Mendorong OPD dalam menciptakan dan mengembangkan produk, layanan dan proses baru yang inovatif;
- n. Meningkatkan kualitas output dan outcome dari pembangunan infrastruktur daerah;
- o. Peningkatan Tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan sepenuhnya oleh semua OPD;
- p. Arsitektur SPBE Pemda Morowali diarahkan mengatur Proses Bisnis kinerja, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE Kabupatenl;
- q. Peningkatan kebersihan dan keindahan Ibukota Kabupaten melalui layanan persampahan yang terintegrasi serta Penataan system persampahan Kota Bungku;
- r. Mengembangkan dan meningkatkan tata bangunan dan lingkungan hidup;
- s. Peningkatan pengendalian pencegahan pencemaran pesisir dan laut serta lingkungan kerjasama swasta dan pengelola industri pertambangan
- t. Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan;
- u. Meningkatkan ketersediaan sarana transportasi dalam rangka untuk mendukung iklim investasi dan pengembangan wilayah;
- v. Percepatan pengelolaan satu data dan Persandian daerah berbasis Informasi teknologi serta peningkatan kualitas SDM IT dan persandian.

6.2.1.4 Arah Kebijakan Tahun 2026

Tema Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk ***“Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Infrastruktur untuk Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat”***,

dengan arah kebijakan meliputi:

- a. Optimalisasi bantuan Sosial pengetasan kemiskinan Ekstream dan Pemantauan Garis Kemiskinan Melalui Peran Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) Kabupaten dan TKPKD;
- b. Percepatan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program yang Sinergis dan Bantuan Tepat Sasaran bagi PMKS;
- c. optimalisasi Pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menggerakkan Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan dan Pariwisata Yang Berkelanjutan;
- d. Meningkatkan peran UMKM Dan Ekonomi Kreatif pada sektor Unggulan di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta Padat Karya Desa;
- e. Menjaga stabilitas Inflasi daerah melalui optimalisasi peran TPID, UMKM Koperasi, PERINDAG dan BumDes;
- f. Mendorong Investasi pada Sektor Unggulan dalam Membuka Lapangan Kerja Baru;
- g. Percepatan reformasi birokrasi melalui penerapan area perubahan secara sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya Organisasi;
- h. Peningkatan peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat;
- i. Evaluasi kinerja OPD dan aparatur pelayanan publik melalui pengukuran indeks kepuasan Masyarakat;
- j. Peningkatan kualitas dok. Perencanaan dan penganggaran OPD;
- k. Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan penganggaran daerah yang terintegrasi berbasis IT;
- l. Meningkatkan dan mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- m. Mendorong OPD dalam menciptakan dan mengembangkan produk, layanan dan proses baru yang inovatif;
- n. Meningkatkan kualitas output dan *outcome* dari pembangunan infrastruktur daerah;
- o. Peningkatan Tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan sepenuhnya oleh semua OPD;
- p. Arsitektur SPBE Pemda Morowali diarahkan mengatur Proses Bisnis kinerja, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE Kabupaten;
- q. Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan;
- r. Meningkatkan ketersediaan sarana transportasi dalam rangka untuk mendukung iklim investasi dan pengembangan wilayah;
- s. Percepatan pengelolaan satu data dan Persandian daerah berbasis Informasi teknologi serta peningkatan kualitas SDM IT dan

persandian.

6.3. Tema Pembangunan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan Rencana pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan RPD setiap tahun.

Penetapan tema tahunan pada RPD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran pencapaian Tujuan Sasaran RPD bersifat tahunan dan tema pembangunan RKPD Kabupaten Morowali, maka tema pembangunan Tahun 2024-2026 disajikan pada Gambar 6.1 berikut ini.



Sumber: Hasil FGD, 2023

Gambar 6.1
Tema Pembangunan Tahunan Kabupaten Morowali

6.4. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

6.4.1. Pendekatan Spasial

Perencanaan Pembangunan (*development planning*) menggunakan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran prioritas pembangunan. Pendekatan spasial (ruang) diperlukan dalam merumuskan keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi. Kebijakan pembangunan berbasis spasial (keruangan) ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang yang dirumuskan secara komprehensif memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, potensi sektoral, potensi investasi, dan struktur permukiman yang sudah terbentuk secara eksisting maupun proyeksi dalam jangka waktu 20 tahun.

Amanat keterkaitan rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang menekankan perlunya integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah baik jangka menengah maupun jangka Panjang untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara khusus disebutkan bahwa rencana pembangunan mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, termasuk penyusunan dokumen RPD melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. RTRW mengarahkan lokasi dan menjadi dasar menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 diharmonisasikan dengan kebijakan penataan ruang (spasial) Kabupaten yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali pada peraturan daerah Kabupaten Morowali nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali tahun 2019-2039. Kebijakan spasial dalam RTRW perlu diintegrasikan dalam RPD khususnya untuk acuan program/kegiatan yang perlu mendapatkan arahan lokasi. RPD 2024-2026 perlu memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah, kebijakan pengembangan struktur ruang (sistem perkotaan dan jaringan prasarana), kebijakan pola ruang (kawasan lindung dan budidaya), kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten morowali yaitu untuk ***Mewujudkan Kabupaten Morowali yang Berdaya Saing, dengan konsep pengembangan Industri, Pariwisata, Minapolitan, dan Agropolitan dengan memperhatikan Asas Penataan Ruang.***

Kebijakan Penataan Ruang daerah terdiri dari hal sebagai berikut.

- a. Pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi antara pusat kegiatan lokal PKL, pusat pelayanan kawasan PPK dan pusat pelayanan lingkungan PPL secara berjenjang dan merata antara Wilayah darat dan pulau-pulau kecil untuk mendukung investasi;
- b. Pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan;
- c. Pengembangan Kawasan agropolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar;
- d. Pengembangan Kawasan minapolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar;
- e. Pengembangan kawasan industri logam dasar dan bahan galian bukan

- logam untuk pemenuhan target Indonesia sebagai negara industri tangguh;
- f. Pengembangan sektor pariwisata alam/bahari, sejarah dan budaya, dan pariwisata buatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - g. Penetapan dan pengembangan kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi dan sosial budaya.

Strategi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali tahun 2024-2026 juga memperhatikan arah dari strategi Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali pada kebijakan yang telah ditentukan diatas. Adapun strategi masing-masing yang termuat dalam RTRW Kabupaten Morowali tahun 2019-2039, adalah sebagai berikut.

- 1) Strategi untuk mewujudkan kebijakan pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi antara pusat kegiatan lokal PKL, pusat pelayanan kawasan PPK dan pusat pelayanan lingkungan PPL secara berjenjang dan merata antara Wilayah darat dan pulau- pulau kecil untuk mendukung investasi meliputi:
 - a. mengusulkan pusat kegiatan lokal PKL hingga pada Wilayah pulau-pulau kecil untuk mendorong kemandirian kawasan perkotaan;
 - b. menghubungkan antar pusat kegiatan lokal PKL, pusat pelayanan kawasan PPK dan pusat pelayanan lingkungan PPL melalui jaringan transportasi secara terpadu antara transportasi darat, laut, dan udara;
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan yang menjangkau hingga kawasan perdesaan dan pulau-pulau kecil;
 - d. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang menjangkau hingga kawasan perdesaan dan pulau-pulau kecil;
 - e. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana air baku hingga kawasan perdesaan dan pulau-pulau kecil; dan
 - f. mengembangkan sistem jaringan parasarana lingkungan yang meliputi sistem jaringan air limbah, persampahan, dan drainase khususnya pada kawasan permukiman perkotaan.
- 2) Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan meliputi:
 - a. mempertahankan kawasan hutan lindung diluar kawasan *outline* yang telah ditetapkan, dari kegiatan industri, pertambangan dan kegiatan budidaya lainnya yang dapat merubah fungsi alam, bentang alam dan ekosistem alami;
 - b. membatasi pertumbuhan permukiman pada kawasan perlindungan setempat;

- c. menyediakan ruang terbuka hijau RTH *public* dan *privat* untuk kepentingan masyarakat di kawasan perkotaan;
 - d. membatasi pertumbuhan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya pada kawasan konservasi;
 - e. mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung geologi;
 - f. mengendalikan pertumbuhan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya pada kawasan rawan bencana;
 - g. mempertahankan dan menjaga kelestarian benda cagar budaya yang bernilai tinggi;
 - h. mempertahankan dan menjaga kelestarian ekosistem mangrove; dan
 - i. merehabilitasi kawasan lindung yang telah berubah fungsi.
- 3) Strategi pengembangan kawasan agropolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan agropolitan;
 - b. mengembangkan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) pangan;
 - c. mengembangkan pasar sentra pengembangan agrobisnis (SPA) yang lebih representatif untuk meningkatkan daya tarik pembeli lokal dan regional;
 - d. mengembangkan sistem jaringan jalan usaha tani yang terkoneksi dari lahan pertanian, tempat pengolahan hasil pertanian dan tempat pemasaran.
 - e. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi teknis, irigasi semi teknis, irigasi sederhana dan irigasi desa untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya pertanian lahan basah; dan
 - f. menetapkan dan meningkatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- 4) Strategi pengembangan kawasan minapolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan perikanan budidaya dengan dukungan balai benih ikan;
 - b. mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan ikan; dan
 - d. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan pulau-pulau kecil dengan Wilayah darat sebagai jalur distribusi.
- 5) Strategi pengembangan kawasan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam untuk pemenuhan target Indonesia sebagai negara industri tangguh terdiri atas:
- a. menetapkan dan membangun kawasan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri.

- 6) Strategi pengembangan sektor pariwisata alam/bahari, sejarah dan budaya, dan pariwisata buatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan terdiri atas :
 - a. mengembangkan wisata bahari seperti wisata pantai, wisata pulau-pulau kecil, ekowisata mangrove, dan wisata alam bawah laut, dengan eksotisme lokasi sebagai daya tarik wisata;
 - b. mengembangkan kegiatan pariwisata di pulau-pulau kecil secara terbatas dan terkendali yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melibatkan masyarakat setempat;
 - c. mengembangkan wisata alam seperti wisata air terjun, wisata penangkaran/perlindungan satwa, wisata goa, dan wisata puncak, dengan eksotisme lokasi sebagai daya tarik wisata;
 - d. menjaga dan mengembangkan kelestarian kawasan dan/atau benda cagar budaya, serta kawasan lainnya yang memiliki nilai historis dan estetika tinggi sebagai daya tarik wisata sejarah dan budaya;
 - e. menjaga dan mengembangkan festival-festival budaya masyarakat lokal sebagai daya tarik wisata budaya; dan
 - f. mengembangkan wisata buatan untuk memberikan daya tarik yang berberbeda sebagai destinasi alternatif dalam menunjang sektor pariwisata yang unggul.
- 7) Strategi penetapan dan pengembangan kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. menata dan mengembangkan kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. menata dan mengembangkan kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya.

6.4.2 Pendekatan Spasial Pengentasan Kemiskinan

Perencanaan Pembangunan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran prioritas pembangunan. Pendekatan spasial (ruang) diperlukan dalam meru-muskan keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi. Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebagaimana termuat dalam RPKD Kabupaten Morowali Tahun 2021-2026 juga memuat Kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis spasial (keruangan).

Perencanaan Pembangunan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran prioritas pengentasan kemiskinan. Pendekatan spasial (ruang) diperlukan dalam merumuskan keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai program dan kegiatan intervensi yang terintegrasi dan tepat

sasaran. Kebijakan spasial percepatan pengentasan kemiskinan dalam dokumen RPKD perlu diintegrasikan dalam RPD khususnya untuk acuan program/ kegiatan yang perlu mendapatkan arahan lokasi. RPD perlu memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah, kebijakan pengembangan struktur ruang (sistem dan jaringan sarana prasarana intervensi berbasis spasial), dengan memperhatikan kebijakan struktur ruang dan pola ruang dalam dokumen RTRW kabupaten Morowali, dan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

Secara umum diketahui bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali pada tahun 2022 mencapai **28,93 persen** atau satu-satunya daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang pertumbuhan ekonomi positif, sementara daerah lain mengalami perlambatan ekonomi (*slow down economic*) bahkan mengalami kontraksi. Namun demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Morowali masih cukup tinggi yaitu sebesar **12,58 persen** pada tahun 2022.

Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya dengan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomian maupun pemerataan pembangunan, serta meningkatkan ketajaman dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Morowali antara lain yakni meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Data status kesejahteraan menurut desil berdasarkan Rumah tangga menunjukkan bahwa total keluarga yang di Kabupaten Morowali sebanyak 13.663 RT, dimana keluarga terbesar pada desil 3. Secara lengkap terdapat pada tabel sebaran secara spasial berikut ini.

Tabel 6.5

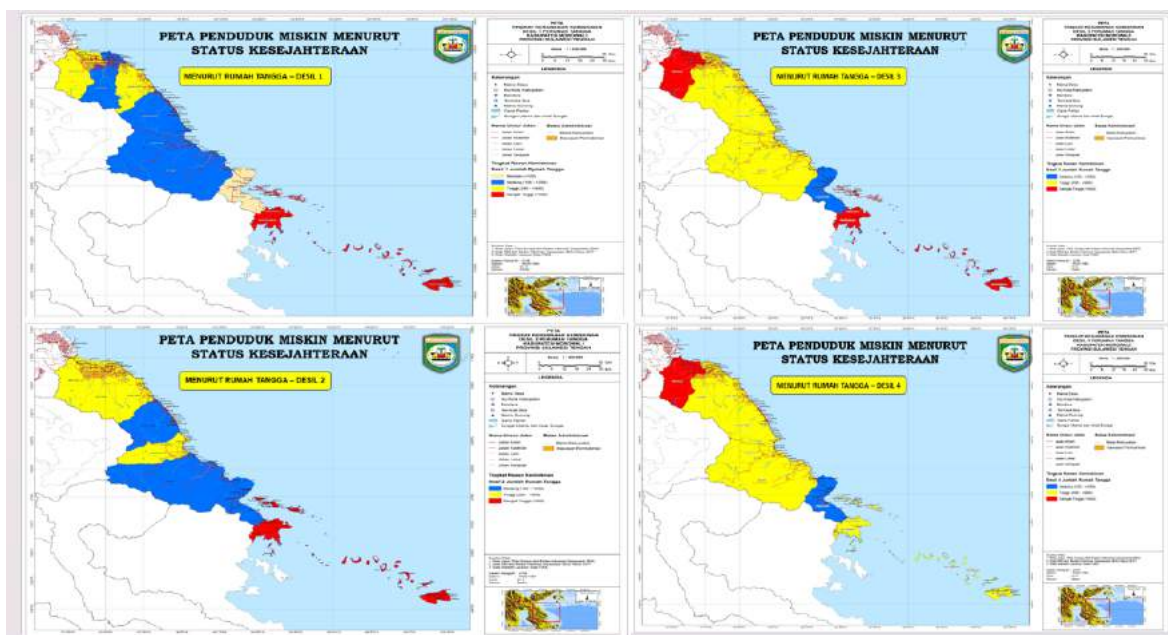
**Jumlah Keluarga Menurut Status Kesejahteraan Per Kecamatan
di Kabupaten Morowali Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Rumah Tangga (RT)				
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
1.	Bungku Tengah	1.072	131	179	387	375
2.	Bungku Selatan	2.502	1.117	551	549	285
3.	Menui Kepulauan	2.408	917	562	563	366
4.	Bungku Barat	1.397	374	293	415	315
5.	Bumi Raya	1.428	223	326	493	386
6.	Bahodopi	1.110	138	220	395	357
7.	Wita Ponda	2.136	448	484	645	559
8.	Bungku Pesisir	561	88	133	180	160
9.	Bungku Timur	1.049	238	224	323	264
Total		13.663	3.674	2.972	3.950	3.067

Sumber: <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/>, 2022

Berdasarkan data kemiskinan spasial diatas dimana kecamatan Bungku Selatan, Menui Kepulauan dan Wita Ponda adalah Kecamatan dengan jumlah keluarga menurut status kesejahteraannya tertinggi hingga mencapai angka dua ribu namun kecamatan paling tertinggi dengan angka sebesar 2.500 adalah Bungku Selatan. Sedangkan Bumi raya, Bungku barat, Bungku Tengah, Bungku Timur dan Bahodopi adalah kecamatan dengan jumlah keluarga berdasarkan status kesejahteraan mencapai angka seribu. Namun yang terendah adalah kecamatan Bungku Pesisir dengan jumlah keluarga menurut status kesejahteraan sebanyak 561. Sehingga akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah.

Selanjutnya dilihat dari desil 1, keluarga yang masuk kategori desil 1 terbesar terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan, untuk Desil 2 terbanyak berada di Kecamatan Bungku Selatan, untuk Desil 3 terbesar berada di Kecamatan Wita Ponda dan Kecamatan Menui Kepulauan. Dan untuk desil 4 terbanyak di Kecamatan Wita Ponda dan Kecamatan Bumi Raya. Data tersebut dapat menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kemiskinan pada keluarga khususnya yang berada pada desil 1 dan desil 2. Persentase kesejahteraan keluarga menurut desil Kabupaten Morowali, tertinggi pada desil 3 dengan jumlah persentase sebesar 28,91 persen, kemudian tertinggi kedua desil 1 dengan jumlah presentase sebesar 26,89 persen, berikut desil 4 dengan jumlah persentase sebesar 22,45 persen dan terakhir desil 2 dengan jumlah persentase sebesar 21,75 persen.



Gambar 6.2

Peta Penduduk Miskin menurut Status Kesejahteraan Desil 1,2,3 dan 4 Kabupaten Morowali Tahun 2022 (Berdasarkan Rumah Tangga)



6.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah adalah program yang secara langsung menopang perwujudan tujuan dan sasaran daerah yang dituangkan dalam program unggulan. Program prioritas pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2024–2026 disajikan dalam tabel 6.6.



Tabel 6.6
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Morowali

Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
			Tujuan 1											
			Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata	Angka Kemiskinan	12,58%	12,58 - 12,00 %		12,00- 11,58 %		11,58- 11,00 %		11,58- 11,00 %		
			Sasaran 1.1											
			Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin	Indeks Gini Rasio	0.29 Indeks	0,285 - 0,280 Indeks		0,280- 0,275 Indeks		0,275- 0,270 Indeks		0,275- 0,270 Indeks		
				Indeks Kedalaman Kemiskinan	2.03 Indeks	2,03 - 1,90 Indeks		1,90- 1,80 Indeks		1,80 Indeks		1,80 Indeks		
				Indeks Keparahan Kemiskinan	0,54 Indeks	0,54 - 0,53 Indeks		0,53- 0,52 Indeks		0,52- 0,51 Indeks		0,52- 0,51 Indeks		
			Program											
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	30%	41.50 %	2.326,97	43.00 %	2.492,03	44.50 %	2.541,72	44.50 %	7.360,72	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0 0	0 0	-	0 0	-	0 0	-	0 0	-	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang di berdayakan	63,00%	6,10%	5,65	15,80%	6,05	15,80%	6,17	15,80%	17,88	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase terhadap jumlah PPKS	37%	19.66 %	351,60	21,58%	376,54	21,77%	384,05	21,77%	1.112,19	
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penurunan anak terlantar dan fakir miskin (rumah tangga miskin)	74.61 %	98.30 %	634,21	99,00%	679,20	100%	692,74	100%	2.006,16	
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan masyarakat	33%	33%	40,15	33%	43,00	33%	43,85	33%	127,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	29.00 %	100.00 %	95,67	100.00 %	102,45	100%	104,50	100%	302,62	
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan tertangani	33.00 %	35.50 %	15,38	38.00 %	16,47	40.50 %	16,80	40.50 %	48,66	
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	32.00 %	35.00 %	3,22	37.50 %	3,44	40.00 %	3,51	40.00 %	10,17	
3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigrasi baru yang direncanakan	20.00 %	32.50 %	5,89	35.00 %	6,31	37.50 %	6,44	0.00 %	18,64	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase tanah yang disertifikasi	26.50 %	27.00 %	5,66	30.00 %	6,06	33.00 %	6,18	0.00 %	17,89	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	37%	100%	38,31	100%	41,03	100%	41,84	100%	121,18	
			Tujuan 2				-		-		-		-	
			Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6.27 Indeks	6-7 Indeks	-	6-7 Indeks	-	6-7 Indeks	-	6-7 Indeks	-	
				Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72.55 Indeks	72,55-72,75 Indeks		72,75- 73,00 Indeks		73,00- 73,50 Indeks		73,00- 73,50 Indeks	-	
			Sasaran 2.1				-		-		-		-	
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas	Angka Pertumbuhan Ekonomi	28.21 %	25,00-30,00 %	-	25,00- 30,00 %	-	25,00- 30,00 %	-	25,00- 30,00 %	-	
			Program				-		-		-		-	
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	33,420 Ton	38,000 Ton	901,59	39,000 Ton	965,54	40,000 Ton	984,80	40,000 Ton	2.851,93	Dinas Perikanan Daerah
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	48,175 Ton	30,000 Ton	186,91	32,000 Ton	200,16	35,000 Ton	204,15	35,000 Ton	591,22	
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penurunannya Ilegal Fishing	100%	20%	-	65%	-	75%	-	75%	-	
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Olahan hasil perikanan	7,24%	6,88%	103,91	6,53%	111,28	6,21%	113,50	6,21%	328,69	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase objek wisata yang dikelola	20%	23%	71,55	24%	76,63	25%	78,16	25%	226,34	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	presentase objek wisata yang dipromosikan	1.89 %	9.43 %	34,65	18.87 %	37,11	28.30 %	37,85	28.30 %	109,61	
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	23.53 %	29.41 %	66,09	35.29 %	70,78	35.29 %	72,19	35.29 %	209,06	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	90%	90%	3.214,43	92.25 %	3.442,43	94.50 %	3.511,07	94.50 %	10.167,94	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				persentase peningkatan produktivitas peternakan	75%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	
				Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	75%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/Perkebunan	100%	76.00% %	760,35	84,00%	814,28	91.00% %	830,52	91.00% %	2.405,15	
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100%	100%	44,18	100%	47,32	100%	48,26	100%	139,76	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	100.00 %	100%	64,90	100%	69,50	100%	70,89	100%	205,28	
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persenatse Kelembagaan/Kelompok Tani yang Dibina	100%	100%	645,60	100%	691,39	100%	705,18	100%	2.042,18	
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten	20%	35%	113,51	37.50 %	121,56	40.00 %	123,98	42.50% %	359,04	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi dan dipantau	20.00 %	22.00 %	5,09	24.00 %	5,45	26.00 %	5,56	26.00 %	16,09	
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	30.00 %	37.80 %	6,22	38.60 %	6,66	39.40 %	6,80	39.40 %	19,68	
			Sasaran 2.2				-		-		-		-	
			Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dipasar Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.20 %	3,2-3,00 %	-	3,00- 2,00 %	-	3,00- 2,00 %	-	3,00- 2,00 %	-	
			Program				-		-		-		-	
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan yang Menyusun RTK	55.56 %	63.50 %	69,69	68.30 %	74,64	71.40 %	76,12	71.40 %	220,45	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi dan LPTKS yang dibina	0.00 %	50.90 %	111,55	51.00 %	119,46	51.10 %	121,84	51.10 %	352,85	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	61.40 %	62.20 %	69,69	62.50 %	74,64	63.30 %	76,12	63.30 %	220,45	
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	71.7 %	71.80 %	48,23	71.70 %	51,65	71.00 %	52,68	71.00 %	152,55	
			Sasaran 2.3				-		-		-		-	
			Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Nilai Investasi	65 Triliun	65-70 Triliun	-	70-75 Triliun	-	75-80 Triliun	-	75-80 Triliun	-	
				Persentase Kenaikan PAD	1.38 %	1,00-2,00 %		2,00- 4,00 %		4,00- 6,00 %		4,00- 6,00 %	-	
			Program				-		-		-		-	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase PMDN yang mendapat fasilitas / insentif kemudahan penanaman modal	100%	100%	35,14	100%	37,64	100%	38,39	100%	111,17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN) di kabupaten/kota	50.00 %	5.00 %	54,56	6.05 %	58,43	7.10 %	59,60	7.10 %	172,59	
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Realisasi Penanaman Modal	90%	100%	18,08	100%	19,36	100%	19,75	100%	57,19	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Jumlah SPPT yang Tertagih	91.4 %	91,50%	-	91,60%	-	91,70%	-	91,70%	-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
				Persentase objek pajak yang ditetapkan berdasarkan potensi pajak	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
				Persentase objek pajak yang tertagih	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
				Persentase peningkatan potensi pajak	3.02 %	5.21 %	401,08	8.44 %	429,53	14.10 %	438,09	14.10 %	1.268,71	
			Sasaran 2.4				-		-		-		-	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	0.40 Indeks	0,40-0,43 Indeks		0,43- 0,46 Indeks		0,46- 0,50 Indeks		0,46- 0,50 Indeks	-	
				Stunting (SSGI)	23.30 SSG	20-17 SSG		16-13 SSG		12-9 SSG		12-9 SSG	-	
			Program				-		-		-		-	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	17.70 AKB	15,70 AKB	-	14,70 AKB	-	13,70 AKB	-	13,70 AKB	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	213.80 AKI	183 AKI	3.462,65	172 AKI	3.708,25	161 AKI	3.782,20	161 AKI	10.953,10	
				Angka Kesakitan	36.20.00	35 -	-	35 -	-	35 -	-	35 -	-	
				Persentase pemenuhan layanan pasien	0.00 %	75.00 %	235,33	77.50 %	252,02	80.00 %	257,05	80.00 %	744,40	
				Persentase pemenuhan layanan pasien	78.50 %	85.00 %	177,36	87.50 %	189,94	90.00 %	193,73	90.00 %	561,04	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
				Prevalensi Stunting	23,30%	16,00%	-	14,00%	-	12,00%	-	12,00%	-	
				Prevalensi Wasting	02.00	0,083333333	-	1,40 -	-	1,20 -	-	1,20 -	-	
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK yang ditingkat Sumber dayanya	6,00%	36,00%	-	46,00%	-	56,00%	-	56,00%	-	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali
				Persentase SDMK yang ditingkat Sumber dayanya	6%	36%	4,41	46%	4,72	56%	4,81	56%	13,94	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase SDMK yang ditingkat Sumber dayanya	6%	36%	26,90	46%	28,80	56%	29,38	56%	85,08	Rumah Sakit Pratama
				Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk	6,00%	15,68%	26,90	15,73%	28,80	15,78%	29,38	15,78%	85,08	
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan Mamin yang memenuhi standar	100%	100%	16,80	100%	17,99	100%	18,35	100%	53,15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kebijakan Berwawasan Kesehatan	9 Kebijakan	13 Kebijakan	15,32	15 Kebijakan	16,41	17 Kebijakan	16,74	17 Kebijakan	48,47	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kepadatan Penduduk	43%	40%	11,31	40%	12,11	40%	12,36	40%	35,78	
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	19,00 Angka	19,00 Angka	-	18,00 Angka	-	18,00 Angka	-	18,00 Angka	-	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
				Cakupan Peserta KB Aktif	51,00%	60%	49,54	75%	53,05	80%	54,11	80%	156,70	
				Total Fertility Rate (TFR)	1 Angka	1 Angka	-	1 Angka	-	1 Angka	-	1	-	
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Pendapatan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	50.00 %	70.00 %	42,97	78.50 %	46,01	87.00 %	46,93	87.00 %	135,91	
			Sasaran 2.5				-		-		-		-	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	55.00 Indeks	55,00-57,00 Indeks		57,00-59,00 Indeks		59,00-61,00 Indeks		59,00-61,00 Indeks	-	
			Program				-		-		-		-	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase Pengelolaan Satuan Pendidikan	95%	96%	6.556,58	97%	7.021,64	98%	7.161,65	98%	20.739,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Kurikulum Yang dikembangkan	90.00 %	98.00 %	13,17	98.50 %	14,10	99.00 %	14,39	99.00 %	41,66	
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase Tenaga Pendidik yang bersertifikat Pendidik	100%	100% %	378,51	100% %	405,36	100% %	413,44	100% %	1.197,30	
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasatr dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	78.00 %	78,56%	-	79,12%	-	79,68%	-	79,68%	-	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan sastra	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam berwirausaha	65%	68%	165,18	72%	176,89	75%	180,42	75%	522,49	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan kapasitas daya saing olahraga	NA %	10%	171,70	20%	183,88	30%	187,54	30%	543,12	
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi Kepramukaan yang dikembangkan	100%	100%	22,63	100%	24,23	100%	24,71	100%	71,57	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Daerah yang di Kembangkan	100.00 %	97%	119,36	97%	127,82	97%	130,37	97%	377,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikestarikan	100.00 %	65.00 %	101,10	68%	108,27	70%	110,43	70%	319,81	
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase benda budaya dan seni yang dilestarikan	75%	75%	86,34	75%	89,77	75%	90,63	75%	266,75	
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan di Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	85%	90%	67,89	90%	72,70	90%	74,15	100%	214,74	Dinas Perpustakaan Daerah
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi hasil pelestarian naskah kuno	NA koleksi	1050 koleksi	2,03	1050 koleksi	2,18	1050 koleksi	2,22	1050 koleksi	6,43	
			Sasaran 2.6				-		-		-		-	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
			Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Inflasi	3.00 Inflasi	3,00-2,00 Inflasi		3,00-2,00 Inflasi		3,00-2,00 Inflasi		3,00-2,00 Inflasi	-	
				Pendapatan Perkapita	16,673611	400,10-420,00 -		400,10-420,00 -		400,10-420,00 -		400,10-420,00 -	-	
			Program				-		-		-		-	
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dala daerah Kabupaten/Kota	100%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Aktif	30.00 %	32.50 %	12,08	35.00 %	12,93	37.50 %	13,19	37.50 %	38,20	
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4.00 %	4.38 %	3,39	6.88 %	3,63	9.38 %	3,71	9.38 %	10,73	
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50%	70%	47,43	73%	50,80	75%	51,81	75%	150,04	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1.5 %	6.41 %	57,46	7.91 %	61,54	9.41 %	62,77	9.41 %	181,77	
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	1%	1.46 %	133,60	1.96 %	143,07	2.46 %	145,92	2.46 %	422,59	
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil	1%	1.25 %	94,93	3.12 %	101,66	4.62 %	103,69	5%	300,28	
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	26.00 %	28.00 %	3,31	30.00 %	3,54	32.00 %	3,61	32.00 %	10,46	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	29.00 %	30.00 %	123,63	32.50 %	132,40	35.00 %	135,04	35.00 %	391,06	
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	24,35	100%	26,07	100%	26,59	100%	77,01	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang tera ulang	50%	55%	30,40	60%	32,55	65%	33,20	65%	96,15	
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentases Produk Dalam Daerah yang di Promosikan Di luar	33.00 %	33.50 %	17,77	34.00 %	19,03	34.50 %	19,41	34.50 %	56,21	
			Tujuan 3				-		-		-		-	
			Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	CC Predikat	B Predikat		B Predikat		BB Predikat		BB Predikat	-	
			Sasaran 3.1				-		-		-		-	
			Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Msyarakat Pada Layanan Publik	75.0 Indeks	75,00-80,00 Indeks		80,00-85,00 Indeks		85,00-90,00 Indeks		85,00-90,00 Indeks	-	
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	60.97 %	68.96 %		77.00 %		84.00 %		84.00 %	-	
				Nilai Sakip	CC Predikat	B Predikat		BB Predikat		A Predikat		A Predikat	-	
				Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.53 Nilai	1,53-1,75 Nilai		1,75-2,00 Nilai		2,00-2,25 Nilai		2,00-2,25 Nilai	-	
				Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	73,56 Nilai	73,7-77,4 Nilai		73,7-77,4 Nilai		77,5-100 Nilai		77,5-100 Nilai	-	
			Program				-		-		-		-	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan KTP-el	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
				Persentase anak memiliki KIA per satuan anak	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
				Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	100%	100%	43,20	100%	46,27	100%	47,19	100%	136,66	
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
				Rasio bayi ber-Akta Kelahiran	89%	89%	-	89%	-	89%	-	89%	-	
				Rasio pasangan nikah ber-Akta Nikah	100%	100%	18,94	100%	20,29	100%	20,69	100%	59,92	
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	100%	100%	14,36	100%	15,38	100%	15,68	100%	45,42	
				Penerapan KTP-el berbasis NIK	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan	100%	100%	10,05	100%	10,76	100%	10,97	100%	31,78	
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	41,74%	65,00%	132,84	70%	142,27	75%	145,10	75%	420,21	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	20.00 %	25.00 %	-	30.00 %	-	35.00 %	-	35.00 %	-	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	20.00 0	25.00 0	-	30.00 0	-	35.00 0	-	35.00 0	-	
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	indeks SPBE Kabupaten Morowali hasil Evaluasi dan Pemantauan Tahun oleh Kempan-RB	1.97 %	2.20 %	276,42	2.40 %	296,03	2.50 %	301,93	2.50 %	874,39	
				Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan kandomain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
				Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP	90%	100%	39,26	100%	42,05	100%	42,88	100%	124,19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%)	80%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	73,14	100%	123,85	100%	138,72	100%	335,71	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks SPBE Kabupaten Morowali pada Domain Manajemen SPBE	NA Indeks	1 Indeks	29,76	2 Indeks	31,87	3 Indeks	32,50	3 Indeks	94,13	
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD/ yang menerapkan arsip secara baku	35%	35%	425,25	35%	455,42	35%	464,50	35%	1.345,17	Dinas Perpustakaan Daerah
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase penyelamatan arsip	90%	90%	-	90%	-	95%	-	95%	-	
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	50%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase produk hukum yang dihasilkan	100%	100%	4.076,78	100%	4.365,94	100%	4.453,00	100%	12.895,72	
				Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang Dihasilkan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	227,96	100%	244,13	100%	249,00	100%	721,08	
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	100%	631,60	100%	676,40	100%	689,89	100%	1.997,89	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	80%	214,52	85.00 %	229,73	90.00 %	234,31	90.00 %	678,57	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80%	100%	206,99	100%	221,67	100%	226,09	100%	654,76	
				Indeks Kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	80%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
				Indeks Kualitas Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	80%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Opini BPK atas LKPD	15 -	15 -	-	15 -	-	15 -	-	15 -	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Kemandirian Keuangan & Fleksibilitas	NA -	02.00	-	02.00	-	02.00	-	02.00	-	
				Kesesuaian Nomenklatur dan Pagu Program RKPD, KUA-PPAS dan APBD	NA -	04.00	20.169,94	04.00	17.019,15	04.00	16.753,35	04.00	53.942,45	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
				Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD yang bersifat Mandatory	NA -	04.00	-	04.00	-	04.00	-	04.00	-	
				Persentase Penyerapan Anggaran Belanja dalam APBD	NA -	04.00	-	04.00	-	04.00	-	04.00	-	
				Sovabilitas	NA -	04.00	-	04.00	-	04.00	-	04.00	-	
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Manajemen Pengelolaan Aset	55%	65%	72,67	75%	77,82	80%	79,37	80%	229,87	
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan yang diimplementasikan	75%	85%	82,40	90%	88,24	90%	90,00	90%	260,64	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Inspektorat Daerah
				Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	62%	65%	-	75%	-	80%	-	80%	-	
				Persentase penyelesaian Tindakanjut hasil temuan BPK dan APIP	73%	75%	216,85	80%	232,23	82%	236,86	82%	685,95	
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian Level Kapabitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	3,00 LEVEL	3,10 LEVEL	103,56	3,15 LEVEL	110,91	3,20 LEVEL	113,12	3,20 LEVEL	327,59	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100%	75.00 %	23,73	77.50 %	25,42	80.00 %	25,92	80.00 %	75,07	Kecamatan Bungku Barat
				Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100.00 %	79%	1,29	81%	1,38	84%	1,41	83.50 %	4,08	Kecamatan Bungku Selatan
				Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	89.00 %	75.00 %	1,33	77.50 %	1,43	80.00 %	1,46	80.00 %	4,22	Kecamatan Menui Kepulauan
				Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100%	78.20 %	25,96	80.70 %	27,80	83.20 %	28,36	83.20 %	82,12	Kecamatan Bahodopi
				Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	15%	73%	2,21	75%	2,36	78%	2,41	77%	6,98	Kecamatan Bumi Raya
				Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100%	75%	10,80	77%	11,57	79%	11,80	78,78%	34,17	Kecamatan Sombori Kepulauan
				Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100%	75.00 %	4,58	77.50 %	4,91	80.00 %	5,01	80.00 %	14,50	Kecamatan Bungku Pesisir
				Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100.00 %	78%	42,18	80%	45,17	83%	46,07	82%	133,41	Kecamatan Bungku Timur
				Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100%	75.00 %	20,57	77.50 %	22,02	80.00 %	22,46	80.00 %	65,05	Kecamatan Wita Ponda
				Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100%	78.50 %	8,19	81.00 %	8,77	83.50 %	8,94	83.50 %	25,90	Kecamatan Bungku Tengah



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100%	100%	623,79	100%	668,03	100%	681,35	100%	1.973,17	Kecamatan Menui Kepulauan
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100%	100%	1.034,40	100%	1.107,76	100%	1.129,85	100%	3.272,01	Kecamatan Bungku Tengah
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100%	100%	457,43	100%	489,87	100%	499,64	100%	1.446,95	Kecamatan Bungku Selatan
				Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	100%	16,45	100%	17,62	100%	17,97	100%	52,03	Kecamatan Bungku Barat
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	472,32	100%	488,40	100%	495,71	100%	1.456,43	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	1.823,02	100%	1.952,32	100%	1.991,25	100%	5.766,59	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	425,43	100%	455,60	100%	464,69	100%	1.345,72	Dinas Sosial
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	531,81	100%	569,53	100%	580,89	100%	1.682,22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
				Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	1.333,87	100%	1.428,48	100%	1.456,96	100%	4.219,31	Inspektorat Daerah
				Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	0%	100%	545,65	100%	584,35	100%	596,00	100%	1.726,00	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	13.501,42	100%	14.459,08	100%	14.747,39	100%	42.707,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	835,71	100%	894,99	100%	912,83	100%	2.643,53	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	2.288,40	100%	2.450,72	100%	2.499,59	100%	7.238,71	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	22%	100%	509,78	100%	545,94	100%	556,83	100%	1.612,55	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	1.128,79	100%	1.208,85	100%	1.232,96	100%	3.570,60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	679,96	100%	728,19	100%	742,71	100%	2.150,87	Dinas Perikanan Daerah



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	532,25	100%	570,01	100%	581,37	100%	1.683,64	Dinas Perpustakaan Daerah
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	488,91	100%	523,59	100%	534,03	100%	1.546,52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	290,52	100%	311,13	100%	317,33	100%	918,98	Kecamatan Bungku Timur
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	330,87	100%	354,34	100%	361,41	100%	1.046,63	Kecamatan Wita Ponda
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	412,22	100%	441,45	100%	450,26	100%	1.303,93	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	1.782,79	100%	1.909,24	100%	1.947,31	100%	5.639,35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	456,35	100%	488,71	100%	498,46	100%	1.443,52	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	2.025,61	100%	2.169,29	100%	2.212,55	100%	6.407,45	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	388,80	100%	416,38	100%	424,68	100%	1.229,86	Kecamatan Bumi Raya



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	345,93	100%	370,46	100%	377,85	100%	1.094,24	Kecamatan Bungku Pesisir
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	739,69	100%	792,15	100%	807,95	100%	2.339,79	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	682,57	100%	730,99	100%	745,57	100%	2.159,13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	4.481,37	100%	4.799,24	100%	4.894,94	100%	14.175,55	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	411,22	100%	440,38	100%	449,17	100%	1.300,77	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	731,01	100%	782,86	100%	798,47	100%	2.312,34	Dinas Perhubungan Daerah
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	575,51	100%	616,33	100%	628,62	100%	1.820,47	Dinas Lingkungan Hidup Daerah



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	478,00	100%	511,91	100%	522,12	100%	1.512,03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	173,79	100%	186,12	100%	189,83	100%	549,74	Kecamatan Sombori Kepulauan
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	1.622,49	100%	1.737,57	100%	1.772,22	100%	5.132,29	Satuan Polisi Pamongpraja
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	655,27	100%	701,75	100%	715,74	100%	2.072,75	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	6.378,92	100%	6.831,38	100%	6.967,60	100%	20.177,90	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	13,81	100%	14,79	100%	15,08	100%	43,68	Kecamatan Bahodopi
			Sasaran 3.2				-		-		-		-	
			Meningkatnya Kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70.00 Indeks	71-73 Indeks		74-76 Indeks		77-80 Indeks		77-80 Indeks	-	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
			Program				-		-		-		-	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Jabatan Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	46.70 %	46.70 %	-	46.74 %	-	46.74 %	-	46.74 %	-	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9.94 %	9.94 %	251,12	9.94 %	268,93	9.94 %	274,30	9.94 %	794,35	
				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	78.73 %	77.82 %	-	78.12 %	-	78.42 %	-	78.42 %	-	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	82.00 %	88.24 %	344,21	91.81 %	368,62	94.12 %	375,97	94.12 %	1.088,81	
				Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	67.00 %	73.83 %	-	80.54 %	-	87.25 %	-	87.25 %	-	
				Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	36.00 %	37.13 %	-	39.60 %	-	42.08 %	-	42.08 %	-	
			Tujuan 4				-		-		-		-	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
			Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	NA Indeks	50-60 Indeks		60-70-Indeks		70-00-Indeks		70-00-Indeks	-	
			Sasaran 4.1				-		-		-		-	
			Meningkatnya Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Baik	Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik	23.27 %	0,235		0,245		0,265		0,265	-	
			Program				-		-		-		-	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sumber daya air dalam kondisi baik	8.5 %	15.68 %	995,59	15.73 %	1.066,20	15.78 %	1.087,46	15.78 %	3.149,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	85,63%	86,38%	1.286,72	87,13%	1.377,98	87,88%	1.405,46	87,88%	4.070,16	
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	20.00 %	23%	33,94	26%	36,34	28%	37,07	28%	107,35	
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Indeks Kualitas Sanitasi	8,32%	0,08%	113,13	0,09%	121,15	0,10%	123,56	0,10%	357,84	
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	58.39 %	70.52 %	907,13	83.42 %	971,47	97.07 %	990,84	97.07 %	2.869,45	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	32.50 %	38.68 %	2.595,27	45.95 %	2.779,35	51.03 %	2.834,77	51.03 %	8.209,39	
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	1,20%	18.5 %	-	18525%	-	18.55 %	-	18.55 %	-	
				Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	20%	3.5 %	16,01	2.63 %	17,14	1.76 %	17,49	1.76 %	50,64	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintass dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	100%	155,23	100%	166,24	100%	169,55	100%	491,02	Dinas Perhubungan Daerah
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan Sarana, Informasi, Korodinasi dan Disiplin Angkutan Penyebrangan	20.00 %	65.50 %	268,47	71.15 %	287,51	76.80 %	293,24	76.80 %	849,22	
			Sasaran 4.2				-		-		-		-	
			Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	NA %	0,5		0,55		0,6		0,6	-	
			Program				-		-		-		-	
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	2,61%	3,68%	735,31	4,75%	787,47	5,83%	803,17	5,83%	2.325,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum dalam kondisi baik	0,00%	4%	12,50	4%	15,00	4%	17,50	4%	45,00	
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	18.90 %	19.00 %	58,34	21.50 %	62,47	24.00 %	63,72	24.00 %	184,53	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana yang tertangani	81 Unit	30 Unit	79,90	30 Unit	85,57	30 Unit	87,28	30 Unit	252,75	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Persentase rumah khusus yang tertangani	117 Unit	10 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	-	
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	99,60%	99,65%	1.570,14	99,65%	1.681,50	99,65%	1.715,03	99,65%	4.966,67	
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara	75%	71,60%	7,16	74,93%	7,49	75,41%	7,54	75,41%	22,19	Dinas Sosial
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan	0%	70%	226,25	75%	242,30	80%	247,13	80%	715,68	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang dilakukan	0%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	15.00 %	16.50 %	-	18.00 %	-	19.50 %	-	20.00 %	-	
			Sasaran 4.3				-		-		-		-	
			Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80.54 %	80.54 %		81.00 %		81.50 %		81.50 %	-	
			Program				-		-		-		-	
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen wajib perencanaan lingkungan hidup	100%	85%	22,63	90%	24,23	95%	24,71	95%	71,57	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Standar Baku Mutu Kualitas Lingkungan	100.00 %	75.00 %	25,44	77.50 %	27,25	80.00 %	27,79	80.00 %	80,47	
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	50.00 %	16.00 %	10,49	21.00 %	11,24	26.00 %	11,46	26.00 %	33,19	
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Pengelolaan Limbah B3	50.00 %	100.00 %	3,40	100.00 %	3,65	100.00 %	3,72	100.00 %	10,77	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	50.00 %	100%	14,11	100%	15,12	100%	15,42	100%	44,65	
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup yang memperoleh penghargaan	5%	5%	9,45	5%	2	5%	2	5%	13,45	
				Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan	2.50 %	5.00 %	-	7.50 %	-	10.00 %	-	10.00 %	-	
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang terselesaikan	0%	100%	9,05	100%	9,69	100%	9,89	100%	28,63	
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani di Wilayah kota	16.00 %	18.18 %	956,13	20.71 %	1.023,95	20.53 %	1.044,37	20.53 %	3.024,45	
			Tujuan 5				-		-		-		-	
			Menciptakan Tataan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah	Indeks Rasa Aman	NA Indeks	70,00 Indeks		75,00 Indeks		80,00 Indeks		80,00 Indeks	-	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
			Sasaran 5.1				-		-		-		-	
			Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis	Angka Kriminalitas	19.42 %	19.00 %		17.50 %		16.00 %		16.00 %	-	
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84.89 %	85.00 %		86.50 %		88.00 %		88.00 %	-	
			Program				-		-		-		-	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100%	100%	365,83	100%	391,78	100%	399,59	100%	1.157,19	Satuan Polisi Pamongpraja
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kasus kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	100%	100%	8,39	100%	8,99	100%	9,17	100%	26,55	
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	30 menit	30 menit	-	30 menit	-	30 menit	-	30 menit	-	
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan	100%	100%	7,53	100%	8,06	100%	8,22	53%	23,81	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera	50%	53%	3,94	55%	4,22	58%	4,30	57.50 %	12,46	
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase Data anak Dan Gender	100%	100%	5,00	100%	5,00	100%	5,00	100%	15,00	
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian klaster Kabupaten Layak Anak	100%	100%	25,11	100%	26,90	100%	27,43	100%	79,44	
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase korban yang mendapatkan layanan	100%	100%	7,45	100%	7,98	100%	8,14	100%	23,57	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bahodopi	100%	100%	0,69	100%	0,74	100%	0,76	100%	2,19	Kecamatan Bahodopi
				Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bumi Raya	15%	100%	1,12	100%	1,20	100%	1,22	100%	3,53	Kecamatan Bumi Raya
				Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bungku Barat	100%	100%	0,32	100%	0,35	100%	0,35	100%	1,02	Kecamatan Bungku Barat
				Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bungku Pesisir	100%	100%	1,29	100%	1,38	100%	1,41	100%	4,08	Kecamatan Bungku Pesisir
				Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bungku Selatan	100%	100%	1,29	100%	1,38	100%	1,41	100%	4,08	Kecamatan Bungku Selatan



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
				Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bungku Tengah	100%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Bungku Tengah
				Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bungku Timur	100%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Bungku Timur
				Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Menui Kepulauan	100%	100%	4,94	100%	5,29	100%	5,40	100%	15,64	Kecamatan Menui Kepulauan
				Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Sombori Kepulauan	100%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Sombori Kepulauan
				Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Witaponda	100%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Wita Ponda
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Wita Ponda
				Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	20%	100%	13,50	100%	14,46	100%	14,75	100%	42,71	Kecamatan Bumi Raya
				Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Bungku Selatan
				Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100.00 %	100.00 %	13,81	100.00 %	14,79	100.00 %	15,08	100.00 %	43,68	Kecamatan Bahodopi
				Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Bungku Tengah
				Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	100%	14,48	100%	15,50	100%	15,81	100%	45,79	Kecamatan Bungku Pesisir



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
				Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	100%	9,16	100%	9,81	100%	10,01	100%	28,98	Kecamatan Bungku Timur
				Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Sombori Kepulauan
				Persentase Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kecamatan Bungku Barat	100%	100%	16,45	100%	17,61	100%	17,97	100%	52,03	Kecamatan Bungku Barat
				Persentase Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kecamatan Menui Kepulauan	100%	100%	32,69	100%	35,01	100%	35,70	100%	103,40	Kecamatan Menui Kepulauan
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
				Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	79%	100%	29,38	100%	31,47	100%	32,09	100%	92,94	
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik.	50%	100%	344,80	100%	369,26	100%	376,62	100%	1.090,69	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase pengurus Ormas yang aktif	78.00 %	78.00 %	39,55	82.00 %	42,35	86.00 %	43,19	86.00 %	125,09	
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan.	20.00 %	40.00 %	85,08	60.00 %	91,11	80.00 %	92,93	80.00 %	269,12	
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Daerah Rawan Konflik	88.00 %	88.00 %	79,18	90.00 %	84,80	92.00 %	86,49	92.00 %	250,47	
			Sasaran 5.2				-		-		-		-	
			Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah dan kemajuan pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	65.28 %	65.28 %		61.78 %		69.08 %		69.08 %	-	
				Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana	1 Level	2 Level		3 Level		4 Level		4 Level	-	
			Program				-		-		-		-	
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase penanganan pasca bencana	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Presentase penanganan pra bencana	100%	100%	362.76	100%	388,50	100%	396,24	100%	1.147,50	



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
				Presentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan penanganan	75%	85,00%	24,00	95,00%	25,70	100,00%	26,21	100,00%	75,91	Dinas Sosial
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama	71.40 %	84.90 %	12,49	98.40 %	13,37	100%	13,64	100%	39,50	
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100%	100%	122,54	100%	131,23	100%	133,85	100%	387,62	
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	65.00 %	77.00 %	162,82	89.00 %	174,37	100%	177,85	100%	515,04	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bahodopi	100%	10%	7,94	10%	8,50	10%	8,67	10%	25,12	Kecamatan Bahodopi
				Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bumi Raya	20%	10%	33,55	10%	35,92	10%	36,64	10%	106,11	Kecamatan Bumi Raya



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
				Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Barat	100%	10%	5,88	10%	6,30	10%	6,42	10%	18,60	Kecamatan Bungku Barat
				Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Pesisir	100%	10%	25,22	10%	27,00	10%	27,54	10%	79,76	Kecamatan Bungku Pesisir
				Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Selatan	100%	10%	32,17	10%	34,45	10%	35,14	10%	101,77	Kecamatan Bungku Selatan
				Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Tengah	100%	100%	485,23	100%	519,65	100%	530,01	100%	1.534,89	Kecamatan Bungku Tengah
				Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Timur	100%	10%	2,25	10%	2,41	10%	2,46	10%	7,12	Kecamatan Bungku Timur



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
				Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Menui Kepulauan	75%	10%	80,33	10%	86,03	10%	87,75	10%	254,11	Kecamatan Menui Kepulauan
				Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Sombori Kepulauan	100%	10%	22,43	10%	24,02	10%	24,50	10%	70,95	Kecamatan Sombori Kepulauan
				Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Wita Ponda	100%	10%	42,70	10%	45,73	10%	46,65	10%	135,09	Kecamatan Wita Ponda
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bahodopi	100%	100%	0,19	100%	0,21	100%	0,21	100%	0,61	Kecamatan Bahodopi
				JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bumi Raya	39%	100%	9,46	100%	10,13	100%	10,33	100%	29,92	Kecamatan Bumi Raya
				JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Barat	100%	100%	8,40	100%	9,00	100%	9,18	100%	26,57	Kecamatan Bungku Barat



Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2023)	Target Capaian								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
				JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Pesisir	100%	100%	6,82	100%	7,30	100%	7,45	100%	21,57	Kecamatan Bungku Pesisir
				JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Selatan	100%	100%	2,62	100%	2,81	100%	2,87	100%	8,30	Kecamatan Bungku Selatan
				JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Tengah	100%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Bungku Tengah
				JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Timur	100%	100%	1,96	100%	2,10	100%	2,14	100%	6,19	Kecamatan Bungku Timur
				JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Menui Kepulauan	100%	100%	10,70	100%	11,46	100%	11,69	100%	33,85	Kecamatan Menui Kepulauan
				JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Sombori Kepulauan	100%	100%	3,15	100%	3,37	100%	3,44	100%	9,96	Kecamatan Sombori Kepulauan
				JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Wita Ponda	100%	100%	5,99	100%	6,42	100%	6,55	100%	18,96	Kecamatan Wita Ponda

BAB 7

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PD



Bab ini merupakan bagian yang menguraikan kerangka pendanaan pembangunan (*framework of development budget*) untuk membiayai program-program yang dikelompokkan sebagai program prioritas I, prioritas II, serta prioritas III. Penyajian program prioritas ini disertai dengan indikator kinerja, kondisi target capaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta capaian kinerja program dan kerangka pendanaan yang diarahkan guna pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali untuk periode 2024-2026 merinci besaran proyeksi Kapasitas Riil Keuangan (*capacity of financial real*) yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah program pembangunan guna pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali. Besaran nilai Kapasitas Riil Keuangan sangat menentukan besaran anggaran untuk membiayai setiap program prioritas, olehnya proyeksi terhadap Kapasitas Riil Keuangan dihitung dengan mempertimbangkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan dinamika komponen pada setiap Belanja.

Indikasi Rencana Program pada RPD Kabupaten Morowali untuk 2024-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya untuk indikator program dan Urusan pada tahun 2024-2026 pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini, berpedoman pada permendagri 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Rincian Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 dan Rincian Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini.



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026**

Tabel 7.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase Pengelolaan Satuan Pendidikan	95 %	96 %	65.565.789.847,11	97 %	70.216.355.392,86	98 %	71.616.492.923,92	98 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Kurikulum Yang	90.00 %	98.00 %	131,699,936.68	98.50 %	141,041,381.19	99.00 %	143,853,793.34	99.00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase Tenaga Pendidik yang bersertifikat Pendidik	100 %	100 %	3,785,075,982.22	100 %	4,053,550,502.12	100 %	4,134,379,650.26	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasatr dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	78.00 %	78.56 %	0.00	79.12 %	0.00	79.68 %	0.00	79.68 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan sastra	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	17.70 AKB	15,70 AKB	0.00	14,70 AKB	0.00	13,70 AKB	0.00	13,70 AKB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	213.80 AKI	183 AKI	34.626.485.516,90	172 AKI	37.082.533.722,70	161 AKI	37.821.971.805,48	161 AKI	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	36.20 -	35 -	0.00	35 -	0.00	35 -	0.00	35 -	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan pasien	0.00 %	75.00 %	2,353,292,508.74	77.50 %	2,520,210,974.69	80.00 %	2,570,464,821.56	80.00 %	Rumah Sakit Pratama
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan pasien	78.50 %	85.00 %	1,773,644,002.66	87.50 %	1,899,448,140.89	90.00 %	1,937,323,769.94	90.00 %	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting	23.30 %	16.00 %	0.00	14.00 %	0.00	12.00 %	0.00	12.00 %	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Wasting	2.00 -	1.60 -	0.00	1,40 -	0.00	1,20 -	0.00	1,20 -	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK yang ditingkat Sumber dayanya	6.00 %	36.00 %	0.00	46.00 %	0.00	56.00 %	0.00	56.00 %	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK yang ditingkat Sumber dayanya	6 %	36 %	44,062,234.25	46 %	47,187,557.82	56 %	48,128,493.46	56 %	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK yang ditingkat Sumber dayanya	6 %	36 %	268,966,285.39	46 %	288,043,998.67	56 %	293,787,692.01	56 %	Rumah Sakit Pratama
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk	6.00 %	15.68 %	268,970,000.00	15.73 %	288,040,000.00	15.78 %	293,790,000.00	15.78 %	Rumah Sakit Pratama
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan Mamin yang memenuhi standar	100 %	100 %	168,030,397.04	100 %	179,948,752.28	100 %	183,536,990.38	100 %	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kebijakan Berwawasan Kesehatan	9 Kebijakan	13 Kebijakan	153,216,606.01	15 Kebijakan	164,084,222.65	17 Kebijakan	167,356,116.74	17 Kebijakan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sumber daya air dalam kondisi baik	8.5 %	15.68 %	9,955,863,627.99	15.73 %	10.662.030.616,51	15.78 %	10.874.635.060,87	15.78 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	85.63 %	86.38 %	12.867.150.699,78	87.13 %	13.779.814.573,06	87.88 %	14.054.588.668,73	87.88 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	20.00 %	23 %	339,375,360.09	26 %	363,447,171.94	28 %	370,694,429.69	28 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Indeks Kualitas Sanitasi	8.32 %	0.08 %	1,131,251,200.31	0.09 %	1,211,490,573.13	0.10 %	1,235,648,098.98	0.10 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	58.39 %	70.52 %	9,071,308,974.33	83.42 %	9,714,734,716.16	97.07 %	9,908,449,764.51	97.07 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	32.50 %	38.68 %	25.952.694.163,35	45.95 %	27.793.512.455,59	51.03 %	28.347.724.358,09	51.03 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan	1.2 %	18.5 %	0.00	18.525 %	0.00	18.55 %	0.00	18.55 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	3.5 %	160,079,696.63	2.63 %	171,434,110.62	1.76 %	174,852,563.93	1.76 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	2.61 %	3.68 %	7,353,132,799.78	4.75 %	7,874,688,722.95	5.83 %	8,031,712,640.88	5.83 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum dalam kondisi baik	0.00 %	4 %	125,000,000.00	4 %	150,000,000.00	4 %	175,000,000.00	4 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	18.90 %	19.00 %	583,357,216.10	21.50 %	624,734,601.72	24.00 %	637,192,017.91	24.00 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	30 %	41.50 %	23.269.737.776,11	43.00 %	24.920.254.623,59	44.50 %	25.417.172.807,20	44.50 %	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0 0	0 0	0.00	0 0	0.00	0 0	0.00	0 0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana yang tertangani	81 Unit	30 Unit	799,044,126.58	30 Unit	855,720,132.36	30 Unit	872,783,477.03	30 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah khusus yang tertangani	117 Unit	10 Unit	0.00	10 Unit	0.00	10 Unit	0.00	10 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	99.60 %	99.65 %	15.701.352.896,19	99.65 %	16.815.046.042,74	99.65 %	17.150.343.665,62	99.65 %	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100 %	100 %	3,658,284,544.50	100 %	3,917,765,778.52	100 %	3,995,887,334.02	100 %	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Satuan Polisi Pamongpraja



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kasus kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	100 %	100 %	83,938,839.06	100 %	89,892,600.53	100 %	91,685,088.94	100 %	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	30 menit	30 menit	0.00	30 menit	0.00	30 menit	0.00	30 menit	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase penanganan pasca bencana	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase penanganan pra bencana	100 %	100 %	3,627,644,744.88	100 %	3,884,952,705.36	100 %	3,962,419,957.24	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang di berdayakan	63.00 %	6.10 %	56,532,581.86	15.8 %	60,542,424.16	15.8 %	61,749,660.27	15.8 %	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase terhadap jumlah PPKS	37 %	19.66 %	3,515,997,510.65	21.58 %	3,765,386,359.93	21.77 %	3,840,469,419.02	21.77 %	Dinas Sosial
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penurunan anak terlantar dan fakir miskin (rumah tangga miskin)	74.61 %	98.30 %	6,342,148,989.34	99.00 %	6,791,996,076.44	100 %	6,927,430,742.11	100 %	Dinas Sosial
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara	75 %	71.60 %	71,596,030.04	74.93 %	74,926,045.30	75.41 %	75,406,747.75	75.41 %	Dinas Sosial
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan penanganan	75 %	85.00 %	239,983,629.63	95.00 %	257,005,610.18	100.00 %	262,130,387.72	100.00 %	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan yang Menyusun RTK	55.56 %	63.50 %	696,918,184.59	68.30 %	746,350,422.12	71.40 %	761,232,898.31	71.40 %	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi dan LPTKS yang dibina	0.00 %	50.90 %	1,115,463,694.99	51.00 %	1,194,583,263.90	51.10 %	1,218,403,652.36	51.10 %	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	61.40 %	62.20 %	696,918,184.59	62.50 %	746,350,422.12	63.30 %	761,232,898.31	63.30 %	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	71.7 %	71.80 %	482,261,210.45	71.70 %	516,467,880.95	71.00 %	526,766,422.65	71.00 %	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan	100 %	100 %	75,262,142.36	100 %	80,600,467.83	100 %	82,207,668.02	53 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan keluarga pra	50 %	53 %	39,394,691.80	55 %	42,188,947.72	58 %	43,030,209.40	57.50 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase Data anak Dan Gender	100 %	100 %	50,000,000.00	100 %	50,000,000.00	100 %	50,000,000.00	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian klaster Kabupaten Layak Anak	100 %	100 %	251,137,766.47	100 %	268,950,907.24	100 %	274,313,877.97	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase korban yang mendapatkan layanan	100 %	100 %	74,504,204.05	100 %	79,788,769.15	100 %	81,379,783.80	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan masyarakat	33 %	33 %	401,475,074.66	33 %	429,951,604.17	33 %	438,524,982.47	33 %	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	29.00 %	100.00 %	956,670,422.10	100.00 %	1,024,526,822.73	100 %	1,044,956,229.07	100 %	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan tertangani	33.00 %	35.50 %	153,832,063.22	38.00 %	164,743,334.10	40.50 %	168,028,371.09	40.50 %	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	32.00 %	35.00 %	32,157,342.56	37.50 %	34,438,255.05	40.00 %	35,124,965.34	40.00 %	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan	0 %	70 %	2,262,502,400.63	75 %	2,422,981,146.27	80 %	2,471,296,197.95	80 %	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang	0 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan	15.00 %	16.50 %	0.00	18.00 %	0.00	19.50 %	0.00	20.00 %	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen wajib perencanaan lingkungan hidup	100 %	85 %	226,250,240.06	90 %	242,298,114.63	95 %	247,129,619.80	95 %	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Standar Baku Mutu Kualitas Lingkungan	100.00 %	75.00 %	254,405,724.94	77.50 %	272,450,661.20	80.00 %	277,883,418.20	80.00 %	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	50.00 %	16.00 %	104,917,598.45	21.00 %	112,359,378.22	26.00 %	114,599,861.67	26.00 %	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Pengelolaan Limbah B3	50.00 %	100.00 %	34,045,004.87	100.00 %	36,459,808.80	100.00 %	37,186,829.54	100.00 %	Dinas Lingkungan Hidup Daerah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	50.00 %	100 %	141,147,343.51	100 %	151,158,890.30	100 %	154,173,048.96	100 %	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup yang memperoleh penghargaan	5 %	5 %	94,502,000.00	5 %	20,000,000.00	5 %	20,000,000.00	5 %	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan	2.50 %	5.00 %	0.00	7.50 %	0.00	10.00 %	0.00	10.00 %	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang terselesaikan	0 %	100 %	90,500,096.03	100 %	96,919,245.85	100 %	98,851,847.92	100 %	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani di Wilayah kota	16.00 %	18.18 %	9,561,311,954.41	20.71 %	10,239,493,488,58	20.53 %	10,443,672,401,77	20.53 %	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan KTP-el	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak memiliki KIA per satuan anak	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	100 %	100 %	432,040,670.92	100 %	462,685,210.75	100 %	471,911,308.07	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio bayi ber-Akta Kelahiran	89 %	89 %	0.00	89 %	0.00	89 %	0.00	89 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan nikah ber-Akta	100 %	100 %	189,433,669.75	100 %	202,870,153.92	100 %	206,915,452.41	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	100 %	100 %	143,573,877.34	100 %	153,757,537.58	100 %	156,823,514.13	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penerapan KTP-el berbasis NIK	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan	100 %	100 %	100,455,106.59	100 %	107,580,362.89	100 %	109,725,551.19	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama	71.40 %	84.90 %	124,865,584.36	98.40 %	133,722,269.93	100 %	136,388,736.56	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100 %	100 %	1,225,403,088.34	100 %	1,312,320,631.70	100 %	1,338,488,742.52	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	65.00 %	77.00 %	1,628,227,341.76	89.00 %	1,743,717,111.56	100 %	1,778,487,411.98	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kepadatan Penduduk	43 %	40 %	113,124,203.72	40 %	121,148,076.01	40 %	123,563,809.02	40 %	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	19.00 Angka	19.00 Angka	0.00	18.00 Angka	0.00	18.00 Angka	0.00	18.00 Angka	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	51.00 %	60 %	495,380,668.85	75 %	530,517,899.35	80 %	541,096,603.09	80 %	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (TFR)	1 Angka	1 Angka	0.00	1 Angka	0.00	1 Angka	0.00	1 Angka	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pendapatan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera	50.00 %	70.00 %	429,664,111.28	78.50 %	460,140,082.32	87.00 %	469,315,428.93	87.00 %	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100 %	100 %	1,552,294,978.31	100 %	1,662,398,884.02	100 %	1,695,547,671.88	100 %	Dinas Perhubungan Daerah
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan Sarana, Informasi, Korodinasi dan Disiplin Angkutan Penyebrangan	20.00 %	65.50 %	2,684,662,826.51	71.15 %	2,875,085,308.60	76.80 %	2,932,415,467.97	76.80 %	Dinas Perhubungan Daerah
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	41.74 %	65.00 %	1,328,440,569.92	70 %	1,422,666,536.82	75 %	1,451,034,981.77	75 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH **KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	20.00 %	25.00 %	0.00	30.00 %	0.00	35.00 %	0.00	35.00 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	20.00 0	25.00 0	0.00	30.00 0	0.00	35.00 0	0.00	35.00 0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE Kabupaten Morowali hasil Evaluasi dan Pemantauan Tahun oleh Kempan-RB	1.97 %	2.20 %	2,764,229,850.17	2.40 %	2,960,296,001.92	2.50 %	3,019,325,290.92	2.50 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan kandomain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dala daerah	100 %	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Aktif	30.00 %	32.50 %	120,777,129.40	35.00 %	129,343,821.85	37.50 %	131,922,980.77	37.50 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				0.00		0.00		0.00		-
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4.00 %	4.38 %	33,928,542.56	6.88 %	36,335,085.84	9.38 %	37,059,619.57	9.38 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan	50 %	70 %	474,320,392.65	73 %	507,963,822.88	75 %	518,092,790.82	75 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1.5 %	6.41 %	574,623,572.20	7.91 %	615,381,482.59	9.41 %	627,652,394.47	9.41 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	1 %	1.46 %	1,335,956,749.95	1.96 %	1,430,715,837.68	2.46 %	1,459,244,788.37	2.46 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil	1 %	1.25 %	949,286,888.12	3.12 %	1,016,619,576.48	4.62 %	1,036,891,309.69	5 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase PMDN yang mendapat fasilitas / insentif kemudahan penanaman modal	100 %	100 %	351,444,056.96	100 %	376,371,898.55	100 %	383,876,879.65	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN) di kabupaten/kota	50.00 %	5.00 %	545,624,230.50	6.05 %	584,325,224.62	7.10 %	595,976,864.36	7.10 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Realisasi Penanaman Modal	90 %	100 %	180,792,041.83	100 %	193,615,577.44	100 %	197,476,336.59	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP	90 %	100 %	392,603,840.01	100 %	420,451,135.01	100 %	428,835,070.78	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				0.00		0.00		0.00		-
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%)	80 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam berwirausaha	65 %	68 %	1,651,771,835.43	72 %	1,768,931,610.44	75 %	1,804,204,696.38	75 %	Dinas Kemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEOLAHRAGAAN				0.00		0.00		0.00		-
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan kapasitas daya saing olahraga	NA %	10 %	1,716,985,767.96	20 %	1,838,771,151.37	30 %	1,875,436,861.02	30 %	Dinas Kemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi Kepramukaan yang dikembangkan	100 %	100 %	226,250,522.88	100 %	242,298,417.50	100 %	247,129,928.71	100 %	Dinas Kemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	100 %	100 %	731,388,653.00	100 %	1,238,509,600.00	100 %	1,387,251,600.00	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks SPBE Kabupaten Morowali pada Domain Manajemen SPBE	NA Indeks	1 Indeks	297,584,828.82	2 Indeks	318,692,448.44	3 Indeks	325,047,282.09	3 Indeks	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Daerah yang di Kembangkan	100.00 %	97 %	1,193,560,799.24	97 %	1,278,219,776.78	97 %	1,303,707,905.18	97 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100.00 %	65.00 %	1,011,019,096.43	68 %	1,082,730,435.33	70 %	1,104,320,441.11	70 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase benda budaya dan seni yang dilestarikan	75 %	75 %	863,417,444.34	75 %	897,711,098.27	75 %	906,347,717.10	75 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan di Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	85 %	90 %	678,869,049.06	90 %	727,021,065.79	90 %	741,518,108.18	100 %	Dinas Perpustakaan Daerah
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi hasil pelestarian naskah kuno	NA koleksi	1050 koleksi	20,319,534.06	1050 koleksi	21,760,793.67	1050 koleksi	22,194,711.15	1050 koleksi	Dinas Perpustakaan Daerah
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD/ yang menerapkan arsip secara baku	35 %	35 %	4,252,544,098.22	35 %	4,554,176,018.02	35 %	4,644,987,805.82	35 %	Dinas Perpustakaan Daerah
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase penyelamatan arsip	90 %	90 %	0.00	90 %	0.00	95 %	0.00	95 %	Dinas Perpustakaan Daerah
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	33,420 Ton	38,000 Ton	9,015,928,397.60	39,000 Ton	9,655,426,008.58	40,000 Ton	9,847,958,421.54	40,000 Ton	Dinas Perikanan Daerah
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	48,175 Ton	30,000 Ton	1,869,055,948.16	32,000 Ton	2,001,627,632.51	35,000 Ton	2,041,540,754.69	35,000 Ton	Dinas Perikanan Daerah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penurunannya Ilegal Fishing	100 %	20 %	0.00	65 %	0.00	75 %	0.00	75 %	Dinas Perikanan Daerah
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Olahan hasil perikanan	7.240 %	6.878 %	1,039,104,002.54	6.534 %	1,112,807,397.01	6.207 %	1,134,997,147.43	6.207 %	Dinas Perikanan Daerah
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase objek wisata yang dikelola	20 %	23 %	715,546,934.77	24 %	766,300,505.02	25 %	781,580,792.52	25 %	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	presentase objek wisata yang dipromosikan	1.89 %	9.43 %	346,525,320.18	18.87 %	371,104,276.96	28.30 %	378,504,219.94	28.30 %	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	23.53 %	29.41 %	660,917,800.70	35.29 %	707,796,539.75	35.29 %	721,910,238.68	35.29 %	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	90 %	90 %	32.144.320.564,86	92.25 %	34.424.309.413,60	94.50 %	35.110.741.617,62	94.50 %	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase peningkatan produktivitas peternakan	75 %	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	75 %	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian	100 %	76.00 %	7,603,484,621.56	84.00 %	8,142,797,938.63	91.00 %	8,305,168,043.69	91.00 %	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100 %	100 %	441,839,930.81	100 %	473,179,529.77	100 %	482,614,887.31	100 %	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	100.00 %	100 %	648,970,487.09	100 %	695,001,806.08	100 %	708,860,373.75	100 %	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan/Kelompok Tani yang Dibina	100 %	100 %	6,456,025,090.48	100 %	6,913,949,381.77	100 %	7,051,815,837.00	100 %	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	26.00 %	28.00 %	33,073,712.59	30.00 %	35,419,622.99	32.00 %	36,125,902.08	32.00 %	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	29.00 %	30.00 %	1,236,271,363.65	32.50 %	1,323,959,791.15	35.00 %	1,350,359,990.68	35.00 %	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 %	100 %	243,451,480.19	100 %	260,719,434.54	100 %	265,918,266.96	100 %	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTP yang tera ulang	50 %	55 %	303,952,647.37	60 %	325,511,934.81	65 %	332,002,751.29	65 %	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Dalam Daerah yang di Promosikan Di luar	33.00 %	33.50 %	177,705,196.68	34.00 %	190,309,783.11	34.50 %	194,104,623.62	34.50 %	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten	20 %	35 %	1,135,050,644.35	37.50 %	1,215,559,510.81	40.00 %	1,239,798,172.63	42.50 %	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi dan	20.00 %	22.00 %	50,880,285.24	24.00 %	54,489,211.51	26.00 %	55,575,744.55	26.00 %	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	30.00 %	37.80 %	62,221,078.52	38.60 %	66,634,404.50	39.40 %	67,963,116.74	39.40 %	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
3 32 02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigrasi baru yang direncanakan	20.00 %	32.50 %	58,933,662.53	35.00 %	63,113,812.90	37.50 %	64,372,323.36	0.00 %	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase tanah yang disertifikasi	26.50 %	27.00 %	56,561,428.76	30.00 %	60,573,317.17	33.00 %	61,781,169.30	0.00 %	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	37 %	100 %	383,091,997.10	100 %	410,264,619.39	100 %	418,445,432.65	100 %	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH **KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	01		SEKRETARIAT DAERAH										
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	50 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	100 %	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang dihasilkan	100 %	100 %	40.767.776.643,98	100 %	43.659.425.137,49	100 %	44.530.008.627,30	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	100 %	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	2,279,595,787.27	100 %	2,441,286,962.67	100 %	2,489,967,038.43	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
4	02		SEKRETARIAT DPRD										
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan Pelaksanaan Tugas	100 %	100 %	6,316,009,450.67	100 %	6,764,002,466.64	100 %	6,898,878,930.40	100 %	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	01		PERENCANAAN										
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	80 %	2,145,176,300.08	85.00 %	2,297,333,133.91	90.00 %	2,343,142,722.35	90.00 %	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80 %	100 %	2,069,926,680.67	100 %	2,216,746,077.28	100 %	2,260,948,732.94	100 %	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	80 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	80 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	02		KEUANGAN										
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Jumlah SPPT yang Tertagih	91.4 %	91.5 %	0.00	91.6 %	0.00	91.7 %	0.00	91.7 %	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase objek pajak yang ditetapkan berdasarkan potensi pajak	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Badan Pengelola Pendapatan Daerah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH **KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase objek pajak yang tertagih	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan potensi pajak	3.02 %	5.21 %	4,010,810,631.92	8.44 %	4,295,296,455.69	14.10 %	4,380,946,098.72	14.10 %	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Opini BPK atas LKPD	15 -	15 -	0.00	15 -	0.00	15 -	0.00	15 -	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kemandirian Keuangan & Fleksibilitas	NA -	2.00 -	0.00	2.00 -	0.00	2.00 -	0.00	2.00 -	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kesesuaian Nomenklatur dan Pagu Program RKPD, KUA-PPAS dan APBD	NA -	4.00 -	201.699.407.537,08	4.00 -	170.191.549.117,77	4.00 -	167.533.516.996,09	4.00 -	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD yang bersifat Mandatory	NA -	4.00 -	0.00	4.00 -	0.00	4.00 -	0.00	4.00 -	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja dalam APBD	NA -	4.00 -	0.00	4.00 -	0.00	4.00 -	0.00	4.00 -	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Sovabilitas	NA -	4.00 -	0.00	4.00 -	0.00	4.00 -	0.00	4.00 -	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Manajemen Pengelolaan Aset	55 %	65 %	726,687,478.49	75 %	778,231,244.80	80 %	793,749,435.22	80 %	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 03	KEPEGAWAIAN										
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Jabatan Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	46.70 %	46.70 %	0.00	46.74 %	0.00	46.74 %	0.00	46.74 %	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9.94 %	9.94 %	2,511,221,552.03	9.94 %	2,689,341,886.66	9.94 %	2,742,968,260.29	9.94 %	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	78.73 %	77.82 %	0.00	78.12 %	0.00	78.42 %	0.00	78.42 %	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	82.00 %	88.24 %	3,442,088,005.35	91.81 %	3,686,234,471.38	94.12 %	3,759,739,215.43	94.12 %	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	67.00 %	73.83 %	0.00	80.54 %	0.00	87.25 %	0.00	87.25 %	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	36.00 %	37.13 %	0.00	39.60 %	0.00	42.08 %	0.00	42.08 %	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan yang diimplementasikan	75 %	85 %	823,979,674.60	90 %	882,424,352.74	90 %	900,020,188.47	90 %	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6 01	INSPEKTORAT DAERAH										
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Inspektorat Daerah
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	62 %	65 %	0.00	75 %	0.00	80 %	0.00	80 %	Inspektorat Daerah
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian Tindakan lanjut hasil temuan BPK dan APIP	73 %	75 %	2,168,515,901.53	80 %	2,322,328,207.62	82 %	2,368,636,206.16	82 %	Inspektorat Daerah
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	3,00 LEVEL 3	3,10 LEVEL 3	1,035,610,472.58	3,15 LEVEL 3	1,109,066,071.82	3,20 LEVEL 3	1,131,181,218.97	3,20 LEVEL 3	Inspektorat Daerah
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7 01	KECAMATAN										
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	75.00 %	237,333,515.32	77.50 %	254,167,523.91	80.00 %	259,235,709.05	80.00 %	Kecamatan Bungku Barat



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100.00 %	79 %	12,896,263.68	81 %	13,810,992.53	84 %	14,086,388.33	83.50 %	Kecamatan Bungku Selatan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	89.00 %	75.00 %	13,345,034.15	77.50 %	14,291,594.18	80.00 %	14,576,573.33	80.00 %	Kecamatan Menui Kepulauan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	78.20 %	259,604,729.20	80.70 %	278,018,429.58	83.20 %	283,562,209.73	83.20 %	Kecamatan Bahodopi
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	15 %	73 %	22,050,914.02	75 %	23,614,980.00	78 %	24,085,870.57	77 %	Kecamatan Bumi Raya
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	75 %	108,021,963.64	77 %	115,683,935.28	79 %	117,990,711.51	78.78 %	Kecamatan Sombori Kepulauan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	75.00 %	45,824,842.40	77.50 %	49,075,187.34	80.00 %	50,053,762.94	80.00 %	Kecamatan Bungku Pesisir
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100.00 %	78 %	421,763,253.76	80 %	451,678,818.89	83 %	460,685,445.09	82 %	Kecamatan Bungku Timur
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	75.00 %	205,660,110.72	77.50 %	220,247,532.41	80.00 %	224,639,341.62	80.00 %	Kecamatan Wita Ponda
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	78.50 %	81,882,224.38	81.00 %	87,690,110.66	83.50 %	89,438,680.70	83.50 %	Kecamatan Bungku Tengah
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bahodopi	100 %	100 %	6,923,257.35	100 %	7,414,322.31	100 %	7,562,166.37	100 %	Kecamatan Bahodopi
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bumi Raya	15 %	100 %	11,173,368.11	100 %	11,965,892.39	100 %	12,204,496.27	100 %	Kecamatan Bumi Raya
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bungku Barat	100 %	100 %	3,224,065.92	100 %	3,452,748.13	100 %	3,521,597.08	100 %	Kecamatan Bungku Barat
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bungku Pesisir	100 %	100 %	12,896,263.68	100 %	13,810,992.53	100 %	14,086,388.33	100 %	Kecamatan Bungku Pesisir



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bungku Selatan	100 %	100 %	12,896,263.68	100 %	13,810,992.53	100 %	14,086,388.33	100 %	Kecamatan Bungku Selatan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bungku Tengah	100 %	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	Kecamatan Bungku Tengah
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bungku Timur	100 %	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	Kecamatan Bungku Timur
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Menui Kepulauan	100 %	100 %	49,428,029.44	100 %	52,933,947.56	100 %	53,989,468.12	100 %	Kecamatan Menui Kepulauan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Sombori Kepulauan	100 %	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	Kecamatan Sombori Kepulauan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Wita Ponda	100 %	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	Kecamatan Wita Ponda
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan	100 %	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	Kecamatan Wita Ponda
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan	20 %	100 %	135,019,582.01	100 %	144,596,488.16	100 %	147,479,790.33	100 %	Kecamatan Bumi Raya
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan	100 %	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	Kecamatan Bungku Selatan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan	100.00 %	100.00 %	138,081,652.76	100.00 %	147,875,750.85	100.00 %	150,824,442.61	100.00 %	Kecamatan Bahodopi
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan	100 %	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	Kecamatan Bungku Tengah
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan	100 %	100 %	144,771,872.36	100 %	155,040,506.10	100 %	158,132,065.47	100 %	Kecamatan Bungku Pesisir
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan	100 %	100 %	91,605,939.32	100 %	98,103,526.35	100 %	100,059,743.36	100 %	Kecamatan Bungku Timur
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan	100 %	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	Kecamatan Sombori Kepulauan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kecamatan Bungku	100 %	100 %	164,480,010.40	100 %	176,146,537.58	100 %	179,658,958.25	100 %	Kecamatan Bungku Barat



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kecamatan Menui	100 %	100 %	326,872,277.88	100 %	350,057,249.14	100 %	357,037,507.37	100 %	Kecamatan Menui Kepulauan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bahodopi	100 %	10 %	79,399,014.87	10 %	85,030,767.71	10 %	86,726,309.56	10 %	Kecamatan Bahodopi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bumi Raya	20 %	10 %	335,452,067.81	10 %	359,245,601.48	10 %	366,409,078.52	10 %	Kecamatan Bumi Raya
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Barat	100 %	10 %	58,806,509.90	10 %	62,977,641.36	10 %	64,233,436.52	10 %	Kecamatan Bungku Barat
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Pesisir	100 %	10 %	252,154,987.55	10 %	270,040,279.56	10 %	275,424,972.74	10 %	Kecamatan Bungku Pesisir
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Selatan	100 %	10 %	321,719,922.61	10 %	344,539,438.57	10 %	351,409,669.81	10 %	Kecamatan Bungku Selatan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Tengah	100 %	100 %	4,852,308,327.52	100 %	5,196,481,574.55	100 %	5,300,101,149.24	100 %	Kecamatan Bungku Tengah
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Timur	100 %	10 %	22,511,898.89	10 %	24,108,662.41	10 %	24,589,397.17	10 %	Kecamatan Bungku Timur
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Menui Kepulauan	75 %	10 %	803,340,051.69	10 %	860,320,766.40	10 %	877,475,849.24	10 %	Kecamatan Menui Kepulauan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Sombori Kepulauan	100 %	10 %	224,305,820.07	10 %	240,215,777.40	10 %	245,005,760.07	10 %	Kecamatan Sombori Kepulauan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Wita Ponda	100 %	10 %	427,049,816.87	10 %	457,340,356.64	10 %	466,459,875.79	10 %	Kecamatan Wita Ponda
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bahodopi	100 %	100 %	1,934,439.55	100 %	2,071,648.88	100 %	2,112,958.25	100 %	Kecamatan Bahodopi
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bumi Raya	39 %	100 %	94,601,899.75	100 %	101,311,989.52	100 %	103,332,184.36	100 %	Kecamatan Bumi Raya
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Barat	100 %	100 %	84,000,322.57	100 %	89,958,445.04	100 %	91,752,246.42	100 %	Kecamatan Bungku Barat
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Pesisir	100 %	100 %	68,187,862.98	100 %	73,024,411.53	100 %	74,480,542.64	100 %	Kecamatan Bungku Pesisir
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Selatan	100 %	100 %	26,233,715.34	100 %	28,094,466.39	100 %	28,654,679.42	100 %	Kecamatan Bungku Selatan
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Tengah	100 %	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	Kecamatan Bungku Tengah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Timur	100 %	100 %	19,570,645.77	100 %	20,958,786.92	100 %	21,376,712.11	100 %	Kecamatan Bungku Timur
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Menui Kepulauan	100 %	100 %	107,027,173.86	100 %	114,618,585.30	100 %	116,904,118.10	100 %	Kecamatan Menui Kepulauan
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Sombori Kepulauan	100 %	100 %	31,483,440.84	100 %	33,716,553.65	100 %	34,388,872.97	100 %	Kecamatan Sombori Kepulauan
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Wita Ponda	100 %	100 %	59,940,476.10	100 %	64,192,039.51	100 %	65,472,050.17	100 %	Kecamatan Wita Ponda
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	79 %	100 %	293,824,964.89	100 %	314,665,898.27	100 %	320,940,441.16	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya politik	50 %	100 %	3,448,030,162.47	100 %	3,692,598,104.25	100 %	3,766,229,741.27	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase pengurus Ormas yang aktif	78.00 %	78.00 %	395,451,821.47	82.00 %	423,501,123.10	86.00 %	431,945,876.65	86.00 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
B 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan.	20.00 %	40.00 %	850,764,988.02	60.00 %	911,109,541.94	80.00 %	929,277,369.90	80.00 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
B 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Daerah Rawan Konflik	88.00 %	88.00 %	791,826,178.29	90.00 %	847,990,216.76	92.00 %	864,899,424.33	92.00 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
X	NON URUSAN										
X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX										
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100 %	100 %	6,237,877,221.00	100 %	6,680,328,336.00	100 %	6,813,536,310.00	100 %	Kecamatan Menui Kepulauan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100 %	100 %	10.343.954.965,00	100 %	11.077.649.177,00	100 %	11.298.541.194,00	100 %	Kecamatan Bungku Tengah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100 %	100 %	4,574,290,536.00	100 %	4,898,743,852.00	100 %	4,996,426,438.00	100 %	Kecamatan Bungku Selatan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Penyelenggaraan Urusan	100 %	100 %	164,480,000.00	100 %	176,150,000.00	100 %	179,660,000.00	100 %	Kecamatan Bungku Barat
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4,723,153,655.00	100 %	4,884,025,418.00	100 %	4,957,134,180.00	100 %	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	18.230.164.683,00	100 %	19.523.225.835,00	100 %	19.912.525.466,00	100 %	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4,254,283,519.00	100 %	4,556,038,815.00	100 %	4,646,887,748.00	100 %	Dinas Sosial
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	5,318,075,978.00	100 %	5,695,285,815.00	100 %	5,808,851,713.00	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	13.338.691.435,00	100 %	14.284.801.578,00	100 %	14.569.645.283,00	100 %	Inspektorat Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	0 %	100 %	5,456,485,921.00	100 %	5,843,513,142.00	100 %	5,960,034,742.00	100 %	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	135.014.225.911,00	100 %	144.590.752.156,00	100 %	147.473.939.949,00	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	8,357,109,139.00	100 %	8,949,876,860.00	100 %	9,128,340,388.00	100 %	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	22.884.022.822,00	100 %	24.507.181.001,00	100 %	24.995.862.359,00	100 %	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	22 %	100 %	5,097,830,345.00	100 %	5,459,418,213.00	100 %	5,568,280,832.00	100 %	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	11.287.899.552,00	100 %	12.088.547.525,00	100 %	12.329.597.192,00	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6,799,619,492.00	100 %	7,281,914,850.00	100 %	7,427,118,660.00	100 %	Dinas Perikanan Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	5,322,547,346.00	100 %	5,700,074,336.00	100 %	5,813,735,718.00	100 %	Dinas Perpustakaan Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4,889,089,683.00	100 %	5,235,871,627.00	100 %	5,340,276,652.00	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	2,905,195,488.00	100 %	3,111,260,298.00	100 %	3,173,299,865.00	100 %	Kecamatan Bungku Timur
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	3,308,744,873.00	100 %	3,543,433,343.00	100 %	3,614,090,585.00	100 %	Kecamatan Wita Ponda
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4,122,160,395.00	100 %	4,414,544,230.00	100 %	4,502,571,713.00	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	17.827.909.977,00	100 %	19.092.439.301,00	100 %	19.473.148.904,00	100 %	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4,563,463,263.00	100 %	4,887,148,603.00	100 %	4,984,599,976.00	100 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	20.256.137.296,00	100 %	21.692.900.193,00	100 %	22.125.463.854,00	100 %	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	3,888,020,235.00	100 %	4,163,796,566.00	100 %	4,246,824,057.00	100 %	Kecamatan Bumi Raya
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	3,459,271,671.00	100 %	3,704,636,971.00	100 %	3,778,508,667.00	100 %	Kecamatan Bungku Pesisir
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	7,396,882,783.00	100 %	7,921,541,882.00	100 %	8,079,500,067.00	100 %	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6,825,747,517.00	100 %	7,309,896,131.00	100 %	7,455,657,896.00	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	44.813.749.605,00	100 %	47.992.377.978,00	100 %	48.949.361.992,00	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4,112,168,432.00	100 %	4,403,843,540.00	100 %	4,491,657,648.00	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	7,310,085,766.00	100 %	7,828,588,374.00	100 %	7,984,693,035.00	100 %	Dinas Perhubungan Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	5,755,123,269.00	100 %	6,163,332,765.00	100 %	6,286,231,674.00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4,780,043,617.00	100 %	5,119,090,950.00	100 %	5,221,167,330.00	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	1,737,902,003.00	100 %	1,861,170,970.00	100 %	1,898,283,340.00	100 %	Kecamatan Sombori Kepulauan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	16.224.907.307,00	100 %	17.375.736.041,00	100 %	17.722.214.009,00	100 %	Satuan Polisi Pamongpraaja
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6,552,672,514.00	100 %	7,017,451,984.00	100 %	7,157,382,315.00	100 %	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	63.789.220.833,00	100 %	68.313.774.770,00	100 %	69.675.974.209,00	100 %	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	10	100 %	138,080,000.00	100 %	147,880,000.00	100 %	150,820,000.00	100 %	Kecamatan Bahodopi

Sumber: diolah 2023

BAB 8

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai Program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Utama secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Bab V RPD. IKU tersebut berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan usai penetapan program prioritas. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Morowali disampaikan melalui Tabel 8.1.

INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja dari setiap aspek kesejahteraan masyarakat, daya saing dan layanan umum serta fokus menurut bidang urusan terhadap capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian indikator kinerja berdasarkan masing-masing urusan pembangunan. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan disajikan dalam Tabel 8.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan indikator



seni budaya dan olahraga.

Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, serta inovasi dan kreativitas daerah.

Aspek Pelayanan Umum

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek Pelayanan Umum dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Pelayanan non Dasar dan Urusan Pilihan.



**Tabel 8.1
Penetapan Indikator Utama 2024-2026**

No	Indikator Utama RPD	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Thn 2022	Target			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
1	Persentase Angka Kemiskinan	Setiap tahun BPS akan mengeluarkan Angka dan presentase Penduduk miskin Prov/Kab/Kota. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (<i>basic needs approach</i>) ; $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Z = garis kemiskinan Yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3,..,q), yi<z	Persen	12,58	12,58-12,00	12,00-11,58	11,58-11,00	11,58-11,00
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	$P_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{G_i}{z}$ di mana : P_1 = <i>poverty gap index</i> G_i = <i>poverty gap</i>: garis kemiskinan dikurangi pendapatan penduduk miskin ke-i $= (z - y_i)I(y_i < z)$ z = garis kemiskinan	Indeks	2.03	2,03-1,90	1,90-1,80	1,80-1,70	1,80-1,70



No	Indikator Utama RPD	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Thn 2022	Target			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
3	Indeks Keparahan Kemiskinan	$P_2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{G_i}{z} \right)^2$ di mana P_2 adalah <i>poverty severity index</i>	Indeks	0,54	0,54-0,53	0,53-0,52	0,52-0,51	0,52-0,51
4	Indeks Gini kabupaten	Pi = persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi = persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai indeks Gini berkisar antara 0 dan 1, jika : $G < 0,3$ = ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi	Indeks	0,285	0,284-0,280	0,279-0,275	0,274-0,270	0,274-0,270
5	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Nas/Prov/Kab/Kota melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator indeks pembentuk pembangunan ekonomi inklusif; Nilai IPEI dikeluarkan setiap tahun oleh BAPPENAS	Indeks	6,27	6-7	6-7	6-7	6-7
6	Angka Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya	Persen	28,21	25,00-30,00	25,00-30,00	25,00-30,00	25,00-30,00



No	Indikator Utama RPD	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Thn 2022	Target			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
7	Pendapatan Perkapita	$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB}{\sum \text{penduduk}} \times 100\%$	Juta Rp	400.10	400,10-420,00	400,10-420,00	400,10-420,00	400,10-420,00
8	Inflasi	Setiap tahun BPS akan mengeluarkan Angka Inflasi daerah $I = \frac{A_1 - A_0}{A_1} \times 100\%$ Keterangan : I = Inflasi A₁ = Angka terakhir yang ditunjukkan pada indikator inflasi (tahun akhir). A₀ = Angka awal yang ditunjukkan pada indikator inflasi (tahun awal).	Persen	3.00	3,00-2,00	3,00-2,00	3,00-2,00	3,00-2,00
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\text{(Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/jumlah penduduk angkatan kerja)} \times 100\%}{100\%}$	Persen	3.2	3,2-3,00	3,00-2,00	3,00-2,00	3,00-2,00
10	Persentase Kenaikan PAD	$Growth \text{ PAD} = \frac{(PAD \text{ Akhir} - PAD \text{ Awal})}{PAD \text{ Awal}} \times 100$	Persen	1.38	1,00-2,00	2,00-4,00	4,00-6,00	4,00-6,00
11	Pertumbuhan Nilai Investasi	$\frac{((\text{Realisasi Investasi Tahun Evaluasi} - \text{Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya}) / \text{Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya}) \times 100\%}{100\%}$	Persen	65 Triliun				



No	Indikator Utama RPD	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Thn 2022	Target			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$	Indeks	72,55	72,55-72,75	72,75-73,00	73,00-73,50	73,00-73,50
13	Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$	Indeks	0.40	0,40-0,43	0,43-0,46	0,46-0,50	0,46-0,50
14	Stunting (Nilai SSGI)	Hasil Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dikeluarkan Oleh Kementerian kesehatan setiap Tahun	Persen	23,3	20-17	16-13	12-9	12-9
15	Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	Indeks	55.00	55,00-57,00	57,00-59,00	59,00-61,00	59,00-61,00



No	Indikator Utama RPD	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Thn 2022	Target			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
16	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Total Pengungkit + Total Hasil Pengungkit : 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang- undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akutabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Hasil : 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal) 3. Nilai Persepsi Korupsi (Survey Eksternal) 4. Opini BPK 5. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal)	Predikat	CC	B	B	BB	BB
17	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Persen	75.0		80,00-85,00	85,00-90,00	85,00-90,00



No	Indikator Utama RPD	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Thn 2022	Target			Kondisi Akhir																								
					2024	2025	2026																									
18	Nilai Sakip	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Nlai Evaluasi dikeluarkan Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) <table><tr><th>No</th><th>Komponen yang Dinilai</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1.</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>25</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15</td></tr><tr><td>4.</td><td>Evaluasi Internal</td><td>10</td></tr><tr><td>5.</td><td>Capaian Kinerja</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>Nilai Hasil Evaluasi</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</td><td></td></tr></table>	No	Komponen yang Dinilai	Bobot	1.	Perencanaan Kinerja	30	2.	Pengukuran Kinerja	25	3.	Pelaporan Kinerja	15	4.	Evaluasi Internal	10	5.	Capaian Kinerja	20		Nilai Hasil Evaluasi	100		Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Nilai	CC	B	BB	A	A
No	Komponen yang Dinilai	Bobot																														
1.	Perencanaan Kinerja	30																														
2.	Pengukuran Kinerja	25																														
3.	Pelaporan Kinerja	15																														
4.	Evaluasi Internal	10																														
5.	Capaian Kinerja	20																														
	Nilai Hasil Evaluasi	100																														
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja																															
19	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan tujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektifitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing K/L/PD (Susilo dkk, 2019)., Nilai SPI Dikeluarkan resmi oleh KPK RI untuk Provinsi/Kabupaten/Kota setiap Tahunnya.	Indeks	73,56 (Rentan)	73,7-77,4 (Waspada)	73,7-77,4 (Waspada)	77,5-100 (Terjaga)	77,5-100 (Terjaga)																								
20	Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks Inovasi setiap tahunnya dikelurkan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil pengukuran Inovasi Prov/Kab/Kota, Sebagai bentuk kebararuan didalam tatakelola pemerintahan dan pelayanan	Indeks	NA	32,50-37,50	37,50-42,50	42,50-47,50	42,50-47,50																								



No	Indikator Utama RPD	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Thn 2022	Target			Kondisi Akhir																		
					2024	2025	2026																			
21	Nilai SPBE	Nilai Indeks SPBE setiap tahunnya dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (PermenPanRB) Nomor 5 Tahun 2018, Nilai Indeks dan Predikat Sbb : <table><tr><td>No.</td><td>Nilai Indeks</td><td>Predikat</td></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>	No.	Nilai Indeks	Predikat	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang	Nilai	1.53	1,53-1,75	1,75-2,00	2,00-2,25	2,00-2,25
No.	Nilai Indeks	Predikat																								
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																								
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																								
3	2,6 – < 3,5	Baik																								
4	1,8 – < 2,6	Cukup																								
5	< 1,8	Kurang																								
22	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memiliki tugas untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dan mengeluarkan opini penilaian	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP																		
23	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Hasil penilaian dikeluarkan Oleh Badan kepegawaian negara (BKN) RI	Persen	70	71-73	74-76	77-80	77-80																		



No	Indikator Utama RPD	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Thn 2022	Target			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
24	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	IKLI adalah data dan informasi dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Dalam memperoleh pelayanan infrastruktur. IKLI Ada 10 indikator yang diukur yaitu jalan dan jembatan, irigasi, taman kota/RTH, drainase, PJU, AMPL, rambu dan penunjuk jalan, persampahan, sanitasi, dan halte $IKLI = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Indeks	NA	50-60 (Tidak Baik)	60-70- (Tidak Baik/Kurang Baik)	70-00- (Kurang Baik)	70-00- (Kurang Baik)
25	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	$J_{Baik} = \frac{\text{Panjang Jalan Kab dlm Kondisi Baik}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$	Persen	23.27	23,50-24,50	24,50-26,50	26,50-28,50	26,50-28,50
26	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	$K_{rtrw} = \frac{\text{Realiasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$	Persen	NA	50,00-55,00	55,00-60,00	60,00-65,00	60,00-65,00
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH Kabupaten = (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%) IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten IPA = indeks Kualitas air IPU = indeks Kualitas udara ITH = indeks tutupan hutan	Indeks	80.54	80,54-81,00	81,00-81,50	81,50-82,00	81,50-82,00



No	Indikator Utama RPD	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Thn 2022	Target			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
28	Indeks Rasa Aman	$IRA = (\text{Nilai Persepsi Rasa Aman} / \text{Nilai Maksimal Persepsi Rasa Aman}) \times 100$	Indeks	NA	70,00-75,00	75,00-80,00	80,00-85,00	80,00-85,00
29	Angka Kriminalitas	$Crame\ rate = \frac{\text{Jumlah Kejadian Kejahatan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100.000$	Persen	19.42	19,00-17,50	17,50-16,00	16,00-13,50	16,00-13,50
30	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L} \times 100$	Indeks	84.89	85,00-86,50	86,50-88,00	88,00-89,50	88,00-89,50
31	Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten	$IRB = \frac{\text{Tingkat Kerentanan}}{\text{Kapasitas Daerah}} \times 100$	Indeks	174.82	174-173,50	173,50-172,00	172,00-171,00	172,00-171,00
32	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana	$IKD = \frac{\text{Nilai Kapasitas Penanggulangan Bencana}}{\text{Nilai Maksimal Kapasitas Penanggulangan Bencana}} \times 100$	Indeks	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 4



No	Indikator Utama RPD	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD Thn 2022	Target			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
33	Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun (IDM) ad/ indeks komposit tiga indeks, yaitu: Indeks Ketahanan Sosial (IS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IEK), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IL). IDM digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian desa berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan. Rumus IDM IDM = 1/3 (IS + IEK + IL) IS = Nilai Kapasitas Sosial / Nilai Maksimal Kapasitas Sosial x 100 IEK = Nilai Kapasitas Ekonomi / Nilai Maksimal Kapasitas Ekonomi x 100 IL = Nilai Kapasitas Ekologi/Lingkungan / Nilai Maksimal Kapasitas Ekologi/Lingkungan x 100	Indeks	0,6528	0,6528- 0,6178	0,6178- 0,6908	0,6908- 0,7098	172,00- 171,00



Tabel 8.2

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI AWAL	TARGET			Status Capaian Terhadap Target Akhir
		2022	2024	2025	2026	
1.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1.1	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (%)	28,21	29,00	30,00	31,00	31,00
1.1.2	Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan dengan Migas (%)	48,20	49,00	49,50	50,00	50,00
1.1.3	PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (Juta Rp)	146.599,32	150.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00
1.1.4	PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas (Juta Rp)	146.599,32	150.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00
1.1.5	PDRB-ADH Konstan dengan Migas (Juta Rp)	70.515,62	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.1.6	PDRB-ADH Konstan tanpa Migas (Juta Rp)	70.515,62	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.1.7	Laju inflasi (Persen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.1.8	Perkembangan PDRB Perkapita (%)					
	- PDRB Perkapita ADH Berlaku (Rp)	831,80	835,00	840,00	845,00	845,00
	- PDRB Perkapita ADH Konstan 2010 (Rp)	400,10	425,00	450,00	475,00	475,00
	- Perkembangan PDRB Konstan 2010 Perkapita (%)	22,14	15,00	15,00	15,00	15,00
1.1.9	Indeks Gini	0,285	0,27	0,26	0,25	0,25
1.1.10	Persentase Penduduk Miskin					
	- Garis Kemiskinan (000)	507.523,00	525.000,00	535.000,00	545.000,00	545.000,00
	- Jumlah Masyarakat Miskin (000)	15,86	13,00	11,00	9,00	9,00
	- Persentase Kemiskinan (%)	12,58	11,00	10,00	9,00	9,00
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,03	2,00	2,00	2,00	2,00
	- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,54	0,50	0,40	0,30	0,30
1.1.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,55	73,00	73,55	74,00	74,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI AWAL	TARGET			Status Capaian Terhadap Target Akhir
		2022	2024	2025	2026	
1.1.11	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	87,42	89,00	90,00	91,00	91,00
1.2.	Kesejahteraan Sosial					
1.2.1	Angka Melek Huruf	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,35	9,36	9,37	9,38	9,38
1.2.3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,36	13,37	13,38	13,39	13,39
1.2.4	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	69,23	69,25	69,27	69,29	69,29
1.2.5	Balita Gizi Buruk	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.2.6	Prevalensi Angka Stunting (SGGI)	23,3	20-17	16-13	12-9	12-9
1.2.7	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	41,83	43,00	45,00	47,00	47,00
1.2.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,74	63,00	64,00	65,00	65,00
1.2.9	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	3,20	3,2-3,00	3,00-2,00	3,00-2,00	3,00-2,00
1.2.10	Rasio Penduduk yang Bekerja	96,80	97,00	97,50	98,00	98,00
1.2.11	PDRB per tenaga kerja Laju pertumbuhan					
	- PDRB ADHB	269.687,30	270.000,00	280.000,00	290.000,00	290.000,00
	- PDRB ADHK	129.722,07	130.000,00	132.000,00	135.000,00	135.000,00
1.2.11	Persentase PAD terhadap pendapatan	26,93	27,50	28,00	28,50	28,50
1.2.12	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.2.13	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten					
	- PDRB ADHB	1,46	2,00	2,50	3,00	3,00
	- PDRB ADHK	2,05	2,50	2,55	2,65	2,65
1.2.14	Kontribusi sektor Pertanian (Holtikultura) terhadap PDRB Kabupaten					
	- PDRB ADHB	0,00	0,05	0,06	0,07	0,07
	- PDRB ADHK	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI AWAL	TARGET			Status Capaian Terhadap Target Akhir
		2022	2024	2025	2026	
1.2.15	Produksi Tanaman Pertanian					
	Padi	39.507,32	42.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00
	Jagung	1.865,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
	Ubi Kayu	4.186,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00
	Ubi Jalar	775,00	800,00	825,00	850,00	850,00
	Kacang Tanah	56,00	60,00	65,00	70,00	70,00
	Kacang Kedelai	127,00	130,00	135,00	140,00	140,00
1.2.16	Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan terhadap PDRB					
	- PDRB ADHB	0,45	0,50	0,55	0,60	0,60
	- PDRB ADHK	0,66	0,70	0,75	0,80	0,80
1.2.17	Produksi Tanaman Perkebunan					
	Kelapa	733,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Kelapa Sawit	76.096,25	78.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
1.2.18	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB					
	- PDRB ADHB	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08
	- PDRB ADHK	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12
1.2.19	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB					
	- PDRB ADHB	17,29	18,00	19,00	20,00	18,00
	- PDRB ADHK	21,11	22,00	22,50	23,00	23,00
1.2.20	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB					
	- PDRB ADHB	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10
	- PDRB ADHK	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI AWAL	TARGET			Status Capaian Terhadap Target Akhir
		2022	2024	2025	2026	
1.2.21	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB					
	- PDRB ADHB	0,70	1,20	1,20	1,20	1,20
	- PDRB ADHK	0,81	1,10	1,10	1,10	1,10
1.2.22	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB					
	- PDRB ADHB	1,25	1,35	1,35	1,35	1,35
	- PDRB ADHK	1,48	1,50	1,50	1,50	1,50
1.2.23	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB					
	- PDRB ADHB	73,19	72,00	72,00	72,00	72,00
	- PDRB ADHK	67,31	68,00	68,00	68,00	68,00
1.2.24	Kontribusi Sektor Industri RT Terhadap PDRB					
	- PDRB ADHB	NA	3,50	3,50	3,50	3,50
	- PDRB ADHK	NA	2,50	2,50	2,50	2,50
1.2.25	Pertumbuhan Industri	NA	0,03	0,06	0,08	0,08
1.2.26	Nilai ICOR	3,51	3,40	3,30	3,20	3,20
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga					
1.3.1	Seni Budaya					
	- Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	17	17	17	17	17
	- Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 Penduduk	1	1	2	2	2
1.3.2	Olahraga					
	Jumlah Klub Olah Raga Per 10.000 Penduduk	14	20	25	30	30



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI AWAL	TARGET			Status Capaian Terhadap Target Akhir
		2022	2024	2025	2026	
	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk	391	394	396	398	398
2.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
2.1.	Urusan pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
2.1.1	Pendidikan					
2.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini					
	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Murid TK	43,86	45,00	50,00	55,00	55,00
	Rasio Ketersediaan Guru Per Murid TK	13,75	14,00	14,00	14,00	14,00
2.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	- Angka Partisipasi Kasar SD/MI	109,40	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	99,41	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Angka Partisipasi Kasar SMU/MA/SMK	98,22	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)					
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMU/MA/SMK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	- Angka Partisipasi Murni SD/MI	93,67	95,00	95,00	95,00	95,00
	- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	73,13	75,00	75,00	75,00	75,00
	- Angka Partisipasi Murni SMU/MA/SMK	70,62	71,00	71,00	71,00	71,00
2.1.1.5	Angka Partisipasi Sekolah					
	- Tingkat SD/MI	97,78	99,00	99,00	99,00	99,00
	- Tingkat SMP/MTs	94,51	95,00	95,00	95,00	95,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI AWAL	TARGET				Status Capaian Terhadap Target Akhir
		2022	2024	2025	2026		
	- Tingkat SMA/SMK/MA	90,06	95,00	95,00	95,00	95,00	
2.1.1.6	Angka Putus Sekolah						
	- Tingkat SD/MI	0,29	0,20	0,15	0,10	0,10	
	- Tingkat SMP/MTs	0,18	0,10	0,10	0,10	0,10	
	- Tingkat SMA/SMK/MA	0,48	0,40	0,40	0,40	0,40	
2.1.1.7	Angka Kelulusan						
	- Tingkat SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Tingkat SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Tingkat SMA/SMK/MA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.1.1.8	Angka Yang Melanjutkan						
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,71	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Angka Lulusan SMA/SMK/MA Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi	76,41	80,00	80,00	80,00	80,00	
2.1.1.9	Fasilitas Pendidikan						
	- Tingkat SD/MI	162,00	164,00	166,00	168,00	168,00	
	- Tingkat SMP/MTs	51,00	52,00	53,00	54,00	54,00	
	- Tingkat SMA/SMK/MA	26,00	26,00	27,00	28,00	28,00	
2.1.1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah						
	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	
	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MI	0,03	0,05	0,07	0,09	0,09	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI AWAL	TARGET			Status Capaian Terhadap Target Akhir
		2022	2024	2025	2026	
2.1.1.11	Rasio Guru/Murid jenjang Pendidikan Dasar	11,39	11,50	11,60	11,72	11,72
2.1.1.12	Rasio Guru/Murid Jenjang pendidikan Menengah	12,73	13,00	14,00	15,00	15,00
2.1.1.13	Rasio guru/murid per kelas					
	- Tingkat SD/MI	0,13	0,15	0,17	0,20	0,20
	- Tingkat SMP/MTs	0,03	0,05	0,07	0,09	0,09
	- Tingkat SMA/SMK/MA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,20
2.1.2.	Kesehatan					
2.1.2.1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	0,611	0,50	0,37	0,30	0,30
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1,527	0,84	0,84	0,84	0,84
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	0,611	0,50	0,45	0,40	0,40
2.1.2.2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	0,299	0,25	0,20	0,15	0,15
2.1.2.3	Rasio posyandu per satuan balita	8,13	10,00	12,00	14,00	14,00
2.1.2.4	Rasio puskesmas, poliklinik, Poskesdes dan pustu per satuan penduduk					
	Rasio Sarana Kesehatan	0,255	0,28	0,30	0,35	0,35
	Rasio Puskesmas	0,074	0,08	0,09	0,10	0,10
	Rasio Poliklinik	0,045	0,05	0,06	0,07	0,07
	Rasio Pustu	0,136	0,17	0,18	0,19	0,19
2.1.2.5	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (Per 1.000)	0,017	0,18	0,19	0,20	0,20
2.1.2.6	Rasio Dokter per satuan penduduk (Per 1.000)	0,437	0,50	0,65	0,70	0,70



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI AWAL	TARGET			Status Capaian Terhadap Target Akhir
		2022	2024	2025	2026	
2.1.2.7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Per 1.000)	5,96	6,00	7,50	8,00	8,00
2.1.2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.10	Persentase Balita Yang Pernah diimunisasi campak	155,50	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Jumlah)	197,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.12	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	969,11	450,00	450,00	450,00	450,00
2.1.2.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	176,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.14	Penderita Diare Yang Ditangani	2911,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
2.1.2.15	Angka kejadian Malaria (Per 100.000 Penduduk)	10,78	8,00	8,00	8,00	8,00
2.1.2.16	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2.1.2.17	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	0,50	0,55	0,60	0,65	0,65
2.1.2.18	Cakupan puskesmas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.19	Cakupan Puskesmas Pembantu	18,05	20,00	25,00	30,00	30,00
2.1.2.20	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	82,18	85,00	86,00	87,00	87,00
2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
2.1.3.1	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	0,18	0,20	0,25	0,30	0,30
2.1.3.2	Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk	0,01	0,04	0,08	0,10	0,10



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI AWAL	TARGET			Status Capaian Terhadap Target Akhir
		2022	2024	2025	2026	
2.1.3.3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	24,30	25,00	30,00	35,00	35,00
2.1.3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	71,80	75,00	80,00	85,00	85,00
2.1.3.5	Rasio jaringan Irigasi	0,87	0,90	0,92	0,95	0,95
2.1.3.6	Persentase penduduk berakses air minum	91,91	93,00	95,00	98,00	98,00
2.1.3.7	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	1,91	2,50	3,00	3,50	3,50
2.1.4.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;					
2.1.4.1	Rumah layak huni	81,71	82,00	83,50	85,00	85,00
2.1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat;					
2.1.5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	825,00	830,00	835,00	840,00	840,00
2.1.5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	5,00	10,00	15,00	20,00	20,00
2.1.5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2.1.6.	Sosial					
2.1.6.1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	51.030,48	51.030,48	51.030,48	51.030,48	51.030,48
2.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	116,34	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6.3	Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2.1.6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
2.2.1.	Tenaga Kerja					



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI AWAL	TARGET			Status Capaian Terhadap Target Akhir
		2022	2024	2025	2026	
2.2.2.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (orang)	35,00	30,00	25,00	20,00	20,00
2.2.2.2	Rasio Lulusan S1/S2/S3	15,12	16,00	17,00	18,00	18,00
2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	11,74	12,00	13,00	14,00	14,00
2.2.2.2	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Rasio KDRT	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
2.2.2.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	36,34	39,00	39,00	39,00	39,00
2.2.2.4	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	1,06	1,02	1,02	1,02	1,02
2.2.2.5	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0,87	0,95	0,95	0,95	0,95
2.2.2.6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	1,01	1,12	1,12	1,12	1,12
2.2.3.	Ketahanan Pangan					
2.2.3.1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	132,32	150,00	150,00	150,00	150,00
2.2.3.2	Ketersediaan Energi	4.014,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2.2.3.3	Ketersediaan protein perkapita	82,13	85,00	85,00	85,00	85,00
2.2.5.	Lingkungan Hidup					
2.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.5.4	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2.5.5	Penetapan MHA	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI AWAL	TARGET			Status Capaian Terhadap Target Akhir
		2022	2024	2025	2026	
2.2.5.6	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2.6.	Kependudukan dan Catatan Sipil					
2.2.6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	132.824,27	133.000,00	134.000,00	135.000,00	135.000,00
2.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	23.497,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
2.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah	179,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
2.2.7.1	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
2.2.7.3	Persentase PKK Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.4	Posyandu aktif	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
2.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
2.2.8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	4,96	5,00	5,00	5,00	5,00
2.2.8.2	Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali	87,34	88,00	89,00	90,00	90,00
2.2.8.3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	68,71	69,00	70,00	71,00	71,00
2.2.8.4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	17,54	18,00	19,00	20,00	20,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI AWAL	TARGET			Status Capaian Terhadap Target Akhir
		2022	2024	2025	2026	
2.2.8.5	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.9.	Perhubungan					
2.2.9.1.	Jumlah Arus Penumpang (Orang)	18.851,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2.2.9.2	Rasio ijin trayek	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
2.2.9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.2.9.4	Pemasangan Rambu-rambu	57,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35
2.2.9.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun					
	Angkutan Laut					
	Jumlah Penumpang Turun	9.676,72	9.700,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00
	Jumlah Penumpang Naik	9.718,62	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	214.033,55	220.000,00	225.000,00	230.000,00	230.000,00
	Jumlah barang muat (ton)	500.409,20	510.000,00	520.000,00	530.000,00	530.000,00
	Angkutan Udara					
	Jumlah Penumpang Datang	31.271,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Jumlah Penumpang Berangkat	21.973,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	244.256,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Jumlah barang muat (ton)	99.202,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.2.10.	Komunikasi dan Informatika					
2.2.10.1	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	NA	15%	17,50%	20%	20%
2.2.11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
2.2.11.1	Persentase koperasi aktif	39,10	40,00	45,00	50,00	50,00
2.2.12.	Penanaman Modal					



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI AWAL	TARGET			Status Capaian Terhadap Target Akhir
		2022	2024	2025	2026	
2.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	87,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	101.146.180.000.000,00	150.000.000.000.000,00	200.000.000.000.000.000,00	250.000.000.000.000.000,00	250.000.000.000.000.000,00
2.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga					
2.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda).	95,04	95,50	95,50	95,50	95,50
2.2.14.	Statistik					
2.2.14.1	Terintegrasinya Sistem Data statistik data terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.14.3	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.15.	Persandian					
2.2.15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	NA	15%	20%	25%	25%
2.2.16.	Kebudayaan					
2.2.16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	6	6	6	6
2.2.17.	Perpustakaan					
2.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	2.508,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00
2.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan yang Berkaitan Pelayanan Dasar					
2.3.1.	Pariwisata					
2.3.1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	3.624,0	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
2.3.1.2	Lama kunjungan Wisata (Hari)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2.3.2.	Pertanian					
2.3.2.1	Kontribusi Sektor Pertanaian					
	- PDRB ADHB	1,98	2,00	2,00	2,00	2,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI AWAL	TARGET			Status Capaian Terhadap Target Akhir
		2022	2024	2025	2026	
	- PDRB ADHK	2,01	2,50	2,50	2,50	2,50
2.3.2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB					
	- PDRB ADHB	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
	- PDRB ADHK	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB					
	- PDRB ADHB	0,45	0,80	0,80	0,80	0,80
	- PDRB ADHK	0,66	0,90	0,90	0,90	0,90
2.3.2.3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar					
	Padi	45,67	46,00	46,00	46,00	46,00
	Jagung	15,81	23,00	23,00	23,00	23,00
	Ubi Kayu	290,69	290,69	290,69	290,69	290,69
	Ubi Jalar	203,95	203,95	203,95	203,95	203,95
	Kacang Tanah	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77
	Kacang Kedelai	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82
	Kacang Hijau	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
2.3.3.	Kehutanan					
2.3.3.1	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20
2.3.4.	Energi dan Sumberdaya Mineral					
2.3.4.1	Rumah tangga pengguna listrik	99,94	99,99	99,99	99,99	99,99
2.3.4.2	Daya Terpasang (Kwh)	43.968.432,00	43.968.432,00	43.968.432,00	43.968.432,00	43.968.432,00
2.3.5.	Perdagangan					
2.3.4.1	Ekspor Bersih Perdagangan	37.654,87	38.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI AWAL	TARGET			Status Capaian Terhadap Target Akhir
		2022	2024	2025	2026	
2.3.6.	Kelautan dan Perikanan					
2.3.5.1	Produksi Perikanan (ton)					
	Produksi Perikanan Laut (ton)	33.420,80	34.350,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00
	Produksi Perikanan Darat (Ton)	2.981,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.220,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.3.5.2	Konsumsi Ikan Perkapita	57,30	58,00	59,00	60,00	60,00
2.3.5.3	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
2.4.	Fokus Layanan Urusan Penunjang					
2.4.1	Perencanaan Pembangunan					
2.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.2	Keuangan					
2.4.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.4.2.2	Persentase SILPA	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00
2.4.2.3	Persentase belanja langsung	80,25	80,00	80,00	80,00	80,00
2.4.2.4	Persentase belanja belanja tidak langsung	19,75	20,00	20,00	20,00	20,00
2.4.2.5	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.4.3	Kepegawain serta Pendidikan dan Pelatihan					
2.4.3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan	NA	40 Orang	60 Orang	80 Orang	80 Orang



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI AWAL	TARGET			Status Capaian Terhadap Target Akhir
		2022	2024	2025	2026	
	pendidikan dan pelatihan					
2.4.3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	NA	75%	80%	85%	85%
2.4.4	Penelitian dan Pengembangan					
2.4.4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	85%	100%	100%	100%	100%
2.4.5	Pengawasan					
2.4.5.1	Persentase tindak lanjut temuan	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.6	Sekretariat Dewan					
2.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Morowali	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	DAYA SAING DAERAH					
3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah					
3.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	NA	25,00	25,00	25,00	25,00
3.1.2	Produktivitas Total Daerah	1.204,02	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00
3.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI AWAL	TARGET				Status Capaian Terhadap Target Akhir
		2022	2024	2025	2026		
3.2.1	Panjang Ruas Jalan Kabupaten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
3.2.2	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun						
	Angkutan Laut						
	Jumlah Penumpang Turun	10.387,45	10.500,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	
	Jumlah Penumpang Naik	9.970,24	10.500,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	220.826,10	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
	Jumlah barang muat (ton)	492.496,40	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	Angkutan Udara						
	Jumlah Penumpang Datang	59.739,04	60.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00	
	Jumlah Penumpang Berangkat	16.577,64	17.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	126.388,48	130.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	
	Jumlah barang muat (ton)	42.367,92	60.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	
3.2.3	Jenis dan jumlah bank dan cabang						
	Bank Umum	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	
	Bank Perkreditan Rakyat	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
3.2.4	Jumlah Restoran/Rumah Makan						
	- Jumlah Rumah Makan	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
3.2.5	Jumlah Penginapan/Hotel	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
3.2.6	Persentase RT Berakses Air bersih	91,91	92,00	92,50	93,00	93,00	
3.2.7	Rumah tangga pengguna listrik	99,94	99,99	99,99	99,99	99,99	
3.3.	Fokus Iklim Berinvestasi						
3.3.1	Angka Kriminalitas	24,74	17,00	16,00	15,00	15,00	
3.3.2	Jumlah Demonstrasi	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
3.4.	Fokus Sumber Daya Manusia						



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI AWAL	TARGET			Status Capaian Terhadap Target Akhir
		2022	2024	2025	2026	
3.4.1	Tingkat Ketergantungan					
	- Rasio Ketergantungan	43,38	43,00	42,00	41,00	41,00

Sumber: Hasil analisis, tahun 2023

BAB 9

PENUTUP



9.1. Pedoman Transisi

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan sebagai dasar dalam penyusunan RKPD, setelah RPJMD Kabupaten Morowali tahun 2018-2023 berakhir, maka disusun dokumen perencanaan transisi. Dimana, RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir tahun 2023, untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah baru (definitif) pada tahun 2024.

RPD ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023. Dalam penyusunannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dari internal maupun eksternal melalui forum konsultasi publik. RPD ini disusun sejalan dengan RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025, khususnya periode akhir Tahun 2022-2025.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Rumusan kaidah pelaksanaan di dalam menjalankan dokumen RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026, selain sebagai panduan (*guideline*) dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2024-2026, juga menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- 2) RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Morowali;
- 3) Seluruh Perangkat Daerah (PD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Morowali wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) PD berpedoman pada RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026;
- 4) Seluruh Perangkat Daerah (PD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Morowali dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-target yang ditetapkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kerangka pendanaan dan program RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026;
- 5) Bappelitbangda Kabupaten Morowali melaksanakan pengendalian



dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026;

RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Morowali serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan. Untuk itu, diperlukan komitmen, kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 oleh seluruh aparatur pemerintah, unsur masyarakat dan *stakeholder* terkait.

